



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2019**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 MEI 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 ayat (2) telah mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 tahun serta (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan beberapa pendekatan meliputi :

1. **Pendekatan politik** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

2. **Pendekatan teknokratik**, dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Secara substansi dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

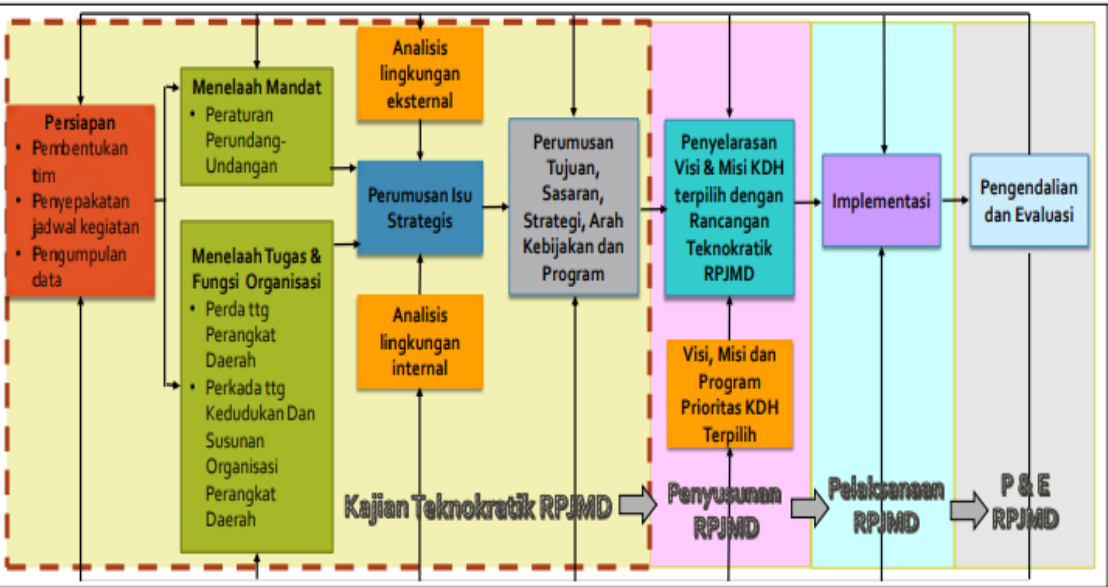
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dirumuskan dengan memperhatikan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perencanaan **Holistik-Tematik, Integratif** dan **Spasial**.
 - 1) **Pendekatan Tematik-Holistik** dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - 2) **Pendekatan Integratif**: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3) **Pendekatan Spasial:** dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

b. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

Adapun alur proses penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Jika dilihat dari gambar diatas, maka proses yang paling dalam penyusunan rancangan RPJMD adalah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu dilaksanakan dengan berbagai upaya dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih, untuk itu disusun indikasi rencana program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara diawali dengan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik,

pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Sumatera Utara serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrencang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Proses penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Skenario pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan menggunakan asas-asas pembangan berkelanjutan serta diperkuat dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen ini juga sudah memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kemudian, pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.3. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya) dalam mewujudkan visi misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah 2019-2023 dan Pedoman dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 sebagai perwujudan dari visi-misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari 9 (sembilan) bab, secara garis besar tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan analisis kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi, yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan dimasa lalu, seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Provinsi Sumatera Utara.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh pihak yang berkepentingan, membangun Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan, dengan memanfaatkan posisi geografi yang sangat strategis dan potensi demografi serta mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dewasa ini dan ke depan nantinya akan semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang komprehensif perlu disusun dengan memperhatikan seluruh potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Utara.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI

Aspek geografi Provinsi Sumatera Utara meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Provinsi Sumatera Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

1) Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 182.414,25 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 72.981,23 km² dan luas lautan sebesar kurang lebih 109.433,02 km².

Berdasarkan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km², atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km² atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 km² atau sekitar 8,26 persen, sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen.

Perkembangan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2017, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 444 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba Samosir	Balige	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.369,00
10. D a i r i	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. K a r o	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	7	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3,892,74

Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

2) Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

3) Topografi

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 persen seluas 47.810 Km², antara 12 – 40 persen seluas 6.305 Km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km², sedangkan luas Wilayah Danau Toba 1.129,20 Hektar (Ha) atau 1,57 persen. Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.200 m dpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembapan tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat

berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km² atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di Sumatera Utara serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

4) Geologi

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (*subduction*) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat-pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara.

5) Hidrologi

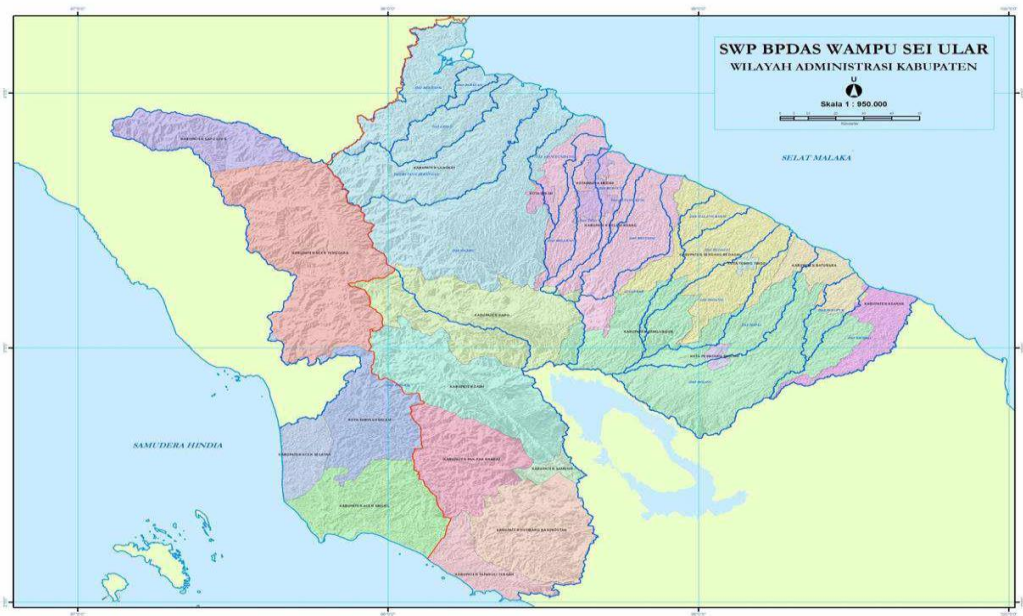
Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71DAS. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 71 DAS yang terdiri dari 20 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 51 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumon dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Berdasarkan kriteria DAS dikelompokkan kepada DAS Prioritas I (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya).

SWPDAS Wampu Sei Ular

Berdasarkan hasil Review Batas DAS yang dikeluarkan Balai Pengelolaan DAS Wampu Sei Ular Tahun 2009, luas SWP DAS Wampu Sei Ular ± 3.164.256,95 Ha.



Sumber : SWP BPDAS Wampu Sei Ular

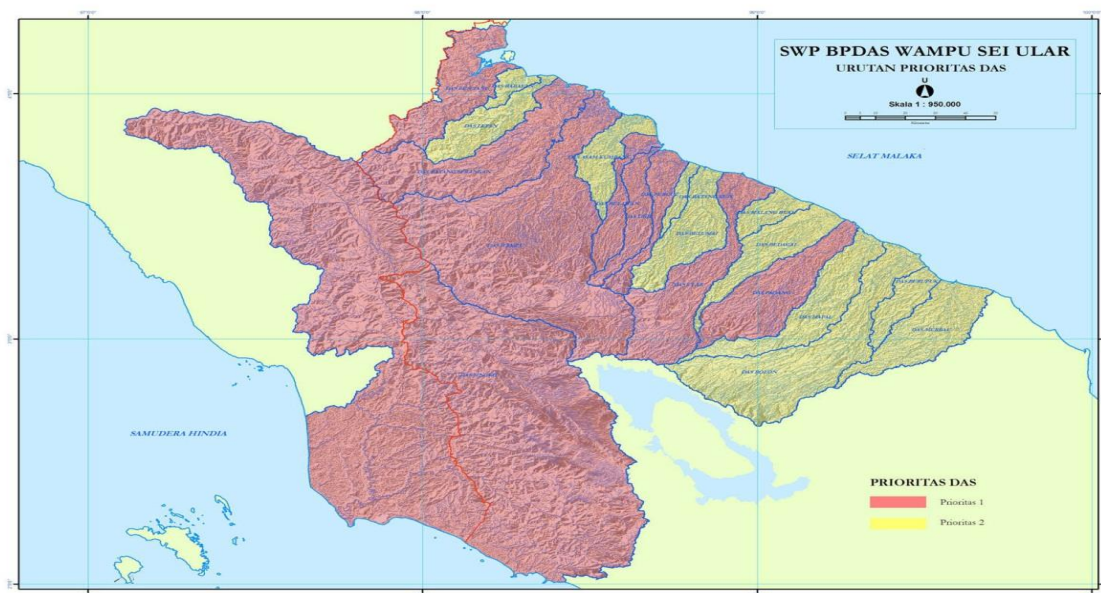
Gambar 2. 2.
Peta SWP DAS Wampu Sei Ular

Penggolongan DAS Prioritas di SWP DAS Wampu Sei Ular adalah sebagai berikut :

DAS Prioritas I (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) adalah: DAS Deli seluas 45.685,02 Ha; DAS Wampu seluas 415.617,46 Ha; DAS Batang Serangan seluas 164.909,66 Ha; DAS Padang 110.801,58 Ha; DAS Ular 130.929,01 Ha; DAS Besitang 96.494,12

Ha; DAS Belawan 41.099,95 Ha; DAS Singkil 1.388.544,09 Ha; DAS Percut 42.758,20 Ha.

DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) adalah: DAS Lengan seluas 57.407,75 Ha; DAS Asam Kumbang seluas 48.960,05 Ha; DAS Bolon seluas 195.695,31 Ha; DAS Babalan seluas 15.292,22 Ha; DAS Bedagai seluas 69.696,93 Ha; DAS Belumai seluas 78.624,55 Ha; DAS Hapal seluas 93.813,43 Ha; DAS Merbau seluas 92.017,41 Ha; DAS Batang Kuis seluas 13.302,53 Ha; DAS Perupuk seluas 35.675,49 Ha dan DAS Sialang Buah seluas 26.932,20 H.



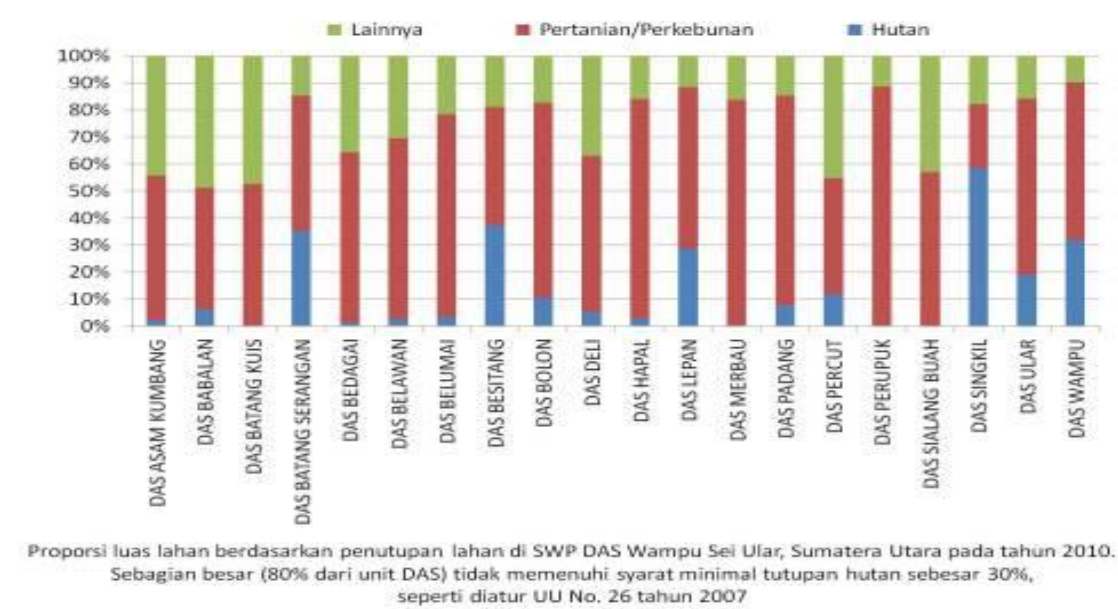
Sumber : SWP BPDAS Wampu Sei Ular

Gambar 2. 3.
DAS Prioritas SWP Wampu Sei Ular

Bila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mengamanatkan bahwa minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berupa kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, maka sangat sedikit DAS di Sumatera Utara yang memenuhi syarat minimal yang dinyatakan Undang-Undang tersebut (lihat Peta).

Kondisi hutan riil di pada SWP DAS Wampu Sei Ular, hanya 20% (4 dari 20 unit DAS) saja yang tutupan hutannya yang memenuhi persyaratan minimal Undang-Undang tersebut, yakni DAS Batang Serangan, DAS Besitang, DAS Singkil dan DAS Wampu. Keempat unit

DAS yang luas hutan memenuhi syarat minimal UU tersebut adalah DAS yang bagian hulunya termasuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). DAS Deli yang melewati Kota Medan, tutupan hutannya hanya 5,21% jauh dari syarat minimal 30% (lihat Grafik).



Sumber : SWP BPDAS Wampu Sei Ular

Gambar 2. 4.
Proporsi Luas Lahan Berdasarkan Penutupan Lahan di SWP Wampu Sei Ular

Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Wampu Sei Ular Dari total seluas 3.122.923,71 Ha, hampir disemua DAS terdapat lahan sangat kritis. Banjir dan longsor merupakan permasalahan yang timbul akibat tidak maksimalnya pengelolaan DAS, disamping tingkat kelerengan lahan. Pada DAS SWP Wampu Sei Ular dengan melihat kondisi DAS nya, Kabupaten/Kota yang potensi rawan banjir dan longsor adalah :

Tabel. 2.2
DAS SWP Wampu Sei Ular Yang Berpotensi Rawan Banjir dan Longsor

NO.	PERMASALAHAN	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
1.	Banjir	Medan	Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Denai, Sunggal, Belawan, Medan Kota, Helvetia, Medan Tembung
		Deli Serdang	Namo rambe, Lubuk Pakam
		Langkat	Kuala, Wampu, Stabat, Secanggang, Tj. Pura, Bahorok, Selesai, Batang Serangan , Besitang dan Selapian
		Tebing Tinggi	Tebing Tinggi

NO.	PERMASALAHAN	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Serdang Bedagai	Pantai Cermin, Rambutan, Bajenis, Perbaungan, Pantai Labu
2.	Longsor	Deli Serdang	Kutalimbaru, Dolok Silau, Raya, Gunung Meriah
		Langkat	Sei Bingei, Merdeka, Bahorok, Besitang
		Karo	Berastagi, Tiga nderket, Tiga Binanga, Silimakuta, Payung, Namanteran, Merek, Gunung Meriah
		Dairi	Kuta Buluh, Silalahi

Sumber : SWP BPDAS Wampu Sei Ular, Tahun 2018

Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Utara adalah 85.047,77 ha selama 5 (lima) tahun atau rata-rata sebesar 17.009,55 ha setiap tahunnya. Oleh karena itu, dengan asumsi super ekstrim bahwa tidak ada penambahan lahan kritis lagi, maka dibutuhkan waktu 145 tahun untuk merehabilitasi seluruh lahan kritis di Sumatera Utara.

Dari total luas Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Wampu Ular seluas 3.122.923,71 Ha, berdasarkan hasil survei terakhir yang dilaksanakan tahun 2018 kondisi kekritisan DAS pada beberapa Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Kondisi Kekritisan Lahan di Wilayah
Kerja BPDASHL Wampu Ular

No	Kelas Kekritisan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Tidak Kritis	643.651,68	20,61
2	Potensial Kritis	253.849,96	8,13
3	Agak Kritis	1.555.767,23	49,82
4	Kritis	471.904,74	15,11
5	Sangat Kritis	197.750,09	6,33
Grand Total		1.229.629,38	3.122.923,71

SWPDAS Asahan Barumon

SWP Asahan Barumon terdiri dari 51 DAS yang tersebar dalam 16 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota. DAS-DAS tersebut dibagi dalam urutan DAS Prioritas berdasarkan penetapan urutan Prioritas DAS tahun 2008 sebagai berikut :

DAS Prioritas I (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) yakni : Asahan Toba (633.725,13 Ha); Susua, Nias Selatan (25.108,26 Ha); Batang Gadis (487.536,63 Ha); Muzoi (77.947,22 Ha); Oyo (55.111,44 Ha).

DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) yakni : Tumula (11.535,03 Ha), Mola (16.668,70 Ha), Idanoi (8.137,06 Ha), Sowu (20.114,21 Ha), Eho (25.437,35 Ha), Gidosibua (15.950,25 Ha), Mejaya (11.059,06 Ha), Sialikhe (9.568,46 Ha), Nou 8.824,16 Ha), Morro 10.943,40 Ha), Sibin (11.235,43 Ha), Sibundong (116.039,78 Ha), Oou (13.881,64 Ha), Batang Toru (303.439,78 Ha), Lumut (57.808,46 Ha), Hoya (4.254,44 Ha), Tabuyung (50.506,68 Ha), Masio (8.263,50 Ha), Kolang (57.029,32 Ha), Tulumbaho (13.762,04 Ha), Barumun Bilah (1.329.300,29 Ha), Batu Garigis (40.566,74 Ha), Batang Garoga (15.940,76 Ha), Natal, Tolang, Batahan, Za'ua, Sokhili, Bintuas dan Gari.

Dari total luas Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Asahan Barumun seluas 4.517.400,82 Ha, juga terdapat sejumlah lahan sangat kritis pada beberapa Kabupaten/Kota, antara lain :

Tabel. 2.4
Kondisi Kekritisan Lahan di Wilayah Kerja
BPDASHL Asahan Barumun

No	Kelas Kekritisan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Tidak Kritis	559.875,16	12,39
2	Potensial Kritis	1.065.612,30	23,59
3	Agak Kritis	2.235.945,76	49,50
4	Kritis	384.157,07	8,50
5	Sangat Kritis	271.810,53	6,02
Grand Total		4.517.400,82	100,00

Sumber : SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Kondisi DAS di Sumatera Utara sudah sangat mendesak untuk ditangani. Kerusakan bukan hanya terjadi di bagian hilir DAS tetapi juga di bagian hulu DAS yang merupakan daerah penyangga. Di bagian hulu dan tengah DAS sering kali terjadi alih fungsi lahan, dimana lahan yang seharusnya kawasan hutan dialih fungsikan menjadi kawasan perkebunan dan kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini yang mengakibatkan

run-off tinggi sehingga menimbulkan bencana longsor di bagian hulu dan banjir di bagian tengah dan hilir DAS.

Perilaku disebagian wilayah pengelolaan DAS banyak yang menyimpang, yang seharusnya dikonservasi agar dapat melindungi tata air dan mencegah erosi, malah banyak dijadikan lahan budidaya. Parahnya lagi, praktek budidaya yang dilakukan justru semakin memicu meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah, sehingga memperbesar potensi banjir dan mempercepat kehilangan kesuburan tanah.

Praktek pembakaran hutan dan lahan masih menjadi kebiasaan. Hal ini mengurangi kapasitas hutan dan lahan dalam menyerap air ke dalam tanah, hilangnya keanekaragaman hayati. Pada akhirnya, praktek ini merugikan secara ekonomi dan ekologi bagi kehidupan kita dan alam sekitar. Sebagian hutan dalam kawasan lindung sekalipun, banyak yang dirambah. Pada hulu DAS yang masih dapat dipertahankan dengan baik, air jernih dan bersih terus mengalir sepanjang tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah di bawahnya.

Beralih ke bagian tengah suatu DAS yang umum dijadikan areal budidaya, masih sangat banyak kita temukan praktek budidaya yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Salah satunya adalah keberadaan sempadan sungai. Keppres 32 tahun 1990 telah mengamatkan, misalnya pada pasal 16 menyatakan sempadan sungai (a) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman, dan (b) untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Banyak areal budidaya, seperti kebun, persawahan dan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai tidak memiliki jalur hijau sebagai sabuk pengaman. Hal ini memicu erosi tebing sungai dan juga erosi tanah dari kegiatan budidaya langsung masuk ke sungai, sehingga sungai semakin cepat dangkal.

Selain itu, banyak lahan-lahan resapan air yang diberi izin untuk dijadikan kawasan permukiman, sehingga menjadi langganan banjir

setiap tahun. Pada bagian hilir DAS, umumnya berupa kawasan permukiman atau perkotaan. Banyak kota yang tidak tertata dengan baik, termasuk tanpa mempertimbangkan resiko banjir. Rasio daerah terbangun dengan daerah terbuka hijau banyak diabaikan. Banyak halaman yang justru malah dibeton. Hal ini sangat mengurangi kapasitas tanah dalam meresapkan air hujan.

b. Sungai

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan-Ular-Padang, WS Toba-Asahan dan WS Batang Angkola-Batang Gadis. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas Provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal-Batang Batahan lintas Provinsi dengan Sumatera Barat dan SWS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Wampu-Besitang Lintas Kabupaten/Kota, WS Bah Bolon Lintas Kabupaten/Kota, WS Barumon-Kualuh adalah lintas Kabupaten/Kota, WS Pulau Nias Lintas Kabupaten/Kota, WS Sibundong-Batang Toru Lintas Kabupaten/Kota. Data tentang pembagian DAS terhadap wilayah sungai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.5
Satuan Wilayah Sungai (SWS)

NO	WILAYAH SUNGAI	NAMA DAS	LUAS (Ha)	LOKASI	KET
1	WS BELAWAN – ULAR – PADANG(I-IV/A/1)		559.828,884	Kab.Deli Serdang, Kota Medan, Karo, Kab.Langkat, Kab.Simalungun, Kab.Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.	WS STRATEGIS NASIONAL
	S. Belawan	DAS Belawan	41.099,948		
	S. Deli	DAS. Deli	45.685,022		
	S. Percut	DAS. Percut	42.758,198		
	S. Belumai	DAS Bt Kuis	13.302,528		
	S. Serdang	DAS Belumai	78.624,547		
	S. Sei Ular	DAS Ular	130.928,007		
	S. Belutu	DAS Sialang Buah	26.932,119		
	S. Padang	DAS Bedagai	69.696,933		
	S. Martebing	DAS Padang	110.801,582		
	S. Kenang				
	S. Bedagai				
2	WS TOBA – ASAHAN (I-IV/A/1)		631.931,08	Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Utara,	WS STRATEGIS NASIONAL
	Danau Toba	DAS Danau Toba	110.260		
	S. Asahan	DAS Asahan	631.931,08		
	S. Tanjung				
	S. Suka				

NO	WILAYAH SUNGAI	NAMA DAS	LUAS (Ha)	LOKASI	KET
	S. Silau			Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan,dan Kota Tanjung Balai	
3	WS BATANG ANGKOLA – BATANG GADIS(I- IV/A/1)		<u>656.871,22</u>	Kab.Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal dan Kota Padangsidempuan	WS LINTAS KABUPATEN /KOTA
	S. Batang gadis	DAS Batang Gadis	549.794,89		
	S. Batang Angkola	DAS Tabuyung	50.506,68		
		DAS Bintuala	30.313,85		
		DAS Nagor	4.325,48		
4	WS ALAS SINGKIL(I- IV/A/1)			Kab. Dairi, Kab.Humbang Hasundutan, Kab.Karo, Kab. Langkat, Kab. Pakpak Bharat, Kab.Toba Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, Kab. Gayo Lues, dan Kota Sabuluh Salam	WS LINTAS PROVINSI DENGAN ACEH
	Lae Pardomuan	DAS Singkil			
	Lae Siabuhan				
	Lae Siragian				
	Lae Singkil				
	Lae Kuala Baru				
	Lae Ordi				
	Lae Kombih				
	Lae Cinondang				
5	WS BATANG NATAL – BATANG BATAHAN		<u>209.309,64</u>	Kab. Mandailing Natal, Kab. Pasaman	WS LINTAS PROVINSI DENGAN SUMATERA BARAT
	S. Batang Natal	DAS Natal	77.720,35		
	S. Batang Batahan	DAS Batahan	131.589,29		
		DAS Nunukan			
6	WS ROKAN			Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Mandailing Natal	WS LINTAS PROVINSI DENGAN RIAU
	S. Rokan	DAS Indra Giri Rokan			
	S. Bangko				
	S. Rokan Kiri				
	S. Rokan Kanan				
	S. Kubu				
	S. Sumpur				
	S. Sontang				
	S. Asik				
	S. Air Pesut				
	S. Sibinail				
	S. Pagang				
	S. Pincuran panjang				
	S. Timbawan				
7	WS WAMPU – BESITANG			Kab. Langkat, Kab. Karo, Kab. Deli Serdang, Kab.Dairi, Kab. Simalungun, dan Kota Binjai	WS LINTAS KABUPATEN /KOTA
	S. Wampu	DAS Besitang			
	S. Batang Serangan	DAS Babalan			
	S. Lapan	DAS Lapan			
	S. Besitang	DAS Batang Serangan			
	S. Babalan	DAS Asam Kumbang			
	S. Kapal Keruk / K. Gading	DAS Wampu			
	S. Galang				
8	WS BAH BOLON(I- IV/A/1)			Kab. Asahan, Kab. Simalungun, Kab.Batubara, Kab. Serdang Bedagai, dan Kota Pematangsiantar	WS LINTAS KABUPATEN /KOTA
	S. Bah Bolon	DAS Hapal			
	S. Balai	DAS Bahbolon			
	S. Pare-Pare/Gambus	DAS Perupuk			
	S. Pagurawan	DAS Merbau			
	S. Perupuk				
	S. Tanjung				
	S. Kiri				
	S. Napal				

NO	WILAYAH SUNGAI	NAMA DAS	LUAS (Ha)	LOKASI	KET
9	WS BARUMUN – KUALUH(I-IV/A/1)		1.721.334,93	Kab. Labuhan Batu, Kab. Mandailing Natal, Kab.Toba Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, dan Kab. Asahan	WS LINTAS KABUPATEN /KOTA
	S. Kualuh	DAS Kualuh	898.602,86		
	S. Bilah	Das Bilah	426.280,50		
	S. Barumun	DAS Barumun	396.451,57		
	S. Panai				
10	WS PULAU NIAS(I-IV/A/1)		530.241,02	Pulau Nias, Pulau Telo dan Pulau Pini	WS LINTAS KABUPATEN /KOTA
	S. Afia	DAS Sawo			
	S. Gido Zebua	DAS Ladara			
	S. Idano Zala	DAS Muzoi			
	S. Bol	DAS Sowu			
	S. Erfi	DAS Gamo			
	S. Otua	DAS Tumula			
	S. No Alu	DAS Nou			
	S. Tulang Baho	DAS Oyo			
	S. Manliho	DAS Idanoi			
	S. Lae Khua	DAS Gari			
	S. Oyo	DAS Moro			
	S. Nalawo	DAS Gidosibua			
	S. Idanogowo	DAS Mua			
	S. Mola	DAS Lahome			
	S. Afia	DAS Oou			
	S. Gido Zebua	DAS Idanogawu			
		DAS Tulumbahu			
		DAS Mola			
		DAS Sokhili			
		DAS Hoya			
		DAS Susua			
		DAS Masio			
		DAS Eho			
		DAS Mejaya			
		DAS Za'ua			
		DAS Sialikhe			
		DAS Telo			
11	WS SIBUNDONG – BATANG TORU(I-IV/A/1)		752.947,71	Kab. Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Samosir, Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah, Kota Sibolga	WS LINTAS KABUPATEN /KOTA
	Aek Sibundong	DAS Sibundong	72.956,72		
	Ek Sirahar	DAS Kolang	126.972,35		
	Aek Sitio – Tio	DAS Lumut	91.616,93		
	Aek Goman	DAS Batang Toru	303.181,82		
	Aek Batang Toru	DAS Sibirin	158.219,89		
		DAS Garoga			
		DAS Banga			
		DAS Tolang			
		DAS Lumut			
		DAS Batu Garigis			
		DAS Maraupu			
		DAS Mabirong			

Sumber : Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS), yakni:

Tabel. 2.6
Penetapan Wilayah Sungai

NO	WILAYAH SUNGAI	KETERANGAN
1.	Alas – Singkil	Lintas Provinsi
2.	Batang Natal-Batang Batahan	Lintas Provinsi
3.	Rokan	Lintas Provinsi
4.	Belawan – Ular – Padang	Strategis Nasional
5.	Toba – Asahan	Strategis Nasional
6.	Batang Angkola -Batang Gadis	Lintas Kab/Kota
7.	Wampu – Besitang	Lintas Kab/Kota
8.	Bah Bolon	Lintas Kab/Kota
9.	Barumun – Kualuh	Lintas Kab/Kota
10.	Pulau Nias	Lintas Kab/Kota
11.	Sibundong - Batang Toru	Lintas Kab/Kota

Sumber : Badan Wilayah Sungai Sumatera Utara Tahun 2018

Badan air sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumun, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri, selain sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA). Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

c. Rawa

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan rawa dengan luas baku 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 ha (32,18 %) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dijadikan areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian seluas 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45 %).

d. Danau

Badan air berupa danau meliputi Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Kabupaten Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang

terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) Kabupaten seluas 112.986,15 ha. Di Pulau Samosir Kabupaten Samosir terdapat dua danau yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau dengan debit air cukup besar potensial bagi pengembangan sistem pengairan dan peyediaan air baku dan danau yang memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

e. Cekungan Air Tanah

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi air tanah dimana enam diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.7
Cekungan Air Tanah

No.	Nama CAT	Luas CAT (Km²)	Lokasi
1	Langsa	853	Kab. Langkat dan Aceh
2	Medan	19.786	Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, dan Kab. Labuhanbatu Utara.
3	Kutacane	351	Kab. Karo dan Aceh
4	Sibulus Salam	3.632	Kab. Tapanuli Tengah dan Aceh
5	Sidikalang	2.438	Kab. Dairi , Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samosir, dan kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
6	Samosir	648	Kab. Samosir
7	Porsea-Prapat	483	Kab. Toba Samosir, Simalungun
8	Tarutung	875	Kab. Tapanuli Utara, Humbang hasundutan dan Toba Samosir
9	Onolimbu/Gunung Sitoli	42	Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan
10	Lahewa	20	Kab. Nias Utara
11	Sirombu	17	Kab. Nias Utara dan Kab. Nias Barat
12	Kuala Batangtoru	795	Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan
13	Teluk Durian/ Pekanbaru	21.799	Kab. Labuhanbatu, kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Provinsi Riau
14	Banjarampa	211	Kab. Mandailing Natal dan Kab. Tapanuli Selatan
15	Panyabungan	242	Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan
16	Pasaribuhan	225	Kab. Padang Lawas Tapanuli Selatan
17	Padangsidimpuan	240	Kota Padangsidimpuan dan Kab. Tapanuli

No.	Nama CAT	Luas CAT (Km ²)	Lokasi
			Selatan
18	Natal-Ujunggading	2.825	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat
19	Lubuk Sikaping	217	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Oleh karena itu kebutuhan air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian perlu dijaga sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat yang potensial dikembangkan dari melimpahnya air di sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga untuk menjaga investasi di bidang energi perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan yang menjadi daerah tangkapan air DAS yang dimanfaatkan.

6) Klimatologi

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di wilayahKabupaten Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Kabupaten Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret. Kondisi ini perlu

diantisipasi dengan membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80° C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C. Kelembaban udara rata-rata 78persen sampai dengan 91 persen.

7) Penggunaan Lahan

a. Penggunaan Lahan untuk Kawasan Budidaya

Berdasarkan data dari Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2014 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, penggunaan lahan Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen.

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

Kegiatan pemanfaatan ruang terkonsentrasi dan berkembang namun tidak meluas tersebar. Dalam distribusi ruang, wilayah yang pada saat ini masih memiliki kawasan hutan produksi yang juga berfungsi untuk perlindungan daerah bawahannya ataupun fungsi ekologis lainnya, perlu menyiapkan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konflik kepentingan dalam kondisi keterbatasan lahan budidaya perlu diatasi melalui kesepakatan yang mengikat dalam

pelestarian kawasan hutan yang berfungsi lindung. Untuk itu, salah satu dasar pengendalian adalah menyesuaikan pengembangan kegiatan pada lahan dengan kemampuan yang memadai.

b. Penggunaan Lahan untuk Kawasan Lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1076 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2016, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah $\pm 3.010.160,89$ Ha atau $\pm 41,25\%$ dari total luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas $\pm 424.476,01$ Ha; Hutan Lindung seluas $\pm 1.197.174,58$ Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm 634.521,04$ Ha, Hutan Produksi Tetap seluas $\pm 675.345,69$ dan Hutan Produksi Konversi seluas $\pm 78.643,58$ Ha.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, serta potensi bahan tambang dan mineral.

1. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Potensi Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain.

Komoditi pertanian dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, bawang merah dan sebagainya, juga berpotensi untuk dikembangkan.

Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, sektor pertanian mencatat pertumbuhan dengan laju positif. Sektor pertanian sendiri pada kenyataannya didukung oleh pertanian rakyat. Namun aktifitas sektor pertanian rakyat belum mampu menggerakkan proses

pertambahan nilai untuk memperluas sumber pendapatan masyarakat secara lokal, sehingga masalah yang dihadapi adalah kondisi tak berkaitan (*mismatch*) antara sektor tersebut dengan sektor sekunder yang cenderung memperoleh bahan bakunya dari luar Sumatera Utara. Kebutuhan yang utama adalah terbentuknya tata kaitan (*linkage*) antara sektor pertanian rakyat dengan sektor sekunder (agroindustri) dan tersier (agrobisnis) yang saling menguntungkan.

Berdasarkan Kepmentan Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, untuk Tanaman Pangan seperti Komoditas Padi akan diprioritaskan di Kabupaten Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Komoditas Jagung akan diprioritaskan di Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Labuhan Batu Selatan dan Tapanuli Selatan. Untuk komoditas Kedelai, lokasi prioritas pengembangan Kawasan di Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Sedangkan untuk ubi kayu prioritas pengembangan Kawasan berada di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Untuk komoditas tanaman hortikultura, Cabai akan diprioritaskan pengembangan kawasannya di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Simalungun, Batu Bara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Untuk komoditas Bawang merah akan dikembangkan pada Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Labuhanbatu Utara, Samosir, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat. Komoditas bawang putih, Provinsi Sumatera Utara akan memprioritaskan pengembangan kawasannya di Kabupaten Simalungun, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Toba Samosir dan Tapanuli Selatan. Kabupaten Karo dan Simalungun merupakan kawasan pertanian untuk prioritas komoditas jeruk, sedangkan pisang akan diprioritaskan di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.

2. Perkebunan

Luas areal perkebunan adalah 2.167.671,49 ha atau 11,88 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 29,7 persen dari total daratan Provinsi Sumatera Utara dengan produksi sebesar $\pm$ 20.318.622,73 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,31 persen dan pertumbuhan produksi sebesar 5,21 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Sektor ekonomi rakyat memperlihatkan kondisi bahwa komoditi perkebunan rakyat telah mengambil peran yang sangat penting, dimana untuk luas dan produksi beberapa komoditi penting bahkan melampaui perkebunan milik PTP/PNP maupun swasta.

Komoditas kopi akan diprioritaskan pengembangan kawasan sebagai amanat Kepmentan No 472 tahun 2018 di Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi dan Karo.

3. Peternakan

Berdasarkan data hasil analisis di semua kabupaten/kota di Sumatera Utara diperoleh bahwa wilayah potensial bagi pengembangan sapi, untuk sapi potong di Sumatera Utara berturut-turut adalah di Kab. Langkat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Asahan, dan Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang dan Kab. Serdang Bedagai, sedangkan untuk sapi perah berada di daerah Kab. Karo. Pengembangan kerbau potensial dilakukan di Kabupaten Samosir, Kab. Toba Samosir. dan Kab. Padang Lawas, Dairi, Humbang Hasundutan. Sedangkan ternak kuda direkomendasikan dilakukan di Kabupaten Samosir dan Kab. Humbang Hasundutan. Ternak kecil seperti kambing potensial diarahkan pemeliharaannya di Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Labuhan Batu Utara, dan Kab. Asahan. Domba potensi dikembangkan di Kabupaten Langkat, Kab. Labuhan Batu Utara, dan Kab. Serdang Bedagai.

Pengembangan ternak unggas seperti ayam buras potensi dikembangkan Kab. Mandailing Natal, Kab. Dairi, Kab. Serdang Bedagai, dan Kab. Pakpak Bharat. Adapun ayam pedaging potensi dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, Asahan, Langkat, Deli Serdang dan Kota Binjai. Kemudian, ayam petelur potensi

dikembangkan di Binjai, Asahan, Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai. Adapun ternak itik potensi dikembangkan di Toba Samosir, Mandiling Natal, Dairi, Nias, dan Serdang Bedagai.

4. Perikanan

Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 276.030 ton pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 persen, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 8,79 persen. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah pulau sebanyak 213 sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak. Di kawasan Pantai Barat, antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, hasilnya mencapai 1.076.960 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias (tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79 persen). Budidaya kelautan antara lain adalah teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang. Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Kawasan Pantai Timur yang meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Medan, mencapai 276.030 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari (tingkat pemanfaatan baru

sekitar 90,75 persen). Sementara potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di bagian tengah yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Kota Pematangsiantar, Tebing Tinggi dan Binjai memiliki potensi jenis ikan unggulan seperti ikan mas, nila, mujair, gurame, lele dumbo dan udang galah.

5. Pariwisata

Sumatera Utara juga memiliki berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain; wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus.

1. Wisata Alam

Wisata alam merupakan jenis wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan bentukan alam, dapat berupa pantai, laut, danau, pegunungan, flora, fauna, dan lain sebagainya. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata alam yang menjadi andalan dalam menarik wisatawan, diantaranya, yaitu:

- a. Kawasan Danau Toba, dimana Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir dan sekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk pantai Haranggaol Kabupaten Karo, serta arahan kedepan Kawasan Danau Toba sebagai Taman Bumi (*Geopark*) yang direncanakan titik pusatnya di Kecamatan Sianjur mula-mula Kabupaten Samosir;
- b. Pemandian air panas Pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
- c. Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
- d. Paroppo di Kabupaten Dairi;
- e. Pegunungan di Kabupaten Pakpak Bharat;

- f. Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun;
- g. Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- h. Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir;
- i. Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara;
- j. Danau Siombak Kota Medan;
- k. Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai;
- l. Pantai Perupuk, Pantai Sejarah di Kabupaten Batubara;
- m. Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang;
- n. Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
- o. Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan;
- p. Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu di Kabupaten Nias;
- q. Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat;
- r. Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
- s. Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- t. Pantai Natal, Mandailing Natal;
- u. Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan;

Selain itu Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar disektor ekowisata. Ekowisata merupakan perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Honey,2008).

Sebagai cabang dari Industri Pariwisata yang telah berkembang, ekowisata hadir sebagai sektor pariwisata yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan diperkenalkan sebagai formasi berkelanjutan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pembangunan (Tsaur dan Lin, 2006).

Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain :

a. Kawasan Ekowisata Tangkahan

Tangkahan terletak diantara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat rehabilitasi satwa langka orangutan sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu juga terdapat kawasan Bahorok, sekitar 75.7 km dari Medan atau 3 jam dengan mobil. Tempat yang terkenal dengan arus sungai yang deras dan jernih yang sangat cocok untuk penikmat olahraga arung jeram.

b. Kawasan Ekowisata Karo.

Kabupaten Karo terletak sekitar 77 Km dari Kota Medan, atau 3,5 jam dengan mobil. Kabupaten Karo adalah salah satu Kabupaten dengan cuaca terdingin di Indonesia dengan suhu 16-17 derajat Celcius. Selain itu, Kabupaten Karo merupakan salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di luar negeri, terbukti dengan wisatawan asing yang datang ke kabupaten ini. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kavar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

2. Wisata Kebudayaan

Merupakan jenis wisata dengan daya tarik budaya, dapat berupa peninggalan jaman dahulu, berupa bangunan dan kawasan permukiman yang masih memelihara tradisi. Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya:

- a. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan;
- b. Stasiun Kereta Api Binjai;
- c. Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. Kawasan situs bersejarah kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
- e. Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- f. Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- g. Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal;
- h. Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal;
- i. Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga;
- j. Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- k. Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara;
- l. Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir;
- m. Istana Sisimangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- n. Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir;
- o. Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi;
- p. Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat;
- q. Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
- r. Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batubara;
- s. Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai;
- t. Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang;

- u. Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat;
- v. Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunungsitoli;
- w. Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan;
- x. Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias;
- y. Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.

3. Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata dengan daya tarik aktivitas tertentu seperti wisata kuliner, pendidikan, belanja, konvensi dan lain sebagainya. Di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dikategorikan wisata minat khusus antara lain:

- a. Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- b. Arung Jeram di Sei Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
- c. Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau-pulau Batu di Nias Selatan
- d. Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat
- e. Olahraga Paralayang di Sitopsi;
- f. Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi;
- h. Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai;
- i. Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
- j. Museum pusaka Nias di Kota Gunungsitoli;
- k. Museum sejarah Batak di Balige di Kabupaten Toba Samosir

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata yang mengamanahkan bahwa perencanaan

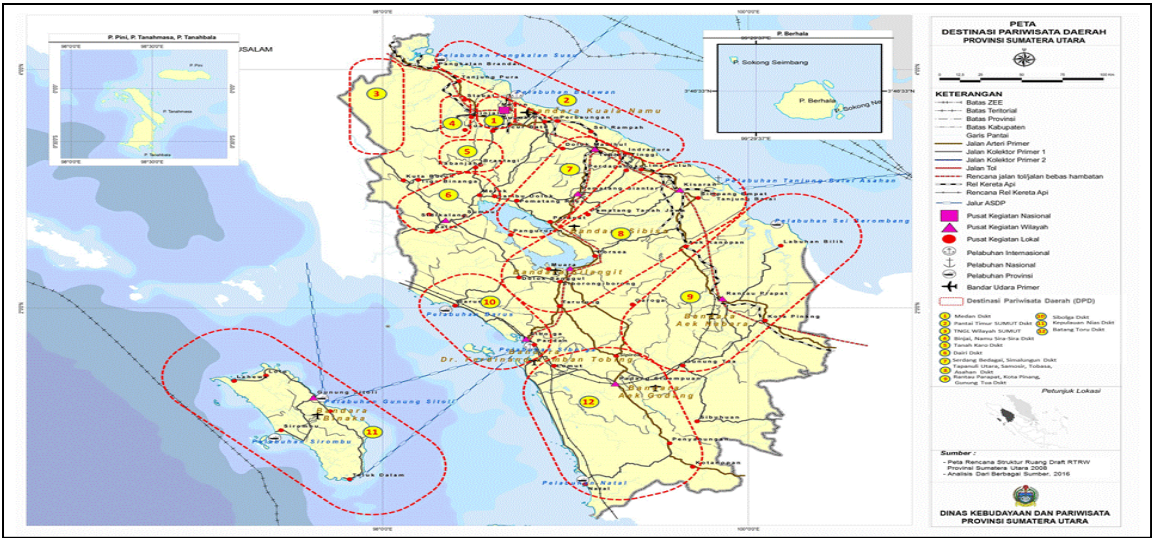
pembangunan kepariwisataan disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi (Ripparda) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018.

Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan perwilayaan. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibagi dalam 12 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), yaitu :

- 1) Medan dan sekitarnya;
- 2) Pantai Timur Sumatera Utara dan sekitarnya;
- 3) Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Wilayah Sumatera Utara;
- 4) Binjai, Namu Sira Sira dan sekitarnya;
- 5) Tanah Karo dan sekitarnya;
- 6) Dairi dan sekitarnya;
- 7) Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya;
- 8) Tapanuli Utara, Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya;
- 9) Rantau Prapat, Kota Pinang, Gunung TUa dan sekitarnya;
- 10) Sibolga dan sekitarnya;
- 11) Kepulauan Nias dan sekitarnya;
- 12) Batang Toru dan sekitarnya.



Gambar 2. 5.
Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara

6. Bahan Tambang dan Mineral

Potensi bahan tambang terdiri dari bahan tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang gambut, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah sebagai berikut :

1. Bahan Tambang Panas Bumi

Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada beberapa tempat antara lain di Desa Lau Debuk-Debuk Sibayak Kabupaten Karo terbukti sebesar 30 MW; Desa Sarulla Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 135 MW; dan Desa Namorailangit Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 210 MW. Potensi panas bumi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.8
Sebaran Potensi Panas Bumi

No	Lapangan	Kabupaten	RES (Mwe)		RE (Mwe)	Pb	Pv	Ins (MW)
			Sp	Hp	Ps			
1	Beras Tepu	Karo	-	-	-	-	-	-
2	LauDebuk-Debuk Sibayak	Karo	-	70	131	-	30	2
3	Marike	Karo	25	-	-	-	-	-
4	Dolok Merawan	Simalungun	225	-	-	-	-	-
5	Pusuk Buhit D. Toba	Samosir	225	-	-	-	-	-
6	Simbolon Samosir	Samosir	225	-	-	-	-	-
7	Sarulla	Tap. Utara	-	100	200	-	135	-
8	Namorailangit	Tap. Utara	-	-	-	-	210	-

No	Lapangan	Kabupaten	RES (Mwe)		RE (Mwe)			Ins
			Sp	Hp	Ps	Pb	Pv	(MW)
9	Sibuhuan	Padang Lawas	100	-	-	-	-	-
10	S. Merapi – Sampuraga	Madina	-	-	420	-	-	-
11	Sampuraga	Madina	225	-	-	-	-	-
12	Roburan	Madina	-	-	320	-	-	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara
Keterangan:Sp:Speculative, Hp:Hipothetical, Ps:Possible/ terduga, Pb:Probable/ mungkin, Pv:Proven/ terbukti, Re:Reserve/ cadangan, Res:Resources/ sumberdaya, Ins:Installed/ terinstal

2. Bahan Tambang Minyak Bumi

Provinsi Sumatera Utara memiliki indikasi kandungan minyak yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

3. Bahan Tambang Gambut

Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Sebaran lahan gambut terdapat di beberapa lokasi antara lain Desa Panai tengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Adapun rincian sebaran potensi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.9
Sebaran Potensi Tambang Gambut

No	Lokasi	Koordinat (LU, BT)	Status	Cadangan (m³)
1	Desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang hasundutan	2°14’0,4” 98°52’04”	Eksplorasi Lanjutan	13.191.086
2	Desa Simangarunsang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	2°16’12” 98°44’00”	Eksplorasi Lanjutan	20.666.444
3	Desa Panaitengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu		Eksplorasi Pendahuluan	370.000.000
4	Desa Buluhtelang, Kecamatan Padangtualang Kabupaten Langkat	03°52’57,4” 98°20’0,9”	Penyelidikan Pendahuluan	6.000.000

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2009

4. Bahan Tambang Batu Bara

Potensi keberadaan batubara terdapat di 15 titik di Sumatera Utara, terdapat 7 (tujuh) lokasi yang telah memiliki potensi cadangan antara lain Desa Pargarutan, Kec. Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 1.000.000 ton seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.10
Sebaran Potensi Tambang Batubara

No	Lokasi	Status	Cadangan (ton)
1	Desa Rantau Panjang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailingnatal	Penyelidikan Pendahuluan	
2	Desa Pulaupadang Kec. Lingga Bayu Kab.Mandailingnatal	Penyelidikan Pendahuluan	
3	Desa Pargarutan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan	Eksplorasi Pendahuluan	1.000.000
4	Desa Ampolu Kec. Angkola Timur, Kab.Tapanuli Selatan	Penyelidikan Pendahuluan	
5	Desa Jonggoljae Kec. Arse Kab.Tapanuli Selatan	Penyelidikan Pendahuluan	
6	Kec. Sibolga Kab. Tapanuli Tengah	Penyelidikan Pendahuluan	-
7	Desa Hudopa Nauli Kec. Kolang Kab.Tapanuli Tengah	Penyelidikan Pendahuluan	
8	Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat	Penyelidikan Pendahuluan	100.000
9	Desa Tangkahan Kec. Batangserangan Kab.Langkat	Penyelidikan Pendahuluan	150.000
10	Kec. Besitang Kab. Langkat	Penyelidikan Pendahuluan	
11	Kec. Seilepan Kab. Langkat	Penyelidikan Pendahuluan	
12	Desa Tanjungberingin Kec. Kualuhhulu Kab. Labuhan Batu	Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000
13	Desa Hilimbowo Kare Kec. Alasa Kab Nias	Eksplorasi Pendahuluan	19.200.000
14	Desa Nazalou Alo'oa, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli	Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000
15	Desa Onozitoli Sifaoro'ase Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli	Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

5. Bahan Tambang Radioaktif

Potensi bahan tambang radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

6. Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Bahan tambang mineral logam terdiri dari 21 jenis dengan sebaran lokasi tercantum pada Tabel berikut :

Tabel. 2.11
Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral Logam

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
1	Antimoni	•Gunungsitoli, Kabupaten Nias •Batangasih Batanglubuk •Kabupaten Mandailingnatal. •Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan •Desa Bangko, Kecamatan Batang natal, Kabupaten Mandailing Natal
2	Arsen	• Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk, Kab. Mandailing Natal • Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan
3	Barit	• Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasamosir • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga
4	Bauksit	• Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu
5	Belerang	• Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal • Desa Namorailangit, Kecamatan Pahae julu, Kabupaten Tapanuli Utara • Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara • Gunung Pusukbuhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir • Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara • Gunung Sibayak, Kecamatan Simpang empat Kabupaten Karo • Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo
6	Besi	• Sebelah barat Pulau Nias, Kabupaten Nias • Aeksorik, Aekhorsik, Siayu, Kecamatan Kota nopan Kab Mandailing Natal
7	Bismutih	• Batanggadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Pulau Samosir, Kabupaten Samosir

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
8	Kromium	• Batangnatal, Kecamatan Batang natal Kabupaten • Mandailing Natal • Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailingnatal
9	Emas	• Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Desa Sinunukan, Desa Muarasoma, Kec Batang natal Kab. Mandailing Natal • Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailingnatal • Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailingnatal • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan • Desa Sikuikkuik, Kec Padangsidimpunan Barat, Kab Tapanuli Selatan • Gunungmeriah, Kecamatan Gunungmeriah Kabupaten Deliserdang • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Toralaulu • Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan • Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan • Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat
10	Perak	• Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Desa Batahan, Kecamatan Batang natal Kabupaten Mandailing Natal • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan
11	Tembaga	• Batanggadis, Aekkorsik, Aeksorik, Aekkulbungnagodang, Batanglobung Kecamatan Batangnatal Kabupaten Mandailing Natal • Pagargunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal • Desa Aekhabil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab Tapanuli Tengah • Dolokpinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang hasundutan • Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi
12	Florit	• Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
13	Mangan	• Desa Simpanggambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal • Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
14	Merkuri	• Seisampali, Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang
15	Molibdenum	• Aekkolbungnagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
16	Niobium	• Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah
17	Platina	• Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
18	Tellurium	• Bukit Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
19	Seng	• Aektambang, Batanggadis, Batanglobung Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal • Hutabargotjulu, Aeksorik, Pagargunung, Patahajang, Malilir, Bukit Piongg, Gunungmarisi Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab Tapanuli Selatan • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan
20	Timbal	• Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias • Batanggadis, Batanglobung, Aekhorsik Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal • Desa Pagargunung, Patahajang, Gunungmarisi Bukit Piongg, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal • Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara • Desa Sopokomil, Kecamatan SilimapunggapunggaKabupaten Dairi • Kecamatan SosaKabupaten Tapanuli Selatan
21	Wolfram	• Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten.

7. Bahan Galian Air Tanah

Lokasi kegiatan pertambangan bahan galian air tanah tersebar di 19 (sembilan belas) cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara yaitu CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane, CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat, CAT Tarutung, CAT Onolimbu/Gunung Sitoli, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala Batangtoru, CAT Teluk Durian/Pekanbaru, CAT Banjarampa,

CAT Panyabungan, CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidempuan, CAT Natal-Ujunggading, CAT Lubuk Sikaping.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Provinsi Sumatera Utara dibagi kedalam beberapa kawasan, yaitu kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan zona patahan aktif, kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami, kawasan rawan banjir/banjir bandang, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan rawan kebakaran hutan, dan kawasan rawan letusan gunung berapi. Wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap terjadinya longsor (gerakan tanah), gelombang pasang (tsunami), banjir dan peristiwa gempa.

a. Massa Gerakan Tanah/ Tanah Longsor

Bencana longsor disertai dengan banjir bandang sudah sering terjadi di Sumatera Utara, gerakan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- **Kemiringan Lereng**

Kemiringan Lereng yang terjal pada bagian barat Pegunungan Bukit Barisan. Perbedaan elevasi satu tempat dengan tempat lain menjadi sumber energi gaya berat untuk mempermudah terjadinya gerakan.

- **Kondisi Geologi**

Batuan Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Utara adalah batuan yang dicacah-cacah oleh patahan-patahan. Di Sumatera Utara terdapat 3 (tiga) ruas patahan utama yaitu Renun, Toru dan Angkola. Keadaan geologi lainnya adalah kedudukan atau kemiringan lapisan tanah dan batuan di daerah (desa, kota) tersebut. Semakin miring lapisan tanah/batuan maka semakin labil atau semakin mudah longsor, demikian pula jika kemiringan topografis suatu daerah semakin curam atau semakin terjal, maka akan semakin mudah longsor.

- **Curah Hujan**

Curah hujan yang tinggi terdapat pada daerah perbukitan bagian barat Bukit Barisan serta disekitar Pegunungan Leuseur.

Selanjutnya kondisi dan pola pengeringan air hujan yang jatuh di suatu daerah akan menentukan tingkat kerawanan terjadinya longsor disuatu daerah. Daerah dengan kondisi pengeringan alamiah (*drainage*) yang buruk akan menyebabkan genangan yang melumas bidang gelincir massa batuan dan memicu terjadinya longsor.

- Gempa

Adanya gempa bumi dapat memicu terjadinya longsor

- Perubahan Vegetasi & Aktifitas Manusia

Penebangan hutan, alih fungsi lahan pembukaan lahan hutan untuk jalan, permukiman dan infrastruktur lainnya turut memicu terjadinya gerakan tanah.

Kawasan yang terletak pada daerah rawan massa gerakan tanah/tanah longsor antara lain pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara – Selatan. Kawasan tersebut pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.

b. Rawan Zona Patahan Aktif

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara terdapat 3 (tiga) ruas patahan utama yaitu Renun, Toru dan Angkola. Kawasan rawan zona patahan aktif yaitu di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan wilayah daratan Sumatera Utara.

c. Rawan Gelombang Pasang Air Laut/Abrasi/Tsunami

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 (lima) meter. Di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

d. Banjir/Banjir Bandang

Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Sumatera Utara yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Kawasan rawan banjir/banjir bandang terletak di sepanjang Pantai Timur yang dilalui oleh jalur lintas timur Sumatera.

e. Angin Puting Beliung

Daerah rawan bencana angin puting beliung Pada kawasan Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Mandailing Natal.

f. Kebakaran Hutan

Selain peristiwa bencana alam, di Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kawasan rawan bencana kebakaran hutan antara lain kawasan yang berada di sekitar Danau Toba.

Tabel. 2.12
Data Kebakaran Hutan dan Lokasi Hot Spot (Titik Api)

No	Nama KPH	No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017		2018	
				Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)	Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)	Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)	Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)	Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)
1	KPH I	1	Langkat	58	-	20	-	3	-	5	-	10	0
		2	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	2	-	0	0
		3	Kota Medan	1	-	1	-	-	-	1	-	2	0
		4	Kota Binjai	2	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		5	Deli Serdang	32	27	25	-	5	-	2	-	11	2
2	KPH II	6	Kota Pematang Siantar	-	-	-	-	-	-	2	1	2	0
		7	Simalungun	25	-	3	139	18	-	15	36	8	44,2
		8	Serdang Bedagai	2	-	7	-	-	139	4	-	8	0
		9	Batubara	-	-	-	239	-	-	8	-	0	0
3	KPH III	10	Labuhan Batu	104	33	11	51	18	239	12	2	69	75
		11	Labuhan Batu Utara	52	8	16	-	7	51	13	-	35	123
		12	Kota Tanjung Balai	2	-	-	117	-	-	-	-	0	0
		13	Asahan	45	-	13	175	-	117	8	26	2	0
4	KPH IV, KPH XII	14	Toba Samosir	36	-	5	212	1	175	19	2	21	94,97
		15	Tapanuli Utara	50	12	29	137	9	212	10	52	16	20,1
5	KPH V, KPH VI, KPH VII, KPH X	16	Labuhan Batu Selatan	39	-	7	242	2	137	22	62	23	121
		17	Tapanuli Selatan	96	16	22	-	28	242	25	78	32	90,6
		18	Padang Lawas Utara	55	-	17	-	47	-	21	-	34	106,5
		19	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	2,355	-	-	1	490	0	0
		20	Padang Lawas	125	45	76	6	128	2,355	36	5	27	123,5
6	KPH VIII, KPH IX	21	Mandailing Natal	94	-	26	-	9	6	10	40	14	20,25
7	KPH XI, KPH XII	22	Tapanuli Tengah	19	5	8	-	5	-	28	-	5	0

No	Nama KPH	No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017		2018	
				Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)	Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)	Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)	Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)	Hot Spot	Luas Terbakar (Ha)
		23	Kota Sibolga	-	-	-	55	-	-	5	10	0	0
8	KPH XII, KPH XIII	24	Humbang Hasundutan	41	-	4	687	30	55	21	7	16	25
		25	Samosir	33	-	3	1	10	687	5	-	27	1697
		26	Pakpak Bharat	9	-	5	450	17	1	4	2	6	0
9	KPH XIV, KPH XV	27	Karo	65	-	19	100	31	450	11	4	19	450,4
		28	Dairi	41	-	4	-	3	100	7	-	5	138,06
10	KPH XVI	29	Nias	5	-	3	-	-	-	3	2	0	0
		30	Nias Utara	-	-	-	-	-	-	4	-	0	0
		31	Nias Selatan	6	-	7	-	-	-	1	-	0	0
		32	Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
		33	Nias Barat	8	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOTAL				1,045	146	331	4,965	371	4,965	305	817	393	3138,88

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, tahun 2018

g. Letusan Gunung Berapi

Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di wilayah Sumatera Utara yakni Gunung Sorik Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Dolok Martimbang, Gunung Sibayak, Gunung Pusuk Buhit dan Gunung Sibual-buali. Keenam gunung api tersebut dapat di bagi kedalam 3 klasifikasi gunung api sebagai berikut:

- **Tipe A**, yaitu gunung yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600. Gunung api tipe ini paling rentan meletus. Gunung api di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk kedalam tipe ini ialah Gunung Sorik Merapi di Kabupaten Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
- **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo;Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api. Gunung di Sumatera Utara yang termasuk kedalam tipe ini ialah Gunung Dolok

Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.1.4. Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.13
Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kawasan Strategis Nasional
1	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sumatera Utara (Pulau Berhala)
2	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)
3	Kawasan Danau Toba dan sekitarnya

Sumber : PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Pulau Berhala, merupakan pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara dari 34 pulau kecil terluar di Pulau Sumatera, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ditetapkan bagian kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam. selain Pulau Berhala masih ada 2 (dua) pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara yaitu, Pulau Simuk dan Pulau Wunga.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo bahwa Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Kawasan danau Toba telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional dengan fungsi lingkungan dan telah memiliki rencana tata ruang sendiri seperti yang dituangkan dalam Perpres No.81 Tahun 2014, Cakupan Kawasan Danau Toba berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 terdiri dari badan danau, DTA dan CAT, mencakup 25 sub DAS pada 7 kabupaten dan 28 kecamatan yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir dan 4 CAT di 8 Kabupaten dan 57 Kecamatan yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir dan Pakpak Bharat

Disamping Kawasan Strategis Nasional, untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan perekonomian nasional, di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Sei Mangkei, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, seluas 2.002,77 ha (dua ribu dua koma tujuh puluh tujuh hektar) yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. KEK Sei Mangkei tersebut direncanakan menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional. KEK Sei Mangkei ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang akan berimplikasi terhadap dinamika pembangunan di kawasan sekitarnya, seperti peningkatan kegiatan ekonomi, perubahan tata guna lahan, kebutuhan SDM / tenaga kerja, maupun kebutuhan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada terbentuknya konsep kota baru disekitar KEK Sei Mangkei.

Kawasan Strategis Provinsi yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, yakni antara lain:

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;

4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;
5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;
6. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;
7. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
8. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
9. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;
11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan
14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

Tabel. 2.14
Aspek Strategis Kawasan Strategis

No	Kawasan Strategis	Nilai/Aspek Strategis
1	Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara India/Thailand/Malaysia di Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai	Pertahanan dan Keamanan
2	Kawasan Perkotaan Mebidangro	Ekonomi
3	Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi: • Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang; • Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan; • Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.	Sosial Budaya
4	Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya	Lingkungan Hidup
5	Kawasan Ekosistem Leuser dan Bohorok	Lingkungan Hidup
6	Kawasan Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru)	Lingkungan Hidup
7	Kawasan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;	Lingkungan Hidup
8	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias	Ekonomi
9	Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten	Sosial Budaya

No	Kawasan Strategis	Nilai/Aspek Strategis
	Nias Selatan dan sekitarnya	
10	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya • Kawasan Labuan Angin – Sibolga • Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan • Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya	Ekonomi
11	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan • Kawasan Tanjung Balai – Asahan • Kawasan Simalungun – Batubara • Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke	Ekonomi
12	Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi • Merek Karo; • Siborong borong, Tapanuli Utara; • Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan; • Lumban Julu Toba Samosir; • Harian, Samosir; • Silimakuta Simalungun; • Sitinjo, Dairi, • Siempat Rube Pakpak Bharat • Siantar Martoba Kota Pematangsiantar	Ekonomi
13	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhan Batu dan sekitarnya	Ekonomi
14	Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah	Sosial Budaya
15	Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir	Sosial Budaya
16	Kawasan Religi dan Situs Candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara	Sosial Budaya
17	Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak	Lingkungan Hidup

Sumber: PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

2.1.1.5. Kondisi Demografi

Kondisi Demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk. Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara 12.982.204 jiwa dengan kepadatan penduduk 188 jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun

1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun, dan pada kurun waktu tahun 2000-2010 menjadi 1,22 persen per tahun. Pada tahun 2017 Penduduk Sumatera Utara berjumlah 14.262.147 jiwa. Pada tahun 2017 penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan, jumlah penduduk yang tinggal dipedesaan adalah 7.132.310 jiwa (50,01%) dan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 7.129.837 jiwa (49,99%).

Berdasarkan data dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2018, penduduk Sumatera Utara didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 7.145.251 jiwa dan laki-laki sebanyak 7.116.896 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Gol. Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
0-4	780.652	753.292	1.553.944	104
5-9	787.706	756.797	1.544.503	104
10-14	729.726	694.428	1.424.154	105
15-19	683.277	655.554	1.338.831	104
20-24	622.950	606.967	1.229.917	103
25-29	550.164	545.949	1.096.113	101
30-34	517.846	523.859	1.041.705	99
35-39	485.113	496.126	981.239	98
40-44	446.939	456.345	903.284	98
45-49	399.810	415.678	815.488	96
50-54	346.337	366.379	712.716	95
55-59	287.999	306.144	594.143	94
60-64	212.047	224.166	436.213	95
65+	266.330	343.567	609.897	78
Sumut	7.116.896	7.145.251	14.262.147	100

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2018

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.16
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018*

No	Kabupaten/Kota	Jumlah			Kepadatan Jiwa per km ²	Distribusi Penduduk
		Lk	Pr	Jlh		
1	Nias	69 191	72 919	142.110	78	1.00
2	Mandailing Natal	215 704	223 801	439.505	72	3.08
3	Tapanuli Selatan	138 486	140 101	278.587	47	1.95
4	Tapanuli Tengah	182 607	181 098	363.705	167	2.55
5	Tapanuli Utara	147 110	150 696	297.806	79	2.09
6	Toba Samosir	90 297	91 493	181 790	79	1.27
7	Labuhan Batu	241 800	236 793	478 593	222	3.36
8	Asahan	360 901	357 817	718 718	195	5.04
9	Simalungun	428 105	431 123	859 228	197	6.02
10	Dairi	140 798	141 078	281 876	147	1.98
11	Karo	200 122	203 085	403 207	190	2.83
12	Deli Serdang	1 064 206	1 050 421	2 114 627	944	14.83
13	Langkat	517 804	510 505	1 028 309	165	7.21
14	Nias Selatan	156 205	158 190	314 395	173	2.20
15	Humbang Hasundutan	92 702	93 992	186 694	80	1.31
16	Pakpak Bharat	23 793	23 390	47 183	39	0.33
17	Samosir	62 214	62 885	125 099	61	0.88
18	Serdang Bedagei	307 722	305 202	612 924	323	4.30
19	Batu Bara	205 818	203 273	409 091	444	2.87
20	Padang Lawas Utara	131 987	130 908	262 895	68	1.84
21	Padang Lawas	135 210	134 589	269 799	70	1.89
22	Labuhan Batu Selatan	166 703	160 122	326 825	91	2.29
23	Labuhan Batu Utara	180 682	177 009	357 691	101	2.51
24	Nias Utara	67 282	68 808	136 090	114	0.95
25	Nias Barat	38 860	42 419	81 279	172	0.57
26	Sibolga	43 726	43 364	87 090	2109	0.61
27	Tanjung Balai	86 277	84 910	171 187	1588	1.20
28	Pematangsiantar	122 626	128 887	251 513	4519	1.76
29	Tebing Tinggi	79 379	81 307	160 686	5184	1.13
30	Medan	1 110 000	1 137 425	2 247 425	8481	15.76
31	Binjai	135 203	135 723	270 926	4578	1.90
32	Padang Sidempuan	105 293	110 720	216 013	1884	1.51
33	Gunung Sitoli	68 083	71 198	139 281	497	0.98
	SUMATERA UTARA	7 116 896	7 145 251	14 262 147	196	0,98

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, 2018 *) Angka Sementara

Komposisi penduduk menurut pendidikan di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota digambarkan dengan usia penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.17
Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah
Menurut Kelompok Umur Tahun 2018*

No. Kabupaten/Kota	Kelompok umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
01 N i a s	98,94	92,71	72,17	15,06
02 Mandailing Natal	99,85	96,74	75,75	17,25
03 Tapanuli Selatan	98,90	97,91	79,24	18,22
04 Tapanuli Tengah	99,65	98,23	85,97	16,14
05 Tapanuli Utara	99,58	99,12	83,91	27,17
06 Toba Samosir	99,21	100,00	89,51	14,46
07 Labuhanbatu	99,79	96,56	73,32	23,04
08 A s a h a n	99,66	96,49	68,49	14,93
09 Simalungun	99,31	96,11	70,81	22,05
10 D a i r i	100,00	100,00	89,27	14,94
11 K a r o	99,15	93,38	83,00	14,96
12 Deli Serdang	99,87	97,31	77,95	24,28
13 L a n g k a t	100,00	97,85	74,67	23,12
14 Nias Selatan	96,02	86,22	78,99	20,73
15 Humbang Hasundutan	99,06	98,45	86,41	14,61
16 Pakpak Bharat	99,76	97,50	90,81	14,56
17 Samosir	99,66	100,00	94,15	4,76
18 Serdang Bedagai	99,51	96,21	74,41	10,55
19 Batu Bara	99,77	96,08	67,74	22,68
20 Padang Lawas Utara	98,83	96,22	72,60	20,07
21 Padang Lawas	99,82	96,24	74,81	29,52
22 Labuhanbatu Selatan	98,70	91,79	77,54	24,19
23 Labuhanbatu Utara	100,00	97,80	75,59	26,96
24 Nias Utara	98,17	96,99	81,08	17,43
25 Nias Barat	100,00	97,32	89,26	14,04
Kota				
26 S i b o l g a	99,11	98,96	79,00	13,42
27 Tanjungbalai	98,82	96,20	71,44	8,36
28 Pematangsiantar	99,77	97,90	82,12	34,72
29 Tebing Tinggi	98,69	96,82	66,69	16,40
30 M e d a n	99,73	97,32	79,69	42,42
31 B i n j a i	100,00	97,45	80,34	22,82
32 Padangsidempuan	100,00	99,33	81,80	29,09
33 Gunungsitoli	99,32	98,92	84,57	19,90
Sumatera Utara	99,50	96,75	77,41	25,31

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2018 *) Angka Sementra

Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.18
Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Menurut Kelompok Umur (jiwa) Tahun 2018

No	Kab/Kota	Kelompok umur			
		5-6	7-12	13-15	16-18
1	Kab. Deli Serdang	137.685	221.937	96.397	96.843
2	Kab. Langkat	81.125	116.848	56.604	52.250
3	Kab. Karo	33.544	47.159	21.976	16.555
4	Kab. Simalungun	71.016	102.499	47.730	42.880
5	Kab. Dairi	31.117	41.427	20.369	15.582
6	Kab. Asahan	63.894	86.730	40.814	40.195
7	Kab. Labuhan Batu	39.341	65,086	28.154	22.170
8	Kab. Tapanuli Utara	29.736	41.346	22.186	16.973
9	Kab. Tapanuli Tengah	32.227	43.665	22.322	18.501
10	Kab. Tapanuli Selatan	28.373	39.708	18.146	15.616
11	Kab. Nias	18.703	24.626	9.,435	8.137
12	Kab. Mandailing Natal	40.929	61.928	30.629	24.786
13	Kab. Toba Samosir	23.862	25.784	13.039	12.381
14	Kab. Nias Selatan	65.322	49.788	19.835	19.819
15	Kab. Pakpak Bharat	17.398	6.790	3.445	2.708
16	Kab. Humbang Hasudutan	23.322	28.118	15.063	11.784
17	Kab. Samosir	15.324	18.704	9.505	7.115
18	Kab. Serdang Bedagai	54.262	78.258	35.034	30.301
19	Kab. Batubara	40.072	52.043	24.454	24.776
20	Kab. Padang Lawas utara	28.322	38.149	15.025	13.493
21	Kab. Padang Lawas	25.635	35.573	15.467	16.866
22	Kab. Labuhan Batu Utara	33.389	51.482	20.714	21.529
23	Kab. Labuhan Batu Selatan	28.999	44.050	17.030	19.851
24	Kab. Nias Barat	9.419	15.436	6.528	5.778
25	Kab. Nias Utara	14.478	24.771	9.724	11.333
26	Kota Medan	153.690	240.754	129.769	132.352
27	Kota Binjai	18.339	31.824	17.948	18.629
28	Kota Tebing Tinggi	15.073	18.892	10.849	12.110
29	Kota Pematangsiantar	18.504	29.775	19.541	25.352
30	Kota Tanjung Balai	14.813	21.752	10.994	9.793
31	Kota Sibolga	13.852	14.671	7.338	7.617
32	Padang Sidempuan	16.399	25.763	13.774	14.964
33	Gunung Sitoli	13.636	21.164	8.862	8.761
Sumatera Utara		1.251.800	1.251.800	1.766.500	838.700

Sumber :Sumatera Utara Dalam Angka, 2018

Jumlah Jiwa Penduduk Umur 3-6 Tahun (PAUD) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan Anak Usia Dini menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.19
Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun (Jiwa) Untuk
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2018*

No	Kabupaten / Kota	P3-6 th	Siswa PAUD	APK PAUD
1	Kab. Deli Serdang	137.685	110.050	79,93
2	Kab. Langkat	81.125	75.986	93,67
3	Kab. Karo	33.544	27.443	81,81
4	Kab. Simalungun	71.,016	52.303	73,65
5	Kab. Dairi	31.117	29.444	94,62
6	Kab. Asahan	63.894	57.763	90,40
7	Kab. Labuhan Batu	39.341	34.995	88,95
8	Kab. Tapanuli Utara	29.736	27.347	91,97
9	Kab. Tapanuli Tengah	32.227	31.919	99,04
10	Kab. Tapanuli Selatan	28.373	27.925	98,42
11	Kab. Nias	18.703	16.585	88,68
12	Kab. Mandailing Natal	40.929	32.474	79,34
13	Kab. Toba Samosir	23.862	16.050	67,26
14	Kab. Nias Selatan	65.322	29.022	44,43
15	Kab. Pakpak Bharat	17.398	8.166	46,94
16	Kab. Humbang Hasundutan	23.322	15.330	65,73
17	Kab. Samosir	15.324	10.135	66,14
18	Kab. Serdang Bedagai	54.262	45.026	82,98
19	Kab. Batu bara	40.072	27.544	68,74
20	Kab. Padang Lawas utara	28.322	12.389	43,74
21	Kab. Padang Lawas	25.635	10.288	40,13
22	Kab. Labuhan Batu Utara	33.389	19.972	59,82
23	Kab. Labuhan Batu Selatan	28.999	26.114	90,05
24	Kab. Nias Barat	9.419	5.132	54,49
25	Kab. Nias Utara	14.478	5.971	41,24
26	Kota Medan	153.690	106.371	69,21
27	Kota Binjai	18.339	17.798	97,05
28	Kota Tebing Tinggi	15.073	14.385	95,44
29	Kota Pematang siantar	18.504	16.316	88,18
30	Kota Tanjung Balai	14.813	13.091	88,38
31	Kota Sibolga	13.852	8.911	64,33
32	Kota Padang Sidempuan	16.399	16.204	98,81
33	Kota Gunungsitoli	13.636	9.270	67,98
	Sumatera Utara	1.251.800	957.719	76,51

Sumber : PDSPK Kemdikbud, 2018 *) Angka sementara

Jumlah Jiwa Penduduk Umur 7-12 Tahun Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan Dasar menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.20
Jumlah Jiwa Penduduk Usia 7-12 Tahun
Untuk Pendidikan Dasar Tahun 2018*

No	Kabupaten / Kota	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Siswa SD/SDLB/MI/Salafiyah ULA/Paket A	Siswa Usia 7-12 untuk SD/SDLB/MI/Salafiyah ULA/Paket A	APK	APM
1	Kab. Deli Serdang	221.937	246.017	211.255	110,85	95,19
2	Kab. Langkat	116.848	129.095	110.168	110,48	94,28
3	Kab. Karo	47.159	48.596	43.140	103,05	91,48
4	Kab. Simalungun	102.499	111.001	95.033	108,29	92,72
5	Kab. Dairi	41.427	44.706	38.267	107,92	92,37
6	Kab. Asahan	86.730	93.617	81.654	107,94	94,15
7	Kab. Labuhan Batu	65.086	64.840	56.779	99,62	87,24
8	Kab. Tapanuli Utara	41.346	45.715	38.613	110,57	93,39
9	Kab. Tapanuli Tengah	43.665	47.444	39.892	108,65	91,36
10	Kab. Tapanuli Selatan	39.708	42.680	36.445	107,48	91,78
11	Kab. Nias	24.626	25.615	21.137	104,02	85,83
12	Kab. Mandailing Natal	61.928	67.222	58.704	108,55	94,79
13	Kab. Toba Samosir	25.784	27.906	23.801	108,23	92,31
14	Kab. Nias Selatan	49.788	50.096	41.101	100,62	82,55
15	Kab. Pakpak Bharat	6.790	7.332	6.232	107,98	91,78
16	Kab. Humbang Hasudutan	28.118	30.014	25.776	106,74	91,67
17	Kab. Samosir	18.704	19.085	15.944	102,04	85,24
18	Kab. Serdang Bedagai	78.258	83.900	71.079	107,21	90,83
19	Kab. Batubara	52.043	58.957	49.888	113,29	95,86
20	Kab. Padang Lawas utara	38.149	41.020	35.636	107,53	93,41
21	Kab. Padang Lawas	35.573	39.844	35.022	112,01	98,45
22	Kab. Labuhan Batu Utara	51.482	51.242	44.719	99,53	86,86
23	Kab. Labuhan Batu Selatan	44.050	43.107	38.191	97,86	86,70
24	Kab. Nias Barat	15.436	14.374	11.818	93,12	76,56
25	Kab. Nias Utara	24.771	21.983	18.388	88,74	74,23
26	Kota Medan	240.754	278.343	235.665	115,61	97,89
27	Kota Binjai	31.824	34.661	29.848	108,91	93,79
28	Kota Tebing Tinggi	18.892	21.506	18.301	113,84	96,87
29	Kota Pematangsiantar	29.775	33.725	28.259	113,27	94,91
30	Kota Tanjung Balai	21.752	22.751	20.422	104,59	93,89
31	Kota Sibolga	14.671	16.183	13.651	110,31	93,05
32	Kota Padang Sidempuan	25.763	27.859	24.068	108,14	93,42
33	Kota Gunungsitoli	21.164	20.481	16.971	96,77	80,19
	Sumatera Utara	1.766.500	1.910.917	1.635.867	108,18	92,60

Sumber : PDSPK Kemdikbud, 2018 *) Angka sementara

Jumlah Jiwa Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.21 Jumlah Jiwa Penduduk Usia 13-15 Tahun Untuk Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2018*						
No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Siswa SMP/SMPLE/MTs/Paket B/SalafiyahWustha	Siswa Usia 13-15 th SMP/SMPLE/MTs/Paket B/SalafiyahWustha	APK	APM
1	Kab. Deli Serdang	96.397	103.631	77.070	107,50	79,95
2	Kab. Langkat	56.604	60.558	45.052	106,99	7959
3	Kab. Karo	21.976	22.198	17.043	101,01	77,55
4	Kab. Simalungun	47.730	49.140	35.723	102,95	74,84
5	Kab. Dairi	20.369	20.844	15.667	102,33	76,92
6	Kab. Asahan	40.814	42.417	32.286	103,93	79,11
7	Kab. Labuhan Batu	28.154	30.115	23.255	106,97	82,60
8	Kab. Tapanuli Utara	22.186	22.493	16.202	101,38	73,03
9	Kab. Tapanuli Tengah	22.322	22.726	16.629	101,81	74,50
10	Kab. Tapanuli Selatan	18.146	19.408	14.905	106,95	82,14
11	Kab. Nias	9.435	10.730	7.406	113,73	78,49
12	Kab. Mandailing Natal	30.629	35.049	26.111	114,43	85,25
13	Kab. Toba Samosir	13.039	13.140	9.929	100,77	76,15
14	Kab. Nias Selatan	19.835	21.116	14.366	106,46	72,43
15	Kab. Pakpak Bharat	3.445	3.427	2.548	99,48	73,96
16	Kab. Humbang Hasudutan	15.063	15.092	11.045	100,19	73,33
17	Kab. Samosir	9.505	9.629	6.870	101,30	72,28
18	Kab. Serdang Bedagai	35.034	35.869	26.729	102,38	76,29
19	Kab. Batubara	24.454	25.706	18.908	105,12	77,32
20	Kab. Padang Lawas utara	15.025	16.654	12.640	110,84	84,13
21	Kab. Padang Lawas	15.467	17.407	12.610	112,54	81,53
22	Kab. Labuhan Batu Utara	20.714	22.152	16.954	106,94	81,85
23	Kab. Labuhan Batu Selatan	17.030	18.716	14.842	109,90	87,15
24	Kab. Nias Barat	6.528	6.803	4.635	104,21	71,00
25	Kab. Nias Utara	9.724	10.433	7.599	107,29	78,15
26	Kota Medan	129.769	140.563	98.779	108,32	76,12
27	Kota Binjai	17.948	18.999	13.473	105,86	75,07
28	Kota Tebing Tinggi	10.849	11.453	8.173	105,57	75,33
29	Kota Pematangsiantar	19.541	20.687	14.251	105,86	72,93
30	Kota Tanjung Balai	10.994	12.209	9.384	111,05	85,36
31	Kota Sibolga	7.338	7.620	5.645	103,84	76,93
32	Kota Padang Sidempuan	13.774	14.650	11.409	106,36	82,83
33	Kota Gunungsitoli	8.862	9.545	6.898	107,71	77,84

Sumber : PDSPK Kemdikbud, 2018 *) Angka sementara

Jumlah Jiwa Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Pendidikan Sekolah Menengah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.22
Jumlah Jiwa Penduduk Usia 16-18 Tahun Untuk Pendidikan Sekolah Menengah Tahun 2018*

No	Kabupaten / Kota	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Siswa SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C/Salafulya	Siswa Usia 16-18 thn MA/SMLB/MA/SMK/Paket C/Salafulya	APK	APM
1	Kab. Deli Serdang	96.843	83.384	58.411	86,10	60,32
2	Kab. Langkat	52.250	46.478	33.016	88,95	63,19
3	Kab. Karo	16.555	17.372	12.970	104,94	78,34
4	Kab. Simalungun	42.880	35.865	24.881	83,64	58,02
5	Kab. Dairi	15.582	17.084	12.690	109,64	81,44
6	Kab. Asahan	40.195	33.018	23.776	82,14	59,15
7	Kab. Labuhan Batu	22.170	25.379	18.966	114,47	85,55
8	Kab. Tapanuli Utara	16.973	19.631	14.049	115,66	82,77
9	Kab. Tapanuli Tengah	18.501	17.206	12.332	93,00	66,66
10	Kab. Tapanuli Selatan	15.616	12.404	9.174	79,43	58,75
11	Kab. Nias	8.137	7.004	4.906	86,08	60,29
12	Kab. Mandailing Natal	24.786	25.729	18.618	10,80	75,11
13	Kab. Toba Samosir	12.381	13.580	9.649	109,68	77,93
14	Kab. Nias Selatan	19.819	20.947	14.127	105,69	71,28
15	Kab. Pakpak Bharat	2.708	2.852	2.188	105,32	80,80
16	Kab. Humbang Hasudutan	11.784	13.064	9.488	110,86	80,52
17	Kab. Samosir	7.115	8.219	5.794	115,52	81,43
18	Kab. Serdang Bedagai	30.301	27.229	19.586	89,86	64,64
19	Kab. Batubara	24.776	19.126	13.447	77,20	54,27
20	Kab. Padang Lawas utara	13.493	10.217	7.694	75,72	57,02
21	Kab. Padang Lawas	16.866	14.329	9.460	84,96	56,09
22	Kab. Labuhan Batu Utara	21.529	17.208	12.915	79,93	59,99
23	Kab. Labuhan Batu Selatan	19.851	13.594	10.608	68,48	53,44
24	Kab. Nias Barat	5.778	5.813	4.039	100,61	69,90
25	Kab. Nias Utara	11.333	8.026	5.944	70,82	52,45
26	Kota Medan	132.352	146.438	100.495	110,64	75,93
27	Kota Binjai	18.629	21.768	14.860	116,85	79,77
28	Kota Tebing Tinggi	12.110	13.538	9.444	111,79	77,99
29	Kota Pematangsiantar	25.352	29.503	19.738	116,37	77,86
30	Kota Tanjung Balai	9.793	10.863	8.036	110,93	82,06
31	Kota Sibolga	7.617	8.440	5.950	110,80	78,11
32	Kota Padang Sidempuan	14.964	17.017	12.535	113,72	83,77
33	Kota Gunungsitoli	8.761	9.890	7.006	112,89	79,97
	Sumatera Utara	797.800	772.215	546.792	96,79	68,54

Sumber : PDSPK Kemdikbud, 2018 *) Angka Sementara

Populasi penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut kewarganegaraan sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.23
Populasi Penduduk Menurut Kewarganegaraan
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010

NO	KAB/KOTA	KEWARGANEGARAAN	
		WNI	WNA
1	Asahan	667.168	2
2	Batubara	374.964	0
3	Dairi	269.691	13
4	Deli Serdang	1.785.901	119
5	Humbang Hasundutan	171.329	2
6	Karo	349.506	4
7	Labuhan Batu	413.665	2
8	Labuhan Batu Selatan	277.520	3
9	Labuhan Batu Utara	330.272	1
10	Langkat	963.245	94
11	Mandailing Natal	399.703	0
12	Nias	131.376	0
13	Nias Barat	81.805	0
14	Nias Selatan	289.581	0
15	Nias Utara	127.243	0
16	Padang Lawas	225.108	3
17	Padang Lawas Utara	222.148	4
18	Pakpak Bharat	40.449	0
19	Samosir	119.592	0
20	Serdang Berdagai	593.874	5
21	Simalungun	815.389	33
22	Tapanuli Selatan	261.713	0
23	Tapanuli Tengah	310.668	6
24	Tapanuli Utara	278.285	0
25	Toba Samosir	171.948	38
26	Kota Binjai	245.045	0
27	Kota Gunung Sitoli	126.077	7
28	Kota Medan	2.079.925	420
29	Kota Padang Sidempuan	191.027	0
30	Kota Pematang Siantar	234.081	10
31	Kota Sibolga	84.364	1
32	Kota Tanjung Balai	153.692	1
33	Kota Tebing Tinggi	143.965	4
Provinsi Sumatera Utara		12.930.319	772

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS Provsu

Persentase penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Agama dan Kepercayaan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 adalah :

Tabel. 2.24
Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
Berdasarkan Sensus Tahun 2010

No	Kab / Kota	Umat Agama								Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	TT/ TD	
1	Asahan	88,94	9,15	0,68	0,02	1,02	0,00	0,02	0,16	100
2	Batubara	87,81	10,04	1,52	0,01	0,29	0,01	0,07	0,24	100
3	Dairi	15,66	72,80	11,29	0,01	0,10	0,00	0,01	0,13	100
4	Deli Serdang	78,22	16,82	2,48	0,17	2,03	0,01	0,02	0,26	100
5	Humbang Hasundutan	3,01	83,11	13,64	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	100
6	Karo	26,16	58,21	14,72	0,04	0,43	0,00	0,03	0,41	100
7	Labuhan Batu	82,92	13,95	1,16	0,01	1,60	0,00	0,01	0,34	100
8	Labuhan Batu Selatan	85,96	13,28	0,47	0,01	0,22	0,01	0,00	0,05	100
9	Labuhan Batu Utara	82,23	15,87	1,21	0,01	0,54	0,00	0,00	0,13	100
10	Langkat	90,58	7,75	0,41	0,04	0,79	0,00	0,03	0,39	100
11	Mandailing Natal	95,51	3,07	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	100
12	Nias	1,17	86,24	12,57	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	100
13	Nias Barat	1,98	78,74	19,24	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100
14	Nias Selatan	2,55	77,27	20,06	0,00	0,01	0,00	0,03	0,07	100
15	Nias Utara	5,42	78,22	16,25	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100
16	Padang Lawas	94,98	4,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	100
17	Padang Lawas Utara	89,68	9,32	0,37	0,00	0,01	0,00	0,00	0,62	100
18	Pakpak Bharat	39,90	56,94	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100
19	Samosir	1,57	58,46	39,76	0,01	0,00	0,00	0,14	0,05	100
20	Serdang Berdagai	83,76	13,38	1,40	0,03	1,22	0,01	0,01	0,19	100
21	Simalungun	57,27	36,97	5,15	0,02	0,24	0,00	0,06	0,29	100
22	Tapanuli Selatan	78,61	19,61	0,96	0,00	0,01	0,00	0,02	0,80	100
23	Tapanuli Tengah	42,71	45,31	11,61	0,01	0,07	0,00	0,11	0,18	100
24	Tapanuli Utara	4,76	90,24	4,59	0,00	0,05	0,00	0,01	0,35	100
25	Toba Samosir	6,20	85,42	6,60	0,02	0,04	0,00	1,05	0,66	100
26	Kota Binjai	85,08	7,88	0,81	0,26	5,44	0,07	0,01	0,45	100
27	Kota Gunung Sitoli	13,59	78,83	7,22	0,00	0,19	0,00	0,03	0,14	100
28	Kota Medan	67,80	20,27	1,79	0,44	8,81	0,02	0,02	0,85	100
29	Kota Padang Sidempuan	89,95	8,94	0,46	0,00	0,35	0,00	0,00	0,29	100
30	Kota Pematang Siantar	43,90	46,54	4,71	0,11	4,36	0,01	0,07	0,29	100
31	Kota Sibolga	57,24	35,19	4,43	0,00	2,97	0,02	0,01	0,14	100
32	Kota Tanjung Balai	85,04	8,00	0,76	0,02	5,69	0,02	0,00	0,49	100
33	Kota Tebing Tinggi	78,03	12,87	0,91	0,15	7,10	0,05	0,00	0,88	100
Provinsi Sumatera Utara		66,09	27,03	3,97	0,11	2,34	0,01	0,04	0,40	100

Sumber : Sensus Penduduk 2010

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial,serta fokus seni budaya dan olahraga.

**2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Dan Pemerataan
Ekonomi**

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Tabel. 2.25
PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	121.418,98	125.487,51	134.915,80	146.366,37	155.071,97
2	Pertambangan dan Penggalian	6.899,06	7.662,92	8.474,41	8.870,35	9.560,43
3	Industri Pengolahan	104.239,00	115.720,02	125.513,75	138.823,78	148.462,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	642,53	639,59	668,83	788,34	840,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	501,06	572,26	654,34	766,84	754,74
6	Konstruksi	69.460,77	77.801,96	84.232,49	92.589,58	102.921,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	89.597,00	99.822,01	114.009,27	122.584,63	134.349,84
8	Transportasi dan Pergudangan	25.898,44	28.511,91	31.832,84	34.277,08	37.043,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.283,32	13.786,20	14.934,25	16.330,13	17.636,58
10	Informasi dan Komunikasi	10.287,35	11.124,25	12.194,59	13.582,77	15.154,95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.057,99	19.119,58	20.716,72	21.729,04	22.643,28
12	Real Estate	22.786,42	25.712,58	29.716,16	33.387,32	37.338,15

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku				
		2014	2015	2016	2017	2018
13	Jasa Perusahaan	4.836,42	5.452,33	6.287,02	7.089,63	7.649,068
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.832,08	21.234,54	22.949,55	24.023,93	26.707,39
15	Jasa Pendidikan	9.930,06	10.723,83	11.799,10	12.443,05	13.527,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.594,43	5.328,76	5.958,50	6.453,79	7.273,25
17	Jasa Lainnya	2.690,05	3.021,75	3.523,51	3.962,86	4.257,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		521.954,95	571.722,00	628.381,15	684.069,49	741.192,69

Berdasarkan tabel di atas, secara umum PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama periode 2014-2018 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2014, PDRB ADH Berlaku mencapai Rp. 521,95 triliun dan nilai ini terus meningkat hingga mencapai Rp. 741,19 triliun pada tahun 2018.

Tabel. 2.26
PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Konstan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	104.262,83	110.066,00	115.179,69	121.300,04	127.202,64
2	Pertambangan dan Penggalian	5.480,37	5.814,94	6.144,99	6.436,60	6.792,01
3	Industri Pengolahan	83.069,09	86.318,90	90.680,99	92.777,25	96.174,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	580,71	593,97	622,76	677,08	694,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	396,43	421,96	446,05	475,82	489,60
6	Konstruksi	51.411,36	54.289,10	57.286,44	61.175,99	64.507,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	73.812,64	76.697,03	80.702,74	85.440,69	90.652,79
8	Transportasi dan Pergudangan	19.082,06	20.165,19	21.390,03	22.961,90	24.372,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.225,42	9.866,78	10.512,20	11.282,16	12.131,73
10	Informasi dan Komunikasi	10.321,29	11.055,36	11.913,13	12.933,95	14.024,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.024,10	13.957,95	14.531,04	14.601,55	14.854,35
12	Real Estate	17.132,22	18.119,23	19.187,89	20.637,93	21.740,02
13	Jasa Perusahaan	3.624,70	3.836,94	4.065,41	4.368,69	4.678,85
14	Administrasi Pemerintahan,	13.836,00	14.642,06	15.083,58	15.463,27	16.409,75

No	Lapangan Usaha	Harga Konstan				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
15	Jasa Pendidikan	8.478,26	8.904,74	9.341,37	9.802,14	10.418,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.793,27	4.066,72	4.366,28	4.699,93	4.977,04
17	Jasa Lainnya	2.042,55	2.179,19	2.320,88	2.496,24	2.644,91
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		419.573,31	440.996,04	463.775,46	487.531,23	512.765,62

Sumber : Sumut dalam Angka (BPS) 2018

Sedangkan dilihat dari besaran nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK tahun 2010) pada tahun 2014 mencapai Rp. 419,57 triliun dan cenderung meningkat menjadi Rp. 512,76 triliun tahun 2018. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi Provinsi Sumatera Utara secara riil semakin membaik dengan perkembangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu tersebut.

Sementara itu, untuk struktur perekonomian Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB dengan rata-rata sebesar 21,82 persen pertahun selama periode 2014-2018. Berikutnya adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 20,10 persen pertahun dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,70 persen serta sektor konstruksi atau bangunan dengan perannya sekitar 13,61 persen pertahun.

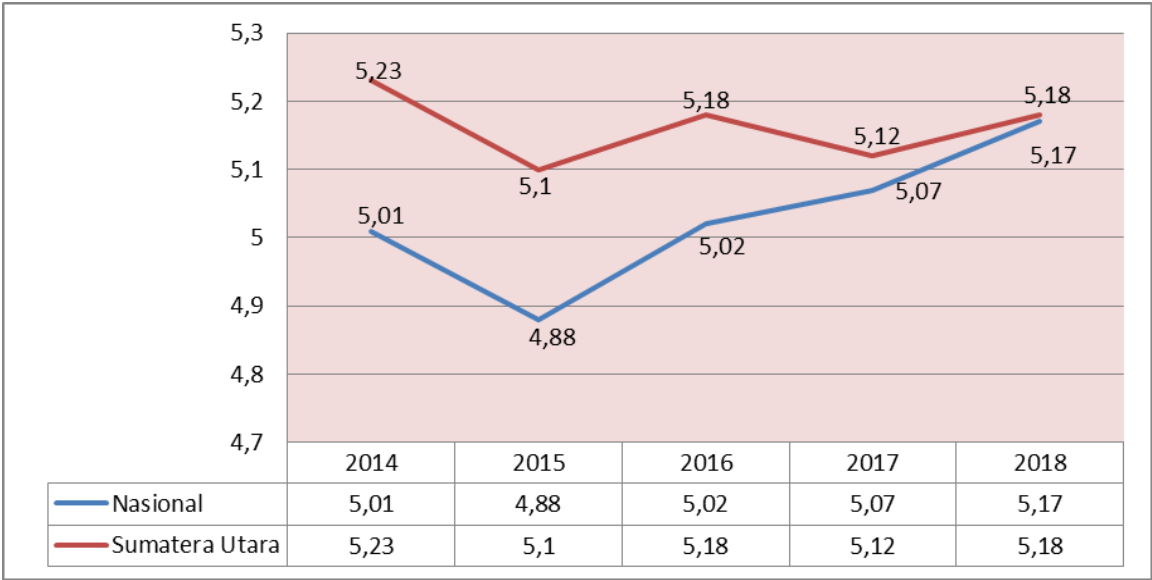
Tabel. 2.27
Struktur Perekonomian Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014-2018 (Persen)

No	Uraian	Tahun					Rata2
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,26	22,02	21,65	21,40	20,92	21,85
2	Pertambangan dan Penggalian	1,32	1,34	1,35	1,30	1,29	1,32
3	Industri Pengolahan	19,97	20,21	19,98	20,29	20,03	20,10
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,11	0,10	0,12	0,11	0,11
5	Pengadaan Air	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10
6	Konstruksi	13,60	13,61	13,40	13,54	13,89	13,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,17	17,41	17,89	17,92	18,13	17,70

No	Uraian	Tahun					Rata2
		2014	2015	2016	2017	2018	
8	Transportasi dan Pergudangan	4,96	4,99	5,07	5,01	5,00	5,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,35	2,41	2,38	2,39	2,38	2,38
10	Informasi dan Komunikasi	1,97	1,95	1,94	1,99	2,04	1,98
11	Jasa Keuangan	3,27	3,35	3,30	3,18	3,05	3,23
12	Real Estate	4,37	4,50	4,73	4,88	5,04	4,70
13	Jasa Perusahaan	0,93	0,95	1,00	1,04	1,03	0,99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,61	3,71	3,64	3,51	3,60	3,61
15	Jasa Pendidikan	1,90	1,88	1,94	1,82	1,83	1,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,93	0,95	0,94	0,98	0,94
17	Jasa lainnya	0,52	0,53	0,56	0,58	0,57	0,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sumut dalam Angka (BPS)

Sejalan dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK tahun 2010), laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama periode 2014-2018 cenderung mengalami perlambatan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara masih lebih baik selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2014 terjadi perlambatan akselerasi yaitu dari 5,23 persen menjadi 5,10 persen pada tahun 2015. Sedangkan tahun 2016, kinerja ekonomi Provinsi Sumatera Utara sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 5,18 persen. Akan tetapi pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami perlambatan menjadi 5,12 persen dan kemudian mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 5,18. Selain itu, selama periode Tahun 2014-2018, Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun juga lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada Tahun 2018, Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,17 persen, kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yaitu sebesar 5,18 pada tahun yang sama, perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dapat dilihat di pada Grafik dibawah ini :



Grafik. 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari segi sektoral, hampir semua sektor memiliki tingkat laju pertumbuhan diatas 5,18 persen atau diatas LPE Sumatera Utara secara keseluruhan. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan dibawah LPE Sumatera Utara adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 4,95 persen, Industri Pengolahan sebesar 3,59 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,22 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,88 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.28
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,37	5,47	4,74	5,31	4,87	4,95
2	Pertambangan dan Penggalian	5,16	6,10	5,68	4,75	5,46	5,43
3	Industri Pengolahan	3,00	3,63	5,34	2,31	3,66	3,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,28	2,28	4,85	8,72	2,58	5,54
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	6,04	6,44	5,71	6,67	2,90	5,55
6	Konstruksi	6,79	5,52	5,60	6,79	5,45	6,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	4,37	4,76	5,87	6,11	5,61
8	Transportasi dan Pergudangan	5,57	5,68	6,07	7,35	6,14	6,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,48	6,95	6,54	7,32	7,53	6,96
10	Informasi dan Komunikasi	7,23	7,11	7,76	8,57	8,43	7,82

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	7,17	4,11	0,49	1,73	3,22
12	Real Estate	6,59	5,76	5,90	7,56	5,34	6,23
13	Jasa Perusahaan	6,76	5,86	5,95	7,46	7,10	6,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,92	5,83	3,02	2,52	6,12	4,88
15	Jasa Pendidikan	6,37	5,03	4,90	4,93	6,29	5,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	6,72	7,21	7,37	7,64	5,90	6,97
17	Jasa Lainnya	7,04	6,69	6,50	7,56	5,96	6,75
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)		5,23	5,10	5,18	5,12	5,18	5,16

Sumber : Sumut dalam Angka (BPS)

Selanjutnya adalah sektor jasa lainnya sebesar 7,05 persen, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,02 persen, sektor real estate sebesar 6,55 persen dan sektor jasa perusahaan sebesar 6,54 persen serta sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh rata-rata sebesar 6,42 persen pertahun. Sedangkan kontribusi sektor sekunder dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sektor konstruksi yang tumbuh dengan rata-rata sekitar 6,47 persen dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang dengan rata-rata sekitar 6,11 persen pertahun.

Sementara itu, sektor ekonomi yang secara signifikan kurang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara adalah kelompok sektor primer melalui sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh melambat dengan rata-rata sebesar 4,92 persen pertahun. Perlambatan ini dikarenakan peranan subsektor kehutanan yang relatif semakin berkurang dan cenderung semakin kecil peranannya. Sedangkan melambatnya kinerja subsektor perkebunan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor komoditas utama Sumatera Utara seperti kelapa sawit, karet dan kopi.

Untuk kelompok sektor sekunder terjadi perlambatan pada sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik dan gas yang tumbuh rata-rata pertahun sebesar 3,82 persen dan 4,25 persen. Penurunan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan seiring dengan penurunan harga komoditas dan hambatan perdagangan di negara tujuan ekspor Sumatera Utara. Selain itu, masih tingginya biaya produksi industri terutama biaya energi di

Provinsi Sumatera Utara yang diperkirakan masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja industri pengolahan. Sedangkan penurunan laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas terkait dengan pasokan listrik dan gas yang ada di Sumatera Utara yang belum stabil.

1. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi subsektor Pertanian terhadap Total PDRB ADHB terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 kontribusi subsektor pertanian sebesar 2,47 persen, turun menjadi 2,37 persen pada tahun 2015 dan kembali turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,3 persen, dan pada tahun 2017 kembali turun menjadi 2,26 persen dan pada tahun 2018 kontribusi subsektor pertanian hanya sebesar 2,12 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.29
Kontribusi Subkategori Pertanian Terhadap PDRB ADHB 2014-2018

Tahun	Tanaman Hortikultura Semusim	Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	Total	Kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	Kontribusi subsektor pertanian terhadap Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
1	2	3	4=2+3	5	6
2014	950.738,02	11.953.583,47	12.904.321,49	2,47	10,63
2015	936.688,88	12.640.418,92	13.577.107,80	2,37	10,82
2016	997.863,63	13.547.270,54	14.545.134,18	2,31	10,78
2017	1.027.365,51	14.463.751,22	15.491.116,73	2,26	10,58
2018	1.102.170,00	14.624.652,00	15.726.822,00	2,12	10,14

Sumber : Sumut dalam Angka (BPS) 2018

Sejalan dengan itu, kontribusi subsektor pertanian juga turun jika dilihat dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu dari 10,63 persen pada tahun 2014 menjadi 10,14 persen pada tahun 2018.

Tabel. 2.30
Kontribusi Subsektor Pertanian
Terhadap PDRB ADHB 2014-2018

Tahun	Kontribusi subsektor pertanian terhadap kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB ADHB
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
2014	10.63	2.47
2015	10.82	2.37
2016	10.78	2.31
2017	10.58	2.26
2018	10.14	2,12

Sumber : Sumut dalam Angka (BPS) 2018

2. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB

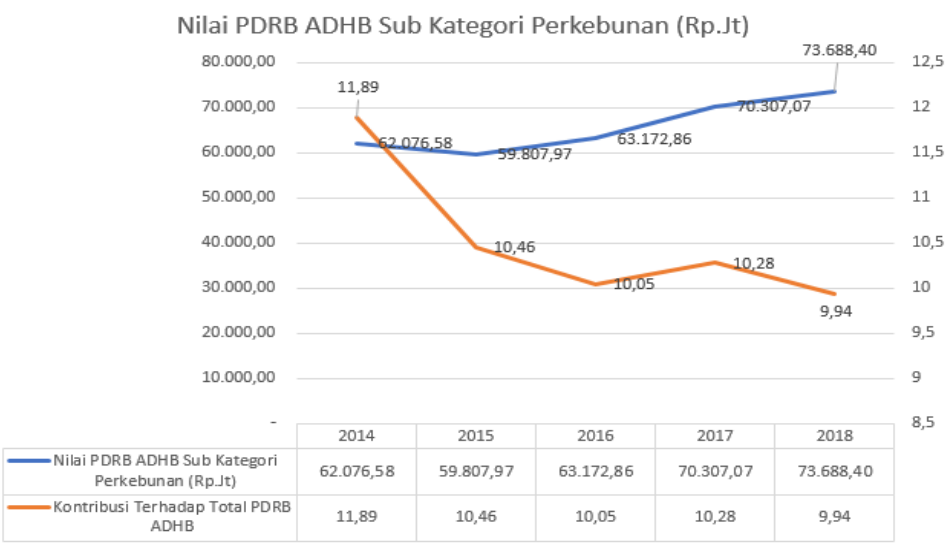
Kontribusi subsektor perkebunan (Tanaman Semusim dan Tanaman Tahunan) terhadap PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara Tahun 2015 berdasarkan ADHB sebesar Rp. 59.743.502,33 juta dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 73.688,40,- atau secara total kontribusi PDRB berdasarkan ADHB Sub sektor perkebunan sebesar 9,94 persen pada tahun 2018.

Tabel. 2.31
Kontribusi Subkategori Perkebunan terhadap PDRB ADHB
2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Perkebunan Semusim (Rp.Jt)	292,465	328,329	373,042	391,246	452,608
Perkebunan Tahunan (Rp.Jt)	61,784,118	59,479,639	62,799,820	69,915,825	73.235,79
Nilai PDRB ADHB Sub Kategori Perkebunan (Rp.Jt)	62,076,583	59,807,968	63,172,862	70,307,071	73.688,40
Kontribusi Terhadap Total PDRB ADHB	11.89	10.46	10.05	10.28	9,94

Sumber : Sumut dalam Angka (BPS) 2018

Dari tabel di atas dan grafik di bawah, dapat dilihat bahwa kontribusi Sub Kategori Perkebunan terhadap total PDRB terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan bergesernya pertumbuhan ekonomi dari bahan mentah ke bahan jadi, ditandai dengan meningkatnya nilai dan kontribusi pada kategori industri pengolahan dan jasa lainnya.



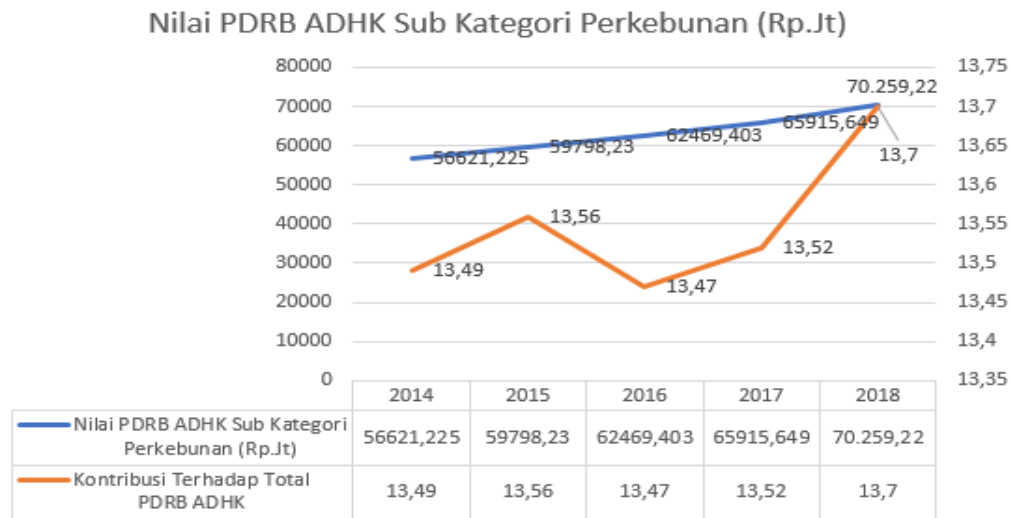
Grafik. 2.2
Nilai PDRB ADHB dan Kontribusi Sub Kategori Perkebunan Tahun 2014 – 2018

Sedangkan Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara Tahun 2014 berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 62.076,58 juta dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 73.688,40 atau secara total kontribusi PDRB berdasarkan ADHK Sub sektor perkebunan sebesar 54,34 % pada PDRB Sektor Pertanian. Meningkatnya PDRB Sub sektor Perkebunan berhubungan adanya Peningkatan produksi perkebunan yang tinggi sangat mempengaruhi PDRB Sumatera Utara baik dari perkebunan rakyat, perkebunan negara maupun swasta nasional dan asing terutama untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa.

Tabel. 2.32
Nilai PDRB ADHB (Rp.Jt) dan Kontribusi (%) Sub Kategori Perkebunan Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Perkebunan Semusim (Rp.Jt)	245,961	260,369	275,861	293,121	315,792
Perkebunan Tahunan (Rp.Jt)	56,375,265	59,537,861	62,193,541	65,622,528	69.943,427
Nilai PDRB ADHK Sub Kategori Perkebunan (Rp.Jt)	56,621,225	59,798,230	62,469,403	65,915,649	70.259,219
Kontribusi Terhadap Total PDRB ADHK	13.49	13.56	13.47	13.52	13,70

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka (BPS) 2018



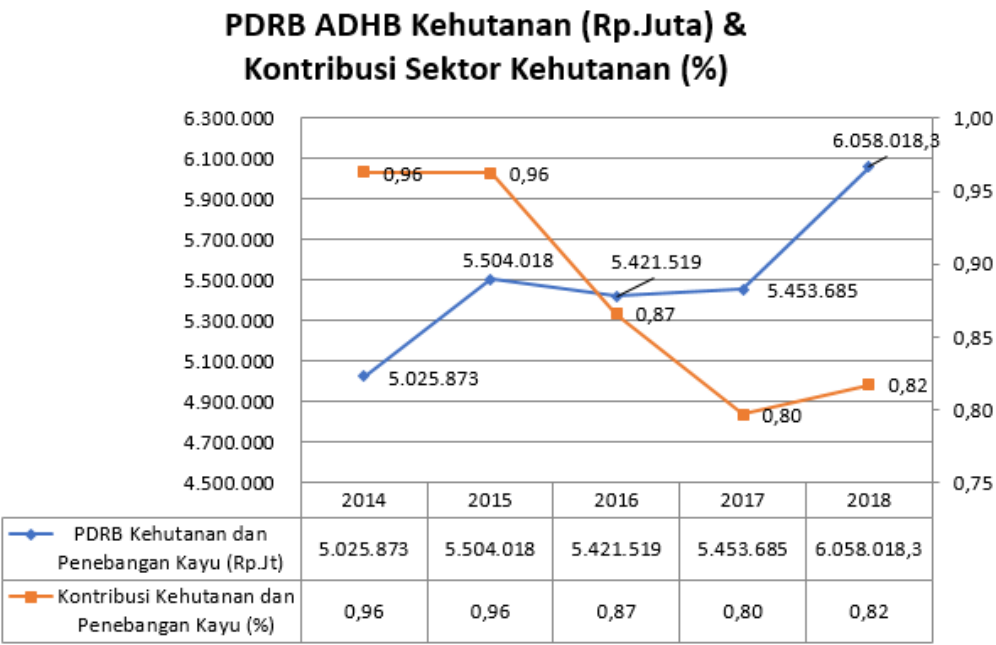
Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka (BPS) 2018

Grafik. 2.3
Nilai PDRB ADHK dan Kontribusi Sub Kategori Perkebunan Tahun 2014 – 2018

Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Sub Kategori Perkebunan terhadap total PDRB ADHK sangat berfluktuatif. Hal ini dikarenakan tidak stabilnya harga komoditi pada sektor perkebunan yang dipengaruhi oleh pasar global yang tidak stabil.

2. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Nilai PDRB ADHB di Sumatera Utara semakin membaik meski mengalami perlambatan. Salah satu sektor yang menjadi penyumbang PDRB ADHB tersebut adalah kategori pertanian, kehutanan, perikanan yaitu sebesar Rp. 121.418.979,3 Juta pada tahun 2014 dan menjadi Rp. 155.071.977,1 Juta pada tahun 2018 dimana sektor kehutanan dan penebangan kayu berkontribusi sebesar 0,96 persen pada tahun 2014 dari total Nilai PDRB ADHB dan 0,84 persen pada tahun 2018 dari total Nilai PDRB ADHB, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :



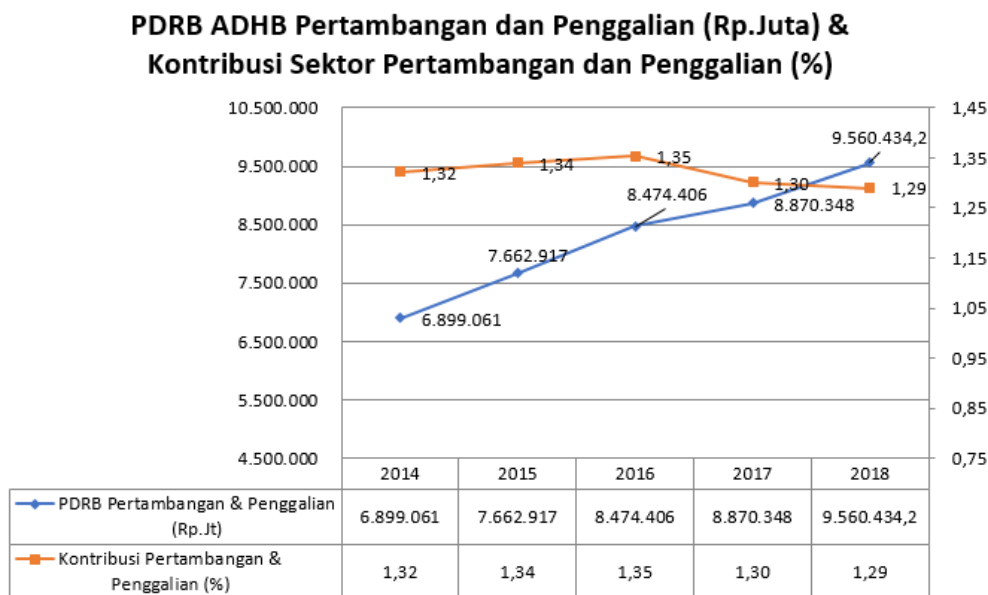
Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka (BPS) 2018

Grafik. 2.4
Nilai PDRB ADHB dan Kontribusi Kehutanan dan Penebangan Kayu Tahun 2014 – 2018

Jika dilihat pada grafik di atas kontribusi sub kategori kehutanan dan penebangan kayu dari tahun 2014 – 2018 semakin menurun hal ini sejalan dengan nilai PDRB sub kategori kehutanan dan penebangan kayu yang terus menurun. Hal ini terjadi dikarenakan semakin maraknya pembalakan liar. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang lebih intensive pada sektor ini.

3. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Komoditas pertambangan yang terdapat di wilayah Sumatera Utara adalah bahan tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang gambut, tambang radio aktif, tambang mineral, tambang batu bara dan bahan galian air tanah yang tersebar di wilayah Sumatera Utara.



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka (BPS) 2018

Grafik. 2.5
Nilai PDRB ADHB dan Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Tahun 2014 – 2018

Jika dilihat pada grafik di atas kontribusi kategori pertambangan dan penggalian dari tahun 2014 sebesar 1,32 persen sampai dengan 2018 menjadi 1,29 persen, tetapi jika dilihat dari nilai PDRB ADHB tahun 2014 sampai dengan 2018 kategori Pertambangan dan penggalian semakin meningkat.

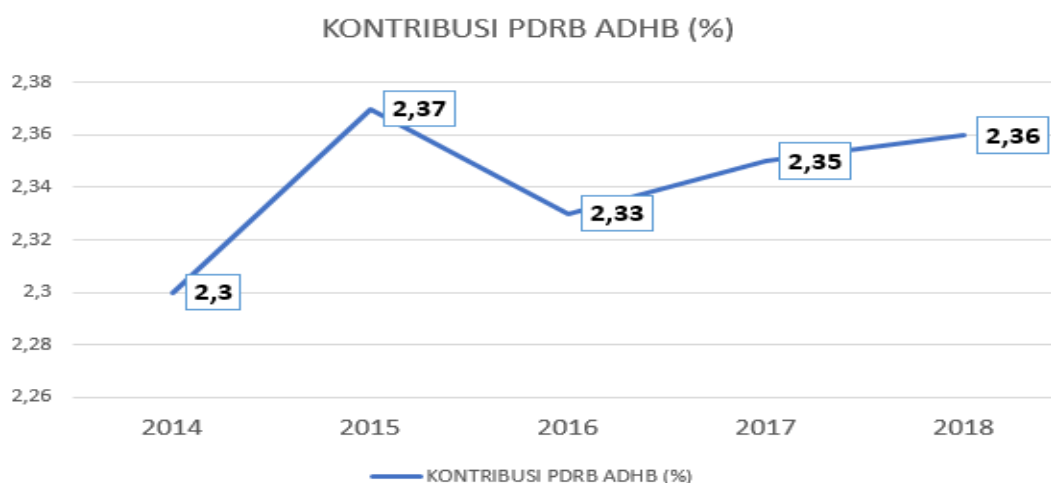
5. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Salah satu penyumbang utama PDRB adalah katagori pertanian, kehutanan, perikanan. Dimana pada katagori ini salah satu penyumbang utamanya adalah sub katagori Kelautan dan Perikanan.

Tabel. 2.33
Kontribusi Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB 2014 – 2018

TAHUN	KONTRIBUSI PDRB ADHB (%)
2014	2,30
2015	2,37
2016	2,33
2017	2,35
2018	2,36

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu Tahun 2017



Grafik. 2.6
Kontribusi Kelautan Perikanan
terhadap PDRB ADHB Tahun 2014 – 2018

Dapat dilihat kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2015 tetapi mengalami penurunan di tahun 2016 dan meningkat lagi di tahun 2017 dan 2018. Terjadi penurunan di Tahun 2016 disebabkan adanya kebijakan dari kementrian Kelautan dan Perikanan tentang perikanan tangkap. Adanya peraturan baru yang diberlakukan pada tahun tersebut. Sedangkan perikanan budidaya juga mengalami penurunan produksi di tahun 2016.

6. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Berdasarkan data Tahun 2014 sampai Tahun 2018, kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHB mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 17,20 persen pada Tahun 2014 menjadi 18,13 pada Tahun 2018. Untuk kontribusi berdasarkan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan yaitu 17,59 persen Tahun 2014 yang meningkat menjadi 17,68 pada Tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.34
Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap ADHK 2010
dan ADHB Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB (ADHK 2010)	ADHK 2010		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(JutaRp.)	%		(JutaRp.)	%
2014	419.573,31	73.817,64	17,59	521.954,96	89.597,00	17,2
2015	440.955,85	76.697,02	17,47	571.722,01	99.646,14	17,4
2016	463.775,46	80.702,74	17,54	628.394,15	114.009,61	17,8
2017	487.531,23	85.440,68	17,53	684.069,48	122.584,62	17,92
2018	512.765,62	90.652,79	17,68	741.192,69	134,349,84	18,13

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Diolah) 2018

7. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Berdasarkan PDRB ADHB, kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan yaitu dari 19,97 persen pada tahun 2014 menjadi 20,03 persen pada Tahun 2018. Untuk menggambarkan kontribusi industri pengolahan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.35
Kontribusi Industri Pengolahan
Terhadap PDRB Tahun 2014-2018

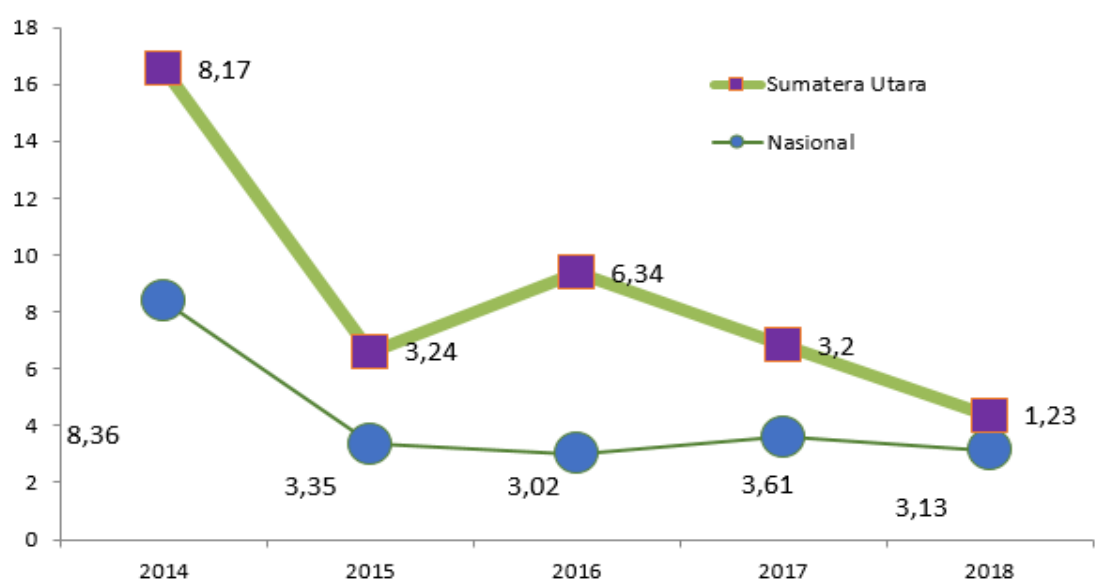
Tahun	Kontribusi		
	PDRB	Sektor Industri Pengolahan	%
2014	521.954,96	104.224,00	19,97
2015	571.722,01	115.560,02	20,24
2016	628.394,15	125.513,75	19,97
2017	684.069,48	138.823,78	20,29
2018	741.192,69	148.462,24	20,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah) 2018

2.2.1.2. Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2014-2018 dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Secara umum, laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode tersebut menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. kondisi inflasi di Provinsi Sumatera Utara cenderung menurun pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,17 persen menjadi 3,24 persen pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan

laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara menjadi 6,34 persen dan angka ini jauh lebih tinggi dari capaian inflasi nasional sebesar 3,02 persen. Faktor utama penyebab tingginya laju inflasi tahun 2016 adalah terjadinya kenaikan harga komoditas bumbu-bumbuan terutama cabai merah yang melonjak cukup tajam yang dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan pasca erupsi gunung sinabung. Selain itu, tekanan inflasi yang cukup tinggi di tahun 2016 dikarenakan adanya kebijakan kenaikan tarif beberapa komoditas seperti cukai rokok, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan fluktuasi harga BBM.



Grafik. 2.7
Perbandingan Inflasi Sumatera Utara
dengan Nasional Tahun 2014-2018

Pada tahun 2018, seiring dengan berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah, gejolak harga-harga barang dan jasa dapat diredam hingga mencapai 1,23 persen dan angka inflasi ini relatif lebih rendah dari laju inflasi nasional yang mencapai 3,13 persen. Turunnya laju inflasi pada tahun 2018 disebabkan oleh tercukupinya pasokan bahan pangan terutama bumbu-bumbuan yang relatif membaik dibandingkan tahun 2017 dan tidak adanya kebijakan penyesuaian tarif listrik serta membaiknya pasokan bahan bakar rumah tangga.

Tabel. 2.36
Laju Inflasi 4 Kota Tahun 2014-2018

No	Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sibolga	8,36	3,34	7,39	3,08	0,10
2	Pematangsiantar	7,94	3,36	4,76	3,10	0,38
3	Medan	8,24	3,32	6,60	3,18	0,12
4	Padangsidempuan	7,38	1,66	4,28	3,82	0,41
Sumatera Utara		8,17	3,24	6,34	3,20	1,23

Sumber : BPS 2019

Terkait dengan perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Utara, terdapat empat kota yang menjadi indikator indeks harga konsumen (IHK) di Sumatera Utara yaitu Sibolga, Pematangsiantar, Medan, dan Padangsidempuan. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 Kota Sibolga menjadi kota penyumbang inflasi terbesar di Sumatera Utara dengan tingkat inflasi sebesar 8.36 persen. Sedangkan Kota Padangsidempuan menjadi kota penyumbang tingkat inflasi terkecil yakni sebesar 7,38 persen. Sementara untuk tahun 2015, penyumbang inflasi terbesar di Sumatera Utara adalah Kota Pematangsiantar dengan tingkat inflasi sebesar 3,36 persen dan Kota Padangsidempuan menjadi penyumbang inflasi terkecil dengan tingkat inflasi sebesar 1,66 persen. Dengan demikian, selama kurun waktu 2014-2018 cenderung semua kota yang menjadi indikator inflasi di Sumatera Utara memberikan sumbangan inflasi setiap tahunnya baik sebagai penyumbang inflasi terbesar maupun penyumbang inflasi terkecil.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Berikut ini adalah perkembangan PDRB Perkapita Sumatera Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel. 2.37
PDRB Perkapita Sumatera Utara Tahun 2014-2018

PDRB Perkapita	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ADH Konstan	30.477.070	31.637.414	32.885.088	34.183.579	35.571.008
ADH Berlaku	37.913.900	41.019.539	44.557.704	47.963.991	51.416.759

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2018

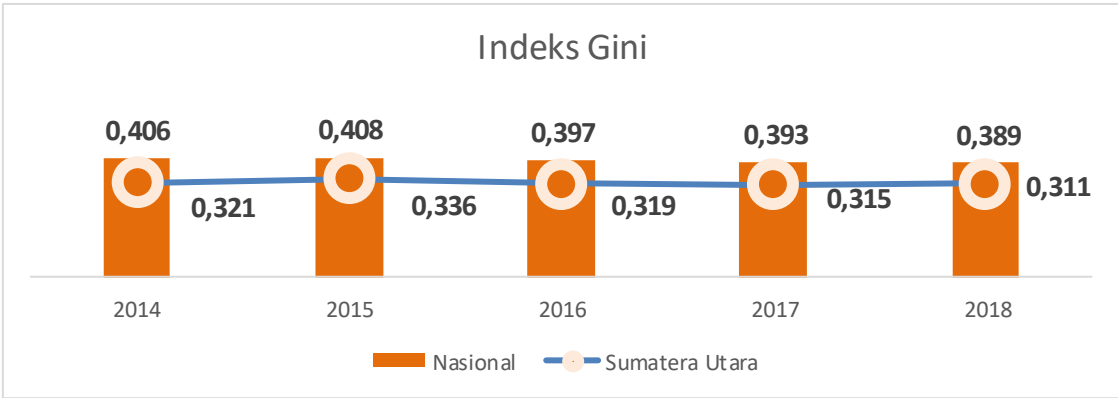
Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, PDRB Perkapita Sumatera Utara baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan harga berlaku (ADHB), PDRB Perkapita Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar Rp. 37,91 juta dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 51,41 juta pada tahun 2018.

Sedangkan dilihat dari harga konstan (ADHK), PDRB Perkapita Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar Rp. 30,47 juta dan meningkat menjadi Rp. 35,57 juta pada tahun 2018. Gambaran ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Sumatera Utara relatif cukup baik sebagai indikator ekonomi. Namun demikian, indikator PDRB Perkapita ini masih perlu untuk ditingkatkan kualitas distribusinya sehingga kesenjangan pendapatan antara penduduk yang kaya dan miskin semakin menurun.

2.2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah indeks gini (gini ratio). Nilai gini ratio berkisar antara 0 sampai 1 dimana nilai gini ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya antara 0,36–0,49 menunjukkan ketimpangan sedang, sementara apabila nilai gini ratio diantara 0,20–0,35 menunjukkan ketimpangan yang merata.

Gini ratio Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama kurun waktu 2014-2018 dan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah gini ratio nasional. Untuk tahun 2014, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,321. Akan tetapi pada tahun 2015, gini ratio Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,336 dan kondisi ini terjadi juga pada tingkat nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan maka nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dari 0,319 menjadi 0,315, dan pada tahun 2018 Indeks Gini juga menurun menjadi 0,311.



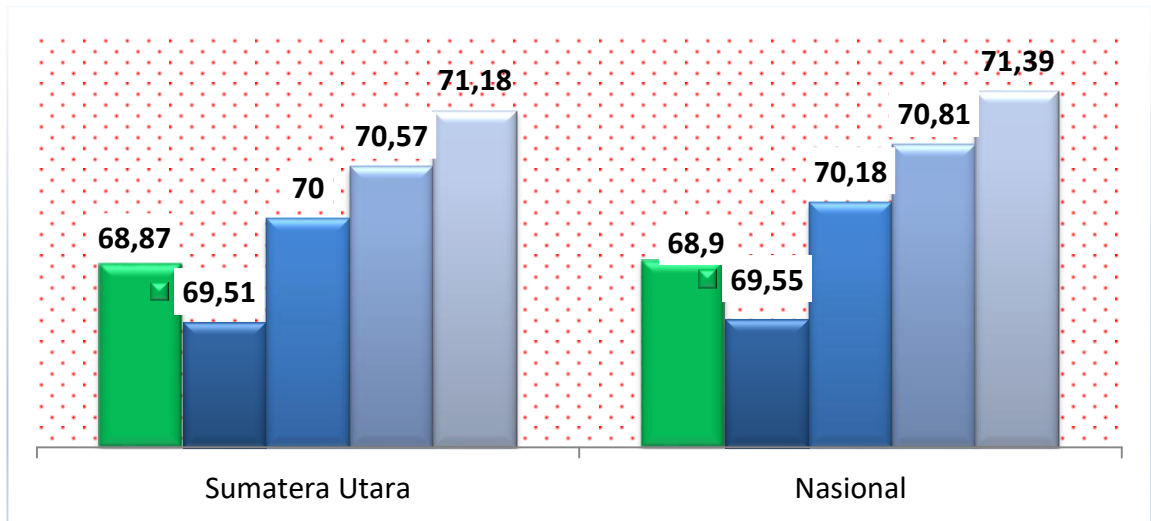
Grafik. 2.8
Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2014-2018

Dengan demikian, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sebesar 0,311 merupakan nilai gini ratio yang paling rendah selama kurun waktu 2014-2018. Begitupun bila dibandingkan dengan tingkat nasional, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dan 2018 berada jauh di bawah gini ratio nasional yang berada pada nilai 0.393 dan 0.389. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Sumatera Utara masih lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sumatera Utara terus mengalami peningkatan selama periode 2014 hingga 2018. Sama halnya dengan Nasional, walaupun terus terjadi peningkatan namun IPM Sumatera Utara masih berada bawah Nasional, pada tahun 2014 IPM Sumatera Utara sebesar 68.87 persen terus mengalami peningkatan hingga 2018 hingga mencapai 71.18.



Sumber : BPS 2019

Grafik. 2.9
IPM Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2014-2018

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,18. Angka ini meningkat sebesar 0,61 poin atau tumbuh sebesar 0,86 persen dibandingkan tahun 2017.

Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,61 tahun, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,14 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan tahun 2017. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,34 tahun, lebih lama 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,39 juta rupiah per tahun, meningkat 355 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada periode 2017-2018, IPM Sumatera Utara tumbuh 0,86 persen. Dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 0,81 persen (2016-2017), status pembangunan manusia Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pembangunan manusia Sumatera Utara telah berstatus “tinggi” mulai tahun 2016.

Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Komponen Tahun 2014-2018

Komponen	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,04	68,29	68,33	68,37	68.61
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,61	12,82	13.00	13,10	13.14
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,93	9,03	91,12	9,25	9.34
Pengeluaran Perkapita	Rp.000	9.391	9.563	9.744	10.036	10.391
IPM		68,87	69,51	70,00	70,57	71.18
Pertumbuhan IPM	%	0,72	0,93	0,70	0,81	0.86

Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2017

Pada tahun 2018, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara cukup bervariasi. IPM pada level Kabupaten/Kota berkisar antara 60,42 (Nias Barat) hingga 80,65 (Medan). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 62,24 tahun (Mandailing Natal) hingga 72,93 tahun (Pematangsiantar). Sementara itu pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,13 tahun (Nias) hingga 14,72 tahun (Medan), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 4,94 tahun (Nias) hingga 11,37 tahun (Medan). Pengeluaran per kapita di tingkat Kabupaten/Kota berkisar antara 5,82 juta rupiah per tahun (Nias Barat) hingga 14,84 juta rupiah per tahun (Medan).

Kemajuan pembangunan manusia Sumatera Utara pada tahun 2018 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota. Secara umum, ada empat Kabupaten/Kota yang naik kelas (mengalami peningkatan status pembangunan manusia). Dua kabupaten yang sebelumnya berstatus “rendah” berubah menjadi “sedang”, satu kabupaten dari status “sedang” menjadi “tinggi” dan satu kota dari status “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Sejak tahun 2018, tidak ada satupun Kabupaten/Kota di

Sumatera Utara yang status pembangunan manusianya pada level rendah.

Peningkatan IPM di tingkat Provinsi Sumatera Utara juga tercermin pada level Kabupaten/Kota. Selama periode 2017 hingga 2018, IPM di seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga Kabupaten/Kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Nias Selatan (1,50 persen), Kabupaten Nias Barat (1,44 persen) dan Kabupaten Deli Serdang (1,33 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Nias Selatan terutama didorong oleh dimensi pendidikan, di Kabupaten Nias Barat terutama didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Kabupaten Deli Serdang lebih didorong oleh perbaikan dimensi pendidikan.

Tabel. 2.39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Provinsi/Kab/ Kota	UHH (Tahun)		Harapan Lama Sekolah		Rata- Rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM		Laju Pertumbuh an IPM (%) 2017-2018
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nias	69.18	69.43	12.12	12.13	4.93	4.94	6.629	6.941	60.21	60.82	1.01
Mandailing Natal	61.97	62.24	12.99	13.15	8.00	8.11	9.385	9.653	65.13	65.83	1.07
Tapanuli Selatan	64.28	64.55	13.08	13.10	8.67	8.70	10.955	11.209	68.69	69.10	0.60
Tapanuli Tengah	66.66	66.82	12.65	12.66	8.28	8.29	9.852	10.067	67.96	68.72	0.46
Tapanuli Utara	67.86	68.11	13.65	13.66	9.46	9.65	11.407	11.607	72.38	72.91	0.73
Toba Samosir	69.36	69.59	13.25	13.26	10.10	10.34	11.846	12.095	73.87	74.48	0.83
Labuhan Batu	69.44	69.60	12.59	12.60	9.01	9.04	10.760	11.053	71.00	71.39	0.55
Asahan	67.57	67.79	12.53	12.56	8.46	8.47	10.477	10.735	69.10	69.49	0.56
Simalungun	70.53	70.75	12.71	12.75	8.95	9.18	11.055	11.311	71.83	72.49	0.92
Dairi	68.13	68.41	13.06	13.07	8.90	9.15	10.395	10.492	70.36	70.89	0.75
Karo	70.77	70.79	12.71	12.73	9.54	9.55	12.059	12.367	73.53	73.91	0.52
Deli Serdang	71.11	71.31	12.90	13.32	9.70	9.92	11.891	12.132	73.94	74.92	1.33
Langkat	67.94	68.22	12.72	12.75	8.51	8.52	10.784	11.088	69.82	70.27	0.64
Nias Selatan	68.00	68.24	11.98	12.20	4.95	5.20	6.792	6.941	59.85	60.75	1.50
Humbang Hansudutan	68.41	68.69	13.24	13.25	9.10	9.28	7.412	7.630	67.30	67.96	0.98
Pakpak Bharat	65.05	65.27	13.82	13.83	8.47	8.48	7.913	8.099	66.25	66.63	0.57
Samosir	70.68	70.87	13.43	13.44	8.95	9.14	8.163	8.348	69.43	69.99	0.81
Serdang Begadai	67.79	68.08	12.55	12.57	8.35	8.51	10.551	10.373	69.16	69.69	0.77
Batu Bara	66.10	66.38	12.49	12.52	7.83	7.84	10.084	10.385	67.20	67.67	0.70
Padang Lawas Utara	66.58	66.77	12.41	12.42	8.93	9.06	9.737	9.912	68.34	68.77	0.63
Padang Lawas	66.50	66.69	12.99	13.00	8.43	8.67	8.445	8.772	66.82	67.59	1.15
Labuhan Batu Selatan	68.14	68.39	12.95	12.97	8.70	8.71	10.892	11.280	70.48	70.98	0.71
Labuhan Batu Utara	68.91	69.09	12.79	12.80	8.34	8.35	11.510	11.730	70.79	71.08	0.41
Nias Utara	68.77	68.98	12.57	12.58	6.08	6.09	5.835	6.041	60.57	61.08	0.84
Nias Barat	68.28	68.50	12.61	12.66	5.78	6.00	5.594	5.817	59.56	60.42	1.44
Sibolga	68.05	68.36	13.12	13.13	9.87	9.91	11.212	11.405	72.28	72.65	0.51
Tanjung Balai	62.28	62.60	12.44	12.47	9.14	9.24	10.778	11.102	67.41	68.00	0.88

Provinsi/Kab/ Kota	UHH (Tahun)		Harapan Lama Sekolah		Rata- Rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM		Laju Pertumbuh an IPM (%) 2017-2018
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
Pematang Siantar	72.63	72.93	14.01	14.02	11.06	11.08	12.106	12.290	77.54	77.88	0.44
Tebing Tinggi	70.28	70.47	12.66	12.68	10.09	10.24	12.055	12.434	73.90	74.50	0.81
Medan	72.40	72.64	14.45	14.72	11.25	11.37	14.613	14.845	79.38	80.65	0.84
Binjai	71.75	71.95	13.58	13.59	10.58	10.75	10.487	10.750	74.65	75.21	0.75
Kota Padangsidempuan	68.41	68.73	14.50	14.51	10.56	10.63	10.464	10.795	73.81	74.38	0.77
Kota Gunungsitoli	70.42	70.67	13.69	13.71	8.40	8.41	7.300	7.639	67.68	68.33	0.96
Sumatera Utara	68.37	68.61	13.10	13.14	9.25	9.34	10.036	10.391	70.57	71.18	0.86

Sumber : Berita Resmi Statisti, BPS 2019

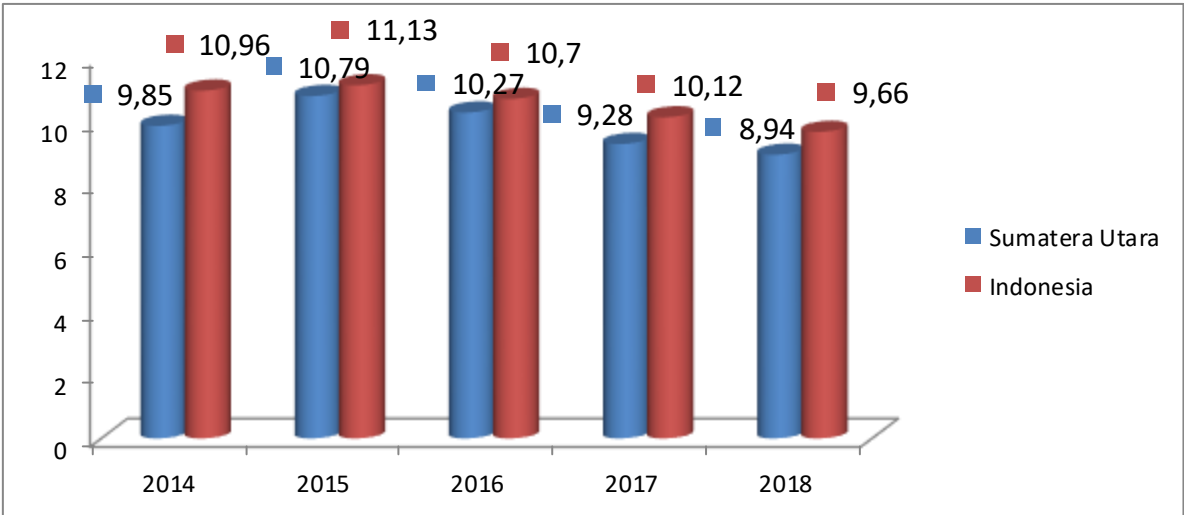
2.2.2.2. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.291.990 jiwa atau sebesar 8.94 persen terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dimana kondisi September 2018 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.291.990 jiwa atau sebesar 8.94 persen. Sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.40
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)
Sept 2014	1.360,60	9,85
Sept 2015	1.508,14	10,79
Sept 2016	1.452,55	10,27
Sept 2017	1.326,57	9,28
Sept 2018	1.291,99	8.94

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, persentase penduduk miskin Sumatera Utara lebih baik dibandingkan capaian Nasional yaitu pada tahun 2017 capaian Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara sebesar 9,28 persen sementara Nasional sebesar 10,12 persen. Demikian juga dengan kondisi 2018, capaian provinsi Sumatera Utara juga lebih bagus dari nasional dimana Provinsi Sumatera Utara sebesar 8.94 persen dan nasional sebesar 9.66, dan sama sama mengalami penurunan.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2018

Grafik. 2.10
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional
Tahun 2014 – 2018

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2017 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp.423.696,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.438.894,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.407.157,- per kapita per bulan. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, perkembangan garis kemiskinan ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel. 2.41
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kota + Desa
Sept 2014	349.372	312.493	330.663
Sept 2015	379.898	352.637	366.137
Sept 2016	413.835	388.707	401.832
Sept 2017	438.894	407.157	423.696
Sept 2018	465.790	435.492	451.673

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2017

Pada tahun 2018 Jumlah Penduduk Miskin, persentase tingkat kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.42
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Tingkat Kemiskinan, Indeks
Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Tahun 2018

No	Kab/Kota	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	Persentase Penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap /Bln)
1	Nias	22.61	16.37	2.45	0.55	353 141
2	Mandailing Natal	42.39	9.58	1.48	0.33	336 820
3	Tapanuli Selatan	25.63	9.16	1.29	0.32	343 407
4	Tapanuli Tengah	48.53	13.17	1.56	0.40	369 471
5	Tapanuli Utara	29.20	9.75	1.08	0.16	357 464
6	Toba Samosir	15.82	8.67	1.25	0.31	352 464
7	Labuhan Batu	41.70	8.61	1.01	0.20	352 860
8	Asahan	74.14	10.25	1.51	0.33	315 420
9	Simalungun	80.30	9.31	1.59	0.41	342 477
10	Dairi	23.19	8.20	1.77	0.54	325 176
11	Karo	35.36	8.67	0.95	0.22	437 702
12	Deli Serdang	88.52	4.13	0.60	0.14	381 173
13	Langkat	105.45	10.20	1.68	0.41	382 536
14	Nias Selatan	52.70	16.65	2.49	0.66	261 104
15	Humbang Hasundutan	16.93	9.00	1.00	0.22	329 189
16	Pakpak Bharat	4.66	9.74	1.54	0.42	283 258
17	Samosir	16.81	13.38	1.70	0.35	299 640
18	Serdang Bedagai	50.49	8.22	1.10	0.22	361 623
19	Batu Bara	51.78	12.58	2.22	0.57	381 651
20	Padang Lawas Utara	26.82	10.06	1.41	0.32	321 076
21	Padang Lawas	23.05	8.41	1.07	0.23	310 569
22	Labuhan Batu Selatan	33.14	10.00	1.42	0.32	355 517
23	Labuhan Batu Utara	36.45	10.12	1.73	0.40	395 696
24	Nias Utara	36.33	26.56	5.10	1.40	383 552
25	Nias Barat	23.00	26.72	4.36	0.97	386 431
26	Kota Sibolga	10.81	12.38	2.23	0.56	415 478
27	Kota Tanjung Balai	25.30	14.64	2.25	0.49	397 647
28	Kota Pematang Siantar	22.01	8.70	1.69	0.53	474 084
29	Kota Tebing Tinggi	16.64	10.27	1.91	0.51	426 469
30	Kota Medan	186.45	8.25	1.50	0.39	548 420
31	Kota Binjai	16.07	5.88	0.72	0.18	380 792
32	Kota Padangsidimpuan	16.79	7.69	1.41	0.37	363 468
33	Kota Gunungsitoli	25.91	18.44	2.40	0.50	327 303
Provinsi Sumatera Utara		1.291,99	8.94	1.56	0.41	451.673

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah perbandingan antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/ BRS 2019

Grafik. 2.11
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2014-2018

Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,93 tahun meningkat menjadi 9,34 tahun pada tahun 2018, selain itu capaian untuk Kabupaten/Kota dapat dilihat Tabel berikut ini :

Tabel. 2.43
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

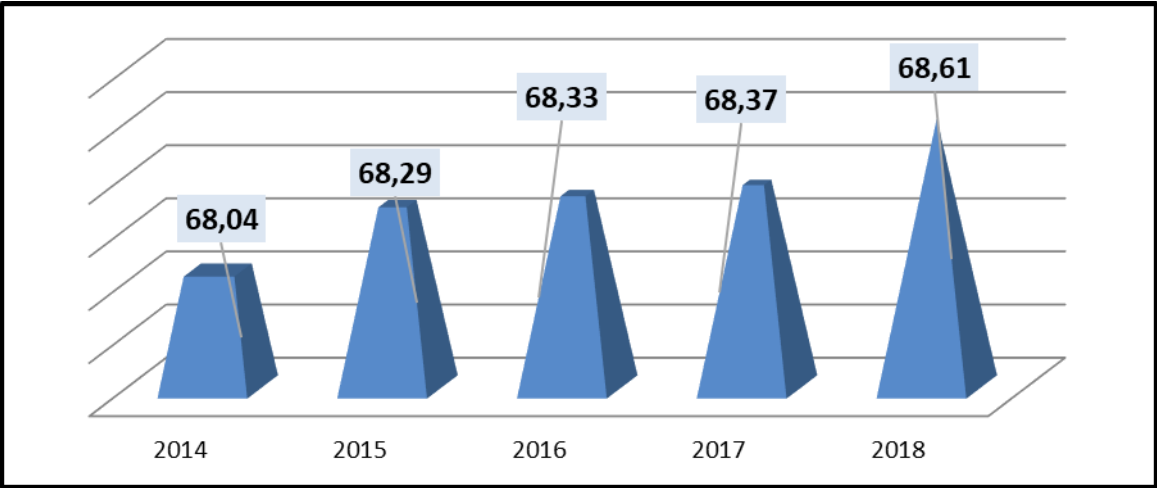
Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Asahan	7,98	8,32	8,32	4.93	4.94
Batubara	7,72	7,74	7,74	8.00	8.11
Dairi	8,59	8,69	8,69	8.67	8.70
Deli Serdang	9,46	9,48	9,48	8.28	8.29
Humbang Hasundutan	8,88	8,90	8.90	9.46	9.65
Karo	9,33	9,50	9,50	10.10	10.34
Labuhan Batu	8,68	8,75	8,75	9.01	9.04
Labuhan Batu Selatan	8,67	8,68	8,68	8.46	8.47
Labuhan Batu Utara	8,27	8,31	7,92	8.95	9.18
Langkat	7,85	7,92	7,92	8.90	9.15
Mandailing Natal	7,54	7,63	7,63	9.54	9.55
Nias	4,75	4,76	4,76	9.70	9.92
Nias Barat	5,73	5,74	5,74	8.51	8.52
Nias Selatan	4,64	4,64	4,64	4.95	5.20
Nias Utara	8,16	6,06	6,06	9.10	9.28
Padang Lawas	8,16	8,40	8,40	8.47	8.48
Padang Lawas Utara	8,44	8,91	8,91	8.95	9.14
Pakpak Bharat	8,39	8,45	8,45	8.35	8.51
Samosir	8,57	8,84	8,84	7.83	7.84
Serdang Berdagai	8,04	8,08	8,08	8.93	9.06
Simalungun	8,70	8,80	8,80	8.43	8.67
Tapanuli Selatan	8,22	8,27	8,27	8.70	8.71
Tapanuli Tengah	7,55	8,02	8,02	8.34	8.35

Tapanuli Utara	9,05	9,31	9,31	6.08	6.09
Toba Samosir	9,83	10,08	10,08	5.78	6.00
Kota Binjai	9,77	10,28	10,28	9.87	9.91
Kota Gunung Sitoli	8,17	8,18	8,18	9.14	9.24
Kota Medan	10,88	11,00	11,00	4.93	4.94
Kota Padang Sidempuan	10,13	10,47	10,47	8.00	8.11
Kota Pematang Siantar	10,70	10,73	10,73	8.67	8.70
Kota Sibolga	9,83	9,85	9,85	8.28	8.29
Kota Tanjung Balai	9,03	9,12	9,12	9.46	9.65
Kota Tebing Tinggi	10,05	10,06	10,06	10.10	10.34
Sumatera Utara	8,93	9,03	9,03	9.01	9.04

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu/ BPS Provsu

2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 terus meningkat sebagaimana terdapat pada Grafik berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu 2018, BPS 2019

Grafik. 2.12
Angka Usia Harapan Hidup
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota sebagian besar mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

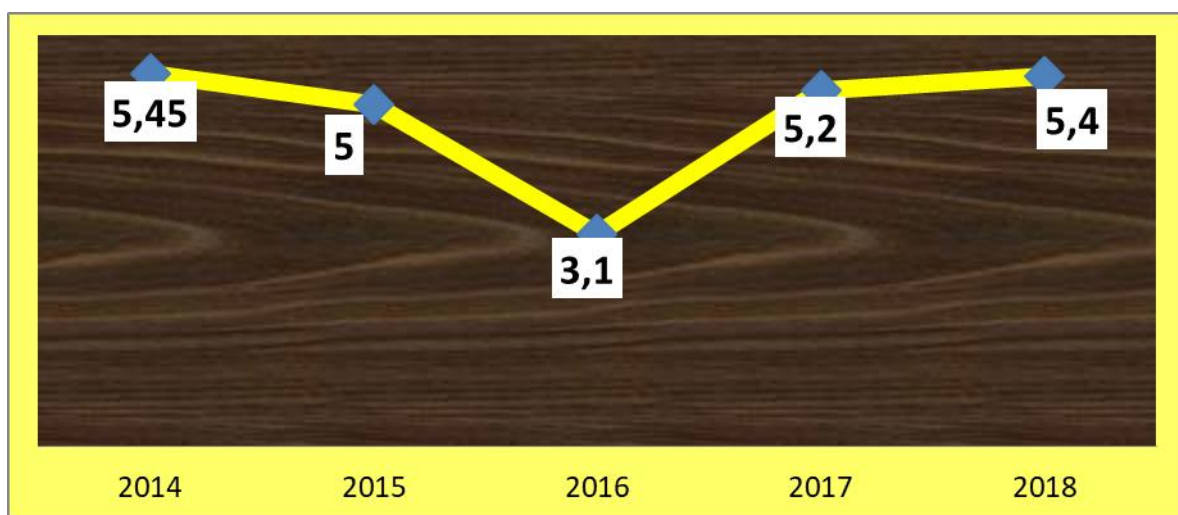
Tabel. 2.44
Usia Harapan Hidup di Kabupaten/Kota
Tahun 2014-2018

KABUPATEN/KOTA	Usia Harapan Hidup				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Deli Serdang	70.80	71.00	71,06	71,11	69.43
Kab. Langkat	67.33	67.63	67,79	67.94	62.24
Kab. Karo	70.42	70.62	70,69	70,77	64.55
Kab. Simalungun	70.24	70.34	70,43	70,53	66.82
Kab. Dairi	67.48	67.78	67,95	68,13	68.11
Kab. Asahan	67.27	67.37	67,47	67,57	69.59
Kab. Batubara	65.50	65.80	65,95	66,10	69.60
Kab. LabuhanBatu	69.26	69.36	69,40	69,44	67.79
Kab. LabuhanBatu Selatan	68.06	68.09	68,11	68,14	70.75
Kab. LabuhanBatu Utara	68.50	68.70	68,80	68,91	68.41
Kab. Tapanuli Utara	67.25	67.55	67,71	67,86	70.79
Kab. Tapanuli Tengah	66.49	66.59	66,62	66,66	71.31
Kab. Tapanuli Selatan	63.14	63.74	64,01	64,28	68.22
Kab. Padang Lawas	66.01	66.31	66,40	66,50	68.24
Kab. Padang Lawas Utara	66.40	66.50	66,54	66,58	68.69
Kab. Nias	68.87	68.97	69,07	69,18	65.27
Kab. Nias Utara	68.49	68.59	68,68	68,77	70.87
Kab. Nias Barat	67.64	67.94	68,10	68,28	68.08
Kab. Mandailing Natal	61.18	61.58	61,77	61,97	66.38
Kab. Toba Samosir	69.04	69.14	69,25	69,36	66.77
Kab. Nias Selatan	67.16	67.66	67,83	68,00	66.69
Kab. Pak pak Bharat	64.45	64.85	64,95	65,05	68.39
Kab. HumbangHasundutan	67.80	68.10	68,26	68,41	69.09
Kab. Samosir	69.66	70.26	70,47	70,68	68.98
Kab. SerdangBedagai	67.27	67.47	67,63	67,79	68.50
Kota Medan	72.18	72.28	72,34	72,40	68.36
Kota Binjai	71.39	71.59	71,67	71,75	62.60
Kota TebingTinggi	70.04	70.19	70,21	70,28	72.93
Kota PematangSiantar	71.69	72.29	72,46	72,63	70.47
Kota TanjungBalai	61.40	61.90	62,09	62,28	72.64
Kota Sibolga	67.40	67.70	67,87	68,05	71.95
Kota Padang Sidempuan	68.27	68.32	68,37	68,41	68.73
Kota GunungSitoli	70.19	70.29	70,36	70,42	70.67
Sumatera Utara	68,04	68,29	68,33	68.37	68.61

Sumber : Dinas KesehatanProvinsi Sumatera Utara Tahun 2018

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal (golden period) terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidacukupan gizi pada masa golden period tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut :



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provsu 2018

Grafik. 2.13
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2014-2018

Persentase balita gizi buruk di Provinsi Sumatera Utara cenderung menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 5.45 persen kemudian turun menjadi sebesar 5,2 persen pada tahun 2017, dan meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 5.4 persen.

Upaya peningkatan status gizi masyarakat (termasuk di dalamnya penurunan prevalensi balita pendek/stunting) menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan merupakan salah satu indikator pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Target prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun (baduta) adalah sebesar 28 persen (RPJMN, 2015-2019).

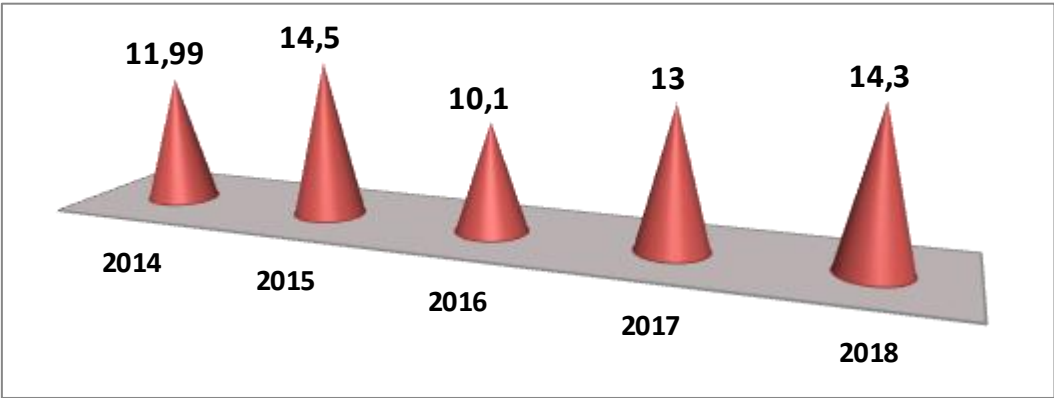
Stunting (pendek dan sangat pendek) adalah masalah kurang gizi kronik yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Seperti masalah kesehatan gizi lainnya, stunting tidak hanya terkait masalah kesehatan saja, namun juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung memengaruhi kesehatan. Terjadinya stunting dapat dipengaruhi oleh kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan balita stunting meliputi upaya intervensi gizi spesifik

(yaitu mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung) serta upaya intervensi gizi sensitif (yaitu upaya mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi sebesar 30 persen saja, sedangkan 70 persen lainnya merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang memerlukan keterlibatan berbagai sektor, seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan, social, penanggulangan kemiskinan, dan lainnya.

Persentase balita stunting Provinsi Sumatera Utara hasil Riskesdas tahun 2013 tercatat sebesar 42,5 persen, menurun menjadi 32,3 persen pada hasil Riskesdas tahun 2018. Persentase baduta pendek hasil Riskesdas tahun 2018 tercatat sebesar 18,6 persen dan baduta sangat pendek sebesar 13,6 persen. Walaupun hasil Riskesdas menunjukkan terjadinya penurunan, prevalensi stunting masih menjadi permasalahan gizi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

2.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

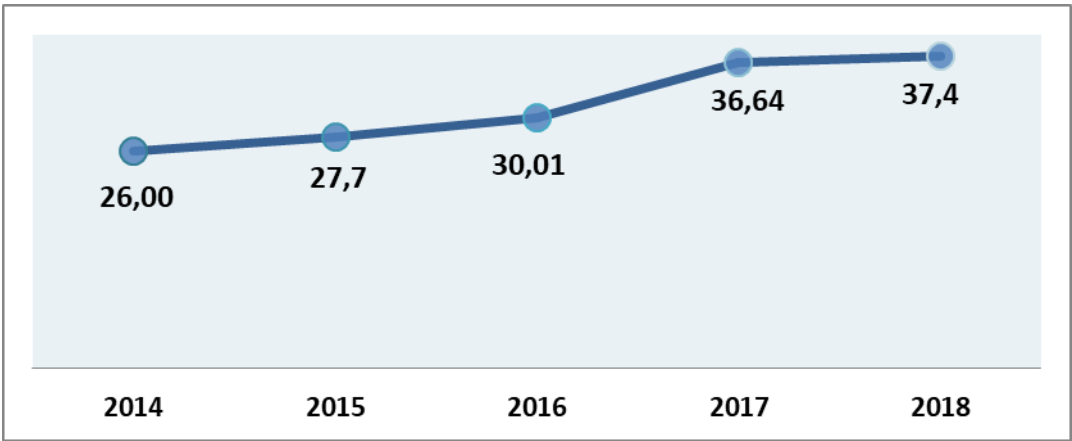
Grafik. 2.14
Prevalensi Balita Gizi Kurang
Tahun 2014-2018

Dari grafik diatas dapat terlihat perkembangan balita Gizi Kurang di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2018 dalam kondisi yang fluktuatif. Persentase balita gizi kurang menurun menjadi sebesar 10.1 persen pada tahun 2016, dari sebelumnya

sebesar 14,5 persen (2015), kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar 13 dan 14.3 persen.

2.2.2.7. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Data Perkembangan Cakupan Desa Siaga aktif dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



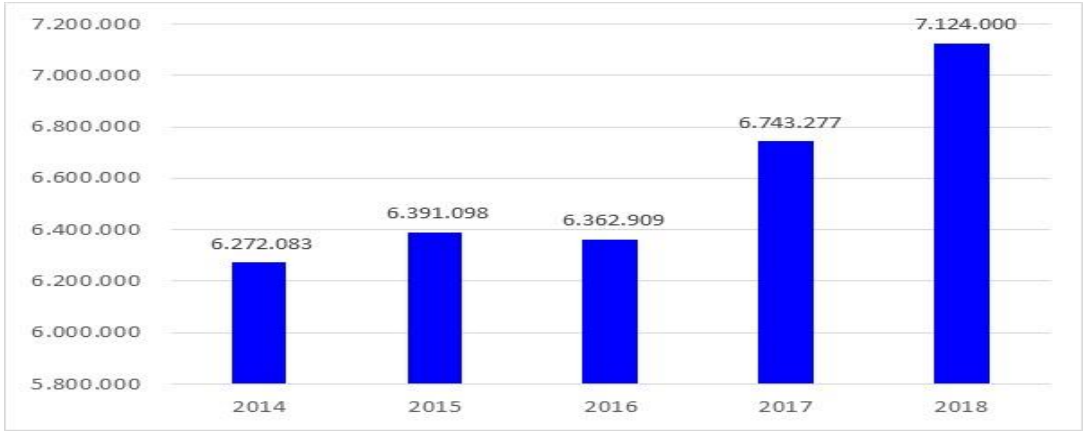
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.15
Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2014-2018

Dari grafik diatas terlihat perkembangan Cakupan Desa Siaga Aktif di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan menjadi sebesar 27.7 persen pada tahun 2015 dari sebelumnya sebesar 26 persen (2014). Cakupan Desa Siaga Aktif terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 37.4 persen.

2.2.2.8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Pada tahun 2014, angka partisipasi angkatan kerja (APAK) Provinsi Sumatera Utara sebesar 6.272.083 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 7.124.000 pada tahun 2018. Besarnya angka partisipasi angkatan kerja (APAK) di Sumatera Utara mengindikasikan banyaknya jumlah tenaga kerja yang siap untuk bekerja.

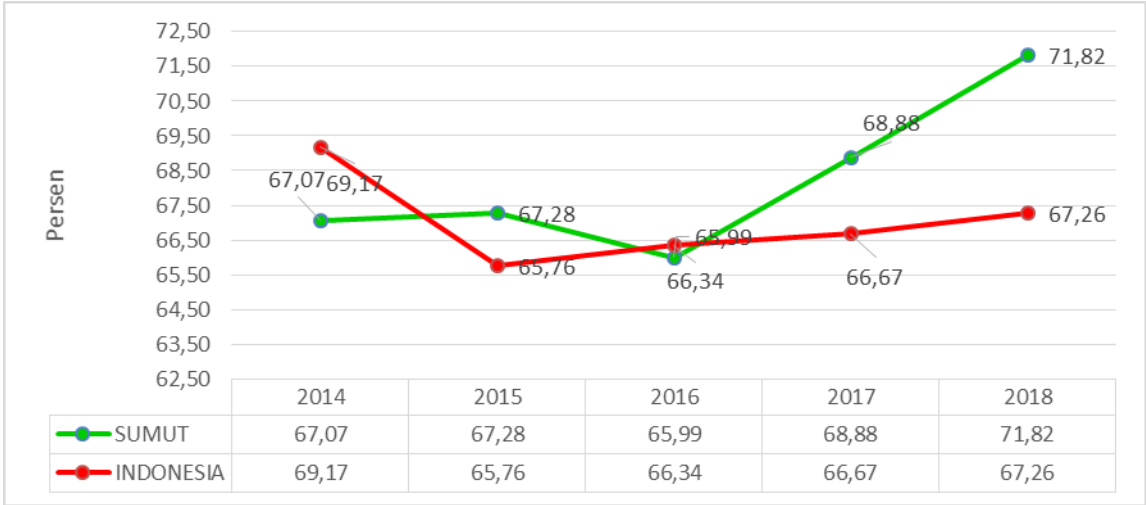


Sumber : BPS 2019

Grafik. 2.16
Angka Partispasi Angkatan Kerja (APAK)
Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018 (jiwa)

2.2.2.9. Tingkat Partispasi Angkatan Kerja

Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berikut ini adalah perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Sumatera Utara selama kurun waktu 2014-2018.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2019

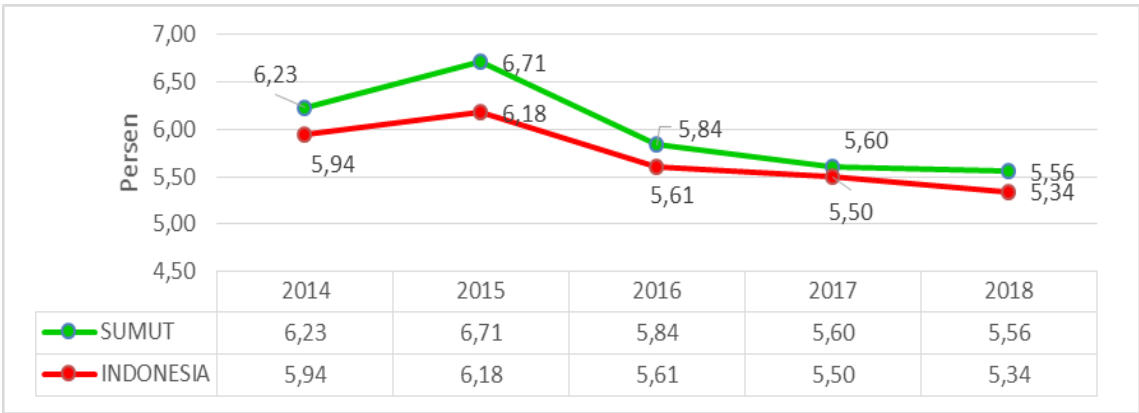
Grafik. 2.17
Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2014 – 2018

Persentase Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Utara mengalami perkembangan fluktuatif selama kurun waktu 2014-2018. Pada tahun 2014, TPAK di Sumatera Utara sebesar 67,07 persen dan mengalami kenaikan hingga tahun 2015 menjadi 67,28. Akan tetapi pada tahun 2015, persentase TPAK di Sumatera

Utara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 65,99 persen dan meningkat kembali pada tahun 2017 dan 2018. Dengan demikian, besarnya persentase TPAK Sumatera Utara selama kurun waktu 2014-2018 berada pada kisaran 67-71 persen. Hal ini mengindikasikan dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Sumatera Utara terdapat sekitar 66-67 penduduk diantaranya adalah angkatan kerja yang untuk memproduksi barang dan jasa.

2.2.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara secara umum mengalami perkembangan yang cenderung menurun selama periode 2014-2018. Untuk TPT di Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 6,23 persen dan berfluktuasi cenderung terus menurun hingga 5,56 persen pada tahun 2018. Penurunan TPT ini mengindikasikan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di Sumatera Utara sehingga angkatan kerja yang ada mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia selama periode 2014-2018. Namun jika dibandingkan dengan angka TPT nasional, angka TPT Sumatera Utara masih lebih tinggi dan kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : BPS 2018

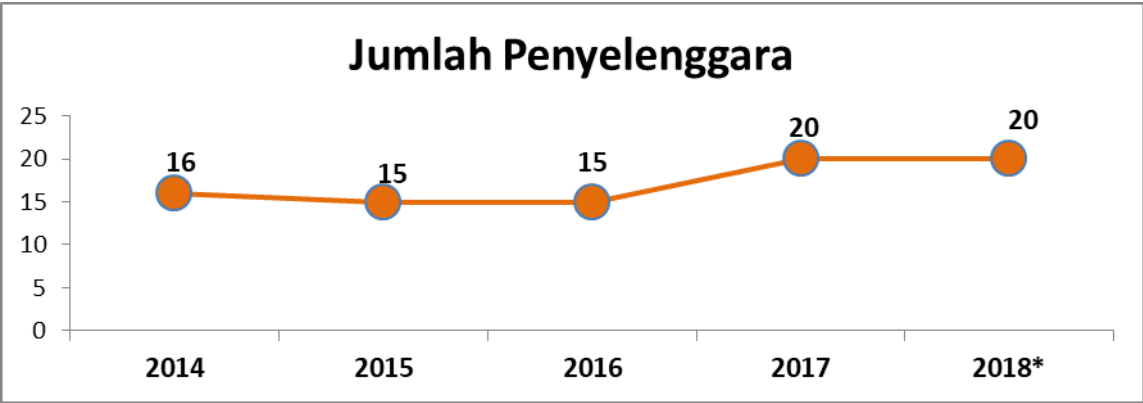
Grafik. 2.18
Perkembangan TPT Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2014-2018 (Persen)

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Perkembangan Seni dan Budaya

a. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya semakin meningkat, tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 16 kali Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 20 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

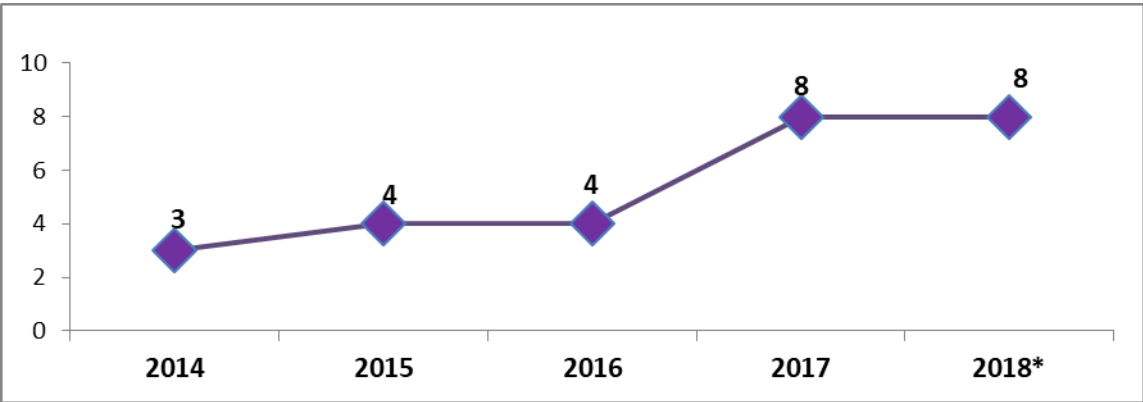


Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata *) data Sementara

Grafik. 2.19
Jumlah Penyelenggaraan Festival
Seni Budaya Tahun 2014-2018

b. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Provinsi Sumatera Utara memiliki kekayaan adat istiadat yang sangat beragam, sehingga terdapat banyak benda, situs maupun kawasan Cagar Budaya yang dimiliki. Namun tidak semua benda cagar budaya tersebut telah dilestarikan maupun tersertifikasi.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata *) data Sementara

Grafik. 2.20
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang Dilestarikan Tahun 2014 – 2018

Tabel diatas menyajikan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Utara yang dilestarikan. Tahun 2017 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan sebanyak 8 (delapan) buah. Jumlah ini naik hampir 3 (tiga) kali lipat jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya 3 (tiga) buah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan.

c. Jumlah Karya Budaya Yang Di Revitalisasi Dan Inventarisasi

Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah karya budaya yg diinventarisasi. Tahun 2014 jumlah karya budaya yang diinventarisasi berjumlah 311 buah dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 608 buah.

Tabel. 2.45
Jumlah Karya Budaya yang di Revitalisasi dan Inventarisasi Tahun 2014 – 2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018*
Jumlah Karya Budaya	311	360	550	608	608

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata *) data Sementara

2.2.3.2. Perkembangan Olahraga

a. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah atlet berprestasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 dan telah memenuhi target RPJMD Tahun 2018.

Tabel. 2.46
Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2014 – 2018

No	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah Atlet Berprestasi	127	66	164	284	284

Sumber : Dispora Provsu 2018 *) data diolah

b. Jumlah Prestasi Cabang Olahraga

Jumlah Prestasi Cabang Olahraga di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah prestasi Cabang olahraga yang ada di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 dan telah memenuhi target RPJMD Tahun 2018.

Tabel. 2.47
Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Tahun 2014 – 2018

No	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	22	15	164	284	284

Sumber : Dispora Provsu 2018
*) data diolah

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik atau maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

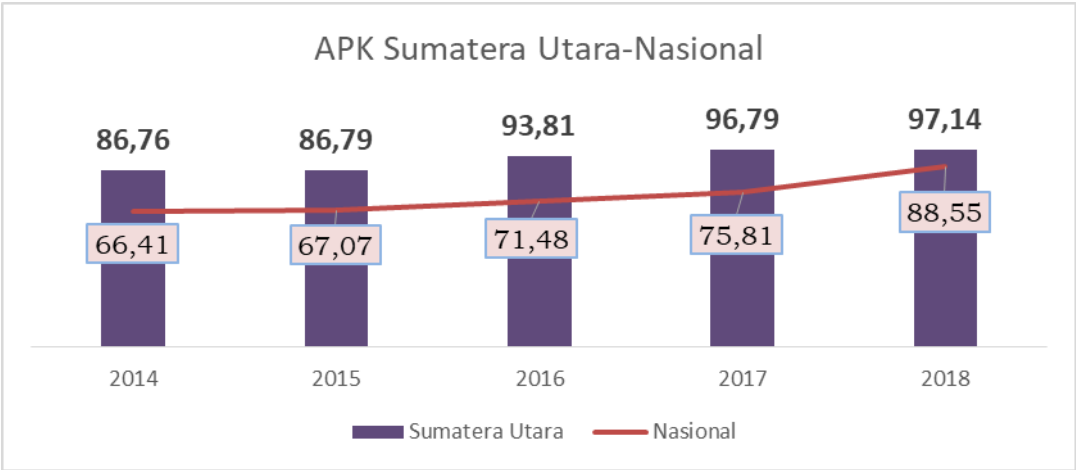
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yang terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.

2.3.1.1. PENDIDIKAN

a. Angka Partisipasi Kasar

Jika dibandingkan dengan Nasional APK SMA/MA/SMK Tahun 2014-2018 Provinsi Sumatera Utara berada diatas capaian Nasional, perkembangan APK SMA/MA/SMK Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada Grafik dibawah :



Grafik. 2.21
APK SMA/MA/SMK Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2014 – 2018

Walaupun Capaian APK SMA/MA/SMK Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 belum mencapai 100 persen, namun posisinya berada diatas capaian APK Nasional. APK Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel. 2.48
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/MA/SMK Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
	SMA/MA/SMK					
1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	687.115	689.795	747.016	772.215	777.966
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	792.010	794.800	796.300	797.800	800.900
3.	APK SMA/MA/SMK	86,76	86,79	93,81	96,79	97,14

Sumber: Disdik Provsu, Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Kemendikbud RI

Selain itu perkembangan Capaian APK Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.49
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

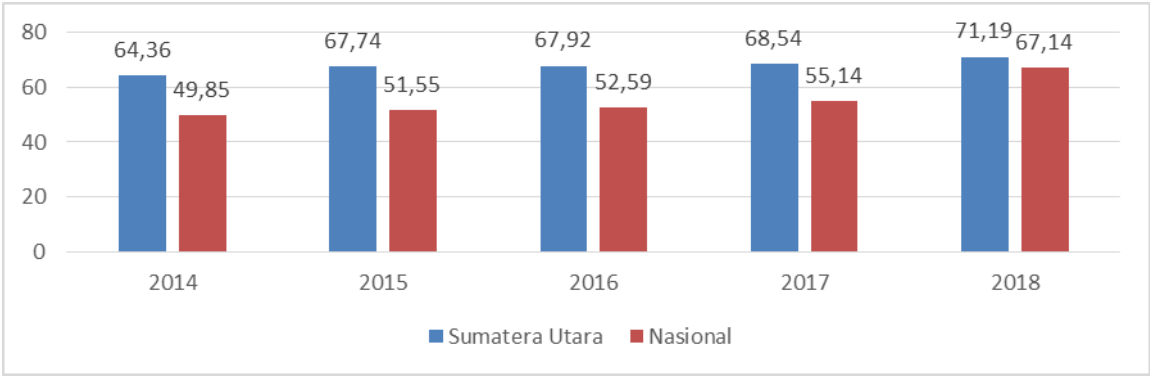
Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Deli Serdang	71,05	71,70	80,54	86,1	92,37
Kab. Langkat	77,13	77,58	85,99	88,95	93,79
Kab. Karo	96,40	96,48	102,46	104,94	106,97
Kab. Simalungun	75,69	75,93	82,22	83,64	82,23

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Dairi	103,42	103,63	108,82	109,64	110,46
Kab. Asahan	73,49	73,81	78,77	82,14	81,64
Kab. Batubara	68,51	68,62	72,94	77,2	77,14
Kab. Labuhan Batu	102,96	103,10	108,45	114,47	112,08
Kab. Labuhan Batu Selatan	59,18	59,60	65,77	68,48	69,19
Kab. Labuhan Batu Utara	66,69	66,92	72,60	79,93	81,19
Kab. Tapanuli Utara	109,83	110,01	119,26	115,66	109,49
Kab. Tapanuli Tengah	82,29	82,68	90,47	93	96,08
Kab. Tapanuli Selatan	73,86	74,00	78,31	79,43	78,66
Kab. Padang Lawas	75,32	75,44	81,63	84,96	87,88
Kab. Padang Lawas Utara	66,79	67,05	71,41	75,72	74,74
Kab. Nias	77,72	77,86	81,46	86,08	94,56
Kab. Nias Utara	61,46	61,58	67,50	70,82	74
Kab. Nias Barat	86,93	87,11	94,64	100,61	101,61
Kab. Mandailing Natal	89,43	89,56	98,57	103,8	104,65
Kab. Toba Samosir	101,29	101,63	106,34	109,68	109,84
Kab. Nias Selatan	100,25	100,36	105,98	105,69	100,55
Kab. Pak-Pak Bharat	99,63	99,87	105,40	105,32	110,11
Kab. Humbang Hasundutan	104,17	104,32	107,52	110,86	110,32
Kab. Samosir	100,12	100,54	109,34	115,52	108,79
Kab. SerdangBedagai	77,66	77,84	85,08	89,86	92,52
Kota Medan	101,13	101,31	109,72	110,64	107,23
Kota Binjai	103,05	103,18	111,93	116,85	112,45
Kota Tebing Tinggi	105,52	105,57	112,42	111,79	112,27
Kota Pematang Siantar	101,76	101,99	110,90	116,37	112,24
Kota Tanjung Balai	102,52	102,85	105,51	110,93	109,33
Kota Sibolga	104,30	104,45	112,21	1110,8	110,14
Kota Padang Sidempuan	104,94	105,30	114,10	113,72	111,29
Kota Gunung Sitoli	104,35	104,88	114,94	112,89	111,76
Sumatera Utara	86,76	86,79	93,81	96,79	97,14

Sumber: Disdik Provsu, Pusat Data Dan StatistikPendidikanKemendikbud RI

b. Angka Partisipasi Murni

APM Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, Jika dibandingkan dengan dengan Nasional, maka APM Sumatera Utara berada di atas capaian Nasional, perkembangan APM Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel di bawah :



Grafik. 2.22
APM Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014 – 2018

APM Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2018 telah mencapai target RPJMD di tahun 2018 sebesar 71,19 persen dan APM SMA/SMK/MA Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2018 selalu berada di atas APM Nasional.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

APM SMA/MA/SMK Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel. 2.50
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/MA/SMK Tahun 2014 – 2018

NO	Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	537.920	520.655	540.820	546.792	570.154
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	792.010	794.800	796.300	797.800	800.900
3.	APM SMA/MA/SMK	67,92	65,51	67,92	68,54	71.19

Sumber : Disdik Provsu, Pusat Data & Statistik Pendidikan Kemendikbud RI

Peningkatan APM SMA/MA/SMK juga terlihat dari capaian Kabupaten/Kota dari tahun 2014 – 2018, hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya, sehingga diharapkan nantinya APM SMA/MA/SMK mencapai seratus persen berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Tabel. 2.51
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Per Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Deli Serdang	56,75	54,08	57,87	60,32	66,89
Kab. Langkat	56,92	56,96	62,41	63,19	66,7
Kab. Karo	77,18	70,54	75,45	78,34	81,69
Kab. Simalungun	62,29	58,11	57,53	58,02	58,76
Kab. Dairi	75,16	77,45	81,44	81,44	87
Kab. Asahan	59,24	55,08	57,41	59,15	60,31
Kab. Batubara	56,04	55,29	52,50	54,27	56,19
Kab. LabuhanBatu	81,99	80,68	83,22	85,55	86,8
Kab. LabuhanBatu Selatan	46,83	43,82	51,32	53,44	56,59
Kab. LabuhanBatu Utara	50,05	54,27	56,69	59,99	63,19
Kab. Tapanuli Utara	79,78	87,64	85,90	82,77	81,64
Kab. Tapanuli Tengah	63,64	60,49	66,03	66,66	73,3
Kab. Tapanuli Selatan	58,23	58,12	60,40	58,75	59,4
Kab. Padang Lawas	61,94	56,09	65,03	56,09	63,76
Kab. Padang Lawas Utara	51,43	50,31	55,43	57,02	58,22
Kab. Nias	62,41	58,07	58,99	60,29	73,45
Kab. Nias Utara	47,61	45,88	49,35	52,45	58,07
Kab. Nias Barat	71,46	68,47	65,65	69,9	76,36
Kab. Mandailing Natal	71,69	65,50	75,89	75,11	78,27
Kab. Toba Samosir	72,05	73,76	75,36	77,93	83,24
Kab. Nias Selatan	77,05	73,93	75,66	71,28	79,39
Kab. Pak-Pak Bharat	74,58	81,82	80,21	80,8	82,55
Kab. Humbang Hasundutan	77,34	83,00	79,25	80,52	83,07
Kab. Samosir	75,74	75,00	77,47	81,43	78,65
Kab. Serdang Bedagai	60,60	59,99	61,44	64,64	66,19
Kota Medan	77,70	73,68	76,56	75,93	75,19
Kota Binjai	80,24	76,14	77,22	79,77	77,22
Kota Tebing Tinggi	78,40	78,58	80,43	77,99	79,26
Kota Pematang Siantar	83,39	84,21	76,53	77,86	77,55
Kota TanjungBalai	86,25	82,11	78,58	82,06	84,92
Kota Sibolga	85,83	78,44	80,82	78,11	80,07
Kota Padang Sidempuan	92,69	81,16	87,15	83,77	84,76
Kota Gunung Sitoli	80,99	83,61	82,20	79,77	82,42
Sumatera Utara	67,92	65,51	67,92	68,54	71,19

Sumber : DisdikProvsu, Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Kemendikbud RI

d. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SMA/SMK dapat dilihat pada Tabel berikut :

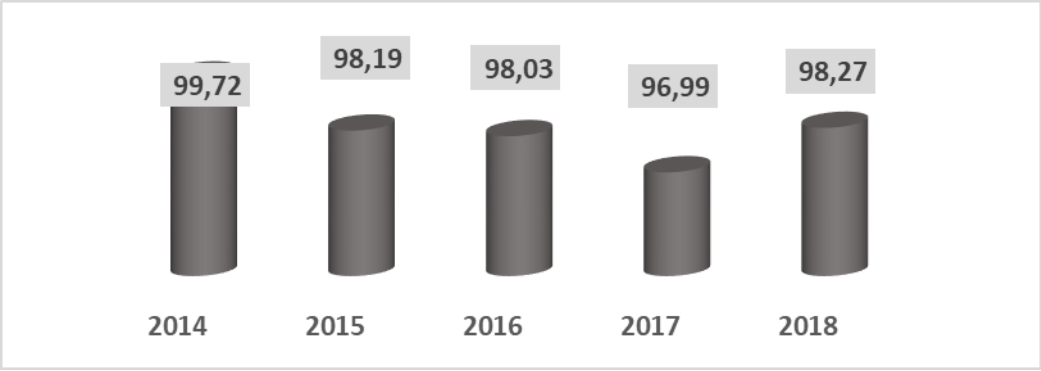
Tabel. 2.52
Jumlah Siswa Putus Sekolah Dan Angka Putus Sekolah
Per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Siswa Putus				Angka Putus Sekolah			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kab. Deli Serdang	548	427	144	628	0,27	0,56	0,44	1,50
2	Kab. Langkat	93	272	106	200	0,09	0,70	0,55	1,06
3	Kab. Karo	56	44	29	72	0,12	0,21	0,24	1,57
4	Kab. Simalungun	162	117	172	136	0,16	0,31	0,89	1,10
5	Kab. Dairi	77	53	23	78	0,18	0,26	0,24	1,16
6	Kab. Asahan	106	118	86	133	0,13	0,42	0,59	1,09
7	Kab. Labuhan Batu	142	34	49	60	0,25	0,19	0,38	0,69
8	Kab. Tapanuli Utara	46	43	39	61	0,10	0,19	0,32	0,86
9	Kab. Tapanuli Tengah	130	63	20	84	0,32	0,35	0,23	1,36
10	Kab. Tapanuli Selatan	35	22	33	30	0,09	0,19	0,71	0,74
11	Kab. Nias	108	81	7	31	0,42	0,77	0,21	0,88
12	Kab. Mandailing Natal	73	83	43	64	0,11	0,51	0,58	1,03
13	Kab. Toba Samosir	35	16	14	127	0,13	0,12	0,18	2,15
14	Kab. Nias Selatan	677	299	175	214	1,37	1,43	1,39	2,74
15	Kab. Pakpak Bharat	3	9	8	3	0,05	0,30	0,44	0,32
16	Kab. Humbang Hasudutan	18	14	13	26	0,06	0,09	0,17	0,51
17	Kab. Samosir	35	14	7	6	0,18	0,15	0,13	0,25
18	Kab. Serdang Bedagai	75	96	100	193	0,10	0,39	0,83	1,67
19	Kab. Batubara	82	94	56	105	0,16	0,58	0,78	1,39
20	Kab. Padang Lawas utara	120	23	14	15	0,31	0,37	0,34	0,96
21	Kab. Padang Lawas	42	20	20	15	0,11	0,32	0,62	0,37
22	Kab. Labuhan Batu Utara	58	47	38	138	0,12	0,36	0,51	2,18
23	Kab. Labuhan Batu Selatan	68	16	2	12	0,18	0,15	0,04	0,26
24	Kab. Nias Barat	50	30	16	13	0,35	0,45	0,45	0,59
25	Kab. Nias Utara	74	54	23	21	0,34	0,52	0,58	0,52
26	Kota Medan	286	362	224	425	0,11	0,31	0,30	0,75
27	Kota Binjai	17	21	36	110	0,05	0,14	0,35	1,19
28	Kota Tebing Tinggi	8	26	31	39	0,04	0,26	0,49	0,65
29	Kota Pematangsiantar	36	16	9	81	0,12	0,09	0,06	0,67
30	Kota Tanjung Balai	16	68	23	5	0,09	0,78	0,36	0,18
31	Kota Sibolga	27	18	6	27	0,18	0,30	0,14	0,79
32	Kota Padang Sidempuan	16	34	8	103	0,06	0,33	0,10	1,57
33	Kota Gunungsitoli	23	17	9	32	0,12	0,19	0,21	0,62
Sumatera Utara		3.342	2.651	1.583	3.287	0,19	0,40	0,43	1,10

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI

e. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dari tahun 2014-2018 telah mengalami peningkatan namun belum mencapai 100 persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



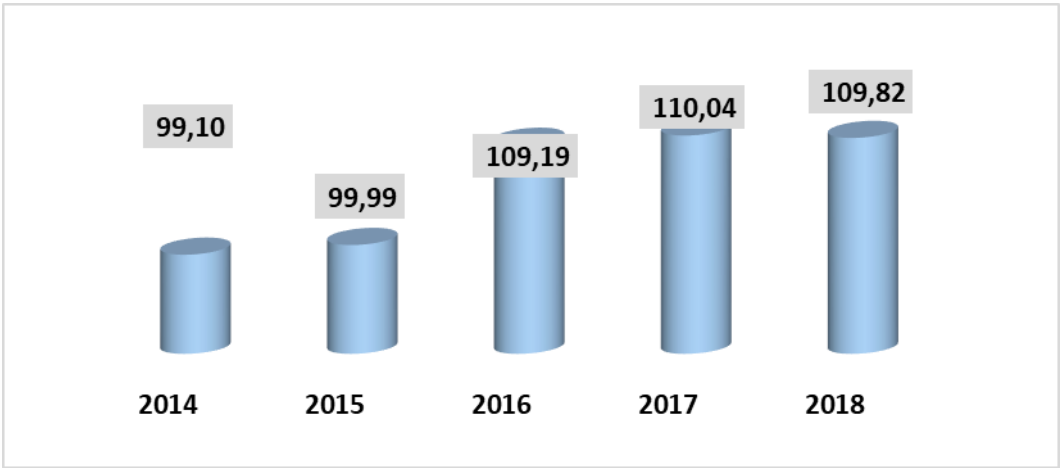
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.23
Angka Lulusan Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA
Tahun 2014 – 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sejak tahun 2014 hingga 2017 (99.72 menjadi 96.99%) namun terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar 98.27 persen.

f. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.24
Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA Tahun 2014 – 2018

g. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah, rasio jumlah guru dan

siswa jenjang pendidikan menengah Provinsi Sumatera Utara pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.53
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk
Usia Sekolah Tahun 2014 - 2018

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018*
	SMA/MA/SMK					
1.	Jumlah murid usia 16-18 tahun	684.052	687.115	689.795	747.016	747.016
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	788.600	792.010	794.800	796.300	796.300

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI
 *) angka sementara

h. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah dapat dilihat dari Rasio Jumlah Guru dan siswa jenjang pendidikan menengah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.54
Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	SMA			SMK		
		Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa
1	Kab. Asahan	794	14.814	18,66	698	12.294	17,61
2	Kab. Batubara	401	7.324	18,26	365	7.653	20,97
3	Kab. Dairi	526	9.965	18,94	399	7.133	17,88
4	Kab. Deli Serdang	1.865	32.653	17,51	2.068	42.728	20,66
5	Kab. Humbang Hasudutan	457	7.982	17,47	377	5.333	14,15
6	Kab. Karo	714	12.294	17,22	361	4.526	12,54
7	Kab. Labuhan Batu	674	12.403	18,40	513	9.165	17,87
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	336	5.472	16,29	247	4.938	19,99
9	Kab. Labuhan Batu Utara	442	7.523	17,02	384	6.595	17,17
10	Kab. Langkat	1.067	19.423	18,20	1.055	19.950	18,91
11	Kab. Mandailing Natal	661	7.174	10,85	522	6.500	12,45
12	Kab. Nias	183	3.537	19,33	256	3.620	14,14
13	Kab. Nias Barat	246	3.699	15,04	210	2.173	10,35
14	Kab. Nias Selatan	849	12.223	14,40	707	7.402	10,47
15	Kab. Nias Utara	270	4.285	15,87	372	4.204	11,30
16	Kab. Padang Lawas	268	3.336	12,45	313	4.083	13,04
17	Kab. Padang Lawas utara	273	4.145	15,18	140	1.541	11,01
18	Kab. Pakpak Bharat	124	1.920	15,48	69	852	12,35
19	Kab. Samosir	315	5.515	17,51	165	2.395	14,52
20	Kab. Serdang Bedagai	664	12.185	18,35	639	11.619	18,18
21	Kab. Simalungun	1.060	19.278	18,19	743	12.311	16,57
22	Kab. Tapanuli Selatan	305	4.518	14,81	371	4.153	11,19
23	Kab. Tapanuli Tengah	539	8.941	16,59	370	6.491	17,54
24	Kab. Tapanuli Utara	715	12.478	17,45	489	7.185	14,69

No	Kabupaten/Kota	SMA			SMK		
		Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa
25	Kab. Toba Samosir	444	7.686	17,31	426	5.828	13,68
26	Kota Binjai	714	10.024	14,04	533	9.318	17,48
27	Kota Gunungsitoli	274	4.588	16,74	371	5.189	13,99
28	Kota Medan	3.989	71.196	17,85	3.219	56.684	17,61
29	Kota Padang Sidempuan	551	7.563	13,73	490	6.420	13,10
30	Kota Pematangsiantar	874	15.489	17,72	769	12.112	15,75
31	Kota Sibolga	245	4.344	17,73	254	3.448	13,57
32	Kota Tanjung Balai	308	6.265	20,34	172	2.680	15,58
33	Kota Tebing Tinggi	364	6.356	17,46	415	6.019	14,50
	Provinsi Sumatera Utara	21.511	366.598	17,04	18.482	302.542	16,37

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

i. Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah

Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.55
**Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	SMA							SMK						
		SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
1	Kab. Asahan	12	1	1	16		685	60	19	1	2	21	1	590	29
2	Kab. Batubara	9		1	8	1	359	20	11		1	10	4	343	13
3	Kab. Dairi	11		2	12		442	14	3	3		17	1	349	7
4	Kab. Deli Serdang	26			15	1	1.560	186	34	5		43	1	1.938	107
5	Kab. Humbang Hasudutan	13		1	12		380	14	6	2	1	13		294	15
6	Kab. Karo	13		1	15		505	22	5			14	3	274	13
7	Kab. Labuhan Batu	26		2	22		583	33	16		1	25		436	22
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	4					264	15	6	1		14	1	244	6
9	Kab. Labuhan Batu Utara	10			6		352	11	31		1	20		314	4
10	Kab. Langkat	25			17		829	39	54	1		25	1	921	29
11	Kab. Mandailing Natal	3			10		510	16	11			12		431	17
12	Kab. Nias	4		2	4		154	5	5			9		227	4
13	Kab. Nias Barat	5			4		209	4	1			5		180	4
14	Kab. Nias Selatan	16		4	29		753	20	13		4	41	3	587	22
15	Kab. Nias Utara	2			3		203	11	2		3	15	1	283	7
16	Kab. Padang Lawas	2	1		2	1	195	12	11	2		7	9	254	6
17	Kab. Padang Lawas utara	4			4		219	12				2	2	121	3
18	Kab. Pakpak Bharat	1				1	107	9	1			3		57	3
19	Kab. Samosir	7	1		5		230	9	3			4		140	4
20	Kab. Serdang Bedagai	15	1		8		558	41	24	3	2	29	2	605	26
21	Kab. Simalungun	12	1	2	22		863	59	25	4		42		717	27
22	Kab. Tapanuli Selatan	1			11		216	25	5	1	1	3	3	295	17
23	Kab. Tapanuli Tengah	13			9		399	32	5		1	10		298	17
24	Kab. Tapanuli Utara	25			17		829	39	54	1		25	1	921	29

No	Kabupaten/Kota	SMA							SMK						
		SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
25	Kab. Toba Samosir	10			8		343	39	9	2		32	2	358	14
26	Kota Binjai	19			7	4	528	77	15	2		12		520	15
27	Kota Gunungsitoli	4			3		237	17	7			14		281	14
28	Kota Medan	38	6		40	2	3.105	587	33	2	2	69	4	2.838	261
29	Kota Padang Sidempuan	4		1	11		417	30	5		2	13	2	407	13
30	Kota Pematangsiantar	6			11		646	61	10	1		36	1	609	29
31	Kota Sibolga	1			4	5	155	19		1		2	2	175	8
32	Kota Tanjung Balai	6			6		247	31	1			4	1	138	6
33	Kota Tebing Tinggi	4			2		292	24	15			12	5	330	24
Grand Total		332	12	17	331	15	17.115	1.577	398	33	21	597	49	15.956	797

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

j. **Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan**

Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan jenjang pendidikan menengah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.56
Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Kondisi Baik			Jumlah Bangunan Kondisi Rusak		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kab. Asahan	255	163	418	8	1	9
2	Kab. Batubara	69	34	103	0	5	5
3	Kab. Dairi	62	22	84	35	1	36
4	Kab. Deli Serdang	323	520	843	15	55	70
5	Kab. Humbang Hasudutan	124	7	131	6	7	13
6	Kab. Karo	87	94	181	16	1	17
7	Kab. Labuhan Batu	68	76	144	3	4	7
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	82	21	103	0	4	4
9	Kab. Labuhan Batu Utara	127	30	157	3	0	3
10	Kab. Langkat	207	132	339	27	7	34
11	Kab. Mandailing Natal	154	13	167	5	0	5
12	Kab. Nias	23	0	23	10	8	18
13	Kab. Nias Barat	18	0	18	52	1	53
14	Kab. Nias Selatan	73	18	91	43	19	62
15	Kab. Nias Utara	32	5	37	29	1	30
16	Kab. Padang Lawas	66	9	75	12	0	12
17	Kab. Padang Lawas Utara	61	0	61	0	0	0
18	Kab. Pakpak Bharat	34	0	34	4	0	4
19	Kab. Samosir	40	36	76	17	0	17
20	Kab. Serdang Bedagai	180	85	265	13	6	19
21	Kab. Simalungun	200	101	301	13	3	16
22	Kab. Tapanuli Selatan	48	3	51	11	2	13
23	Kab. Tapanuli Tengah	111	24	135	43	12	55
24	Kab. Tapanuli Utara	51	3	54	65	27	92
25	Kab. Toba Samosir	60	49	109	2	0	2

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Kondisi Baik			Jumlah Bangunan Kondisi Rusak		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
26	Kota Binjai	94	88	182	24	1	25
27	Kota Gunungsitoli	75	28	103	3	0	3
28	Kota Medan	388	1716	2104	8	35	43
29	Kota Padang Sidempuan	153	15	168	8	4	12
30	Kota Pematangsiantar	75	181	256	13	1	14
31	Kota Sibolga	41	34	75	14	0	14
32	Kota Tanjung Balai	101	47	148	0	0	0
33	Kota Tebing Tinggi	62	121	183	0	1	1
Jumlah Total		3.544	3.675	7.219	502	206	708

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

k. Jumlah Siswa Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK)

Jumlah Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Pendidikan Khusus menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.57
Jumlah Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Tahun 2018*

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SISWA
1	Kab. Deli Serdang	498
2	Kab. Langkat	197
3	Kab. Karo	106
4	Kab. Simalungun	39
5	Kab. Dairi	33
6	Kab. Asahan	141
7	Kab. Labuhan Batu	71
8	Kab. Tapanuli Utara	118
9	Kab. Tapanuli Tengah	34
10	Kab. Tapanuli Selatan	82
11	Kab. Mandailing Natal	123
12	Kab. Toba Samosir	59
13	Kab. Pakpak Bharat	32
14	Kab. Humbang Hasudutan	24
15	Kab. Serdang Bedagai	107
16	Kab. Batubara	131
17	Kab. Padang Lawas Utara	43
18	Kab. Labuhan Batu Utara	48
19	Kab. Nias Barat	16
20	Kota Medan	1257
21	Kota Binjai	400
22	Kota Tebing Tinggi	417
23	Kota Pematangsiantar	151
24	Kota Tanjung Balai	96
25	Kota Sibolga	63
26	Kota Padang Sidempuan	99
27	Kota Gunungsitoli	96
	Provinsi Sumatera Utara	4.481

1. Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK)

Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Pendidikan Khusus menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.58
Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK) Tahun 2018*

NO	KAB/KOTA	JUMLAH GURU
1	Asahan	7
2	Batubara	29
3	Deli Serdang	54
4	Karo	9
5	Labura	11
6	Madina	21
7	Paluta	13
8	Pak-pak Bharat	13
9	Sergei	20
10	Tapsel	17
11	Taput	21
12	Tobasa	8
13	Binjai	51
14	Gunungsitoli	7
15	Medan	244
16	P.Sidimpuan	17
17	P.Siantar	7
18	Tebing Tinggi	37
Provinsi Sumatera Utara		586

Sumber : PDSPK Kemdikbud, 2018

*) Angka Sementara

a. Jumlah Siswa, Jumlah Putus Sekolah dan Angka Putus Sekolah

Jumlah Siswa, Jumlah Putus Sekolah dan Angka Putus Sekolah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.59
Jumlah Siswa, Jumlah Putus Sekolah dan Angka Putus Sekolah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Per Tahun 2018*

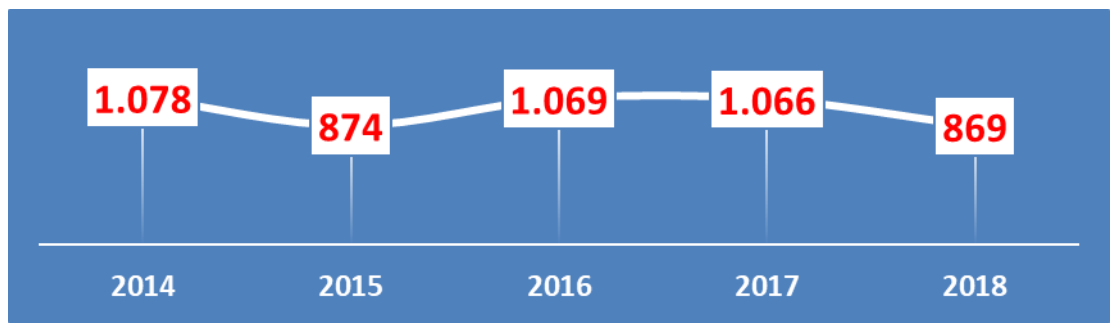
No.	Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA			SMK		
		Jumlah Siswa	Jumlah Pts. Sklh	Angka Pts. Sklh	Jumlah Siswa	Jumlah Pts. Sklh	Angka Pts. Sklh	Jumlah Siswa	Jumlah Pts. Sklh	Angka Pts. Sklh	Jumlah Siswa	Jumlah Pts. Sklh	Angka Pts. Sklh
1	Kab. Deli Serdang	205.976	559	0,27	75.693	765	1,01	32.468	384	1,18	41,838	966	2.31
2	Kab. Langkat	107.582	236	0,22	38.890	321	0,83	19.237	167	0,87	18,860	446	2.36
3	Kab. Karo	46.556	168	0,36	21.027	81	0,39	12.065	70	0,58	4,550	190	4.18
4	Kab. Simalungun	102.734	204	0,20	38.080	320	0,84	19.282	167	0,87	12,383	505	4.08
5	Kab. Dairi	43.063	140	0,33	20.240	84	0,42	9.660	73	0,76	6,721	100	1.49
6	Kab. Asahan	78.616	122	0,16	28.298	173	0,61	14.673	112	0,76	12,143	255	2.10
7	Kab. Labuhan Batu	57.958	182	0,31	17.425	130	0,75	12.763	78	0,61	8,691	103	1.19
8	Kab. Tapanuli Utara	45.003	57	0,13	22.090	63	0,29	12.324	61	0,49	7,083	90	1.27
9	Kab. Tapanuli Tengah	41.166	128	0,31	18.061	143	0,79	8.751	74	0,85	6,169	93	1.51
10	Kab. Tapanuli Selatan	41.169	211	0,51	11.487	74	0,64	4.648	38	0,82	4,017	105	2.61
11	Kab. Nias	25.467	140	0,55	10.483	97	0,93	3.291	19	0,58	3,518	61	1.73
12	Kab. Mandailing Natal	65.717	158	0,24	16.196	222	1,37	7.256	173	2,38	6,233	143	2.29
13	Kab. Toba Samosir	27.432	16	0,06	12.967	20	0,15	7.590	45	0,59	5,881	151	2.57
14	Kab. Nias Selatan	49.153	883	1,80	20.788	516	2,48	12.573	327	2,60	7,661	371	4.84
15	Kab. Pakpak Bharat	6.378	9	0,14	3.044	13	0,43	1.814	21	1,16	926	14	1.51
16	Kab. Humbang Hasudutan	29.596	21	0,07	14.882	22	0,15	7.763	33	0,43	5,084	96	1.89
17	Kab. Samosir	19.076	26	0,14	9.588	27	0,28	5.497	46	0,84	2,424	16	0.66
18	Kab. Serdang Bedagai	77.007	192	0,25	24.524	162	0,66	12.053	173	1,44	11,521	310	2.69
19	Kab. Batubara	51.530	137	0,27	16.090	326	2,03	7.205	72	1,00	7,509	218	2.90
20	Kab. Padang Lawas utara	38.653	193	0,50	6.211	43	0,69	4.068	48	1,18	1,562	44	2.82
21	Kab. Padang Lawas	37.181	99	0,27	6.125	83	1,36	3.186	97	3,04	4,077	50	1.23
22	Kab. Labuhan Batu Utara	47.130	89	0,19	12.904	54	0,42	7.388	33	0,45	6,321	189	2.99
23	Kab. Labuhan Batu Selatan	38.478	139	0,36	10.467	71	0,68	5.551	75	1,35	4,657	115	2.47
24	Kab. Nias Barat	14.382	103	0,72	6.721	12	0,18	3.512	31	0,88	2,193	11	0.50
25	Kab. Nias Utara	21.742	87	0,40	10.313	53	0,51	3.950	19	0,48	4,031	36	0.89
26	Kota Medan	255.121	618	0,24	116.811	721	0,62	75.029	689	0,92	56,749	818	1.44
27	Kota Binjai	32.658	42	0,13	14.739	81	0,55	10.289	46	0,45	9,172	149	1.62
28	Kota Tebing Tinggi	19.458	12	0,06	9.918	33	0,33	6.263	49	0,78	5,975	125	2.09
29	Kota Pematangsiantar	30.995	67	0,22	17.984	96	0,53	15.525	83	0,53	11,988	375	3.13
30	Kota Tanjung Balai	18.250	22	0,12	8.679	65	0,75	6.433	66	1,03	2,714	68	2.51
31	Kota Sibolga	15.184	30	0,20	5.989	30	0,50	4.241	28	0,66	3,430	122	3.56
32	Kota Padang Sidempuan	25.629	40	0,16	10.420	73	0,70	7.634	83	1,09	6,514	221	3.39
33	Kota Gunungsitoli	19.111	69	0,36	8.866	29	0,33	4.341	21	0,48	5,105	43	0.84
	Prov. Sumatera Utara	1.735.151	5.199	0,30	666.000	5.003	0,75	368.323	3.501	0,95	297,700	6,599	2.22

Sumber : PDSPK, Kemdikbud, 2018 *) Angka Sementara

2.3.1.2. KESEHATAN

a. Jumlah Kematian Bayi

Pada kurun waktu dari 2014 hingga 2018 Jumlah Kematian Bayi mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2014 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.078 orang terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 sebanyak 874 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 1.069 orang dan sedikit penurunan pada tahun 2017 sebanyak 1.066 orang dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 869 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Tahun 2018 (Data Diolah)

Grafik. 2.25
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2014 – 2018

Jika dilihat dari Perkembangan Kabupaten/Kota, dimana jumlah kematian bayi tertinggi pada tahun 2018 ada di Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebanyak 68 orang, jumlah kematian bayi Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.60
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten/Kota Tahun 2014 – 2018

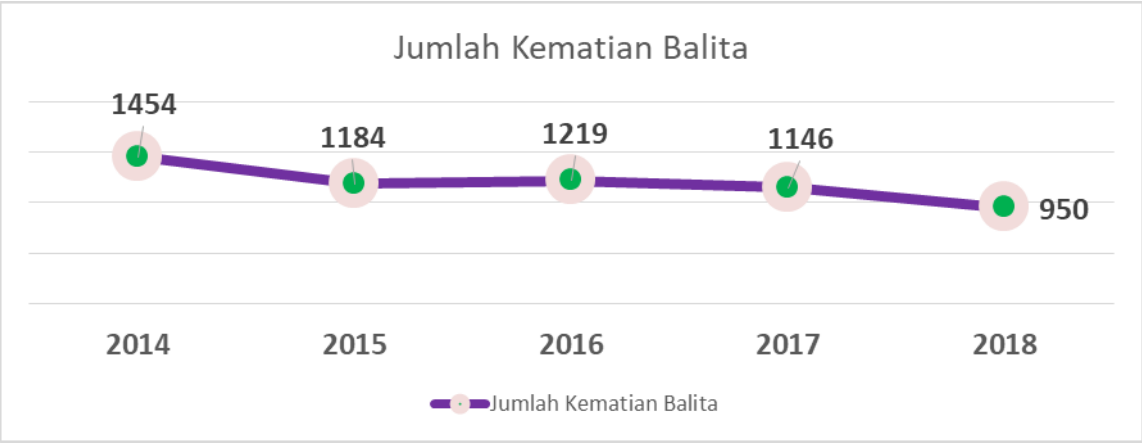
KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN BAYI				
	2014	2015	2016	2017	2018
Nias	68	58	60	18	18
Mandailing Natal	113	100	49	86	68
Tapanuli Selatan	53	34	11	33	36
Tapanuli Tengah	10	0	42	20	30
Tapanuli Utara	30	30	14	51	30
Toba Samosir	90	81	91	21	29
Labuhan Batu	87	59	34	50	65
Asahan	155	78	78	28	18
Simalungun	39	43	39	53	35
Dairi	22	9	10	68	16
Karo	28	34	34	14	20
Deli Serdang	46	70	56	80	36
Langkat	40	36	30	41	32
Nias Selatan	69	62	79	39	3
Humbang	77	3	33	40	22

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN BAYI				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hasundutan					
Pakpak Bharat	80	33	25	8	9
Samosir	11	41	19	9	28
Serdang Bedagai	16	22	4	22	60
Batubara	16	3	16	25	26
Padang Lawas	16	11	6	37	32
Padang Lawas Utara	17	0	29	14	4
Labuhan Batu Selatan	18	20	27	32	14
Labuhan Batu Utara	22	19	3	24	14
Nias Utara	10	14	9	8	9
Nias Barat	20	27	14	7	13
Sibolga	46	38	32	0	7
Tanjungbalai	8	33	61	25	35
Pematang Siantar	18	20	27	20	15
Tebing Tinggi	68	58	60	21	15
Medan	113	100	49	17	23
Binjai	53	34	11	15	7
Padangsidempuan	10	0	42	69	59
Gunung Sitoli	30	30	14	38	41
Sumatera Utara	1.078	874	1.069	1.066	869

Sumber : Dinas KesehatanProvinsi Sumatera Utara

b. Jumlah Kematian Balita

Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami penurunan, untuk Tahun 2014 dengan angka 1.454 dan di akhir Tahun 2018 sebesar 950 Hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

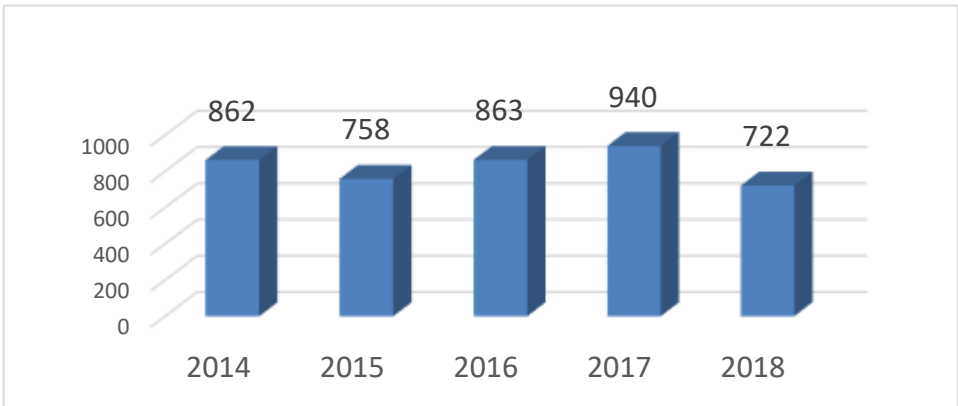


Sumber : Dinas Kesehatan Provsu 2018

Grafik. 2.26
Jumlah Kematian Balita
Tahun 2014 – 2018

c. Jumlah Kematian Neonatal

Jumlah Kematian Neonatal di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami penurunan, sebagaimana terdapat pada Grafik berikut ini :

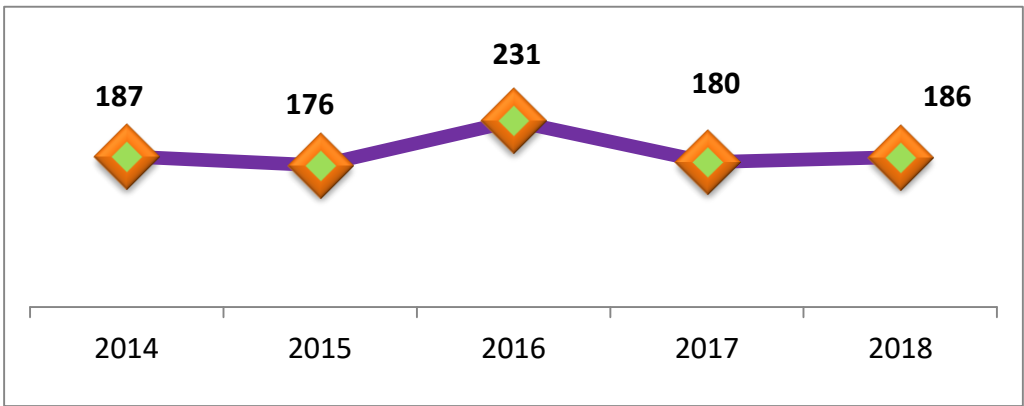


Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, Tahun 2018

Grafik. 2.27
Jumlah Kematian Neonatal Tahun 2014 – 2018

d. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 (satu) tahun. Perkembangan Jumlah Kematian Ibu dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, Tahun 2018

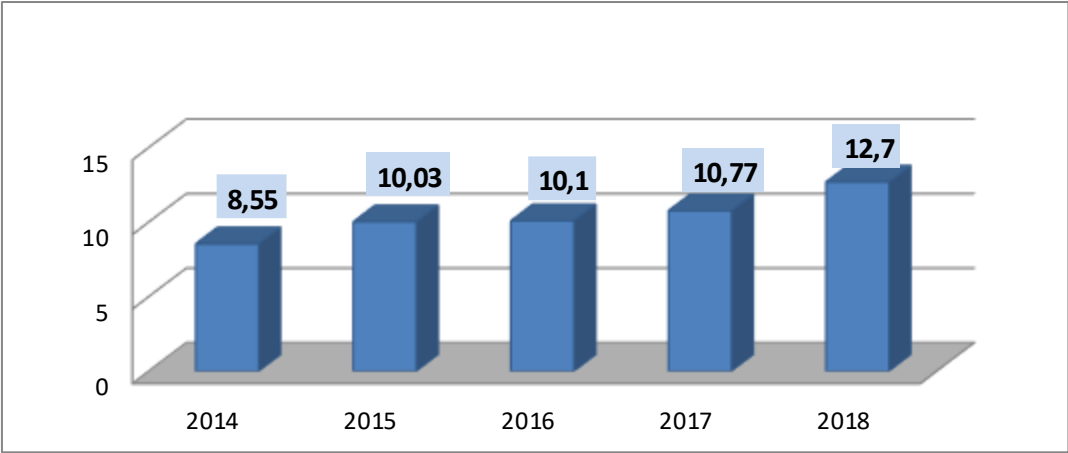
Grafik. 2.28
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2014 – 2018

Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 fluktuatif, terjadi peningkatan pada tahun 2016 sebesar 231 jiwa, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 180 jiwa dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun

2018 sebesar 186 jiwa.

e. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Perkembangan Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provinsi Sumatera dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat sebagaimana terdapat pada Grafik berikut ini :



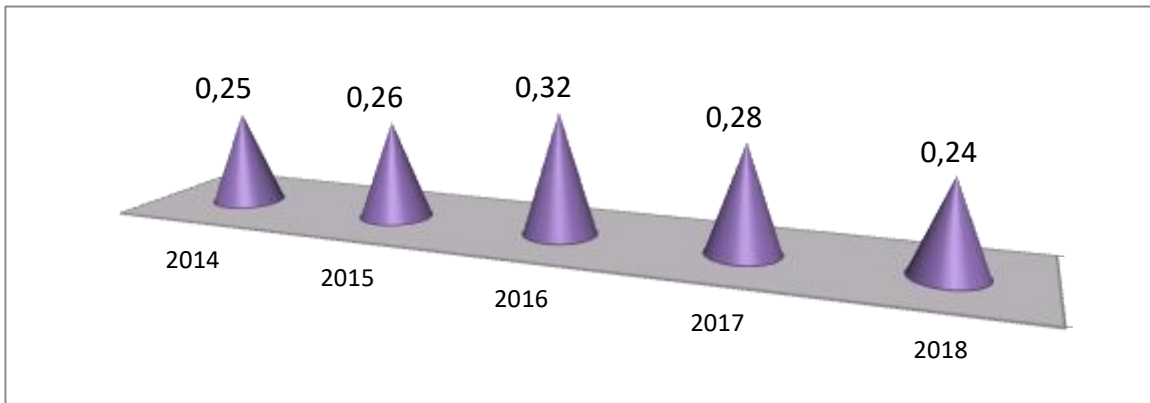
Sumber : Dinas Kesehatan Provsu , Tahun 2018

Grafik. 2.29
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2014 – 2018

Terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar 10.03 persen dari tahun 2014 (8.55%), hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan sebesar 12.7 persen.

f. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Perkembangan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per-Satuan Penduduk yang di Sumatera Utara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



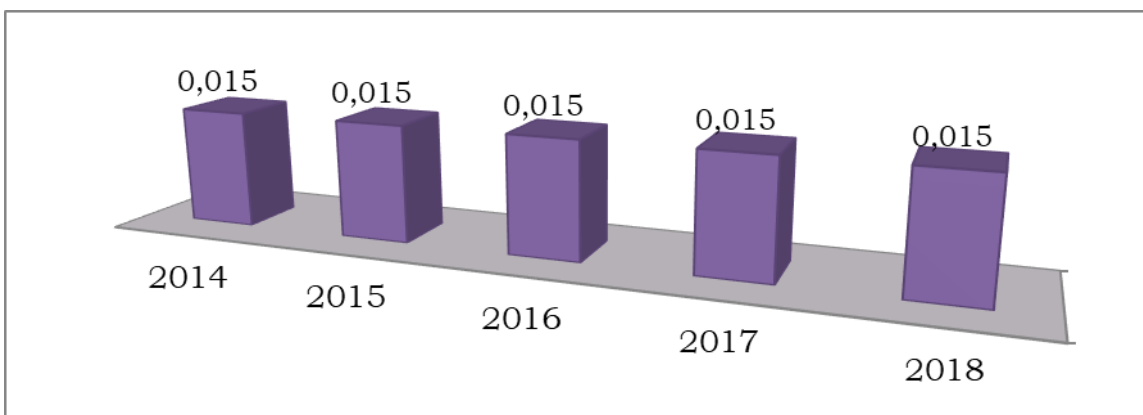
Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, Tahun 2018

Grafik. 2.30
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan
Penduduk Tahun 2014-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk mengalami fluktuatif, dimana terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar 0,26 persen dari tahun 2014 (0,25%), kemudian meningkat pada tahun 2015 dan 2016 (0,26 dan 0,32) dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,28 dan 0.24 persen.

g. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per jumlah penduduk adalah membandingkan jumlah Rumah Sakit dengan banyaknya jumlah penduduk. Di Provinsi Sumatera Utara Perkembangan Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



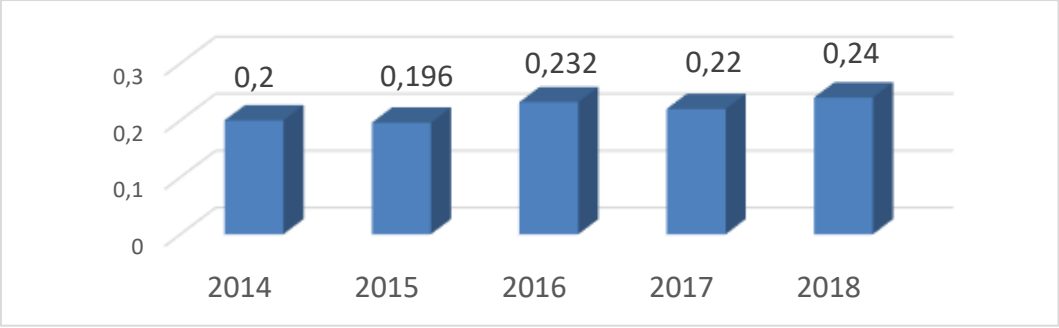
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.31
Rasio Rumah Sakit per-Satuan Penduduk
Tahun 2014-2018

Rasio Rumah Sakit per-satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 0.015. Rasio tersebut cenderung stagnan pada tahun berikutnya, yaitu sebesar 0.015 pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

h. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter persatuan penduduk adalah perbandingan antara banyaknya dokter dengan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Utara, perkembangan dari tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



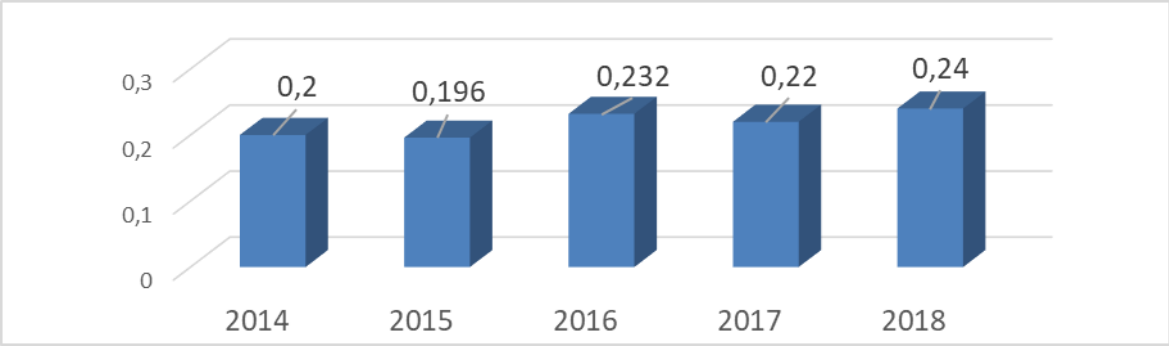
Sumber : DinasKesehatanProvinsi Sumatera Utara, Tahun 2018

Grafik. 2.32
Rasio Dokter per-Satuan Penduduk
Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari tabel diatas, maka Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami penurunan, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2016 sebesar 0.23 dan menurun kembali hingga tahun 2017 sebesar 0.22, kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 0.24 persen.

i. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Sumatera Utara dilihat dari banyaknya jumlah tenaga medis dan dibandingkan dengan jumlah penduduk, Perkembangan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Provinsi Sumatera dari 2014 hingga 2018 daat dilihat dari Grafik dibawah ini :



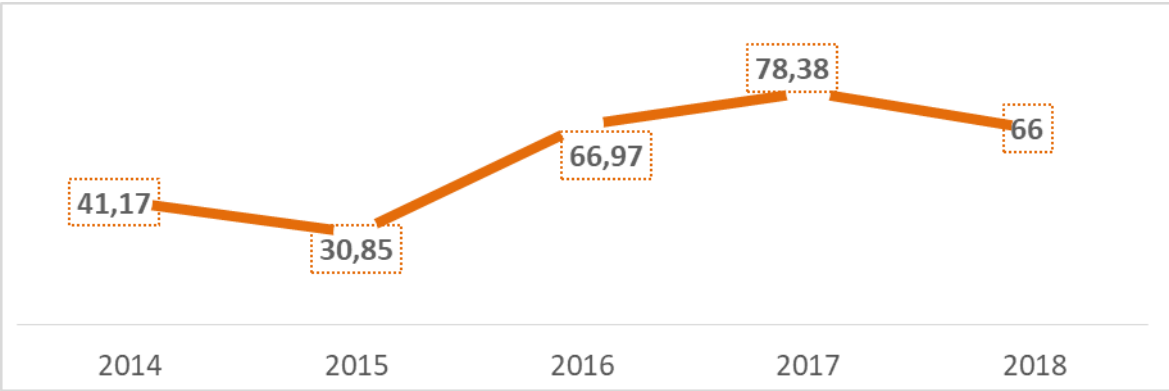
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018

Grafik. 2.33
Rasio Tenaga Medis per-Satuan Penduduk
Tahun 2014-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,196 persen dari 0,200 persen (2014), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing masing sebesar 0,23, 0,22 dan 2.24 persen.

j. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani dapat dilihat pada Grafik berikut :



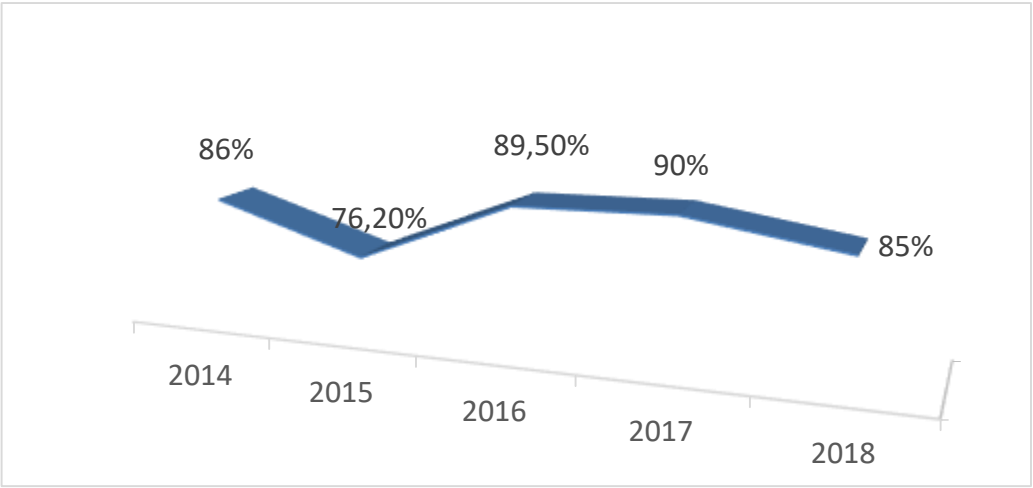
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018

Grafik. 2.34
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik diatas terjadi penurunan pada Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani pada tahun 2015 sebesar 30.85 persen, namun pada tahun 2016 hingga 2017 terjadi peningkatan masing masing sebesar 66.97 dan 78.38 persen, namun terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 66 persen.

k. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018

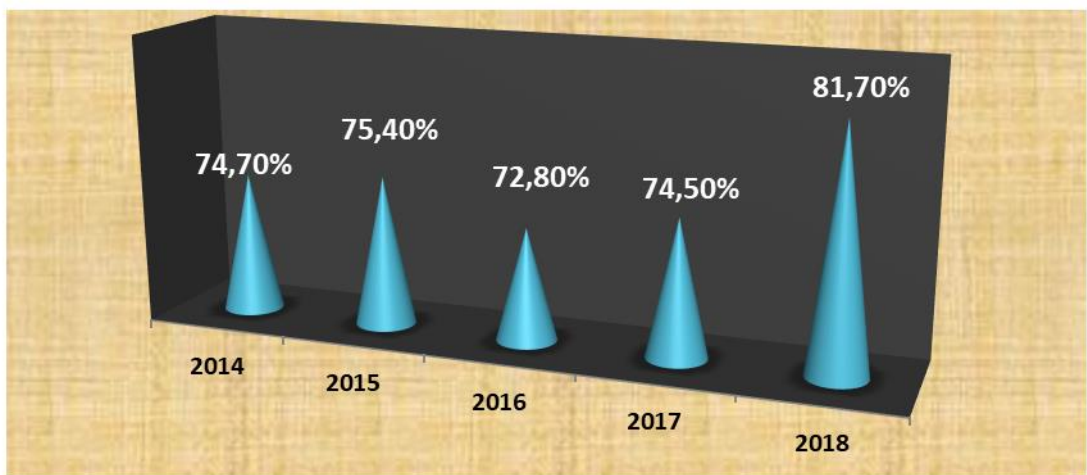
Grafik. 2.35
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik diatas terjadi peningkatan Pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2016 sebesar 89.50 persen dan pada tahun 2017 sebesar 90.30 persen, dan 2018 menurun 85 persen. angka ini sudah mencapai target RPJMD tahun 2018 sebesar 85 persen, walaupun sudah mencapai target, tenaga kesehatan yang meiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih meggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan didaerah daerah tersebut.

1. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indonesia menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjuta (TPB/SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indicator keberhasilan UCI desa/kelurahan yaitu 80 persen (target RPJMD 2018) bayi di desa/kelurahan yang telah mendapatkan imunisasi dasar

lengkap. Perkembangan dari tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Grafik dibawah :



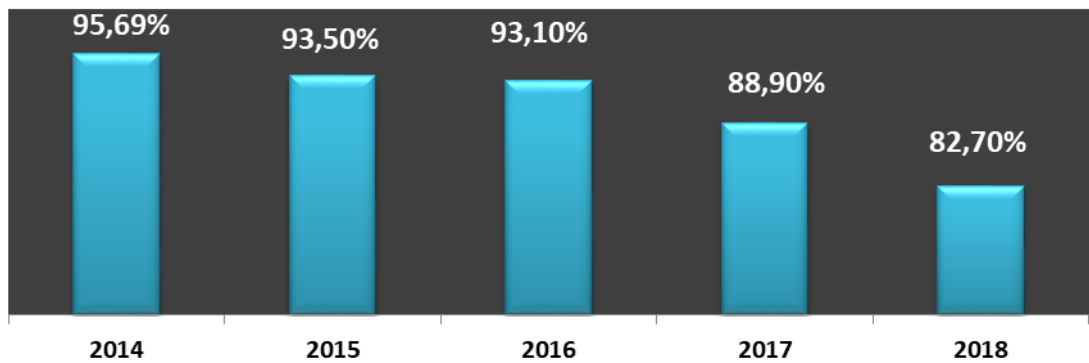
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018

Grafik. 2.36
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik diatas Cakupan Desa/Keluurahan UCI di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuattif, namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 81,7 persen persen, dan capaian ini sudah memenuhi target RPJMD tahun 2018 sebesar 80 persen.

m. Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Perkembangan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Grafik berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2018

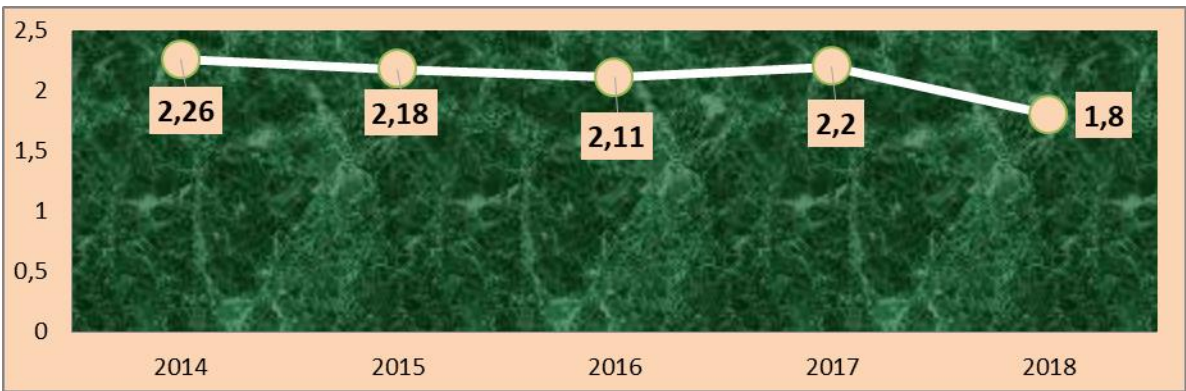
Grafik. 2.37
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik diatas Persentase Anak Usia 1 tahun yang diimunisasi campak sejak tahun 2015 terus mengalami penurunan hingga tahun 2018, namun penurunan pada tahun 2018 jauh di bawah

target RPJM 2018 yaitu sebesar 90 persen, hal ini tidak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti dan memerlukan kerja keras dalam pencapaiannya.

n. Non Polio AFF Rate Per 100.000 Penduduk

Non Folio AFF Rate per-100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Utara sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



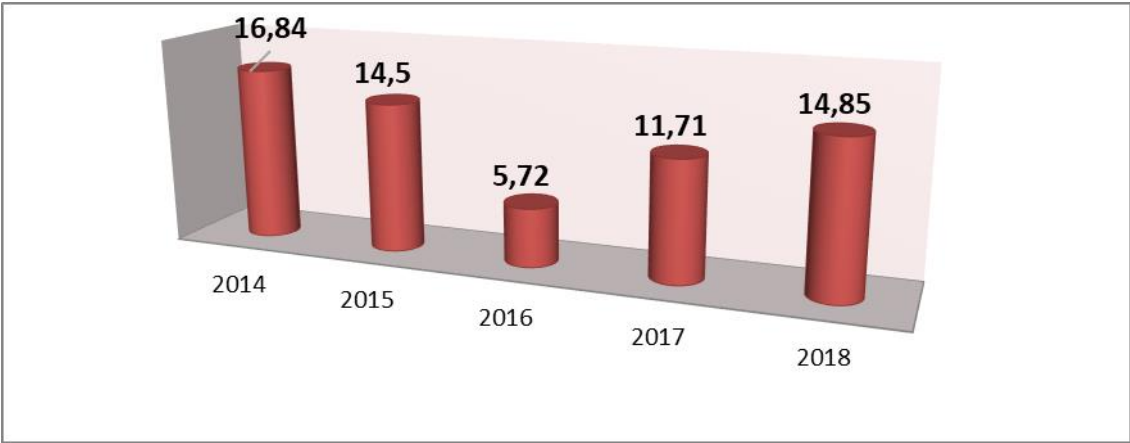
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.38
Non Folio AFF Rate per-100.000 Penduduk Tahun 2013-2018

Jika dilihat dari grafik diatas maka perkembangan Non Folio AFF Rate per-100.000 Penduduk pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan (2.18 per-100.000 Penduduk dan 2.11 per-100.000 Penduduk) kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 2.20 per-100.000 Penduduk, dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 1,8 per-100.000 Penduduk sehingg capaian Non Folio AFF Rate per-100.000 Penduduk pada target RPJMD 2018 belum terpenuhi.

o. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani adalah perbandingan Jumlah Penderita Pneumonia balita yang ditangani dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani di Provinsi Sumatera Utara sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



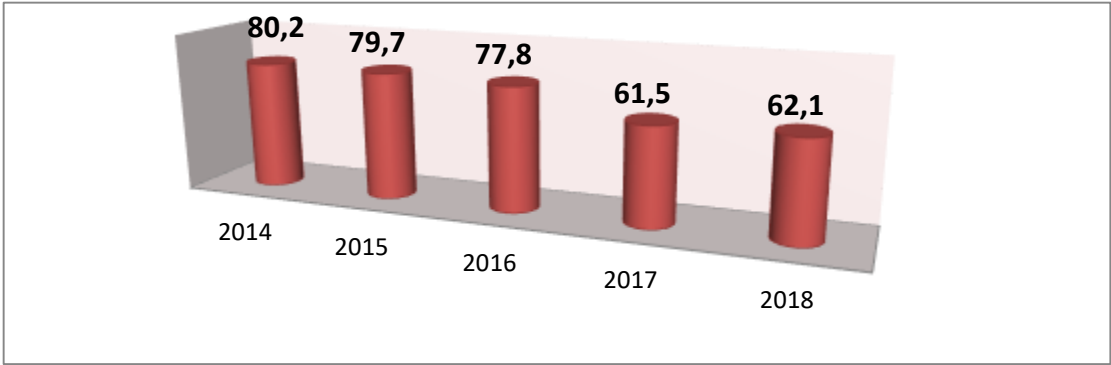
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.39
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari perkembangan grafik di atas, Perkembangan Cakupan Balita Pneumonia mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2016 yakni sebesar 5,72 persen, walaupun mengalami peningkatan kembali di tahun 2018 sebesar 14,85 persen namun masih sangat jauh dari target RPJMD 2018 sebesar 40 persen, hal ini menunjukkan bahwa perlu kerja keras dan dukukungan berbagai pihak untuk mencapai target tersebut.

p. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 masih fluktuatif, masih rendahnya cakupan karena sebagian masyarakat yang dropout dalam berobat, perkembangannya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



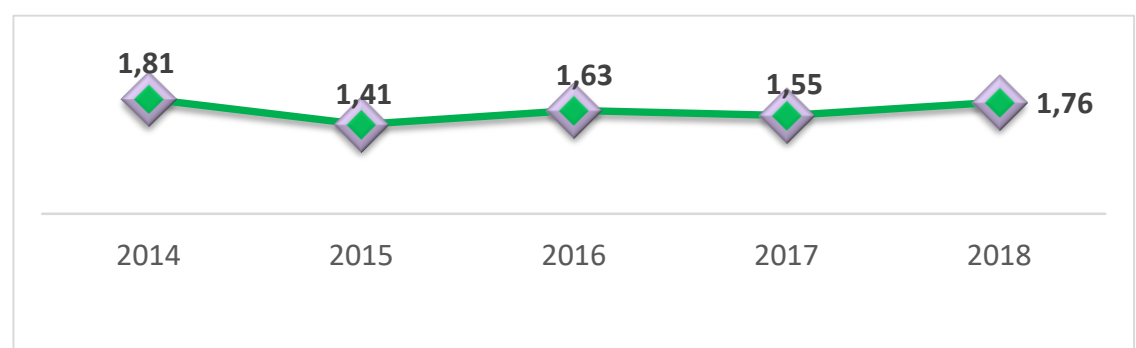
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.40
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (CDR)Tahun 2014-2018

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar 62,10 persen dari 61,50 persen (2017), namun angka ini belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, target RPJMD 2018 sebesar 87 persen sulit dicapai dan memerlukan kerja keras dalam pencapaiannya

q. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk) di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



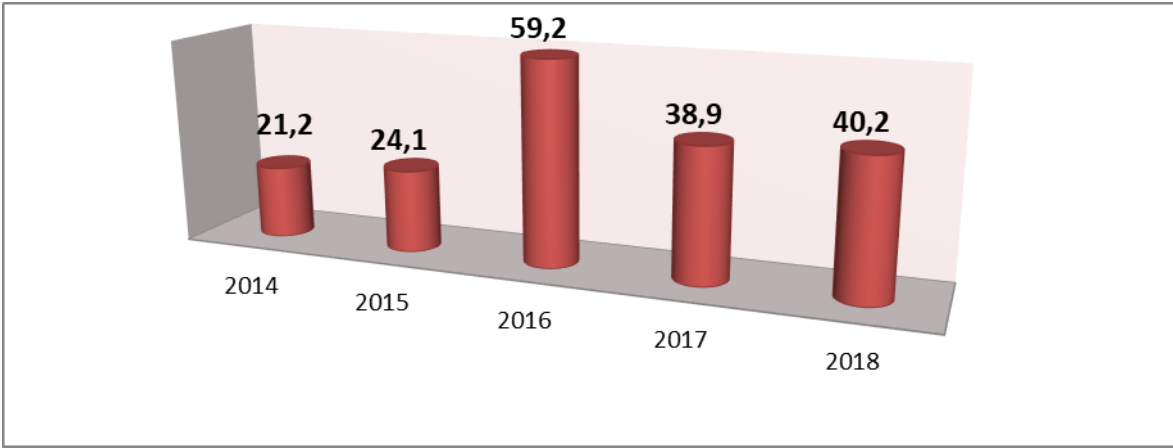
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.41
Tingkat Kematian karena Tuberkolosis
(Per 100.000 Penduduk) Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari perkembangannya Tingkat Kematian karena Tuberkulosis menunjukkan fluktuatif pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 1.55 persen namun di tahun 2018 meningkat menjadi 1,76 persen. Diharapkan angka ini terus menurun dan perlu kerja sama berbagai pihak untuk menurunkan angka kematian TB ini dengan kepatuhan minum obat jangka panjang.

r. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Provinsi Sumatera Utara sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.42
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik di atas cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD menunjukkan fluktuatif, puncak peningkatan di tahun 2016 yakni 59,2 per-100.000 penduduk, namun dapat diturunkan pada tahun 2018 menjadi 40,2 per-100.000 penduduk dan angka ini sudah memenuhi target RPJMD 2018 sebesar 45 per-100.000 penduduk.

s. Case Fatality Rate (CFR) Diare pada Saat KLB (Kejadian Luar Biasa)

Diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, hingga Kejadian Luar Biasa (KLB) masih dapat terjadi setiap tahunnya. Perkembangan CFR atau kematian akibat penyakit diare pada saat KLB setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.61
CFR Diare pada Saat KLB Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CFR Diare pada Saat KLB	1,58%	1,86%	2,73%	2,17%	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Dilihat dari tabel diatas terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2018 yaitu sebesar 2,73 persen (2015) menjadi 0 persen (2017 dan 2018) dan angka ini sudah memenuhi target RPJMD 2018 yaitu <1 persen.

t. **Angka Kejadian Malaria**

Perkembangan Angka Kejadian Malaria di Provinsi Sumatera utara kurun waktu 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

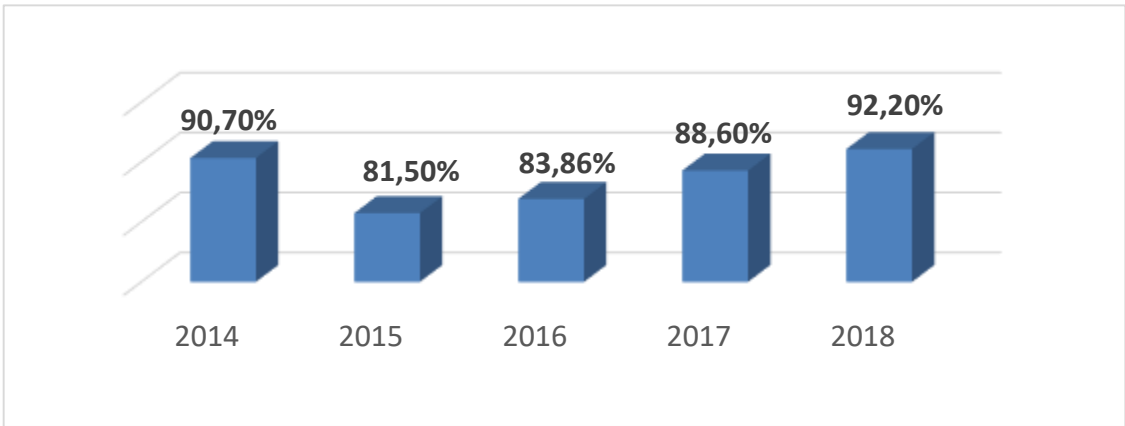
Tabel. 2.62
Angka Kejadian Malaria Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kejadian Malaria	1/1000 penduduk	0,51/1000 penduduk	0,27/1000 penduduk	0,18/1000 penduduk	0,09/1.000 penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

u. **Cakupan Kunjungan Bayi**

Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Sumatera Utara dapat di lihat pada Grafik berikut ini :



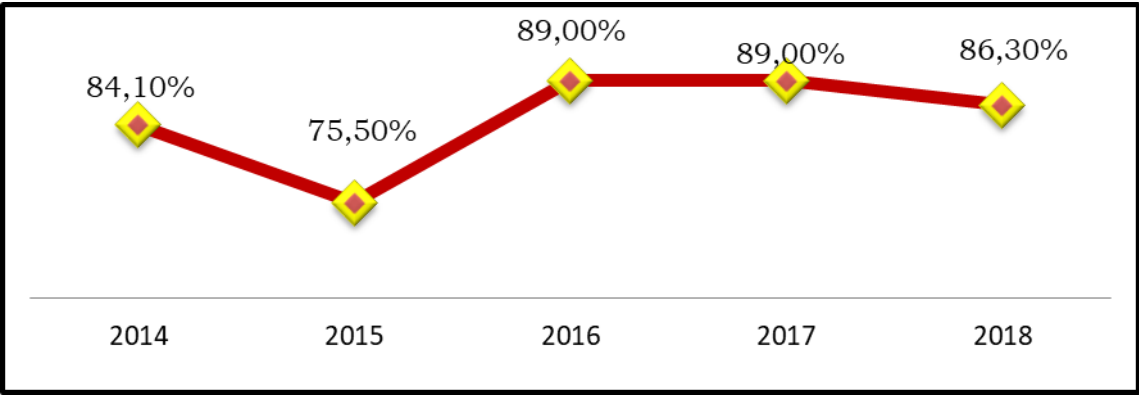
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.43
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik diatas Cakupan Kunjungan Bayi mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 81.50 persen dari 90.70 persen (2014) namun pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan hingga 92,20 persen, angka ini sudah mencapai target RPJMD 2018 sebesar 80 persen.

v. **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Provinsi Sumatera Utara sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



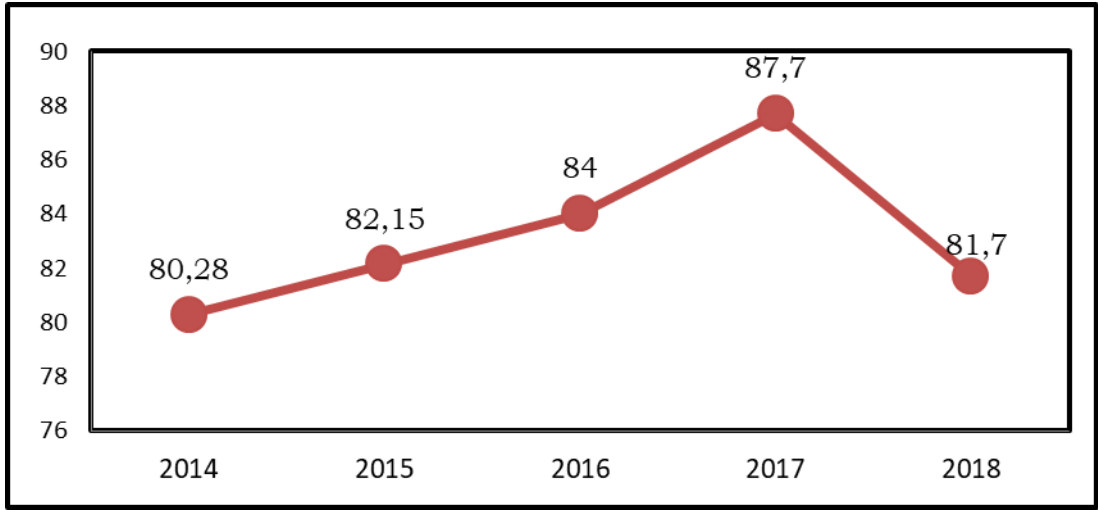
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.44
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik diatas cakupan kunjungan Ibu hamil K4 sangat menggembirakan, hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian dari tahun 2015 (75.50%) menjadi 89.00 persen (2016 dan 2017) namun menurun pada tahun 2018 menjadi 86,3 persen, meskipun terjadi penurunan tetapi angka ini juga sudah mencapai target RPJMD 2018 yaitu sebesar 86 persen.

w. Cakupan Pelayanan Nifas

Perkembangan Cakupan Pelayanan Nifas di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

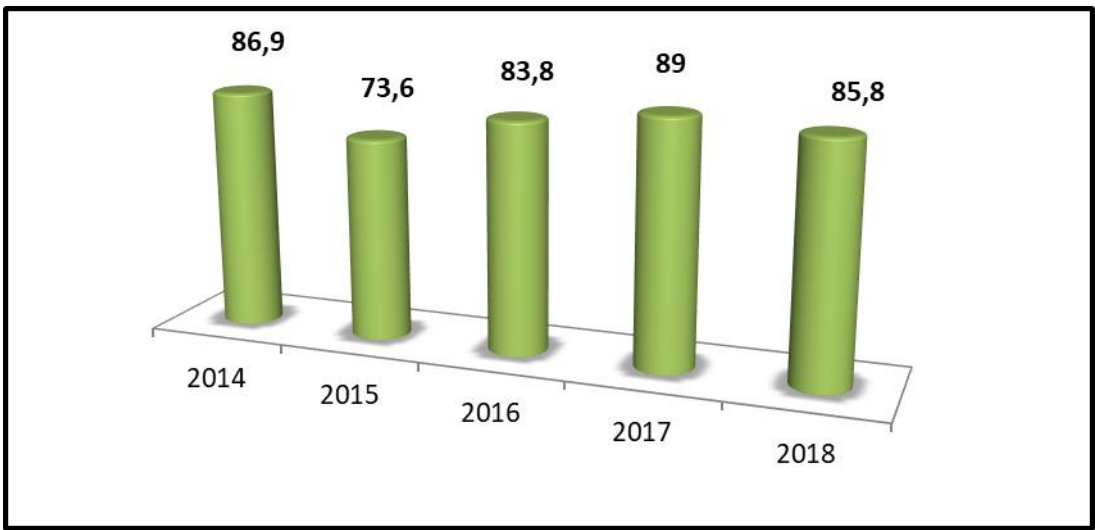
Grafik. 2.45
Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2014-2018

Cakupan pelayanan Nifas di Provinsi Sumatera Utara mengalami trend peningkatan mulai tahun 2014 (80,28 persen) sampai tahun 2017 (87,7 persen) namun pada tahun 2018 menurun menjadi 81,7 persen.

Angka ini belum mampu memenuhi Target RPJMD 2018 sebesar 83 persen, diperlukan upaya dan kerja keras untuk tahun-tahun selanjutnya.

x. Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)

Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



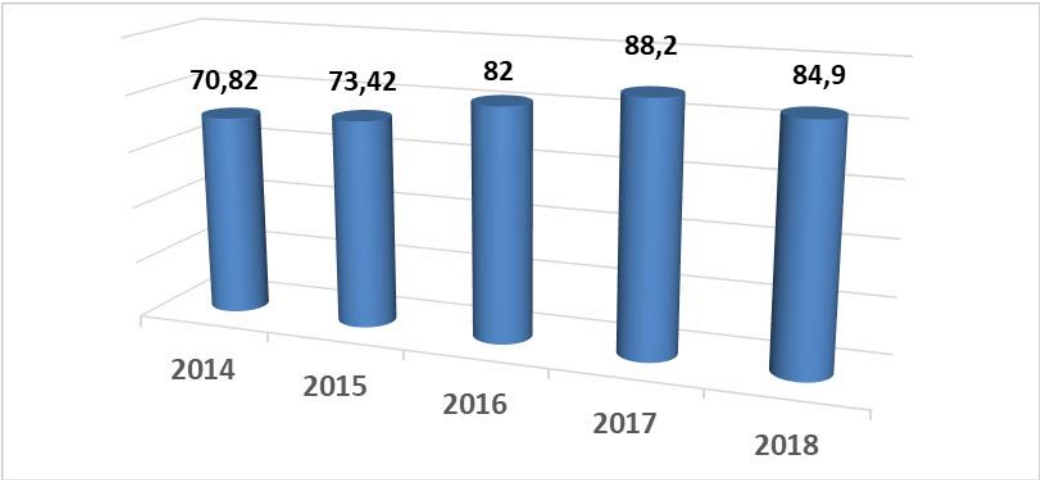
Sumber : DinasKesehatanProvinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.46
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi
Yang Ditangani Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik diatas, Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni 73,6 persen namun dapat ditingkatkan menjadi 85,8 persen pada tahun 2018 yang sangat berarti, angka ini sudah dapat memenuhi target RPJMD tahun 2018 sebesar 80 persen.

y. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Sumatera Utara sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



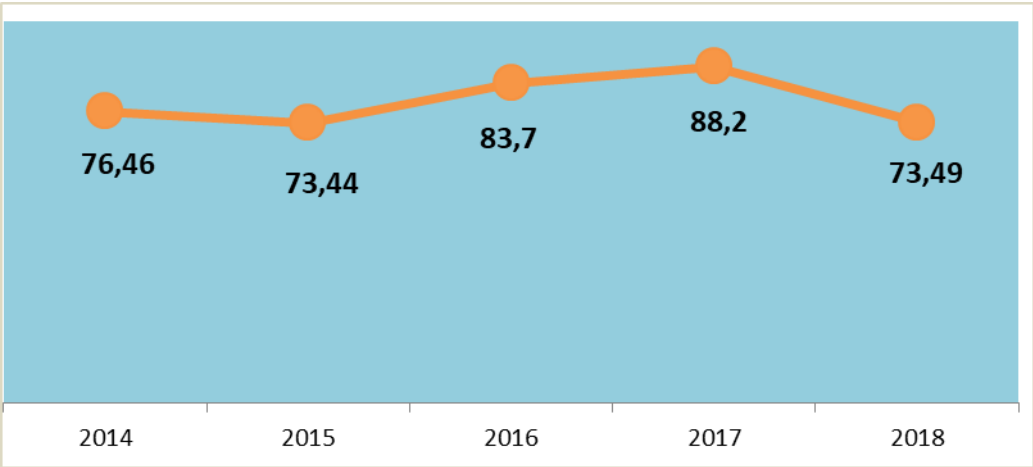
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.47
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2014-2018

Jika dilihat dari grafik di atas Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik ditandai dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 88,2 persen namun menurun pada tahun 2018 menjadi 84,9 persen, meskipun terjadi penurunan capaian akan tetapi angka ini berada diatas target RPJMD 2018 sebesar 78 persen, untuk itu perlu peningkatan target untuk indikator ini agar pelayanan anak balita dimasa akan datang lebih maksimal.

z. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan Penjangkaran Kesehatan SD dan Setingkat di Provinsi Sumatera Utara sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Grafik. 2.48
Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2014-2018

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan setingkat dari 2014 hingga 2018 menunjukkan perkembangan yang sangat baik hal ini ditandai dengan capaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 85.44 persen, namun capaian menurun pada tahun 2018 menjadi 73,49 persen, namun demikian target RPJMD 2018 sebesar 65 persen sudah terlampaui. Perlu penambahan target untuk indikator ini, agar cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setinggkat bisa mencapai angka 100 persen.

aa. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin setiap warga Negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Mengingat kebutuhan warga Negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan barang/jasa kesehatan memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, maka perlu ada standar dalam penyelenggaraan peran pemerintah di bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 memuat ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sekurangnya ada 2 fungsi SPM, yaitu (1) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan (2) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi serta 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait SPM kesehatan yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2019.

2.3.1.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.3.1.2.1. PEKERJAAN UMUM

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk

lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.63
Rekapitulasi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Berdasarkan Kondisi Tahun 2014 - 2018

TAHUN	KONDISI JALAN KABUPATEN/KOTA (Km)					
	BAIK	SEDANG	RUSAK	RUSAK BERAT	TIDAK DIRINCI	JUMLAH
2014	12.186,05	7.115,58	7.357,55	6.745,95	47,77	33.452,90
2015	13.985,72	9.426,21	7,889,89	7.401,45	47,77	30.861,15
2016	13.239,10	4.580,62	6.254,15	7.028,66	2.535,92	33.638,45
2017	12.186,05	7.115,58	7.357,55	6.745,95	47,55	33.452,90
2018*	12.186,05	7.115,58	7.357,55	6.745,95	47,55	33.452,90

Sumber : SUDA 2013 - 2016 dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Tahun 2018

*) data sementara

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa panjang jaringan jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 13.985,72 Km dan kemudian berturut-turut mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 sebesar 12.186,05 Km.

b. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Perkembangan panjang dan kondisi jalan berdasarkan kewenangan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kondisi Tahun 2014 - 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.64
Panjang Jaringan Jalan Provinsi Berdasarkan
Kondisi Tahun 2014 – 2018

NO	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN PROVINSI (Km)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kondisi Jalan Mantap	74,42	76,11	80,83	84,31	81,17
2	Kondisi Baik	1.190,19	1.236,23	1.397,83	1.346,28	1.026,77
3	Kondisi Sedang	1.078,56	1.083,97	1.066,37	1.223,84	1.410,82
4	Kondisi Rusak	259,00	259,72	242,12	177,42	217,13
5	Kondisi Rusak Berat	520,75	468,58	342,18	300,97	350,92
	Total	3.048,50	3.048,50	3.048,50	3.048,50	3.005,63

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat panjang jaringan jalan Provinsi dengan kondisi jalan mantap setiap tahunnya mengalami peningkatan terlihat dari tahun 2014 dengan panjang jalan 74.42 Km sampai dengan tahun 2017 mencapai angka sebesar 84,31 Km. Namun untuk tahun 2018 kemantapan jalan tersebut menurun menjadi 81,17 persen disebabkan peralihan status dari jalan Kabupaten/Kota menjadi jalan provinsi, demikian juga halnya peralihan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Jalan provinsi yang semula 3.048,50 km dengan 144 ruas (SK Gubsu No. 188.44/31/KPTS/2012) menjadi 3.005,63 km dengan 171 ruas (berdasarkan SK Gubsu No. 188.44/673/KPTS/ 2018 tanggal 8 Juni 2018). Untuk perkembangan kondisi jalan Provinsi per Kawasan berdasarkan Kondisi Mantap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.65
Rekapitulasi Jalan Provinsi di Wilayah Kawasan
Berdasarkan Kondisi Mantap Tahun 2014-2018

KAWASAN	KONDISI JALAN PROVINSI MANTAP PER KAWASAN									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
Kawasan Pantai Timur	831,97	74,29	755,17	78,58	768,72	83,66	811,83	88,03	867,34	84,39
Kawasan Pantai Barat	529,70	73,99	498,77	70,69	546,74	77,54	565,87	79,65	527,20	78,80
Kawasan Dataran Tinggi	546,09	70,19	696,70	74,46	820,32	82,68	837,35	85,50	825,95	78,99
Kawasan Kepulauan Nias	360,99	83,03	369,56	82,83	328,42	75,95	355,07	81,29	217,10	82,50

Sumber: Bappedasu, Data Diolah Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama dalam dalam Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Bidang Jalan yaitu dengan meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi sebesar 60% di tahun 2019. Sedangkan untuk perkembangan kondisi jembatan dalam kondisi baik dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.66
Jumlah Jembatan Provinsi Berdasarkan
Kondisi Tahun 2013 – 2017

NO	KONDISI	JUMLAH JEMBATAN PROVINSI (buah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kondisi Baik	770	663	655	681	680
2.	Kondisi Sedang	124	162	166	160	160
3.	Kondisi Rusak	44	54	52	51	49
	TOTAL	938	879	873	892	889
	PANJANG JEMBATAN (m)	13.505,50	11.723,70	11.623,50	11.164,41	11.844,81

Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah jembatan dengan kondisi baik dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sebelumnya dari tahun 2014 sebanyak 770 buah dengan panjang jembatan 13.505,50 m mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 680 buah dengan panjang jembatan 11.844,81 m.

c. Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengamanan Pantai

Kondisi umum pencapaian kinerja pengendalian daya rusak air dalam pengelolaan sungai dan pantai dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.67
Pengendalian Daya Rusak Air (Pengolaan Sungai dan Pantai)
Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013-2017				
	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luas genangan banjir (%)	77,05	78,83	82,10	86.83	89.39
Perbaikan/Pemb. Perkuatan Tebing (m)	132.629	135.994	141.410	146.046	160.266
Normalisasi /Pelurusan alur sungai/Perbaikan/Pembuatan Tanggul (m)	411.455	415.455	444.534	455.999	466.799

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, 2018

Dari tabel di atas dapat terlihat kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luas genangan banjir setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini terlihat sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 96 persen.

d. Rasio Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas Daerah Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi tanggal 21 April 2015, Daerah Irigasi Permukaan di Provinsi Sumatera terdiri dari 76 Daerah Irigasi (D.I) seluas 86.999 Ha, dan Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) terdiri dari 14 Daerah Irigasi Rawa seluas 26.846 Ha. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengkajian kembali terhadap Daerah Irigasi di Provinsi Sumatera Utara, baik yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan Kabupaten/Kota.

Hasil kajian tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan luasan Daerah Irigasi. Beberapa Daerah Irigasi kewenangan Provinsi telah ditingkatkan fungsinya menjadi satu kesatuan sistem irigasi sehingga luasannya sudah lebih dari 3000 Ha, akan beralih menjadi kewenangan Pusat yang dalam hal ini berada dibawah pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-II. Sebagian daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Utara telah mengalami pengurangan luas kurang dari 1000 Ha, akibat terjadinya alih fungsi menjadi area bukan pertanian atau penggunaan lainnya, sehingga akan beralih kewenangan penanganannya kepada Kabupaten/Kota.

Sebaliknya beberapa Daerah Irigasi yang berada pada daerah lintas Kabupaten/Kota yang selama ini tidak tertangani, akan beralih menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Perubahan luasan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi ini telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ditetapkan status kewenangannya.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan %-tase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2014-2018, menunjukkan adanya peningkatan, namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.68
Persentase Fungsi Layanan Irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara Dalam kondisi Optimal Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2013	Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
Layanan Irigasi Permukaan kondisi optimal (%)	60	61,40	64,90	75,16	79,03	81.82
Layanan Jaringan Irigasi Rawa kondisi optimal (%)	35	39,00	43,01	46,75	51,00	53.48

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, 2018

e. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Penyediaan Air Baku bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air untuk penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, kebutuhan air rumah tangga (air minum dan air bersih) dan keperluan lainnya. Penyediaan air baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ di Provinsi Sumatera Utara selama priode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.69
Penyediaan Air Baku Dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014-2018				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Sarana Air Baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ (Unit) terbangun/terehabilitasi	1 (Rehab)	2 (Rehab)	13 (Rehab)	8 (Rehab)	2 (Rehab)
Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	205.000	215.000	280.000	320.000	325.000

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kegiatan penyediaan air baku selama priode tahun 2014-2018 tidak ada embung baru yang dibangun, hanya terbatas pada rehabilitasi embung yang sudah ada. Rehabilitasi Embung yang telah dilaksanakan sejak 2014-2018 adalah sebanyak 26 Unit (dengan asumsi penambahan daya tampung melalui kegiatan Rehabilitasi sebesar 5.000 m3/unit).

Tidak tercapainya target pembangunan embung untuk penyediaan air baku yang diharapkan pertambahan sebanyak 10 unit/tahun

disebabkan kesulitan kabupaten/kota dalam penyediaan lahan. Status lahan dimana embung berada, sebagian besar adalah milik masyarakat, sehingga keberlanjutannya sulit dijamin apabila masyarakat akan menggunakan lahan tersebut untuk keperluan sendiri.

f. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Tabel. 2.70
Perkembangan Capaian Kinerja Sub Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Air Minum					
Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	85,90	79,57	87,01	88,07	88,51
Layanan Akses Air Minum Aman	45,14	47,26	45,84	49,87	48,35
Akses Air Minum Perpipaan (%)	12,77	12,83	12,54	14,12	12,78
Jaringan Air Minum Non Perpipaan (%)	73,13	66,75	74,47	73,95	75,73
Sanitasi					
Layanan Air Limbah Perkotaan dan Perdesaan	66,92	67,18	72,43	72,56	74,60

Sumber : Susenas BPS Provinsi Sumatera Utara 2013-2017, 2018
Keterangan : Indikator air minum layak mulai tahun 2011 menggunakan rumus baru yaitu air minum layak sudah mencakup air minum utama dan air mandi/cuci. Sedangkan sebelum tahun 2011 menggunakan rumus lama yaitu hanya air minum utama

Sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yakni universal akses air minum dan sanitasi layak 100% pada tahun 2019, masih belum tercapai. Sehingga diperlukan upaya yang lebih keras untuk dapat memenuhi target tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan lahan

untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Airminum (IPA) dan pipa distribusi khususnya pada tanah milik masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Air Minum dalam rangka Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Bidang Keciptakarya. Sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 7 Ayat 2, bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

Sesuai dengan arahan kebijakan dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023, bahwa pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada Pemantapan dan pengembangan SPAM Regional dengan sistem jaringan perpipaan, Pengembangan unit produksi air minum PDAM di Provinsi Sumatera Utara, dan Pemantapan dan pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan pada kawasan terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional diprioritas pada Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai-Deli Serdang (SPAM MEBIDANG) yang sampai dengan Tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan intake pada Sungai Bingei Kota Binjai. Kapasitas sistem penyediaan air minum SPAM Regional MEBIDANG direncanakan sebesar 2 x 1. 100 lt/dt. Diharapkan pada tahun 2019 telah mulai dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 1100 M3/Detik.

Perencanaan pembangunan dan pengelolaan SPAM Regional selanjutnya diarahkan pada SPAM Regional Kota Tebing Tinggi-Kabupaten Serdang Bedagei (SPAM Seriti), yang sampai tahun 2018 sudah dalam tahapan Penyusunan Feasibility Studi.

Pada tahapan selanjutnya direncanakan pengembangan SPAM Regional pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Kuala Tanjung (Lintas Kabupaten Simalungun-Batubara), SPAM Regional Danau Toba, SPAM Regional Tanjung Balai-Asahan dan SPAM Regional Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Dometik Regional Lintas Kabupaten/Kota

Sesuai dengan arahan kebijakan dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023, bahwa untuk penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, masih terbatas kepada pengembangan dan pengelolaan Air Limbah di Kawasan Strategis Medan-Binjai-Deli Serdang (MEBIDANG). Pembangunan Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah pada daerah lintas Kabupaten/Kota lainnya masih dalam tahapan proses perencanaan.

2.3.1.2.2. PENATAAN RUANG

a. Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Penataan Ruang adalah Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub bidang penataan ruang, yakni persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100% pada Tahun 2019.

Capaian kinerja sub urusan penataan ruang ini masih belum tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan hingga akhir tahun 2018, fokus penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah masih terkait proses legalisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara serta Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, target untuk memiliki dokumen dan regulasi penataan ruang hingga rencana rinci tata ruang belum dapat terealisasi.

Pasca ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, penyelenggaraan penataan ruang daerah di Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara terkait sasaran bidang penataan ruang adalah terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang serasi baik dengan RTRW Kabupaten/Kota maupun dengan kepentingan pembangunan sektoral Provinsi Sumatera Utara bidang

tata ruang diamanatkan untuk mewujudkan keserasian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga kemudian rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor.

Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang, dan efektivitas penerapan serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Belum terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan pasca penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. Hingga saat ini, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki data dasar (baseline) kesesuaian perwujudan RTRW, yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa besar pencapaian kinerja penataan ruang terhadap perwujudan RTRW.

Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara secara terukur, dapat ditampilkan melalui indikator persentase perwujudan rencana pola ruang dengan melihat realisasi dari analisis tutupan lahan yang bersumber dari citra satelit atau analisis penggunaan lahan yang bisa didapatkan dari peta Rupa Bumi Indonesia yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial.

Untuk mewujudkan dukungan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, Provinsi Sumatera Utara masih perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penataan ruang, antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD) serta personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). TKPRD yang beranggotakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait tentunya perlu memahami keterkaitan penataan ruang dalam konteks pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi di sektoral OPD-nya masing-masing. Peningkatan kapasitas TKPRD diharapkan dapat mendukung kinerja TKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu komponen penting dalam pengendalian pemanfaatan

ruang adalah penegakan hukum atau yang sering disebut sebagai penerapan/pengenaan sanksi, baik administratif maupun pidana. Oleh karena itu, kehadiran PPNS sangatlah penting dalam penegakan hukum di bidang penataan ruang. Kondisi saat ini PPNS Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, dengan status sebagian besar perlu memperpanjang Kartu Tanda Anggota (KTA) PPNS-nya dan belum berjalan optimal terlibat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas personil PPNS, serta mekanisme/sistem koordinasi pelaporan PPNS di Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa indikator merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau membutuhkan data dengan ketelitian detail di tingkat Kabupaten/Kota. Indikator tersebut yaitu Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan, Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya, Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit Dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan.

Indikator ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator kinerja suburusan penataan ruang, namun pada periode RPJMD 2013 – 2017, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara yang digunakan sebagai baseline rencana, belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sehingga pada periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara berikutnya, indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur kinerja sub urusan penataan ruang.

b. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara

Indikator dokumen dan regulasi perencanaan Kawasan Strategis Provinsi memiliki kesamaan dengan indikator RTR Kawasan Strategis Provinsi, sehingga sebaiknya dapat menjadi kesatuan indikator. Indikator tersebut perlu ditegaskan terkait output yang dihasilkan sebagai regulasi peraturan daerah, sementara dokumen yang sudah disusun merupakan bersifat kajian/studi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.71
Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara

No	Kawasan Strategis Nasional
1	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sumatera Utara (Pulau Berhala)
2	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)
3	Kawasan Danau Toba dan sekitarnya

Sumber : PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Pulau Berhala, merupakan pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara dari 34 (tiga puluh empat) pulau kecil terluar di Pulau Sumatera, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ditetapkan bagian kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam. selain Pulau Berhala masih ada 2 (dua) pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara yaitu, Pulau Simuk dan Pulau Wunga.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo bahwa Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Kawasan danau Toba telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional dengan fungsi lingkungan dan telah memiliki rencana tata ruang sendiri seperti yang dituangkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2014, Cakupan Kawasan Danau Toba berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 terdiri dari badan danau, DTA dan CAT, mencakup 25 sub DAS pada 7 kabupaten

dan 28 kecamatan yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir dan 4 CAT di 8 Kabupaten dan 57 Kecamatan yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir dan Pakpak Bharat.

Disamping Kawasan Strategis Nasional, untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan perekonomian nasional, di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Sei Mangkei, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, seluas 2.002,77 ha (dua ribu dua koma tujuh puluh tujuh hektar) yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. KEK Sei Mangkei tersebut direncanakan menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional. KEK Sei Mangkei ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang akan berimplikasi terhadap dinamika pembangunan di kawasan sekitarnya, seperti peningkatan kegiatan ekonomi, perubahan tata guna lahan, kebutuhan SDM/tenaga kerja, maupun kebutuhan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada terbentuknya konsep kota baru disekitar KEK Sei Mangkei. Kawasan Strategis Provinsi yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, yakni antara lain:

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;
5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;
6. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;
7. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;

8. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
9. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;
11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan
14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

Tabel. 2.72
Aspek Strategis untuk Kawasan Strategis

NO	KAWASAN STRATEGIS	NILAI/ASPEK STRATEGIS
1	Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara India/Thailand/Malaysia di Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai	Pertahanan dan Keamanan
2	Kawasan Perkotaan Mebidangro	Ekonomi
3	Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi: • Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang; • Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan; • Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.	Sosial Budaya
4	Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya	Lingkungan Hidup
		Sosial Budaya
		Ekonomi
5	Kawasan Ekosistem Leuser dan Bohorok	Lingkungan Hidup
6	Kawasan Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru)	Lingkungan Hidup
7	Kawasan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;	Lingkungan Hidup
8	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias	Ekonomi
		Sosial Budaya
9	Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya	Sosial Budaya
10	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya	Ekonomi
	• Kawasan Labuan Angin – Sibolga	
	• Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan	
	• Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya	
11	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan	Ekonomi
	• Kawasan Tanjung Balai – Asahan	
	• Kawasan Simalungun – Batubara	
	• Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke	

NO	KAWASAN STRATEGIS	NILAI/ASPEK STRATEGIS
12	Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi • Merek Karo; • Siborong borong, Tapanuli Utara; • Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan; • Lumban Julu Toba Samosir; • Harian, Samosir; • Silimakuta Simalungun; • Sitinjo, Dairi, • Siempat Rube Pakpak Bharat • Siantar Martoba Kota Pematangsiantar	Ekonomi
13	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhan Batu dan sekitarnya	Ekonomi
14	Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah	Sosial Budaya
15	Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir	Sosial Budaya
16	Kawasan Religi dan Situs Candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara	Sosial Budaya
17	Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak	Lingkungan Hidup

Sumber: PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

2.3.1.4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.73
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)	1.626	1.576	1.481	1.263	951,68
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (unit)	600	1.045	349	382	518

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2018

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Luas kawasan kumuh menurun dari tahun ke tahun, dari kondisi awal pada tahun 2014 seluas 1.626 ha pada tahun 2018 menurun menjadi 951,68 ha. Pengurangan luas kawasan kumuh sudah melebihi target yang diharapkan, namun masih terdapat gap yang

cukup besar untuk memenuhi target 0% Kawasan Kumuh pada SDGs tahun 2030.

2. Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni meningkat dari tahun ke tahun, dari kondisi awal pada tahun 2014 jumlahnya sebesar 3.500 unit pada tahun 2017 meningkat sebesar 5.794 unit. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah memenuhi target yang ditetapkan, namun persentase rumah layak huni di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2017 masih berkisar 92,02%, sehingga program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini masih perlu untuk terus dilanjutkan.

b. Capaian Penyediaan Rumah bagi masyarakat korban bencana dan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi masyarakat relokasi program pemerintah (SPM)

Dalam rangka pencapaian SPM penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana, telah dilakukan melalui Program Pengembangan Perumahan dalam rangka Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana letusan Gunung Sinabung yang direlokasi, mulai tahun 2017 dan pada tahun 2018 telah dibangun rumah sebanyak 103 unit dan akan dilanjutkan pada tahun 2019 dengan kegiatan Pematangan Lahan untuk pembangunan yang berikutnya.

SPM Fasilitas Penyediaan Rumah bagi masyarakat relokasi program pemerintah sampai dengan tahun 2018 belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

2.3.1.5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tahun 2017 sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan satuan Linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban dalam pemilu, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang struktur dan organisasi dan tata kerja Kementerian

Dalam Negeri fungsi linmas sudah tidak ada di Kesbangpol, Adapun data personil linmas pada PAM Pemilu tahun 2009 sejumlah 54.374 peronil, selanjutnya pendataan linmas sejak 2014 sampai dengan 2016 tidak dilakukan. Dan baru dilakukan pendataan kembali oleh Satpol PP pada tahun 2017 sebanyak 10.383 dan untuk tahun 2018 pendataan petugas Linmas masih dalam proses

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Provinsi Sumatera Utara sangat menggembirakan, hal ini ditandai dengan tingkat keberhasilan capaian setiap tahunnya, dimana hingga akhir periode RPJMD 2018, capaiannya sudah sesuai dengan yang ditargetkan. Perkembangan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di provinsi sumatera utara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.74
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran 3K
(Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018*
TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN 3K (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	85	151	105	73	73

Sumber : Satpol PP Provsu, Tahun 2018

*) Angka Sementara

c. Persentase Penegakan PERDA

Persentase Penegakan Perda adalah Jumlah penyelesaian Penegakan Perda dibandingkan dengan Pelanggaran PERDA, capaian indikator ini telah sesuai dengan target RPJMD 2018, perkembangan persentase penegakan PERDA di Provinsi Sumaera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.75
Penegakan PERDA Tahun 2013-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Penegakan Perda	15	20	25	33	33

Sumber : Satpol PP Provsu, Tahun 2018

d. Penanggulangan Bencana

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunungapi aktif. Berdasarkan kondisi ini menyebabkan Provinsi Sumatera Utara berulang kali mengalami bencana alam. Adapun beberapa potensi kejadian bencana yang akan terjadi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.76
Potensi Bencana Provinsi Sumatera Utara

BENCANA YANG BERPOTENSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA	
1. BANJIR	7. KEKERINGAN
2. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT
3. GEMPABUMI	9. LETUSAN GUNUNGAPI
4. TSUNAMI	10. CUACA EKSTRIM
5. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	11. TANAH LONGSOR
6. KEGAGALAN TEKNOLOGI	12. BANJIR BANDANG

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Hasil Analisa 2015

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Provinsi Sumatera Utara berpotensi terhadap 12 jenis bencana yaitu bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim, tanah longsor dan banjir bandang.

Salah satu analisis yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kerentanan bencana adalah Analisa indeks bahaya yang didapatkan berdasarkan jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di daerah tersebut. Penentuan indeks bahaya tersebut mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait lainnya di tingkat nasional. Keseluruhan bencana tersebut disesuaikan penamaannya

dengan kerangka acuan kerja BNPB. Terdapat 12 jenis bahaya telah diatur dan disamakan penamaannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia tahun 2015. Penentuan jenis dan tingkat bahaya merupakan langkah awal dalam melakukan sebuah kajian risiko bencana. Untuk sumber data yang digunakan terkait potensi luas bahaya dianjurkan oleh BNPB dengan mengacu pada data luas wilayah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2015 yang bertujuan untuk kesamaan proses analisa kajian risiko bencana di seluruh wilayah.

Hasil indeks kelas bahaya dan persentase luas bahaya didapatkan dari pengkajian bahaya yang berpotensi di Provinsi Sumatera Utara. Untuk indeks bahaya 0-0,333 merupakan kategori kelas rendah, indeks 0,333-0,666 termasuk kelas sedang, dan 0,666-1 termasuk dalam kelas bahaya tinggi. Hasil kajian indeks bahaya untuk tiap bencana yang berpotensi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.77
Potensi Luas Bahaya di Provinsi Sumatera Utara

JENIS BENCANA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. BANJIR	3.188.573	TINGGI
2. BANJIR BANDANG	162.610	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	5.293.311	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	74.631	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	48.699	TINGGI
6. GEMPABUMI	6.831.296	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	3.543.960	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	6.698	TINGGI
9. KEKERINGAN	6.830.761	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI PUSUK BUKIT	6.356	RENDAH
11. LETUSAN GUNUNGAPI SINABUNG	16.713	TINGGI
12. LETUSAN GUNUNGAPI SORIK MARAPI	20.630	TINGGI
13. TANAH LONGSOR	1.992.892	TINGGI
14. TSUNAMI	63.299	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel di atas memperlihatkan hasil rekapitulasi kelas bahaya di Provinsi Sumatera Utara. Kelas bahaya dominan berada pada kelas bahaya tinggi. Kecuali untuk bencana letusan Gunungapi Pusuk Bukit berada pada kelas bahaya rendah.

Selain indeks penduduk terpapar, kerentanan diperoleh dari analisis indeks kerugian yang dikelompokkan ke dalam dua indeks, yaitu kerugian rupiah (fisik dan ekonomi) dan kerugian lingkungan).

Parameter yang digunakan untuk komponen fisik adalah fasilitas rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis yang berpotensi terdampak bencana sedangkan parameter yang digunakan untuk komponen ekonomi adalah lahan produktif dan PDRB. Sementara itu indeks kerugian lingkungan diperoleh berdasarkan parameter penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, rawa, dan semak belukar).

Adapun rekapitulasi seluruh kajian kerentanan tingkat Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.78
Potensi Kerugian Bencana di Provinsi Sumatera Utara

BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. BANJIR	34.182,0	23.655,1	57.837,1	TINGGI	755	TINGGI
2. BANJIR BANDANG	3.530,9	1.662,6	5.193,5	TINGGI	29.600	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	56.240,3	46.923,0	103.163,3	TINGGI	-	-
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	-	-	-	-	-	-
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	3.046,0	79,9	3.125,9	TINGGI	19.427	TINGGI
6. GEMPABUMI	49.509,93	36.714,91	86.224,84	TINGGI	-	-
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	37.699,46	37.699,46	SEDANG	444.135	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	6.320,7	-	-	-	-	-
9. KEKERINGAN	-	50.520,5	50.520,5	SEDANG	1.250.076	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI PUSUK BUKIT	6,55	0,02	6,56	TINGGI	899	TINGGI
11. LETUSAN GUNUNGAPI SINABUNG	137,2	0,1	137,3	TINGGI	1.731	TINGGI
12. LETUSAN GUNUNGAPI SORIK MARAPI	2,32	0,01	2,33	SEDANG	2.124	TINGGI
13. TANAH LONGSOR	4.054,1	4.041,7	8.095,8	TINGGI	1.395.063	TINGGI
14. TSUNAMI	1.557,3	460,9	2.018,1	TINGGI	11.297	TINGGI

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kelas dominan potensi kerugian fisik dan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara adalah tinggi dan kelas potensi kerusakan lingkungan adalah tinggi.

Tabel. 2.79
Potensi Kerugian Bencana di Provinsi Sumatera Utara

JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAKAR	KELAS KERUGIAN RUPIAH	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS KERENTANAN
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
2. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
3. CUACA EKSTREM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	-	-	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
6. GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	SEDANG	-	TINGGI
9. KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI PUSUK BUKIT	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
11. LETUSAN GUNUNGAPI SINABUNG	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
12. LETUSAN GUNUNGAPI SORIK MARAPI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
13. TANAH LONGSOR	TINGGI		TINGGI	TINGGI
14. TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan indeks kerentanan seluruh potensi bencana di Provinsi Sumatera Utara. Indeks kerentanan merupakan dasar penentuan kelas kerentanan bencana. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kerentanan seluruh potensi bencana di Provinsi Sumatera Utara berada pada kelas tinggi.

2.3.1.6. SOSIAL

Untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada Point **Pertama, no poverty**, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; **Kedua, zero hunger**, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, maka sentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang urgen dilaksanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1)*Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang **Sosial*** serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam

penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4584) dan Peraturan Menteri Sosial RI NO. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan SPM lama dan tidak dipakai lagi, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2); an kemudian Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), bahwa Jenis SPM Sosial Provinsi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

a. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara fluktuatif, perkembangannya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Tabel. 2.80
Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase PMKS yang tertangani	1.09	0.8	1.02	1.3	1.35

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penurunan terjadi pada tahun 2015 sebesar 0.8 persen, namun terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 1.3 dan 1.35 persen.

b. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Perkembangan Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

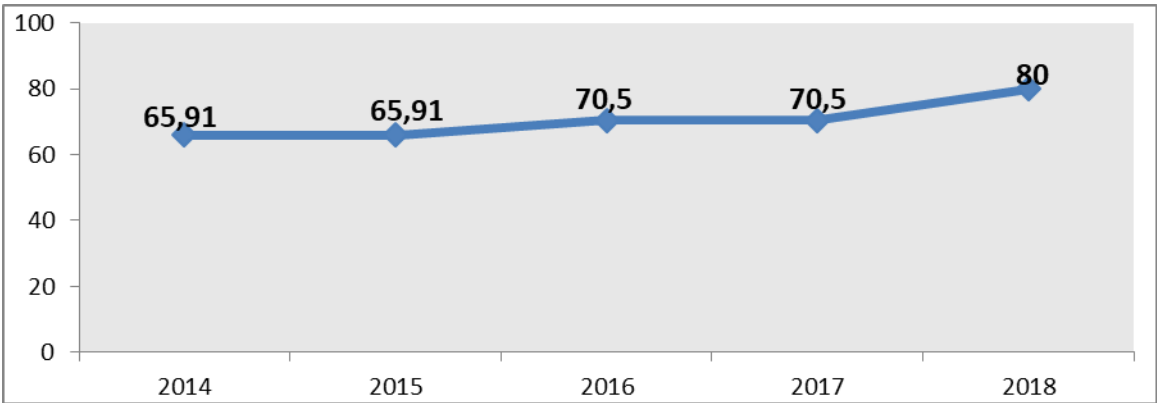
Tabel. 2.81
Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	20.50	15.20	18.20	25.30	20.25

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018

c. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Perkembangan Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2018 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana mencapai 80 persen, perkembangan capaiannya dapat dilihat pada tabel di Grafik di bawah :



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018

Grafik. 2.49
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Tahun 2014-2018

d. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Perkembangan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 hingga 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.82
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	70,50	40,20	80,50	85,50	85.00

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1. TENAGA KERJA

a. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Provinsi Sumatera Utara, tercatat mengalami fluktuasi kenaikan dari 69 kasus pada tahun 2014 menjadi 53 kasus pada tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.83
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan
Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2013-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*)
DATA PENYELESAIAN PB	69 Kasus	82 Kasus	148 Kasus	53 Kasus	53 Kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provsu,
*) data sementara

b. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan di Provinsi Sumatera Utara, tercatat mengalami penurunan dari 17.1692 orang pada tahun 2014 menjadi 4.441 Orang pada tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.84
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar
Yang Ditempatkan Tahun 2014-2018 (Orang)

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2014		Jmlh	Tahun 2015		Jmlh	Tahun 2016		Jmlh	Tahun 2017		Jmlh	Tahun 2018*		Jmlh
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr	
1.	TIDAK SEKOLAH	5	0	5	-	6	6	21	8	29	1	-	1	1	-	1
2	SD, TIDAK TAMAT	64	30	94	25	74	99	103	39	142	71	46	117	71	46	117
3	SLTP UMUM	149	3941	4090	32307	173	32480	408	3592	4000	124	167	291	124	167	291
4	SMTA UMUM	36107	37798	73905	31199	41878	73076	34116	35085	69201	1472	1417	2889	1472	1417	2889
5	STM	9879	7891	17770	6513	11458	17971	5324	4016	9340	-	-	-	-	-	-
6	SMEA	2604	3636	6240	3001	3020	6021	2986	3861	6847	-	-	-	-	-	-
7	SPMA	0	0	0	-	-	-	1861	1456	3317	-	-	-	-	-	-
8	SMTA LAINNYA	3544	6154	9698	5080	4110	9190	5971	8619	14590	-	-	-	-	-	-
9	DIPLOMA, I, II, II	4091	2737	6828	2259	4745	7004	4570	2935	7505	82	357	439	82	357	439
10	SARJANA MUDA	18186	18935	37121	15629	21093	36722	44192	73947	118139	299	385	684	299	385	684
11	SARJANA LENGKAP	10538	5403	15941	4460	12222	16682	22014	14653	36667	7	13	20	7	13	20
Jumlah		85167	86525	171692	100472	98779	199251	121566	148211	269777	2056	2385	4441	2056	2385	4441

Sumber: Dinas Tenaga Provsu, 2018
*) Angka sementara

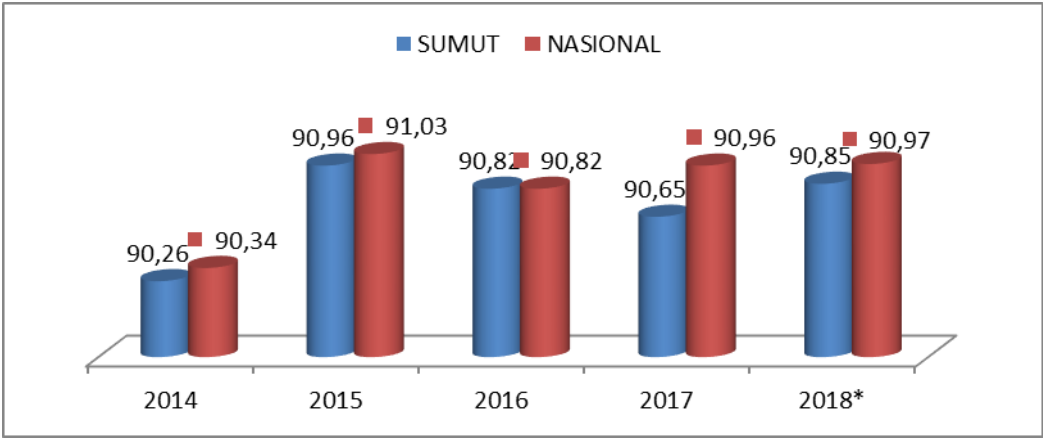
2.3.2.2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Di Provinsi Sumatera Utara, perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun 2014 hingga tahun 2018, memperlihatkan adanya trend positif pada kurun waktu 2014 – 2015, namun mengalami fluktuasi pada tahun berikutnya yaitu 2016 dan 2017. Hal ini

memberikan gambaran bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam skala nasional capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara ini, dapat dikatakan berada di atas rata capaian Nasional, hanya saja terjadi penurunan pada tahun 2017, dimana capaian nasioal mencapai 90,96 poin , sedangkan Sumatera Utara mencapai 90, 65 point, sebagaimana Grafik berikut :



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kemen PP PA, RI, 2018
*) Angka Sementara

Grafik. 2.50
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Sumatera Utara – Indonesia 2014-2018

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, dengan variabel pengukur sebagai berikut :

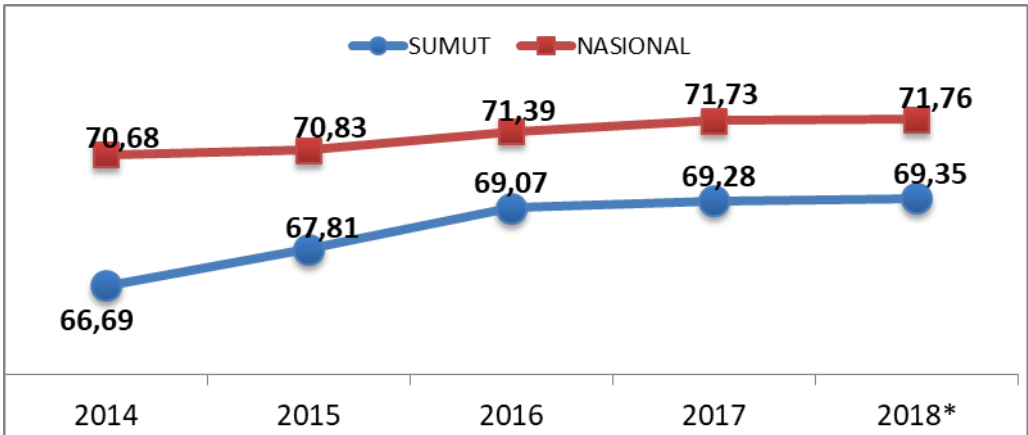
Tabel. 2.85
Dimensi Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di ParlemenLaki-laki & Perempuan	Indeks keterwakilan di Parlemen
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan	Indeks pengambilan keputusan
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-laki & Perempuan	Indeks pendapatan

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kemen PP PA, RI, 2018

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 hingga 2018 memperlihatkan adanya fluktuasi, Fluktuasi terjadi dari tahun 2015 yang mana terjadi kenaikan dari capaian 66,69 pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 67,81 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 69,07 (2016) dan 69,28 (2017).

Namun bila melihat dalam skala nasional, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara ini masih berada di bawah dari rata capaian Nasional pada rentang tahun yang sama, sebagaimana Grafik berikut :



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kemen PP PA, RI, 2018
*) Angka Sementara

Grafik. 2.51
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumut – Indonesia Tahun 2014 – 2018

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perempuan di Sumatera Utara pada umumnya sudah dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, hanya saja masih belum menemukan berbagai hambatan yang menyentuh segala aspek primer dan skunder dari kehidupan.

c. Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu dari 3 (tiga) provinsi di Indonesia dengan populasi terbesar untuk anak, terus berupaya dapat meningkatkan jumlah Kota/Kabupaten yang menjadi daerah layak anak, hingga pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penekanan dan penurunan kekerasan terhadap anak.

Pada rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, Provinsi Sumatera Utara, baru memiliki 6 (enam) Kabupaten/Kota Layak Anak (sumber: Kementerian PPPA, Tahun 2018), hal ini tentu sangat jauh dari yang diharapkan, karena luasnya wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota, sehingga bila diprosentasekan hanya mencapai 18 persen. Sehingga selain dari perlunya peran pemerintah, juga perlu melibatkan satu lembaga atau organisasi yang bersentuhan langsung seperti Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dimana pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Permen PP PA Nomor 14 Tahun 2010 (10)) dengan lingkup tugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pengembangan KLA di wilayahnya dan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Strategis serta Rencana Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

d. Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak

Fungsi penting sekolah bagi anak tentunya juga tidak bisa begitu saja dipisahkan dengan kondisi lingkungan yang kondusif dan 'ramah' terhadap anak. Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sekolah mencapai 16.753 unit sekolah yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota hingga tahun 2017 telah memiliki kurang lebih 502 unit Sekolah Ramah Anak. Angka ini tentu masih terlalu sedikit bila dibandingkan dengan jumlah sekolah yang belum ramah terhadap anak.

Begitu juga halnya dengan banyaknya puskesmas di Provinsi Sumatera Utara dan tersebar di 33 Kabupaten/Kota mencapai 571 unit puskesmas, pada tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki kurang lebih sebanyak 71 puskesmas layak anak, dan ini juga masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang belum ramah anak.

e. Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG

Secara konseptual Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan bagian dari pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management). Harus dipahami bahwa PPRG bukanlah merupakan suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, namun PPRG merupakan alat dan bukan tujuan. Dalam penyusunan PPRG dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG wajib berdasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikenal singkatan 3E, yaitu Ekonomis, Efisien dan Efektif serta menambahkan prinsip Equity. Teknis penyusunan PPRG di daerah dapat dilakukan melalui (1) analisis gender dengan Gender Analysis Pathway (GAP), (2) penyusunan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD).

Pada tahun 2017, capaian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara baru mencapai 10 OPD dari total 47 Organisasi Perangkat Daerah (<http://www.sumutprov.go.id>) yang bila diprosentasekan hanya mencapai 21 persen. Kondisi ini belum benar-benar melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

f. Perlindungan Anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk anak terbesar di Indonesia pada tahun 2017 telah memiliki penduduk anak sebanyak 4.964.424 penduduk anak-anak

dengan komposisi 2.531.411 orang anak laki-laki dan 2.433.013 orang anak perempuan, namun Kepemilikan Akta kelahiran pada Anak pada tahun 2017 (27,9) persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2016) yang mencapai 29,56 persen. Demikian juga dengan partisipasi PAUD usia 3-6 tahun di Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai 21,24 persen berada di peringkat 3 (tiga) terendah setelah Kalimantan Barat (18,38 persen) dan Papua (10,56 persen). Begitu juga halnya dengan Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) USIA 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir menurut Lama Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat rendah (39,35) persen bersama dengan Provinsi Maluku sebesar 33,64 persen, Papua Barat sebesar 34,62 persen. Selain daripada itu, berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memperlihatkan bahwa persentase anak bekerja usia 10-12 tahun di Provinsi Sumatera Utara termasuk cukup besar yaitu mencapai 16,6 persen berada di bawah Provinsi Sulawesi Tenggara 18,74 persen dan Nusa Tenggara Timur 18,59 persen, Bali 16,64 persen, Persentase penduduk usia 10 Tahun ke atas yang memiliki kesulitan dalam beraktivitas (Disabilitas) sebagaimana tercantum pada Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015, sebanyak 8,04 persen penduduk Sumatera Utara adalah penduduk dengan keterbatasan kemampuan (Disabilitas), baik itu keterbatasan dalam melihat, mendengar, berjalan, menggerakkan tangan/jari, perilaku/emosional, berbicara, dan mengurus diri sendiri.

Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2016 sudah memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) Sumatera Utara yang tersebar di 28 Kabupaten/Kota. Namun bila melihat keaktifan dan partisipasi di dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di wilayah masing – masing, maka dapat dikatakan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih terlalu kecil yaitu hanya 18 Forum Anak Daerah dari 28 Forum Anak Daerah yang terbentuk. Begitu pula halnya pada tahun 2017, dari 25 Forum Anak Daerah yang terbentuk, hanya 18 Forum Anak Daerah yang aktif mengikuti proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari

Musrenbang Desa, Kecamatan/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ke Musrenbang Nasional (sumber: Dinas PP PA Provsu). Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Forum Anak Daerah di 33 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

g. Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak sering terjadi di masyarakat. Perempuan dan Anak sebagai makhluk yang lemah, polos dan membutuhkan perlindungan menyebabkan orang-orang disekitarnya sering melampiaskan kemarahan kepada perempuan dan anak-anak. Setiap tahun jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat. Pemerintah sudah banyak membentuk peraturan yang dapat melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, namun tidak membuat pelaku kekerasan menjadi jera.

Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2016 telah melakukan dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO di Sumatera Utara dengan efektivitas layanan yang tidak sebanding dengan jumlah korban dan pengaduan yang masuk ke layanan. Pada tahun 2016 UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara telah memberikan pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO sebanyak 350 korban dengan jumlah SDM penyedia layanan sebanyak 11 orang yang terdiri dari penyedia layanan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 5 (lima) orang dan Non ASN sebanyak 6 (enam) orang. Pada tahun 2017, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan yang masih 11 orang dan jumlah korban yang melakukan pengaduan sebanyak 400 korban menjadikan kurang optimalnya layanan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (sumber: UPTD PPA SUMUT).

Tabel. 2.86
Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Pada Unit P2TP2A Sumut

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pada Unit P2TP2A Sumut	NA	NA	350 orang	437 orang	280 orang

Sumber : Dinas PPPA Sumut, 2018

h. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan bahwa *Trafficking in Person* merupakan salah satu kategori *Trans National Organized Crime* (TOC) terbesar ketiga secara keuntungan ekonomi dan kompleksitas masalahnya, setelah perdagangan Ilegal Senjata dan Obat Bius/Narkoba. Pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2015 – 2017) dan sejak diluncurkannya program pengaduan online berbasis aplikasi (2016) yang telah dibangun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>), masyarakat Sumatera Utara sudah mulai lebih terbuka dalam melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang ada disekitarnya, sehingga hal ini berimplikasi pada peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 2.87
Jumlah Perempuan dan Anak – Anak Korban Kekerasan Tahun 2014-2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	NA	400 orang	523 orang	1.553 orang	1.311 orang

Sumber : UPT P2TP2A dan Simfoni Kement. PP PA 2018

*) Angka Sementara

i. Ketersediaan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak

Isu gender dan anak masih kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan, dikarenakan ketersediaan data terpilah yang kurang memadai. Padahal data dan informasi ini merupakan sebuah komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang digunakan mulai dari tahap perencanaan,

penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Data dan informasi ini sangatlah dibutuhkan sebagai suatu bahan masukan dalam melakukan perencanaan pembangunan di semua bidang, Dengan demikian, hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan dan perhatian dari instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara saja, namun menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di seluruh lintas sektor dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2017 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru memiliki data terpilah gender dan anak dalam bentuk publikasi sebanyak 1 (satu) dokumen (Profil Gender dan Anak Provinsi Sumut Tahun 2017), dan ini masih perlu ditingkatkan sehingga akan memberikan data yang benar-benar dapat membuka wawasan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan tahunan.

2.3.2.3. PANGAN

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan.

a. Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele,Daging)

Data ketersediaan pangan utama yaitu beras, jagung, kedele, daging, susu dan telur di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.88
Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele, Daging)
Tahun 2014 – 2018

No.	URAIAN	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Beras					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	128,65	128,53	126,32	122,94	121,4
	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.714.429	1.769.453	1.760.623	1.810.303	1.731.425
	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi*) (Ton)	1.967.542	2. 271.160	2.457.466	2.876.567	3.400.744
2.	Jagung					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	61.615	60.820	21.743	25.949	1,84
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	133.975	174.249	1.521.768	1.637.694	27.303
	Produksi Jagung (Ton)	1.159.782	1.519.413	1.557.552	1.741.395	1.777.382
3.	Kedele					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	4,452	4,83	-	101.259	7,18
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	492	642	108.864	39.579	106.542
	Produksi Kedele(Ton)	5.707	6.588	5.063	7.766,40	32.622
4.	Daging Sapi					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	1,84	1,89	1,94	1,74	1,74
	Kebutuhan Konsumsi per- tahun (Ton)	25.331,01	26.342,44	27.359,63	24.539,10	25.819
	Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	22,656,29	24.141,46	25.571,07	26.862,27	27.498

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

b. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 1.4 persen per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energi disebabkan adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan.

Tabel. 2.89
Ketersediaan Energi dan Penyediaan Protein
Per Kapita Tahun 2014-2018

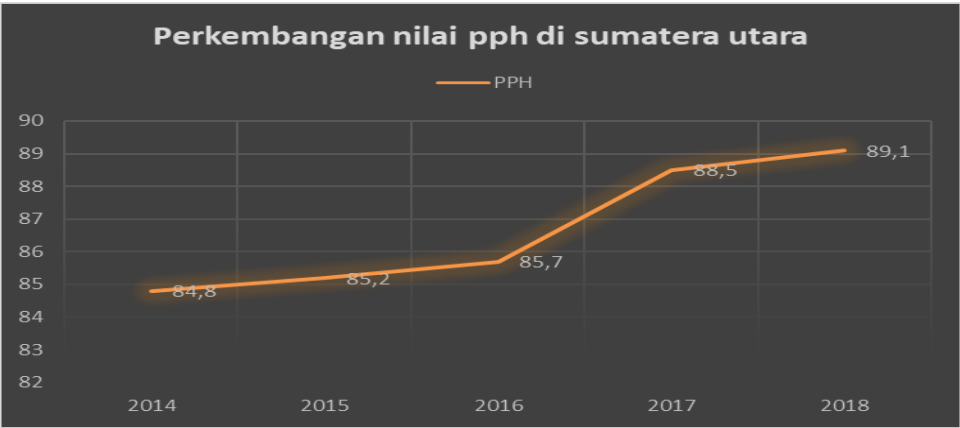
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Karbohidrat k.kal)	3.887,00	3.880,00	3.900,70	3.796,00	4.362,00
Protein (gr)	76,96	77,38	64,08	98,91	94,34

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Ketersediaan energi karbohidrat rata – rata penduduk Sumatera Utara mengalami penurunan dari 3.796,00 K.kal/kap/hari pada tahun 2017 menjadi 4.362,00 k.kal/kap/hari pada tahun 2018, dan angka ini sudah mencapai target ketersediaan energi yang sebesar 3.884 k.kal/kap/hari. Sedangkan angka ketersediaan energi protein pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan dari capaian tahun 2016 yaitu sebesar 64,08 gr/kap/hari menjadi 98,91 gr/kap/hari dan capaian tersebut telah melampaui target capaian kecukupan energi protein tahun 2017 yang sebesar 77,78 gr/kap/hari. Untuk ukuran nasional, keadaan ini menggambarkan ketersediaan pangan di Sumatera Utara sangat aman, mengingat target nasional untuk ketersediaan energi karbohidrat sebesar 2.400 k.kal/kap/hari dan penyediaan protein 63 gr/kap/hari.

c. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Berdasarkan data menunjukkan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) di Sumatera Utara mengalami peningkatan sejak tahun 2014 hingga 2018. Berikut ini adalah perkembangan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) di Sumatera Utara selama kurun waktu 2014-2018.



Grafik. 2.52
Nilai PPH Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan tahun 2014, nilai Pola Pangan Harapan (PPH) di Sumatera Utara mencapai 84,80 persen. Begitupun pada tahun 2015 terjadi peningkatan nilai PPH di Sumatera Utara menjadi 85,2 persen dan 85,7 persen pada tahun 2016 walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain daya beli masyarakat yang mengalami penurunan, berkurangnya jumlah konsumsi energi per kelompok pangan, dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap asupan konsumsi energi yang baik kurang. Sedangkan pada tahun 2017, nilai PPH di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 88,5 persen dan tahun 2018 sebesar 89,1 persen.

Tabel. 2.90
Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penurunan
Konsumsi Beras Perkapita 1,5% Untuk Memenuhi Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2014 – 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Konsumsi Beras (kg/kap/th/PPH)	128,53	126,32	124,80	122,95	121,4
PPH	84,80	85,20	85,70	88,50	89,1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara cenderung berhasil melakukan penurunan terhadap konsumsi beras dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2013, konsumsi beras sebesar 130,61 kg/kap/th/pph dan menurun menjadi 122,95 kg/kap/th/pph pada tahun 2017. Begitu juga jika dilihat dari skor Pola Pangan Harapan yang semakin membaik, walaupun

kenaikan skor pola pangan harapan tidak naik secara signifikan tetapi cukup baik.

2.3.2.4. PERTANAHAN

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan.

a. Jumlah Luas Lahan Bersertifikat

Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) jenis-jenis kepemilikan tanah tersebut terdiri dari:

- 1. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat mempunyai orang atas tanah.
- 2. Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lambat 25 tahun.
- 3. Hak guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- 4. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah Negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha milik Daerah (BUMD).

Jumlah lahan bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.91
Jumlah Lahan Bersertifikat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelola	Hak Guna Usaha
Kab. Deli Serdang	13.369	2.684	65	-	-
Kab. Langkat	4.620	72	125	-	-
Kab. Karo	2.344	3	4	1	-
Kab. Simalungun	5.419	56	7	-	-
Kab. Dairi	1.596	-	-	-	-
Kab. Asahan	5.437	34	10	-	-
Kab. Batubara	-	-	-	-	-

Kabupaten/Kota	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelola	Hak Guna Usaha
Kab. Labuhan Batu	2.269	21	2	-	9
Kab. Labusel	-	-	-	-	-
Kab. Labura	-	-	-	-	-
Kab. Tapanuli Utara	1.510	4	-	-	-
Kab. Tapanuli Tengah	2.110	-	3	-	-
Kab. Tapanuli Selatan	397	1	12	-	-
Kab. Padang Lawas	1.724	1	3	-	-
Kab. Paluta	930	1	2	-	-
Kab. Nias	2.107	10	48	-	-
Kab. Nias Utara	-	-	-	-	-
Kab. Nias Barat	-	-	-	-	-
Kab. Mandailing Natal	1.678	5	8	-	14
Kab. Toba Samosir	997	-	-	-	-
Kab. Nias Selatan	445	1	7	-	-
Kab. Pak pak Bharat	115	1	1	-	-
Kab. Humbang Hasundutan	1.175	-	33	-	-
Kab. Samosir	1.198	-	2	-	-
Kab. Serdang Bedagai	4.228	21	21	-	1
Kota Medan	12.331	1.488	15	-	-
Kota Binjai	1.110	40	2	-	-
Kota Tebing Tinggi	1.361	93	6	-	-
Kota Pematang Siantar	2.031	199	23	-	-
Kota Tanjung Balai	467	1	5	-	-
Kota Sibolga	97	-	-	-	-
Kota Padang Sidempuan	205	15	22	-	-
Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	71.270	4.751	426	1	25

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2017, BPS Provsu

Dari tabel tersebut dapat lihat bahwa perkembangan kepemilikan tanah di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 untuk jenis kepemilikan tanah Hak Milik yang tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 13.369 sertifikat dan yang terendah di Kota Sibolga sebanyak 97 sertifikat, untuk Hak Guna Bangunan yang tertinggi berada Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2.684 sertifikat sedangkan yang terendah sebanyak 1 (satu) sertifikat berada dibeberapa kabupaten yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, untuk Hak Pakai yang tertinggi di Kabupaten Langkat 125 sertifikat dan yang terendah di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 1 (satu) sertifikat, sedangkan untuk Hak Pengelola hanya di Kabupaten Karo dan untuk Hak Guna Usaha yang tertinggi di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 14 sertifikat dan yang terendah di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) sertifikat.

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan peraturan mengenai penyelesaian kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen Agraria No. 11/2016”) yang mulai berlaku sejak 14 April 2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kasus Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas (“Sengketa”), perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas (“Konflik”), atau perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan (“Perkara Pertanahan”) untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Sumatera Utara dari tahun 2014-2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.92
Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Jumlah Kasus Tanah	Ditindak lanjuti
1.	2014	NA	NA
2.	2015	NA	NA
3.	2016	309	117
4.	2017	277	106
5.	2018*	277	106

Sumber : Biro Pemerintahan
*) Angka Sementara

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tanah pada tahun 2016 sebesar 309 kasus namun yang ditindaklanjuti hanya sebanyak 117 kasus, selanjutnya pada tahun 2017 jumlah kasus tanah sebesar 277 kasus namun yang ditindaklanjuti hanya 106 kasus.

2.3.2.5. LINGKUNGAN HIDUP

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup versi baru (IKLH baru) merupakan istilah baru yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. IKLH versi baru ini dikembangkan dengan cara menggabungkan semua komponen indeks yang mencakup Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH), Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM), dan Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL).

Nilai IKLH Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.93
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018

Indeks	2014	2015	2016	2017	2018
IKA	56,67	76,00	75,43	80	77,50
IKU	87,23	88,15	79,20	87,32	85,59
IKTL	45,89	50,32	50,21	45,32	45,60
IKLH	62,91	69,37	66,47	68,34	67,17

Sumber : Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Utara
Catatan:
1. IKA (Indeks Kualitas Air) ; Angka Indeks semakin tinggi, semakin baik
2. IKU (Indeks Kualitas Udara); Angka Indeks semakin tinggi, semakin baik
3. IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan); Angka Indeks semakin tinggi, semakin baik
4. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) ; Angka Indeks semakin tinggi, semakin baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sumatera Utara cenderung tidak stabil. Dimana pada tahun 2014 nilai IKLH sebesar 62,91 meningkat pada tahun 2015 sebesar 69,37 tetapi kualitas lingkungan hidup di Sumatera Utara kembali menurun menjadi 66,47 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 68,34 dan mengalami sedikit penurunan hingga tahun 2018 menjadi 67.17. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas

lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain erupsi Gunung Sinabung dan Kebakaran Hutan.

b. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2014 Indeks Kualitas Air sebesar 56,67 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 76,00 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 80 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 77,50. Perkembangan Indeks Kualitas Air dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.94
Indeks Kualitas Air Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kualitas Air	56,67	76,00	75,43	80	77,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan, pada tahun 2014 Indeks Kualitas Udara sebesar 87,23 dan mengalami peningkatan pada hingga tahun 2017 sebesar 87,32, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 85.59 persen, perkembangan Indeks Kualitas Udara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.95
Indeks Kualitas Udara Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kualitas Udara	87,23	88,15	79,20	87,32	85,59

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Berikut dampak-dampak yang di akibatkan dari penurunan Indeks kualitas udara, yaitu:

1. Dampak Kesehatan

Substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikulat berukuran

besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), termasuk di antaranya, asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya.

2. Dampak Terhadap Tanaman

Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis, merusak estetika, mengganggu kenyamanan, merusak gedung, kantor, dan perumahan.

3. Hujan Asam

PH normal air hujan adalah adanya CO_2 di atmosfer. Pencemar udara seperti SO_2 dan NO_2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara lain: mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman dan melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan.

4. Efek Rumah Kaca

Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan gas-gas rumah kaca yaitu CO_2 , CFC, NH_3 , H_2S , NO_x , CH_4 , N_2O di lapisan udara. Jumlah gas rumah kaca pada saat ini sangat banyak sehingga menghalangi energi matahari yang masuk ke bumi untuk dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Akibatnya suhu bumi naik yang selanjutnya mengakibatkan fenomena global warming (pemanasan global). Dampak dari pemanasan global antara lain; pencairan es di kutub, naiknya permukaan air laut, perubahan iklim regional dan global yang dikenal juga sebagai iklim ekstrim, perubahan siklus hidup flora dan fauna, dan tenggelamnya kota-kota di tepi laut. Dampak dari pemanasan global sangat merugikan pada sektor pertanian, perikanan dan

kesehatan sehingga perlu dilakukan upaya menurunkan intensitas keberadaan gas-gas rumah kaca yang dikenal sebagai upaya mitigasi. Selain itu perlu juga dilakukan upaya penyesuaian kegiatan pertanian, perikanan dan lainnya terhadap perubahan iklim yang dikenal sebagai upaya adaptasi.

Berdasarkan hasil penelitian tim Kementerian Lingkungan Hidup Jepang bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sejak tahun 2016, analisis dampak perubahan iklim di Sumatera Utara telah terjadi kecenderungan peningkatan suhu rata-rata harian sebesar 1 derajat celcius, peningkatan jumlah hari dengan suhu ekstrim di musim kemarau, perubahan tekanan udara dan kenaikan permukaan air laut.

5. Kerusakan Lapisan Ozon

Lapisan ozon yang berada di stratosfer (ketinggian 20-35 km) merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultra violet B dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon (O₃) terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan sinar UV-B matahari tidak terfilter dan dapat mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman.

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Indeks tutupan lahan di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.

Tabel. 2.96
Indeks Tutupan Lahan Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Tutupan Lahan	45,89	50,32	50,21	45,32	45,60

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

e. Penurunan Emisi GRK (TEqCO2)

Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Selain gas CO2, yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah, Dinitrogenoksida (N2O) serta beberapa senyawa organik seperti gas metana (CH4) dan klorofluorokarbon (CFC). Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca. Yang berakibat meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrem di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan tinggi muka air laut, perubahan pola angin, meningkatnya badai atmosferik, perubahan pola hujan dan siklus hidrologi dan lain-lain dan akhirnya berdampak pada ekosistem hutan, daratan, dan ekosistem alam lainnya.

Sumber emisi GRK di Provinsi Sumatera Utara yang terbesar berasal dari sektor berbasis lahan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut (12,2%), kemudian sektor yang berbasis energi, yaitu sektor industri (4,7%), energi (2,5%) transportasi (1,8%) dan yang terendah adalah sektor pengelolaan limbah (1,6%). Capaian penurunan emisi GRK Provinsi Sumatera Utara 2010-2017 sebesar 13,21 juta ton eCO2 atau 5,03 % emisi baseline BAU sampai tahun 2020. Berikut adalah tabel kondisi emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co2Eq) di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2014 – 2018.

Tabel. 2.97
Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co2Eq)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018

	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Total Emisi GRK (Ton Co2Eq)	31.883.670	53.987.270	48.306.780	50.790.000	50.790.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara hanya mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 13,21 Juta Ton Co2Eq dari target 64 Juta Ton Co2Eq dari masing-masing sektor.

f. Penurunan Timbulan Sampah (M³/Hari)

Sampah merupakan semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat, lumpur, cair maupun gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi (Damanhuri dan Padmi, 2004). Sampah dapat pula diartikan sebagai buangan yang bersifat padat yang terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-2454- 2002).

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Timbulan sampah akan bervariasi berdasarkan lokasi/wilayah pemukiman, tingkat pendapatan rata-rata warga setempat serta komponen sumber sampah.

Timbulan sampah dapat dinyatakan dalam satuan volume atau berat. Apabila satuan yang digunakan adalah volume, maka cara menghitung timbulan sampah adalah dengan mengetahui kapasitas volume kendaraan pengangkut dalam 1 (satu) minggu. Untuk menghitung volume timbulan sampah dalam 1 (satu) tahun, maka volume dalam 1 (satu) minggu dikalikan dengan 52.

Dengan mengetahui timbulan sampah, maka data ini dapat digunakan untuk bahan perencanaan pengelolaan sampah baik skala RT/RW, skala kawasan maupun skala kota.

Tabel. 2.98
Volume Timbunan Sampah di Sumatera Utara
Tahun 2014 – 2018

No.	Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah (m ³ /hari)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Medan	3.378,41	3378	3378,41	1383,50	1.588,71
2	Kota Binjai	265,23	265	265,23	133,95	192,55
3	Kota Tebing Tinggi	162,45	162	162,45	80,34	114,30
4	Kota Pematang Siantar	256,79	257	256,79	125,76	177,81
5	Kota Tanjung Balai	154,55	155	154,55	68,47	121,83
6	Kota Sibolga	84,81	85	84,81	43,55	61,12
7	Kota Padang Sidempuan	201	201	201,00	86,41	121,83
8	Kota Gunung Sitoli	120,65	121	120,65	55,71	99,06
9	Kab. Deli Serdang	2.950,78	2951	2950,78	1057,31	1.523,31
10	Kab. Langkat	1.393,01	1393	1393,01	411,32	730,27
11	Kab. Asahan	913,87	914	913,87	359,36	508,40
12	Kab. Dairi	303,49	303	303,49	112,75	96,04
13	Kab. Labuhan Batu	437,94	438	437,94	191,44	343,33
14	Kab. Labuhanbatu Selatan	308,23	308	308,23	130,73	235,28
15	Kab. Labuhanbatu Utara	358,69	359	358,69	143,08	253,40
16	Kab. Simalungun	1.222,51	1223	1222,51	429,61	605,07
17	Kab. Tapanuli Utara	302,46	302	302,46	119,12	210,41
18	Kab. Tapanuli Tengah	312,77	313	312,77	145,48	261,53
19	Kab. Tapanuli Selatan	285,51	286	285,51	111,43	196,41
20	Kab. Mandailing Natal	444,33	444	444,33	219,75	311,40
21	Kab. Karo	444,32	444	444,32	161,28	288,79
22	Kab. Nias	121,48	121	121,48	55,04	311,40
23	Kab. Nias Selatan	281,66	282	281,66	125,76	222,78
24	Kab. Nias Utara	122,32	122	122,32	54,44	96,04
25	Kab. Nias Barat	75,55	76	75,55	25,74	261,53
26	Kab. Humbang Hasundutan	182,59	183	182,59	74,68	132,38
27	Kab. Pakpak Barat	42,08	42	42,08	14,15	34,01
28	Kab. Toba Samosir	198,93	199	198,93	72,72	127,95
29	Kab. Serdang Berdagai	848,93	849	848,93	257,13	429,91
30	Kab. Samosir	135,4	135	135,40	37,53	87,99
31	Kab. Batu Bara	403,88	404	403,88	163,64	290,01
32	Kab. Padang Lawas	243,76	244	243,76	107,92	194,88
33	Kab. Padang Lawas Utara	243,49	243	243,49	105,16	189,21
Total		17.201,87	17.202	17.201,87	6.664,26	10.137,92

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah timbunan sampah di Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak ada mengalami perubahan yaitu rata-rata sebesar 1.701,87 m3/hari, tetapi pada tahun 2017 timbunan sampah mengalami Penurunan sebesar 6.664,26 m3/hari, terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi 10.137,92 Hal ini dapat diartikan bahwa penanganan sampah di Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan dengan baik, baik dari segi pengumpulan, mapun pengolahannya seperti kegiatan 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*).

2.3.2.6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel. 2.99
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	NA	49,07 %	74,59%	74,44%	82,86%
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	NA	45,14 %	60,58%	63,11%	69,82%
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	NA	10,88 %	13,79%	16,25%	23,06%
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	NA	NA	NA	2 Sektoral	3 Sektoral
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	NA	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	NA	4.959.125	7.711.692	7.793.600	8.684.137
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	NA	2.002.532	2.687.193	2.994.357	3.519.127

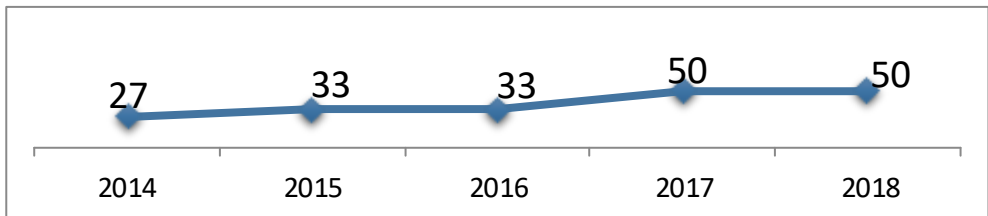
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu

Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk di Sumatera Utara mengalami peningkatan hingga 2018 sebesar 82.86 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara telah membuat Database Kependudukan Skala Provinsi. Namun masih terus ditingkatkan keakuratannya. Pada Tahun 2018 pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 8.684.137 dan Akta Kelahiran sebanyak 3.519,127.

2.3.2.6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

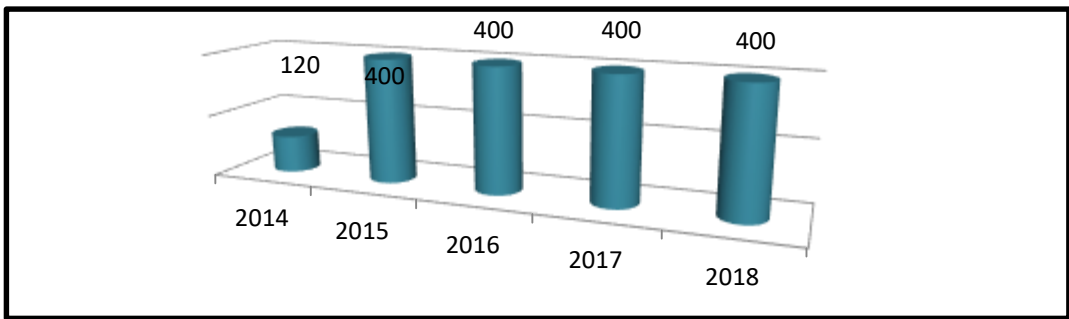
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, perkembangan capaian Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada Grafik :



Grafik. 2.53
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2014-2018

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

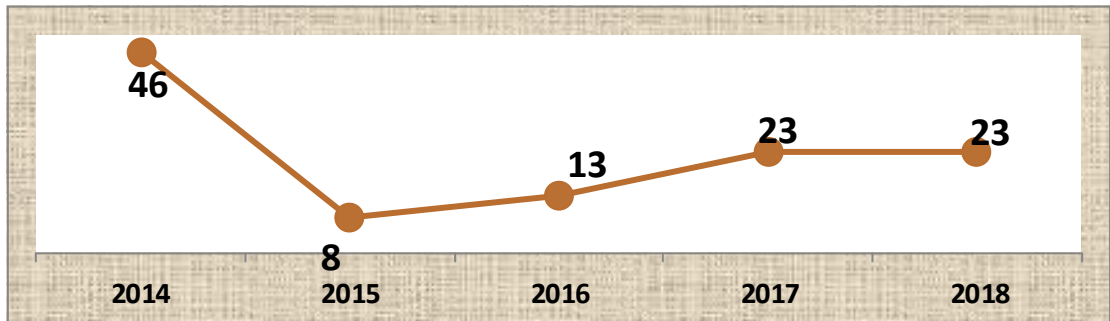
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2018 fluktuatif, terjadi peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 120 meningkat hingga 2018 sebesar 400, perkembangan dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :



Grafik. 2.54
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2014-2018

c. Persentase Lsm Aktif

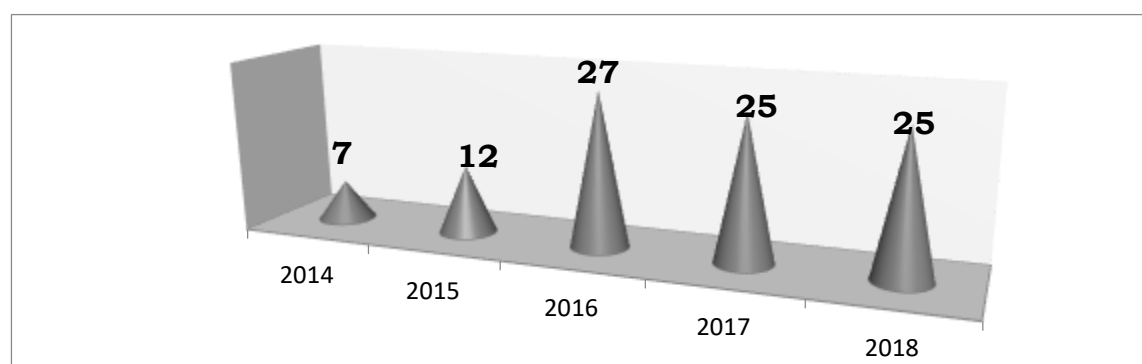
Persentase LSM aktif sejak tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 46 persen, namun terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 8 persen dan meningkat kembali pada tahun 2016 hingga 2018 sebesar 23 persen. Sebagaimana terlihat pada Grafik dibawah ini :



Grafik. 2.55
Persentase LSM Aktif Tahun 2014-2018

d. Persentase LPM Berprestasi

Persentase LPM Berprestasi sejak tahun 2014 hingga 2018 fluktuatif, terjadi peningkatan pada tahun 2014 dari 7 persen menjadi 12 persen (2015), kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar 27 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 25 persen. Sebagaimana terdapat pada Tabel dibawah ini :

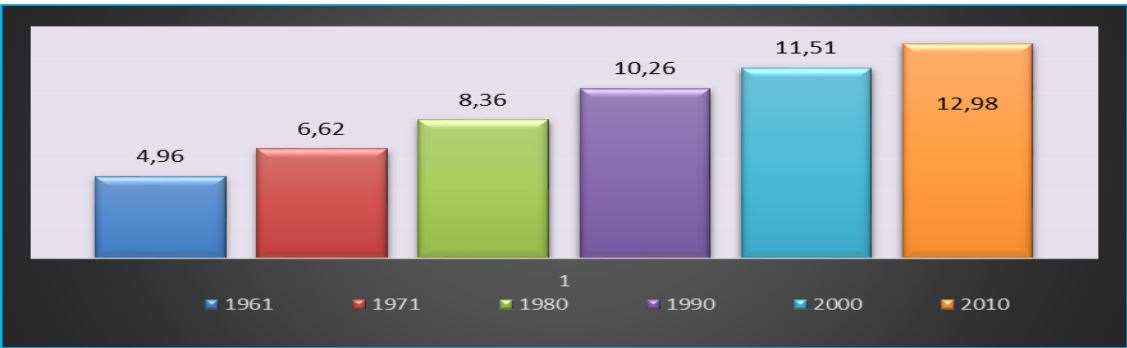


Grafik. 2.56
Persentase LPM Berprestasi Tahun 2014-2018

2.3.2.7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

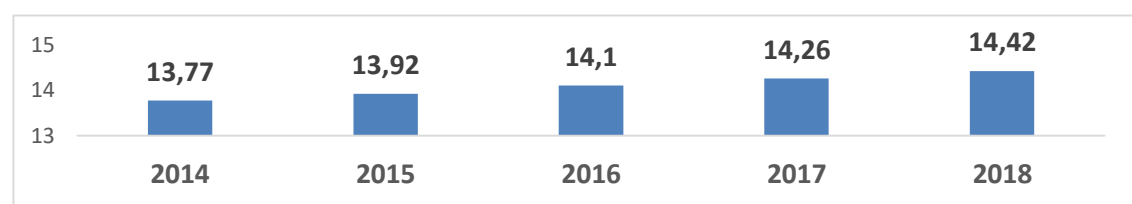
Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dari hasil sensus penduduk 2000, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa, selanjutnya pada hasil sensus penduduk bulan Mei 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara 12.982.204 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2000 sebesar 161 jiwa per km², laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2000-2010 adalah 1.22 persen pertahun.



Sumber : Sumatera Utara dalam Angka 2018

Grafik. 2.57
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk

Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Utara tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebanyak 14,42 juta jiwa berdasarkan proyeksi penduduk 2010, dalam 6 (enam) tahun terakhir, perkembangan dapat dilihat pada Grafk dibawah ini :

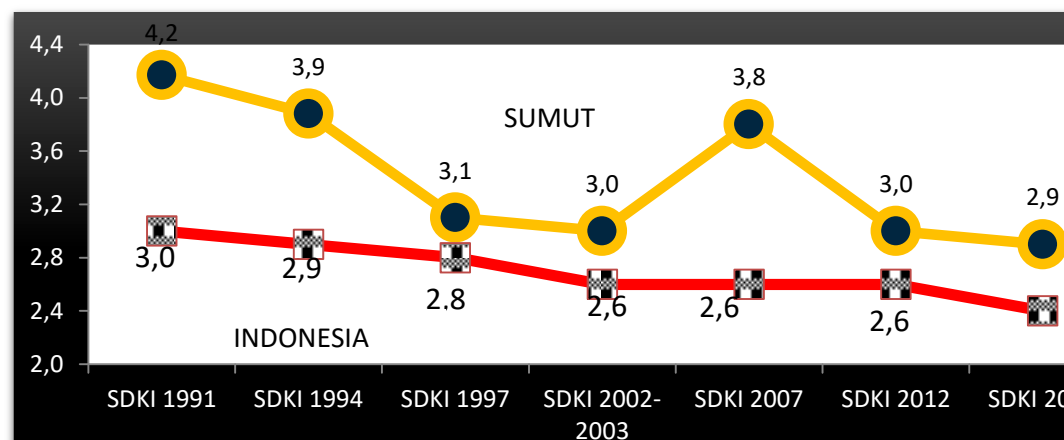


Sumber : BPS Sumatera Utara 2018

Grafik. 2.58
Perkembangan Jumlah Penduduk
Sumatera Utara 2014-2018 (Juta Jiwa)

b. Total Fertility Rate (TFR)

Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik. 2.59
TFR Indonesia dan Sumatera Utara
Tahun 1991-2017

Berdasarkan grafik diatas TFR Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan yang signifikan kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dimana pada tahun 2007, TFR beradapada angka 3,8 dan turun menjadi 2,9 pada tahun 2017. Namun,angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka nasional pada tahun 2017 yaitu 2,4.

c. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga sejak tahun 2014 hingga 2017 fluktuatif, pada tahun 2014 rata rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,27, terjadi peningkatan pada tahun 2015 (2,28)

hingga 2016 sebesar 2,66 namun pada tahun 2017 terjadi penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga menjadi 2,46 persen, perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga dapat dilihat pada Grafik dibawah :

Tabel. 2.100
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018*
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	2.27	2.28	2.66	2.46	2.46

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
*) Data Sementara

d. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 PUS yang memakai CPR sebanyak 51,7% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 58,9 % masih dibawah capaian tingkat nasional yaitu 61%. Ini membuktikan belum optimalnya tenaga penyuluh pelayanan KB dalam mendorong PUS untuk menggunakan kontrasepsi khususnya kontrasepsi jangka panjang.

Tabel. 2.101
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS Tahun 2014-2018

Inikator	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS	NA	NA	51,7	58,9	54,00

Sumber : Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP Tahun 2018)

e. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)

Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (*Age specific fertility rate*/ASFR 15-19 tahun) menunjukkan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Sejumlah artikel menjelaskan ASFR 15-19 tahun sebagai *Adolescent birth rate-ABR*.

Sejalan dengan semakin tingginya kesadaran perempuan di Provinsi Sumatera Utara akan pentingnya kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Berikut Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19).

Tabel. 2.102
Angka Kelahiran Perempuan Kelompok Usia 15–19 Tahun
(ASFR 15–19) Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kelahiran Perempuan Kelompok Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	NA	30,20	30,20	36	19,16

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mengatasi permasalahan peningkatan kelahiran pada perempuan kelompok usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan program Generasi Berencana (Genre) dengan tujuan meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang kependudukan dan permasalahannya seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan Napza, HIV-AIDS dan pernikahan dini serta pengetahuan tentang program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

f. Cakupan Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)

Unmeet need merupakan indikator yang mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah. Berikut adalah Cakupan Kebutuhan ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Provinsi Sumatera Utara :

Tabel. 2.103
***Unmet Need* Sumatera Utara Tahun 2014-2018**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Unmet Need</i> Sumatera Utara	NA	37.46	21	10.7	11.54

Sumber : Susenas 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) terlihat pada tabel sebesar 37,46 persen terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 10,7 persen, namun terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar 18 persen.

g. Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 pemakaian MKJP sebanyak 27,6 persen meningkat pada tahun 2017 menjadi 36,1 persen, ini membuktikan bahwa masih diperlukannya tenaga penyuluh pelayanan KB untuk menginformasikan tentang MKJP. Hal ini terlihat pada Tabel berikut :

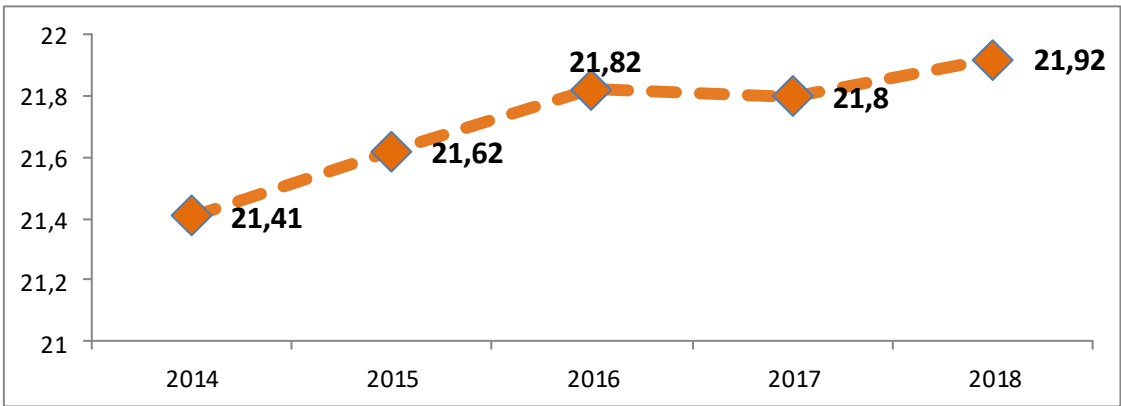
Tabel. 2.104
Unmet Need Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Unmet Need Sumatera Utara	NA	NA	27.6	40.18	33.07

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu

h. Median Usia Kawin Pertama

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang sejak tahun 2014-2018 melaporkan bahwa median usia kawin pertama bagi perempuan mengalami peningkatan di Sumatera Utara, yaitu dari 21,41 tahun pada tahun 2014 meningkat menjadi 21,82 tahun pada tahun 2016 dan menurun sedikit menjadi 21,80 pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 sebesar 21.92 . Hal ini dapat terlihat pada Grafik berikut ini :



Grafik. 2.60
Median Usia kawin Pertama bagi Perempuan
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

i. Kampung KB

Sejak Presiden RI Bapak Joko Widodo mencanangkan Kampung KB pertama di Indonesia di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di Seluruh Indonesia maka di Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk sebanyak 450 Kampung KB pada 33 Kabupaten/Kota sampai tahun 2017, dengan distribusi per Kabupaten/Kota adalah :

Tabel. 2.105
Data Kampung KB Sumatera Utara Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	KAMPUNG KB
1	Nias	10
2	Mandailing Natal	23
3	Tapanuli Selatan	14
4	Tapanuli Tengah	21
5	Tapanuli Utara	14
6	Toba Samosir	16
7	Labuhan batu	9
8	Asahan	25
9	Simalungun	32
10	Dairi	15
11	Karo	28
12	Deli Serdang	22
13	Langkat	23
14	Nias Selatan	28
15	Humbang Hasundutan	11
16	Pakpak Bharat	8
17	Samosir	9
18	Serdang Bedagai	17
19	Batu Bara	7
20	Padang Lawas Utara	12
21	Padang Lawas	11
22	Labuhanbatu Selatan	6
23	Labuhanbatu Utara	8
24	Nias Utara	12
25	Nias Barat	8
26	Sibolga	4
27	Tanjungbalai	6
28	Pematang Siantar	8
29	Tebing Tinggi	5
30	Medan	21
31	Binjai	5
32	Padangsidempuan	6
33	Gunungsitoli	6
SUMATERA UTARA (440 KECAMATAN)		450

j. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) maka Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun GDPK sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 telah menyusun GDPK dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang GDPK Provinsi Sumatera Utara. Sampai akhir tahun RPJMD, dari 33 kabupaten/kota sebanyak 3 daerah telah menyusun GDPK yaitu Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebanyak 16 (enam belas) Kab/kota sedang berproses dan selebihnya yaitu 14 (empat belas) kab/kota belum melakukan penyusunan. Penyusunan GDPK yang mencakup 5 aspek yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan Penataan Administrasi Kependudukan dengan roadmap 25 tahunan merupakan dokumen yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin terlaksana dan terintegrasinya pembangunan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih akan terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk menyusun dan menetapkan GDPK.

2.3.2.8. PERHUBUNGAN

Fasilitas sarana perhubungan di provinsi Sumatera Utara terbagi atas transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, kereta api, dan transportasi angkutan danau/penyeberangan.

Hingga tahun 2018, fasilitas terminal angkutan darat yang tersedia di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 39 buah dengan perincian 7 (tujuh) terminal tipe A, 15 terminal tipe B, dan 17 terminal tipe C.

Pada akhir tahun 2018, telah diserahkan sebanyak 4 (empat) Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Sumatera Utara yaitu:

Tabel. 2.106
Terminal Tipe B yang Menjadi Kewenangan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No	Terminal	Kab/Kota	Tipe	Luas (m2)	Kapasitas
1	Kabanjahe	Karo	B	1.500	20 Bus. 150 Angdes
2	Bahorok/ Bukit Lawang	Langkat	B	3.496	
3	Pasar X/Tanjung Beringin	Langkat	B	20.000	30 Bus. 100 MPU
4	Sijambi	Tanjungbalai	B	22.000	50 Bus. 100 MPU

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2018 (data diolah)

Tabel. 2.107
Realisasi Pembangunan Fasilitas Keselamatan
Lalu Lintas Tahun 2014-2018

No	Kegiatan	Realisasi								Total	
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Volume		Volume		Volume		Volume		Volume	
1	Rambu Lalu Lintas	1.100	buah	1.120	buah	1.421	buah	700	buah	4.341	buah
2	Marka Jalan	1.600	m	0	m	84.479	m	212.900	m	298.979	m
3	Guardrail	-	m	-	m	2.006	m	2.392	m	4.398	m
4	Rambu Perairan	50	unit	-25	unit	75	unit	-	unit	150	unit
5	ZOSS	-	lok	-	lok	3	lok	0	lok	3	lok
6	APILL	-	lok	-	lok	7	lok	8	lok	15	lok
7	Paku Jalan	-	bh	9.000	bh	8.974	bh	0	bh	17.974	bh
8	Delineator	3.000	bh	2.900	bh	3.395	bh	3.500	bh	12.795	bh
9	LPJU	-	bh	-	bh	40	bh	28	bh	68	bh
10	RPPJ	-	bh	-	bh	-	bh	-	bh	-	bh
11	VMS	0	unit	2	unit	-	unit	200	unit	202	unit
12	Alat Uji Emisi Gas Buang	2	unit	2	unit	-	unit	-	unit	4	unit

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu 2018 (Data diolah)

Dengan semakin baiknya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan diharapkan akan berdampak pada menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Adapun jumlah kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sumatera Utara untuk periode tahun 2014-2018 mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan pada Grafik di berikut ini :

Tabel. 2.108
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018*
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	6.112	6.396	6.276	5.308	5.308

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018
*) Angka Sementara

Mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 432 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, jumlah dan tipe Pelabuhan laut di Sumatera Utara adalah Penetapan Lokasi dan Hierarki Pelabuhan Laut sebanyak 22 Pelabuhan sedangkan untuk Rencana Lokasi dan hierarki Pelabuhan sebanyak 36 Pelabuhan dengan perincian sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 2.109
Jumlah dan Tipe Pelabuhan Laut

No.	Kabupaten/ Kota	Lokasi / Nama Pelabuhan	Tipe Pelabuhan	Keterangan
1.	Asahan	Tanjung Balai Asahan/Teluk Nibung	Pelabuhan Pengumpul	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
2.	Asahan	Bagan Asahan	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
3.	Asahan	Sei Nangka	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
4.	Asahan	Sei Belimbing	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
5.	Asahan	Silau Baru	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
6.	Batubara	Kuala Tanjung	Pelabuhan Utama	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
7.	Batubara	Pangkalan Dodek	Pengumpan Lokal	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
8.	Batubara	Tanjung Tiram	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
9.	Batubara	Kampung Lalang	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
10.	Batubara	Perupuk / Medang Beras	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
11.	Deli Serdang	Pantai Labu	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
12.	Deli Serdang	Percut	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
13.	Deli Serdang	Rantau Panjang	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
14.	Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pengumpul	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
15.	Labuhan Batu	Sei Berombang	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
16.	Labuhan Batu	Tanjung Sarang Elang	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
17.	Labuhan Batu	Ajamu	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
18.	Labuhan Batu	Gajah Mati	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
19.	Labuhan Batu	Pantai Pukat	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
20.	Labuhan Batu	Sei Kubung	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan

No.	Kabupaten/ Kota	Lokasi / Nama Pelabuhan	Tipe Pelabuhan	Keterangan
21.	Labuhan Batu Utara	Teluk Leidong	Pengumpul	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
22.	Labuhan Batu Utara	Simandulang	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
23.	Langkat	Pangkalan Susu	Pengumpul	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
24.	Langkat	Pangkalan Berandan	Pengumpul	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
25.	Langkat	Pulau Kampal	Pengumpan Lokal	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
26.	Langkat	Tanjung Pura	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
27.	Langkat	Kuala Sarapuh	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
28.	Langkat	Tapak Kuda	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
29.	Mandailing Natal	Natal/Sikara-kara	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
30.	Mandailing Natal	Palimbungan Ketek	Pengumpul	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
31.	Mandailing Natal	Batahan	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
32.	Mandailing Natal	Singkuang	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
33.	Mandailing Natal	Tabuyung	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
34.	Medan	Belawan	Pelabuhan Utama	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
35.	Nias Barat	Sirombu	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
36.	Nias Selatan	Pulau Tello	Pengumpul	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
37.	Nias Selatan	Teluk Dalam	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
38.	Nias Selatan	Labuhan Hiu	Pengumpul Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
39.	Nias Selatan	Lagundri	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
40.	Nias Selatan	Lahusa	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
41.	Nias Selatan	Moale	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
42.	Nias Selatan	Pulau Simuk	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
43.	Nias Selatan	Pulau Tanah Masa	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
44.	Nias Selatan	Pulau Bais	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
45.	Nias Selatan	Pulau Tanah Bala	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
46.	Nias Selatan	Saero	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
47.	Nias Selatan	Solonako	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
48.	Nias Utara	Lahewa	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
49.	Nias Utara	Afulu	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
50.	Nias Utara	Lehelewau	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
51.	Nias Utara	Tuhemberua	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
52.	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
53.	Serdang Bedagai	Pantai Cermin	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
54.	Serdang Bedagai	Labuhan Bilik	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
55.	Serdang Bedagai	Sialang Buah	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
56.	Sibolga	Sibolga	Pengumpul	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
57.	Sibolga	Hinako	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan

No.	Kabupaten/ Kota	Lokasi / Nama Pelabuhan	Tipe Pelabuhan	Keterangan
58.	Tapanuli Tengah	Barus	Pengumpan Lokal	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
59.	Tapanuli Tengah	Oswald Siahaan/ Labuhan Angin	Pengumpan Regional	Penetapan Lokasi & hierarki Pelabuhan
60.	Tapanuli Tengah	Sigolo - golo	Pengumpan lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
61.	Tapanuli Tengah	Manduamas	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
62.	Tapanuli Tengah	Muara Tapus	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan
63.	Tapanuli Tengah	Sorkam	Pengumpan Lokal	Rencana Lokasi & Hierarki Pelabuhan

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 901 Tahun 2016

Saat ini, pelabuhan Belawan memiliki keterbatasan untuk dikembangkan akibat kondisi fisik memiliki kedalaman alur yang sangat terbatas sehingga tidak memadai untuk menunjang angkutan laut secara efektif, sehingga perlu didukung dengan pengembangan pelabuhan alternatif di Kuala Tanjung dan pelabuhan lainnya. Data fasilitas di Pelabuhan belawan berikut kapasitasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 2.110
Fasilitas Pelabuhan Belawan Tahun 2018

No	Nama/Lokasi	Sat	Nilai	Keterangan
1.	ALUR KOLAM	Mil	8	Lebar 100 m, kedalaman -10 m LWS -6 s/d -10 LWS
2.	TERMINAL TERMINAL PENUMPANG Kapal Peln	M	100	Gd. Terminal Penumpang 882 m ²
	TERMINAL CURAH CAIR	M	300	105 – 106 Ujung Baru
	1) Minyak Sawit	M	75	Jetty + SMB Offshore
	2) BBM			
	TERMINAL CURAH KERING	M	100	104 Ujung Baru
	1) Pupuk	M	100	PT SAI, Kolam Citra
	2) Semen	M	190	Ujung Barura
	3) Bungkil	M	2.184	Belawan Lama, Ujung Baru dan Kolam Citra
	TERMINAL GENERAL CARGO			
3.	TPS (TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA)			
	Container Yard (CY)	M2	14.846	Penanganan Peti Kemas Antar Pulau
	Container Freight Station (CFS)	M2	19.502	Penanganan LCL Cargo

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu

Tabel. 2.111
Fasilitas Dermaga di Pelabuhan Belawan Tahun 2018

No	Uraian	Panjang	Luas (m ²)
DERMAGA			
1	Belawan Lama	688,71	9.832,82
2	Ujung Baru	1.669,75	20.906,73
3	Citra	625,00	8.937,50
4	IKD	300,00	7.500,00
	TOTAL	3.283,46	47.220,55

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu

Tabel. 2.112
Fasilitas Gudang di Pelabuhan Belawan Tahun 2018

No	Uraian	Unit	Luas (m²)
GUDANG			
1	Belawan Lama	4	3.013,30
2	Ujung Baru	6	24.124,50
3	Gudang Tertutup	2	1.457,20
4	Gudang Terbuka	3	1.935,00
5	Citra	3	16.800,00
	Total	18	47.330,21

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu

Tabel. 2.113
**Fasilitas Lapangan Penumpukan
di Pelabuhan Belawan Tahun 2018**

No	Uraian	Unit	Luas (m²)
LAPANGAN PENUMPUKAN			
1	Belawan Lama	5	10.580,87
2	Ujung Baru	9	32.212,92
3	Citra	8	40.634,86
4	IKD	1	9.390,00
5	Lapangan Container	2	34.348,00
	Total	25	127.166,65

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu

Hingga tahun 2018 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 11 pelabuhan udara dengan perincian: 1 (satu) bandara internasional Bandara Kuala Namu, dan 10 bandara perintis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.114
Pelabuhan Udara di Sumatera Utara Tahun 2018

No	Bandara	Landasan Pacu/ Runway (M)	Hierarki	Lokasi
1	Kuala namu	3.750 X 60	Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Deli Serdang
2	Polonia	2.900 X 45	Cargo dan TNI AURI	Kota Medan
3	Binaka	1.800 X 30	Pengumpan	Gunung Sitoli
4	Dr. F. L. Tobing	2.260 X 30	Pengumpan	Tapanuli Tengah
5	Sibisa	750 X 23	Pengumpan	Toba Samosir
6	Aek godang	1.400 X 30	Pengumpan	Padang Lawas Utara
7	Silangit	2.250 X 30	Pengumpan	Tapanuli Utara
8	Lasondre	1.400 X 30	Pengumpan	Nias Selatan

No	Bandara	Landasan Pacu/ Runway (M)	Hierarki	Lokasi
9	Bukit Malintang	2470 X 45	Pengumpan	Mandailing Natal (dalam tahap perencanaan)
10	Teluk Dalam	750 X 18	Pengumpan	Nias Selatan (dalam tahap perencanaan)
11	Simalungun	NA	Pengumpan	Simalungun (dalam tahap perencanaan)

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2013

Jaringan Transportasi Kereta Api di Sumatera Utara memiliki panjang rel keseluruhan 491,112 kilometer yang terdiri dari bantalan beton, bantalan besi dan bantalan kayu.

Tabel. 2.115
Panjang Lintasan Rel Kereta Api Tahun 2018

No.	Lintas	Panjang Lintas (M'sp)	Type Rel
1.	Medan – Tanjung Balai	1,000	R.42
		97,000	NP.34
		55,739	R.42
		20,703	NP.25
2.	Kisaran - Rantau Prapat	19,800	R.42
		8,400	NP.34
		85,720	R.42
3.	Tebing Tinggi – P. Siantar	500	NP.34
		47,967	R.25
4.	Medan – Kuala Namu	700	R.42
		40,706	R.25
5.	Binjai – Pkl. Brandan	65,915	R.25
6.	Pkl. Brandan - Besitang	14,990	R.25
7.	Besitang - Halaban	10,365	R.42
8.	Medan - Belawan	1,100	R.42
		20,507	R.25
JUMLAH		491,112	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Transportasi kereta api di Sumatera Utara dimanfaatkan untuk angkutan umum dan angkutan barang. Pertumbuhan jumlah penumpang dan pengiriman barang menggunakan moda kereta api ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.116
Jumlah Penumpang/Barang Menggunakan
Angkutan Kereta Api Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penumpang (orang)	397.471.175	397.552.994	406.460.906	460.432.727	419.596.186
2.	Jumlah Barang (ton)	119.293.212	110.076.436	124.217.520	134.602.495	151.701.426

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka (Data diolah)

Jumlah dermaga Angkutan Danau dan Penyeberangan di Sumatera Utara adalah 18 dermaga yang sebahagian besar berada di kawasan Danau Toba. Konstruksi dermaga penyeberangan terdiri dari dermaga kayu dan dermaga beton.

Tabel. 2.117
Dermaga Angkutan Danau dan Penyeberangan Tahun 2018

No.	Nama Dermaga	Luas Dermaga		Konstruksi
		Lantai (M2)	Areal (M2)	
1	Tongging	200,00	400,00	Beton
2	Haranggaol	250,00	630,00	Kayu
3	Tigaras	200,00	635,00	Beton
4	Tigaraja	268.70	3.200,00	Beton
5	Ajibata	162,00	900,00	Beton
6	Tomok	270,00	480,00	Beton
7	Ambarita	225,00	-	Beton
8	Simanindo	-	2.800,00	Beton
9	Pangururan	368,00	1.500,00	Beton
10	Nainggolan	100,00	240,00	Kayu
11	Onan Runggu	60,00	157.5	Beton
12	Balige	98,00	774,00	Beton
13	Muara	450,00	452,00	Beton
14	Mogang	70,00	450,00	Kayu
15	Bakkara	175,00	450,00	Beton
16	Silalahi	-	450,00	Beton
17	Batang Serai	-	-	Beton
18	Belawan Lama	-	-	Beton

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu

2.3.2.9. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian clean goverment dan good goverment melalui e-goverment. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu :

a. Informasi dan Komunikasi Publik, yang memiliki kewenangan *Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi* dengan capaian sebagai berikut :

- Tercatat/terpantaunya sejumlah surat kabar yang berada di Sumatera Utara yang terdiri dari :
 - ✓ Surat Kabar Harian (SKH) Nasional yaitu Kompas, Tempo, Sindo, Republika dan Koran Jakarta.
 - ✓ Surat Kabar Harian (SKH) lokal yaitu: Analisa, Andalas, Berita Sore, Harian Bersama, Warta Garuda, HarianGlobal, Harian Mandiri, Medan Bisnis, Medan Pos, Mimbar Umum, Perjuangan, Portibi, Posmetro Medan, Realitas, Sinar Indonesia Baru (SIB), Suara Rakyat Medan, Sumatera, Sumut Pos, Warta Kita, Waspada, Gebrak, Batak Pos, Tribun Medan, Jurnal Medan, Berita Medan, Bintang Sumatera, Gaya Medan, Koran Medan, Medan Ekspos , Suara Sumut, Harian Koreksi, Skala Indonesia, Pos Kota Sumatera dan Orbit.
 - ✓ Surat Kabar Mingguan yaitu : Aktual, Radar, Suara Buruh, Aplaus, Barisan Baru, IndependenSangkakala, Indonesia Baru, Indonesiaku, Koran Politik DOR, KoranSepak Bola GOL, Media Fakta, News Investigasi Indonesia, Senior, Suara Rakyat, Taruna Mandiri dan Suara Masa.
- Penyiaran Radio di Sumatera Utara yang terdiri dari :
 - ✓ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jasa Penyiaran Radio terdiri dari:RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, Radio Pemerintah Deli Serdang, Radio Pemerintah Serdang Bedagai, Radio Pemerintah Kota Siantar, Radio Pemerintah Tapanuli Tengah, Radio Pemerintah Pakpak Bharat, Radio Siaran Publik Daerah Labuhanbatu.
 - ✓ Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio sebanyak 145 stasiun radio.

- ✓ Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio sebanyak 15 stasiun radio.
- Penyiaran Televisi di Sumatera Utara yang terdiri dari :
 - ✓ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jasa Penyiaran Televisi ada 2 (dua) diantaranya : TVRI DAN TV Karo.
 - ✓ Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi ada 23 lembaga.
 - ✓ Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi ada 7 lembaga.
- Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

b. Aplikasi Informatika, yang memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu :

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, dengan capaian sebagai berikut :
 - ✓ Terbangun dan beroperasionalnya situs resmi Pemerintah Daerah Provinsi pada website (*http://www.sumutprov.go.id/*).
 - ✓ Terbangun dan beroperasionalnya situs resmi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, dengan capaian sebagai berikut :
 - ✓ Terbangunnya sistem jaringan informasi melalui LAN (Lokal Area Network), FO (Fiber Optic), RADIO LINK, WIRELESS, VPN-IP (Intranet) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - ✓ Terbangunnya sistem Sumut Smart Province yang diresmikan pada tanggal 20 Maret 2018, yang tujuannya untuk mendorong terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government*.

2.3.2.10. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Capaian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara tercatat mengalami penurunan dari 7.480 Unit pada tahun 2014 menjadi 6.142 Unit pada tahun 2017. Hal ini berdampak pada penurunan pada Persentase Koperasi aktif dari 60.95% pada tahun 2014 menjadi 57,26% pada tahun 2017. Sementara jumlah Usaha Mikro dan Kecil meningkat dari 2.855.399 Unit pada tahun 2014 menjadi 2.857.124 Unit pada tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.118
Jumlah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2014-2018

	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Koperasi Aktif	%	60.95	58.06	56.68	57.26	59,60
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	7.480	6.825	6.035	6.142	6.594
3	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	2.855.399	2.855.549	2.855.847	2.857.124	2.858.131

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provsu

2.3.2.11. PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Perkembangan Penanaman modal (Investasi) di Provinsi Sumatera Utara baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan, ini dapat dilihat pada capaian realisasi tahun 2014 untuk PMA sebesar Rp. 6.389.687,16 sedangkan untuk PMDN sebesar Rp. 5.231.905,85. Untuk tahun tahun 2015 realisasi investasi PMA sebesar Rp. 15.576.202,50 sedangkan untuk PMDN mengalami penurunan sebesar Rp. 4.287.417,30. Untuk lebih lengkapnya disampaikan pada tabel perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di bawah ini :

Tabel. 2.119
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA
Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Tahun 2014 s/d 2018

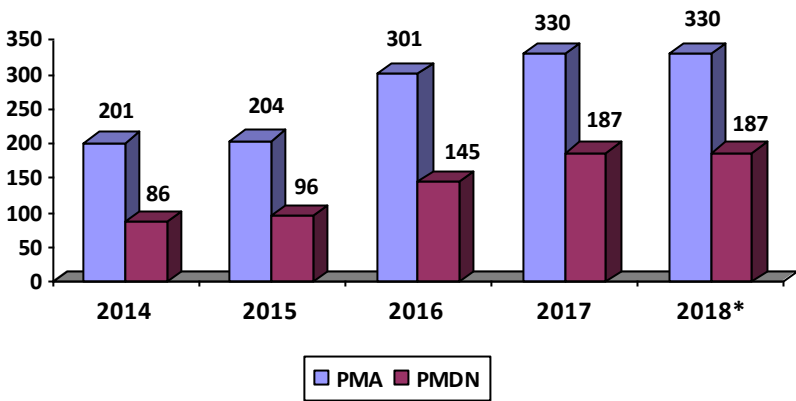
NO	TAHUN	PMA						PMDN					
		JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US\$.000)		INVESTASI (Rp. JUTA)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. JUTA)	TENAGA KERJA		INA	A
						INA	A						
1	2014	201	550,835.10	=	Rp 6,389,687.16	17,511	218	86	Rp 5,231,905.85	8,745	193		
2	2015	204	1,246,096.20	=	Rp 15,576,202.50	12,013	149	96	Rp 4,287,417.30	13,684	217		
3	2016	301	1,057,989.14	=	Rp 14,435,422.80	9,036	164	145	Rp 4,954,829.29	9,685	5		
4	2017	330	1,514,942.90	=	Rp 20,240,969.47	5,53	171	187	Rp 11,683,639.20	16,502	155		
5	2018	380	1,227,609.40	=	Rp 16,449,965.96	4,28	465	309	Rp 8,371,820.30	11,803	54		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Untuk investor yang berasal dari PMA mengalami peningkatan pada periode tahun 2014 sampai 2017, ini dapat dilihat pada tahun 2014 jumlah proyek PMA di Provinsi Sumatera Utara sebesar 201 proyek, tahun 2015 menjadi 204 proyek, untuk tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 301 proyek dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 330 proyek.

Bila dilihat investor yang berasal dari PMDN, jumlah proyek dari PMDN tidak lebih baik dari yang dicapai proyek di PMA. Ini dapat dilihat pada tahun 2014 jumlah proyek PMDN di Provinsi Sumatera Utara sebesar 86 proyek, sedangkan untuk tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 96 proyek, meningkat signifikan pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 menjadi 145 proyek, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 187. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :



*) angka sementara

Grafik. 2.61
Perkembangan Realisasi Jumlah Investor PMA/PMDN
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

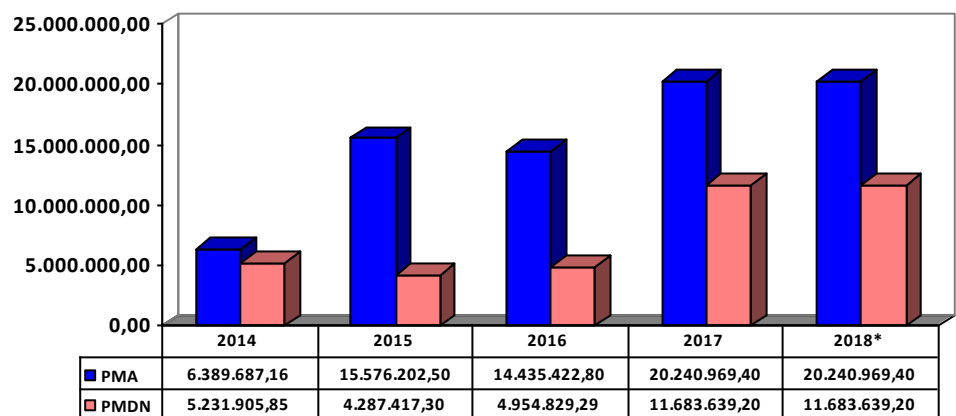
b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Untuk realisasi nilai investasi yang masuk ke Provinsi Sumatera Utara melalui investor yang berasal dari PMA pada tahun 2014 sebesar Rp. 6,38 triliun sedangkan untuk PMDN sebesar Rp. 5,23 triliun sehingga total nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 11,61 triliun.

Pada tahun 2015 realisasi investasi mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun 2014 karena disebabkan kurang tanggapnya pengusaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) baik di pusat maupun daerah. Maka untuk proyek PMDN yang nilai realisasi investasi sebesar Rp. 4,28 triliun sedangkan proyek PMA dengan realisasi investasi sebesar Rp. 15,57 triliun sehingga total realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 19,852 triliun.

Tahun 2016 untuk proyek PMDN yang telah direalisasikan investasi sebesar Rp. 4,95 triliun mengalami kenaikan dan peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk proyek PMA yang telah direalisasikan investasi sebesar Rp. 14,43 triliun mengalami penurunan dari tahun 2015. Sehingga total realisasi investasi menjadi Rp. 19,38 triliun.

Tahun 2017 untuk proyek PMDN yang telah direalisasikan investasi sebesar Rp. 11,68 triliun yang mengalami kenaikan, sedangkan proyek PMA dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 20,24 triliun. Sehingga total realisasi investasi adalah sebesar Rp. 31,92 yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2016. Perkembangan nilai investasi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :



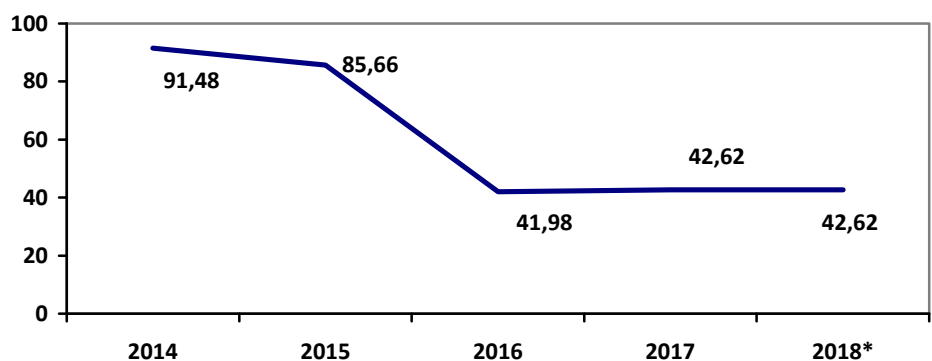
*) angka sementara

Grafik. 2.62
Perkembangan Realisasi Jumlah Nilai Investor
PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Pada Tahun 2014 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 91,48 mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 85,66, bila dibandingkan pada tahun 2015 perolehan di tahun 2016 menjadi 41,98 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2018 yaitu menjadi 42,62, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

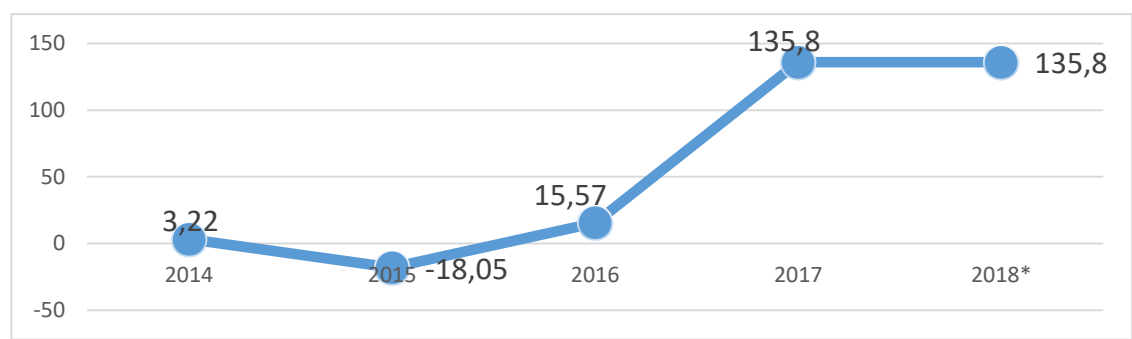


*) angka sementara

Grafik. 2.63
Perolehan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Pada tahun 2014 realisasi PMDN sebesar Rp. 5.231.905,85 sebesar 3.22 persen. Pada tahun 2015 perolehan nilai investasi dari PMDN sebesar Rp. 4.287.417,30 jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 18.05 persen. Mengalami lonjakan pada tahun 2016 (Rp. 4.954.829,29) sebesar 15.57 persen bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi di tahun 2015. Untuk tahun 2017 mengalami lonjakan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 11.683.639,20 jika dibandingkan dengan perolehan realisasi investasi dari PMDN tahun 2016 yaitu sebesar 135.80 persen. Grafik dapat dilihat seperti dibawah ini :



**) angka sementara*

Grafik. 2.64
Persentase Nilai Realisasi PMDN Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

e. Perizinan

Berdasarkan Pergub Nomor 37 tahun 2011 mengenai Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, belum keseluruhannya dilimpahkan dari OPD-OPD Teknis terkait. Pelimpahan Kewenangan berikutnya dilimpahkan berdasarkan Pergub Nomor 29 Tahun 2014, disusul pelimpahan berikutnya pada tahun 2016 berdasarkan Pergub Nomor 20 Tahun 2016 dan yang terakhir berdasarkan Pergub Nomor 66 Tahun 2017 yang terdiri dari 22 sektor bidang ijin.

Setiap tahunnya realisasi ijin yang diterbitkan melebihi target yang telah ditetapkan. Puncaknya terjadi pada tahun 2017 dimana realisasi jumlah ijin dan non ijin yang diterbitkan melampaui target lebih dari

1000%. Pada Tahun 2018 ini, setelah terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 pada 21 Juni 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu Online System Submission (OSS), dimana pelaku usaha diberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha secara elektronik untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha), sehingga terjadi penurunan dalam jumlah penerbitan izin dan non izin yang dilimpahkan kepada DISMPPTSP Provsu. Walaupun terjadi penurunan, tetapi realisasi jumlah izin dan non izin yang diterbitkan DISMPPTSP Provsu telah melebihi target yang ditetapkan sekitar 200% untuk izin dan 1500% untuk non izin. Dilihat dari data tersebut, sudah sepatutnya target jumlah izin dan non izin yang diterbitkan untuk ditingkatkan agar tidak terjadi kesenjangan jumlah yang signifikan.

Tabel. 2.120
Data Target dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan
yang diterbitkan Tahun 2014 - 2018

Indikator Kinerja Utama	2014	Target Tahunan								Sumber Data
		2015	Realisasi 2015	2016	Realisasi 2016	2017	Realisasi 2017	2018*	Realisasi 2018*	
1. Jumlah izin yang terbit	85	215	346	280	314 (< 5 Hari)	345	3423	345	3423	Laporan hasil kegiatan proses penerbitan izin
2. Jumlah non izin/ rekomendasi	3	10	209	18	897	25	363	25	363	

f. Badan Usaha Milik Daerah

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham dan Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas dimana yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan investasinya telah membentuk 8 (delapan) BUMD yang sampai dengan tahun 2018 total investasi yang telah dilakukan mencapai Rp. 1,553

triliun terbagi dalam bentuk penyertaan berupa Dana dan Non Kas. Dari tabel 2.118 dibawah ini terlihat bahwa PT. Bank Sumut yang dibentuk sejak tahun

2009, ditahun 2016 telah menghasilkan Rp. 1,4 triliun dan merupakan BUMD yang paling produktif diantara lainnya. Namun demikian, terhadap BUMD yang lainnya perlu didorong untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Tabel. 2.121
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran 2018	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah s. d Tahun 2016	Jumlah Modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	9 (7+8)	10 (6-9)	11	12
1	2009	PDAM Tirtanadi	Perda No. 10 Thn 2009	Dana	400.000.000.000,00	399.999.964.000,00	399.999.964.000,00	36.000,00	-	-
	2016	PDAM Tirtanadi	PMK RI No.31/PMK.05 /2016 dan Surat Menkeu No.S-36/ MK.7/2016	Non Kas	185.120.553.000,00	185.120.553.000,00	185.120.553.000,00	-	-	20.000.000.000,00
2	2014	PT. Perkebunan	Perda No.4 Thn 2014	Dana	529.740.706.000,00	250.097.486.000,00	250.097.486.000,00	279.643.220.000,00	131.873.763.155,00	20.000.000.000,00
3	2007	PT. Pembangunan Sarana Prasarana	Perda No. 11 Thn 2007	Dana	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	921.760.157,00	244.728.912,00
4	2014	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	Perda No. 6 Tahun 2014	Dana	500.000.000.000,00	20.000.350.500,00	20.000.350.500,00	479.999.649.500,00	2.987.250.000,00	450.000.000,00
5	1985	PD. Aneka Industri dan Jasa	Perda No. 26 Thn 1985	Dana	15.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	-
6	2009	PT. Bank Sumut	Perda No. 5 Tahun 2009	Dana	-	658.816.800.639,00	658.816.800.639,00	-	1.470.998.567.517,96	276.371.633.799,00
7	-	PT. Kawasan Industri Medan		Non Kas	-	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-	7.613.546.080,00	1.080.000.000,00
8	-	PT. Asuransi Bangun Askrida		Non Kas	-	680.000.000,00	680.000.000,00	-	872.827.139,00	271.713.584,00
		J U M L A H			1.649.861.259.000,00	1.552.715.154.139,00	1.552.715.154.139,00	765.642.905.500,00	1.615.267.714.048,96	318.418.076.295,00

2.3.2.12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda.

Capaian Perkembangan jumlah organisasi pemuda bidang Kepemudaan dan Olahraga dari Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2018 jumlah organisasi pemuda tetap sama yaitu sebanyak 72 organisasi kepemudaan dan telah memenuhi target RPJMD Tahun 2018.

Tabel. 2.122
Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	72	72	72	72	72

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Provsu 2018

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Capaian Perkembangan Jumlah Organisasi Olahraga bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2016 Jumlah Organisasi Olahraga tidak mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 54 Organisasi Olahraga, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.123
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Organisasi Olahraga	49	49	49	54	54

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Provsu 2018

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan pada Tahun 2018.

Tabel. 2.124
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	13	10	14	24	13

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Provsu 2018

d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah Kegiatan Olahraga yang ada di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun 2014 (17) ke 2015 (10) mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 (19) dan mengalami penurunan pada Tahun 2018 sebesar 16 jumlah kegiatan olahraga. Perkembangan Jumlah Kegiatan Olahraga tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.125
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kegiatan Olahraga	17	10	19	19	16

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Provsu 2018

e. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja

Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Provinsi Sumatera Utara mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan telah memenuhi target RPJMD Tahun 2018. Perkembangan dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.126
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	4	4	4	5	5

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Provsu 2018

f. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2015 sebesar 70 sarana dan prasarana Olahraga, data ini hanya untuk provinsi Sumatera Utara saja, namun sejak tahun 2016 terjadi peningkatan hingga 181 Sarana dan Prasarana olahraga peningkatan tersebut terjadi karena data yang diambil tidak hanya dari Provinsi Sumatera Utara saja tapi juga dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, kondisi ini terus mengalami peningkatan

pada tahun 2017 sebesar 190 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 sebesar 185, perkembangan jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.127
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Lapangan Olahraga	70	70	181	190	185

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Provsu 2018

2.3.2.13. STATISTIK

Urusan statistik memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat statistik merupakan instrument untuk menilai atas capaian indikator pembangunan. Pemerintah Daerah dalam urusan statistik diberikan kewenangan untuk Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan tugas baru untuk urusan statistik, dengan capaian saat ini berupa Penyusunan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara.

Urusan statistik sebelum berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014, pelaksanaannya di dominasi pelaksanaannya oleh Badan Pusat Statistik. Untuk itu, dalam rangka mendukung kebutuhan data-data sebagai informasi dalam pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah bersama BPS membuat nota kesepahaman untuk pelaksanaan urusan statistik sejak tahun 2011 – 2015, dengan capaian produk-produk buku statistik sebagai berikut :

- Buku Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka
- Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka
- Buku produk domestik regional bruto

2.3.2.14. PERSANDIAN

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah digelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara digelar antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas/Badan yang menangani persandian di Kabupaten/Kota serta jajaran persandian Muspida yang meliputi:

- Jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi se Indonesia
- Jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara
- Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU
- Jajaran POLDA
- Jajaran Kejaksaan Tinggi

Selanjutnya, setelah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

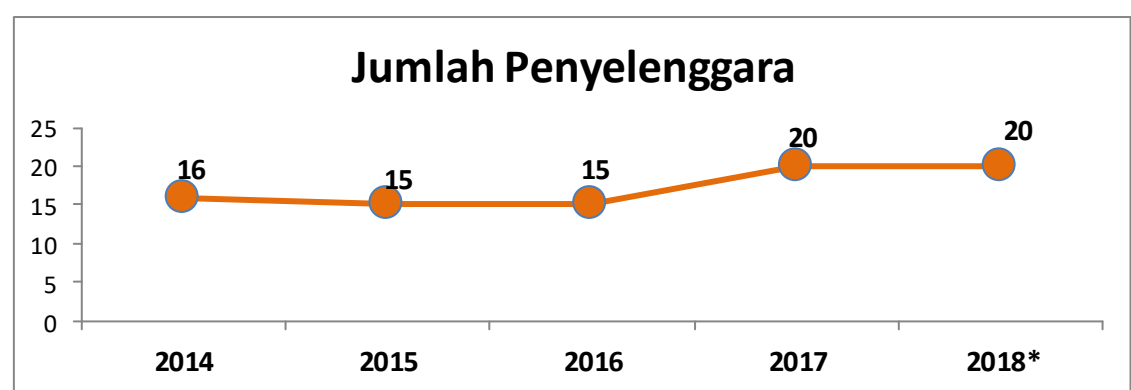
1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.3.2.15. KEBUDAYAAN

a. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya semakin meningkat, tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 16 kali Penyelenggaraan

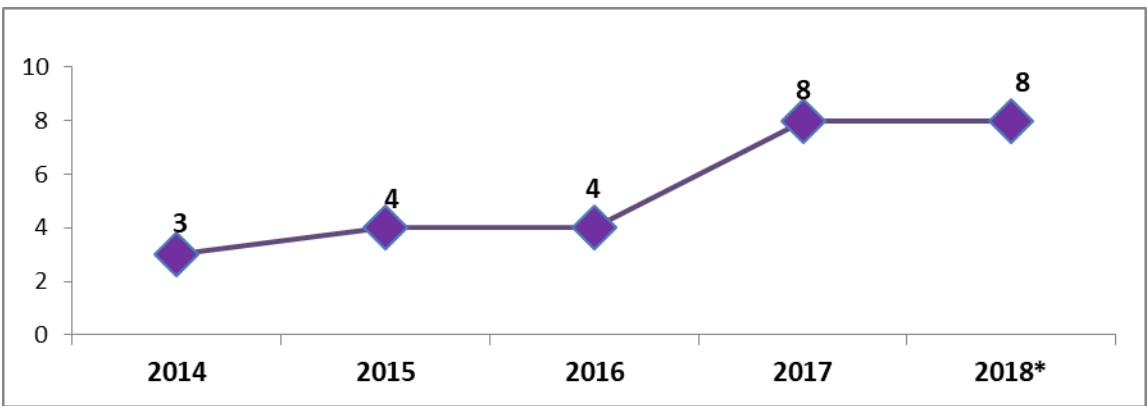
Festival Seni dan Budaya di Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 20 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :



Grafik. 2.65
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya
Tahun 2014-2018

b. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Provinsi Sumatera Utara memiliki kekayaan adat istiadat yang sangat beragam, sehingga terdapat banyak benda, situs maupun kawasan Cagar Budaya yang dimiliki. Namun tidak semua benda cagar budaya tersebut telah dilestarikan maupun tersertifikasi.



Grafik. 2.66
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang Dilestarikan Tahun 2014–2018

Grafik diatas menyajikan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Utara yang dilestarikan. Tahun 2018 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 8 (delapan) buah. Jumlah ini naik hampir 3 (tiga) kali lipat jika dibandingkan tahun 2013 yang hanya 3 (tiga) buah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan.

c. Jumlah Karya Budaya Yang di Revitalisasi dan Inventarisasi

Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah karya budaya yang diinventarisasi. Tahun 2014 jumlah karya budaya yang diinventarisasi berjumlah 311 buah dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 608 buah.

Tabel. 2.128
Jumlah Karya Budaya yang di Revitalisasi dan Inventarisasi Tahun 2014 – 2018

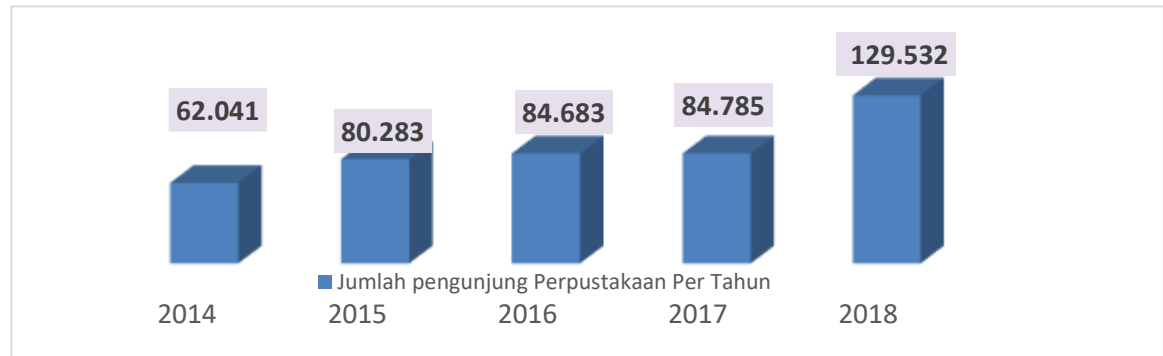
Indikator	2014	2015	2016	2017	2018*
Jumlah Karya Budaya	311	360	220	608	608

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
*) angka sementara

2.3.2.16. PERPUSTAKAAN

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Realisasi Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Tahun 2014 sebanyak 62.041 orang, mengalami peningkatan hingga mencapai 129.532 orang pada tahun 2018. Realisasi Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Grafik di bawah ini :



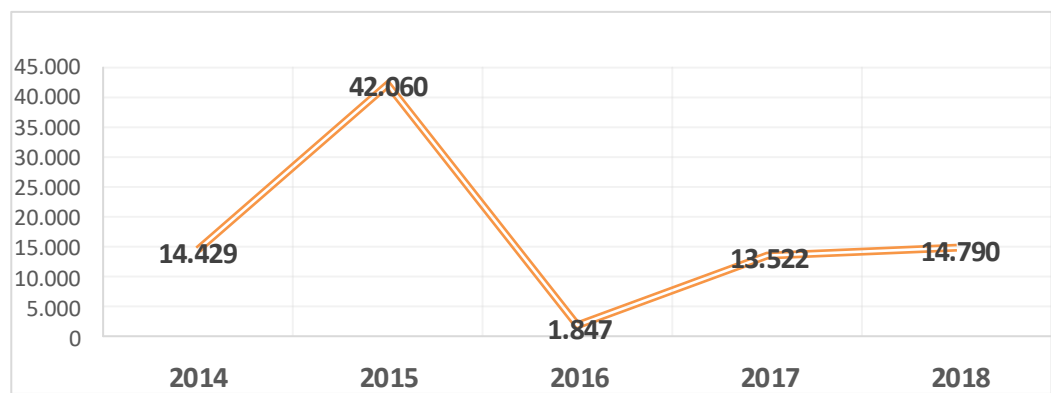
Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu

Grafik. 2.67
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 2014-2018

b. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Realisasi Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah di tahun 2014 sebanyak 14.429 buku, di tahun 2015 meningkat menjadi 42.060 buku, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 1.847 buku dan selanjutnya bertambah hingga menjadi 13.522 buku pada dan

pada tahun 2018 sebanyak 14.790 buku. Realisasi Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat perkembangannya pada Grafik berikut ini :

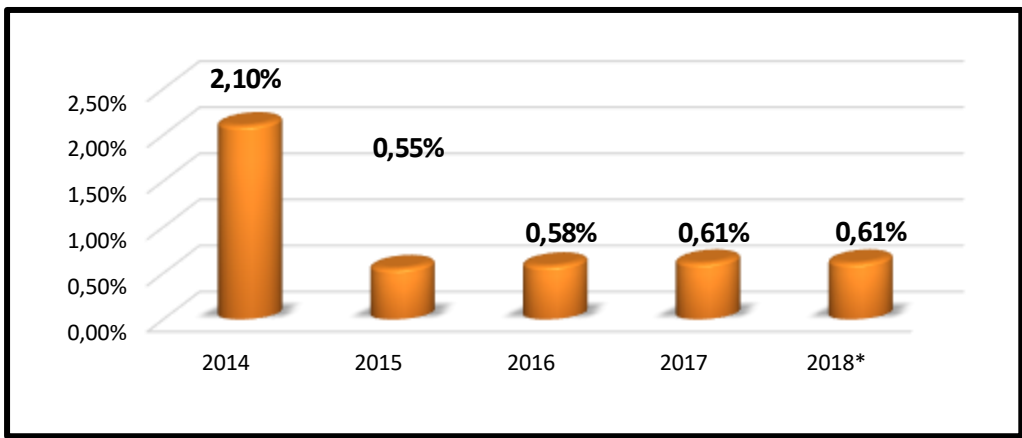


Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu

Grafik. 2.68
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2014-2018

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio Perpustakaan persatuan penduduk di Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2014 hingga 2017 terjadi fluktuatif, tahun 2014 sebesar 2.10 persen menurun hingga 2015 sebesar 0.55 persen, terjadi peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018 sebesar 0.58 dan 0.61 persen. Perkembangan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

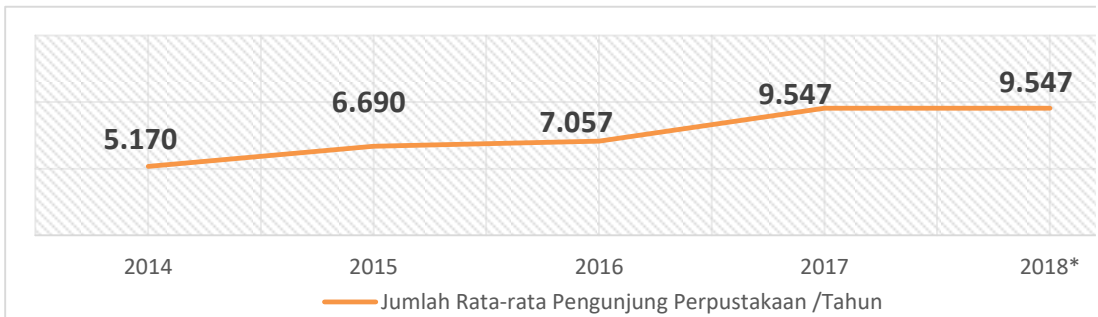


Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu
 *) Angka Sementara

Grafik. 2.69
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Tahun 2014-2018

d. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Realisasi Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun 2014 sebanyak 5.170 orang, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebanyak 9.547 orang. Sebagaimana terlihat pada Grafik di bawah ini :

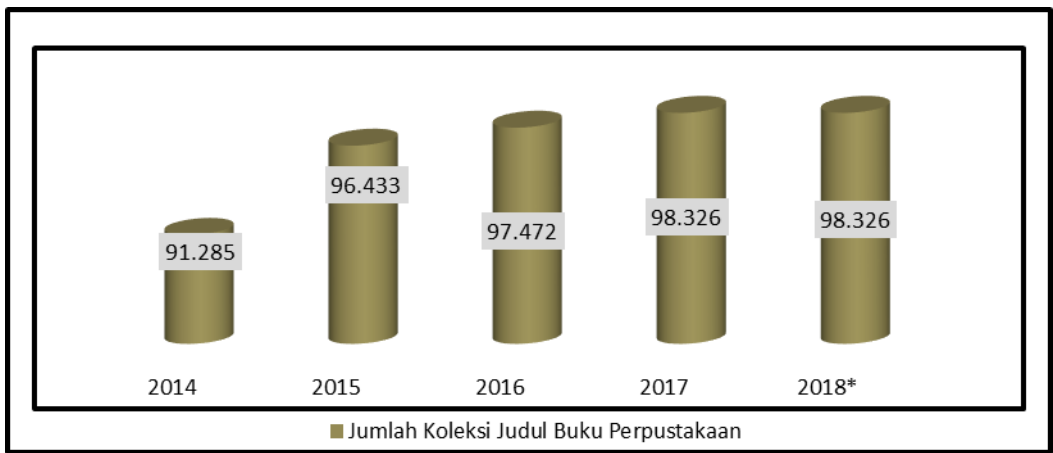


Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu
*) Angka Sementara

Grafik. 2.70
Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 2014-2018

e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan sejak tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada Grafik berikut :



Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu
*) Angka Sementara

Grafik. 2.71
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2014-2018

f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Realisasi Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat sejak tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel. 2.129
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	NA	3	7	11	0

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu

2.3.2.17. KEARSIPAN

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Provnsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami peningkatan, sebagaimana terdapat pada Tabel di bawah ini:

Tabel. 2.130
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	37	38	42	42	15

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu

2.3.3. Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah yaitu dibidang urusan Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan.

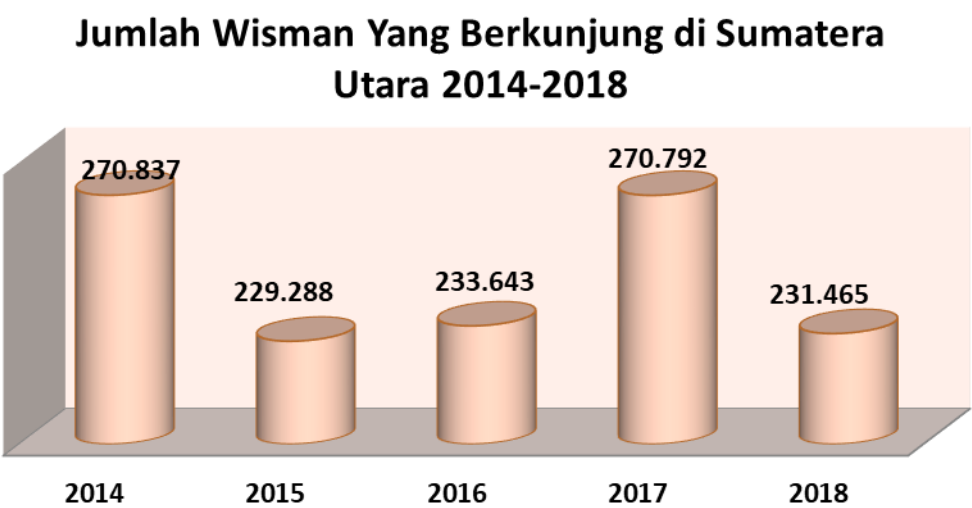
2.3.3.1. PARIWISATA

a. Kunjungan Wisata

Di Provinsi Sumatera Utara, Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung dapat diperoleh dari 3 (tiga) pintu masuk utama, yaitu:

Bandara Internasional Kuala Namu, Pelabuhan Laut Belawan, dan Pelabuhan Laut Tanjungbalai. Jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Utara pada tahun 2018 sebanyak 231.465 orang. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 270.792 orang.

Dari keempat pintu masuk utama kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara, Pintu masuk Bandar Udara Kuala Namu menjadi pintu masuk dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak sepanjang 2018. Diikuti oleh pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjung Balai, Bandar Udara Silangit, dan terakhir Pelabuhan Laut Belawan. Pada tahun 2018, pintu masuk Bandar Udara Kuala Namu menerima kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara sebanyak 225.167 orang, diikuti oleh pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjung Balai sebanyak 3.869 orang, kemudian pintu masuk Bandar Udara Silangit dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.289 orang, serta pintu masuk Pelabuhan Laut Belawan sebanyak 140 orang. Dibawah ini disajikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara tahun 2014-2018



Sumber : BPS (diolah)

Grafik. 2.72
Jumlah Wisman Yang Berkunjung di Sumatera Utara 2014-2018

b. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata dapat kita lihat dari berapa lama wisatawan menginap di hotel atau akomodasi lainnya. Dari tabel dibawah dapat kita lihat bahwa tahun 2015, Lama Inap Tamu Hotel

mencapai angka tertinggi yaitu 1.92 hari, dan tahun 2018 Lama Inap Tamu Hotel berada pada angka terendah selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 1.42 hari.

Tabel. 2.131
Lama Kunjungan Wisatawan Menginap di Hotel
Tahun 2014 – 2018

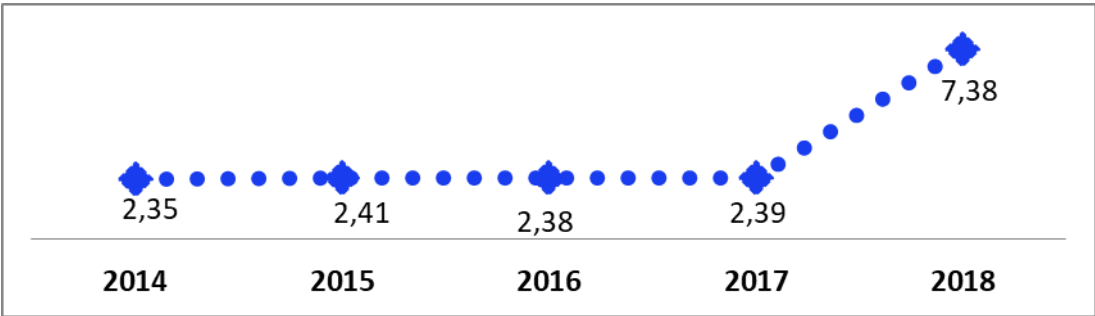
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Rata-Rata Bintang
2014	1,20	1,37	1,80	1,79	1,69	1,64
2015	1,33	1,46	1,78	2,01	2,46	1,92
2016	1,29	1,54	1,60	1,55	1,80	1,60
2017	1,50	1,47	1,73	1,97	1,84	1,77
2018*	1,24	1,19	1,42	1,60	1,18	1,42

*) Kondisi Desember 2018

Sumber Data : BPS Provsu (data diolah)

c. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Begitu juga di Sumatera Utara, kontribusi sektor pariwisata diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Utara selama 4 (empat) tahun terakhir rata-rata sebesar 2,36%. Pada Tahun 2018, kontribusi sektor pariwisata Sumatera Utara terhadap PDRB mencapai 7,38 %, karena perbedaan cara penghitungan. Yang sebelumnya hanya diukur dari kontribusi sektor Akomodasi & Makan-Minum, Untuk Tahun 2018 dihitung dengan penambahan kontribusi **sektor Akomodasi, Makan& Minum** dan **sektor Transportasi**.



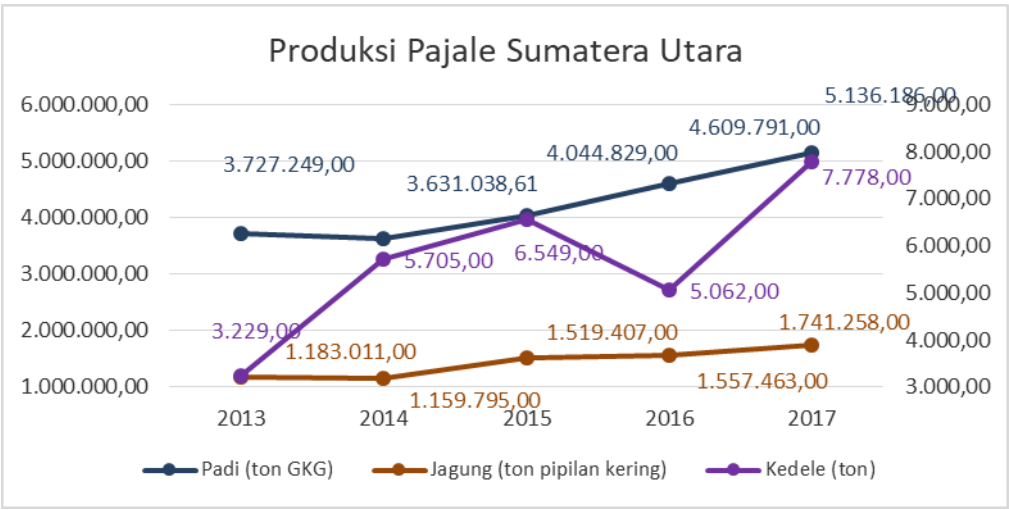
Sumber Data : BPS Provsu (data diolah)

Grafik. 2.73
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Sumatera Utara 2014-2018

2.3.3.2. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi lumbung berasnya Indonesia. Kemampuan Sumatera Utara mempertahankan kondisi ketersediaan pangan di Sumatera Utara telah membawa Sumatera Utara mendapat penghargaan ketahanan pangan dari Presiden Republik Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanan di daerah. Untuk itu diperlukan dukungan-dukungan untuk membantu petani dalam rangka peningkatan produksi pangan.

Peningkatan Produksi pangan terutama komoditi padi/beras merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang kebutuhan/konsumsi pokok masyarakatnya terutama adalah beras/nasi. Komoditi padi/beras ini mempunyai nilai yang sangat strategis karena ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya keamanan/ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik.



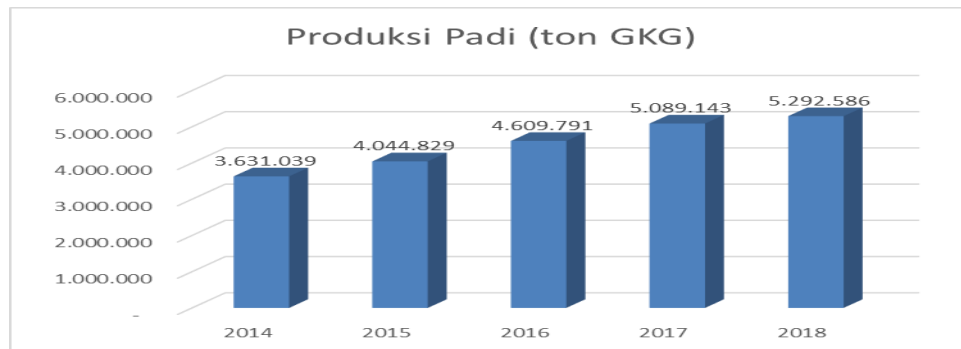
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 2017

Grafik. 2.74
Grafik Produksi Pajale Tahun 2014-2018

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa produksi pajale terus meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2017, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

a. Padi (ton GKG)

Tanaman padi merupakan komoditas pertanian terpenting dalam kehidupan penduduk Indonesia. Produksi padi dan kebutuhan akan beras merupakan hal mutlak yang harus selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan untuk mencegah permintaan akan beras yang lebih besar dari pada produksi padi para petani.



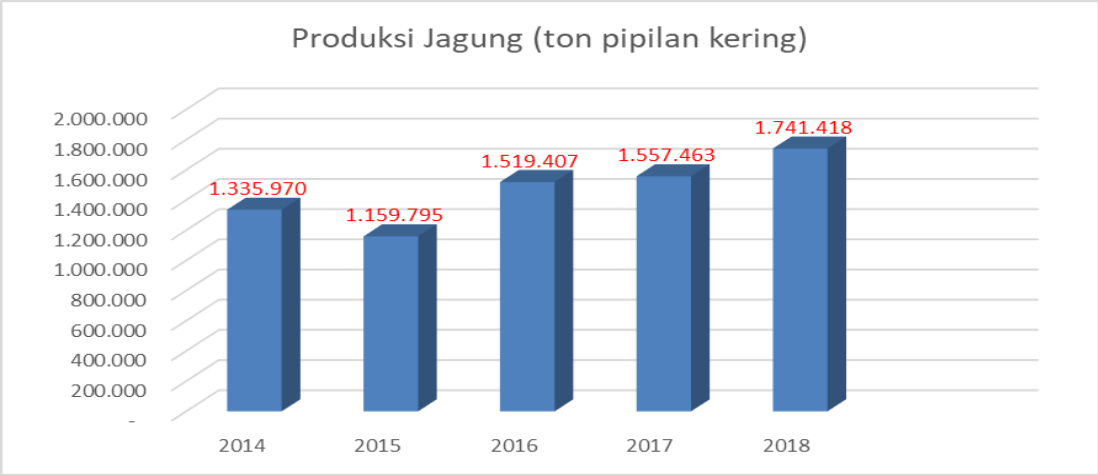
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 2018

Grafik. 2.75
Produksi Padi Tahun 2014 – 2018

Produksi padi (Ton GKG atau Gabah Kering Giling) di Sumatera Utara mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 3.631.039 ton, tahun 2015 sebesar 4.044.829 ton, tahun 2016 sebesar 4.609.791 ton, tahun 2017 sebesar 5.089.143 ton dan tahun 2018 sebesar 5.292.586 ton.

b. Jagung (ton pipilan Kering)

Jagung merupakan tanaman yang banyak digunakan untuk bahan makanan pokok. Jagung dapat berkembang di Provinsi Sumatera Utara, walaupun pada areal pertanaman yang masih sempit. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi orang-orang yang bergelut dibidang pertanian untuk berusaha menghasilkan produksi tanaman yang tinggi dengan ketersediaan lahan yang sedikit. Dengan adanya peluang tersebut, diperlukan upaya perbaikan pada teknik budidaya tanaman yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam hasil panen.



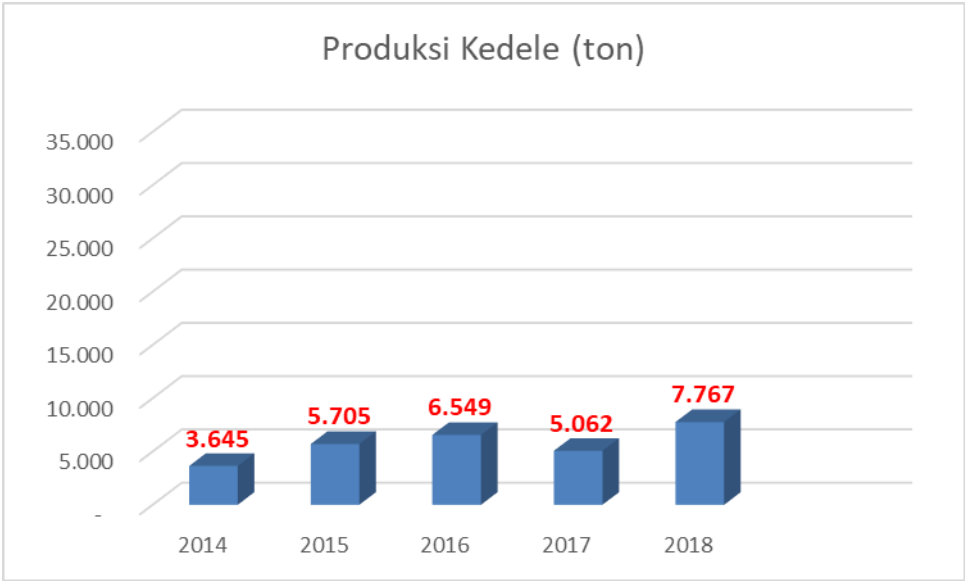
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 2018

Grafik. 2.76
Produksi Jagung Tahun 2014 – 2018

Jagung (Ton Pipilan Kering) di Sumatera Utara mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 1.335.970 ton, menjadi sebesar 1.741.418 ton pada tahun 2018.

c. Kedele (ton)

Saat ini tanaman kedele merupakan salah satu bahan pangan yang penting setelah beras, disamping sebagai bahan pakan dan industri olahan. Karena hampir 90% digunakan sebagai bahan pangan maka ketersediaan kedele menjadi faktor yang cukup penting. Selain itu, kedele juga merupakan tanaman palawija yang kaya akan protein yang memiliki arti penting sebagai sumber protein nabati untuk peningkatan gizi dan mengatasi kurang gizi.



Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 2018

Grafik. 2.77
Produksi Kedelai Tahun 2014 – 2018

Kedele di Sumatera Utara mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sekitar 3.645 ton, tahun 2015 sekitar 5.705 ton, tahun 2016 sekitar 6.549 ton, tahun 2017 sekitar 5.062 ton dan tahun 2018 sekitar 7.767 ton. Namun produksi ini belum mampu mencukupi kebutuhan lokal di Sumatera Utara, untuk itu perlu dilakukan pengembangan terhadap kedelai untuk memenuhi kebutuhan pasar.

d. Tanaman Hortikultura

Sumatera Utara merupakan daerah potensi untuk komoditas hortikultura, sehingga produksi beberapa komoditas Hortikultura menempati urutan pertama seperti Jeruk dan Salak, sedangkan beberapa komoditas Unggulan lainnya banyak yang menempati produksi 5 (lima) besar di Indonesia. Sehingga banyak komoditas Hortikultura yang di Eksport ke Luar Negeri, dan Potensi Hortikultura ini masih dapat terus ditingkatkan mengingat potensi yang ada.

Tabel. 2.132
Perkembangan Produksi Buah-buahan
Tahun 2014-2018 Provinsi Sumatera Utara

No	Komoditi	Perkembangan Tahun 2014 - 2018				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Alpokat	10,319	11,832	14,105	15,123	15.122,86
2	Belimbing	2,941	4,028	3,453	3,894	3.894
3	Duku/Langsar	16,715	13,868	12,326	13,289	13.288
4	Durian	80,441	65,530	74,811	64,659	64.659
5	Jambu Biji	12,661	8,806	10,049	9,807	9.807
6	Jambu Air	6,840	6,821	5,729	11,714	11.714
7	Jeruk Besar	13,615	2,956	8,597	18,076	18.076
8	Jeruk Siam/Keprok	500,243	483,006	459,149	435,454	435.454
9	Mangga	31,378	32,173	21,499	24,692	24.691
10	Manggis	10,870	7,947	7,325	9,382	9.382
11	Nangka/Cempedak	12,818	11,018	10,253	9,971	9.971
12	Nenas	237,581	223,128	163,504	160,552	160.551
13	Pepaya	26,238	26,305	20,235	29,570	29.569
14	Pisang	298,910	139,541	137,886	150,691	150.690
15	Rambutan	28,325	24,953	13,939	15,266	15.266
16	Salak	354,087	192,585	118,619	162,622	162.621
17	Sawo	8,601	7,389	9,002	11,707	11.707

No	Komoditi	Perkembangan Tahun 2014 - 2018				
		2014	2015	2016	2017	2018*
18	Sirsak	960	954	1,107	932	932
19	Sukun	897	853	660	600	599
20	Markisah	3,135	8,576	5,325	6,689	6.689
21	Buah-buahan lain	147,975	75,018	41,930	64,600	64.600
Jumlah		1,805,548	1,347,286	1,139,500	1,219,288	1.219.288

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan produksi buah-buahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 sebanyak 1.805.548 ton, pada tahun 2015 s/d 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu tahun 2015 sebanyak 1.347.286 ton, tahun 2016 menjadi 1.139.500 ton dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1.219.288 ton.

Tabel. 2.133
Perkembangan Produktivitas Buah-buahan
Tahun 2014-2018 Provinsi Sumatera Utara

No	Komoditi	Perkembangan Tahun 2014 - 2018				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Alpokat	203.61	209.73	198.74	206.79	206,82
2	Blimbing	388.23	419.80	316.11	296.06	296,22
3	Duku/Langsat	183.34	190.49	156.63	99.54	99,90
4	Durian	194.11	177.69	261.91	137.35	137,65
5	Jambu Biji	259.45	267.11	321.51	242.94	243,06
6	Jambu Air	82.68	114.06	84.96	86.63	86,72
7	Jeruk Besar	897.58	447.92	540.59	618.64	618,66
8	Jeruk Siam/ Keprok	635.22	739.48	689.15	682.20	682,30
9	Mangga	202.07	216.11	202.65	186.42	186,50
10	Manggis	174.32	143.43	148.80	137.82	137,91
11	Nangka/Cempedak	194.59	208.46	188.18	221.34	221,42
12	Nenas	3,446.98	3,063.45	2,352.14	2,374.33	2.374,53
13	Pepaya	1,148.16	1,343.55	1,060.36	1,180.92	1.180,96
14	Pisang	1,156.03	1,013.26	1,043.55	1,172.03	1.172,09
15	Rambutan	135.44	154.64	95.15	76.65	77,01
16	Salak	742.62	419.80	301.94	454.95	455,06
17	Sawo	228.98	217.33	218.74	243.19	243,27
18	Sirsak	198.50	204.21	213.03	191.48	191,51
19	Sukun	165.67	153.39	35.25	111.74	111,99
20	Markisah	348.49	1,015.16	686.54	1,111.37	1.111,94
21	Buah-buahan Lain	358.29	214.15	148.27	209.40	209,50
Jumlah		549.19	486.30	448.85	416.14	416, 26

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan Produktivitas Buah-buahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 sebanyak 549,19 Kw/ha, pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2015 sebesar 486,30 Kw/ha, tahun 2016 sebesar 448,85 Kw/ha dan pada tahun 2018 menjadi 416,14 Kw/ha. Terjadinya penurunan produktivitas akibat kurangnya perawatan dari petani karena turunnya harga jual dan kurangnya air akibat musim kemarau.

Tabel. 2.134
Perkembangan Produksi Sayur-sayuran Semusim
Tahun 2014-2018 Provinsi Sumatera Utara

No	Komoditi	Perkembangan Tahun 2014- 2018				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Bawang Merah	7,810	9,971	13,368	16,103	16.103
2	Bawang Putih	38	129	70	56	56
3	Bawang Daun	11,534	11,290	10,368	9,551	9.551
4	Kentang	107,058	106,452	91,400	96,893	96.893
5	Kool/Kubis	173,486	170,665	175,922	180,371	180.371
6	Kembang Kol	29,232	30,317	35,515	39,652	39.652
7	Petsai/Sawi	63,032	76,367	64,820	70,098	70.098
8	Wortel	43,456	51,810	47,205	50,900	50.900
9	Lobak	7,569	4,940	1,748	1,170	1.170
10	Kacang Merah	2,837	1,364	355	666	666
11	Kac. Panjang	44,305	45,095	40,427	43,946	43.946
12	Cabe Besar	147,810	187,833	152,630	159,131	159.131
13	Cabe Rawit	33,896	39,656	29,800	31,727	31.727
14	Tomat	84,339	114,652	99,883	97,358	97.358
15	Terung	62,291	69,164	77,595	82,825	82.825
16	Buncis	33,560	29,903	21,582	29,435	29.435
17	Ketimun	35,965	37,656	30,135	30,618	30.618
18	Labu Siam	20,306	26,559	13,606	11,165	11.165
19	Kangkung	22,175	25,763	16,131	16,514	16.514
20	Bayam	16,761	19,892	19,892	20,435	20.435
21	Paprika	-	-	-	-	-
Jumlah		947,459	1,059,477	942,449	988,612	988.612

Sumber Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan Produksi Sayur-sayuran Semusim Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 yaitu 947.459 ton, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 1.059.447 ton, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 942.449 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 988.612 ton. Terjadinya penurunan produksi karena cuaca/iklim yang tidak mendukung, musim buah yang tidak bagus, serangan hama penyakit, terjadinya alih fungsi lahan dan alih komoditi ke tanaman perkebunan.

Tabel. 2.135
Perkembangan Produktivitas Sayur-sayuran Semusim
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

No	Komoditi	Perkembangan Tahun 2014 - 2018				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Bawang Merah	77.87	80.54	86.92	77.05	77.05
2	Bawang Putih	54.29	51.68	41.18	32.76	32.76
3	Bawang Daun	71.55	71.28	70.48	65.19	65.19
4	Kentang	175.79	180.00	167.12	156.71	156.71
5	Kool/Kubis	242.20	225.18	236.74	229.13	229.13
6	Kembang Kol	145.94	114.10	149.73	142.02	142.02
7	Petsai/Sawi	114.35	119.04	120.42	116.13	116.13
8	Wortel	198.16	202.22	200.10	196.45	196.45
9	Lobak	129.84	124.43	94.49	128.55	128.55
10	Kacang Merah	58.87	41.83	12.18	24.41	24.41
11	Kac. Panjang	107.48	109.48	114.01	120.33	120.33
12	Cabe Besar	97.13	121.32	105.60	96.97	96.97
13	Cabe Rawit	79.25	86.00	77.06	78.73	78.73
14	Tomat	206.97	239.16	212.47	212.71	212.71
15	Terung	161.92	175.54	213.46	224.34	224.34
16	Buncis	156.90	138.25	115.84	135.27	135.27
17	Ketimun	136.34	146.41	136.36	145.38	145.38
18	Labu Siam	506.38	679.26	400.18	446.61	446.61
19	Kangkung	82.56	102.15	63.38	64.18	64.18
20	Bayam	50.33	60.44	60.44	68.57	68.57
21	Paprika	-	-	-	-	-
Jumlah		136.56	145.97	140.73	137.58	137.58

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan Produktivitas Sayur-sayuran Semusim Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu 136,56 Kw/ha tahun 2014 dan 145,97 Kw/ha tahun 2015, pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 140,73 Kw/ha tahun 2016 137,58 Kw/ha tahun 2018. Terjadinya penurunan produktivitas karena kurangnya perawatan dari petani, pengaruh iklim/musim yang tidak mendukung dan serangan hama penyakit.

e. Luas Areal Perkebunan Jenis Komoditi dan Pengusahaan

Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pengertian perkebunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengertian perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Sedangkan Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Tabel. 2.136
Luas Areal Perkebunan Jenis Komoditi
dan Pengusahaan Tahun 2014-2018

No.	Jenis Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelapa Sawit					
	Perkebunan Rakyat	416.475,11	417,656.44	418,156.44	419.118,94	433.126,66
	PTPN	286.627,87	287,841.32	287,841.00	288.657,82	324.719,66
	PBSN	346.009,00	346,283.00	347,521.00	349.258,61	351.878,05
	PBSA	154.187,00	154,386.00	155,845.00	156.624,23	157.798,91
	Total Luas (Ha)	1.203.298,98	1,206,166.76	1,209,363.44	1.213.659,59	1.267.521,28
2.	Karet					
	Perkebunan Rakyat	394.113,57	395.017,00	394,517.00	394.648,62	393.189,02
	PTPN	42.317,35	38.501,15	38,529.85	35.656,80	33.345,63
	PBSN	102.132,00	102.238,00	102,738.00	103.499,93	104.276,18
	PBSA	52.700,00	53.299,00	53,400.00	54.143,37	54.549,44
	Total Luas (Ha)	591.262,92	589.055,15	589,184.85	587.948,71	585.360,27
3.	Kelapa					
	Perkebunan Rakyat	110.457,93	110.122,13	110,622.00	110.659,68	109.422,96
	PTPN	-	-		-	
	PBSN	1.735,00	1.851,00	1,864.00	2.013,02	
	PBSA	1.122,60	1.140,00	1,140.00	1.330,62	
	Total Luas (Ha)	113.315,53	113.113,13	113,626.00	114.003,31	109.422,96
4.	Kakao					
	Perkebunan Rakyat	66.623,88	64.934,36	64,434.36	64.630,77	57.514,25
	PTPN	6.782,06	-	-	-	
	PBSN	3.096,20	441	441.00	450,24	453,38
	PBSA	2.696,00	-	-	-	
	Total Luas (Ha)	65.375,36	64,875.36	65,182.00	65.081,01	57.967,63
5.	Kopi Arabika					
	Perkebunan Rakyat	61.231,44	62,731.00	63,531.00	66.733,13	71.954,92
	PTPN	-	-	-	-	
	PBSN	-	-	-	-	
	PBSA	-	-	-	-	
	Total Luas (Ha)	61.231,44	62,731.00	63,531.00	66.733,13	71.954,92
6.	Kopi Robusta					
	Perkebunan Rakyat	20.853,81	21,161.85	21,661.00	17.504,30	19.415,72
	PTPN	-	-	-	-	
	PBSN	810	806.00	912.00	1.098,96	
	PBSA	-	-	-	-	
	Total Luas (Ha)	21.663,81	21,967.85	22,573.00	18.603,26	19.415,72
7.	Komoditi Perkebunan Lainnya					
	Perkebunan	60.224,86	61,488.03	62,507.88	61.856,05	62.565,74

No.	Jenis Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Rakyat					
	PTPN	11.455,98	5,773.81	5,774.00	9.838,19	10.106,68
	PBSN	-	-	-		
	PBSA	-	-	-		
	Total Luas (Ha)	71.680,84	67,261.84	68,281.88	137.723,25	72.672,42

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Luas areal perkebunan Sumatera Utara didominasi oleh kelapa sawit dimana pada Tahun 2018 luas areal kelapa sawit mencapai 1.267.521,28 hektar atau 55,93% dari total luas areal perkebunan. Selanjutnya tanaman perkebunan dengan luas areal terbesar adalah karet, kelapa, kopi, kakao disamping komoditas potensial lainnya seperti tembakau dan aren.

Dilihat dari pengelolaannya, perkebunan Sumatera Utara terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR), PTPN, PBSN dan PBSA. Rasio luas areal perkebunan rakyat menempati posisi yang tinggi dari total luas areal perkebunan di Sumatera Utara yaitu mencapai 2,184.315,2 hektar atau 52,42% pada Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan rakyat memiliki peran yang penting sebagai bagian dari sub sektor perkebunan di Sumatera Utara.

Tabel. 2.137
Produksi komoditas Perkebunan Tahun 2014-2018

No	Jenis Komoditi		Produksi (Ton)				Total Produksi (ton)
			PR	P T P N	P B S N	P B S A	
1	2		3	4	5	6	7
Tahun 2014							
1	Karet		332.673,82	36.169,84	119.864,00	71.556,00	560.263,66
2	Kelapa Sawit	TBS	5.745.235,23	4.340.754,16	5.376.885,83	2.654.857,00	18.117.732,22
		MS	1.263.951,75	998.897,54	1.182.914,88	584.068,54	4.029.832,71
		IS	172.357,06	192.556,15	215.075,43	106.194,28	686.182,92
3	Kopi Arabika		49.176,51				49.176,51
	Kopi Robusta		8.887,52		776		9.663,52
4	Kelapa		91.662,47		2.146,00	1.349,00	95.157,47
5	Kakao		41.265,77		353		41.618,77
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		35.843,39	37.007,16			72.850,55
Jumlah :			6.304.744,71	4.413.931,16	5.500.024,83	2.727.762,00	18.846.462,70
Tahun 2015							
1	Karet		331,673.00	35,057.84	120,838.00	72,026.00	559,594.84
2	Kelapa Sawit	TBS	5,773,848.50	4,705,645.92	5,377,539.83	2,655,753.00	18,512,787.25
		MS	1,270,246.67	1,092,450.48	1,183,058.76	584,265.66	4,130,021.58
		IS	173,215.46	192,778.00	215,101.59	106,230.12	687,325.17

No	Jenis Komoditi		Produksi (Ton)				Total Produksi (ton)
			PR	P T P N	P B S N	P B S A	
1	2		3	4	5	6	7
3	Kopi Arabika		52,902.10	-			52,902.10
	Kopi Robusta		9,830.34	-	783.00	-	10,613.34
4	Kelapa		94,446.43	-	2,242.00	1,349.00	98,037.43
5	Kakao		40,765.22	-	352.00	-	41,117.22
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		38,128.56	355,733.17	-	-	393,861.73
Jumlah :			6,341,594.15	5,096,436.93	5,501,754.83	2,729,128.00	19,668,913.91
Tahun 2016							
1	Karet		332,173.00	35,058.00	121,025.00	73,245.00	561,501.00
2	Kelapa Sawit	TBS	5,765,248.50	4,705,646.00	5,378,256.00	2,657,234.00	18,506,384.50
		MS	1,272,246.67	1,092,451.00	1,184,256.00	585,213.00	4,134,166.67
		IS	196,425.00	192,778.00	216,421.00	107,254.00	712,878.00
3	Kopi Arabika		53,214.00	-			53,214.00
	Kopi Robusta		11,245.00	-	882.00	-	12,127.00
4	Kelapa		95,123.00	-	3,145.00	1,654.00	99,922.00
5	Kakao		41,254.00	-	654.00	-	41,908.00
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		41,755.04	355,733.00	-	-	397,488.04
Jumlah :			6,340,012.54	5,096,437.00	5,503,962.00	2,732,133.00	19,672,544.54
Tahun 2017							
1	Karet		340.287,51	38.629,61	124.135,34	75.127,40	578.179,86
2	Kelapa Sawit	6.078.680,86	4.759.719,14	5.521.324,45	2.728.422,60	19.088.147,05	
		1.343.909,79	1.047.138,21	1.214.691,38	600.252,87	4.205.992,36	
		184.028,70	191.186,92	222.913,63	110.471,62	708.600,87	
3	Kopi Arabika		55.349,19	-	-	-	55.349,19
	Kopi Robusta		7.541,87	-	905,67	-	8.446,54
4	Kelapa		97.055,84	-	3.225,83	1.696,51	101.978,17
5	Kakao		45.532,11	-	670,81	-	46.202,91
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		39.859,59	33.492,85	-	-	73.352,44
Jumlah :				6.664.306,96	4.831.841.59	5.650.201.09	2.805.246,50
Tahun 2018							
1	Karet		314.164,09	38.994,31	127.859,40	77.381,22	558.399,02
2	Kelapa Sawit	TBS	6.799.152,77	5.616.640,55	5.686.964,18	2.810.275,28	20.913.032,78
		MS	1.495.813,61	1.235.660,92	1.251.132,12	618.260,56	4.600.867,21
		IS	203.974,58	168.499,22	270.608,93	119.306,26	762.388,99
3	Kopi Arabika		63.425,16	-	-	-	63.425,16
	Kopi Robusta		8.954,41	-		-	8.954,41
4	Kelapa		99.945,59				99.945,59
5	Kakao		41.728,12	-	690,93	-	42.419,05
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		41.279,62	16.481,76	-	-	57.761,38
Jumlah :			7.368.649,76	5.672.116,62	5.815.514,51	2.887.656,50	21.743.937,39

Sumber : Dinas Perkebunan Tahun 2018

Keterangan : - PTPN : Perusahaan Terbuka Perkebunan Negara

- PBSN : Perusahaan Besar Swasta Nasional

- PBSA : Perusahaan Besar Swasta Asing

Sejalan dengan dominasi luas areal Perkebunan Rakyat di Sumatera Utara maka rasio produksi tanaman perkebunan rakyat juga memiliki angka tertinggi yaitu 36,99% dari total produksi tanaman perkebunan yang berasal dari PTPN, PBSN maupun PBSA pada tahun 2017. Namun demikian salah satu tantangan yang dihadapi oleh perkebunan rakyat adalah tingkat produksi dan kualitas hasil yang masih rendah, sehingga perlu upaya melalui pengelolaan sumber daya perkebunan secara optimal.

g. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.



Grafik. 2.78
Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 – 2018

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Nilai tukar Petani di Sumatera Utara masih sangat tidak stabil, hal ini menunjukkan petani di Sumatera Utara belum dapat dikatakan sejahtera. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Nilai Tukar Petani berfluktuatif. Dimana pada tahun 2014 NTP berada pada posisi 98.61, dan pada tahun 2015 naik menjadi 100,18 dan pada tahun 2016 kembali naik pada kisaran 101.56, tetapi pada tahun 2017 kembali turun dengan sangat signifikan yaitu pada point 99.39 dan turun lagi pada tahun 2018 pada point 97,98 yang disumbang dari 5 (lima) sub sektor yaitu Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Untuk lebih detail dapat dilihat pada grafik di bawah ini Nilai Tukar Petani dari masing-masing subsektor.



Grafik. 2.79
Nilai Tukar Petani Per Subsektor
Tahun 2014 – 2018

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Nilai tukar Petani persubsektor masih berada dibawah point 100 pada 3 (tiga) subsektor yaitu pangan, hortikultura dan perkebunan. Sedangkan untuk subsektor Peternakan dan Perikanan berada di atas 100. Jika dilihat secara tren subkategori pangan dan hortikultura terus mengalami penurunan, sedangkan pada subsektor perkebunan terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan. Tetapi tidak pada subsektor peternakan, dari tahun 2014 – 2018 terus berada diatas point 100 dengan tren yang terus meningkat.

2.3.3.3. KEHUTANAN

a. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis

Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik fisik maupun vegetatif guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya. akibat mengalami kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah.

Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2015 adalah 7.187,00 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 6.840,35 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 346,65 hektar. Kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan reboisasi adalah seluas 2.964,56 hektar.

Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan penghijauan berupa penanaman oleh Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon oleh Organisasi Wanita seluas 9 (Sembilan) hektar, Penghijauan Lingkungan seluas 303,11 hektar, Pengadaan bibit simbolis sebanyak 527 batang serta pembuatan 2 (dua) Unit Pintu Paluh.

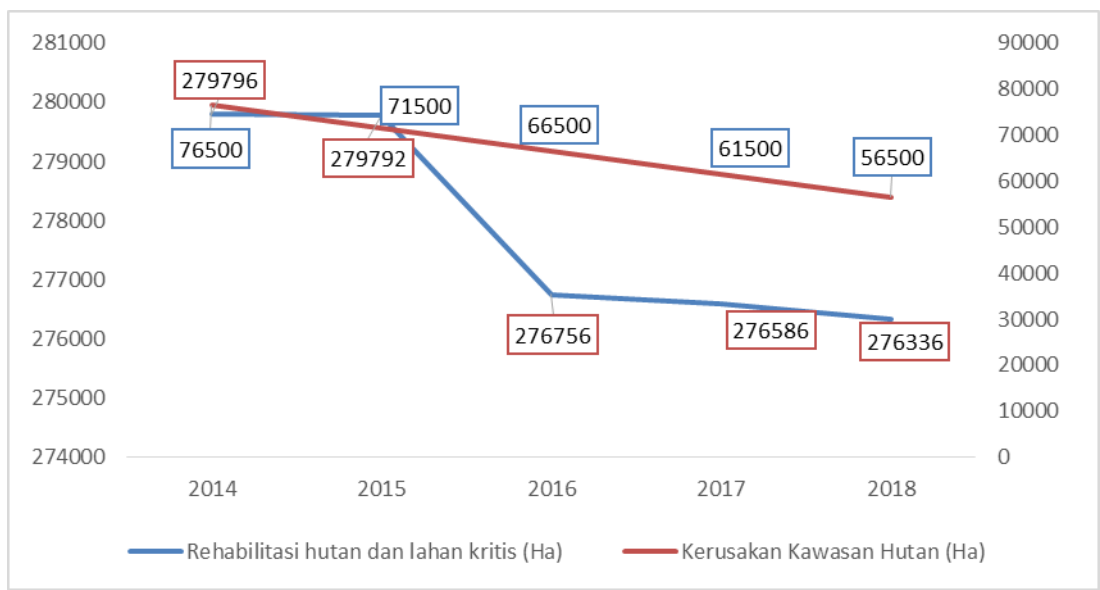
Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara seluas 1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No 306/2018) dan program perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 3511/2018).

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara :

1. Kawasan Hutan Register (Penunjukan Zaman Belanda) seluas ± 2.121.500,02 Ha.
2. Kawasan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 seluas ± 3.780.132,02 Ha.
3. Padu serasi TGHK dan RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 seluas ± 3.867.761 Ha.

4. RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2003 seluas $\pm$ 3.679.338,48 Ha.
5. Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Menhut No. SK.44/Menhut-II/2005 seluas $\pm$ 3.742.120 Ha; Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK Menhut No.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas: 3.055.795 Ha.



Grafik. 2.80
Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa masih banyak kawasan hutan di Sumatera Utara dalam kondisi kritis, pada tahun 2014 hutan di Sumatera Utara yang harus direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 279.796 Ha, namun pada tahun 2018 Sumatera Utara hanya mampu melakukan rehabilitasi sebanyak 3.460 Ha atau menjadi 276.336 Ha.

Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2014 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 76.500 Ha dan pada tahun 2018 turun menjadi 56.500 Ha, artinya Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun terakhir hanya mampu menurunkan kerusakan kawasan hutan seluas 20.000 Ha. Hal ini menjadi sebuah permasalahan serius, dengan tingginya kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis akan berdampak pada perubahan iklim yang ekstrim, bencana alam, yang pada akhirnya akan berakibat pada kestabilan keamanan pangan.

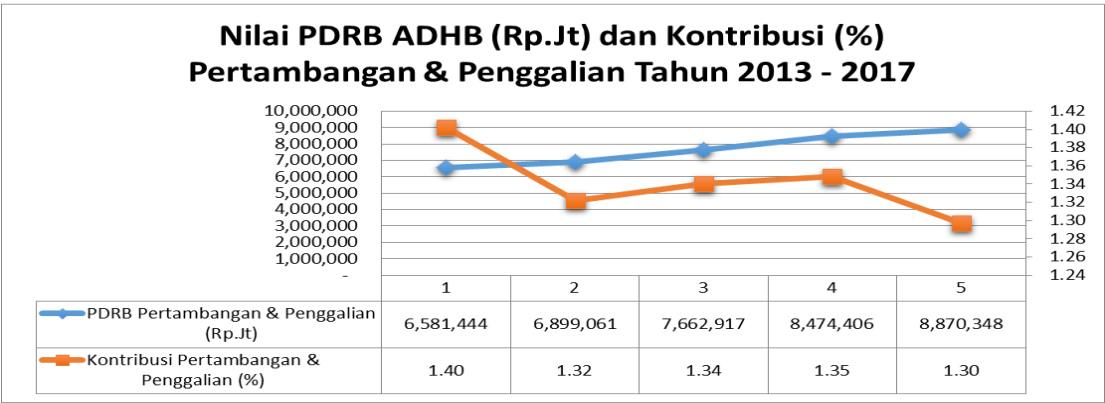
2.3.3.4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Pertambangan Tanpa Ijin

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki cadangan energi dan sumber daya mineral yang tinggi. Karena itu sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan dan sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dengan sebaik-baiknya potensi energi dan sumber daya mineral yang ada.

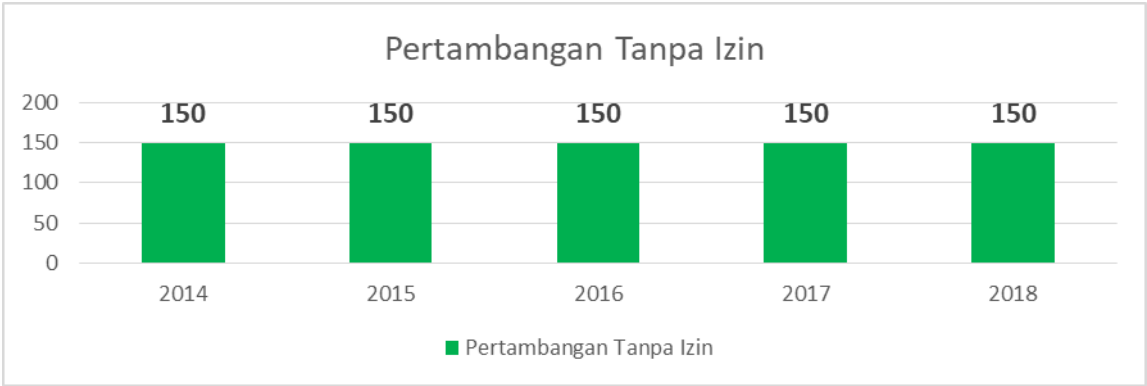
Pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari sisi keberlanjutan ekonomi, harus mampu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan semua bentuk sumber daya secara efisien dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk terciptanya diversifikasi usaha dalam perekonomian satu daerah. Agar perekonomian yang berkelanjutan dari suatu pembangunan yang berbasis sumber daya alam tidak terbarukan harus mampu mentransformasi kekayaan sumber daya alam tersebut ke dalam bentuk-bentuk kekayaan yang lain.

Untuk mengelola energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan yang dapat memberi manfaat maksimal bagi penduduknya, Provinsi Sumatera Utara harus memiliki rancangan detil (*blueprint*) pengelolaan dan pemanfaatan dari seluruh cadangan mineral dan energi yang dimilikinya yang konsisten dengan empat pilar utama pembangunan berkelanjutan: ekonomi, lingkungan, sosial dan tata pemerintahan yang baik.



Grafik. 2.81
Nilai PDRB ADHB (Rp.Jt) dan Kontribusi (%) Pertambangan dan Penggalian Tahun 2014 – 2018

Jika dilihat dari kontribusi kategori pertambangan dan penggalian dari tahun 2014 – 2018 semakin menurun, tetapi jika dilihat dari nilai PDRB ADHB tahun 2014 – 2018 kategori Pertambangan dan penggalian semakin meningkat. Hal ini terlihat tidak sejalan tetapi jika kita melihat secara keseluruhan kategori penyumbang PDRB akan terlihat bahwa kontribusi dari kategori Pertambangan dan Penggalian memang semakin sedikit. Hal ini terjadi dikarenakan semakin maraknya pertambangan tanpa izin yang kurang diawasi. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang lebih intensive pada sektor ini.



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

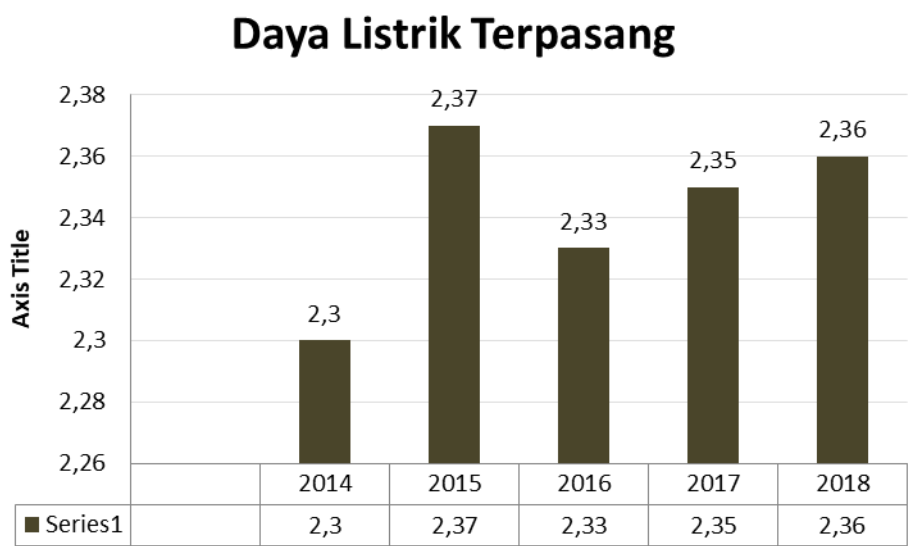
Grafik. 2.82
Kondisi PETI Tahun 2014 – 2018

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertambangan tanpa izin masih sangat tinggi, hal ini mberdampak pada beberapa hal antara lain rendahnya kontribusi sektor pertambangan dalam penyumbang pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang tidak terjaga, kerusakan kelestarian alam dan masih banyak lagi.

b. Daya Listrik Terpasang (MW)

Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok kepada masyarakat melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi. Karena seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah usaha PT. PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik terintegrasi hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari subsistem Provinsi Aceh dan

Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi.



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.83
Kondisi Daya Listrik Terpasang Tahun 2014-2018

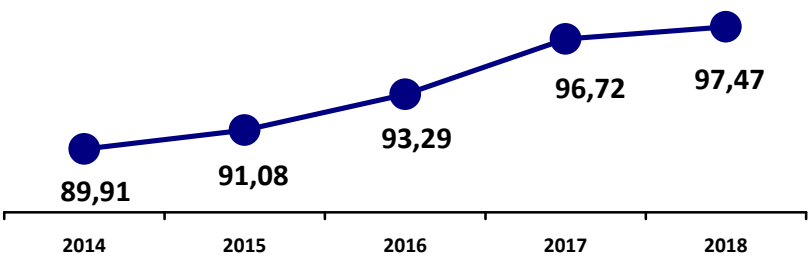
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa daya listrik terpasang di SUMBAGUT cukup tinggi sebesar 4107,2 MW yang terdiri dari Kapasitas Terpasang Provinsi Sumatera sebesar Utara 3427 MW dan Kapasitas Terpasang Provinsi Aceh sebesar 680,2 MW artinya Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 mampu mengatasi kebutuhan listriknya sendiri. Namun dengan adanya pembangunan di Sumatera Utara seperti pembangunan kawasan industri, kawasan pariwisata, pertumbuhan penduduk yang meningkat membuat kita tidak bisa mengabaikan akan kebutuhan listrik yang akan meningkat. Untuk itu kita masih perlu mengeksplorasi potensi-potensi energi baru terbarukan yang biasa dijadikan sebagai sumber energi listrik.

c. Rasio Elektrifikasi (%)

Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok kepada masyarakat melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi. Karena

seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah usaha PT. PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik terintegrasi hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero).

Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari subsistem Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi.



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.84
Rasio Elektrifikasi Tahun 2014 – 2018

Jika dilihat dari grafik di atas, Ratio Elektrifikasi Sumatera Utara pada kondisi yang baik, artinya hampir seluruh penduduk Sumatera Utara telah mendapatkan aliran listrik. Namun dengan demikian ratio elektrifikas ini diatas belum cukup, yang artinya untuk beberapa daerah belum mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar listrik. Daerah ini berada pada daerah yang belum terjangkau, sehingga masih perlu pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar akan listrik. Selain itu pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kebutuhan akan listrik dimaksud.

2.3.3.5. PERDAGANGAN

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Nilai ekspor bersih Provinsi Sumatera Utara mulai mengalami penurunan, yaitu dari U\$ 9.3 Milyar pada Tahun 2014 menjadi U\$ 9.2 Milyar pada Tahun 2018. Nilai Impor Provinsi Sumatera Utara pada

Tahun 2017 (U\$ 4.6 Milyar) atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2014 (U\$ 5.108 Milyar). Kondisi neraca perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 tercatat sebesar U\$ 4.58 Milyar. Sementara pada Tahun 2014 neraca perdagangan tercatat sebesar 4.31 Milyar. Data Ekspor bersi perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.138
Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2014-2018

TAHUN	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (000 US\$)	Berat Bersih (Ton)		Berat Bersih(Ton)
2014	9.087.526	9.361.110	7.391.305	2014	9.087.526
2015	9.008.520	7.752.788	6.853.734	2015	9.008.520
2016	8.391.024	7.776.492	6.819.193	2016	8.391.024
2017	9.017.646	9.217.734	7.038.770	2017	9.017.646
2018*	9.017.646	9.217.734	7.038.770	2018*	9.017.646

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2018

2.3.3.6. PERINDUSTRIAN

a. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada pada Tahun 2013 yang tercatat sebesar 4,85% menjadi -3,11% pada Tahun 2017. Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil juga mengalami penurunan yaitu dari 3,38% pada Tahun 2013 menjadi 0,66% pada Tahun 2017. Untuk menggambarkan pertumbuhan industri Besar dan Sedang serta Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.139
**Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang
dan Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014-2018**

Nomor	Tahun	Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil
1	2014	- 1,08%	5,41%
2	2015	11,72 %	10,49%
3	2016	0,21 %	10,75%
4	2017	- 3,11 %	0,66%
5	2018*	- 3,11 %	0,66%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2018

b. Industri Kecil Menengah

Jumlah Industri Kecil Menengah di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan selama 5 (lima) Tahun terakhir. Rekapitulasi Data Direktori Perusahaan IKM di Provinsi Sumatera Utara per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.140
Rekapitulasi Data Direktori Perusahaan IKM
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

NO	KABUPATEN / KOTA	2014	2015	2016	2017	2018*
1	KOTA MEDAN	309	309	670	1031	1439
2	KOTA BINJAI	128	490	490	544	680
3	KABUPATEN LANGKAT	37	324	611	650	724
4	KABUPATEN DELI SERDANG	249	676	1103	1317	1814
5	KOTA TEBING TINGGI	121	299	299	571	579
6	KABUPATEN SIMALUNGUN	325	402	402	402	579
7	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	21	1496	1496	1850	1920
8	KOTA PEMATANG SIANTAR	260	270	270	270	522
9	KABUPATEN TOBASAMOSIR	54	204	354	467	582
10	KABUPATEN SAMOSIR	15	54	93	132	171
11	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	43	428	428	428	645
12	KABUPATEN TAPANULI UTARA	137	356	849	1224	1604
13	KOTA SIBOLGA	163	163	163	280	361
14	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	187	100	100	287	356
15	KABUPATEN NIAS	10	44	78	84	94
16	KOTA GUNUNG SITOLI	88	808	808	808	808
17	KABUPATEN NIAS SELATAN	597	661	661	661	661
18	KABUPATEN NIAS BARAT	37	183	183	198	198
19	KABUPATEN NIAS UTARA	20	40	60	146	166
20	KABUPATEN BATU BARA	96	426	426	414	500
21	KABUPATEN ASAHAN	410	383	383	107	213
22	KOTA TANJUNG BALAI	49	150	150	189	259
23	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	81	567	567	567	567
24	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	38	70	102	792	824
25	KABUPATEN LABUHAN BATU	327	397	397	467	567
26	KABUPATEN PADANG LAWAS	51	21	21	41	100
27	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	585	593	593	593	593
28	KABUPATEN MANDAILING NATAL	76	498	498	498	574

NO	KABUPATEN / KOTA	2014	2015	2016	2017	2018*
29	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	13	29	45	297	549
30	KOTA PADANG SIDEMPUAN	106	241	241	241	550
31	KABUPATEN KARO	183	354	525	685	854
32	KABUPATEN DAIRI	369	369	369	369	439
33	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	254	254	254	254	254
	TOTAL	5439	12020	14050	17030	20746

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019

2.3.3.7. TRANSMIGRASI

Transmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Program- program yang dikembangkan di antaranya adalah pengembangan kesempatan berusaha terutama di sektor pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan aksesibilitas terhadap faktor produksi, seperti pembangunan sarana jalan, kelembagaan ekonomi, dan permodalan.

2.3.3.8. KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Produksi Perikanan

Provinsi Sumatera Utara daerah penyumbang terbesar kedua setelah Provinsi Maluku pada produksi perikanan tangkap di Indonesia. Secara umum produksi perikanan dari hasil usaha budidaya terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai perkembangan produksi perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018.

Tabel. 2.141
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2014 – 2018

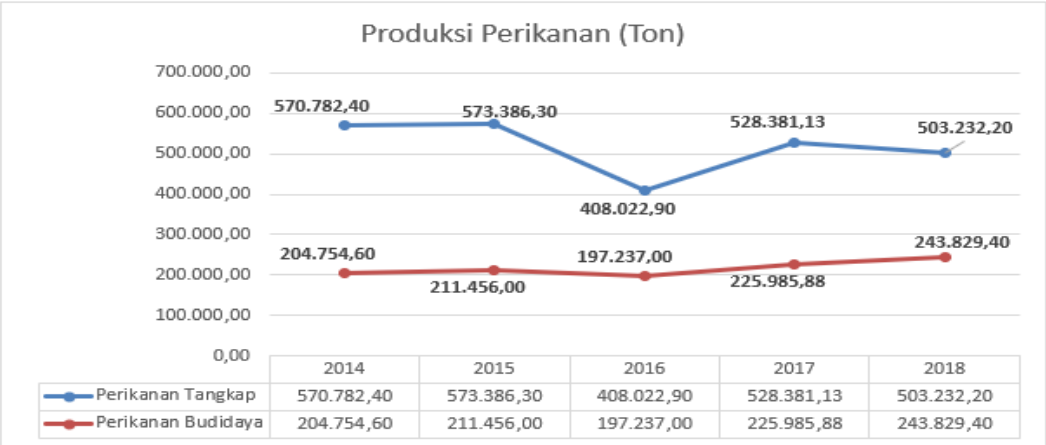
NO	KABUPATEN/ KOTA	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Medan					
	Perikanan Tangkap	104,316.90	91,141.20	88,521.00	126,616.85	34.711,6
	Perikanan Budidaya	1,617.10	8,201.40	8,374.00	8,521.61	3.584.7
2	Kota Binjai					
	Perikanan Tangkap	4.20	9.80	-	-	-
	Perikanan Budidaya	3,315.50	6,525.90	3,469.00	3,750.50	6.454.9
3	Kab. Langkat					
	Perikanan Tangkap	32,970.80	29,699.20	28,356.60	31,115.70	33.450.0
	Perikanan Budidaya	18,495.90	21,178.00	29,549.00	27,430.10	32.485.9
4	Kab. Deli Serdang					
	Perikanan Tangkap	19,261.50	17,241.90	23,866.50	26,177.87	47.519,5
	Perikanan Budidaya	24,018.70	27,002.40	35,751.00	66,579.38	89.570.2
5	Kab. Serdang Bedagai					
	Perikanan Tangkap	24,035.00	25,371.00	25,667.00	23,122.00	29.047.9
	Perikanan Budidaya	22,242.00	24,138.50	30,731.00	37,853.00	37.910.7
6	Kota Tebing Tinggi					
	Perikanan Tangkap	6.30	2.20	3.10	3.20	-
	Perikanan Budidaya	961.30	2,876.00	2,902.00	2,334.00	4.959.4
7	Kab. Batu Bara					
	Perikanan Tangkap	28,494.50	28,546.90	27,810.50	30,505.30	35.305.7
	Perikanan Budidaya	218.50	1,275.80	1,314.00	1,279.95	3.361.4
8	Kota Tanjung Balai					
	Perikanan Tangkap	22,511.60	31,878.50	34,785.80	34,643.70	76.943
	Perikanan Budidaya	47.50	1,021.60	573.00	107.20	667.7
9	Kab. Asahan					
	Perikanan Tangkap	174,934.00	202,054.50	47,644.00	33,894.35	71.103.2
	Perikanan Budidaya	2,020.00	6,112.50	3,958.00	2,626.59	5.457.9
10	Kab. Labuhanbatu					
	Perikanan Tangkap	7,519.10	609.80	6,799.20	4,108.20	12.644.6
	Perikanan Budidaya	136.90	1,036.60	176.00	1,026.00	1.511.3
11	Kab. Labuhanbatu Utara					
	Perikanan Tangkap	144.90	157.90	20.00	18.30	24.803.1
	Perikanan Budidaya	104,316.90	91,141.20	88,521.00	126,616.85	102.6
12	Kab. Labuhanbatu Selatan					
	Perikanan Tangkap	118.30	120.40	10,713.00	6,150.00	150.6
	Perikanan Budidaya	1,311.50	2,484.10	1,194.00	1,300.00	1.403.5
13	Kab. Padang Lawas					
	Perikanan Tangkap	110.40	219.20	83.70	90.40	97.4
	Perikanan Budidaya	579.50	2,647.00	3,690.00	3,423.85	8.831.9
14	Kab. Padang Lawas Utara					
	Perikanan Tangkap	82.80	101.40	2,317.10	1,310.34	9,7
	Perikanan Budidaya	1,107.20	2,069.00	2,069.00	2,380.90	3.635.0
15	Kab. Tapanuli Selatan					
	Perikanan Tangkap	217.10	245.30	72.70	3,254.73	9.941.7
	Perikanan Budidaya	3,501.60	3,841.10	3,268.00	3,647.82	7.735.6
16	Kab. Mandailing Natal					
	Perikanan Tangkap	16,510.40	10,337.70	4,575.20	18,090.00	15.034.4
	Perikanan Budidaya	2,430.00	1,556.30	1,665.00	1,665.31	3.040.7
17	Kota Padang Sidempuan					
	Perikanan Tangkap	34.10	19.20	41.50	41.40	34.6
	Perikanan Budidaya	470.80	440.50	580.00	580.70	1.128.8
18	Kota Pematang Siantar					
	Perikanan Tangkap	4,2	4.00	8.40	9.70	288.4
	Perikanan Budidaya	3,997.70	2,132.90	752.00	645.31	1.527.1
19	Kab. Simalungun					

NO	KABUPATEN/ KOTA	2014	2015	2016	2017	2018
	Perikanan Tangkap	1,238.20	435.20	-	283.20	106.9
	Perikanan Budidaya	62,088.00	41,601.80	18,573.00	1,260.00	1.4
20	Kab. Toba Samosir					
	Perikanan Tangkap	1,506.90	1,002.40	939.90	480.94	11.8
	Perikanan Budidaya	14,702.80	17,426.00	9,340.00	7,637.00	2.471.1
21	Kab. Tapanuli Utara					
	Perikanan Tangkap	422.80	32.70	26.30	18.90	4.918.1
	Perikanan Budidaya	1,279.90	2,603.90	1,290.00	1,392.00	1.323.0
22	Kab. Humbanghasundutan					
	Perikanan Tangkap	162.80	536.10	149.10	102.80	221.4
	Perikanan Budidaya	983.50	1,034.90	798.00	1,173.56	6.974.8
23	Kab. Samosir					
	Perikanan Tangkap	10,081.30	4,348.60	8,637.00	8,702.00	6.564.6
	Perikanan Budidaya	29,403.40	27,918.30	34,212.00	8,872.00	13.549.9
24	Kab. Pakpak Bharat					
	Perikanan Tangkap	-	-	-	-	-
	Perikanan Budidaya	5,099.00	31.40	34.00	33.60	65.9
25	Kab. Dairi					
	Perikanan Tangkap	1,376.20	997.20	239.30	458.10	140.7
	Perikanan Budidaya	33.70	2,602.30	1,158.00	1,122.00	4.811.5
26	Kab. Karo					
	Perikanan Tangkap	100.50	10.90	38.00	351.61	70.8
	Perikanan Budidaya	2,439.00	1,488.40	576.00	1.82	313.8
27	Kab. Nias					
	Perikanan Tangkap	1,215.90	4,314.30	889.10	840.00	1.630.1
	Perikanan Budidaya	72.50	61.70	27.00	27.00	41.1
28	Kab. Nias Selatan					
	Perikanan Tangkap	-	338.80	-	16,920.00	26.642,4
	Perikanan Budidaya	94.00	26.40	21.00	38,476.00	152.5
29	Kab. Nias Barat					
	Perikanan Tangkap	-	21.10	1,959.60	161.42	222.8
	Perikanan Budidaya	108.20	74.00	27.00	33.20	66.7
30	Kab. Nias Utara					
	Perikanan Tangkap	12,237.90	11,940.10		12,472.00	21.643.2
	Perikanan Budidaya	602.20	44.60	64.00	90.50	178.1
31	Kota Gunung Sitoli					
	Perikanan Tangkap	3,061.00	2,930.10	3,912.00	4,001.40	13.565,8
	Perikanan Budidaya	283.60	67.60	73.00	88.01	156.1
32	Kab. Tapanuli Tengah					
	Perikanan Tangkap	53,292.00	60,287.80	41,001.00	98,878.70	36.407.4
	Perikanan Budidaya	915.30	1,711.10	955.00	567.71	278.5
33	Kota Sibolga					
	Perikanan Tangkap	54,840.00	48,534.50	48,912.00	45,525.00	-
	Perikanan Budidaya	32.90	66.10	54.00	40.96	74.2
	Total					
	Perikanan Tangkap	570.782,40	573.386,30	408.022,90	528.381,13	503.232,20
	Perikanan Budidaya	204.754,60	211.456,00	197.237,00	225.985,88	243.829,40

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi 2018

Dari tabel di atas produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 yaitu sebesar 570.782,40 ton terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 503.232,20 ton, hal ini dikarenakan adanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penangkapan ikan. Tetapi untuk perikanan budidaya terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 produksi perikanan budidaya

sebesar 204.754,60 ton menjadi sebesar 243.829,40 ton pada tahun 2018.



Grafik. 2.85
Produksi Perikanan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 – 2018

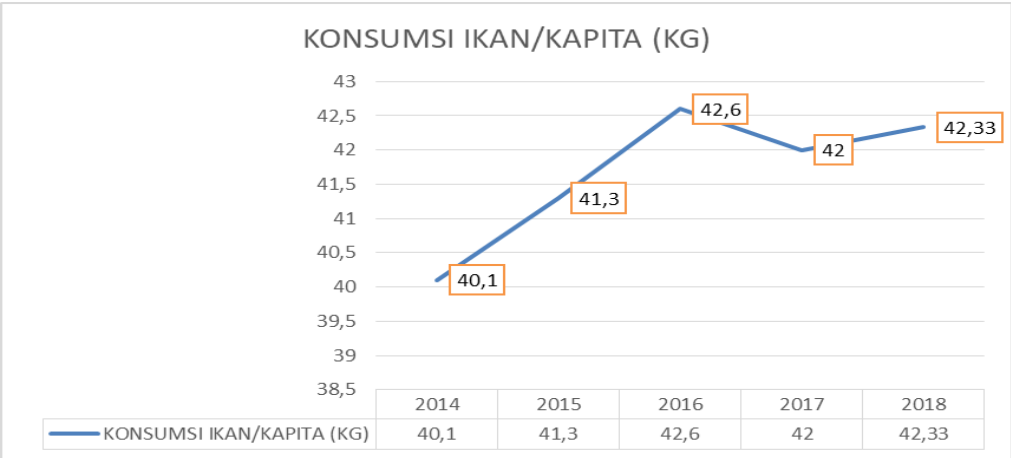
b. Konsumsi Ikan

Dari data Dinas Kelautan Perikan Provinsi Sumatera Utara, yaitu konsumsi ikan/kapita tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 1,3 kg/kapita atau meningkat sebesar 3,14%. Naiknya konsumsi ikan/kapita pada masyarakat menjadi indikator kenaikan gizi masyarakat terutama untuk sumber protein.

Tabel. 2.142
Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2014-2018

TAHUN	KONSUMSI IKAN/KAPITA (KG)
2014	40,10
2015	41,30
2016	42,60
2017	42
2018	42,33

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu Tahun 2018
(catt: nilai kurs dollar 13.000)*



Grafik. 2.86
Konsumsi Ikan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 – 2018

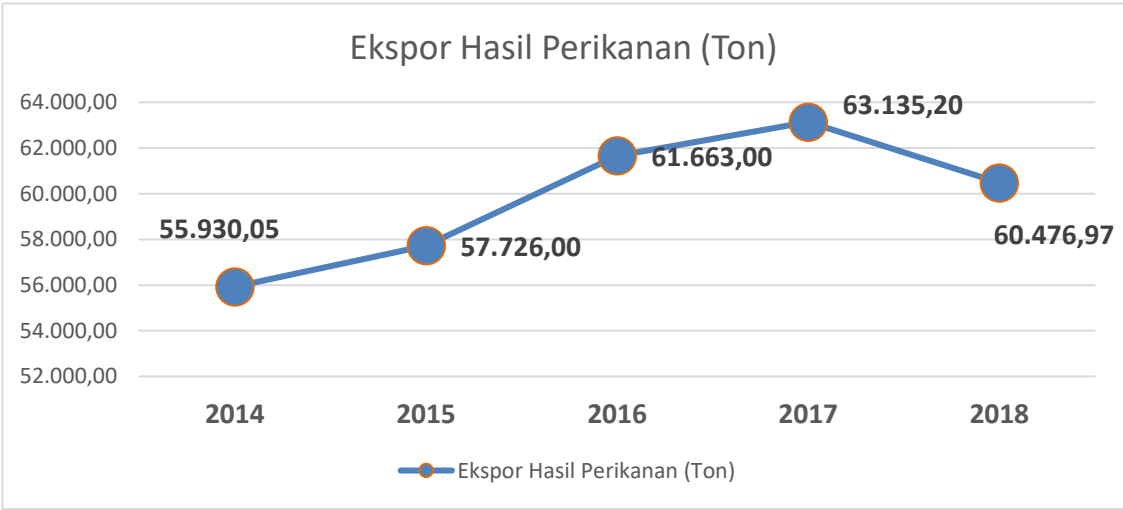
c. Ekspor Hasil Perikanan (Ton)

Dari data yang ada dapat dilihat volume ekspor perikanan terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Pada tahun 2018 jumlah ekspor sebesar 60.476,97, dan tahun 2017 eksport perikanan mengalami kenaikan yaitu sebesar 63.135,20 ton dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 61.663,00 ton. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih khusus lagi dalam usaha peningkatan nilai ekspor ikan kita. Peninjauan regulasi yang berkaitan dengan eksport di sektor perikanan dan dan juga peningkatan kualitas ikan yang akan diekspor.

Tabel. 2.143
Produksi Ekspor Tahun 2014-2018

TAHUN	EKSPOR	
	VOLUME (TON)	NILAI (US\$)
2014	55.930,05	299.591.121.35
2015	58.726,00	246.829.677,64
2016	61.663,00	334.305.733,24
2017	63.135,20	1.066.821.977.000
2018	60.476,97	846.677,580

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu tahun 2018
(catt: nilai kurs dollar 13.000)



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu tahun 2018

Grafik. 2.87
Eksport Perikanan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 – 2018

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang visioner dan

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*Sense of ownership*) juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal

bagi implementasinya.

Saat ini pemerintah menggunakan pendekatan *money follow program* dalam menyusun perencanaan yaitu pendekatan penganggaran secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang sesuai/searah dengan pencapaian tujuan program prioritas, serta sasaran prioritas nasional dan pemerintah daerah.

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
- Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
- Tersedianya Dokumen Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 -2018;
- Tersedianya dokumen RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Dalam rangka mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dan juga sebagai tindak lanjut atas Korsupgah KPK di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2016 telah dibangun Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya diimplementasikan menjadi Aplikasi e_SUMUT (Sistem Usulan Musrenbang Terintegrasi pada web <http://eplanning.sumutprov.go.id>).

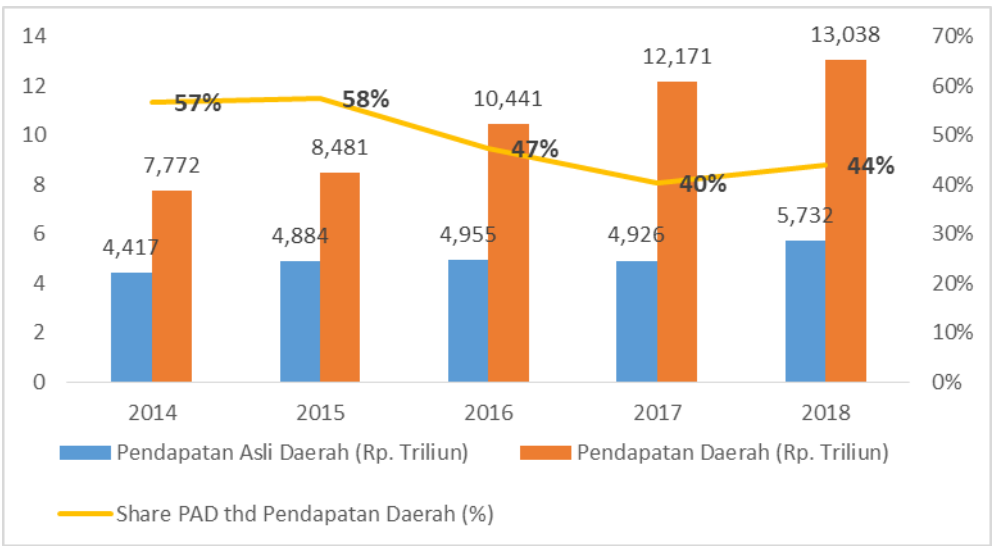
Aplikasi *e_Planning* juga bertujuan untuk menampung aspirasi seluruh anggota DPRD yang akan dihimpun dalam aplikasi e_POKIR untuk selanjutnya akan diverifikasi oleh Perangkat Daerah dan

Bappeda sebelum diakomodir kedalam rencana kerja Perangkat Daerah.

2.3.4.2. KEUANGAN

a. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya



Sumber : BPKAD Provsu 2018

Grafik. 2.88
Perkembangan PAD dan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Berdasarkan data di atas, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya dan salah satu sumber pendapatan daerah tersebut adalah pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini ditunjukkan dengan kecenderungan meningkatnya PAD Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014, jumlah PAD Provinsi Sumatera

Utara sebesar Rp. 4,417 triliun dan cenderung terus meningkat hingga tahun 2018 yang mencapai Rp. 5,732 triliun. Begitupun untuk penerimaan pendapatan daerah, pada tahun 2014 mencapai Rp. 7,772 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 13,038 triliun pada tahun 2018.

Berdasarkan data PAD dan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2014-2018 mengindikasikan derajat desentralisasi fiskal sudah relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu 2014-2018 di atas 40 persen. Untuk tahun 2014, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 57 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi sebesar 58 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 dan tahun 2017, persentase PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yakni menjadi 47 persen pada tahun 2016 dan 40 persen tahun 2017 serta 44 persen di tahun 2018.

b. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berusaha secara maksimal agar memperoleh Opini BPK yang baik terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut ini adalah hasil perolehan Opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018.

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk

mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.144
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2014 hingga 2018, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c. Persentase Silpa Terhadap APBD

Pemerintah Daerah yang mengalami defisit dalam anggaran dapat saja menyisakan dana pada akhir tahun dalam bentuk SILPA realisasian karena pelampauan target pendapatan dan tidak tercapainya target realisasi belanja. Pelampauan target pendapatan bisa disebabkan beberapa hal, seperti PAD yang ditargetnya di bawah potensi riil, informasi tentang penerimaan daerah dari Pemerintah diperoleh setelah penetapan Perda APBD-P, dan diterimanya lain-lain pendapatan yang sah setelah APBD-P ditetapkan. Sedangkan ketidaktercapaian target belanja bisa disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (*output* kegiatan tercapai, namun anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga anggaran yang belum digunakan “dibawa” ke tahun anggaran berikutnya), dan kegiatan yang batal dilaksanakan dengan alasan tertentu. Berikut disajikan perolehan persentase SILPA terhadap APBD pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.145
Persentase SILPA terhadap APBD
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Persentase SILPA terhadap APBD	0,17%	6,34%	11,02	6,19%	7,69%

**) Angka Sementara*

d. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

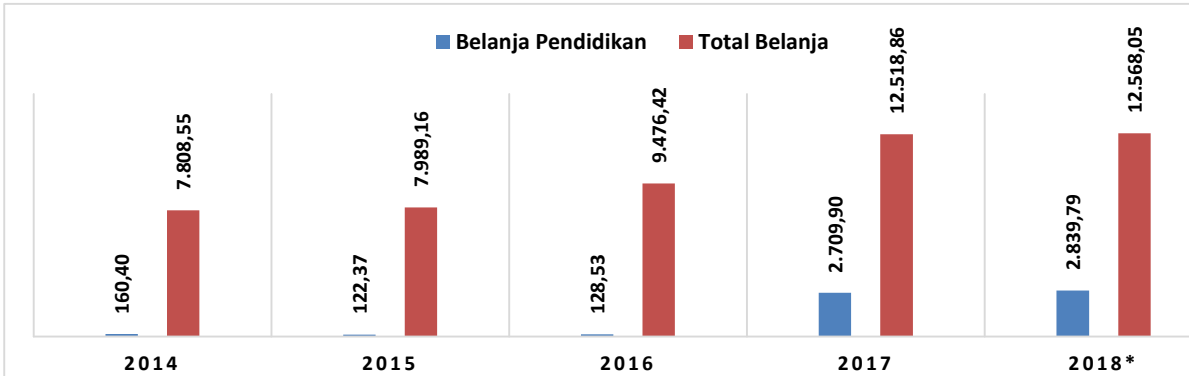
Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, maka alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% diterjemahkan dalam alokasi anggaran fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan terdiri dari sub fungsi yaitu : (1) Pendidikan Anak Usia Dini, (2) Pendidikan Dasar, (3) Pendidikan Menengah, (4) Pendidikan Non Formal dan Informal, (5) Pendidikan kedinasan, (6) Pendidikan Tinggi, (7) Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan, (8) Pendidikan Keagamaan, (9) Litbang Pendidikan, (10) Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, (11) Pendidikan Lainnya yang terdapat di beberapa perangkat daerah.

Guna mencerdaskan anak bangsa sebagai calon pemimpin masa depan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara konsisten mempertahankan anggaran pendidikan di mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sebesar 20%. Adapun sasaran pembangunan pendidikan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain : pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu dan lain sebagainya. Untuk melihat persentase belanja Pendidikan dari tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.146
Persentase Belanja Pendidikan dibanding Total Belanja
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Persentase Belanja Pendidikan dibanding Total Belanja	23,05%	23,54%	24,36%	24,65%	22,60%

Catatan : *) Angka Sementara



*) Angka Sementara

Grafik. 2.89
Perbandingan Belanja Pendidikan Terhadap
Total Belanja 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)

e. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Amanat pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menjadikan alokasi belanja di bidang kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diluar gaji, sementara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji. Tujuan dari pembangunan bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik. Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat termanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total belanja sesuai dengan amanat regulasi. Anggaran kesehatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menguatkan program upaya kesehatan

promotif preventif. Adapun besaran persentase belanja kesehatan dibanding total belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.147
Persentase Belanja Kesehatan dibanding
Total Belanja 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Persentase Belanja Kesehatan dibanding Total Belanja	14.84%	15,75%	17,83%	18,05%	4,43%

**) Angka Sementara*

f. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Kuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik. Elemen pokok dalam struktur keuangan daerah yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

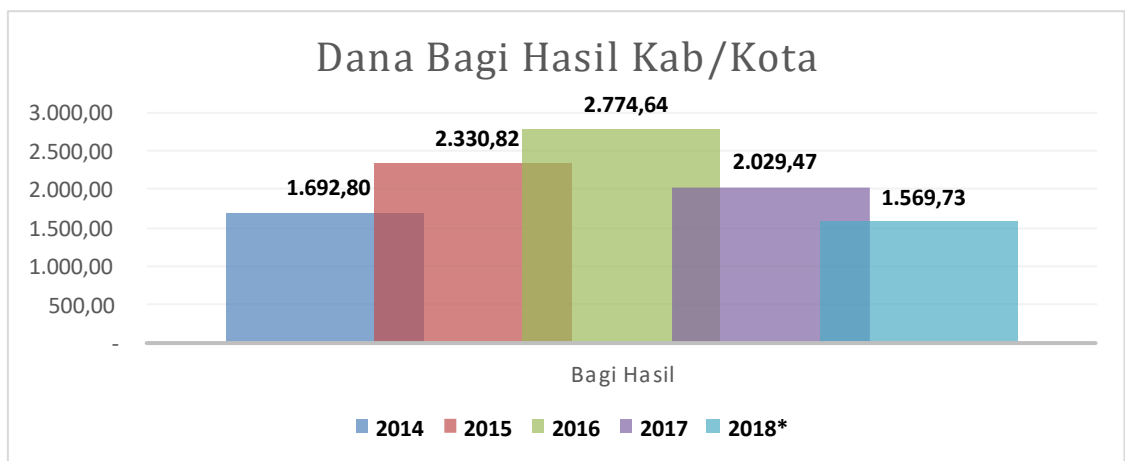
Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 di Belanja Darah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perbandingan yang fluktuatif ini dapat dilihat dari hasil peroleh perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung yang dimulai dari tahun 2014 sebesar 45.37%, tahun 2015 sebesar 35.22%, tahun 2016 sebesar 34.66% dan tahun 2017 sebesar 53.15% dan tahun 2018 sebesar 30.13% untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.148
Perbandingan antara Belanja Langsung dengan
Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	45,37%	35,22%	34,66%	53,15%	30,13%

g. Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Bagi hasil Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagi hasil pajak yang berasal dari pendapatan pajak yang dipungut dari masing-masing Kabupaten/Kota dibagihasilkan berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Bagi hasil tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan perimbangan keuangan Provinsi dan keuangan Kabupaten/Kota. Kebijakan perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan pemeratakan kemampuan/kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) antar daerah berdasar derajat kebutuhan (*fiscal need*) masing-masing.



Grafik. 2.90
Besaran Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
Periode Tahun 2014-2018

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa besaran bagi hasil untuk Kabupaten/Kota sangat fluktuatif, tahun 2014 sebesar Rp. 1,692 triliun atau naik sebesar, tahun 2015 sebesar Rp. 2,330 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 29,28% dan tahun 2016 sebesar Rp. 2,774 triliun mengalami persentase yang stagnan sebesar 29.28% dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 2,029 Triliun atau menurun sebesar 15,84%, dan di Tahun 2018 kembali turun menjadi Rp. 1,569 Triliun.

h. Penetapan APBD

APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah. Sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah.

Dalam penyusunan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berusaha dengan maksimal untuk dapat tepat waktu. Keterlambatan dalam penetapan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Di mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017 penyusunan APBD yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan elemen legislative berusaha untuk dapat menyusun APBD tepat waktu sehingga diperoleh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi efektif dan efisien.

2.3.4.3. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

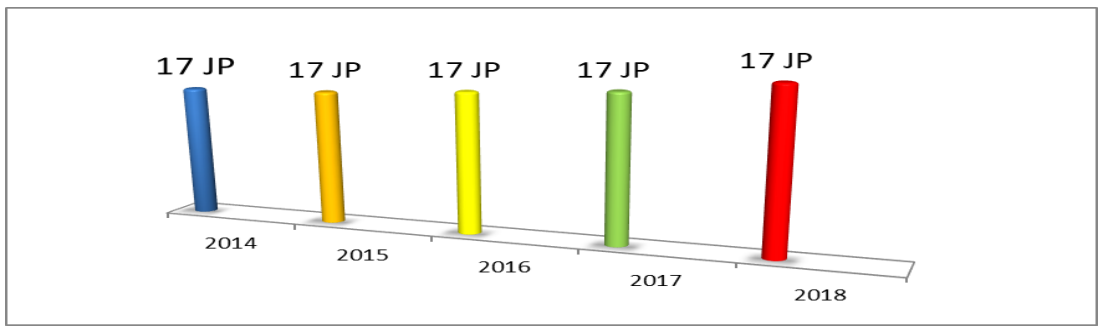
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 stagnan,

perkembangan capaian dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

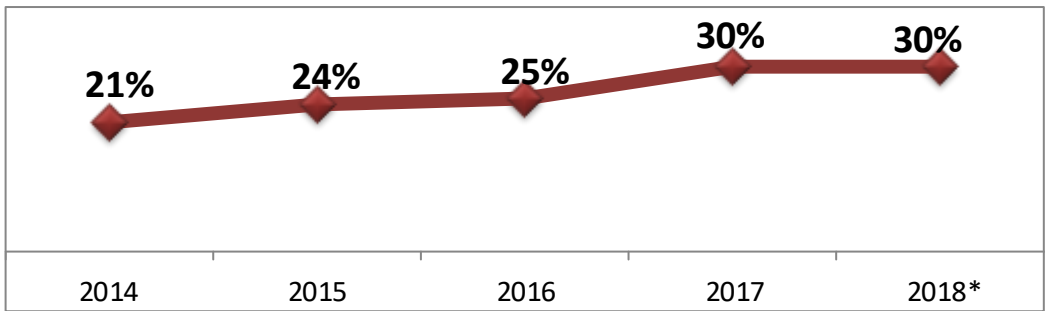


Sumber : BPSDM Provsu 2018

Grafik. 2.91
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2018

b. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal di Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2017 capaian Sumatera Utara sebesar 30%, capaian Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal dapat dilihat pada Grafik berikut :

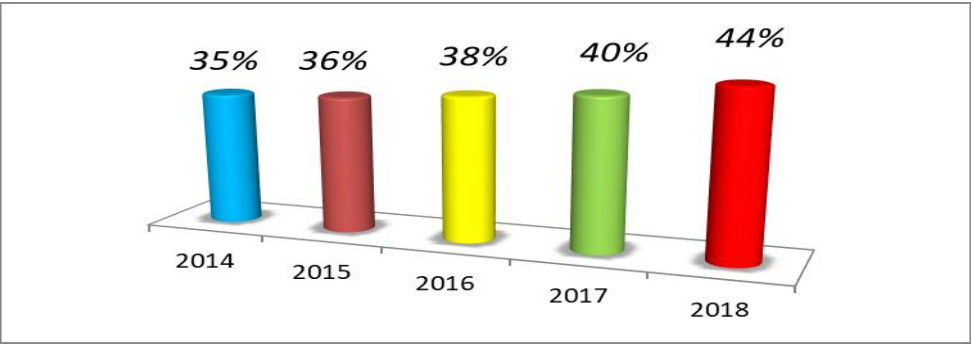


Sumber : BKD Provsu 2018
*) Angka Sementara

Grafik. 2.92
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2014-2018

c. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2017 target mencapai 44 persen, perkembangan Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

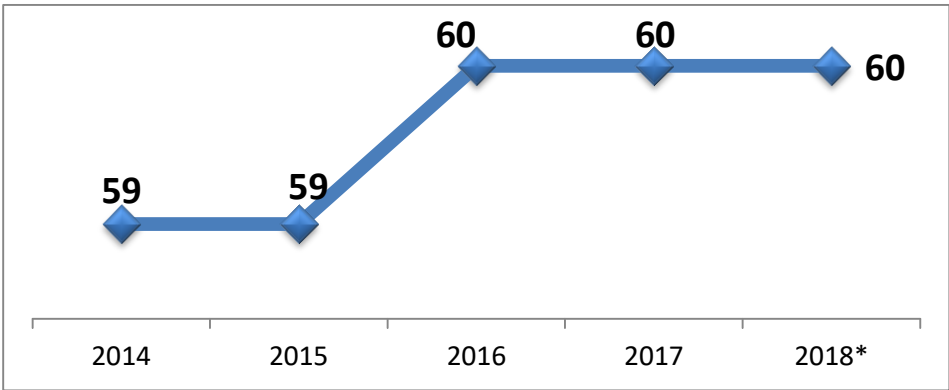


Sumber : BPSDM Provsu 2018

Grafik. 2.93
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2014-2018

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2015 stagnan, kemudian peningkatan terjadi pada tahun 2016 hingga 2018, perkembangan dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

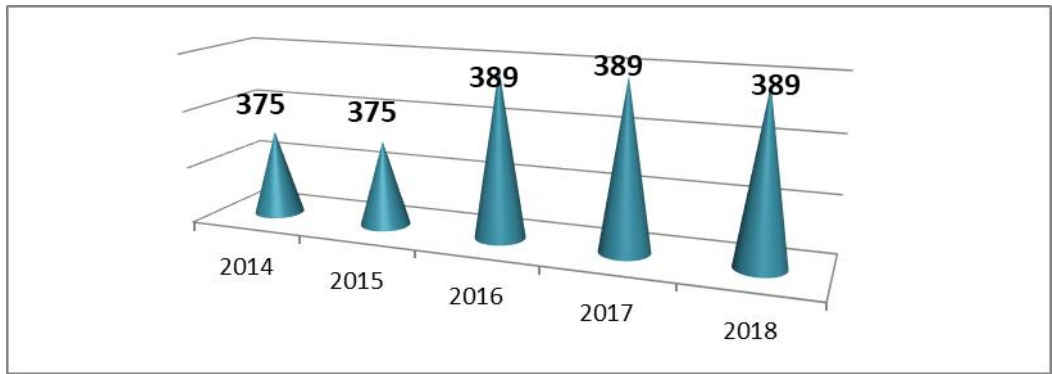


Sumber : BKD Provsu 2018
*) Angka Sementara

Grafik. 2.94
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2014-2018

e. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 hingga 2015 stagnan yaitu sebesar 375 jabatan, terjadi peningkatan pada tahun 2016 hingga 2018 sebesar 389, perkembangan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

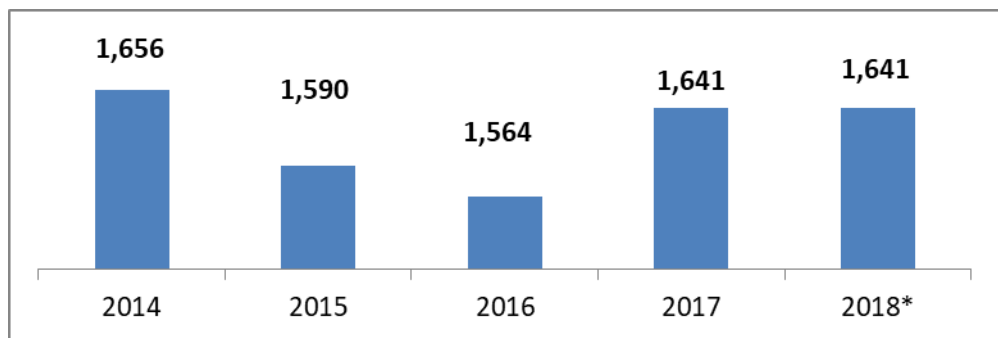


Sumber : BKD Provsu 2018

Grafik. 2.95
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Tahun 2014-2018

f. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Fluktuatif, dimana pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan yaitu sebesar 1.590 dan 1.564, kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 1.641, perkembangan dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



Sumber : BKD Provsu 2018

Grafik. 2.96
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu
Pada Instansi Pemerintah Tahun 2014-2018

2.3.4.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Data persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2014 hingga 2018 sudah mencapai seratus persen, perkembangan persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.149
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2014-2018

INDKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu 2018

b. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah perbandingan jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi dengan total perangkat daerah. Perkembangan dari tahun 2014 hingga 2018 stagnan, tidak ada kemajuan, namun pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan sebesar 42.11 persen, perkembangan persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.150
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2014-2018

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	13,16%	13,16%	13,16%	42,11%	42,11%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

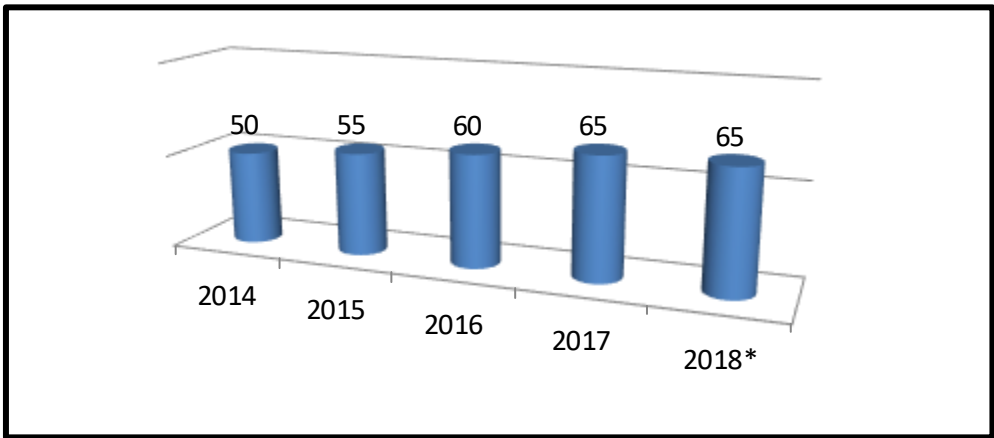
2.3.4.5. PENGAWASAN

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Proses Kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase Tindak Lanjut Temuan adalah jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan total jumlah total temuan, sejak tahun 2014 hingga 2018 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi

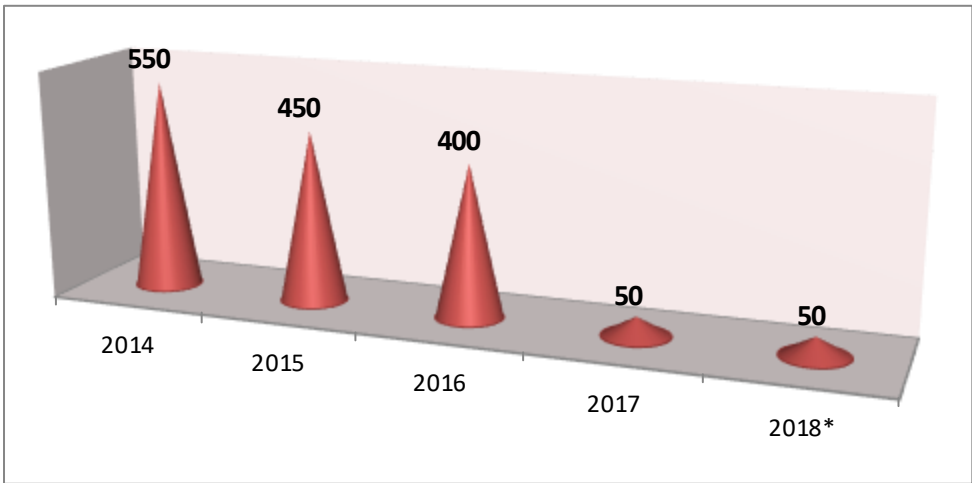
Sumatera Utara terus meningkat, sebagaimana terlihat pada Grafik berikut ini :



Sumber : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
*) Angka Sementara

Grafik. 2.97
Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2014-2018
Jumlah Temuan BPK

Sejak tahun 2014 hingga 2018, jumlah temuan BPK di Provinsi Sumatera Utara terus menurun, sebagaimana terlihat pada Grafik dibawah ini :



Sumber : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
*) Angka Sementara

Grafik. 2.98
Jumlah Temuan BPK
Tahun 2014- 2018

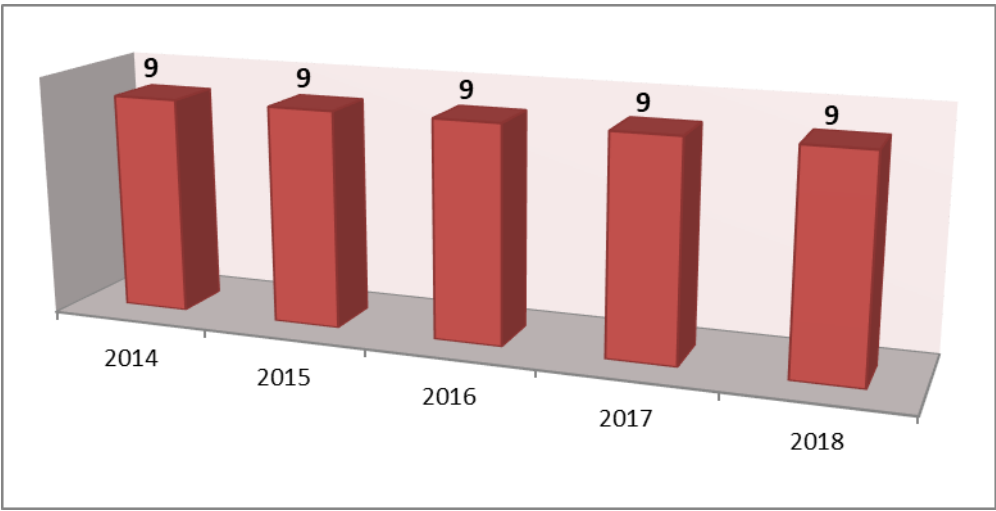
2.3.4.6. SEKRETARIAT DEWAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.

a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

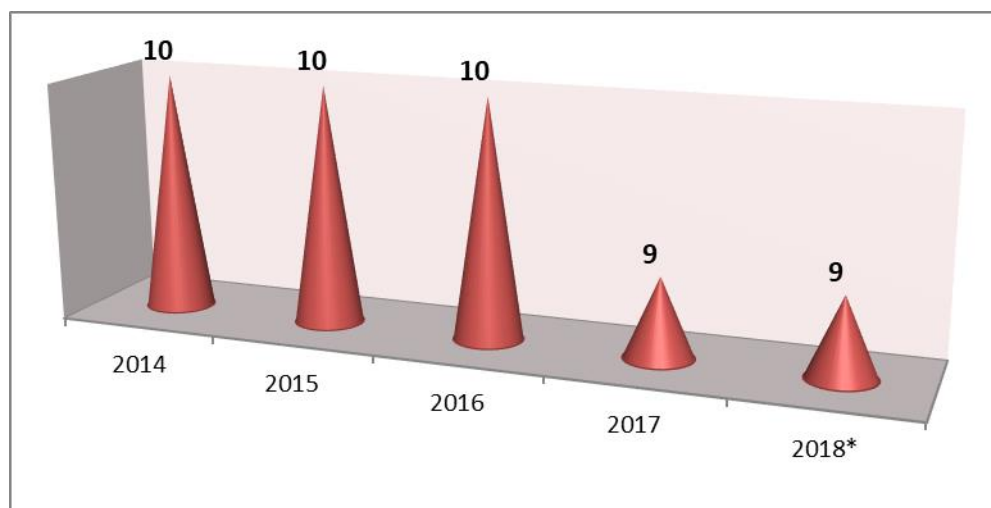
Capaian Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sejak tahun 2014 hingga 2018 stagnan, perkembangannya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Grafik. 2.99
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

b. Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana 5 (lima) tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2015 stagnan, namun terjadi penurunan pada tahun 2017 dan 2018.



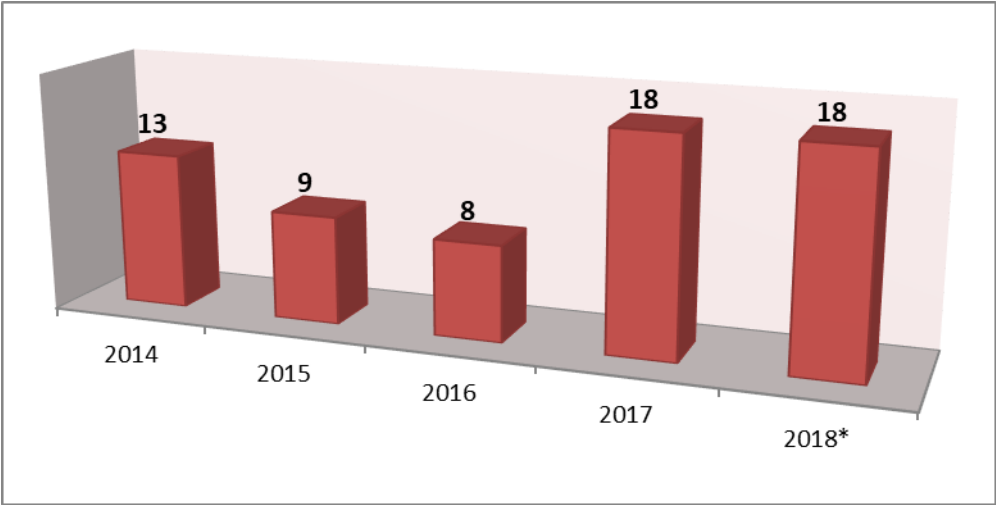
Grafik. 2.100

Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2014-2018

c. Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dalam melaksanakan fungsi pengawas, pembentukan perda dan anggaran telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD. Pada tahun 2017 DPRD membentuk Perda sebanyak 18 Peraturan Daerah (tertinggi), sedangkan pada tahun 2016 DPRD hanya membentuk Perda sebanyak 8 Perda (terendah). Pembentukan Perda bersama Kepala Daerah yang diusulkan oleh OPD teknis. Perkembangan terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, Dan Anggaran

Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :



Sumber : Sekretariat DPRD 2018
*) Angka Sementara

Grafik. 2.101
Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDAdan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2014-2018

d. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Provsu

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dan dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi dapat dirangkum dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*). Dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

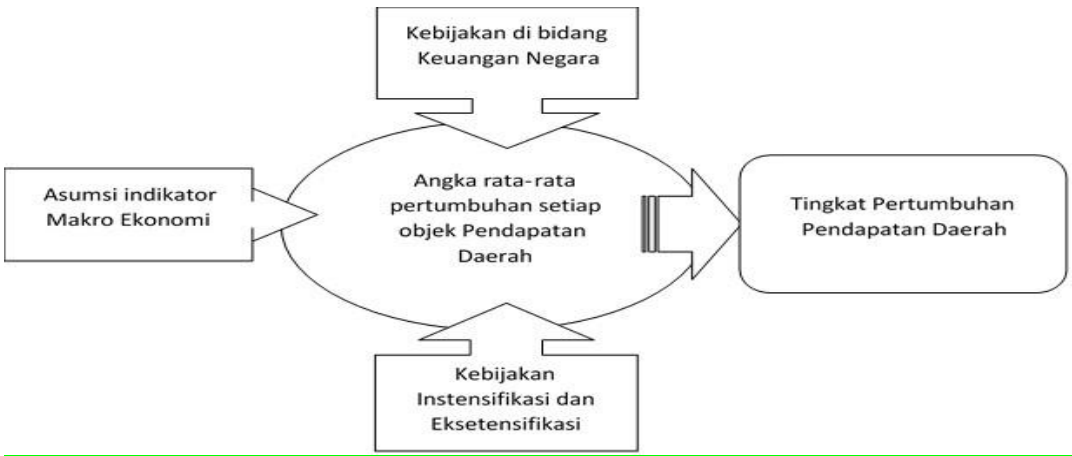
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan Pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat Berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, Termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka Penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara ringkas, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau

kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam Gambar dibawah :



Sumber : Permendagri 86 Tahun

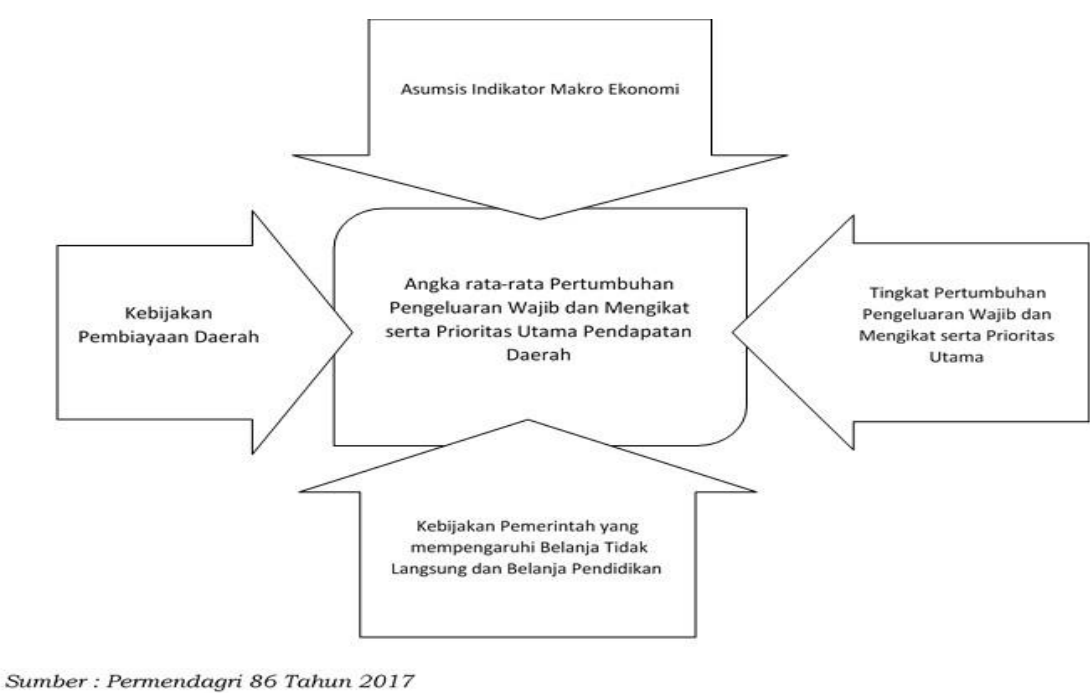
Gambar 3.1
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, Pendapatan Daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan Negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan

melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi Pendapatan Daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Dari formulasi dimaksud diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek Pendapatan Daerah yang secara kumulatif mencerminkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah. Angka pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

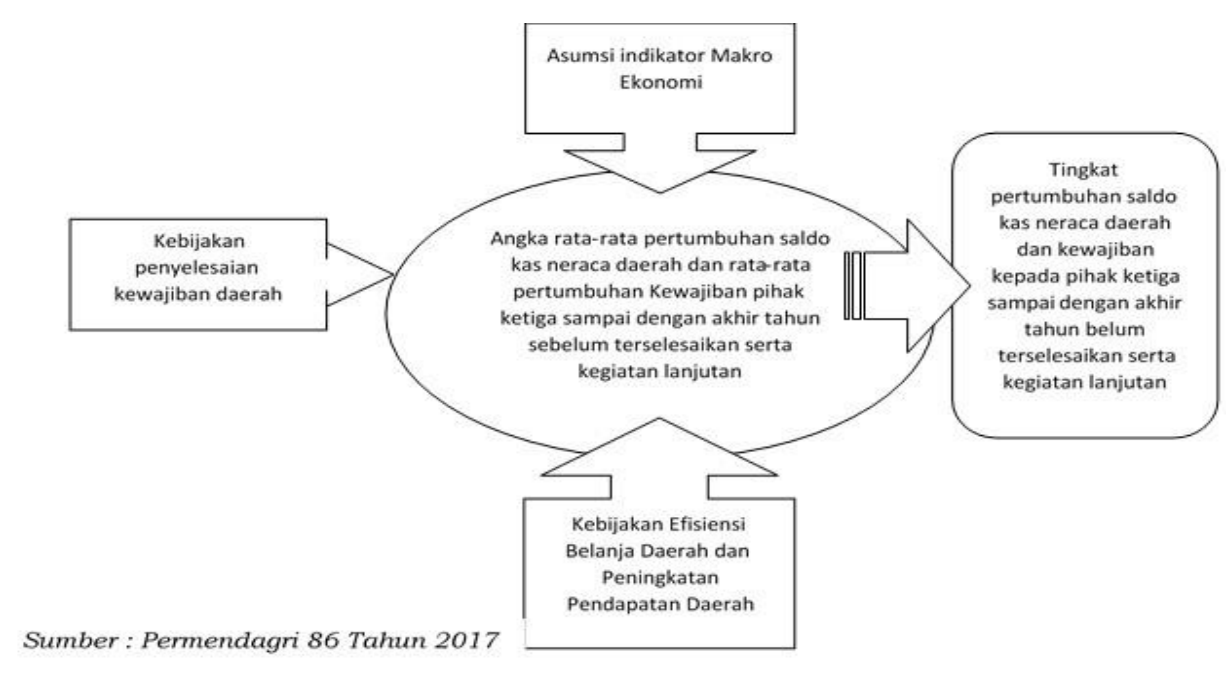
Setelah dilakukan analisis Pendapatan Daerah, perlu dilakukan analisis Belanja Daerah dengan kerangka pemikiran yang digambarkan pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 3.2
Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Analisis mengenai Belanja Daerah, didasarkan pada kondisi

perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada Kebijakan Pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan Pembiayaan Daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari Belanja Daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang. Selain analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dilakukan analisis berkaitan dengan Pembiayaan Daerah yang rumusan pemikiran digambarkan pada Gambar berikut :



Gambar 3.3
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam menganalisis Pembiayaan Daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi Belanja Daerah dan peningkatan Pendapatan Daerah, sebagai komponen

pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2013-2018

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk dapat melihat perkembangan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, terlebih dahulu dilihat asumsi indikator makro ekonomi sebagai gambaran kondisi perekonomian di lapangan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
(Dalam Persen) Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PERTUMBUHAN EKONOMI	5.23	5.10	5.18	5.12	5.18
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.77	7.48	5.71	5.31	4.87
b	Pertambangan dan Penggalian	4.48	3.62	5.48	4.75	5.46
c	Industri Pengolahan	0.54	5.80	3.06	2.31	3.66
d	Pengadan Listrik, Gas	7.43	4.11	2.91	8.72	2.58
e	Pengadaan Air	6.74	3.40	6.65	6.67	2.90
f	Kontruksi	8.41	2.08	4.82	6.79	5.45
g	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.44	3.30	5.09	5.87	6.11
h	Transportasi dan Pergudangan	6.22	5.83	6.14	7.35	6.14

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.37	5.57	6.14	7.32	7.53
j	Informasi dan Komunikasi	4.66	7.11	7.21	8.57	8.43
k	Jasa Keuangan	6.57	9.27	5.80	0.49	1.73
l	Real Estate	7.71	6.21	5.53	7.56	5.34
m	Jasa Perusahaan	7.35	4.47	5.29	7.46	7.10
n	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.21	4.70	9.79	2.52	6.12
o	Jasa Pendidikan	0.06	8.40	5.76	4.93	6.29
p	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.38	4.64	6.00	7.64	5.90
q	Jasa Lainnya	5.98	7.86	6.56	7.56	5.96
2	INFLASI	8.17	3.24	6.34	3.20	1.23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama tahun 2014 hingga 2018, realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada pada kisaran diatas 5 (lima) persen per tahun. Namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan diakibatkan tergerusnya harga komoditas yang menjadi unggulan Sumatera Utara yaitu Kelapa Sawit dan Karet, sehingga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara hanya mencapai 5,10 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hingga tahun 2018 terus meningkat, sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan sektoral khususnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Sektor Industri Pengolahan, yang merupakan sektor-sektor produksi utama penopang perekonomian Sumatera Utara.

Dengan pendekatan tersebut, dapat dilihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor produksi utama perekonomian di Sumatera Utara, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi menandai peningkatan output pada sektor-sektor produksi utama, juga sebaliknya. Pergerakan output sektor-sektor produksi utama tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Pendapatan Daerah. Untuk dapat melihat bagaimana pengaruh tersebut, terlebih dahulu perlu dilihat kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2014-2018 sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan mutu, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, dan menggali sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan retribusi sewa dari aset tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Daerah;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - i. Mengupayakan koordinasi PT. Pertamina (Persero) dalam hal akurasi data pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - j. Mengupayakan peningkatan pajak rokok daerah yang akan diberlakukan pada tahun 2014 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan, melalui :
 - a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan, termasuk untuk memperoleh dana bagi hasil sub sektor perkebunan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah, melalui :
 - a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh SKPD dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 - b. Mengembangkan ekstensifikasi PAD, dengan meminimalisir resiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah.

Pengaruh dari pergerakan output sektor-sektor produksi utama dalam hal ini diindikasikan melalui pergerakan pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan kebijakan Pendapatan Daerah, selama tahun 2014-2018 tergambar dalam rencana dan realisasi Pendapatan Daerah pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Persentase Realisasi terhadap Rencana Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018

Tahun	Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp.)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.)	% Realisasi Pendapatan Daerah
2013	8,481,871,649,956	7,397,986,773,338	87.22
2014	8,583,954,472,850	7,772,029,153,270	90.54
2015	9,203,933,142,743	8,480,758,952,969	92.14
2016	9,515,149,963,105	10,440,618,930,401	109.73
2017	9,718,943,463,247	12,170,582,105,913	125.23
2018	12,423,931,859,535	12,703,058,587,891	102.25

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

PAD terdiri atas:

- Penerimaan pajak daerah
- Penerimaan retribusi daerah
- Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer terdiri dari:

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- Bagi hasil sumber daya alam
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus
- Dana Otonomi Khusus (Transfer Pemerintah Pusat)
- Dana penyesuaian (Transfer Pemerintah Pusat)

Sedangkan pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari:

- Bantuan/Hibah
- Dana Darurat
- Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya
- Pendapatan Lainnya dari Pemerintah

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Realisasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan sejak tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun (hingga tahun 2018) sebesar 13,46 persen. Pada tahun 2016 pendapatan Provinsi Sumatera

Utara tercatat Rp 10,44 triliun meningkat Rp 1,95 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 23,11 persen.

Sumber pendapatan terbesar berasal dari Pajak Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 50,27 persen. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang signifikan berasal dari Pajak Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 90,72 persen. Salah satu faktor pengungkit eksternal pertumbuhan retribusi tersebut dikarenakan adanya pelimpahan pengelolaan BPHTB dan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2012. Disamping itu komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 6,07 persen, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 250.240 miliar atau sebesar 6,11 persen.

Jika melihat Tabel dibawah ini keseluruhan komponen pendapatan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2013-2018 disajikan sebagai berikut :

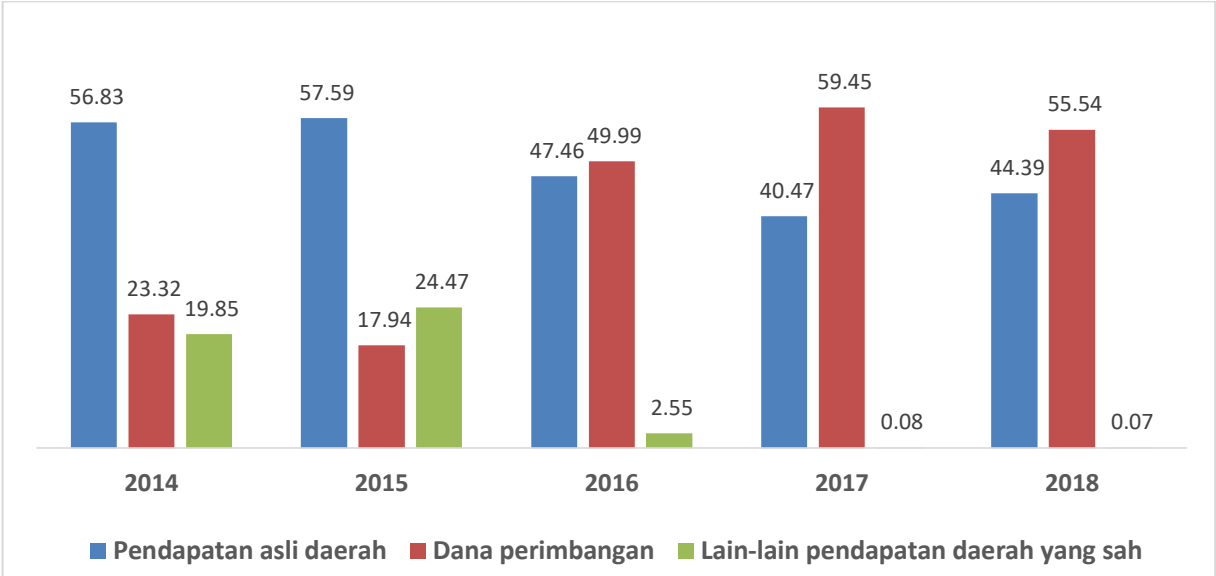
Tabel 3.3
Rata- rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 – 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.1	Pendapatan asli daerah	4,416,811,865,266	4,883,880,619,308	4,954,833,100,869	4,925,627,725,733	5,638,960,579,479
1.1.1	Pajak daerah	4,054,634,671,325	4,427,143,658,803	4,446,393,905,465	4,486,811,919,686	5,219,324,543,311
1.1.2	Retribusi daerah	78,497,614,144	36,071,947,471	34,505,500,522	33,959,567,600	36,614,846,458
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	156,330,872,843	250,240,903,282	259,493,568,323	277,500,967,496	191,995,313,161
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	127,348,706,954	170,424,109,752	214,440,126,559	127,355,270,951	191,025,876,549
1.2	Dana perimbangan	1,812,638,981,079	1,521,253,168,298	5,219,273,756,069	7,235,420,477,680	7,055,134,429,266
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	403,778,317,079	334,244,916,798	511,083,219,609	567,882,964,200	513,849,016,717
1.2.2	Dana alokasi umum	1,349,132,276,000	1,139,261,371,000	1,604,505,673,000	2,638,744,012,480	2,629,224,545,000
1.2.3	Dana alokasi khusus	59,728,388,000	47,746,880,500	3,103,684,863,460	4,028,793,501,000	3,912,060,867,549
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1,542,578,306,925	2,075,625,165,363	266,512,073,463	9,533,902,500	8,963,579,146
1.3.1	Hibah	30,087,355,809	10,809,017,000	221,411,401,185	9,533,902,500	8,963,579,146
1.3.2	Dana darurat	-	-	39,666,323,000	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,508,790,304,934	2,061,543,814,318	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan lainnya dari Pemerintah	3,700,646,182	3,272,334,045	5,434,349,278	-	-
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		7,772,029,153,270	8,480,758,952,969	10,440,618,930,401	12,170,582,105,913	12,703,058,587,891

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara 2018

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Daerah (Tabel 3.3), terlihat bahwa realisasi total Pendapatan Daerah dari tahun 2014 s.d 2018 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,16 persen. Realisasi terbesar Pendapatan Daerah kurun waktu Tahun 2014 s.d 2015 berada pada komponen Pendapatan Asli Daerah, namun sejak tahun 2016 s.d 2018 beralih kepada Dana Perimbangan. Hal ini disebabkan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan Dana Perimbangan khususnya transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang semula masuk dalam komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah beralih ke komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dana Perimbangan. Komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus nilainya mencapai 19.41 persen dari total Pendapatan Daerah di tahun 2014 dan 24,31 persen di tahun 2015 untuk tahun

berikutnya sangat berpengaruh terhadap perbandingan nilai Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan pada tahun 2016 s.d 2018. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

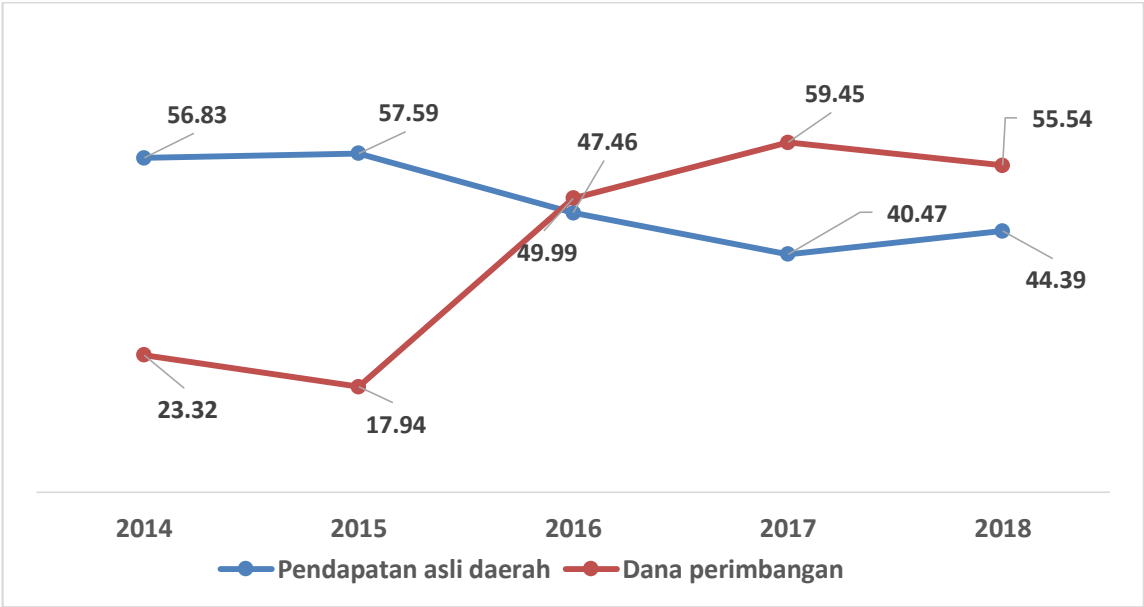


Grafik. 3.1
Persentase Komponen Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2014 yang semula sebesar

56,83 persen mengalami peningkatan menjadi 57,59 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 47,46 persen, tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 40,47 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 44.39 persen. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,94 persen yang semula sebesar 23,32 pada tahun 2014 hingga pada tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai 49,99 persen dan 59,45 persen di tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 55.54 persen.



Grafik. 3.2
Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Provinsi Sumatera Utara

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2014-2018 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan Belanja Daerah tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 % anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang semakin baik, cepat, bermutu, dan terjangkau.
4. Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, drainase, sarana air bersih, dan lainnya.
5. Melakukan efisiensi anggaran dengan menilai secara ketat terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, belanja perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa.
6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah lingkaran luar.
8. Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
9. Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sehingga menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan

- masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
10. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar OPD.

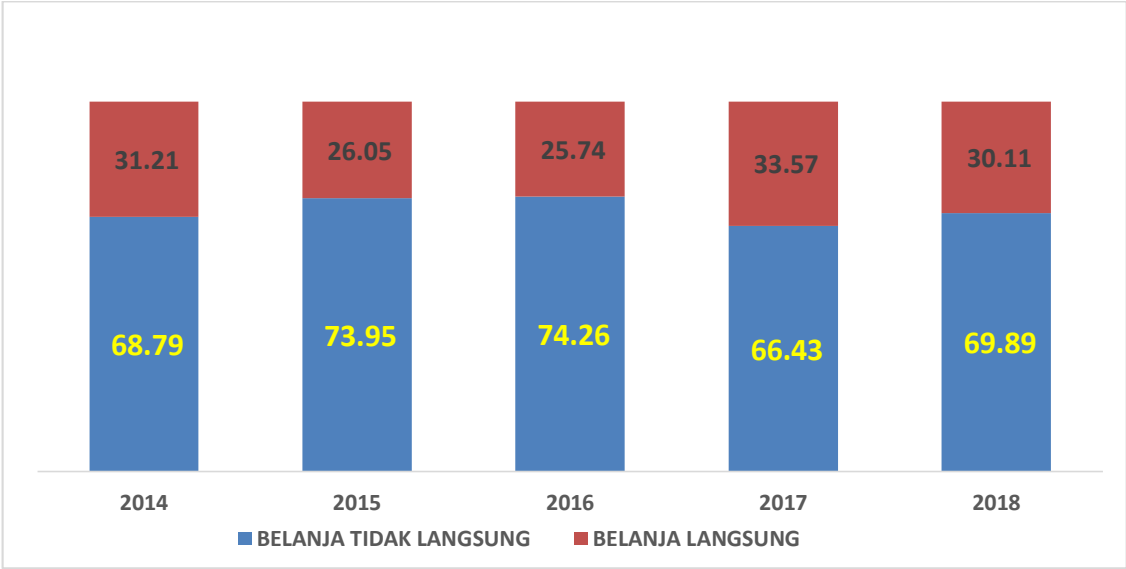
Tabel 3.4
Nilai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Periode 2014 – 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	1,008,161,978,816	1,055,299,206,507	1,115,950,649,213	3,037,330,274,182	3,464,489,476,375
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	1,611,718,256,710	2,094,026,766,000	3,010,055,530,000	3,620,208,919,358	3,165,070,721,289
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1,065,000,000	-	-	-	-
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	1,692,809,638,822	2,330,828,370,083	2,774,649,016,371	1,982,455,818,915	1,569,730,611,414
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1,053,174,611,548	405,929,354,911	134,545,437,669	2,443,753,800	528,068,540,828
2.1.8	Belanja tidak terduga	4,482,346,000	-	2,002,321,560	18,750,000,000	53,155,528,758
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,371,411,831,896	5,886,083,697,501	7,037,202,954,813	8,661,188,766,255	8,780,514,878,664
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	144,540,208,585	151,092,147,808	150,934,730,809	121,913,822,523	119,909,842,025
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1,146,633,040,611	989,746,989,128	1,268,431,086,312	2,155,463,994,769	2,098,059,596,323
2.2.3	Belanja modal	1,145,972,228,647	932,244,349,249	1,019,855,142,610	2,099,190,679,803	1,564,903,232,653
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2,437,145,477,843	2,073,083,486,185	2,439,220,959,731	4,376,568,497,095	3,782,872,671,001
	TOTAL JUMLAH BELANJA	7,808,557,309,739	7,959,167,183,686	9,476,423,914,544	13,037,757,263,350	12,563,387,549,665

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa komponen Belanja Daerah terdiri dari 2 kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dan Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditentukan kurun waktu tahun 2014 s.d 2018 terus mengalami peningkatan dengan trend rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 16,53 persen sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 diatas. Dari sisi kelompok belanja, rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung mencapai 12,19 persen dan Belanja Langsung mencapai 15,32 persen.



Tabel 3.5
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Provinsi Sumatera Utara

Persentase proporsi antara kelompok Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung dari Tahun 2014 s.d 2018 secara umum dapat dilihat Gambar diatas bahwa kelompok Belanja Tidak Langsung lebih besar dibanding Belanja Langsung dengan perbandingan proporsi rata-rata 70,38 persen besaran kelompok Belanja Tidak Langsung dan 29,62 proporsi Belanja Langsung.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018 disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.5
Rincian Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Periode 2014 – 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	51,426,062,191	14,897,905,723	536,274,841,422	945,175,157,437	841,496,523,210
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan dana bergulir		-	1,000,000	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51,426,062,191	14,897,905,723	536,275,841,422	945,175,157,437	841,496,523,210
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	332,611,537,736	78,000,000,000	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
C	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	332,611,537,736	78,000,000,000	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	51,426,062,191	14,897,905,723	868,887,379,158	1,023,175,157,437	841,496,523,210

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Dari data di atas terlihat bahwa penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara berfluktuatif setiap tahunnya, dimana SiLPA memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat tidak signifikan setiap tahunnya, dimana Penyertaan Modal (Investasi) Daerah memberikan kontribusi pada tahun 2016 dan tahun 2017 dalam pengeluaran pembiayaan daerah, disebabkan oleh adanya pemberian penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Perusahaan Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan social bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Asset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan, dan (5) Aset Lainnya.

Tabel 3.6
Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	KATA-KATA PERTUMBUHAN %
I	ASET	14.583.981.924.092,70	16.465.581.739.483,30	12.307.648.066.986,50	14.152.149.422.267,70	19.618.093.925.218,90	0,10
A	ASET LANCAR	190.789.478.526,74	630.067.042.905,21	1.788.323.062.179,83	2.125.870.764.482,86	2.700.640.310.834,84	1,05
1	Kas						
2	Kas di Kas Daerah	45.225.748.117,79	6.035.278.270,21	523.953.280.645,62	1.154.661.149.826,12	832.429.227.070,22	49,69
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.200.314.074,00	1.238.577.292,00	3.992.884.909,00	-	7.196.551.383,00	0,17
4	Kas Lainnya di Bendahara	4.262.932.019,00	7.624.050.161,00	-	3.412.129.613,00	-	0,07
5	Kas di Bendahara Penerimaan	66.714.000,00	152.123.304,00	462.100.009,92	78.346.980,00	-	0,15
6	Kas di Bendahara BLUD	-	-	8.759.750.344,00	9.650.962.149,00	1.763.054.375,00	0,06
7	Kas Lainnya	-	-	1.250.000,00	-	-	-
8	Piutang Pendapatan	-	-	1.189.825.036.469,00	1.196.875.672.470,00	1.678.925.016.137,00	0,28
9	Piutang	-	62.706.828,00	-	-	-	-
10	Piutang Pajak	80.435.576.961,00	552.201.346.315,00	-	-	-	1,02
11	Piutang Retribusi	1.630.059.815,76	75.504.737,00	-	505.253.703.445,49	-	3,97
12	Penyisihan Piutang	-	-	14.814.097.847,38	-	16.881.855.713,49	0,40
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	117.834.000,00	147.105.000,00	-	-	-	0,27
14	Sewa Dibayar Dimuka	843.953.445,00	1.279.602.163,00	-	-	-	0,14
15	Piutang Lainnya	6.461.472.662,00	7.705.818.289,00	313.026.051,67	178.496.550.269,03	104.091.710.583,63	113,70
16	Beban Dibayar Dimuka	-	-	1.641.305.755,00	2.406.690.266,00	3.121.166.673,00	0,35
17	Persediaan	45.544.873.432,19	53.544.930.546,00	74.188.525.843,00	85.542.966.355,20	89.995.440.326,48	0,33
B	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.940.297.956.403,53	2.114.568.502.591,47	2.171.537.402.069,51	2.643.232.669.499,30	3.043.382.412.359,71	0,13
1	Investasi Nonpermanen	8.050.000.000,00			62.462.332,00		
a	Investasi Nonpermanen Lainnya-Dana Bergulir	6.333.499.055,00	6.333.499.055,00	8.050.000.000,00	2.550.500.000,00	874.750.000,00	0,29
b	Investasi Nonpermanen Lainnya-Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.716.500.945,00	1.716.500.945,00	-	-	-	-
c	Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya	-	-	-	24.268.280.639,00	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	8.050.000.000,00	8.050.000.000,00	8.050.000.000,00	26.818.780.639,00	874.750.000,00	0,23
2	Investasi Permanen	1.932.247.956.403,53	-	-	-	-	0,17
-	Penyertaan Modal Pemerintah	1.932.247.956.403,53	2.106.518.502.591,47	2.163.487.402.069,51	2.616.413.888.860,30	3.042.507.662.359,71	0,13
	Jumlah Investasi Permanen	1.932.247.956.403,53	2.106.518.502.591,47	2.163.487.402.069,51	2.616.413.888.860,30	3.042.507.662.359,71	0,13
C	ASET TETAP	12.072.961.342.413,10	13.224.678.359.315,20	7.869.244.584.156,00	8.848.728.141.283,00	12.142.156.583.429,20	0,06
1	Tanah	4.342.595.223.422,00	4.310.167.536.230,00	4.310.165.467.730,00	4.277.340.160.666,00	4.806.946.632.643,00	0,02
2	Peralatan dan Mesin	1.038.438.956.349,40	1.121.407.073.873,01	1.163.007.600.432,00	1.327.016.555.607,00	2.221.150.036.892,20	0,19
3	Gedung dan Bangunan	1.225.818.585.132,00	1.355.138.564.432,00	1.433.452.482.934,00	1.549.967.305.031,00	3.864.573.384.735,00	0,40
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.348.613.139.871,21	6.246.609.953.399,21	6.919.204.333.915,00	7.696.003.645.937,00	7.723.610.415.051,00	0,12
5	Aset Tetap Lainnya	105.643.064.947,46	122.685.723.933,00	118.448.189.755,00	120.851.850.333,00	451.249.343.664,00	0,63
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.852.372.691,00	68.669.507.448,00	36.285.154.214,00	34.495.177.898,00	70.261.754.800,00	0,87
7	Akumulasi Penyusutan	-	-	6.111.318.644.824,00	6.156.946.554.189,00	6.995.634.984.356,00	0,17
D	ASET LAINNYA	379.933.146.749,40	496.267.834.671,40	478.543.018.581,18	534.317.847.002,51	1.731.914.618.595,15	0,57
1	Tagihan Penjualan Angsuran	1.694.053.667,00	1.477.040.892,00	2.631.689.411,33	2.518.329.489,66	-	0,07
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1.483.687.899,00	1.483.687.899,00	-	-	-	0,20
3	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	2.404.969.568,00	0,20
4	Aset Tak Berwujud	20.483.200.740,00	27.736.994.394,00	16.433.865.994,00	14.315.003.689,00	12.176.662.897,00	0,06
5	Beban Dibayar Dimuka	-	465.570.111.486,40	-	-	-	0,20
6	Aset Lain-lain	356.272.204.443,40	-	459.477.463.175,85	517.484.513.823,85	1.717.332.986.130,15	0,53
II	KEWAJIBAN	2.291.569.817.863,18	2.328.579.136.579,47	1.640.039.402.695,78	971.274.195.766,00	973.818.241.033,04	0,01
A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.291.569.817.863,18	2.328.579.136.579,47	1.640.039.402.695,78	971.274.195.766,00	973.818.241.033,04	0,01
1	Utang Pemotongan Pajak Pusat	4.262.932.019,00	152.123.304,00	-	-	-	0,42
2	Pendapatan Diterima Dimuka	282.166.666,66	221.166.666,72	158.574.166,67	888.093.385,84	618.137.052,51	0,96
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.287.024.719.177,52	2.328.205.846.608,75	1.633.637.474.948,70	960.227.068.871,16	964.334.246.446,92	0,01
4	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	-	-	161.417.751,00	17.714.752,00	62.462.332,00	0,33
5	Utang Beban	-	-	6.081.935.829,41	10.141.318.757,00	8.803.395.201,61	0,11
III	EKUITAS DANA	12.292.412.106.129,60	14.137.002.602.903,80	10.667.608.664.290,70	13.180.875.226.501,70	18.644.275.684.185,80	0,12
A	EKUITAS DANA LANCAR	2.100.780.339.436,44	1.698.512.093.674,26	10.667.608.664.290,70	13.180.875.226.501,70	18.644.275.684.185,80	1,24
1	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	51.426.062.191,79	14.897.905.723,21	-	-	-	0,16
2	Pendapatan yang Ditangguhkan	66.714.000,00	62.706.828,00	-	-	-	0,36
3	Cadangan Piutang	89.488.896.883,76	561.409.376.504,00	-	-	-	0,91
4	Cadangan Persediaan	45.544.873.432,19	53.544.930.546,00	-	-	-	0,01
5	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang	2.287.306.885.944,18	2.328.427.013.275,47	-	-	-	0,07
6	Ekuitas	-	-	10.667.608.664.290,70	13.180.875.226.501,70	18.644.275.684.185,80	0,33
B	EKUITAS DANA INVESTASI	14.393.192.445.566,00	15.835.514.696.578,10	-	-	-	0,16
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1.940.297.956.403,53	2.114.568.502.591,47	-	-	-	0,15
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	12.072.961.342.413,10	13.224.678.359.315,20	-	-	-	0,16
3	Diinvestasikan dalam Aset	379.933.146.749,40	496.267.834.671,40	-	-	-	0,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	14.583.981.923.992,80	16.465.581.739.483,30	12.307.648.066.986,50	14.152.149.422.267,70	19.618.093.925.218,80	0,10

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio lancar pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 dan 2014 berada dibawah angka 1 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong rendah, sedangkan untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 menunjukkan rasio diatas 1 yang artinya kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio* (rasio cair), yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat Tabel diatas, Rasio Cair Pemerintah Provinsi Sumatera Utara capaiannya kurang dari 1 pada tahun 2013 dan tahun 2014 artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 rasio diperoleh lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, sekaligus

menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu antara lain :

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tergolong kecil, hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil di bandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.
2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel dibawah ini, diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tergolong baik dengan nilai rasio.

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	0,2706	1,0904	2,1887	2,7732	2,7732
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	0,2476	1,0452	2,1007	2,6808	2,6808
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,1414	0,1332	0,0686	0,0496	0,0496
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0000	0,1537	0,0736	0,0522	0,0522

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara *)Angka Sementara

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan APBD.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah yang disebabkan dengan berpindahnya aparatur dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2014	1,152,702,187,401	7,808,557,309,739	14.76
2	2015	1,206,391,354,315	7,959,167,183,686	15.16
3	2016	1,266,885,380,022	9,809,035,452,280	12.92
4	2017	3,159,244,096,705	13,115,757,263,350	24.09
5	2018	3,584,399,318,400	12,563,387,549,665	28.53

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah alokasi pendanaan aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	7,772,029,153,270	8,480,758,952,969	10,440,618,930,401	12,170,582,105,913	12,703,058,587,891
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	7,808,557,309,739	7,959,167,183,686	9,476,423,914,544	13,037,757,263,350	12,563,387,549,665
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	332,611,537,736	78,000,000,000	-
	Defisit Riil (Rp.)	- 36,528,156,469	521,591,769,283	631,583,478,121	- 945,175,157,437	139,671,038,226

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki defisit anggaran pada tahun 2014 dan 2017, sementara itu pada tahun 2015, 2016 dan 2018 mengalami surplus.

Kemampuan Provinsi Sumatera Utara untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	- 1.41	0.03	0.85	- 1.00	6.02
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas terlihat pada tahun 2014 – 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai SILPA yang tidak terlalu besar ini dilihat melalui akumulasi dari surplus/defisit ditambah penerimaan pembiayaan minim. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SILPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah perolehan SiLPA selama tahun 2014 hingga 2018.

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	(Rp.)	% dari SiLPA	(Rp.)	% dari SiLPA	(Rp.)	% dari SiLPA	(Rp.)	% dari SiLPA	(Rp.)	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	51,426,062,191		14,897,905,723		536,274,841,422		945,175,157,437		841,496,523,210	
Pelampauan penerimaan PAD	- 570,579,844,134	-9.01	- 677,789,482,732	-2.20	- 643,007,389,785	-83.40	- 7,244,954,380,180	-13.05	- 7,311,982,506,528	-11.51
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	- 94,724,618,570	-54.29	- 431,809,708,606	-3.45	3,081,164,447,418	17.40	-	0.00	- 446,242,143,224	-188.57
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	- 146,621,856,875	-35.07	386,425,001,563	3.86	- 1,512,688,090,337	-35.45	-	0.00	- 35,917,542,403	-2342.86
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	924,900,726,977	5.56	- 2,368,646,882,337	-0.63	- 3,035,203,237,334	-17.67	1,293,782,613,362	73.06	845,042,275,100	99.58
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Perolehan SiLPA selama tahun 2014 hingga 2018 sebagian besar diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kemudian juga dari pelampauan Pendapatan Daerah baik dari PAD, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam setahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.12
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja pegawai	924,490,865,162	1,008,161,978,816	1,055,299,206,507	1,115,950,649,213	3,037,330,274,182	3,464,489,476,375
2.1.4	Belanja hibah	1,825,737,597,165	1,611,718,256,710	2,094,026,766,000	3,010,055,530,000	3,620,208,919,358	3,165,070,721,289
2.1.5	Belanja bantuan sosial	43,718,380,000	1,065,000,000	-	-	-	-
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	522,121,373,000	1,692,809,638,822	2,330,828,370,083	2,774,649,016,371	1,982,455,818,915	1,569,730,611,414
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1,687,837,008,253	1,053,174,611,548	405,929,354,911	134,545,437,669	2,443,753,800	528,068,540,828
2.1.8	Belanja tidak terduga	498,100,000	4,482,346,000	-	2,002,321,560	18,750,000,000	53,155,528,758
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,004,403,323,580	5,371,411,831,896	5,886,083,697,501	7,037,202,954,813	8,661,188,766,255	8,780,514,878,664
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja pegawai	167,575,793,020	144,540,208,585	151,092,147,808	150,934,730,809	121,913,822,523	119,909,842,025
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1,327,766,717,316	1,146,633,040,611	989,746,989,128	1,268,431,086,312	2,155,463,994,769	2,098,059,596,323
2.2.3	Belanja modal	760,722,418,737	1,145,972,228,647	932,244,349,249	1,019,855,142,610	2,099,190,679,803	1,564,903,232,653
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2,256,064,929,073	2,437,145,477,843	2,073,083,486,185	2,439,220,959,731	4,376,568,497,095	3,782,872,671,001
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	14,107,541,507	51,426,062,191	14,897,905,723	536,274,841,422	945,175,157,437	841,496,523,210
3.1.7	Penerimaan dana bergulir			-	1,000,000	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14,107,541,507	51,426,062,191	14,897,905,723	536,275,841,422	945,175,157,437	841,496,523,210
3.2	Pengeluaran pembiayaan						
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	100,000,000,000	-	-	332,611,537,736	78,000,000,000	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	200,000,000	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
C	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100,200,000,000	-	-	332,611,537,736	78,000,000,000	-
TOTAL (A+B+C)		7,360,668,252,653	7,808,557,309,739	7,959,167,183,686	9,809,035,452,280	13,115,757,263,350	12,563,387,549,665

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

A. Kebijakan Dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019-2023

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diperkirakan tumbuh membaik. Pertumbuhan didorong oleh perbaikan struktur ekonomi, perbaikan iklim investasi, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur, implementasi paket kebijakan, peningkatan konsumsi Pemerintah dan Rumah Tangga didukung inflasi yang terjaga.

Inflasi terjaga dalam level yang rendah didukung perbaikan efisiensi baik dalam distribusi barang dan jasa, perbaikan manajemen stok, dan proses bisnis yang lebih tertata baik. Pengendali inflasi di Provinsi Sumatera Utara di fokuskan pada 4K yaitu kesediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi untuk pengendalian ekspektasi. Dalam kaitan tersebut, pengendalian inflasi diarahkan baik untuk mengurangi dampak maupun frekuensi dari inflasi komoditas strategis. Inflasi tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dari inflasi saat ini, dengan asumsi permasalahan struktural terkait infrastruktur telah diselesaikan dan proses tata niaga yang semakin efisien.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara dan tingkat inflasi pada tahun 2019-2023 diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023 (Dalam Persen)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,3%	5,4%	5,5%	5,6%	5,7%
Inflasi (yoy persen ± 1 persen)	2,95 ± 1%	2,90 ± 1%	2,85 ± 1%	2,80 ± 1%	2,75 ± 1%

Sumber : BPS Sumut (data diolah)

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 serta melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2013-2018, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat lebih meningkat dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Pada tahun 2019-2023, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/ wajib pajak;
- c. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pembentukan PAD;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi dan kumuniaksi (TIK);
- e. Melaksanakan intensifikasi pungutan pajak dan retribusi;
- f. Menyempurnakan dan mengevaluasi dasar hukum pungutan.

Berdasarkan arah kebijakan PAD yang telah dikemukakan di atas, maka proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian global dan nasional yang lebih baik;
- b. Tingkat inflasi yang diproyeksikan semakin terkendali diangka 3+1 persen;
- c. Proyeksi angka kemiskinan yang semakin menurun yang dibarengi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat;
- d. Realisasi Pendapatan Daerah (PD) berdasarkan rata-rata kenaikan penerimaan Pendapatan Daerah selama periode 2013-2018 sebesar 13,46 %, serta optimalisasi peran Badan Pengelolaan Pendapatan dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;

Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa proyeksi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2019-2023 akan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,85 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan terdiri dari komponen PAD sebesar 6.99 persen yang terakumulasi dari kelompok Pajak Daerah, Retibusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Selanjutnya komponen Dana Perimbangan diproyeksikan akan dapat tumbuh rata-rata sebesar 7.83 persen setiap tahunnya yang terdiri dari dari kelompok Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU, Dana Alokasi Khusus dan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 4,47 persen.

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.1	Pendapatan asli daerah	7.583.849.754.886	5.904.947.360.000	6.340.840.471.528	6.849.808.530.597	7.491.736.725.473
1.1.1	Pajak daerah	6.087.369.133.968	5.421.539.077.000	5.839.435.257.528	6.329.647.115.097	6.952.024.563.848
1.1.2	Retribusi daerah	36.744.959.900	39.317.107.000	41.676.133.000	44.176.701.000	46.827.303.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	612.177.474.033	262.666.176.000	269.232.831.000	275.963.652.000	282.862.743.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	847.558.186.985	181.425.000.000	190.496.250.000	200.021.062.500	210.022.115.625
1.2	Dana perimbangan	7.736.050.762.700	9.426.364.422.964	9.780.404.182.618	10.148.238.425.217	10.530.429.127.576
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	550.587.677.700	601.487.445.770	631.561.818.059	663.139.908.961	696.296.904.410
1.2.2	Dana alokasi umum	2.713.750.553.000	2.971.417.838.770	3.063.531.791.772	3.158.501.277.317	3.256.414.816.914
1.2.3	Dana alokasi khusus	4.471.712.532.000	5.853.459.138.424	6.085.310.572.787	6.326.597.238.939	6.577.717.406.252
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	7.852.000.000	8.637.200.000	9.500.920.000	10.451.012.000	11.496.113.000
1.3.1	Hibah	7.852.000.000	8.637.200.000	9.500.920.000	10.451.012.000	11.496.113.000
TOTAL JUMLAH		15.327.752.517.586	15.339.948.982.964	16.130.745.574.146	17.008.497.967.814	18.033.661.966.049

Sumber : BP2RD Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Kebijakan peningkatan sumber Pendapatan Daerah diarahkan untuk :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Provinsi melalui Peraturan Daerah dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;

2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa/layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah didukung dengan perbaikan dan pengembangan regulasi daerah serta sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi serta peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
6. Mengembangkan system evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei-survei untuk mendapatkan penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang diberikan;
7. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
8. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi pada penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat (bertambahnya insentif ke daerah) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Kebijakan Dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2023

Penggunaan Belanja Daerah fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan asumsi proyeksi Pendapatan Daerah, maka proyeksi Belanja Daerah tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja dalam pencapaian

target dan sasaran yang ditetapkan, namun demikian kebijakan Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan, antara lain untuk :

1. Mendorong pencapaian target indikator makro pembangunan daerah termasuk diantaranya pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Mendukung pencapaian target dan saran visi misi kepala daerah dan mendukung kebijakan prioritas nasional di daerah;
3. Peningkatan pelayanan aparatur daerah.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL JUMLAH BELANJA	15,558,340,229,760	16,016,930,000,000	16,594,100,000,000	17,472,810,000,000	18,326,044,000,000
Belanja Tidak Langsung	10,466,265,829,760	9,509,000,000,000	9,366,100,000,000	9,684,810,000,000	10,032,144,000,000
Belanja pegawai	3,647,433,927,485	3,684,000,000,000	3,821,100,000,000	3,946,210,000,000	4,065,000,000,000
Belanja hibah	2,968,196,113,522	3,000,000,000,000	3,120,000,000,000	3,213,600,000,000	3,342,144,000,000
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	3,818,395,036,753	2,800,000,000,000	2,400,000,000,000	2,500,000,000,000	2,600,000,000,000
Belanja tidak terduga	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
Belanja Langsung	5,092,074,400,000	6,507,930,000,000	7,228,000,000,000	7,788,000,000,000	8,293,900,000,000

Sumber : Bappeda Provsu (data diolah)

Pada tabel di atas, Pertumbuhan Belanja Daerah dari tahun 2019-2023 diproyeksikan rata-rata pertahun mencapai 5.79 persen. Asumsi selanjutnya dan berdasarkan pengalaman selama periode 2014-2018, terdapat keseimbangan pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung, sehingga Belanja Modal terutama untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat memungkinkan dioptimalkan untuk ditingkatkan. Secara nominal kelihatannya masih besar Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan Belanja Langsung, namun masih dalam batas kewajaran. Hal ini disebabkan karena pada komponen belanja Tidak Langsung terdapat Belanja Hibah (BOS) yang merupakan operasional langsung ke sekolah dan sejak tahun 2016 beralih jenis Belanja Hibah dalam komponen Belanja Tidak Langsung.

C. Kebijakan Dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019-2023

Proyeksi SILPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 serta asumsi-asumsi kebijakan penggunaan anggaran dimasa mendatang. Direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SILPA tahun 2019-2023 terus berada dikisaran minus 6 persen. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat ditingkatkan untuk mendorong penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	514.432.465.174	701.989.221.284	488.296.848.897	489.807.367.920	317.931.265.757
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	514.432.465.174	701.989.221.284	488.296.848.897	489.807.367.920	317.931.265.757
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	283.844.753.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
C	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	283.844.753.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	230.587.712.174	676.989.221.284	463.296.848.897	464.807.367.920	292.931.265.757
	TOTAL A+B+C	15.842.184.982.760	16.041.938.204.248	16.619.042.423.043	17.498.305.335.734	18.351.593.231.806

Sumber : Bappeda Provsu (data diolah)

Pada jenis pengeluaran pembiayaan sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah melalui penyertaan modal (investasi daerah) kepada Badan Usaha Milik Daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan diproyeksikan pemberian Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setiap tahun dialokasikan sebesar Rp. 25.000.000.000,- hingga Tahun 2023.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka

menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2019-2023 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	Proyeksi				
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan	15,327,752,517,586	15,583,235,078,964	16,202,544,857,139	17,092,984,853,286	17,957,152,032,009
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	514,432,465,174	486,263,161,076	445,160,003,128	434,842,792,789	425,144,402,552
Total penerimaan	15,842,184,982,760	16,069,498,240,040	16,647,704,860,267	17,527,827,646,075	18,382,296,434,561
Dikurangi:					
Belanja Tidak Langsung	10,466,265,829,760	10,631,231,240,040	11,016,532,860,267	11,346,278,846,075	11,718,348,434,561
Pengeluaran Pembiayaan	283,844,753,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
Kapasitas riil kemampuan keuangan	5,092,074,400,000	5,413,267,000,000	5,606,172,000,000	6,156,548,800,000	6,638,948,000,000

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Analisis data diatas adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Dari tabel di atas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2019 sampai tahun 2023 cukup besar, meskipun ada penyesuaian Belanja terhadap Pendapatan dari tahun 2019 menuju tahun 2020.

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperlihatkan pada Tabel selanjutnya dapat ditentukan kerangka pendanaan seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Proyeksi				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kapasitas riil kemampuan keuangan	5,092,074,400,000	5,413,267,000,000	5,606,172,000,000	6,156,548,800,000	6,638,948,000,000
PRIORITAS I	1,018,414,880,000	1,082,653,400,000	1,121,234,400,000	1,231,309,760,000	1,327,789,600,000
PRIORITAS II	2,800,640,920,000	2,977,296,850,000	3,083,394,600,000	3,386,101,840,000	3,651,421,400,000
PRIORITAS III	1,273,018,600,000	1,353,316,750,000	1,401,543,000,000	1,539,137,200,000	1,659,737,000,000

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam bab ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk jangka waktu 2019-2023.

Permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari hasil analisis capaian indikator Kinerja Pembangunan periode sebelumnya. Sedangkan variabel isu-isu strategis yang ada di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari hasil telaahan dokumen Tujuan Pembangunan berkelanjutan, Dokumen RPJMN 2015-2019, Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dibandingkan kondisi saat ini. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, untuk dapat dijadikan dasar pijakan upaya pembangunan.

4.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi RPJMD tahun 2013-2018 dan hasil analisis serta interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan pokok pembangunan daerah.

Tabel 4.1
Permasalahan Pokok Pembangunan di Sumatera Utara

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tingginya ketimpangan Wilayah dan Pendapatan	a. Adanya ketimpangan regional antara kawasan pantai barat dan pantai timur wilayah Sumatera Utara, b. Masih tingginya Indeks Ketimpangan Gender c. Tingginya resiko bencana alam karena sebahagian besar kawasan Sumatera Utara adalah kawasan rawan bencana alam sehingga menimbulkan limitasi pengembangan. d. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya yang berpotensi menimbulkan beberapa masalah pembangunan e. Kurangnya kesamaan dan strategi pembangunan pada kawasan yang bersisian antara wilayah kota dan kabupaten f. Masih tingginya angka kelahiran total, laju pertumbuhan penduduk dan migrasi keluar penduduk, diperberat dengan ketimpangan distribusi penduduk akibat arus urbanisasi menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan g. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara secara garis besar cenderung mengalami trend penurunan dalam lima tahun terakhir. Kondisi ekonomi global yang belum cukup membaik secara signifikan, harga komoditas di pasar dunia yang belum pulih, merupakan beberapa faktor masih melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. h. Pertumbuhan Ekonomi masih bertumpu pada sektor-sektor yang padat modal, sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang, dampaknya adalah pengangguran meningkat	a. Kondisi Geografi dan demografi b. Sumber Daya Alam c. Sumber Daya Manusia d. Infrastruktur e. Penduduk belum menjadi subjek pembangunan a. Melemahnya harga-harga komoditas dan turunnya belanja konsumen, dibarengi dengan pelemahan pasar global. b. Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur.
2.	Sosial dan Kemiskinan	a. Minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran dan rendahnya kualitas SDM. b. Kegiatan pemberdayaan fakir miskin tidak sepenuhnya mendapat perhatian.	Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, upah yang rendah dan lemahnya sumber daya manusia

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		c. Masih rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. d. Pelayanan dasar bagi masyarakat miskin seperti penyediaan air minum, listrik dan sanitasi layak masih rendah dan kecenderungan masih terpusat di kawasan perkotaan. e. Belum optimalnya layanan bagi para penyandang disabilitas f. Masih kurangnya perhatian bagi penanganan anak terlantar, lanjut usia, gelandangan, dan pengemis g. Masih rendahnya upaya perlindungan terhadap anak-anak h. Belum optimalnya penanganan terhadap korban bencana	
3.	Keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan	kerjasama pemerintahan seperti dengan Badan Usaha dan CSR masih belum optimal	Kurangnya Kerjasama dengan non Pemerintahan
4.	Pendidikan dan Kesehatan	a. Tidak meratanya ketersediaan guru dan Kualitas SDM Tenaga Pendidik masih kurang (khususnya tenaga pendidik SMK yang mempunyai keahlian dibidangnya dan tenaga Pendidik di SLB yang mempunyai kompetensi atau latar belakang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) b. Tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah (diantaranya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa) c. Belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan. d. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah ke Pendidikan Tinggi. e. Tidak tersambunganya profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industri. f. Masih terlalu banyak Program Keahlian yang terdapat pada satu SMK g. Kurangnya kompetensi lulusan SLB dari sisi keterampilan/skill h. Belum dijalankannya konsep	a. Otonomi daerah dan peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi b. Tidak meratanya akses pendidikan dan distribusi guru; c. Rendahnya Mutu Manajemen Sekolah d. Belum adanya <i>Link and Match</i> antara sekolah menengah kejuruan dengan industri usaha e. Tidak adanya diklat peningkatan kompetensi guru khusus SMK dan tidak adanya lembaga pemerintah yang memproduksi guru khusus SMK f. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan kurang fokus pada program keahlian yang sesuai dengan industri pendukung g. Masih rendahnya identifikasi kebutuhan untuk sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan ketunaannya a. Konsep PENDIDIKAN KARAKTER / SCHOOL EDUCATION QUALITY INDEX/SEQI masih

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		PENDIDIKAN KARAKTER (SCHOOL EDUCATION QUALITY INDEX/SEQI) sehingga tujuan untuk meningkatkan indek sekolah-sekolah dengan pencapaian <i>Outcome</i> tertentu seperti <i>outcome</i> pembelajaran dan kualitasnya, keterjangkuan <i>outcome</i> dan persamaan <i>outcome</i> belum terukur . Indeks ini harus diterapkan di sekolah sekolah untuk mengukur kualitas sekolah dan kualitas para lulusannya i. Belum dijadikannya konsep Guru Lintas Sekolah atau Guru Terbang sebagai solusi kekurangan guru di daerah terpencil j. Masih rendahnya kesehatan Ibu dan anak k. Masih rendahnya status gizi masyarakat l. Masih tingginya angka kesakitan (morbiditas)	asing dan belum dijadikan sebagai oritenasi penyelenggaraan sekolah b. Masih terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan c. Masih terbatasnya sumberdaya kesehatan d. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan
5.	Peningkatan Reformasi Birokrasi, tatakelola pemerintahan, Penegakan hukum dan Pencegahan Korupsi	a. Belum maksimalnya pelaksanaan SAKIP b. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik	a. Sasaran Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama Renstra PD belum menggambarkan sebagai penjabaran dari sasaran Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama RPJMD. b. Belum optimalnya pelaksanaan penerapan Standard Pelayanan Publik yang telah ditetapkan
6.	Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	a. masih adanya perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali. b. Penanganan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.	1. Regulasi 2. Rendahnya kesadaran masyarakat
7.	Pengelolaan Sumber Daya Alam	a. Masih banyaknya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI); b. Perlunya upaya konservasi pemanfaatan air tanah; c. Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan gas;	Komitmen terhadap regulasi dan SDM yang minim.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		d. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;	
8.	Infrastruktur wilayah	a. Belum optimalnya operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi dan rawa. b. Adanya kondisi rawan bencana pada beberapa daerah. c. Masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni d. Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan strategis e. Minimnya layanan komunikasi dan informatika di wilayah tertinggal, pulau terluar dan terdepan.	1. Sumber Daya Manusia 2. Kemampuan Anggaran

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan evaluasi RPJMD tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah	Interpre stasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melamp aui (>) s.d 2018	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
<i>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</i>				
1.	Pendidikan			
1.1	Angka Partisipasi Kasar	<	a. Belum meratanya distribusi guru antar daerah dan Kualitas SDM masih kurang. b. Tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah c. Belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan. d. Masih belum meratanya akses dan	a. Jangkauan Kewilayahan b. Perencanaan kebutuhan guru antar wilayah c. Akses ekonomi keluarga d. Standarisasi guru dan sekolah e. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan kurang fokus pada program keahlian yang
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	<		
1.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.4	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	<		
1.5	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	<		
1.6	Persentase Guru			

			partisipasi Pendidikan terutama di Pendidikan menengah dan tinggi. e. Tidak tersambunganya profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industri f. Masih kurangnya SDM (guru) SMK yang mempunyai kompetensi yang baik di bidang keahliannya dan masih terlalu banyak Program Keahlian yang terdapat pada satu SMK g. Masih kurangnya Pendidik di SLB yang mempunyai kompetensi atau latar belakang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus h. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa i. Kurangnya kompetensi lulusan SLB dari sisi keterampilan/skill j. Belum terintegrasinya pendidikan karakter pada mata pelajaran baik secara konseptual maupun dalam praktik k. Masih adanya ketimpangan guru antara daerah terpencil dan perkotaan akibat belum berjalannya Guru Lintas Sekolah atau Guru Terbang baik di SMA maupun SMK.	sesuai dengan industri pendukung
2.	Kesehatan			
2.1	Jumlah Kematian Bayi	<	a. Masih tingginya kasus kematian Ibu dan Bayi. b. Masih rendahnya status gizi masyarakat c. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular. d. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;	a. Ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu b. Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar
2.2	Jumlah Kematian Ibu	<		
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	<		
2.4	Prevalensi Balita Gizi Kurang	=		
2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif	=		
2.6	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang	<		

	Ditangani			
2.7	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	>		c. Kemampuan Akses Ekonomi Keluarga d. Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
2.8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	<		
2.9	Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	=		
2.10	Non Polio AFF Rate Per 100.000 Penduduk	=		
2.11	Angka Kejadian Malaria	>		
2.12	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	>		
2.13	Cakupan Pelayanan Nifas	>		
2.14	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	>		
2.15	Cakupan Pelayanan Anak Balita	>		
2.16	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat	>		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Terlaksananya pembangunan/ peningkatan jalan (km)	>	Kebinamargaan : a. Biaya yang tersedia tidak sebanding dengan biaya kebutuhan pemeliharaan jalan; b. Masih lemahnya sistem manajemen pengelolaan jalan; c. Kerusakan jalan dan jembatan yang meningkat akibat tonase kendaraan yang berlebihan;	a. Pengelolaan alokasi dana pembangunan jalan; b. Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pembangunan
3.2	Terlaksananya pembangunan/ peningkatan jembatan (m)	<		
3.3	Terlaksananya pemeliharaan berkala ruas jalan (km)	<		
3.4	Terlaksananya pemeliharaan rutin ruas jalan (km)	<		
3.5	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan (m)	>		
3.6	Rasio jaringan rawa kondisi baik (%)	<	Sumber Daya Air a. Belum optimalnya penanganan konservasi dan pelestarian Sumber Daya Air, b. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi permukaan dan rawa c. Masih terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian; d. Masih tingginya frekuensi kejadian banjir, dan longsor khususnya di kawasan dataran tinggi dan	a. Peningkatan konservasi SDA dalam rangka kelangsungan keberadaan (kelestarian) daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air b. Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui peningkatan OP dan Rehabilitasi Irigasi
3.7	Optimalisasi Sumber Air Baku pada Daerah Kekurangan Air di Musim Hujan dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ	<		
3.8	Dokumen dan Regulasi Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi	<		

			abrasi pantai di wilayah kepulauan Nias dan Danau Toba. e. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Sumber Daya Air, yang terdiri dari OPD Pengelola Sumber Daya Air, TKPSDA Wilayah Sungai, Komisi Irigasi, dan P3A/GP3A/IP3A f. Belum terbangun dan terkelolanya Sistem Informasi Sumber Daya Air secara terpadu Keciptakarya : a. Belum tercapainya Universal akses Air Minum Layak; b. Belum tercapainya Universal akses sanitasi layak; c. Masih belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak; d. Masih belum optimalnya jumlah cakupan pelayanan air limbah perpipaan; e. Pencemaran sumber air khususnya di Kawasan Danau Toba akibat pemanfaatan yang tidak tepat sesuai dengan zonasi dan peruntukannya sehingga mengganggu potensi besar Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera Utara; Penataan Ruang : a. Belum tersedianya regulasi penataan ruang yang lengkap, harmonis,	c. Peningkatan Pemanfaatan embung sebagai reservoir air bersih; d. Peningkatan konservasi sumber daya air, peningkatan kesadaran masyarakat tentang resiko kerawanan banjir, longsor dan abrasi pantai serta mitigasi bencana. e. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Sumber Daya Air f. Pengembangan Sistem Informasi SDA melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi a. Penyusunan kebijakan daerah (Road Map) yang mendukung pencapaian target akses universal air minum aman dan sanitasi layak b. Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi c. Penerapan pola hidup bersih dan sehat a. Penyusunan dokumen pemanfaatan

			dan berkualitas; b. Belum terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang c. Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; d. Masih belum memadainya kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM Bidang Tata Ruang, yang berdampak pada kinerja penyelenggaraan penataan ruang;	ruang di kawasan strategis Provinsi; b. Perencanaan detail tata ruang di kawasan strategis provinsi; c. Penyusunan Perda/Perkada khusus terkait kawasan strategis;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
4.1	Penanganan Kawasan Kumuh (ha)	>	a. Masih adanya kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. b. Tingginya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi terutama pada kawasan perkotaan. Dengan terbatasnya kondisi ekonomi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan timbulnya pertambahan kawasan kumuh; c. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni; d. Belum memadai Pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan berkelanjutan	a. Dukungan/ Fasilitas Pemerintah dalam menjalankan kewenangan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana c. Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah d. Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan MBR e. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman f. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU:tingkat kemampuan menengah g. Menurunkan laju
4.2	Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni	<		

				urbanisasi penduduk desa ke kota.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Jumlah Ormas/OKP yang mendapat pembinaan	<	a. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini.	a. Peningkatan pembangunan sistem pengelolaan bencana dan peringatan dini;
5.2	Tebentuknya kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten/kota (forum)	<	b. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana.	b. Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan terutama di wilayah rawan bencana;
5.3	Terbentuknya forum pembauran kebangsaan	<	c. Belum Optimalnya Penegakan Perda.	c. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah terkait ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat
5.4	Jumlah kegiatan dalam rangka Deteksi dan cegah dini konflik	<	d. Belum optimalnya Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.	d. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;
5.5	Persentase Penegakan Perda	<	e. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.	e. Meningkatkan koordinasi antar instansi vertikal seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan;
			f. Kurangnya koordinasi khususnya dengan instansi vertikal, seperti TNI, Polri dan Kejaksaan terkait pencegahan dan penanganan konflik.	
6	Sosial			
6.1	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	<	a. Belum optimalnya penanganan bencana sosial	a. Peningkatan penanganan bencana sosial dan PMKS;
6.2	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	<	b. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial	b. Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan di panti-panti;
6.3	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	>	c. Masih kurangnya pemberdayaan di dalam panti	c. Sinergitas antar lembaga terkait dalam penanggulangan bencana;
6.4	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	>	d. Masih belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	
6.5	Persentase Korban	=		

	Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat			
<i>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar</i>				
1.	Tenaga Kerja			
1.1	Rasio Penduduk yang Bekerja	=	a. Kurangnya skill/kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global. b. Masih banyaknya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. c. Informasi terhadap Pasar kerja yang belum memadai. d. Kurangnya kerjasama antara dunia usaha dalam penyediaan tenaga kerja. e. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. f. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.	a. Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; b. Peningkatan tenaga kerja yang mandiri; c. Ketersediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja; d. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkit penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja;
1.2	Rasio Ketergantungan	=		
1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<		
1.4	Pencari Kerja yang ditempatkan	<		
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<	a. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) c. Rendahnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) kedalam dokumen perencanaan di perangkat daerah. d. Rendahnya ketahanan dan kualitas keluarga menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). e. Minimnya layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). f. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. g. Rendahnya implementasi Kabupaten/Kota Layak	a. Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. Peningkatan pengimplementasi an PPRG; c. Peningkatan penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu berbasis gender dan anak; d. Pemahaman masyarakat pada undang-undang terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
2.2	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak hak anak	<		
2.3	Menguatnya system dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender dan anak	<		

			anak; Minimnya ketersediaan data gender.	
3.	Pangan			
3.1	Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63gr per hari	<	a. Tekanan Penduduk terhadap Ketahanan Pangan Membesar. b. Rumah Tangga Petani (RTP) Berkurang.	a. Ketersediaan pasokan pangan untuk penduduk baik dari segi kuantitas dan kualitas;
3.2	Ketersediaan cadangan pangan (ton)	<	c. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi.	b. Peningkatan penyuluhan pengembangan diversifikasi pangan dan gizi;
3.3	Lumbung pangan masyarakat (lumbung pangan)	<	d. Masih tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,5 ha);	c. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian;
3.4	Kelompok Lumbung Pangan (Gapoktan)		e. Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif,	d. Pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan perkarangan;
3.5	Sistem distribusi harga	=	f. Ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan.	e. Peningkatan sistem jaringan irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air;
	Akses pangan masyarakat (Kelompok)	<	g. Terbatasnya prasarana usaha tani yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan.	
3.6	Penganekaragaman konsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras perkapita 1,5% untuk memenuhi target skor pola pangan harapan (PPH)	<	h. Fluktuasi harga pangan yang ditunjukkan oleh <i>Coefficient of Variation (cv)</i> perlu diantisipasi karena nilai cv yang tinggi mencerminkan harga jual pangan.	
3.7	Sistem penanganan keamanan pangan segar (%)	<		
3.8	Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota (kelompok sayuran/ buah)	<		
3.9	Berkurangnya penduduk miskin dan rawan pangan (%)	<		
3.10	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan (desa)	<		
3.11	Efektivitas koordinasi kelembagaan dewan ketahanan pangan (%)	<		
3.12	Nilai Tukar Petani (NTP)	<		
3.13	Produksi komoditi hasil ternak per tahun	<		
4.	Pertanahan			
4.1	Jumlah Lahan Bersertifikat	<	a. Masih rendahnya jumlah lahan bersertifikat	a. Penertiban administrasi pertanahan secara rutin dan bertahap;
4.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	<	b. Belum optimalnya kasus tanah yang ditindaklanjuti. c. Masih banyaknya sengketa tanah yang belum terselesaikan.	b. Penetapan kebijakan NPSK penyelesaian sengketa tanah;

			d. Sering terjadi konflik akibat HGU yang sudah kadaluarsa tidak diurus kembali, sehingga banyak masyarakat maupun mafia tanah yang memperjualbelikan tanah dan menggarapnya	
5.	Lingkung Hidup			
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	<	a. Semua komponen lingkungan mengalami penurunan kualitas, Sedangkan status mutu sungai-sungai lainnya didominasi cemar ringan; b. Kadar-kadar pencemar udara ambien masih berada dibawah baku mutu. Namun derajat keasaman air hujan terlihat semakin mengarah ke asam, c. Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca terus meningkat,. d. Perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali, perubahan penutupan lahan tersebut telah mempengaruhi indeks tutupan lahan Sumatera Utara;	a. Penanaman bibit tanaman teduh dan tanaman hias di perkotaan; b. Penyediaan dokumen status lingkungan hidup sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan lingkungan hidup; c. Peningkatan pengendalian Lingkungan Hidup; d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan minimal 30 %
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	<	a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus data-data pribadi (Akta kelahiran, KTP, KK, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan KIA).	a. Sosialisasi pentingnya tertibnya administrasi kebutuhan data pribadi masyarakat;
6.2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<	b. Minimnya sarana dan prasarana perekaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Kamera, Server, Peralatan Database, Mobil Pelayanan Keliling untuk pengurusan administrasi kependudukan) faktor utama penyebabnya sejak tahun 2012 sampai saat ini alat	b. Peningkatan sarana dan prasarana perekaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

			perekaman adminduk tidak difasilitasi lagi oleh Pemerintah Pusat;	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	<	a. Belum optimalnya fungsi pemerintah desa/kelurahan, kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas.	a. Peningkatan fungsi Lembaga Desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenang;
7.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	=	b. Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat desa, pemanfaatan teknologi tepat guna.	b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
7.3	Persentase LPM Berprestasi	>	c. Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan terpadu.	c. Peningkatan Badan Usaha Milik Desa;
			d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa dan penyediaan data profil desa, kelurahan.	d. Peningkatan kualitas akuntabilitas pemerintahan desa;
			e. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (PRUKADES).	
			f. Belum optimalnya pembinaan kepada PKK dan LPM.	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<	a. Masih tingginya Angka Kelahiran Total (TFR).	a. Penguatan program Keluarga Berencana
8.2	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	<	b. Tingginya migrasi dan mobilitas keluar penduduk usia produktif.	b. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan/ GDPK Kabupaten/Kota
8.3	Rasio Akseptor KB	<	c. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Rancangan program Kependudukan (Grand Design Pembangunan Kependudukan/ GDPK sebagai acuan perencanaan pemerintahan sesuai Perpres Nomor 153 tahun 2014.	c. Pengembangan Kampung KB
8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	=	d. Masih tingginya angka pernikahan dini terutama didaerah yang terpencil	
			e. Masih rendahnya cakupan penggunaan	

			kontrasepsi dengan metode kontrasepsi jangka panjang.	
9.	Perhubungan			
9.1	Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Lokasi)	<	a. Belum maksimal dan meratanya fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas	a. Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas serta pendistribusiannya secara merata
9.2	Tersedianya alat-alat keselamatan pelayaran (buah)	<	b. Belum optimalnya pengawasan operasional kendaraan angkutan umum dan barang	b. Pengontrolan sistem pelayanan angkutan umum dan barang
9.3	Terpenuhinya operasional KMP Ferry Roro rute Tiga Ras-Simanindo dan Muara-Nainggolan (kali)	>	c. Belum memadainya fasilitas terminal penumpang	c. Pembangunan sarana dan prasarana
9.4	Terpenuhinya fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	>		d. Kawasan terminal penumpang
10.	Komunikasi dan Informatika			
	-		a. Perlunya peningkatan kapasitas Smart Province dan pengintegrasian aplikasi tersebut di Sumatera Utara dan di seluruh kab/kota, guna mendukung percepatan penerapan e-government. b. Kurangnya pembinaan berkesinambungan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;	a. Meningkatnya aplikasi Smart Province yang terintegrasi ke seluruh kab/kota di Provsu
11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
11.1	Persentase Koperasi Aktif	<	a. Kurangnya akses permodalan UMKM.	a. Fasilitasi Akses Permodalan UMKM
11.2	Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	<	b. Kurangnya Produktivitas UMKM. c. Kurang akses pasar dan promosi terhadap produk UMKM. d. Belum berkembangnya Digitalisasi Koperasi dan UKM. e. Kualitas SDM yang kurang memadai dikarenakan rendahnya pendidikan dan keterampilan. f. Kurang inovasi dan kreatifitas pelaku usaha.	b. Pelatihan Sosial Media Marketing dan Pemanfaatan Teknologi Informasi c. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM d. Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dalam

				berwirausaha
12.	Penanaman Modal			
12.1	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	<	a. Tidak meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sector. b. Belum semua Kabupaten/Kota menerbitkan regulasi kemudahan berinvestasi c. Perlunya peningkatan sarana dan prasana dan pelayanan dalam memberikan pelayanan perizinan. d. Tidak sinerginya antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi;	a. Peningkatan Standar Pelayanan Adm. atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif b. Koordinasi lintas sektor yang kaitannya dengan daya tarik berinvestasi c. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi d. Peningkatan dan Pembenahan Infrastruktur e. Pelayanan data dan informasi investasi ekonomi secara elektronik, lengkap dan mudah diakses
13.	Kepemudaan dan Olahraga			
13.1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	=	a. Masih kurangnya tenaga keolahragaan yang tersertifikasi.	a. Peningkatan pembinaan ketenagaolahragaan yang bersertifikat
13.2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	<	b. Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai menuju tuan rumah PON XXI Tahun 2024.	b. Pembangunan sarana dan prasarana areal pertandingan yang mendukung penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024.
13.3	Jumlah Kegiatan Olahraga	<	c. Belum optimalnya sinkronisasi antara organisasi olahraga dengan sekolah dalam hal pemassalan, pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga pelajar yang menjadi cikal bakal atlet Nasional di masa depan. d. Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event regional, nasional dan internasional, sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertanding serta kematangan fisik, mental, teknik dan taktik.	c. Sinkronisasi antara Pemerintah Atlet, Organisasi Olahraga dalam hal informasi event-event olahraga d. Fasilitasi kepada atlet dalam hal meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri e. Meningkatkan kesejahteraan

			e. Optimalisasi pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi. f. Kurangnya komitmen organisasi kepemudaan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.	insan olahraga berprestasi f. Meningkatkan komitmen organisasi kepemudaan dalam melaksanakan UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan.
14.	Statistik			
14.1	Buku "Provinsi Dalam Angka"	=	a. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Statistik.	a. Peningkatan, Pembinaan dan Pelatihan SDM di bidang Statistik
15.	Persandian			
15.1	-	-	a. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Persandian. b. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung.	a. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan di bidang Persandian
16.	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	<	a. Belum Optimalnya pelestarian terhadap budaya dan situs budaya dan sejarah bangsa. b. Kurangnya pengenalan pengetahuan tentang kebudayaan dan sejarah di seluruh lapisan masyarakat.	a. Identifikasi, Dokumentasi dan Inventarisasi Benda, Cagar Budaya dan Situs Budaya agar kelestariannya bisa terpelihara b. Peningkatan komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah
16.2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	<		
16.3	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	<		
17.	Perpustakaan			
17.1	Jumlah Perpustakaan (unit)	<	a. Masih kurangnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. b. Masih kurangnya minat baca masyarakat. c. Belum optimalnya pengembangan Perpustakaan Digital (e-Library) d. Belum optimalnya Sosialisasi dan Promosi Gerakan Literasi	a. Penambahan koleksi buku secara rutin terutama buku-buku <i>best seller</i> yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan perpustakaan b. Mengubah pola pikir masyarakat tentang perpustakaan
17.2	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	<		
17.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	<		

			Nasional di Provinsi	melalui promosi-promosi yang kreatif secara berkelanjutan
18	Arsip			
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	<	a. Minimnya sarana dan prasarana kearsipan di Sumatera Utara.	a. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	<	b. Maasih kurangnya SDM Arsipari. c. Belum dimilikinya pedoman tata kerja kearsipan yang diberlakukan secara baku.	b. Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang arsip
<i>Urusan Pilihan</i>				
1.	Pariwisata			
1.1	Kunjungan Wisata	<	a. Belum optimalnya Pengelolaan pariwisata di Sumatera Utara.	a. Peningkatan penataan objek wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan
1.2	Lama Kunjungan Wisata	<	b. Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata. c. Minat investor pada sektor kebudayaan dan pariwisata di Sumatera Utara masih rendah. d. Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada pangsa pasar tertentu.	b. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata dengan melibatkan masyarakat swasta dan pemerintahan c. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan disekitar lokasi wisata d. Peningkatan sarana Promosi (pembuatan brosur), event dan pameran yang berguna mengundang wisatawan baik lokal dan mancanegara
2.	Pertanian/ Perkebunan			
2.1	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	>	a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi.	a. Penguatan peran kelembagaan Pertanian
2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	>	b. Belum optimalnya kelembagaan petani.	b. Pelatihan bimbingan bidang Pertanian/Perkebunan dalam hal peningkatan produksi secara efisiensi melalui
2.3	Hortikultura (Sayur, Buah, Tan. Obat, Tan. Hias) utama lokal lainnya meningkat	<	c. Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal.	
2.4	Persentase peningkatan	<	d. Infrastruktur/ jalan	

	produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)		produksi perkebunan yang belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. e. Keterbatasan areal dalam pengembangan swasembada tebu; f. Budidaya tanaman masih terbatas pada komoditas utama/konvensional. g. Masih rendahnya Mutu hasil produk perkebunan masih rendah, kurang didukung oleh Unit Pengolahan yang efisien dan terbatas pada produk primer, sehingga peluang untuk memperoleh nilai tambah belum maksimal, keterbatasan infrastruktur dan rantai pemasaran yang panjang juga mendukung rendahnya produksi yang mengakibatkan kontribusi juga menurun; h. Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi dan. i. Masih tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil. j. Masih rendahnya kualitas dan SDM pertanian.	teknologi yang sesuai c. Peningkatan pembangunan infrastruktur/jalan daerah Produksi Perkebunan d. Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi yang melayani sentra-sentra Produksi Pertanian demi meningkatkan kualitas dan kuantitas Produksi Pertanian e. Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian guna menciptakan benih unggul menuju kualitas dan produktifitas hasil pertanian yang tinggi
3.	Kehutanan			
3.1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	<	a. Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dimana Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.	a. Meningkatnya penetapan tata batas Kawasan Hutan di Provsu
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	<		b. Penetapan regulasi terkait fungsi Kawasan Kehutanan
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	=	b. Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan peruntukan kawasan hutan	c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap konservasi serta

			menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain. c. Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan. d. Tingginya intensitas kebakaran hutan di beberapa kabupaten, serta belum terbentuknya Satuan Pengendali Kebakaran Hutan di Kabupaten/Kota sampai ke tingkat desa. e. Masih Luasnya Lahan Kritis dan sangat kritis (+1.251.482,64 Ha) yang ada di Provinsi Sumatera Utara. f. Belum adanya Peraturan Daerah terkait pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Utara. g. Adanya pembatasan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menata kelola kawasan Hutan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. h. Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk yang pada akhirnya dapat meningkatkan alih fungsi kawasan hutan.	upaya menanam dan memelihara pohon secara terus-menerus d. Menetapkan Perda terkait Pengelolaan Hutan e. Meningkatkan sinergitas dengan urusan kependudukan terkait pengendalian laju Pertumbuhan Penduduk
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
4.1	Daya Listrik Terpasang	<	a. Masih banyaknya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI).	a. Regulasi izin pertambangan
4.2	Rasio Elektrifikasi	>	b. Perlunya upaya konservasi pemanfaatan air tanah.	b. Peningkatan pasokan energi
4.3	Pertambangan tanpa ijin (PETI) (buah)	=	c. Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan gas.	c. Kelengkapan SOP pengurusan izin pertambangan
4.4	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) ADHB	>	d. Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan.	
			e. Meningkatnya Kebutuhan akan Energi Listrik.	
			f. Potensi energi alternatif yang belum termanfaatkan sepenuhnya.	

			g. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi. h. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi terutama dalam pengelolaan rekomendasi teknis perizinan pertambangan.	
5.	Perdagangan			
5.1	-		a. Kualitas produk yang belum memenuhi standard ekspor. b. Promosi dagang dalam dan luar negeri yang belum optimal terhadap produk unggulan daerah. c. Kerjasama pengembangan ekspor dengan Negara lain masih belum optimal, d. Aksesibilitas dan distribusi barang yang belum optimal.	a. Peningkatan kualitas Produk unggulan daerah b. Mengoptimalkan akses dan distribusi
7.	Perindustrian			
7.1			a. Hillirisasi industri dan industri yang bernilai tambah masih belum optimal. b. Belum Optimalnya Kemampuan Sektor Industri Dalam Digitalisasi Industri. c. Teknologi industri yang belum mengikuti perkembangan teknologi terbaru. d. Peningkatan desain, standardisasi mutu, kualitas produk yang belum optimal. e. Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri masih belum optimal. f. Bahan baku produksi bahan pendukung produksi yang masih sulit diperoleh dan harga bahan baku yang kurang kompetitif.	1. Regulasi 2. memperkuat riset dan inovasi 3. Persediaan bahan baku untuk mempelancar proses produksi 4. Pelaksanaan produksi harus disertai dengan pengendalian produksi.
6.	Kelautan dan Perikanan			
6.1	Produksi Perikanan	<	a. Belum optimalnya	a. Kesiambungan

	Tangkap (Ton)		produksi perikanan tangkap dan budidaya	sumber daya ikan
6.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	<	b. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan	b. Ketersediaan sarana dan parasarana yang memadai
6.3	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	<	c. Belum optimalnya pengawasan UU fishing;	c. Pengembangan atau inovasi pnerapan teknologi kelautan dan perikanan secara pasif dan efektif
6.4	Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	<	d. Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah.	d. SDM kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten
			e. Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan nelayan.	e. Pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik
			f. Kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil	f. Dukungan investasi dari para pelaku usaha
				g. Regulasi Pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
<i>Urusan Penunjang</i>				
1.	Perencanaan Pembangunan		a. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran.	Optimalisasi E-Planning
			b. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan	
2.	Keuangan			
			a. Masih tingginya alokasi Dana Perimbangan dibanding komponen pendapatan asli daerah pada Pendapatan Daerah yang disebabkan belum optimalnya serapan pendapatan daerah dari potensi yang ada.	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan dengan :
			b. Perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam peningkatan Pendapatan Daerah melalui	a. Peningkatan kapasitas SDM otoritas pajak.
				b. Kerjasama pertukaran data dan informasi

			peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Perlu melakukan optimalisasi retribusi daerah, meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD. c. perlu ditingkatkan kualitas laporan keuangan terutama terkait dengan inventaris aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	perpajakan dengan pemerintah pusat maupun institusi lainnya. c. Peningkatan tariff pajak dan retribusi daerah d. Penggunaan teknologi informasi dalam pajak. e. Keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan.
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	<	a. Terbatasnya disiplin ilmu serta jenjang pendidikan yang ditempatkan pada masing masing OPD sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan, serta kurangnya penguasaan IT/Komputer. b. Lemahnya penerapan dan aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.	Peningkatan aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government
3.2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	<		
3.3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	<		
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	=		
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	<		
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	<		
4.	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	<	a. Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian yang disampaikan kepada perangkat daerah. b. Belum efektifnya sosialisasi terhadap hasil penelitian Balitbang kepada Perangkat daerah/pemangku kepentingan. c. Belum melakukan koordinasi/belum melibatkan Perangkat Daerah dalam hal memantau sejauhmana hasil kelitbangan yang telah dimanfaatkan oleh	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian

			pemangku kepentingan.	
5.	Pengawasan		a. Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjend Kementerian Dalam Negeri, Itjend Kementerian Teknis, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Inspektorat Provinsi. b. Masih belum adanya Kendali Mutu dan Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis. c. Masih terbatasnya SDM pemeriksa/pengawas.	Standar Operasional Pemeriksaan
6.	Sekretariat Dewan		Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat.	Persamaan persepsi dalam menyikapi malalah-masalah pembangunan

4.2. ISU STRATEGIS

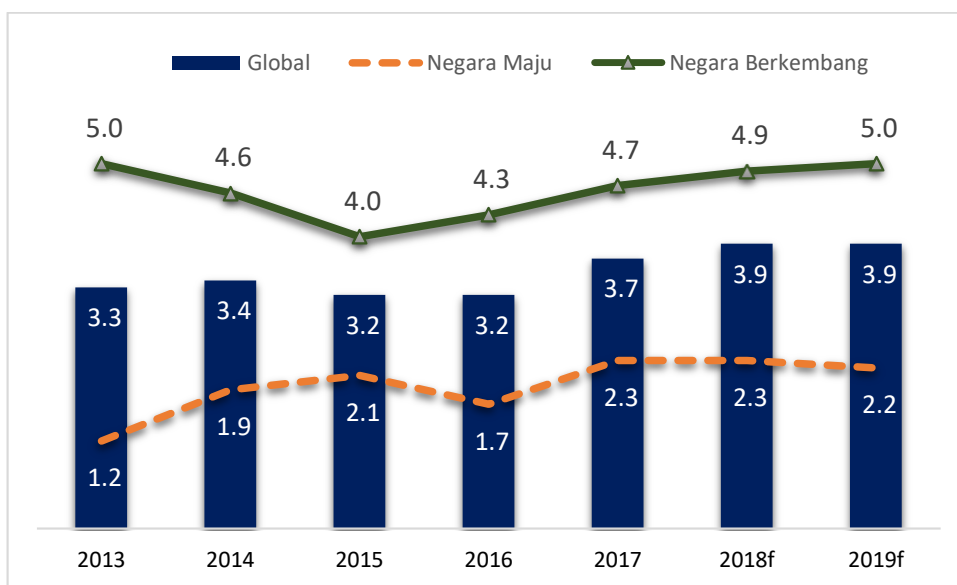
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.2.1. Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan isu strategis terlebih dahulu perlu diidentifikasi isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

4.2.1.1. Isu Global/International

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan akan sangat dipengaruhi berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik yang merupakan tantangan sekaligus peluang. Dinamika ekonomi global yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi global namun disertai dengan perekonomian Tiongkok dan India yang masih melambat. Namun, kebijakan pengurangan pajak di Amerika Serikat telah memberikan dampak berupa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang cukup baik di tahun 2017 yakni tumbuh mencapai 2,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global juga tumbuh mencapai 3,7 persen pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga kisaran 3,9 persen pada tahun 2019. Capaian ini lebih optimis dibandingkan prediksi sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh sebesar 3,6 persen pada tahun 2018. Ekspansi ekonomi global tahun 2017 dan 2018 diharapkan akan didorong oleh meningkatnya permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas. Pertumbuhan negara berkembang diperkirakan akan menjadi penopang utama laju pertumbuhan global di tahun 2018.



Sumber: IMF, 2018

Gambar 4.1.
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Tahun 2013 - 2019 (%)

Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin membaik tahun 2017 dan 2018 ditopang oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan negara maju. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengalami perbaikan setelah sempat turun dari 5,0% tahun 2013 menjadi 4,0 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi negara berkembang meningkat menjadi 4,3 persen. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang kembali meningkat pada tahun 2017 yang tumbuh mencapai 4,7 persen. IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan kelompok negara ini akan terus berlanjut pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 5,0 persen.

Gelombang pertumbuhan ekonomi dunia yang membaik juga didorong oleh semakin membaiknya ekonomi negara maju. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 1,7 persen dan pada tahun 2017 menjadi 2,3 persen. Membaiknya perekonomian negara Eropa yang tumbuh sebesar 2,4 persen pada tahun 2017 dan ekonomi Amerika Serikat yang juga tumbuh sebesar 2,3 persen mendorong perekonomian global semakin baik. Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan terus berlanjut di tahun 2018 dimana pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 2,3 persen. Ekonomi AS dipekirakan tumbuh sebesar 2,7 persen di tahun 2018 lebih tinggi dari

proyeksi sebelumnya sekitar 2,2 persen. Membaiknya ekonomi AS didukung oleh cukup kuatnya sektor ketenagakerjaan serta meningkatnya pendapatan dan belanja masyarakat sebagai akibat meningkatnya investasi perusahaan korporat sebagai dampak penurunan pajak korporasi. Kebijakan moneter yang akomodatif secara gradual diperkirakan terus dilakukan oleh Bank Sentral AS dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi AS di tengah situasi ekonomi dunia yang masih terus dibayangi risiko ketidakpastian.

Isu-isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian Sumatera Utara adalah:

- (1) Moderasi pertumbuhan (*rebalancing*) pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini akan mengalami pertumbuhan yang tidak begitu tinggi bahkan cenderung sedikit melambat. Sebagai provinsi yang menjadi mitra utama perdagangan internasional dengan kedua negara akan mempengaruhi aktivitas ekspor-impor.
- (2) Meningkatnya harga minyak dunia mendorong kenaikan harga barang atau inflasi di dalam negeri. Jika harga minyak terus meningkat maka akan dapat mempengaruhi biaya produksi pelaku usaha dan kemudian akan berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
- (3) Masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika di berbagai negara maju. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat di tahun 2018 disebabkan adanya reformasi pajak yang dilakukan Amerika Serikat dengan memangkas pajak perusahaan. Dengan demikian akan terjadi penarikan uang dari luar negeri untuk balik ke Amerika Serikat. Dampaknya mata uang Dollar Amerika Serikat akan semakin menguat dan utang Indonesia bisa melonjak. Melonjaknya nilai tukar Rupiah yang sempat menembus Rp 15.000 per US Dollar dapat berdampak terhadap kenaikan impor bahan baku/penolong, dan barang modal yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi di tanah air.

- (4) Risiko geopolitik jadi tantangan ekonomi, terutama berasal dari Korea Utara, Timur Tengah, dan Amerika Serikat.
- (5) Rencana lanjutan kenaikan Fed Fund Rate dan normalisasi neraca bank sentral Amerika Serikat. Dengan demikian, aliran dana masuk ke dalam negeri Amerika Serikat akan semakin meningkat dan dapat mengancam cadangan devisa Indonesia. The Fed akan mendorong kenaikan bunga tiga sampai empat kali bunga acuan, seiring pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS). Jika ini terjadi, ada potensi rupiah terpapar dengan kenaikan bunga acuan. Dalam pasar keuangan Indonesia, penguasaan dana investor asing dikisaran Rp 830,3 triliun yang dapat sewaktu-waktu keluar untuk mengejar rente yang lebih menarik. Dampaknya akan mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah.

Selain isu ekonomi yang hangat diperbincangkan dan dibahas oleh para pakar, terdapat pula isu strategis yang berkenaan dengan bencana. Peristiwa bencana besar akan mempengaruhi semua kawasan/daerah dan memberikan dampak yang cukup signifikan seperti contoh bencana yang terjadi di Chernobyl Uni Soviet yang mengakibatkan terjadinya kepanikan di seluruh dunia, begitu juga dengan gempa bumi Kobe yang mempengaruhi pasar perekonomian dunia. Isu bencana telah lahir seiring dengan era perang dingin. Isu penanggulangan bencana merupakan isu strategis yang ingin dicapai dan dikuasai semua Negara khususnya Negara-negara yang rawan bencana. Isu bencana dapat menjadi keuntungan komparatif dan keunggulan kompetitif bagi sebuah Negara. Dalam perspektif yang lebih luas keuntungan dan keunggulan tersebut bukan hanya pada aspek finansial, namun dimensi-dimensi lain yang tidak dapat di kuantifikasi seperti citra pengakuan dan sebagainya.

Saat ini terdapat beberapa isu internasional tentang lingkungan yang berdampak kepada terjadinya bencana baik alam maupun nonalam, seperti:

1. Pemanasan Global

Pemanasan Global atau Global Warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperature global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan

CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik yaitu pelelehan es di kutub, kenaikan moto air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktivitas social ekonomi masyarakat yaitu gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara. Gangguan terhadap pemukiman penduduk, gangguan produktifitas pertanian. Peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit.

2. Isu Lingkungan Lokal

Menipisnya lapisan ozon ini menjadi isu yang paling sering diperbincangkan, bahkan telah menjadi materi pelajaran anak-anak di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Bukan tanpa sebab karena tanpa lapisan ozon akan sangat banyak dampak negative yang menimpa makhluk hidup di muka bumi seperti penyakit-penyakit, cuaca yang tidak menentu, pemanasan global, bahkan tenggelamnya suatu daratan akibat muka air laut yang meningkat disebabkan es yang mencari di Kutub Utara dan Selatan.

3. Kebakaran Hutan

Hal ini dapat terjadi dengan tanpa atau ulah manusia, kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan. Hal ini berdampak kepada tingginya kontribusi CO₂ di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, mengganggu kesehatan (ISPA) dan berdampak kepada Negara lain.

4. Pencemaran Minyak di Lepas Pantai

Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tengker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan tumpahnya minyak ke perairan. Hal ini berdampak limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut. Dampaknya sangat luas yaitu tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang sehingga fotosintesis terganggu, pengikatan oksigen juga terganggu yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian organisme laut.

5. Banjir

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan (yang pada keadaan normal kering) karena meningkatnya volume air. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pemanasan global. Selain itu banjir juga disebabkan akibat meningkatnya curah hujan dan tidak adanya saluran air yang baik dan cukup untuk menampung air hujan tersebut. Banjir juga dapat disebabkan karena peluapan air sungai akibat meningkatnya debit curah hujan atau karena sebab lain seperti pecahnya bendungan sungai. Banjir yang banyak melanda kota-kota besar biasanya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan saluran air lainnya. Banjir juga disebabkan oleh kurangnya resapan air karena telah tertutup oleh bangunan-bangunan. Banjir menyebabkan kerugian, tidak saja dari sisi perekonomian tetapi juga kesehatan dan lingkungan.

6. Sampah/Limbah

Sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan organik dan anorganik. Sampah anorganik dihasilkan dari rumah tangga maupun industri. Sampah merupakan masalah sosial yang dapat menyebabkan konflik, di Indonesia maupun Sumatera Utara masalah sampah kurang mendapat pengawasan yang baik. Sampah plastik adalah isu yang paling mengkhawatirkan dalam decade ini dan fatalnya bahwa Indonesia adalah produsen sampah plastik nomor 2 (dua) terbesar di dunia setelah China dan nomor 1 (satu) penyumbang sampah plastik yang dibuang ke laut.

7. Reklamasi Pantai

Sangat berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan ekosistem karena perubahan topografi area reklamasi yang akan memberikan efek domino terhadap ekologi dan rantai kehidupan disekitarnya termasuk gangguan terhadap biota laut terutama pada rantai makanan akibat hilangnya populasi plankton dan fitoplankton, sehingga keberadaan ikan kecil juga akan hilang atau bermigrasi dan pasti akan diikuti oleh bergesernya populasi ikan sedang dan ikan besar sehingga nelayan pun akan bergeser dalam pencarian lokasi tangkapan.

8. Penipisan Lapisan Ozon

Terdapat dampak bagi makhluk hidup seperti terjadinya kanker kulit, meningkatnya kasus katarak, dan menurunnya produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara, dan kematian pada hewan liar.

4.2.1.2. Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan.

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. SDGs diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program *Millenium Development Goals* (MDGs), dan program ini aktif mulai Tahun 2016 hingga 2030.

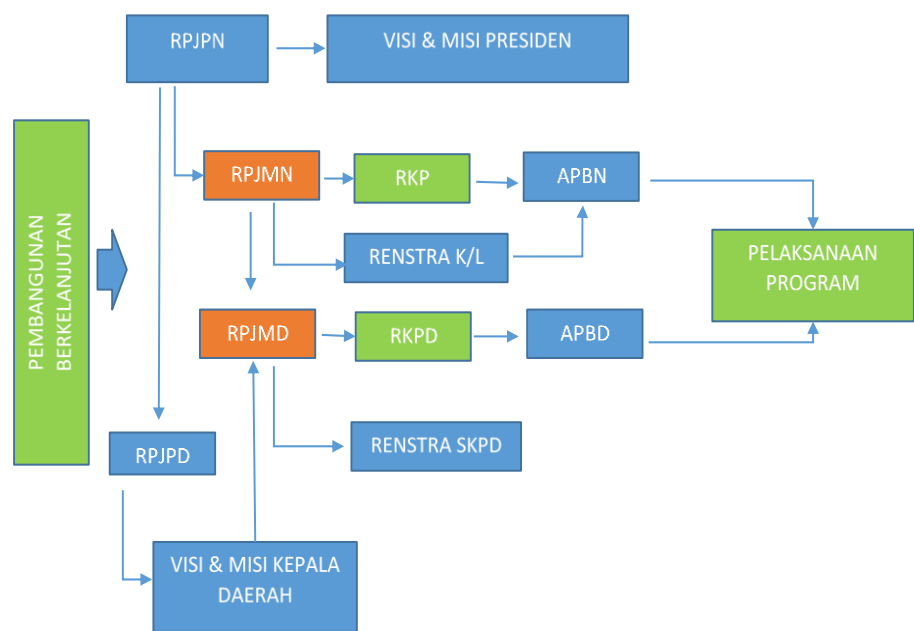
Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;

Di Provinsi Sumatera Utara pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, Indikator TPB/SDGs yang dapat diukur menjadi bagian dari rencana kerja yang dilakukan pemerintah daerah Povinsi Sumatera Utara baik dalam bentuk rumusan, program, kegiatan dan indikator. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 4.2.
Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen

Sedangkan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana.
2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Air (*Food and Water Security*).
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Berusaha.
4. Peningkatan Kualitas dan Gaya Hidup Sehat, Sejahtera serta Bebas dari Kecacatan.
5. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas dalam pembangunan, hal ini terlihat dari sinkronisi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Provinsi Sumatra Utara sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs)

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Indikator proksi
		Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		
	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Sesuai
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	Indikator proksi
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Indikator Proksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Indikator Proksi
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Sesuai
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Sesuai
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan (underweight) pada anak balita.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Sesuai
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Sesuai
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Berkurangnya penduduk miskin dan rawan pangan	Indikator Proksi
			Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	
			Karbohidrat Protein	Indikator Proksi
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian Ibu	Indikator Proksi
	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Balita	Indikator Proksi
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Neonata	Indikator Proksi
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Bayi	Indikator Proksi
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Indikator Proksi
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian TB per 1000 orang.	Cakupan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Indikator Proksi
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka Kejadian Malaria	
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	Indikator Proksi

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.			
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Indikator Proksi
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Sesuai
		Median Kawin Pertama.	Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	Sesuai
		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi Perempuan menikah Usia 15 – 49 Tahun	Indikator Proksi
		Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	Sesuai
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Sesuai
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Sesuai
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.			
	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Sesuai
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Sesuai
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Sesuai
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Angka Melek Huruf	Sesuai
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Angka Melek Huruf	
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D3	Indikator Proksi
	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Indikator Proksi

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN : 5 KESETARAAN GENDER			(Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	
	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Rasio kekerasan terhadap anak terhadap TPPO	Sesuai
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio kekerasan terhadap perempuan terhadap TPPO	Sesuai
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	Sesuai
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran remaja (perempuan umur 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19).	Sesuai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Sesuai
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Sesuai
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Masyarakat	Sesuai
		2. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		Indikator Proksi
		3. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Sesuai
		4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat		Sesuai
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1. Persentase Luas Permukiman kumuh di kawasan perkotaan 2. Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Indikator Proksi
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1. Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Indikator Proksi
		2. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya AIR Software (Sistem Aplikasi),	Indikator Proksi

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat		Hardware, Pelatihan dan Updating Data	
	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Terbinanya dan terkoordinasinya perkuatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD, Komisi Irigasi, P3A/GP3A/IP3A) Provinsi dan Kabupaten Kota	Indikator Proksi
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Sesuai
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	Sesuai
		Konsumsi listrik per kapita	Daya listrik terpasang	Indikator Proksi
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Pertumbuhan PDRB	Sesuai
		PDB per kapita	PDRB Per Kapita	Sesuai
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Persentase tenaga kerja formal.	Angka partisipasi angkatan kerja (orang)	Indikator Proksi
			Tingkat partisipasi angkatan kerja	Indikator Proksi
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Jumlah tenaga kerja yang diserap sektor informal	Sesuai
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.			
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	Kunjungan wisata	Sesuai
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Kunjungan wisata	Sesuai
TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Penurunan Emisi GRK (TEqCO2)	Sesuai
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Koefisien Gini Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Sesuai
TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Penurunan Emisi GRK (TEqCO2)	Sesuai
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Sesuai
			Kerusakan Kawasan Hutan	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.			
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAA N YANG TANGGUH	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Sesuai	Opini BPK	Sesuai
		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Sesuai
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indeks Pembangunan Gender	Sesuai
			Indeks Pemberdayaan Gender	Sesuai
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indeks Pembangunan Gender	Sesuai
			Indeks Pemberdayaan Gender	Sesuai
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	PDRB Per Kapita	Indikator Proksi
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persentase PDB terhadap pendapatan	
	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor bersih perdagangan	Sesuai
			Ekspor hasil perikanan	Sesuai
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Total Fertility Rate (TFR)	Sesuai
			Jumlah Kematian Bayi	Sesuai
			Jumlah Kematian Balita	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
			Jumlah Kematian Neonatal	Sesuai
	kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang		Jumlah Kematian Ibu	Sesuai

4.2.2. Isu Strategis Regional

Isu Strategis regional melihat berdasarkan posisi Geostrategis Provinsi Sumatera Utara di dalam konstelasi hubungan dengan provinsi bertetangga dan letak nya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Isu Strategis Regional Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah sebagai berikut :

1. Daya Saing Nasional dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia dan seluruh negara-negara ASEAN lainnya (9 negara lainnya) telah bersepakat menyepakati perjanjian MEA tersebut mulai tahun 2015. Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai pasok makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Peluang dari implementasi MEA dapat dimanfaatkan Provinsi Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan ekspornya ke negara-negara ASEAN. Selama ini, Singapura, Malaysia, Thailand telah menjadi mitra dagang utama bagi Sumatera Utara. Pada masa yang akan datang dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara ASEAN lainnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apalagi Sumatera Utara sanggup berkompetisi dengan produk-produk unggulannya khususnya komoditas hasil perkebunan seperti Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Kopi.

Implementasi MEA juga memberikan tantangan bagi perekonomian Sumatera Utara. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah:

1. Meningkatnya resiko kompetisi perdagangan, khususnya produk-produk UMKM. Dengan diimplementasikannya MEA, muncul produk-produk dari negara ASEAN lainnya yang beragam dalam jumlah banyak ke pasar Sumatera Utara. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus. Industri di Provinsi Sumatera Utara pun dapat terancam karena persaingan yang semakin ketat.
2. Meningkatnya resiko eksploitasi di bidang investasi. Dengan meningkatnya investasi akan memberikan tantangan bagi persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Sumatera Utara. Permasalahan konflik sosial sering muncul ketika munculnya investasi asing, karena masyarakat setempat tidak diberikan kesempatan besar untuk berperan dalam kegiatan produksi.
3. Meningkatnya persaingan di bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja di Sumatera Utara pada umumnya masih berpendidikan rendah. Ditinjau dari sisi pendidikan dan produktivitas, maka kualitas tenaga kerja Sumatera Utara masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dengan upah minimum yang terus meningkat setiap tahunnya, maka keunggulan upah murah yang masih dimiliki saat ini akan hilang di masa yang akan datang. Di samping itu, untuk tenaga kerja profesional, masih terbatasnya tenaga profesional yang dimiliki Sumatera Utara dapat menyebabkannya masukkan tenaga-tenaga profesional dari negara ASEAN lainnya mengisi posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan besar di Sumatera Utara.

4.2.3. Isu Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang menetapkan agenda pembangunan Nasional 2015-

2019 (Nawa Cita) adalah “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, antara lain:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Peningkatan Ketahanan Air;
3. Peningkatan Kedaulatan Energi;
4. Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
6. Penguatan Sektor Keuangan; dan
7. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Isu-isu dalam pembangunan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi makro yang tidak terlepas dari kondisi perekonomian global
2. Reformasi keuangan negara bagi peningkatan penerimaan negara, dan peningkatan kualitas belanja melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun daerah.
3. Stabilitas moneter dalam menjaga stabilitas laju inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga stabilitas moneter.
4. Menjaga makroprudensial dan keuangan yang inklusif.
5. Reindustrialisasi yang berkelanjutan dalam mengantisipasi deindustrialisasi, struktur industri yang lemah, ekspor yang berbasis bahan mentah, ketergantungan pada impor yang tinggi, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan konsentrasi industri yang hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera.
6. Peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN
7. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
8. Peningkatan pariwisata
9. Peningkatan ekonomi kreatif
10. Penguatan investasi melalui penyebaran investasi, investasi manufaktur yang berbasis ekspor, peningkatan efisiensi dalam proses perijinan, implementasi insentif fiskal bagi pengusaha, ketersediaan infrastruktur dan energi, proses pengadaan dan

perijinan lahan yang lebih cepat, melakukan debirokratisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah.

11. Mendorong perdagangan dalam negeri untuk mengatasi kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi, pengoptimalan aktivitas perdagangan dalam negeri dengan sistem elektronik, peningkatan minat masyarakat terhadap produk domestik dan peningkatan perlindungan konsumen.
12. Peningkatan daya saing ekspor melalui hilirasasi industri, diversifikasi pasar tujuan ekspor, mengurangi hambatan non-tarif, dan penyederhanaan proses ekspor dan skema pendanaan ekspor.
13. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan pekerjaan.
14. Perlindungan pekerja migran
15. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui perluasan peserta SJSN, peningkatan manfaat dan kualitas jaminan sosial, menjaga kesinambungan finansial BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
16. Peningkatan kerjasama ekonomi internasional
17. Penyempurnaan data dan informasi statistik.

Selain masalah ekonomi terdapat isu strategis di tingkat nasional yang perlu untuk disikapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden saat melakukan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Surabaya pada tanggal 4 Februari 2019, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
2. Pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara massif untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi, dan mengurangi dampak bencana, serta sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitiannya.
3. Gubernur akan secara otomatis menjadi komandan satgas darurat pada saat kejadian bencana, serta Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas.

4. Pembangunan system peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.
5. Edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutama di daerah rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama.
6. Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan.

4.2.4. Isu Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara

a. Isu Strategis Utama

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Isu-Isu Strategis Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah :

1. Ketimpangan

Kondisi ketimpangan di Sumatera Utara dapat dilihat dari indikator Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama kurun waktu 2014-2018 dan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah gini ratio nasional. Untuk tahun 2014, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,321 dan terjadi peningkatan nilai gini ratio pada tahun 2015 menjadi 0,336. Akan tetapi pada tahun 2016, gini ratio Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 0,319 dan kondisi ini terjadi juga pada tingkat nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan maka nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 penurunan 0,315 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,318.

2. Sosial dan Kemiskinan

Di masa mendatang, permasalahan sosial ini akan semakin kompleks dan besar dan selalu terkait dengan isu-isu yang lainnya. Karena itu, isu-isu tersebut seperti harus diantisipasi perkembangannya sehingga permasalahan sosial tidak menyebar dan berkembang apalagi membawa dampak yang lebih besar, yang ujung-

ujungnya akan berdampak pada disfungsi sosial.

Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan masalah kemiskinan, kedisabilitasan, keterlantaran, ketunasosialan dan bencana alam/bencana sosial.

Rendahnya kualitas penanganan kedisabilitasan berdampak pada kondisi dimana penyandang Disabilitas masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktifitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, hal ini berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis keDisabilitas serta aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan masyarakat.

Masalah ketunasusilaan yang terdiri dari gelandangan, pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah keterlantaran sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi pada anak, keluarga serta lanjut usia.

Peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit diperkirakan secara tepat sehingga sering timbul kelemahan-kelemahan dalam penanganan pada saat bencana telah terjadi. Disamping itu sikap sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana yang menghambat penanganan bencana.

Dengan demikian isu-isu strategis dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga miskin KAT dan kelompok rentan sosial ekonomi lainnya.
2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran (anak dan lanjut usia) dan orang dengan kedisabilitasan.
3. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), pekerja sektor informal, korban bencana alam dan sosial serta tunjangan berkelanjutan bagi perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.

4. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di lingkungan sosial PMKS.
5. Intergrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan *sustainable*;
6. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PMKS lainnya;
7. Pengembangan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas PSKS dan PMKS dalam pengelolaan bantuan sosial yang diberikan secara non tunai.

Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih relatif tinggi yakni 8,94 persen terhadap total penduduk pada bulan September 2018. Pola permasalahan kemiskinan yang relatif sama yaitu dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah.

3. Pengangguran

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 7,45 juta orang, naik 224 ribu orang dibanding Februari 2018. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 1,21 poin. Dalam setahun terakhir TPT turun 0,03 poin menjadi 5,56 persen pada Februari 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT jenjang Universitas mendominasi yaitu sebesar 8,76 persen.

Penduduk bekerja di Sumatera Utara pada Februari 2019 sebanyak 7,04 juta orang, bertambah 213 ribu orang dari Februari 2018. Persentase lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja yang mengalami peningkatan adalah Pertanian (1,51 poin), Penyediaan Akomodasi (1,14 poin) dan Transportasi (0,50 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan pada Perdagangan (1,79 poin), Administrasi

Pemerintahan (0,41 poin) dan Industri Pengolahan (0,35 poin). Sebagian besar dari penduduk bekerja yakni 60,25 persen (4,24 juta orang) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, dari Februari 2018 pekerja informal turun hingga 1,93 poin. Dalam setahun terakhir, pekerja paruh waktu turun sebesar 3.26 poin. Sementara itu pekerja penuh dan setengah pengangguran mengalami kenaikan.

4. Kesehatan

Pelayanan kesehatan terdiri dari 4 aspek yaitu preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Aspek preventif berarti pencegahan terhadap penyakit, terutama pada masyarakat yang berisiko tinggi.

Aspek kuratif yaitu usaha penyembuhan dari penyakit yang menyerang. Aspek promotif adalah usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, terutama pada masyarakat yang sehat. Aspek rehabilitatif adalah usaha pemulihan dari penyakit dengan tujuan mencapai kualitas hidup yang sama dengan saat sebelum terkena penyakit.

Beberapa hal yang menjadi isu dalam pembangunan kesehatan masyarakat antara lain perhatian terhadap pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat yang selama ini belum berjalan dengan optimal. Perbaikan terhadap bidang kesehatan masih harus dilakukan. Perbaikan terhadap sarana dan prasana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, dan lain-lain) harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat.

Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, Angka Usia Harapan Hidup Sumatera Utara tahun 2018 adalah 68,61 tahun. Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah kematian Ibu yang masih tinggi, Cakupan Balita Gizi Buruk yang mengalami perawatan juga patut menjadi perhatian karena grafik penanganannya sangat fluktuatif. Selain itu dalam hal menyangkut fasilitas kesehatan yakni rasio posyandu, puskesmas, poliklinik, pustu, Rumah Sakit per satuan penduduk belum mengalami perkembangan

yang berarti begitu halnya juga dengan rasio dokter dan tenaga medis persatuan penduduk sehingga pelayanan kesehatan belum optimal.

Guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana untuk meningkatkan Rumah Sakit Regional dari Tipe C ke tipe B antara lain : RSUD Kota Padang Sidempuan, RSUD Gunung Sitoli, RSUD Samosir dan RSUD Toba Samosir, serta peningkatan Rumah Sakit Haji Medan menuju Rumah Sakit bertaraf International.

5. Pendidikan

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan bahwa pendidikan merupakan hal yang menjadi landasan pembangunan, dan mengalokasikan dana pembangunan minimal 20% untuk mendukung pendidikan.

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat terus ditingkatkan untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan juga tuntutan kemajuan IPTEK. Berbagai upaya pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pelaku pembangunan lainnya, namun tak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Peningkatan kualitas sarana dan prasana pendidikan (sekolah, kompetensi guru, akreditasi, dan lain-lain) masih menjadi agenda pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi Provinsi Sumatera Utara. Hal lain lagi yang perlu ditingkatkan yaitu belum meratanya akses dan partisipasi pendidikan terutama di pendidikan menengah dan tinggi di Sumatera Utara.

6. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasca telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan regulasi turunan melalui regulasi Rencana rinci tata ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki data dasar (baseline) kesesuaian perwujudan RTRW, yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa besar pencapaian kinerja penataan ruang terhadap perwujudan RTRW. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi isu strategis penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Penyediaan regulasi penataan ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas;
- Perwujudan tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penataan ruang Daerah.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Sumatera Utara adalah sebesar 55,02 Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain erupsi gunung Sinabung dan Kebakaran Hutan.

Selanjutnya yang menjadi isu strategis lingkungan hidup adalah terkait dengan sampah, dan menjadi masalah dari tahun ke tahun. Namun saat ini yang menjadi penekanan terhadap pengelolaan sampah adalah bagaimana pengelolaan sampah di setiap kabupaten/kota ditangani dengan baik seperti meminimalisasi timbunan sampah, meningkatkan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Sistem Operasional TPA dan Sarana Pengangkutan Sampah. Pertambahan penduduk, geliat

perekonomian yang mulai membaik dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif meningkatkan volume sampah, serta jenis dan karakteristik yang semakin beragam.

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Utara khususnya di perkotaan, pemerintah melakukan upaya mengembangkan kualitas layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun diperdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, berupa sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau.

7. Infrastruktur

Kondisi ekonomi daerah yang produktif sangat sulit dicapai apabila tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan. Sampai dengan Tahun 2018, berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Sumatera Utara terus dipacu. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka pemenuhan infrastruktur semakin besar. Untuk itu pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan untuk menjadi solusi atas masalah-masalah utama yang dihadapi Sumatera Utara berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pelayanan dasar serta pemerataan pembangunan. Beberapa infrastruktur di Sumatera Utara yang perlu diprioritaskan selain transportasi yang menghubungkan inter dan intra wilayah, yaitu Perumahan dan Permukiman yakni menyangkut Rehabilitasi rumah tidak layak huni, Pembangunan pembangkit listrik, air minum, sanitasi, dan sampah. Selain itu, untuk menunjang produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan, maka infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan.

8. Perlindungan Anak

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana pemenuhan hak anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi,

penelantaran dan perlakuan salah lainnya (ABK) dan belum optimalnya peran kelembagaan anak dan atau masyarakat yang fokus pada upaya perlindungan anak, menjadikan isu terkait dengan perlindungan anak menjadi satu isu yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah di Sumatera Utara.

9. Reformasi Birokrasi

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu prioritas untuk menghasilkan kinerja yang baik.

Selain itu sistem pemerintahan yang bersih juga dihasilkan dari transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Tuntutan dalam melaksanakan *e-government* menjadi salah satu hal penting dalam melaksanakan tata pemerintahan yang bersih. Tantangan dalam pengembangan *e-government* cukup besar mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi Informasi Teknologi (IT) terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

b. Isu Strategis Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka isu strategis dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 4.4
Isu Strategis Prioritas Pembangunan

NO	SASARAN PRIORITAS	ISU STRATEGIS
1	Peningkatan Kesempatan Penyediaan Lapangan Pekerjaan	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara (5,56 persen)
2	Peningkatan dan Pemenuhan akses Pendidikan	a. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah ke Pendidikan Tinggi. b. Belum adanya <i>Link and Match</i> antara sekolah menengah kejuruan dengan industri usaha c. Terbatasnya tenaga Pendidik dan sarana prasarana fasilitas Sekolah berkebutuhan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB)
3	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan Lingkungan	a. Belum optimalnya operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi dan rawa. b. Adanya kondisi rawan bencana pada beberapa daerah. c. Masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni d. Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan strategis
4	Penyediaan Layanan Kesehatan yang berkualitas	a. Masih terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan b. Masih terbatasnya sumber daya kesehatan sesuai standar
5	Peningkatan Daya Saing melalui sektor agraris dan Pariwisata	a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi. b. Belum optimalnya Pengelolaan pariwisata di Sumatera Utara baik dari sarana prasarana maupun promosi dan pemasaran

4.3. Penelaahan RPJMN Tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas Pembangunan dirumuskan melalui sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (nawa cita), maka perlu memperhatikan strategi pembangunan nasional yang antara lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

4.3.1. Penelaahan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, dengan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara Yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan Dan Berkeadilan”**, untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan berbagai upaya yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen yang dapat dicapai melalui **Misi** pembangunan jangka panjang Sumatera utara 2005-2025 sebagai berikut :

1. Memperkuat akhlak dan moal penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah swasta serta kerjasama pemerintah daerah lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat International.
5. Memantapkan sandi-sandi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sector unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun kawasan Agropolitan maupun kawasan Agromarinpolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumber daya alam lokal secara berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas yaitu cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktifitas dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahandalam arti luas.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 Sumatera Utara adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan di bawah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang demokratis, bersih dan jujur, arah pembangunan Sumatera Utara dalam periode 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum.

4. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
5. Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
6. Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan.

4.3.2. Penelaahan RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara, meliputi antara lain:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Sistem Jaringan Energi, Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air, serta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan, dan
- f. Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Arahana Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Arahana Perizinan, Arahana Insentif dan Disinsentif, serta arahan sanksi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah **"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan"**.

4.3.3. Penelaahan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Guna mensinkronisasikan kajian berwawasan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Permendagri ini merupakan instrumen yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

KLHS RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan analisa TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan alternatif pencapaian al. sebagaimana terdapat pada tabel diatas adalah:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana;
 - b. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi (*food, water and energy security*);
 - c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perluasan kesempatan berusaha;
 - d. Peningkatan kualitas dan gaya hidup sehat, sejahtera serta bebas dari kecacatan; dan
 - e. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2. Mendorong peran para pihak dalam pencapaian TBP di Sumatera Utara;
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan guna pencapaian TPB;

BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yaitu tahap pemantapan *“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*. Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

5.2. MISI

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 sebagai berikut :

- Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.

- Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- Misi Keempat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- Misi Kelima

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur. Kinerja sasaran disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun selama periode Tahun 2019 – 2023, seperti disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

5.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas tersebut akan dicapai berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. **Good Governance (tata kelola pemerintahan) yang baik**, yaitu pengelolaan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity (integritas)**, yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas)**, yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta

sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun 2019-2023 yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, dengan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara Yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan Dan Berkeadilan”**, untuk mewujudkan visi tersebutdibutuhkan berbagai upaya yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen yangdapat dicapai melalui **Misi** pembangunan jangka panjang Sumatera utara 2005-2025 sebagai berikut :

1. Memperkuat akhlak dan moal penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.

3. Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah swasta serta kerjasama pemerintah daerah lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat International.
5. Memantapkan sandi-sandi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriindustri, kepariwisataan serta sector unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun kawasan Agropolitan maupun kawasan Agromaripolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumberdaya alam local secara berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas yaitu cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktifitas dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahandalam arti luas.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 Sumatera Utara adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan social, berkeadilan di bawah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang demokratis, bersih dan jujur, arah pembangunan Sumatera Utara dalam periode 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum
4. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
5. Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

6. Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas Pembangunan dirumuskan melalui sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (nawa cita), maka perlu memperhatikan strategi pembangunan nasional yang antara lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara, meliputi antara lain:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Sistem Jaringan Energi, Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air, serta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan, dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Arahan Perizinan, Arahan Insentif dan Disinsentif, serta arahan sanksi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah **"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Sejahtera, Merata, Berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan"**.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi Sumatera Utara antara lain:

- a. mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat;
- b. mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk;
- c. mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif;
- d. menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah; dan
- f. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan sumatera utara dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Pembangunan RPJMD 2019-2023 melalui pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi untuk pencapaian visi dan misi provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini menggunakan hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan, kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) yang di miliki Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan strategi yang tepat dalam melakukan perubahan dan transformasi menuju keadaan yang lebih maju, aman, dan bermartabat, sebagaimana cita-cita masyarakat Sumatera Utara.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut Sumatera Utara memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial. Akan tetapi martabat daerah ini mengalami kemerosotan akibat rendahnya integritas dan kemampuan pemimpin untuk mengelola dan mendayagunakan serta mengaktualisasikannya. Pada saat yang sama Sumatera Utara memiliki kelemahan dan tantangan yang demikian serius sebagai mana yang disebut diatas. Maka untuk memajukan daerah ini dan meraih martabatnya yang tinggi, diperlukan strategi yang tepat, realistis, dan visioner dengan membaca peluang dan memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya. Strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	1.1	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang religius	1.1.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama Meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagai sarana kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
	1.2	Terwujudnya pangan yang cukup	1.2.1	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Pengembangan diversifikasi pangan Penanganan daerah rawan pangan Stabilisasi harga dan pasokan pangan Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar
	1.3	Terwujudnya kesejahteraan petani	1.3.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan berbasis korporasi petani Pengembangan agroindustri melalui penerapan dan penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Komoditas pertanian, peternakan dan perikanan
	1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas hunian dan lingkungan kawasan permukiman	1.4.1	Meningkatnya kualitas hunian dan lingkungan Kawasan permukiman	Pembangunan PSU Permukiman bagi masyarakat kurang mampu Bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

				Peningkatan peran dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman kumuh
1.5	Terwujudnya kesehatan masyarakat yang prima	1.5.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
1.6	Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha	1.6.1	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif Pemberian insentif dan fasilitas investasi Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
1.7	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	1.7.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan nilai tambah produk
		1.7.2	Menurunnya angka kemiskinan	Pemberdayaan dan penguatan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu dalam pengembangan ekonomi kreatif
		1.7.3	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan pemerataan pembangunan	Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah
		1.7.4	Meningkatnya infrastruktur dasar	Pembangunan dan peningkatan Jalan Peningkatan layanan irigasi dalam kondisi optimal Pembangunan dan peningkatan penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi Pembangunan dan Peningkatan Sambungan Listrik Rumah Tangga Masyarakat
1.8	Terjaminnya stabilitas permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau	1.8.1	Terkendalinya inflasi	Pengendalian Laju Inflasi dan Penguatan stabilitas harga

	1.9	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas	1.9.1	Menurunnya jumlah kelahiran per wanita usia 15-49 tahun	Peningkatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
					Peningkatan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur
					Peningkatan Pembinaan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia
	1.10	Terwujudnya masyarakat yang memperoleh kehidupan yang layak	1.10.1	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan menengah
					Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
					Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah
					Pengarusutamaan gender melalui optimalisasi regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	2.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik	2.1.1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
					Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi
	2.2	Terwujudnya politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	2.2.1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan upaya pre-emptif, preventif, dan represif atas pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya
					Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar,	3.1	'Terwujudnya masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas,	3.1.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan
					Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan yang berfokus pada program keahlian yang sesuai dengan potensi daerah

berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri		kolaboratif, berdaya saing dan mandiri			Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	4.1	Terwujudnya masyarakat yang terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	4.1.1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
					Peningkatan pembinaan pemuda
					Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan dan keikut kesertaan pada kejuaraan Multi Event Olahraga Prestasi di tingkat nasional dan internasional
					Pengembangan pemberdayaan organisasi seni budaya
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	5.1	Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan ekologi lingkungan hidup yang berkualitas	5.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan
					Penataan, Pembinaan dan pendampingan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari
					Peningkatan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
	5.2	Terwujudnya penanganan bencana yang responsif dan cepat tanggap	5.2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana	Peningkatan Pemberian Pelayanan Informasi rawan Bencana
					Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	5.3	Terwujudnya masyarakat yang	5.3.1	Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					Penguatan Warisan Budaya Daerah

		ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab dengan Pelestarian Nilai Kekayaan Budaya dalam mendukung Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan		dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata	Peningkatan dan Optimalisasi Sektor Pariwisata yang Berkelanjutan

6.2. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2019)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), melalui pengembangan serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2021)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2022)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan padaakselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat.

f. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan padaakselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Arah Kebijakan				
Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023
Difokuskan padaupaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) dan tata pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>), serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan infrastruktur dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan serta lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.	Difokuskan pada percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya di daerah kumuh, perdesaan, terpencil dan kepulauan untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha	Difokuskan untuk melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan	Difokuskan padaupaya pengoptimalandan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat	Difokuskan padaakselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat.

6.3. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Sedangkan yang dimaksud dengan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam penataan ruang.

Tabel 6.3
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

KEBIJAKAN	STRATEGI
Mengurangi Kesenjangan Pengembangan Wilayah Timur dan Barat	a. Mengembangkan Pusat-pusat Pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung b. Membangun dan meningkatkan Aksesibilitas Wilayah Timur dan Barat serta Dataran Tinggi
Mengembangkan Sektor Ekonomi Unggulan Melalui Peningkatan Daya Saing dan Diversifikasi Produk	a. Mendorong Kegiatan Pengolahan Komoditi Unggulan di Pusat Produksi Komoditi Unggulan; b. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendukung Produksi untuk Menjamin Kestabilan Produksi Komoditi Unggulan; c. Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi, Perhubungan, Sumber Daya Air dan Telekomunikasi Dari Pusat Produksi Komoditi Unggulan Menuju Pusat Pemasaran; d. Mengembangkan Pusat-Pusat Agropolitan, Minapolitan Serta Kawasan Wisata Potensial Untuk Meningkatkan Daya Saing; e. Meningkatkan Kapasitas Pembangkit Listrik Dengan Memanfaatkan Sumber Energi yang Tersedia dan Terbaharukan Serta Memperluas Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Guna Mendukung Produksi Komoditas Unggulan; dan f. Mengembangkan Kawasan dan Produk Unggulan yang Berpotensi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kawasan dan Wilayah di Sekitarnya Serta Mendorong Pemerataan Perkembangan Wilayah.
Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Intensifikasi Lahan yang ada	a. Mempertahankan Luasan Lahan Pertanian;

KEBIJAKAN	STRATEGI
dan Ektensifikasi Kegiatan Pertanian pada Lahan Non - Produktif	b. Meningkatkan Produktivitas Pertanian; c. Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan d. Mencetak Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Baru dan Penyediaan Sarana Prasarananya untuk Memenuhi Swasembada pangan.
Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem	a. Mempertahankan Luasan Kawasan Lindung b. Meningkatkan Kualitas Kawasan Lindung; dan c. Mengembalikan Ekosistem Kawasan Lindung.
Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Budidaya sebagai Antisipasi Perkembangan wilayah	a. Mengembangkan Kawasan Budidaya Yang Berwawasan Lingkungan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; b. Mengendalikan Perkembangan Fisik Permukiman dan Peruntukan Lainnya; dan c. Mendorong Sinergitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perdesaan dan Perkotaan.
Meningkatkan Aksesibilitas dan Memeratakan Pelayanan Sosial Ekonomi ke Seluruh Wilayah Provinsi	a. Mengembangkan dan Memeratakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Sosial Pada Seluruh Bagian Kawasan; dan b. Menyediakan dan Memeratakan Fasilitas Pelayanan Ekonomi Sosial.

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang tersebut yang sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah, dibutuhkan inovasi pola perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Upaya yang dikembangkan adalah melakukan penguatan perencanaan kawasan yang diarahkan untuk mendukung perwujudan kawasan strategis nasional serta mewujudkan kawasan-kawasan strategis provinsi melalui percepatan pembangunan infrastuktur ekonomi dan sosial.

Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan kerjasama antar daerah untuk membuat terobosan dalam upaya tumbuhnya usaha yang saling menguntungkan untuk dikembangkan secara intensif. Hal utama yang harus mendasari terbentuknya kerjasama pembangunan antar daerah tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing pemerintahan daerah terkait. Komitmen yang dimaksud adalah

komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Beberapa kerjasama yang dikembangkan, antara lain :

1. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
2. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
3. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Saat ini, beberapa kerjasama yang telah diselenggarakan adalah kerjasama pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan kerjasama dengan provinsi lain, khususnya yang berbatasan, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Riau. Bentuk-bentuk kerjasama ini akan semakin dikembangkan pada masa periode jangka menengah untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam mengantisipasi keterbatasan pembiayaan pembangunan dan pengembangan pola alternatif pembiayaan pembangunan.

Keterbatasan alokasi anggaran daerah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, seperti yang diamanatkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan (RPJP, RTRW, RPJM, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan sebagainya) menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan beberapa alternatif pendanaan antara lain:

- a. menggunakan skema Kerjasama Pemerinah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Infrastruktur yang dapat di-KPBU-kan dapat berupa infrastruktur ekonomi maupun sosial, baik yang

membutuhkan dana yang sangat besar maupun dana yang tidak begitu besar. Infrastruktur ekonomi misalnya: angkutan/transportasi, jalan, irigasi, air baku, air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, energi dan ketenagalistrikan, konservasi energi, fasilitas ekonomi perkotaan/kawasan. Infrastruktur sosial antara lain: fasilitas pariwisata, fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, fasilitas sarana olah raga/kesenian/ budaya, perumahan rakyat, dan kesehatan.

- b. Corporate Sosial Responsibility (CSR), yang merupakan sebuah program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat luas. Hal ini dapat dimanfaatkan melalui kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana CSR. CSR ini harus direncanakan dengan tepat serta dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan agar pembangunan dapat diimplementasikan secara optimal.
- c. Peningkatan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memanfaatkan potensi dan peluang pembangunan daerah

6.4. Program Unggulan

Dalam rangka pencapaian 5 (lima) sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, akan dilaksanakan melalui serangkaian program unggulan yang akan mendorong terjadinya “**lompatan**” dalam pembangunan Provinsi Sumatera yaitu:

- 1. Prioritas Pembangunan-1 : Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja**, diarahkan kepada:
 - a. Membangun kerjasama dengan institusi nasional dan internasional serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung latihan kerja (**link and match**);
 - b. Meningkatkan produktifitas dan perlindungan tenaga kerja yang bertumpu kepada peningkatan daya saing tenaga kerja;

- c. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pariwisata dan industri 4.0;
- d. Pengembangan Sentra Koperasi dan KUKM berbasis online.
- e. Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan IKM berbasis online (e-smart IKM)
- f. Mendorong pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru dan pengembangan industri kreatif;
- g. Meningkatkan promosi potensi investasi yang diikuti dengan kebijakan kemudahan dalam perizinan.

2. Prioritas Pembangunan-2 : Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan, diarahkan kepada :

- a. Pemberian beasiswa bagi lulusan SMA/SMK berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi;
- b. Pemberian beasiswa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru;
- c. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam pembangunan sarana prasarana SMA/SMK di setiap kecamatan;
- d. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK terakreditasi;
- e. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan kabupaten/kota dan mendorong partisipasi stakeholders (BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat) dalam pembangunan SMK sesuai potensi sumber daya alam dan kebutuhan pasar kerja melalui;
- f. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan Khusus;
- g. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mendorong partisipasi stakeholders (BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat) dalam peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- h. Penguatan dan pengintegrasian pendidikan karakter di semua mata pelajaran/kurikulum dengan pengembangan nilai-nilai seperti nilai religius, bekerja keras, jujur, toleransi, dan disiplin terutama di sekolah menengah di Provinsi Sumatera Utara;
- i. Program Guru Lintas Sekolah (GLS) atau Guru Terbang untuk membantu mengatasi masalah kekurangan guru di daerah

terpencil di Provinsi Sumatera Utara.

3. Prioritas Pembangunan-3 : Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, diarahkan kepada:

- a. Mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada Kawasan Strategis Nasional (KSN Mebidangro, KSPN Danau Toba, KSPN Bukit Lawang, KSPN Tangkahan, KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Parawisata Kepulauan Nias), pembangunan jalan tol, pembangunan pembangunan jalur Kereta Api Sumatera (Trans Sumatera Railway), pembangunan Bendung Serbaguna Lau Simeme, dan pengembangan transportasi massal di Kawasan perkotaan (LRT/MRT);
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi seperti Kawasan Simalungun-Batubara-Asahan, Kawasan Pengembangan Ekonomi Labuhanbatu dan sekitarnya, Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan, Kawasan Pengembangan Ekonomi Pantai Barat dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Ekonomi Kepulauan Nias, Kawasan Ekosistem Bahorok, Kawasan Budaya Bawomataluo, Kawasan Bersejarah Barus dan Situs Sejarah Medan-Deli Serdang;
- c. Pembangunan Kawasan **Sport Center** berstandar internasional dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga, dan pembangunan pusat pengembangan IPTEK keolahragaan, peningkatan kualitas pelatih dan pembinaan atlet berprestasi dalam rangka peningkatan prestasi Sumatera Utara di bidang olahraga;
- d. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota, BUMN/BUMD, swasta (CSR) dan masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar (jalan/jembatan, irigasi, air minum, sanitasi (air limbah dan persampahan), rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh) dan pelayanan dasar lainnya;
- e. Mendorong pengembangan kota-kota satelit baru pada kawasan cepat tumbuh (Binjai, Percut Sei Tuan, Kualanamu, Kualanamu, Batangkuis, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Parapat)

4. Prioritas Pembangunan-4 : Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, diarahkan kepada :

- a. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota dalam peningkatan SDM, sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan dan mendorong pengembangan rumah sakit berkelas internasional khususnya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
- b. Peningkatan Pembinaan dan Koorinasi dalam mendorong kabupaten/kota dalam rangka penurunan angka ibu melahirkan, angka kematian bayi, balita stunting, balita kekurangan gizi dan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- c. Pengembangan siaga kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.

5. Prioritas Pembangunan-5 : Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata, diarahkan kepada:

- a. Pengembangan produk unggulan daerah yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kelapa, dan mendorong pengembangan sentra produk lokal seperti gula aren, nilam, akar wangi, dan hasilhasil perikanan (*one region one product*) serta pencapaian swasembada pangan;
- b. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan, Pengembangan Kawasan Peternakan, Agro Techno Park di Kawasan Mebidangro, dan pengembangan kawasan agrowisata yang berstandar internasional dengan potensi alam dan budidaya pertanian.
- c. Mendorong investasi swasta dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (*convention center*, perhotelan, restoran, sport area dan lain-lain) untuk mendorong kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) berskala nasional dan internasional di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pariwisata melalui pembangunan Agro Techno Park di Kawasan Mebidangro, pengembangan wisata olahraga, dan kawasan

- agrowisata dan ekowisata yang berstandar internasional dengan potensi alam dan budidaya pertanian, kelautan dan perikanan
- e. Pengembangan Pusat Kawasan Budaya dan Wisata Religi melalui pembangunan dan pengembangan Islamic Center dan situs-situs dan cagar budaya.
 - f. Penyelenggaraan event wisata berskala nasional dan internasional antara lain berupa Festival Seni Budaya, Festival Kopi, Festival Buah Dan Bunga, serta Karnaval Kebudayaan.
 - g. Meningkatkan SDM Pariwisata melalui benchmarking/studi pengalaman dari pusat pariwisata.

6.5. Program Prioritas

Untuk mengupayakan terjadinya perubahan kearah yang lebih baik serta terciptanya pembangunan yang berarti bagi kesejahteraan rakyat, maka penyusunan program prioritas pembangunan Sumatera Utara berlandaskan kepada :

Pertama, sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, diupayakan secara sungguh-sungguh agar hasil-hasil daerah dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, bagi hasil sumber daya alam terbarukan seperti perkebunan, minyak bumi, gas, hasil laut, hutan, dan emas pondo ditingkatkan. Sejalan dengan itu, penggunaan bagi-hasil tersebut bagi kesejahteraan rakyat Sumatera Utara akan dimanfaatkan dan disosialisasikan secara transparan.

Kedua, sebagaimana diketahui bahwa setiap daerah di Sumatera Utara memiliki potensi yang dapat dijadikan keunggulan daerah tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, setiap daerah didorong agar dapat menetapkan orientasi pembangunannya secara khusus dan menjadi ikon dari daerah tersebut. Sejalan dengan itu maka koordinasi pembangunan terus dimantapkan dan ego sektoral ditekan seminimal mungkin.

Ketiga, mensukseskan dan mengawal pembangunan infrastruktur yang merupakan program nasional dan mengalokasikan dana yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur daerah (seperti jalan, jembatan,

irigasi, dan pelabuhan) guna menghubungkan daerah dan memperlancar peningkatan ekonomi rakyat.

Keempat, melakukan upaya sungguh-sungguh dalam peningkatan pemahaman dan pengalaman Pancasila, wawasan kebangsaan, peningkatan iman dan taqwa, penguatan lembaga-lembaga agama dan ormas-ormas keagamaan dalam peningkatan moralitas dan karakter bangsa, peningkatan kesadaran pluralitas, dan perwujudan harmonisasi sosial yang kuat.

Kelima, memaksimalkan pelaksanaan peran seluruh instrumen pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu ditegakkan disiplin, budaya kerja, dan efisiensi dana pembangunan, sehingga roda pembangunan Sumatera Utara dapat berjalan lancar dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu, pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dari berbagai sumber untuk memepersbesar alokasi dana publik.

Keenam, menekan semaksimal mungkin segala bentuk kebocoran dana pembangunan, pungli, gratifikasi, transaksi pembuatan perturan dan formasi jabatan, serta debirokratifikasi perizinan.

Ketujuh, memaksimalkan pelaksanaan Pendidikan Universal 12 tahun dan meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan melalui Peningkatan alokasi anggaran untuk urusan Pendidikan diatas 20%, pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi baru di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pertimbangan wilayah dengan jenis program studi disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah serta meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing dengan memberikan beasiswa kepada siswa/i yang layak dan kompeten.

Kedelapan, mendorong secara sungguh-sungguh peningkatan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan rakyat, mendorong dan mengadvokasi pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha besar.

Kesembilan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata Sumatera Utara dan halal *tourism* dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada serta sosialisasinya di Asia Tenggara dan dunia internasional.

Kesepuluh, memaksimalkan pencegahan narkoba, radikalisme-terorisme, perdagangan manusia (*trafficking*) dan kejahatan-kejahatan transnasional lainnya.

Kesebelas, meningkatkan rasa keamanan masyarakat, serta meningkatkan peran rakyat dalam pertahanan Negara di wilayah Sumatera Utara. Pada saat yang sama melakukan advokasi rakyat dari penguasaan tanah, usaha, dan perdagangan yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak memilki rasa keadilan dan kasih sayang kepada kaum yang lemah.

Berdasarkan kesebelas prioritas tersebut ditetapkanlah program prioritas Provinsi Sumatera Utara. Pada dasarnya program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Secara khusus program prioritas Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2019 - 2023 lahir dari janji kampanye yang disampaikan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang terdiri atas :



Karena bersifat prioritas, kelima bidang tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi arus utama pembangunan daerah. Karakteristik program yang menyentuh langsung kepentingan publik yang bersifat luar, memerlukan kerja sama lintas organisasi pemerintah daerah. Karenanya dibutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tujuan yang diharapkan dan koordinasi yang baik terhadap pelaksanaan program. Memperhatikan bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah agraris dan pesisir pantai. Saat ini Sumatera Utara setidaknya memiliki 647.223 ha lahan pertanian. Oleh karenanya kebijakan pengurangan angka pengangguran dilakukan dengan menumbuhkan angkatan kerja pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Potensi lain tercipta dari pengolahan dan pemasaran pasca panen produk pertanian. Dengan penciptaan lapangan pekerjaan hasil produk pertanian baik dalam negeri maupun ekspor produk pertanian. Karenanya kebijakan dan program kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus berpihak kepada para petani penggarap dan pada sektor pasca panen.

Kebijakan ini dimulai dari perubahan *mind set* dari generasi muda mengenai kewirausahaan pada bidang agribisnis. Perlu ada pumbuhan minat sejak dini terhadap bisnis pada sektor pertanian melalui kurikulum pendidikan. Generasi milenial Sumatera Utara harus didekatkan dengan potensi daerah seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi sangat penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi meliputi: (1) Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; SPM

bidang Kesehatan untuk Provinsi meliputi: 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; (2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. SPM bidang Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi. SPM Bidang Sosial meliputi; (1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; (2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; (3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti; (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya pengembara dan pengemis di dalam panti dan (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Selanjutnya di dalam Permendagri nomor 100 Tahun 2018 disebutkan target capaian untuk SPM bidang urusan harus mencapai 100 persen.

Pada sektor pendidikan, permasalahan utama yang terjadi adalah tidak tersambungannya profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industri. Berdasarkan riset yang dirilis oleh McKinsey, 40% perusahaan menyatakan bahwa lulusan sekolah formal tidak memiliki skill yang mencukupi di lapangan. Sehingga diperlukan reformasi melalui pendidikan berbasis lingkungan yang mentitikberatkan pada bakat dan karakter anak. Oleh karenanya, kedepannya kebijakan pendidikan yang diambil oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara harus *link and match* dengan dunia usaha.

Hal ini dilakukan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan, utamanya untuk menunjang program prioritas, seperti SMK Pertanian, SMK Perikanan, SMK Teknologi Hasil Pertanian, SMK Pariwisata dan lain sebagainya. Selain itu pendidikan kejuruan juga harus melibatkan dunia usaha dalam pendidikan, seperti melibatkan tenaga ahli dari perusahaan untuk mengajar disekolah, pembukaan magang pada perusahaan pertanian, maupun penggunaan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk praktik siswa kejuruan.

Demikian halnya dengan Sumber Daya Manusia (guru) SMK dinilai masih kurang mempunyai kompetensi yang baik di bidangnya sesuai dengan program keahlian. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya diklat

peningkatan kompetensi guru SMK dan tidak adanya lagi lembaga pemerintah yang memproduksi guru khusus SMK seperti PT3GT. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilaksanakan Diklat Kompetensi Guru serta mengikutsertakan guru SMK pada program On the Job Training (OJT) di industri.

Begitu juga dengan masih terlalu banyak Program Keahlian yang terdapat pada satu SMK yang disebabkan karena Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan kurang fokus pada pengembangan program keahlian yang sesuai dengan industri pendukung sehingga perlunya penyesuaian program keahlian dengan industri pendukung dan melakukan merger terhadap program keahlian yang tidak sesuai.

Untuk Pendidikan Khusus, terdapat permasalahan masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa dan kurangnya Pendidik di SLB yang mempunyai kompetensi atau latar belakang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan ketunaannya/disabilitasnya dan belum adanya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang memiliki fakultas pendidikan khusus. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di SLB perlu dilakukan identifikasi kebutuhan yang sesuai dengan ketunaan siswa di SLB sebagai dasar pembangunan dan pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus serta untuk meningkatkan kompetensi Guru SLB maka diharapkan optimalisasi pelaksanaan program penerimaan Guru yang berlatar belakang pendidikan formal untuk di training ke provinsi lain yang memiliki LPTK dan fakultas pendidikan khusus.

Demikian halnya dengan lulusan Sekolah Luar Biasa yang belum memiliki keterampilan yang memadai karena kurangnya Guru dengan keterampilan khusus di SLB, hal ini dapat diatasi dengan melakukan rekrutmen Guru dengan keterampilan untuk SLB serta program kerjasama dengan Pendidikan Kejuruan (SMK) sehingga Guru keterampilan yang ada di SMK dapat juga mengajarkan keterampilannya kepada siswa berkebutuhan khusus di SLB.

Selain itu Pendidikan karakter menjadi landasan pembelajaran yang penting. Pendidikan karakter dengan nilai-nilai yang harus dikembangkannya seperti nilai religius, bekerja keras, jujur, toleransi, dan disiplin akan dapat menjadi solusi berbagai krisis yang dihadapi oleh pelajar-pelajar sekarang. Sekarang ini ditengarai terjadi krisis identitas karena orientasi siswa terhadap budaya luar. Selain karena pengaruh budaya luar juga juga disebabkan oleh tidak kuatnya pertahanan generasi muda bangsa kita terhadap jati diri bangsa Indonesia.

Konsep dan implementasi pendidikan karakter sesungguhnya telah dirancang dengan apik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk bagaimana strategi pengembangannya di sekolah-sekolah. Secara kurikuler pendidikan karakter telah diwajibkan kepada semua guru yang mengasuh mata pelajaran untuk memuat nilai-nilai karakter disamping nilai-nilai lain seperti kemampuan bernalar aras tinggi, kemampuan literasi, dan 4 C (critical thinking, collaborative, creative dan communication). Semuanya ini harus dijalankan secara simultan sehingga penanaman nilai-nilai karakter menyatu dengan sendirinya.

Konsep seperti ini sedang dikembangkan dan tentu saja belum merata dikonsepsi dan dipahami secara komprehensif guru bidang studi. Selain itu masih adanya anggapan bahwa semua nilai-nilai di atas seakan-akan tidak berkaitan dengan semua mata pelajaran dan hak itu hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran tertentu. Pandangan-pandangan seperti inilah yang masih muncul secara kurikuler. Sementara itu pemerintah juga sudah menetapkan bahwa kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka merupakan kegiatan wajib bagi siswa karena melalui kegiatan kepramukaan ini pengembangan nilai-nilai karakter akan dapat diterapkan dengan baik.

Berdasarkan hal itu penguatan pendidikan karakter terutama di sekolah menengah di Sumatera Utara perlu dijaga dan dirawat dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dengan semua mata pelajaran. Dengan keterlibatan semua guru dan semua mata pelajaran menjadikan pendidikan karakter akan semakin kuat. Tentu saja contoh dan keteladanan dari lingkungan sekolah dan orang tua menjadi tempat siswa menginternalisasi nilai-nilai karakter dimaksud secara praktis.

Oleh karena itu setiap satuan pendidikan harus menjadi pengembangan karakter sebagai landasan pembelajaran di sekolah dan setiap rumah tangga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada anak-anak dalam pengembangan karakter mereka. Orientasi pendidikan karakter menjadi landasan yang penting dalam pendidikan Sumatera Utara yang bermartabat.

Merupakan sebuah kenyataan bahwa masih banyak daerah di Sumatera Utara yang kelebihan guru dan kekurangan guru. Pada umumnya daerah-daerah terpencil mengalami kekurangan guru baik karena daerah ini kurang diminati oleh tenaga guru baru maupun karena guru-guru yang sudah bertugas di sana meminta dipindahkan ke daerah perkotaan. Pada umumnya alasan mereka pindah karena keterbatasan kebutuhan hidup di daerah terpencil.

Masalah ini sudah lama berlangsung dan hingga saat ini belum ditemukan solusinya. Meskipun pernah ditempuh kebijakan penerimaan guru ASN berbasis kuota, dengan memberikan kuota yang besar ke daerah terpencil, namun konsep ini tidak terealisasi dengan optimal. Oleh karena itu, konsep baru yang ditawarkan adalah program Guru Lintas Sekolah (GLS) atau Guru Terbang yang penjadwalan pekerjaannya dapat diatur seperti guru dari perkotaan berada di daerah terpencil selama waktu semester atau paling sedikit setengah semester (antara dua bulan s.d empat bulan). Agar program ini menarik minat guru diharapkan ada tambahan penghasilan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil.

Dalam menjalankan program ini Cabang Dinas Pendidikan terlebih dahulu memetakan sekolah-sekolah yang kekurangan guru pada bidang studi tertentu. Hasil pemetaan ini disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi sehingga Dinas Pendidikan Provinsi memiliki mapping/pemetaan kekurangan dan kelebihan guru bidang studi. Sekolah yang memiliki kelebihan guru bidang studi memberikan izin kepada guru yang bersangkutan untuk ditugaskan sebagai “Guru Terbang” ke daerah terpencil yang kekurangan guru. Penugasan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Dengan adanya program Guru Lintas Sekolah ini kekurangan guru di daerah terpencil dapat diatasi. Program ini tentu saja menjadi sebuah solusi praktis menunggu keikhlasan guru-guru tertentu yang rela bermukim di daerah terpencil. Dengan demikian kekurangan guru di Sekolah-sekolah daerah terpencil dapat diatasi dan anak-anak akan bergairah belajar dengan adanya tambahan guru yang segar dari perkotaan dengan wawasannya yang lebih luas dan lebih maju.

Kebijakan infrastruktur menjadi program prioritas diorientasikan untuk mendukung dan mendorong laju perekonomian di Sumatera Utara. Karenanya, pembangunan infrastruktur ini lebih fokus pada penguatan akses ke lokasi pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan pasar. Dukungan terhadap infrastruktur tersebut dilakukan dengan pembuatan jalan baru, perawatan jalan, dan penaikan kelas jalan. Termasuk dengan meningkatkan sarana prasarana yang ada di lokasi wisata dan pasar tradisional. Dengan tersedianya sarana infrastruktur yang baik diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pada bidang kesehatan, orientasi program prioritas adalah memberikan layanan kesehatan berkualitas. Langkah dasar yang dilakukan adalah memberi akses kesehatan pada 4,8 juta penduduk yang belum tercover program perlindungan kesehatan dari BPJS. Selain itu program pada bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, hal ini dilakukan dengan beberapa langkah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang kesehatan dan kesehatan reproduksi yang berkualitas;
2. Menghadirkan peralatan kesehatan yang paling mutakhir;
3. Meningkatkan kemampuan penanganan kesehatan dari tenaga medis;
4. Meningkatkan respon kondisi kegawatdaruratan medis.

Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dilakukan program peningkatan daya saing. Program ini memiliki orientasi untuk menguatkan kualitas hidup dari masyarakat Sumatera Utara. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pada sektor ini adalah:

1. Penguatan ketahanan pangan
2. Mengontrol stabilitas harga
3. Revitalisasi Pasar
4. Pengembangan UMKM

Selain *program prioritas*, pembangunan Sumatera Utara dilaksanakan secara regular yang dirumuskan dalam kerangka ekonomi, politik, hukum, agama dan pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Diharapkan dengan formulasi tersebut, percepatan pembangunan Sumatera Utara dapat dilaksanakan.

6.5.1. Bidang Ekonomi

1. Selama ini pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada diatas rata-rata nasional. Tetapi, hal ini berjalan dengan sendirinya. Ke depan pertumbuhan diupayakan agar meningkat dan dicapai dengan sengaja atas usaha keras dari pemerintah. Pada saat yang sama pertumbuhan itu di upayakan agar membawa kesejahteraan bagi rakyat secara merata.
2. Adalah suatu kenyataan bahwa ekonomi Sumatera Utara masih di kuasai oleh kelompok kecil sehingga kesejahteraan rakyat tidak tampak dan dirasakan oleh rakyat. Oleh karenanya penataan sektor rill menjadi keniscayaan agar pendapatan masyarakat dapat meningkatkan sejalan dengan daya belinya yang meningkat pula.
3. Meminimalisir inflasi dengan penataan sektor rill secara sungguh-sungguh dan cermat inflasi akan dikurangi dan ditekan seminimal.
4. Mendukung program nasional dalam pembangunan infrastruktur (seperti jalan, jembatan, irigasi dan pelabuhan) serta mengalokasikan dana yang lebih besar pada pembangunan infrstruktur yang menjadi tanggungjawab Provinsi.
5. Mendorong pemanfaatan dana bantuan desa agar efektif, efisien dan tepat sasaran, karena bantuan tersebut merupakan upaya rill untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu, diupayakan secara perencanaan pembangunan desa dengan pengawasan pemanfaatannya diefektifkan. Untuk itu

peran pengetahuan dan fungsi para pendamping dana desa akan ditingkatkan.

6. Diupayakan agar pembangunan kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei dan jalur kereta api Aceh-Sumut-Riau-Lampung membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan ekonomi rakyat.
7. Mendorong pertumbuhan UMKM dengan melakukan debirokratisasi perolehan kredit pinjaman bagi rakyat yang ingin berusaha. Pada saat yang sama CSR perusahaan-perusahaan yang masuk ke pemerintah akan di salurkan secara objektif, adil, dan berorientasi pada pencapaian sejahtera rakyat.
8. Pasar bebas dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan ekonomi Sumatera Utara. Untuk itu, industri-industri besar dan kecil Kota dan Kabupaten akan didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kualitasnya, serta memodernisasi kemasan (*packing*) barang-barang produksinya agar dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri, baik di pasar lokal, regional, maupun internasional.
9. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat adalah dengan mendorong tumbuhnya kewirausahaan (*enterepreneurship*). Berkenaan dengan itu akan dilaksanakan gerakan KES (Keluarga Enterepreneur Sumut) dengan target *one family one entrepreneur*. Teknik yang digunakan adalah dengan mempermudah pengucuran dana kredit dan perintisan pasar oleh pemerintah baik domestik maupun antar Negara. Targetnya adalah dari 2% penduduk menjadi 10% sebagai *entrepreneur*. Dana khusus juga dialokasikan untuk program '*container iqtishadi*' dengan membangun minimarket, kios minyak dan pabrik roti.
10. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat, maka akan didorong terjadinya keseimbangan kemajuan ekonomi Pantai Timur dan Pantai Barat.
11. Revitalisasi peran pekan Raya Sumatera Utara sebagai ajang promosi dan tukar menukar informasi industri perdagangan antar daerah di Sumatera Utara dan dengan provinsi-provinsi lain dan negara-negara tetangga.

6.5.2. Bidang Pemerintahan, Politik, dan Kesejahteraan Rakyat

1. Disadari bahwa perbaikan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilakukan oleh aparatur dan tenaga-tenaga yang bersih, jujur, dan berkualitas. Oleh karenanya, perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance dan clean government*) menjadi niscaya.
2. Menempatkan Aparatur Sipil Negara pada posisi yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan. Untuk itu para aparatur yang memiliki bakat dan kemampuan didorong untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
3. Melakukan dan mendukung secara maksimal upaya pemberantasan korupsi, meniadakan pungli dan gratifikasi. Pada saat yang sama penegakan disiplin dan budaya kerja menjadi program utama dalam bidang pemerintahan.
4. Sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemerintahan, pemerintah Sumatera Utara akan terus diupayakan memiliki martabat yang tinggi dan dihadirkan untuk tidak didikte oleh pihak lain, baik kekuatan politik maupun kekuatan yang memiliki pengaruh besar pada kegiatan ekonomi.
5. Meningkatkan pemahaman dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Sumatera Utara dengan menekannya pada setiap acara, promosi jabatan, dan kompetisi yang melibatkan rakyat.
6. Menjamin berlangsungnya pelayanan public (*public service*) di setiap instansi pemerintahan dan instansi yang terkait serta member sanksi tegas (langsung dari Gubernur) bagi setiap pelayanan yang mengecewakan rakyat.
7. Memberikan pendidikan politik kepada rakyat melalui pendidikan dan latihan serta mengawal pelaksanaan Pilkada agar dapat menjadi pendidikan politik yang efektif bagi rakyat.
8. Menjamin terlaksananya perumusan arah pembangunan bagi setiap Kabupaten/Kota serta merealisasikannya dalam seluruh kegiatan pembangunan.

9. Terus memperkuat dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa sehingga pelaksanaan pembangunan di desa dan pengelolaan dan desa dapat berjalan baik, efektif, dan efisien.
10. Menjamin terlaksananya koordinasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta menekan semaksimal mungkin ego sektoral.
11. Mengembangkan penggunaan dana desa, tidak saja untuk infrastruktur tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat.
12. Mewujudkan dan menerapkan secara konsisiten RT/RW daerah Sumatera Utara serta mengefektifkan penggunaan dan produktifitas asetnya.
13. Meningkatkan ketertiban rakyat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, selain melibatkan rakyat secara aktif dalam Musrenbang, juga mendorong masyarakat untuk mengikuti dan mengawasi jalannya pembangunan.
14. Memaksimalkan peran kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mendorong percepatan pembangunan. Untuk itu, akan dibangun Budaya Center dan Pusat kesenian serta penguatan kohesi sosial. Untuk itu, akan diakolasikan dana yang cukup untuk kemajuannya.
15. Menerapkan *land reform* untuk mewujudkan keadilan dalam kepemilikan tanah serta tersedianya lahan yang cukup bagi usaha dan pertanian rakyat.
16. Mendorong perwakilan daerah (DPD) agar dapat melakukan upaya-upaya maksimal untuk menyampaikan aspirasi rakyat Sumatera Utara ke pusat. Demikian juga, melakukan upaya-upaya maksimal agar dana-dana dan fasilitas pembangunan yang ada didalam dan luar Negara dialokasikan bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sumatra Utara.
17. Memaksimalkan usaha-usaha yang sistematis dalam mensejahterakan kehidupan petani dengan program “*one family one bectare*”lahan usaha. Disamping itu diupayakan pula pengadaan bibit dan kemudahan produsen Negara, petani,

nelayan, dan buruh serta mendorong efektivitas pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan pertanian.

18. Melakukan upaya-upaya maksimal dan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan meningkatkan pengawasan terhadap pukat harimau dan penyediaan dana bagi budi daya ikan rakyat serta kredit alat nelayan dan peningkatan produktifitas perikanan darat.
19. Peningkatan kualitas tenaga kerja antar Negara.
20. Mendorong penyelesaian masalah hak ulayat dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
21. Mengambil langkah-langkah kongkrit bagi penyelesaian sengketa lahan, agar masyarakat dapat fokus pada usaha meningkatkan taraf hidup mereka.

6.5.3. Bidang Hukum

1. Menjunjung tinggi supremasi hukum dalam pelaksanaan pembangunan Sumatera Utara disemua sektor, sebagai upaya mewujudkan Sumut Bermartabat.
2. Penegakan hukun yang lebih komprehensif dalam pengelolaan dan bagi-hasil sumber daya alam yang terbarukan antara Sumatera Utara dan Pusat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Mendorong ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam pengelolaan dana bantuan desa. Untuk itu akan dilakukan program 'KADARKUMDES' (Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan).
4. Penegasan hukum secara konsisten dalam pengolaan dana pembangunan. Untuk itu perencanaan pembangunan di setiap sektor dilakukan secara tranparan dan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pada saat yang sama bagian/tenaga hukum pada setiap instansi akan ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan dan orientasi hukum.
5. Menerapkan hukum secara konsisten dalam pencegahan narkoba, penyeludupan, *illega logging*, *illegal fishing*, dan perusakan bakau (*mangrove*) di Sumatera Utara.

6. Memperkuat advokasi rakyat dan proteksi terhadap rakyat dari pengaruh negatif pasar bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
7. Menerapkan sistem pengawasan secara konsisten terhadap penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas Negara oleh Aparat Sipil Negara (ASN).
8. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat mewujudkan regulasi yang lebih konsisten, sederhana, dan simple terhadap laporan setiap pelaksanaan pembangunan.
9. Melaksanakan pembenahan terhadap rumah tahanan yang lebih manusiawi dan mendidik.
10. Membangun tempat Rehabilitasi korban yang lebih layak, mendidik, dan menimbulkan efek jera.

6.5.4. Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

A. Bidang Agama

1. Mengupayakan agar pelaksanaan pembangunan dalam bidang agama lebih disemangati oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan amanah Pancasila sebagai dasar Negara.
2. Menjadikan pendidikan agama sebagai instrument penguatan karakter dan akhlak berbangsa. Untuk itu jam pendidikan agama ditambah dengan muatan lokal, dan muatan lokal tersebut adalah penegakan nilai-nilai agama ditambah dengan budaya daerah.
3. Mendorong pengamalan agama yang lebih baik dikalangan masyarakat dan aparatur pemerintahan. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan peran Kementerian Agama, ormas-ormas keagamaan, dan majelis-majelis agama, dalam pembinaan kehidupan umat beragama, pemberian bantuan kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan secara lebih memadai sesuai dengan ketentuan, peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, MTQ, dan peringatan hari-hari besar keagamaan.
4. Mendorong terciptanya kerukunan umat beragama dan pengamalan agama yang lebih dinamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan.

5. Melibatkan ahli agama dalam dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan Sumatera Utara sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kualitas dan fungsi lembaga-lembaga ekonomi agama dalam pemberdayaan rakyat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting bagi percepatan pembangunan Sumatera Utara secara keseluruhan.

B. Bidang Pendidikan

1. Menuntaskan Pendidikan Universal 12 tahun dan mengalokasikan dana pendidikan diatas 20%.
2. Mendorong peningkatan kualitas satuan pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing masyarakat Sumatera Utara dengan pemberian beasiswa:
 - S3 500 orang
 - S2 1000 orang
 - S1 2500 orang
4. Mendorong pendirian Perguruan Tinggi di 5 wilayah Sumatera Utara, dengan program studi sesuai kebutuhan daerah.
5. Mengupayakan kecukupan guru dan mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dengan peningkatan kualifikasinya melalui pendidikan lanjutan. Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian dana pendidikan bagi guru sehingga guru sekolah/madrasah tingkat menengah dapat menyelesaikan pendidikan strata 2.
6. Mendorong penguatan kebijakan pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang bersifat *link and match* dengan dunia usaha seperti melibatkan tenaga ahli dari perusahaan untuk mengajar disekolah, pembukaan magang pada perusahaan pertanian, maupun penggunaan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk praktik siswa kejuruan.
7. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan ketunaannya/disabilitasnya dan belum adanya Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan yang memiliki fakultas pendidikan khusus.

8. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa dan meningkatkan jumlah Pendidik di SLB yang mempunyai kompetensi atau latar belakang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
9. Mendorong penguatan nasionalisme dan patriotisme melalui pemahaman dan pengalaman pancasila disemua level pendidikan.
10. Menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan nasional pada satuan pendidikan.
11. Mengintegrasikan pendidikan karakter pada semua mata pelajaran sehingga anak didik mendapatkan konsep dan praktik dari semua bidang ilmu dan pada sisi lain semua guru yang membina mata pelajaran bertanggung jawab dalam meningkatkan pendidikan karakter di sekolah.
12. Menggunakan konsep “guru terbang” atau Guru Lintas Sekolah (GLS) untuk mengatasi tidak meratanya distribusi guru baik pada Satuan Pendidikan SMA maupun SMK antara daerah terpencil dan perkotaan.

C. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Meningkatkan Idealisme dan Nasionalisme pemuda sehingga mereka menjadi generasi muda yang memiliki akses yang kuat pada globalisasi dan pada saat yang sama memiliki jati diri bangsa yang kuat.
2. Memaksimalkan peran pemuda dalam pembangunan Sumatera Utara.
3. Mendorong organisasi-organisasi pemuda untuk melakukan reorientasi sehingga menjadi orientasi kader kepemimpinan dan basis pendidikan karakter bangsa.
4. Membangun kantor-kantor pemuda dan memaksimalkan kantor-kantor/sentra kepemudaan yang telah ada sebagai wadah perkaderan kepemimpinan dan pembangunan karakter bangsa.

5. Memaksimalkan peran organisasi-organisasi keagamaan pemuda dan remaja sebagai wadah penggemblengan generasi muda bangsa yang nasionalis dan relegius.
6. Mengembalikan martabat Sumatera Utara sebagai basis atlet nasional.
7. Menjalinkan kerjasama dengan negara ASEAN yang memiliki cabang olahraga unggulan yang sama dengan cabang olahraga unggulan di Sumatera.
8. Meningkatkan kapasitas Pemda melalui penguatan, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.
9. Bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara terkait dalam usaha penciptaan wirausaha muda pemula.
10. Mewujudkan stadion bertaraf Nasional setiap daerah di Kabupaten/Kota dan mewujudkan 2 (dua) stadion bertaraf Internasional di Medan dan disekitarnya.
11. Dalam rangka pelaksanaan Tuan Rumah PON Sumut – Aceh XXI Tahun 2024 di Sumatera Utara, beberapa langkah-langkah pencapaian strategis yang akan dilakukan Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan kegiatan dalam lingkup olahraga pendidikan, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga, meningkatkan pembinaan terhadap cabang olahraga unggulan serta mengembangkan industri olahraga dalam mendukung kemajuan olahraga nasional.
12. Harapan Provinsi Sumatera Utara untuk bisa menduduki peringkat 5 (lima) besar perolehan medali pada PON Sumut – Aceh XXI Tahun 2024 dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan-tahapan yaitu :
 - Menyusun Roadmap pembinaan olahraga Sumatera Utara menuju PON Sumut – Aceh XXI Tahun 2024
 - Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga PON Sumut – Aceh XXI Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
 - Membentuk Sekretariat Bersama Tuan Rumah PON Sumut – Aceh XXI Tahun 2024

- Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana olahraga untuk persiapan Tuan Rumah PON Sumut – Aceh XXI Tahun 2024
13. Menghidupkan kembali turnamen Internasional Marah Halim Cup di Sumatera Utara.
 14. Memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi sehingga mereka menjadi atlet yang sejahtera dan bermartabat.

6.5.5. Bidang Sosial Budaya dan Perempuan

A. Bidang Sosial Budaya

1. Mewujudkan kerukunan sosial dengan pemantapan penghayatan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah akan menjadi penggerak utama aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, melalui organisasi dan lembaga sosial, dharmawanita, persif kartika candra, kirana dan kesatuan wanita institusi lainnya, karang taruna, dan lain-lain.
2. Memperkuat peran kearifan lokal (*local wisdom*) dalam menciptakan kohesi sosial. Untuk itu akan di revitalisasi sarana dan peran bina budaya disetiap daerah di Sumatera Utara.
3. Mendorong ditetapkannya peraturan daerah tentang identitas masing-masing daerah dengan berbasis budaya dan Pancasila.
4. Melibatkan lembaga-lembaga sosial dan Ormas keagamaan dalam pencegahan narkoba, prostitusi, judi, radikalisme, dan terorisme.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan disabilitas dan menerapkan ketentuan mengenai upaya memperkerjakan mereka.
6. Menjadi kerukunan dan moralitas sosial sebagai para meter peringkat keberhasilan daerah.
7. Sebagai salah satu instrument penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat maka pengembangan Seni Budaya Daerah terus digelar dalam berbagai acara kedaerahan dan kemasyarakatan.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan anak melalui penguatan peran keluarga yang meliputi pemberian layanan pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak diantaranya pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan serta peran di berbagai bidang pembangunan dan sebagainya, sehingga akan berimplikasi pada wujudnya keluarga yang berkualitas dalam rangka mendukung ketahanan nasional di Sumatera Utara.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran maka ditetapkan program prioritas pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sebagaimana terdapat pada Tabel 6.4 berikut ini :

6.6. SINKRONISASI INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang disusun berdasarkan Undang – Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 32 ayat (2) yakni Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang disinkronkan dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Administratif sekitarnya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 berdasarkan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Pasal 12 ayat (2) yakni RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukannya Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 dengan Program Prioritas Pembangunan (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang bertujuan, yakni:

1. Mewujudkan Perencanaan Program Prioritas Pembangunan yang berbasis Spasial/Kewilayahan;
2. Terciptanya kesamaan persepsi dalam menyusun Program Prioritas Pembangunan terkait Penyediaan Infrastruktur Dasar pada kawasan-kawasan yang diprioritaskan sesuai arahan Rencana Tata Ruang
3. Terciptanya Sinergitas Program Prioritas Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan antar Wilayah/Kawasan;
5. Mengawal Substansi Rencana Tata Ruang agar dapat terakomodir ke

dalam RPJMD.

Untuk mencapai tujuan diatas perlu adanya integrasi dan kesesuaian antara perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, berikut gambaran Sinkronisasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada Tabel 6.5. berikut ini :

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu 1) program prioritas untuk perencanaan strategis yaitu proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini, dan 2) program prioritas untuk perencanaan operasional yaitu perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci dan juga merupakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program Gubernur terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan Sumatera Utara dan secara sistematis dilakukan pada saat identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Pada Tabel 7.1 berikut ini akan ditampilkan kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2019-2023.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL JUMLAH BELANJA	15,558,340,229,760	16,016,930,000,000	16,594,100,000,000	17,472,810,000,000	18,326,044,000,000
Belanja Tidak Langsung	10,466,265,829,760	9,509,000,000,000	9,366,100,000,000	9,684,810,000,000	10,032,144,000,000
Belanja pegawai	3,647,433,927,485	3,684,000,000,000	3,821,100,000,000	3,946,210,000,000	4,065,000,000,000
Belanja hibah	2,968,196,113,522	3,000,000,000,000	3,120,000,000,000	3,213,600,000,000	3,342,144,000,000
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	3,818,395,036,753	2,800,000,000,000	2,400,000,000,000	2,500,000,000,000	2,600,000,000,000
Belanja tidak terduga	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
Belanja Langsung	5,092,074,400,000	6,507,930,000,000	7,228,000,000,000	7,788,000,000,000	8,293,900,000,000

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara 2019, data diolah

Berdasarkan kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Tabel 7.1 diatas maka ditetapkanlah pagu indikatif anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019-2023 sebagaimana terdapat pada Tabel 7.2 dan Tabel 7.3 berikut ini :

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2019-2023, yang secara rinci dijelaskan pada tabel-tabel Tabel 8.1 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dan Tabel 8.2 tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 pada dasarnya merupakan suatu perencanaan kebijakan yang erat kaitannya dengan proses penetapan kemana daerah Provinsi Sumatera Utara akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2019-2023); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Utara ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2019-2023. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, serta arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sumatera Utara, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun pertama (2019) hingga tahun terakhir (2023).

Program-program transisi disusun sebagai rancangan program indikatif satu tahun ke depan (2024) setelah periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara berakhir tahun 2023, bertujuan untuk menjembatani

kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi landasan bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara periode selanjutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik terutama dibidang pendidikan dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, serta berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintah yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel sehingga Sumatera Utara yang bermartabat dapat tercapai.

Program transisi sudah barang tertentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan

yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2019-2023 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah mulai tahun 2019-2023.
3. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas/Badan/Unit (Renja Perangkat Daerah).
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman Renstra-PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
5. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota.
6. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah,

hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.

7. Konsep deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten/Kota, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

ttd

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

EDY RAHMAYADI

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2 003

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
B.1.1	PELAYANAN DASAR								
1	PENDIDIKAN								
1.1	Angka Partisipasi Kasar	33.87	65.02	68.70	73.18	-	-	55.67	
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PAKET A	106.26	114.38	114.01	109.56	-	-		
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PAKET B	88.55	101.22	102.98	104.29	-	-		
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/PAKET C	80.58	86.76	86.79	93.81	96.79	97.14	96.91	
1.2	Angka Partisipasi Murni	60.02	64.36	67.74	67.92	68.54		74.00	<
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93.26	93.59	92.21	94.41	92.60		96.40	
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70.51	80.90	81.96	76.81	78.10		85.90	
1.3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	60.02	64.36	67.74	67.92	68.54	71.19	68.80	
1.4	Angka Putus Sekolah								
1.4.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	1.15	0.76	0.43	0.23	0.22	-		
1.4.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1.45	0.73	0.63	0.35	0.55	-		
1.4.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	1.00	1.92	1.95	1.61	1.36	1.53	1.32	
1.5	Angka Kelulusan								
1.5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.53	100.00	99.67	99.82	99.65	-	100.00	
1.5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.62	99.92	99.12	99.53	98.83	-	100.00	
1.5.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	87.20	99.72	98.19	98.03	96.99	98.27	97.01	<
1.6	Angka Melanjutkan (AM)								
1.6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	70.75	74.75	76.92	76.51	78.87	-		
1.6.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	115.28	99.10	99.99	109.19	110.04	109.82	110.40	<
1.7	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	97.46	97.84	98.92	98.55	98.96		99.11	
1.8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	67.72	82.50	89.41	81.50	93.59		93.92	
2	KESEHATAN								
2.1	Jumlah Kematian Bayi	1,624	1,078	874	1,069	1,066	869		
2.2	Jumlah Kematian Balita	1,588	1,454	1,184	1,219	1,146	950		
2.3	Jumlah Kematian Neonatal	1,016	862	758	863	940	722		
2.4	Jumlah Kematian Ibu	254	187	176	231	180	186	191	>
2.5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	10.13	8.55	10.03	10.10	10.77	12.70		
2.6	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0.29	0.25	0.26	0.32	0.28	0.24		
2.7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
2.8	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0.20	0.20	0.20	0.23	0.22	0.24		
2.9	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	43.01	41.17	30.85	66.97	78.38	66.00	79.00	<
2.10	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	84.90	86.00	76.20	85.90	90.00	85.00	85.00	>
2.11	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	73.80	74.70	75.40	72.80	74.50	81.70	80.00	<
2.12	Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	94.16	95.69	93.50	93.10	88.90	82.70	90.00	=
2.13	Non Polio AFF Rate Per 100.000 Penduduk	2.04	2.26	2.18	2.11	2.20	1.80	≥ 2	=
2.14	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	15.36	16.84	14.50	5.72	11.71	14.85	40.00	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	79.60	80.20	79.70	77.80	61.50	62.10	87.00	
2.16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	1.27	1.81	1.41	1.63	1.55	1.76		
2.17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	18.50	21.20	24.10	59.20	38.90	40.20	38.90	
2.18	CFR Diare pada sat KLB		1.58	1.86	2.17	-	-	-	
2.19	Angka Kejadian Malaria	1,33/1000 Penduduk	1/1000 Penduduk	0,51/1000 Penduduk	0,27/1000 Penduduk	0,18/1000 Penduduk	0,09/1000 Penduduk	<1/1000 Penduduk	>
2.20	Cakupan Kunjungan Bayi	87.11	90.70	81.50	83.86	88.60	92.20	80.00	
2.21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	83.35	84.10	75.50	89.00	89.00	86.30	86.00	>
2.22	Cakupan Pelayanan Nifas	96.54	80.28	82.15	84.00	87.70	81.70	83.00	>
2.23	Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap	29.78	86.90	73.60	83.80	89.00	85.80	80.00	>
2.24	Cakupan Pelayanan Anak Balita	65.91	70.82	73.42	82.00	88.20	84.90	78.00	>
2.25	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat	63.83	76.46	73.44	83.70	88.20	73.49	65.00	>
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	PEKERJAAN UMUM								
3.1.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	69.60	74.42	76.11	80.83	84.31	81.17	88.00	(<)
3.1.3	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	0.40	0.36	0.36	0.36	0.45			
3.1.4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	69.86	73.34	69.76	NA	NA			
3.1.5	Terlaksananya pembangunan/ peningkatan jalan (km)	2,029.72	203.00	107.68	128.40	168.85		309.40	(>)
3.1.6	Terlaksananya pembangunan/ peningkatan jembatan (m)	13,280.10	613.00	211.00	375.00	513.60		505.80	(<)
3.1.7	Terlaksananya pemeliharaan berkala ruas jalan (km)	-	21.40	15.35	35.20	50.45		52.06	(<)
3.1.8	Terlaksananya pemeliharaan rutin ruas jalan (km)	3,048.50	2,145.70	2,346.90	1,989.86	1,920.72		2,106.40	(<)
3.1.9	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan (m)	0.00	9,504.28	12,121.50	11,924.75	10,380.00		9,325.30	(>)
3.1.10	Rasio jaringan irigasi kondisi baik (%)	60.00	61.40	64.90	75.16	79.03	81.82	78.52	(>)
3.1.11	Rasio jaringan rawa kondisi baik (%)	35.00	39.00	43.01	46.75	51.00	53.48	53.48	(<)
3.1.12	Berfungsinya jaringan Irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan Rawa seluas 64.339 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi	60.00%	60,00%	69,90%	74,93%	79.95			
3.1.13	Terbinanya dan terkoordinasinya perkuatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD, Komisi Irigasi, P3A/GP3A/IP3A) Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	0	8	8	26		5	
3.1.14	Optimalisasi Sumber Air Baku pada Daerah Kekurangan Air di Musim Hujan dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ	20	1 (rehab)	3 (rehab)	13 (rehab)	8 (rehab)		46	(<)
3.1.15	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luas genangan banjir	74.16%	77.33%	80.50%	85.98%			89.39%	
3.1.16	Perbaikan/Pemb. Perkuatan Tebing (m)	129,539	132,629	135,994	141,410	146,046		161,923	
3.1.17	Normalisasi/Pelurusan alur sungai/Perbaikan/Pembuatan Tanggul (m)	375,155	411,455	415,455	444,534	455,999		482,794	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.18	Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumut (%)	60/17,4	72/37,10	78/47,10	84/57,10			90/67,10	
3.1.19	Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya AIR Software (Sistem Aplikasi), Hardware, Pelatihan dan Updating Data	-	-	1 Paket Software (Sistem Aplikasi) /Hardware	Pelatihan Teknis Tenaga SDM operator database			Pelatihan Teknis Tenaga SDM operator database	
3.2	PENATAAN RUANG								
3.2.7	Regulasi Daerah terhadap Pengendalian Ruang (Regulasi)	NA	1	2	NA	NA			
3.2.8	Luas RTH Perkotaan (%)	10.00	11.06	12.12	NA	NA			
3.2.9	Kajian Materi Teknis Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi	NA	0	2	1	5		18	<
3.2.10	RTR Kawasan Strategis Provinsi (Perda)	NA	0	0	0	0			
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
4.1	Penanganan Kawasan Kumuh (ha)	1.792	1.626	1.576	1.481	1.263	951.69	1.092	>
4.2	Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni	2.900	600	1.045	349	382	518	275	<
4.3	Peningkatan akses air minum Perpipaan (%)	12.99	12.77	12.83	12.54	14.12	12.78		
4.4	Perencanaan Pembangunan TPA Regional (Dokumen)	-	-	-	-	1		-	
4.5	Dokumen Perencanaan Pembangunan IPAL di Kawasan Strategis Provinsi	-	-	-	-	1		1	
4.6	Jaringan drainase dengan kondisi baik (m)	186,190	186,190	256,182	326,174	396,166		NA	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	NA	NA	NA	NA	10,383	10.383	15,000	
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	105	85	151	105	73	73	20	>
5.3	Persentase Penegakan PERDA	10	15	20	25	33	33	33	<
5.4	Persentase LSM Aktif	40	46	8	13	23	23	21	>
6	SOSIAL								
6.1	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1.05	1.09	0.8	1.02	1.3	1.35		
6.2	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	20.50	20.50	15.20	18.20	25.30	20.25		
6.3	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	65.91	65.91	70.50	70.50	80.00	80.00		

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.4	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62		
6.5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	60.50	70.50	40.20	80.50	85.50	85.00		
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA								
1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	NA	164	220	195	222			
1.2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	27	69	82	148	53	53*		
1.3	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	10,867	171,692	199,251	269,777	4,441	4,441*	2,500	>
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.07	90.26	90.96	90.82	90.65	90.85	90.65	=
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.08	66.69	67.81	69.07	69.29	69.35	69.29	=
2.3	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG(perencanaan dan penganggaran Responsive gender)	25	30	35	40	45			
2.4	Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan termasuk TPPO	5	8	13	15	20		20	
2.5	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	15	13	10	7	5		5	
2.6	Rasio kekerasan terhadap Anak terhadap TPPO	20	18	15	13	10		10	
2.7	Kabupaten/kota layak Anak	NA	NA	NA	NA	1		1	
2.8	Persentase ketersediaan data Gender dan Anak di tingkat Provsu	NA	NA	NA	NA	8 %		8 %	
3	PANGAN								
3.1	Ketersediaan Bahan Pangan								
3.1.1	Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63gr per hari :								
	- Karbohidrat (k.kal)	3868.41	3887.00	3880.00	3900.70	3796.00	4362.00	3890.00	<
	- Protein (gr)	76.18	76.96	77.38	64.08	98.91	9.34	78.00	<
3.1.2	Ketersediaan cadangan pangan (ton)	66.00	200.00	200.00	200.00	267.00		260.00	<
3.1.3	Lambung pangan masyarakat (lambung pangan)	282.00	312.00	361.00	384.00	404.00		427.00	<
3.1.4	Kelompok Lambung Pangan (Gapoktan)	84.00	84.00	91.00	99.00	104.00		109.00	<
3.1.5	Distribusi Akses Pangan :								
	- Sistem distribusi harga	75.00	99.41	100.00	100.00	100.00		100.00	=
	- Akses pangan masyarakat (Kelompok)	43.00	70.00	89.00	143.00	110.00		141.00	<
3.2	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan								

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.1	Penganekaragaman konsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras perkapita 1,5% untuk memenuhi target skor pola pangan harapan (PPH)								
	- Konsumsi Beras (kg/kap/th/PPH)	130.61	128.53	126.32	124.80	122.95	121.40	121.11	<
	- PPH	83.60	84.80	85.20	85.70	88.50	89.10	87.00	<
3.2.2	Konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan energi ; karbohidrat minimal 2.220 kkal dan protein 57,0 gr perkapita perhari								
	- Karbohidrat (k.kal)	1,997.20	1,998.50	1,999.00	2,005.00	2,125.50		1,997.20	<
	- Protein (gr)	57.60	55.30	59.30	64.00	58.00		58.50	=
3.3	Sistem penanganan keamanan pangan segar (%)	65.00	70.00	75.00	95.56	85.00		90.00	<
3.4	Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota (kelompok sayuran/ buah)	6.00	5.00	7.00	23.00	25.00		30.00	<
3.5	Penanganan Kerawanan Pangan								
	- Berkurangnya penduduk miskin dan rawan pangan (%)	10.67	9.38	10.53	10.27	8.17		8.49	>
	- Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan (desa)	300.00	35.00	71.00	137.00	132.00		75.00	=
3.6	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan								
3.7	Efektivitas koordinasi kelembagaan dewan ketahanan pangan (%)	42.00	61.00	78.00	78.00	88.00		100.00	<
3.8	Nilai Tukar Petani (NTP) :	99.49	98.61	100.19	101.56	99.39	97.98	100.10	<
	- Peternakan	104.10	106.48	108.76	111.35	112.34	112.49	114.88	<
	- Pangan	98.67	99.51	96.97	98.11	93.11	93.72	100.59	<
	- Holtikultura	95.38	98.17	97.91	98.04	94.22	91.72	100.94	<
	- Perikanan	96.04	97.77	97.31	99.86	103.17	102.67	101.10	>
	- Perkebunan	99.92	97.98	94.76	96.74	98.53	95.87	100.10	<
3.9	Produksi komoditi hasil ternak per tahun								
	- Daging (ton/thn)	135,911.00	141,639.97	143,741.80	153,156.43	157,686.46		164,792.09	<
	- Telur (ton/thn)	133,464.26	159,945.50	161,681.54	170,613.36	172,822.64		162,959.87	<
	- Susu (ton/thn)	761.04	783.36	825.84	1,014.48	1,197.36		1,131.67	<
3.10	Pemanfaatan teknologi IB								
	- Jumlah akseptor IB (ekor)	56,758.00	55,906.00	57,813.00	61,165.00	136,363.00		125,900.00	=
	- Jumlah kelahiran IB (ekor)	37,388.00	31,774.00	49,901.00	37,635.00	26,915.00		68,000.00	=
3.11	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB								
	- PDRB ADHB (%)	1.82	1.83	1.84	1.84	1.83		1.79	>
4	PERTANAHAN								
4.1	Jumlah Lahan Bersertifikat	NA	NA	NA	NA	76,473	76		
4.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	NA	NA	NA	117	106	106		
5	LINGKUNGAN HIDUP								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	62.98	62.91	69.37	66.47	68.34	67.17	63.00	<
5.2	Indeks Kualitas Air (%)	60.67	56.67	76.00	75.43	80.00	77.50		
5.3	Indeks Kualitas Udara (%)	87.81	87.23	88.15	79.20	87.32	85.59		

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	46.08	45.89	50.32	50.21	45.32	45.60		
5.5	Penurunan Emisi GRK (TEqCO2)	31,116,610.00	31,883,670.00	53,987,270.00	48,306,780.00	50,790,000.00	50,790.00		
5.6	Jumlah Timbunan Sampah rumah Tangga dan Sejenisnya (Ton/Tahun)	6,278,693.50	6,278,682.55	6,278,730.00	6,278,693.50	6,278,693.50	10,137,92		
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
6.1	Cakupan Kepemilikan kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)	-	-	4,959,125	7,711,692	7,793,600.00	8,684,137.00	8.336.086 (78,76%)	
6.2	Cakupan Akte anak usia 0-18 Tahun	-	-	2.002.532 (45.14 %)	2.687.193 (60.58%)	2.994.357 (63,11%)	3,519,127.00	3.288.472 (68,02%)	
6.3	Cakupan Akte perkawinan	-	-	10.88%	13.79%	16.25%	23.06%	1.376.120 (21,47%)	
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah Melaksanakan Penerbitan KIA	-	-	-	2 Kab/Kota	1 Kab/Kota		3 Kab/Kota	
6.5	Jumlah OPD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan.	-	-	-	-	-		10 OPD dari 47 OPD Provsu baru melakukan PKS	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
7.1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	285	27	33	33	50	50		
7.2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	285	120	400	400	400	400		
7.3	Jumlah LPM Berprestasi	33	7	12	27	25	25		
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.22	1.22	1.36	1.36	1.36			
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.60	2.60	2.61	2.66	2.91	2.91		
8.3	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	NA	NA	NA	NA	1 MOU			
8.4	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	2.21	2.27	2.28	2.66	2.46	2.46		
8.5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah 15-49	NA	NA	NA	51.7	58.9	54.0		
8.6	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	NA	NA	30.20	30.20	36.00	19.16		
8.7	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	NA	NA	37.46	21.00	10.70	11.54		
8.8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	NA	NA	NA	27.60	40.18	33.07		
8.9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	NA	NA	NA	NA	56.88			
8.10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	NA	NA	NA	NA	48.49			
8.11	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	NA	NA	NA	NA	37.98			

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.12	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	NA	NA	NA	NA	6.8			
8.13	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	NA	NA	NA	NA	11.96			
8.14	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga	NA	NA	NA	NA	7			
8.15	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	NA	NA	NA	NA	31			
9	PERHUBUNGAN								
9.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	325,343,610	405,491,610	388,395,374	416,392,825	471,010,541			
9.2	Rasio Ijin Trayek	0.00012	0.00058	0.00015	0.00019	0.00028			
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	85	85	85	88	109			
9.4	Persentase Layanan Angkutan darat	0.85	0.98	1.42	1.44	1.65			
9.5	Pemasangan Rambu-rambu	1,670	1,100	1,120	1,421	700			
9.6	Rasi Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.574	0.548	0.523	0.448	0.430			
9.7	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum								
	a. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (orang)	325,343,610	405,491,610	388,395,374	416,392,825	471,010,541			
	b. Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	13,065,260	14,676,106	23,560,672	83,396,233	16,535,383			
9.8	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun								
	a. Jumlah orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun (org)	325,343,610	405,491,610	388,395,374	416,392,825	471,010,541			
	b. Jumlah barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun (ton)	13,065,260	14,676,106	23,560,672	83,396,233	16,535,383			
9.9	Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Lokasi)	0	0	0	0	0		3	<
9.10	Tersedianya alat-alat keselamatan pelayaran (buah)	1,680	0	0	0	0		3,100	<
9.11	Terpenuhinya operasional KMP Ferry Roro rute Tiga Ras- Simanindo dan Muara-Nainggolan (kali)	8	1	1	1	1		4.00	>
9.12	Terpenuhinya fasilitas Keselamatan Lalu Lintas berupa:								
	Rambu Lalu Lintas (buah)	1,670	1,100	1,120	1,421	700		5,772	>
	Guard rail (m)	4,275	-	-	2,006	2,392		14,852	<
	Delineator (buah)	2,075	3,000	2,900	3,395	3,500		13,614	>
	Paku jalan (buah)	2,085	-	9,000	8,974	-		145,700	<
	APILL (lokasi)	13	-	-	7	8		27	>
	Marka Jalan (m')	9,487	1,600	-	84,479	212,900		2,191,150	<
	LPJU (buah)	-	-	-	40	28		195	>
	ZOSS (lokasi)	4	-	-	3	-		1	>
	Rambu Perairan (buah)	-	50	25	75	-		460	<
	RPPJ (unit)	-	-	-	-	-		-	=
	VMS (unit)	1	-	2	-	200		201	>

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai ($<$) Sesuai (=) Melampaui ($>$)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tersedianya alat uji Emisi Gas Buang (unit)	-	2	2	-	-		6	$<$
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	26 KIM	27 KIM	52 KIM	62 KIM	157 KIM			
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
11.1	Persentase Koperasi Aktif	59.27	60.95	58.06	56.68	57.26	57.26		
11.2	Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	2,823,210	2,855,399	2,855,549	2,855,847	2,857,124	2,857,124	2,829,210	$<$
12	PENANAMAN MODAL								
12.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) (proyek)	90	86	96	145	187	309		
12.2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA) Proyek	165	201	204	301	330	380		
12.3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) (Rp. Juta)	5,068,881.40	5,231,905.85	4,287,417.30	4,954,829.29	11,683,639.20	8,371,820.30		
12.4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMA (Rp.Juta)	8,519,539.20	6,389,687.16	15,576,202.50	14,435,422.80	20,240,969.47	16,449,965.66		
12.5	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	10.50	10.80	11.50	11.30	11.50		11.70	$<$
12.6	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	70.66	3.22	-18.05	15.57	135.80			
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
13.1	Jumlah Organisasi Pemuda	62	72	72	72	72	72		
13.2	Jumlah Organisasi Olaraga	10	49	49	49	54	54		
13.3	Jumlah Kegiatan Kepemudan	61	13	10	14	24	13		
13.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	NA	17	10	19	19	16		
13.5	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	NA	4	4	4	5	5		
13.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	83	70	70	181	190	185		
14	STATISTIK								
15	PERSANDIAN								
16	KEBUDAYAAN								
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	10	16	15	15	20	20		
16.2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	3	3	4	4	8	8		
16.3	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	300	311	360	550	608	608		
17	PERPUSTAKAAN								
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	99,771	62,041	80,283	84,683	114,568	130	150,000	($<$)
17.2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	699,204	14.429	42,060	1,847	13,522	14,790	794,062	($<$)
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	-	2.10	0.55	0.58	0.61	0.61	1	($<$)
17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	8,314	5,170	6,690	7,057	9,547	9,547	10,000	($<$)
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	88,694	91,285	96,433	97,472	98,326	98,326	99,500	($<$)
17.6	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	NA	NA	3	7	11	0	15	($<$)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	KEARSIPAN								
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	NA	37.00	38.46	42.00	42.00	15	56.00	(<)
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	NA	485	110	117	248	248	300	
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
1	PARIWISATA								
1.1	Kunjungan Wisata	259,299	270,837	229,288	233,643	261,736		300,599	<
1.2	Lama Kunjungan Wisata	1.63	1.64	1.92	1.60	1.77	142.00		
1.3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.17	2,35	2.41	2.38	2,39	7,38	2.36	>
2	PERTANIAN								
2.1	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya								
	1. Padi (ton GKG)	3,727,249	3,631,039	4,044,829	4,609,791	5,136,186	5,292,586	4,087,420	>
	2. Jagung (ton pipilan kering)	1,183,011	1,335,970	1,159,795	1,519,407	1,557,463	1,741,418	1,831,820	<
	3. Kedele (ton)	3,229	3,645	5,705	6,549	5,062	7,676	7,158	>
2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar								
	1. Padi (ton/Ha)	5.02	5.06	5.17	5.21	5.20		5.13	>
	2. Jagung (ton/Ha)	5.59	5.78	6.23	6.16	6.18		5.99	>
	3. Kedele (ton/ha)	1.03	1.14	1.24	1.28	1.30		1.13	>
2.3	Hortikultura (Sayur, Buah, Tan. Obat, Tan. Hias) utama lokal lainnya meningkat :								
	1. Sayuran (ton/ha)	13.56	13.66	14.59	14.07	13.76		13.35	<
	2. Buah-buahan (ton/ha)	46.13	54.91	48.63	44.88	41.61		47.00	<
	3. Tanaman Obat (Biofarmaka) (ton)	23,123.69	22,382.73	13,716.09	11,616.63	13,424.67		11,990.00	<
	4. Tanaman Hias bunga potong (tangkai)	5,795,169.00	5,467,384.00	5,393,718.00	11,148,953.00	9,345,632.00		11,350,000.00	<
	5. Tanaman Hias satuan produksi pohon (pohon)	168,734	159,203	141,507	69,349	52,922		73,572	<
	6. Melati (kg)	957,547	72,943	398,737	231,007	41,911		245,075	<
2.4	Perbanyakan Benih Tanaman Pangan (%)	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80		2.00	<
2.5	Perbanyakan Benih Hortikultura (%)	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80		2.00	<
2.6	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB (%)	6.56	6.07	6.12	6.19	5.93		6.23	<
2.7	Cakupan bina kelompok petani (%)	3.00	6.00	7.00	8.00	9.00		10.00	
2.8	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)								
2.9	Produksi								
	1. K. Sawit (ton)	5,612,066.73	5,745,235.23	5,773,848.50	5,955,621.41	6,068,178.45		6,139,272.87	<
	2. Karet (ton)	321,099.05	332,673.82	331,673.00	331,761.25	311,098.69		334,958.65	<
	3. Kopi Arabika (ton)	48,646.44	49,176.51	52,902.10	53,962.36	58,055.09		57,645.09	<
	3. Kopi Robusta (ton)	8,562.54	8,887.52	9,830.34	7,352.90	8,484.72		11,019.50	<
	4. Kelapa (ton)	91,621.57	91,662.47	94,446.43	94,624.00	95,741.98		99,160.09	<

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	5. Kakao (ton)	41,101.64	41,265.77	40,765.22	44,391.25	46,330.97		43,004.85	<
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	36,649.11	35,843.39	38,128.56	38,881.77	37,241.42		41,442.27	<
2.10	Luas Areal								
	1. K. Sawit (Ha)	1,201,452.50	1,203,298.98	1,206,166.76	1,209,363.44	1,213,659.59		406,965.42	>
	2. Karet (Ha)	581,677.11	591,262.92	589,055.15	589,184.85	587,948.71		379,636.02	<
	3. Kopi Arabika (Ha)	61,063.35	61,231.44	62,731.00	66,533.53	69,340.92		59,473.41	<
	3. Kopi Robusta (Ha)	21,439.70	21,663.81	21,967.85	22,573.00	18,603.26		21,020.48	<
	4. Kelapa (Ha)	112,952.42	113,315.53	113,113.13	113,626.00	114,003.31		110,453.11	<
	5. Kakao (Ha)	79,198.14	65,375.36	64,875.36	65,182.00	65,081.01		65,382.96	<
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	60,096.42	60,224.86	61,488.03	61,818.17	62,330.02		59,244.02	<
3	KEHUTANAN								
3.1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	279,864.00	279,796.00	279,792.00	276,756.00	276,586.00	276,336.00	276,336.00	<
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	81,500.00	76,500.00	71,500.00	66,500.00	61,500.00	56,500.00	56,500.00	<
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0.93	0.90	0.81	0.89	0.84		0.84	=
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
4.1	Daya Listrik Terpasang	2,500.00	2,855.30	2,909.50	3,452.50	3,780.40		4,100.00	<
4.2	Rasio Elektrifikasi	88.52	89.91	91.08	93.29	96.72	99.99	96.00	>
4.3	Pertambangan tanpa ijin (PETI) (buah)	750.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00	=
4.4	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) ADHB	1.30	1.32	1.35	1.36	1.30	1.29	1.29	>
5	PERDAGANGAN								
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	4,489,497	4,314,596	3,764,348	3,842,737	4,581,889			
6	PERINDUSTRIAN								
6.1	Laju Pertumbuhan Industri PDRB ADHK	4.84	3.00	3.63	5.34	2.31			
6.2	Pertumbuhan Industri								
6.2.1	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	4.85	-1.08	11.72	0.21	-3.11			
6.2.2	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	3.38	5.41	10.49	10.75	0.66			
6.3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	5,402	5,439	12,020	14,050	17,030			
7	TRANSMIGRASI								
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
8.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	555,021.40	570,782.40	573,386.30	408,022.90	528,381.13	5,3,232,40	541,110.20	<
8.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	175,725.00	204,754.60	211,456.00	197,237.00	225,985.88	243,829.40	202,000.00	<
8.3	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	38.95	40.10	41.30	42.60	42.00	42.33	43.20	<
8.4	Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	56,185.92	55,930.00	58,726.00	61,663.00	63,135.20	60,476.97	65,029.20	<
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG								
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD								
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD								
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW								
2	KEUANGAN								
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2.2	Persentase SILPA	349.18	28.97	3601.11	217.59	72.09			
2.3	Persentase SILPA Terhadap APBD	0.56	0.17	6.34	11.02	6.19			
2.4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	21.04	23.05	23.54	24.36	24.65	22.60		
2.5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	14.24	14.84	15.75	17.83	18.05	4.43		
2.6	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	45.08	45.37	35.22	34.66	53.15	30.13		
2.7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	7.19	21.68	29.28	29.28	15.84			
2.8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu			
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	120	120	120	120	120	120	140	<
3.2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	20	21	24	25	30	30	39	<
3.3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	35	35	36	38	40	44	50	<
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	59	59	59	60	60	60	60	=
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	375	375	375	389	389	389	450	<
3.6	Jumlah Jabatan Pengawas Pada Instansi	858	927	923	977	1280			
3.7	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	1656	1656	1590	1564	1641	1641	2500	<
3.8	Jumlah Pelanggaran Disiplin Pegawai Pada Instansi Provinsi Sumatera Utara	8 orang	3 orang	15 orang	-	11 orang			
3.9	Jumlah Pegawai Pada Instansi Provinsi Sumatera Utara	12,019	11,730	11,691	11,214	29,715			
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	100	100	100	100	100	100		
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	5	11	10	25	10			
	Penerapan SIDA:								

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI						Target RPJMD Tahun 2013/2018	INTERPRETASI* Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	NA	13.16	13.16	13.16	42.11	42.1	100	
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	NA	NA	NA	NA	100			
5	PENGAWASAN								
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	45	50	55	60	65	65		
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	NA	NA	NA	NA	NA			
5.3	Jumlah Temuan BPK	600	550	450	400	50	50		
6	SEKRETARIAT DEWAN								
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	
6.2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	10 Program Pada APBD 2013	10 Program Pada APBD 2014	10 Program Pada APBD 2015	10 Program Pada APBD 2016	10 Program Pada APBD 2017	10 Program Pada APBD 2017	10 Program Pada APBD 2013 s.d 2018	
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
C.1	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH								
1	Nilai Tukar Petani	99.49	98.61	100.19	101.56	99.39	97.98	100.10	<
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkpita	42.50	44.62	42.95	86.99	86.99			>
C.2	FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR								
C.3	FOKUS IKLIM BERINVESTASI								
1	Jumlah Demonstrasi								Satpol PP
2	Angka Kriminalitas Yang Tertangani								Satpol PP
3	Lama Proses Perizinan Melalui Aplikasi SPIPISE	10	7	6	5	3		3	=
4	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	18	18	18	18	18		12	>

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Provinsi Sumatera Utara
VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

NO	MISI	TUJUAN/SASRAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SASARAN					KONDISI AKHIR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	77	80	83	85	90	90
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.18	71.35	71.67	72.22	72.77	73.32	73.32
		1.1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama								
		1.2.	Meningkatnya ketersediaan sandang pangan	Skor	89,1	90.4	92.3	94.3	96.3	98.1	98.1
		1.3.	Meningkatnya rumah yang layak	Persen	NA	92.72	93.22	93.72	94.22	94.72	94.72
		1.4	Meningkatnya kesehatan yang prima	Usia Harapan Hidup	68.61	68.74	68.87	69	69.13	70.00	70.00
				Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2.91	2.86	2.84	2.82	2.8	2.78
		1.5	Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan	Nilai Tukar Petani	Skor	97.98	100.1011168	100.1020835	100.1029377	100.1037045	100.2156751
				Persentase Kemiskinan	Persen	8.94	8.87	8.43	8.04	7.7	7.39
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.56	5.5	5.45	5.4	5.35	5.3
				Indeks Gini	Poin	0.318	0.325	0.32	0.315	0.31	0.3
		1.6	Meningkatnya keterjangkauan harga	Pertumbuhan PDRB	Persen	5.18	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
				Inflasi	Persen	1.23	2.95	2.9	2.85	2.8	2.75
		1.7	Meningkatnya konektifitas infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	81.17	82.99	84.52	86.29	88.59	90
				Rasio elektrifikasi	Persen	99.9	99.9	100	100	100	100
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	Terwujudnya masyarakat Sumatera	Indeks Demokrasi								
			Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2.1	Terciptanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	B	B	BB	BB	BB
				Skor Reformasi Birokrasi							
		2.2.	Meningkatnya politik yang beretika	Indeks Demokrasi							
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif,	Terwujudnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan								
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.61	9.79	9.97	10.15	10.33	10.50	10,50
		3.1	Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	Harapan lama sekolah							
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Poin	NA	0.9	0.93	0.96	0.99	1	1
			Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan								

NO	MISI	TUJUAN/SASRAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SASARAN					KONDISI AKHIR
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
		4.2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.85	90.87	90.93	91	91.08	91.17	91.17
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi nya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67.17	68	68.7	70.7	71.7	72.7	72.7
		5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								
		5.2	Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana	Poin	150	145	134.4	127	121	109	109
				Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	231,465	280,000	300,000	370,000	400,000	500,000	500,000
				Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB								

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SASARAN										KONDISI AKHIR		OPD PENANGGUNGJAWAB	
								2018	2019		2020		2021		2022		2023		RPJMD			
									Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak-kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1.1	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang religius	1.1.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Program Pembinaan Keagamaan	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama	%	100%	100%	5,654,981,828	100%	5,667,818,637	100%	5,878,661,490	100%	6,731,067,406	100%	7,691,590,725	100%	31,624,120,086	Biro Sosial
						Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	persentase konflik Ipolek Sosbud yang tertangani	Persen	11%	10%	3,843,092,465	10%	2,850,000,000	10%	2,850,000,000	10%	2,950,000,000	10%	2,950,000,000	50%	15,443,092,465	Kesbangpol
	1.2	Terwujudnya pangan yang cukup	1.2.1	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89.10	90.40	10,532,799,000	92.30	11,121,981,000	94.30	11,305,000,000	96.30	11,799,678,000	98.10	11,981,212,000	98.10	11,981,212,000.00	Dinas TPH, Dinas KPP, Dinas KP, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kesehatan
	1.3	Terwujudnya kesejahteraan petani	1.3.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	97.98	100.10	93,972,000,000	100.10	99,228,594,000	100.10	100,867,000,000	100.10	105,280,690,000	100.2	106,900,393,000	100.22	106,900,393,000	Dinas TPH/Dinas KP/Dinas KPP/Dinas Perkebunan
					Program Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian																	
	1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas hunian dan lingkungan kawasan permukiman	1.4.1	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Pengurangan luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	% luasan permukiman kumuh di kws permukiman	Ha	135	135	46,332,966,407	135	50,469,440,000	135	55,336,383,900	135	57,655,999,900	135	66,631,999,900	675	276,426,790,107	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
						Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kekurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	34%	50%	2,532,837,890	65%	3,032,837,890	75%	3,032,837,890	85%	3,372,837,890	100%	6,532,837,890	100%	18,504,189,450	Dinkes
	1.5	Terwujudnya kesehatan masyarakat yang prima	1.5.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	89.6%	100%	8,889,154,430	100%	7,389,154,430	100%	7,389,154,430	100%	7,729,154,430	100%	12,389,154,430	100%	43,785,772,150	Dinkes
						Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun	%	32.30	31.50	5,226,337,500	30.50	5,167,130,500	29.50	5,167,130,500	28.50	5,507,130,500	27.50	12,167,130,500	27.50	33,234,859,500	Dinkes
						Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	NA	100%	11,943,801,268	100%	12,443,801,268	100%	12,443,801,268	100%	12,783,801,268	100%	15,943,801,268	100%	65,559,006,340	Dinkes
1.6	Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha	1.6.1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	orang	1.500 orang	416 orang	6,618,000,000	464 orang	6,798,000,000	512 orang	7,014,000,000	592 orang	7,273,200,000	592 orang	7,584,240,000	2.576 orang	35,287,440,000	Dinas Tenaga Kerja	
						Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis masyarakat	orang	128 orang	256 orang		288 orang		320 orang		400 orang		400 orang		1.664 orang			
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan (dalam dan luar negeri)	orang	420 orang	300 orang	2,690,000,000	320 orang	360 orang	3,150,000,000	360 orang	380 orang	4,470,000,000	420 orang	5,250,000,000	450 orang	19,490,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
						Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor informal	orang	160 orang	60 orang		80 orang	100 orang		140 orang	160 orang							
						Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	400 orang	280 orang		280 orang	320 orang		320 orang	400 orang		400 orang					
						Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang menerima bantuan sertifikasi dan izin usaha	IKM	155		165	3,223,500,000		175	3,292,000,000		185		3,338,000,000			195

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SASARAN										KONDISI AKHIR		OPD PENANGGUNGJAWAB		
							2018	2019		2020		2021		2022		2023						
							Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang						Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Sambungan Rumah (SR)	-	100	Rp	200	Rp	300	Rp	400	Rp	500	Rp	500 (Kumulatif)			
				Rasio elektrifikasi	Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	99.99%	99.90%	1,887,795,850	100%	1,800,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	9,687,795,850	Dinas ESDM	
	1.8	Terjaminnya stabilitas permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau	1.8.1	Terkendalinya inflasi	Inflasi	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar di kab/kota yang dipantau lewat PIHPS	Pasar	60	61	2,374,950,000	62	2,419,000,000	63	2,453,000,000	64	2,961,000,000	65	3,275,000,000	65	13,482,950,000	DISPERINDAG
					Jumlah komoditas strategis yang dipantau lewat PIHPS	Komoditi	33	33	33	33		33		33								
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Penanganan sengketa konsumen melalui BPJS	Kasus	120	130.00	6,690,000,000	140.00	6,814,000,000	150.00	6,910,000,000	160	8341000000	170	9,227,000,000	170	37,982,000,000	DISPERINDAG	
					Jumlah komoditi yang diawasi	Jenis	47	49.00	51.00		53.00		55		57		57					
					Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Meningkatkan Produksi tanaman Pangan				19,529,033,104.40		20,929,033,104.00		23,929,033,104.00		33,329,033,104.00		39,229,033,104.00		39,229,033,104.00	TPH	
					Padi	Ton	5,136,186	5,375,167.60	5,498,796.45		5,625,268.77		5,754,649.95		5,887,006.90		5,887,007					
					Jagung	Ton	1,741,258	1,829,409.19	1,875,144.42		1,922,023.03		1,970,073.60		2,019,325.44		2,019,325					
					Kedelai	Ton	7,778	8,905.03	9,528.38		10,195.37		10,909.05		11,672.68		11,673					
					Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi tanaman hortikultura				14,820,751,522.00		17,320,751,522.00		21,320,751,522.00		32,320,751,522.00		37,320,751,522.00		37,320,751,522.00	TPH	
					Bawang Merah	Ton	16,103.20	16,918	17,341		17,775		18,219		18,675		18,675					
					Cabe	Ton	159,131.00	168,822	173,887		179,103		184,476		190,011		190,011					
					Sayur-sayuran	Ton	988,612.30	998,498	1,008,483		1,018,568		1,028,754		1,039,041		1,039,041					
					Buah - Buahhan	Ton	1,154,687.60	1,180,230	1,193,213		1,206,338		1,219,608		1,233,024		1,233,024					
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dan Pencegahan / Penanggulangan Penyakit Hewan	Produksi daging; produksi telur; produksi susu	Ton	169,775,74; 186,062,33; 1,587,56	93,972,000,000	175,551.96; 191,961,45; 1,661,68	99,228,594,000	181,328,18; 197,860,67; 1,735,80	100,867,000,000	187,104,40; 203,759,69; 1,809,92	105,280,690,000	192,880,62; 209,658,81; 1,884,05	106,900,393,000	192,880,62; 209,658,81; 1,884,05	106,900,393,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
	1.9	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	1.9.1	Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendali Penduduk	Persen	2%	5%	1,500,000,000	10%	1,530,000,000	15%	1,345,300,000	20%	1,412,565,000	25%	1,426,690,650	25%	7,214,555,650	DINAS PP & KB
							Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	2 Sektor	5 Sektor	1,297,955,988	10 sektor	1,323,915,108	15 sektor	1,257,154,259	20 sektor	1,320,011,972	25 sektor	1,333,212,091	25 sekytor	6,532,249,418	DINAS PP & KB
							Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	650,000,000	1 Kerjasama	663,000,000	2 kerjasama	669,630,000	2 Kerjasama	703,111,500	3 Kerjasama	710,142,615	3 Kerjasama	3,395,884,115	DINAS PP & KB
	1.10	Terwujudnya masyarakat yang memperoleh kehidupan yang	1.10.1	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	IPM Indeks Pembangunan Gender	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	%	70%	76%	1,093,523,600	79%	1,170,523,600	82%	1,170,523,600	86%	1,170,523,600	90%	1,470,773,600	90%	1,470,773,600	Dinas PPPA Provsu
	2.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik	2.1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kualitas Kapasitas Kelembagaan Meningkatkan	%	10	10	24,727,000,000	10	16,000,000,000	10	16,500,000,000	10	16,500,000,000	10	17,200,000,000	10	223,331,968,849	BPKAD
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kulitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	12	12	10,076,000,000	12	7,500,000,000	12	7,500,000,000	12	7,500,000,000	12	7,247,000,000	12	55,675,094,163	BPKAD

Tabel 6.5
SINKRONISASI INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
TUJUAN 1 : PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI					
A.	PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN PROVINSI				
1.	Percepatan Pengembangan Sistem Perkotaan Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Pusat Pelayanan	PKN, PKW, PKWp, PKL	1	PENDIDIKAN	
2.			1.1	Program Pembinaan Pendidikan Khusus	33 Kab/ Kota
			1.2	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas	33 Kab/ Kota
			1.3	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	33 Kab/ Kota
			1.4	Program Pembinaan dan Ketenagaan	Provinsi Sumatera Utara
			1.5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya	18 Kab/ Kota
			1.6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA	33 Kab/ Kota
			1.7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK	33 Kab/ Kota
			1.8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus	33 Kab/ Kota
			2	KESEHATAN	
			2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/Rumah Sakit Khusus/Laboratorium Kesehatan	
				- Pengembangan RS Daerah bertaraf Internasional	RSU Haji Medan
					RSUD Parapat (Simalungun)
				- Peningkatan RS Rujukan Regional	RSUD DR. Hadrianus Sinaga Pangururan (Samosir)
					RSUD Porsea (Toba Samosir)
					RSUD Kota Padangsidimpuan
					RSUD Gunung Sitoli Nias
					RSUD DR Jasamen Saragih (Siantar)
					RSUD Rantau Prapat (Labuhanbatu)
					RSUD Pirngadi Medan
			3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			3.1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	76 Daerah Irigasi Permukaan dan 14 D.I. Rawa Kewenangan Provinsi
			3.2	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
			3.3	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
			3.4	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
			3.5	Program pembangunan pengelolaan persampahan	- TPA Regional KSN MEBIDANG
					- TPA Regional Asahan Simalungun
					- TPA Regional Sergei-Tebingtinggi
					- TPA Regional Tanjungbalai Asahan
			4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			4.1	Pengembangan Perumahan	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
			4.2	Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
			4.3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023				
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI		
3.	Rehabilitasi dan Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana		1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
			1.1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara		
			1.2	Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara		
4.	Pengembangan/Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bagi Pengelolaan Perkotaan						
5.	Penyusunan Rencana RincI sebagai Operasional Pengelolaan		1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
			1.1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara		
B.	PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI PROVINSI						
1.	Transportasi Darat		1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Binjai - Langkat, Asahan - Tebing Tinggi, Labusel - Labura, Tebing Tinggi - Serdang Bedagai - Simalungun - Pematangsiantar - Tobasa - Taput - Tapteng - Sibolga , Dairi - Pakpak Bharat, Padanglawas, Madina, Labura - Tobasa, Deli Serdang - Sedang Bedagai - Simalungun - Karo, Karo - Dairi - Samosir - Humbahas - Taput - Tobasa - Simalungun, Deli Serdang - Serdang Bedagai - Batubara - Asahan - Tanjung Balai - Labura - Labuhanbatu, Deli Serdang - Karo, Gunung Sitoli - Nias Induk - Nias Selatan - Nias Barat - Nias Utara		
1.1	Jaringan Jalan Provinsi	Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Wilayah Provinsi				1.1	Pembangunan Jalan dan Jembatan
-	Pemantapan jaringan jalan kolektor primer K-2/K-3 dan jalan strategis					1.2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
-	Pengembangan jalan kolektor primer K-2/K-3 dan jalan strategis Provinsi yang menghubungkan antar kota			2		PERHUBUNGAN	
				2.1		Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
1.2	Perwujudan Sistem Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan						
-	Pengembangan/Peningkatan Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota	Sibolga - Gunungsitoli, Sibolga - Teluk Dalam, Teluk Dalam, Pulau Telo, Natal - Pulau Telo,	1	PERHUBUNGAN			
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kawasan Danau Toba dan Sibolga - Gunung Sitoli		
-	Perwujudan Simpul jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi dermaga sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan	Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV RTRW Provsu Tahun 2017 - 2037	1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	ASDP (Kawasan Danau Toba dan Sibolga - Gunung Sitoli) dan Pelabuhan Pengumpang Regional (Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Langkat, Madina, Serdang Bedagai, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara)		
1.3	Perwujudan Sistem Angkutan, Terminal Penumpang serta Terminal Barang						
-	Pemantapan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Lokasi Terminal Tipe A sesuai Lampiran V	1	PERHUBUNGAN			
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Medan, Pematangsiantar, Tapanuli Utara, Labuhanbatu, Madina dan Sibolga		
-	Pemantapan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Lokasi Terminal Tipe B sesuai Lampiran V	1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Karo, Langkat, Tanjungbalai		
-	Pembangunan Terminal Penumpang Baru	1. Terminal Belawan di Kota Medan 2. Terminal Tuntungan di Kota Medan	1	PERHUBUNGAN			
			1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Medan dan Padanglawas Utara		
-	Pemantapan dan Pengembangan terminal barang	Lokasi Terminal Angkutan Barang sesuai Lampiran VI	1	PERHUBUNGAN			
			1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Medan, Deli Serdang, Batubara, Simalungun		
-	Pemantapan dan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan	Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo	1	PERHUBUNGAN			
			1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Mebidangro		
-	Pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel	Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo	1	PERHUBUNGAN	Tebing tinggi - Batubara, Labuhanbatu - Labusel, Pematangsiantar - Simalungun		
			1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
-	Pemantapan dan Pengembangan angkutan pemadu moda melalui moda angkutan darat, kereta api, dan angkutan laut	• Bandara Kuala Namu	1	PERHUBUNGAN	Deli Serdang		
			1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
-	Pemantapan dan Pengembangan fasilitas alih moda (transfer point) untuk angkutan pemadu moda	• Bandara Kuala Namu	1	PERHUBUNGAN	Deli Serdang		
			1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
-	Pemantapan dan Pengembangan pelayanan angkutan penumpang	• lintas wilayah timur, • lintas wilayah barat dan • dataran tinggi	1	PERHUBUNGAN			
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan			
			1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
2.	Transportasi Laut						
2.1	Pengembangan/Peningkatan Pelayanan Pengumpan Regional	Lokasi pelabuhan pengumpan regional sesuai Lampiran VII	1	PERHUBUNGAN			
			1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
2.2	Pengembangan/Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Pengumpan	Lokasi pelabuhan pengumpan lokal sesuai	1	PERHUBUNGAN			

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
	Lokal	Lampiran VII	1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Batubara, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Tanjung Balai
2.3	Pengembangan/Peningkatan Angkutan Laut dengan Waterbus	Sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara	1	PERHUBUNGAN	
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
			1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
3.	Transportasi Udara				
3.1	Pengembangan/Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Skala Primer	Bandara Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang	1	PERHUBUNGAN	Deli Serdang, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Padanglawas Utara, Tapanuli Tengah, Gunung Sitoli
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
			1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
3.2	Pengembangan /Pemantapan Bandar Udara Skala Tersler	Bandara Binaka di Kota Gunung Sitoli	1	PERHUBUNGAN	
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
			1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
3.3	Pengembangan/Pementapan Bandar Udara Pengumpan	Bandara Dr. F L Tobing, Sibisa, Aek Godang, Silambo/ Teluk Dalam, Lasondre, Aek Nabara, Bukit Malintang, Pematang Raya	1	PERHUBUNGAN	
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
			1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
3.4	Peningkatan Status Bandara Pengumpan menjadi Pengumpul	Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara	1	PERHUBUNGAN	
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
			1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
3.5	Pengembangan/Peningkatan Baru Bandar Udara Baru	Kabupaten Dairi, Labuhanbatu Selatan, dan Padanglawas	1	PERHUBUNGAN	
			1.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	
			1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
C.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI PROVINSI				
1.	Pengembangan Sistem Penyediaan Minyak dan Gas Bumi		1	ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	
			1.1	Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal
2.	Pemantapan dan Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik				
2.1	Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik yang Telah Beroperasi	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	
			1.1	Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Asahan
2.2	Pemantapan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Baru	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	
			1.1	Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Asahan
			1.2	Pemanfaatan Energi	
2.3	Pemantapan dan Pengembangan Sumber Energi Baru yang Berbasiskan Potensi Panas Bumi, Tenaga Hidro Power, Biomassa dan Biogas	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara, Paluta, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Deli Serdang
			1.1	Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	
			1.2	Pengembangan Pelayanan Energi Baru dan Terbarukan	
2.4	Pemantapan dan Pengembangan sistem Pembangkit Mikrohidro, Tenaga Surya, Tenaga Angin dan Tenaga Diesel	Sistem jaringan terisolasi pada Pulau Berhala, pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta kawasan terpencil dan pedalaman.	1	ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	Samosir, Nias Selatan
			1.1	Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	
			1.2	Pengembangan Pelayanan Energi Baru dan Terbarukan	
3.	Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik				
3.1	Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jaringan Interkoneksi Se - Sumatera dan Sistem Energi Asean	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	
			1.1	Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Asahan
3.2	Pengembangan Sistem Jaringan Transmisi SUTET dan SUTUT	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	
			1.1	Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Asahan

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
D.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI				
1.	Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Terestrial				
1.1	Rehabilitasi dan pengembangan sistem jaringan terestrial kabel serat optik	Kawasan perkotaan PKN Mebidangro	1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.2	Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jaringan Teresterial Kabel dan Nirkabel	Jaringan pusat pelayanan wilayah pantai timur dan pantai barat			
1.3	Pemanfaatan Jaringan Teresterial Sistem Nirkabel dengan Penutupan Wilayah Blankspot	Wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil di Sumatera Utara			
2.	Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Satelit				
2.1	Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Satelit	PKN Mebidangro, PKW, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan Pulau Berhala, Pulau Simuk, Pulau Wunga	1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.2	Pembangunan dan Pengembangan Stasiun Bumi	Kabupaten Karo dan wilayah yang bersesuaian			
2.3	Penataan dan Pengelolaan Lokasi BTS	Seluruh Kabupaten/Kota			
E	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (SDA)				
1.	Pengembangan Konservasi SDA melalui Perlindungan dan Pelestarian Jaringan Sumber Daya Air				
1.1	Pengembangan Pola Pengelolaan Sungai/WS	Lampiran VIII Tabel Wilayah Sungai (WS) Provinsi Sumatera Utara	1 1.1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya	Madina, Tapsel, Padanglawas, Paluta, Labuhanbatu, Labura, Labusel, Simalungun
1.2	Pengembangan Pola Pengelolaan Cekungan Air Tanah	Lampiran IX Tabel Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Sumatera Utara	1 1.1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya	Langkat
1.3	Pengembangan Pola Pengelolaan Danau dan Sumber Air Lainnya	Badan air danau di Provinsi Sumatera Utara	1 1.1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya	

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
1.4	Pengembangan Sumber Daya Air pada Kawasan Rawa	Deli Serdang, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Asahan, Langkat, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya	
			1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
1.5	Pengembangan Pengelolaan Sumber Mata Air Permukaan dan Sumber Air Lainnya	Seluruh Kabupaten/kota Sumatera Utara	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya	
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air				
2.1	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Irigasi				
-	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bendungan	Bendungan Sigura-gura, Lau Simeme, dan Sei Wampu	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara, Paluta, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Deli Serdang
			1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
-	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bendung	Bendung Batang Batahan, Batang Gadis, Batang Angkola, Bah Bolon, Batang Anai,	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
-	Pengembangan daerah saluran irigasi pertanian	Arahan lokasi sesuai Lampiran XIII	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	
-	Pengembangan situ/waduk/embung	Arahan lokasi sesuai Lampiran XIV	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
2.2	Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Baku/SPAM				
-	Pemantapan SPAM yang telah ada baik jaringan dan non bukan jaringan	Kawasan permukiman wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Binjai - Deli Serdang - Medan, Tebing Tinggi - Serdang Bedagai, Simalungun - Batubara, Samosir, Padangsidempuan - Tapanuli Selatan, Tanjung Balai - Asahan
			1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
			1.2	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
-	Pemantapan dan pengembangan SPAM Regional dengan sistem jaringan perpipaan	• Mebidangro, • Siboga –Tapanuli Tengah • Tebing Tinggi – Serdang Bedagai, • Tanjung Balai –Asahan, • Pematangsiantar –Simalungun, • Padangsidimpuan –Tapanuli Selatan • Kepulauan Nias	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
			1.2	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
-	Pemantapan dan pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan	kawasan permukiman , perkotaan dan pedesaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri dan kawasan budidaya lainnya	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
			1.2	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
-	Pengembangan unit produksi air minum	PDAM di wilayah Provsu			
-	Pemantapan dan pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan	kawasan terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
-	Pengembangan kelembagaan badan layanan umum (BLU) SPAM	Wilayah Provinsi Sumatera Utara			
2.3	Pengembangan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air pada Alur Sungai, Danau, Waduk dan Pantal				
-	Pemantapan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam reten	a. Kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan permukiman perkotaan pedesaan	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
-	Normalisasi pertemuan sungai Batang Angkola – Sungai Batang Gad	b. SDA yang terletak pada kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya dan kawasan perlindungan setempat	1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	
-	Normalisasi Sungai Tanjung Kabupaten Batubara	c. Daerah rawan banjir dan pengamanan pantai			
-	Pemantapan sistem penanganan erosi dan longsor	d. Jaringan DAS Provinsi Sumatera Utara			

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
-	Pemantapan sistem pengamanan abrasi pantai	Pesisir Pantai Provsu	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	
2.4	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir				
-	Pemantapan dan pengembangan sistem jaringan drainase makro	Kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	
-	Pemantapan dan pengembangan sistem jaringan drainase mikro	Kawasan permukiman bagian dari kawasan perkotaan	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
-	Pemantapan penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi	Kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30%	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
-	Pembangunan prasarana pengendali banjir	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dam Pengamanan Pantai	Kota Medan, Deli Serdang, Asahan, Tanjungbalai, Sibolga
			1.2	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
F	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN				
1.	Pengelolaan Persampahan				
1.1	Revitalisasi TPA yang telah ada	Pusat Pertumbuhan dan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.2	Pengembangan / Peningkatan TPA Regional	- Mebidangro	1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dam Pengamanan Pantai	Deli Serdang, Simalungun, Batubara, Tanjung balai, Samosir, Tapanuli Selatan, Nias Selatan, Tapanuli Tengah
		- Sibolga - Tapanuli Tengah			
		- Tebing Tinggi - Serdang Bedagai			
		- Tanjung Balai - Asahan			
		- Pematangsiantar - Simalungun			
		- Padangsidempuan - Tapsel			
		- Kepulauan Nias			
2.	Pengelolaan Air Limbah				
1.1	sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat	Kawasan Perkotaan	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
1.2	Revitalisasi dan peningkatan kapasitas IPAL yang telah ada	Pusat pertumbuhan dan permukiman perkotaan dan pedesaan	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
1.3	Pengembangan Kelembagaan Pengelola Jaringan Prasarana Lingkungan		1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1.1	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
3.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh kabupaten/kota	1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
			1.1	Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	
			2	PERHUBUNGAN	
			2.1	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
TUJUAN 2 : PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI					
A.	PERWUJUDAN KAWASAN FUNGSI LINDUNG				
1.	Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Lindung				
1.1	Penyelesaian Tata Batas wilayah Administrasi Provinsi dan Kab./Kota se-Sumatera Utara	Seluruh segmen batas dengan Provinsi berbatasan dan antar Kab./kota di Provinsi	1	SEKRETARIAT DAERAH	
			1.1	Pengembangan Wilayah Perbatasan	
1.2	Perda tanah ulayat (penegasan hak keperdataan atas tanah di Sumatera Utara)	Kawasan hutan di Provsu			
1.3	Penyelesaian tata batas kawasan hutan		1	KEHUTANAN	
			1.1	Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labusel, Labura, Langkat, Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
2.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung				
2.1	Konservasi dan rehabilitasi seluruh kawasan lindung dan lahan kritis serta SDA	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	1	KEHUTANAN	
			1.1	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labusel, Labura, Langkat, Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun
			1.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
2.2	Penylapan dan pengelolaan kawasan evakuasi dan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana			
3.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Lindung				
3.1	Identifikasi kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	1	KEHUTANAN	
			1.1	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah
3.2	Kerjasama lintas sektor dan atau daerah dalam pemanfaatan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	1	KEHUTANAN	
			1.1	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah
3.3	Pengembangan peluang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	1	KEHUTANAN	
			1.1	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Karo, Langkat, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah
3.4	Pengembangan kawasan RTH	Seluruh wilayah Kab./Kota, Kec. Polonia, Kota Medan	1	PENATAAN RUANG	
			1.1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	
4.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung				
4.1	Pengendalian kegiatan budaya di sekitar kawasan fungsi lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	1	KEHUTANAN	
			1.1	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Karo, Langkat, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah
4.2	Pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	1	KEHUTANAN	
			1.1	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labusel, Labura, Langkat, Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun
4.3	Peningkatan penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	1	PENATAAN RUANG	
			1.1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			2	KEHUTANAN	
			2.1	Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labusel, Labura, Langkat, Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun
			3	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
			3.1	Peningkatan Penegakan Perda	
B.	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PROVINSI				
1.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya Hutan Produksi				
1.1	Tata Batas dan Penetapan Kawasan Hutan Produksi	Kawasan dengan peruntukan budidaya hutan produksi di Provinsi Sumatera Utara Tabel XXIV	1	KEHUTANAN	
			1.1	Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandiling Natal

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
1.2	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Tanaman Rakyat di Kab./kota	1	KEHUTANAN	
-	Rehabilitasi Fungsi Kawasan dan reboisasi lahan kritis Hutan Produksi		1.1	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandiling Natal
-	Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi		1.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandiling Natal
1.3	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi		1	KEHUTANAN	
-	Pengembangan Kawasan Hutan Produksi		1.1	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandiling Natal
-	Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi				
1.4	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi		1	KEHUTANAN	
1.5	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat		1.1	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya Pertanian				
2.1	Rehabilitasi/Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian				
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian				
-	Pengembangan Sentra Produksi Agropolitan Dataran Tinggi Kawasan Pertanian	Kec. Merek, Kab. Karo; Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara; Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan; Kec. Lumban Julu, Kab.	1	PERTANIAN	
			1.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Kec. Merek, Kab. Karo; Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara; Kec. Dolok Sanggul, Kab.
			1.2	Pemasaran, Pengolahan Hasil, Jaminan Mutu dan Sertifikasi	Humbang Hasundutan; Kec. Lumban Julu, Kab. Toba Samosir; Kec. Harian, Kab. Samosir;
			1	PERTANIAN	
-	Pemantapan Penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tabel XXI	1.1	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	32 kab/kota
		Tabel Kawasan Pertanian Sumatera Utara	1	PENATAAN RUANG	
2.3	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Tabel XXI	1.1		
		Tabel Kawasan Pertanian Sumatera Utara		Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			2	PERTANIAN	
3.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan				
3.1	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkebunan	Tabel XXII			Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labusel, Labura, Langkat,
-	Pengembangan Kawasan Perkebunan berdasarkan komoditas	Tabel Kawasan Perkebunan Sumatera Utara	1	PERTANIAN	Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Humbang
-	Pengelolaan Kawasan Perkebunan Berdasarkan Komoditas		1.1	Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun,

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023			
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	
3.2	Pemantapan dan Pengembangan Taman Teknologi Tanaman Pertanian Perkebunan (Agrotechno Park)	Kawasan Sekitar Bandara Kuala Namu, Kab. Deli Serdang	1	PERTANIAN		
			1.1	Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	Deli Serdang	
			2	BALITBANG		
			2.1	Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Medan	
			2.2	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Medan	
			2.3	Program Diseminasi Informasi Teknologi	Medan	
3.3	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perkebunan	Wilyah Kab. Provinsi Sumatera Utara	1	PENATAAN RUANG		
			1.1	Penyelenggaraan Penataan Ruang		
4.	Perwujudan Kawasan Budidaya Peternakan					
4.1	Pemantapan Fungsi Kawasan Peternakan	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	KETAHANAN PANGAN		
			1.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Diversifikasi Pangan	Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labusel, Labura, Langkat, Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Humbang	
			1.2	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dan Pencegahan / Penanggulangan Penyakit Hewan	Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun	
4.2	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan yang Terintegrasi dengan Kawasan Budidaya Pertanian dan Perkebunan dan Perikanan Budidaya					
-	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan hewan besar yang terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dan perikanan budidaya	Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Padanglawas, Mandailing Natal, dan Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Samosir.	1	KETAHANAN PANGAN		
			1.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Diversifikasi Pangan	Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Padanglawas, Mandailing Natal, dan Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Samosir.	
			1.2	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dan Pencegahan / Penanggulangan Penyakit Hewan		
-	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan hewan kecil yang terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dan perikanan budidaya	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	KETAHANAN PANGAN		
			1.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Diversifikasi Pangan	Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Padanglawas, Mandailing Natal, dan Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Samosir.	
			1.2	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dan Pencegahan / Penanggulangan Penyakit Hewan		
4.3	Pengendalian Pemantapan Kawasan Peternakan	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	1	PENATAAN RUANG		
			1.1	Penyelenggaraan Penataan Ruang		
5.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan dan Kelautan					
5.1	Rehabilitasi dan Pemantapan fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan					
-	Rehabilitasi Fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan	Kawasan Perikanan dan Kelautan di Kab./kota	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
			1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Deli Serdang, Simalungun, Batubara, Tanjung balai, Samosir, Tapanuli Selatan, Nias Selatan, Tapanuli Tengah	
	-		Pemantapan Fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				1.1	Pengembangan Perikanan Budidaya	Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Padanglawas, Mandailing Natal, dan Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Samosir.
		1.2	Pengembangan Perikanan Tangkap	Deli Serdang, Simalungun, Batubara, Tanjung balai, Samosir, Tapanuli Selatan, Nias Selatan, Tapanuli Tengah		
5.2	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Kelautan					
-	Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara,	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN		

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
		Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandailing Natal, dan Padang Lawas	1.1	Pengembangan Perikanan Budidaya	Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Padanglawas, Mandailing Natal, dan Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Samosir.
			1.2	Pengembangan Kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	
-	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap	Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Kota Sibolga, Kota Medan	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Kota Sibolga, Kota Medan
			1.1	Pengembangan Perikanan Tangkap	
-	Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	Tabel XXIII Pangkalan Pendaratan Ikan	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Kota Sibolga, Kota Medan
			1.1	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran	
-	Pengembangan Kawasan Agromarinropolitan	Kawasan Sepanjang pesisir Pantai Barat dan Timur Provinsi Sumatera Utara			
5.3	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Perikanan dan Kelautan				
6	Perwujudan Kawasan Budidaya Pertambangan				
6.1	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Pertambangan				Tapanuli Selatan
-	Rehabilitasi dan konservasi Fungsi Kawasan Pertambangan yang eksisting	Kawasan pertambangan di Kab./kota di Provinsi Sumatera Utara			
-	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertambangan		1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			1.1	Pemanfaatan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	
6.2	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan				
-	Identifikasi Potensi Pertambangan		1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			1.1	Pemanfaatan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	
-	Pengelolaan Kawasan Pertambangan		1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
			1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	
6.3	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertambangan		1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			1.1	Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	
7	Perwujudan Kawasan Budaya Perindustrian				
7.1	Pemantapan Fungsi Kawasan Perindustrian	Tabel XXIV Kawasan Industri di Provinsi Sumatera Utara			
7.2	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perindustrian		1	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
-	Pengembangan dan Pengelolaan kawasan Industri Mikro Kecil		1.1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Batubara, Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu, Medan, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah,
				- UMKM Center	Kawasan Danau Toba dan Sibolga
				- Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis Online/E-Smart	Medan, Deli Serdang, Binjai Dan Pematang Siantar
-	Pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri Menengah dan industri Besar				
-	Pengembangan dan Pengelolaan kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus				
7.3	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perindustrian				
8	Perwujudan Kawasan Budaya Pariwisata				
8.1	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Pariwisata	Tabel XXV Kawasan Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara			
-	Rehabilitasi Fungsi Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata		1	PARIWISATA	
-	Pemantapan Fungsi Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata		1.1	Pemasaran Pariwisata	
			1.2	Destinasi Pariwisata	Langkat, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat, Simalungun
8.2	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata				
-	Pengembangan Kawasan Pariwisata		1	PARIWISATA	
			1.1	Pemasaran Pariwisata	
-	Pengelolaan Kawasan Pariwisata		1.2	Destinasi Pariwisata	Langkat, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat, Simalungun
-	Penyusunan Perencanaan Induk Pariwisata Sumatera Utara		1	PARIWISATA	
-	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pariwisata		1.1	Destinasi Pariwisata	
9	Perwujudan Kawasan Budaya Permukiman Perkotaan dan Pedesaan				
9.1	Rehabilitasi/Pemantapan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan Pedesaan	Kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan di Provinsi Sumatera Utara	1	PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			1.1	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
				- Pembangunan Kawasan Sport Center sebagai bagian dari pengembangan KSN MEBIDANGRO	Kabupaten Deli Serdang
				- Pembangunan venue cabang olahraga	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Parapat Kabupaten Simalungun (Cabang Olahraga Air)
9.2	Pengembangan/Peningkatan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan Pedesaan				
TUJUAN 3 : PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI					
1	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara				

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
1.1	Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk pulau kecil terluar (Pulau Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia			
1.2	Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi	Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro)			
1.3	Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup	Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya			
2	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi				
2.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pemantapan Kawasan	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi: o Kawasan Tanjungbalai – Asahan o Kawasan Simalungun - Batubara o Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke			
2.2	Pengembangan Peningkatan Kualitas Kawasan	☐ Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, ☐ Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias; ☐ Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya; ☐ Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya			
3	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya				
3.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pemantapan Kawasan	☐ Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, ☐ Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara; ☐ Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya; ☐ Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah; ☐ Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit			

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA			RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023		
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI		BIDANG URUSAN / INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	LOKASI
4	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup				
4.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan	Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok; ☐ Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan ☐ Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis			

Tabel 7.2
Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara

NO.	URUSAN/SKPD	KERANGKA PENDANAAN					TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN WAJIB DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan						
	1 Dinas Pendidikan	1,359,635,000,000	1,697,630,000,000	1,917,630,000,000	2,000,000,000,000	2,012,170,000,000	8,987,065,000,000
2	Kesehatan						
	1 Dinas Kesehatan	266,438,000,000	581,200,000,000	685,100,000,000	890,839,000,000	988,814,000,000	3,412,391,000,000
	2 Rumah Sakit Jiwa Daerah	26,428,000,000	43,760,000,000	44,530,000,000	47,549,000,000	49,839,000,000	212,106,000,000
	3 Rumah Sakit Haji Medan	101,832,000,000	158,428,000,000	240,987,000,000	193,676,000,000	230,190,000,000	925,113,000,000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	1 Dinas Bina Marga dan Bina Kostruksi	817,652,000,000	940,000,000,000	1,000,000,000,000	1,106,000,000,000	1,299,000,000,000	5,162,652,000,000
	2 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata ruang	323,304,000,000	689,600,000,000	588,500,000,000	599,844,000,000	619,500,000,000	2,820,748,000,000
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	149,263,000,000	160,260,000,000	174,000,000,000	205,000,000,000	229,827,000,000	918,350,000,000
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
	1 Badan Kesbang Linmas	19,553,000,000	22,000,000,000	24,000,000,000	26,900,000,000	28,600,000,000	121,053,000,000
	2 Satuan Polisi Pamong Praja	29,999,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	21,500,000,000	22,149,000,000	116,648,000,000
	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33,997,000,000	38,218,000,000	44,000,000,000	46,000,000,000	50,000,000,000	212,215,000,000
6	Sosial						
	1 Dinas Sosial	45,943,000,000	55,000,000,000	56,500,000,000	64,000,000,000	73,000,000,000	294,443,000,000

NO.		URUSAN/SKPD	KERANGKA PENDANAAN					TOTAL
			2019	2020	2021	2022	2023	
1		2	3	4	5	6	7	8
2		URUSAN WAJIB DENGAN PELAYANAN DASAR						
1		Tenaga Kerja						
	1	Dinas Tenaga Kerja	15,679,000,000	34,000,000,000	34,400,000,000	37,400,000,000	46,247,000,000	167,726,000,000
2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,150,000,000	12,852,000,000	13,237,000,000	13,338,000,000	14,539,000,000	65,116,000,000
3		Ketahanan Pangan						
	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	116,035,000,000	132,526,000,000	144,550,000,000	150,000,000,000	162,000,000,000	705,111,000,000
4		Lingkungan Hidup						
	1	Dinas Lingkungan Hidup	56,516,000,000	58,135,000,000	60,187,000,000	65,000,000,000	68,000,000,000	307,838,000,000
5		Kependudukan dan Catatan Sipil						
	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14,739,000,000	14,118,000,000	15,298,000,000	14,785,000,000	15,000,000,000	73,940,000,000
6		Pemberdayaan Masyarakat & Desa						
	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24,134,000,000	24,500,000,000	25,000,000,000	26,000,000,000	26,200,000,000	125,834,000,000
7		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
	1	Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	9,693,000,000	11,000,000,000	11,098,000,000	11,300,000,000	11,998,000,000	55,089,000,000
8		Perhubungan						
	1	Dinas Perhubungan	26,991,000,000	29,000,000,000	32,000,000,000	34,000,000,000	35,000,000,000	156,991,000,000
9		Komunikasi dan Informatika						
	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	31,390,400,000	34,850,000,000	36,157,000,000	39,490,000,000	40,500,000,000	182,387,400,000

NO.		URUSAN/SKPD	KERANGKA PENDANAAN					TOTAL
			2019	2020	2021	2022	2023	
1		2	3	4	5	6	7	8
10		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
	1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41,441,600,000	44,870,000,000	47,084,000,000	52,000,000,000	56,000,000,000	241,395,600,000
11		Penanaman Modal						
	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	13,508,000,000	16,625,000,000	20,851,000,000	22,187,000,000	23,934,000,000	97,105,000,000
12		Pemuda dan Olah Raga						
	1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	156,000,000,000	190,000,000,000	410,000,000,000	486,400,000,000	485,000,000,000	1,727,400,000,000
13		Kebudayaan						
	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	84,794,900,000	91,305,000,000	93,300,000,000	95,594,000,000	98,757,000,000	463,750,900,000
14		Perpustakaan						
	1	Dinas Perpustakaan dan Arsip	21,475,000,000	26,050,000,000	28,464,000,000	28,500,000,000	28,956,000,000	133,445,000,000
2		URUSAN PILIHAN						
1		Pertanian						
	1	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	46,719,000,000	174,000,000,000	180,000,000,000	185,000,000,000	205,000,000,000	790,719,000,000
	2	Dinas Perkebunan	84,705,000,000	54,543,000,000	58,731,000,000	73,117,000,000	7,989,000,000	279,085,000,000
2		Kehutanan						
	1	Dinas Kehutanan	54,462,000,000	90,700,000,000	95,000,000,000	99,000,000,000	99,000,000,000	438,162,000,000
3		Energi dan Sumberdaya Mineral						
	1	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	63,643,000,000	58,462,000,000	61,000,000,000	64,600,000,000	68,000,000,000	315,705,000,000
5		Kelautan dan Perikanan						
	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	120,057,000,000	64,616,000,000	65,600,000,000	70,689,000,000	74,411,000,000	395,373,000,000

NO.	URUSAN/SKPD	KERANGKA PENDANAAN					TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Perdagangan						
	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28,261,800,000	28,790,000,000	29,201,000,000	35,250,000,000	39,000,000,000	160,502,800,000
3	URUSAN PENUNJANG						
	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91,189,000,000	28,000,000,000	28,500,000,000	30,000,000,000	32,500,000,000	210,189,000,000
	2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	201,995,000,000	70,000,000,000	72,000,000,000	73,000,000,000	75,000,000,000	491,995,000,000
	3 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	312,000,000,000	212,000,000,000	240,000,000,000	245,000,000,000	250,000,000,000	1,259,000,000,000
	4 Badan Kepegawaian Daerah	28,371,000,000	22,542,000,000	22,542,000,000	22,542,000,000	22,542,000,000	118,539,000,000
	5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13,802,000,000	34,500,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	35,800,000,000	154,102,000,000
	6 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	38,000,000,000	17,200,000,000	18,700,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000	109,900,000,000
	7 Inspektorat Daerah Provinsi	45,000,000,000	40,000,000,000	42,240,000,000	44,843,000,000	45,949,000,000	218,032,000,000
	8 Sekretariat DPRD	250,000,000,000	260,000,000,000	265,000,000,000	270,000,000,000	275,000,000,000	1,320,000,000,000
	9 Sekretariat Daerah						
	Biro Organisasi	9,500,000,000	6,970,000,000	6,919,000,000	8,514,000,000	9,264,000,000	41,167,000,000
	Biro Sosial dan Kesejahteraan	7,750,000,000	14,670,000,000	15,110,000,000	17,310,000,000	19,781,000,000	74,621,000,000
	Biro Humas dan Keprotokolan	12,669,800,000	22,250,000,000	22,450,000,000	24,470,000,000	27,900,000,000	109,739,800,000
	Biro Pemerintahan	21,923,000,000	12,220,000,000	14,250,000,000	13,435,000,000	14,768,000,000	76,596,000,000
	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	5,412,000,000	7,950,000,000	8,250,000,000	8,750,000,000	9,750,000,000	40,112,000,000
	Biro Administrasi Pembangunan	129,000,000,000	9,790,000,000	9,820,000,000	9,890,000,000	10,000,000,000	168,500,000,000
	Biro Hukum	8,900,000,000	6,350,000,000	7,764,000,000	7,758,000,000	7,958,000,000	38,730,000,000
	Biro Umum dan Perlengkapan	14,534,000,000	120,000,000,000	136,000,000,000	127,490,000,000	130,119,000,000	528,143,000,000
	Biro Bina Perekonomian	12,070,000,000	8,950,000,000	9,000,000,000	9,140,000,000	9,700,000,000	48,860,000,000
	10 Badan Penghubung Daerah Provinsi	15,000,000,000	16,000,000,000	16,550,000,000	17,500,000,000	18,000,000,000	83,050,000,000
		5,412,554,500,000	6,507,930,000,000	7,228,000,000,000	7,787,600,000,000	8,220,651,000,000	35,156,735,500,000

Tabel 7.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Pendidikan																	
Dinas Pendidikan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	18,354,300,607	100	18,354,300,607	100	18,354,300,607	100	18,354,300,607	100	18,354,300,607	100	18,354,300,607	Dinas Pendidikan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	5,454,288,210	100	5,454,288,210	100	5,454,288,210	100	5,454,288,210	100	5,454,288,210	100	5,454,288,210	Dinas Pendidikan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	509,350,000	100	509,350,000	100	509,350,000	100	509,350,000	100	509,350,000	100	509,350,000	Dinas Pendidikan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	Dinas Pendidikan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	Dinas Pendidikan
6	Program Pembinaan Pendidikan Khusus	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	15,626,085,549	98	16,664,524,784	98	16,664,524,784	99	16,664,524,784	99	16,664,524,784	99	16,664,524,784	Dinas Pendidikan
		APM SM SEDERAJAT	%	69	71		73		74		74		74		Dinas Pendidikan		
		Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99		99		99		99		99		Dinas Pendidikan		
7	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	477,904,251,105	98	481,019,568,808	98	481,019,568,808	99	481,019,568,808	99	481,019,568,808	99	481,019,568,808	Dinas Pendidikan
		APM SM SEDERAJAT	%	69	71		73		74		74		74		Dinas Pendidikan		
		Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99		99		99		99		99		Dinas Pendidikan		
8	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	347,053,701,106	98	349,130,579,575	98	350,502,579,575	99	350,930,579,575	99	350,930,579,575	99	350,930,579,575	Dinas Pendidikan
		APM SM SEDERAJAT	%	69	71		73		74		74		74		Dinas Pendidikan		
		Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99		99		99		99		99		Dinas Pendidikan		
9	Program Pembinaan dan Ketenagaan	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	%	95	96	101,346,113,345	97	135,115,477,940	97	143,743,477,940	98	160,999,477,940	99	178,255,477,940	99	178,255,477,940	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik minimal S1/D4	%	92	94		95		95		96		96		Dinas Pendidikan		
		Persentase Guru SMA / LB bersertifikasi	%	53	56		57		59		60		61		Dinas Pendidikan		
		Persentase Guru SMK Bersertifikasi	%	41	43		43		44		45		46		Dinas Pendidikan		
10	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya	Persentase Kehadiran Pegawai Tidak Kurang Dari 100%	%	100	100	269,443,229,977	100	269,443,229,977	100	269,443,229,977	100	269,443,229,977	100	269,443,229,977	100	269,443,229,977	Dinas Pendidikan
		Persentase daya serap keuangan	%	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan	%	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan		
		APK SM SEDERAJAT	%	97	97		98		98		99		99		Dinas Pendidikan		
		APM SM SEDERAJAT	%	69	71		73		73		74		74		Dinas Pendidikan		
		Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99		99		99		99		99		Dinas Pendidikan		
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	75,670,945,574	98	75,670,945,574	98	75,670,945,574	99	75,670,945,574	99	82,042,945,574	99	82,042,945,574	Dinas Pendidikan
		APM SM SEDERAJAT	%	69	71		73		74		74		74		Dinas Pendidikan		
		Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99		99		99		99		99		Dinas Pendidikan		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	43,727,283,174	98	43,727,283,174	98	43,727,283,174	99	43,727,283,174	99	50,599,283,174	99	50,599,283,174	Dinas Pendidikan
		APM SM SEDERAJAT	%	69	71		73		74		74		Dinas Pendidikan				
		Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99		99		99		99		Dinas Pendidikan				
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	4,285,451,351	98	4,285,451,351	98	4,285,451,351	99	4,285,451,351	99	6,101,451,351	99	6,101,451,351	Dinas Pendidikan
		APM SM SEDERAJAT	%	69	71		73		74		74		Dinas Pendidikan				
		Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99		99		99		99		Dinas Pendidikan				
Kesehatan																	
Dinas Kesehatan																	
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	95	96	24,728,012,227	97	25,207,090,158	98	25,207,090,158	99	25,327,090,158	100	25,707,090,158	100	25,707,090,158	Dinas Kesehatan
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	82	25,763,148,006	84	23,812,029,606	86	23,812,029,606	88	21,052,029,606	90	75,287,029,606	90	75,287,029,606	Dinas Kesehatan
16	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	95	96	1,497,270,000	97	1,497,270,000	98	1,497,270,000	99	1,647,270,000	100	1,997,270,000	100	1,997,270,000	Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	95	96	4,661,161,328	97	4,661,161,328	98	4,661,161,328	99	4,951,161,328	100	5,857,393,551	100	5,857,393,551	Dinas Kesehatan
18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	499,890,000	100	499,890,000	100	499,890,000	100	619,890,000	100	999,890,000	100	999,890,000	Dinas Kesehatan
19	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	%	85	90	11,429,051,702	92	11,429,051,702	94	11,429,051,702	95	11,769,051,702	96	20,929,051,702	96	20,929,051,702	Dinas Kesehatan
20	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90	100	8,889,154,430	100	7,389,154,430	100	7,389,154,430	100	7,729,154,430	100	12,389,154,430	100	12,389,154,430	Dinas Kesehatan
21	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	%	25	30	4,090,374,410	40	4,590,374,410	50	4,590,374,410	60	4,930,374,410	75	8,090,374,410	75	8,090,374,410	Dinas Kesehatan
22	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun)	%	33	32	5,226,337,500	31	5,167,130,500	30	5,167,130,500	29	5,507,130,500	28	12,167,130,500	28	12,167,130,500	Dinas Kesehatan
23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	34	50	2,532,837,890	65	3,032,837,890	75	3,032,837,890	85	3,372,837,890	100	6,532,837,890	100	6,532,837,890	Dinas Kesehatan
24	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	0	100	11,943,801,268	100	12,443,801,268	100	12,443,801,268	100	12,783,801,268	100	15,943,801,268	100	15,943,801,268	Dinas Kesehatan
25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit / Rumah Sakit Khusus / Laboratorium Kesehatan	Persentase Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	%	0	0	27,055,095,286	20	27,555,095,286	40	27,555,095,286	60	82,895,095,286	80	27,895,095,286	80	27,895,095,286	Dinas Kesehatan
26	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	%	0	30	18,710,257,302	37	9,552,718,302	45	9,552,718,302	52	9,892,718,302	60	13,052,718,302	60	13,052,718,302	Dinas Kesehatan
27	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	70	79	11,677,232,223	87	12,177,232,223	96	12,177,232,223	98	12,916,232,223	100	20,500,000,000	100	20,500,000,000	Dinas Kesehatan
28	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas	dokumen	13	13	6,884,170,297	12	7,384,170,297	12	11,284,170,297	12	7,884,170,297	12	8,384,170,297	12	8,384,170,297	Dinas Kesehatan
29	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan JKN	%	69	75	100,850,992,600	80	124,800,992,600	85	124,800,992,600	90	127,560,992,600	95	133,080,992,600	95	133,080,992,600	Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Jiwa Daerah																	
30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	97	4,279,965,000	98	4,700,000,000	99	5,000,000,000	100	5,200,000,000	100	5,500,000,000	0	5,500,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	1,099,671,000	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,400,000,000	100	1,400,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah
32	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	399,000,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah
33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	92	320,775,000	96	400,000,000	97	450,000,000	96	500,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah
34	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	92	20,000,000	95	20,000,000	97	30,000,000	96	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah
35	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, dan perbekalan kesehatan RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem	%	0	100	1,767,208,320	100	4,927,499,776	100	5,420,250,112	100	5,962,274,816	100	6,558,502,400	0	6,558,502,400	Rumah Sakit Jiwa Daerah
36	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat di RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem	%	0	96	12,554,125,312	97	13,942,024,192	98	15,336,226,816	99	16,869,850,112	100	18,556,833,792	0	18,556,833,792	Rumah Sakit Jiwa Daerah
37	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kesehatan jiwa	%	0	50	17,200,000	70	20,000,000	80	30,000,000	90	40,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah
38	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	%	0	100	5,368,250,000	100	17,300,476,032	100	7,500,000,000	100	12,774,000,000	100	20,609,000,000	100	20,609,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah
39	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana di RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem	%	0	100	569,426,000	100	1,000,000,000	100	1,170,000,000	100	1,500,000,000	100	1,600,000,000	100	1,600,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah
Rumah Sakit Haji Medan																	
40	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	8,717,376,210	100	115,000,000,000	100	15,000,000,000	100	15,000,000,000	100	16,000,000,000	0	16,000,000,000	Rumah Sakit Haji Medan
41	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	75	3,067,881,280	80	6,000,000,000	85	10,000,000,000	90	10,000,000,000	95	12,000,000,000	0	12,000,000,000	Rumah Sakit Haji Medan
42	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	404,950,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	0	1,000,000,000	Rumah Sakit Haji Medan
43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	70	951,672,000	75	1,200,000,000	80	1,500,000,000	85	1,500,000,000	90	1,500,000,000	0	1,500,000,000	Rumah Sakit Haji Medan
44	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	220,526,500	100	300,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	700,000,000	0	700,000,000	Rumah Sakit Haji Medan
45	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standart	%	0	70	21,363,491,420	75	72,728,000,000	80	141,987,000,000	85	94,676,000,000	90	125,490,000,000	0	125,490,000,000	Rumah Sakit Haji Medan
46	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	%	0	100	3,106,102,590	100	3,000,000,000	100	6,000,000,000	100	6,000,000,000	100	7,000,000,000	0	7,000,000,000	Rumah Sakit Haji Medan
47	Program Pelayanan BLUD RS	Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan BLUD	%	100	100	64,000,000,000	100	62,000,000,000	100	64,000,000,000	100	64,000,000,000	100	65,000,000,000	100	65,000,000,000	Rumah Sakit Haji Medan
48	Program Standart Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pelayanan rumah sakit yang memenuhi standart	%	100	100	0	100	510,000,000	100	510,000,000	100	310,000,000	100	757,500,000	100	757,500,000	Rumah Sakit Haji Medan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi																	
49	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	96	4,098,849,960	97	4,166,153,592	98	4,243,351,592	99	4,328,269,392	100	4,421,678,972	0	4,421,678,972	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
50	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	66	15,039,340,000	67	20,432,985,800	68	4,187,576,800	69	4,267,576,800	70	2,196,240,000	0	2,196,240,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
51	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	96	63,000,000	97	210,000,000	98	210,000,000	99	210,000,000	100	210,000,000	0	210,000,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
52	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	95	674,087,460	96	680,000,000	97	680,000,000	98	680,000,000	99	680,000,000	0	680,000,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
53	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	0	79	521,709,500,000	82	631,316,439,477	85	677,521,014,701	89	76,857,658,686	92	945,379,725,370	0	945,379,725,370	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	%	0	83	0	85	0	87	0	90	0	95	0	0	0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
54	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi yang Terpelihara	%	0	100	1,246,250,650,000	100	1,246,250,650,000	100	1,246,250,650,000	100	1,246,250,650,000	100	1,246,250,650,000	0	1,246,250,650,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase Panjang Jembatan yang Terpelihara	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
55	Program Pembinaan Jalan dan Jembatan	Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintah yang tepat waktu	%	100	100	78,599,683,171	100	79,246,033,803	100	83,028,335,493	100	87,368,752,268	100	91,737,189,882	100	91,737,189,882	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Berfungsinya Saluran Drainase di Jalan Provinsi	%		70	19,000,000,000	73	20,900,000,000	76	22,990,000,000	79	25,289,000,000	82	27,817,900,000		27,817,900,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
56	Program Peningkatan/Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Longsor yang Tertangani	%	0	100	64,500,000,000	100	70,950,000,000	100	78,045,000,000	100	85,849,500,000	100	94,434,450,000	0	94,434,450,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
57	Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	%	10	0	0	11	3,283,633,526	12	3,447,815,203	13	3,620,205,963	14	3,801,216,261	14	3,801,216,261	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang																	
58	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kualitiats dan Kapasitas Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
59	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kapasitas dan Efektivitas Layanan	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
60	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Efektivitas dan Produktifitas Layanan	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
61	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
62	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan menyerahkan laporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	784,894,035	100	1,042,954,035	100	1,110,269,950	100	1,110,269,950	100	1,110,269,950	100	1,110,269,950	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
63	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tingkat layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal	%	82	83	154,526,202,365	84	138,587,015,201	86	136,651,060,964	87	138,227,595,754	89	123,941,528,684	90	123,941,528,684	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Tingkat layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal	%	53	55	0	58	0	60	0	63	0	65	0	65	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
64	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	M2	325	M3	1,500,000,000	20,000	6,000,000,000	20,000	6,000,000,000	20,000	9,000,000,000	20,000	10,350,000,000	20,000	29,850,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
65	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Meningkatnya Kapasitas dan Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi (OPD Pengelola Irigasi P3A/GP3A/IP3A, Komisi Irigasi) dalam Pengembangan dan Pengeloaan Irigasi	kab/kota		4	2,339,637,429	4	2,456,619,300	4	2,579,450,262	3	2,708,422,778	3	2,843,843,917	3	2,843,843,917	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Terbentuknya TKPSDA WS kewenangan provinsi	unit	0	2	3,500,000,000	4	4,200,000,000	0	4,450,000,000	0	4,500,000,000	0	5,000,000,000	6	5,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
66	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas dan peran kelembagaan TKPSDA WS Kewenangan Provinsi Lainnya	laporan	0	2	0	4	0	6	0	6	0	6	0	24	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Kapasitas dan Peran kelembagaan Forum DAS, dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung	laporan	0	1		1		1		1		6		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang		
67	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Meningkatnya kemanfaatan infrastruktur pengendali daya rusak air (pengamanan areal pemukiman dan infrastruktur masvarakat)	%	0	25	88,077,467,920	40	96,885,214,712	60	101,729,475,447	70	106,815,949,219	80	112,156,746,680	80	112,156,746,680	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
68	Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya Air serta tercapainya peningkatan ketrampilan SDM	aplikasi	0	1	7,500,000,000	1	6,650,000,000	1	6,650,000,000	1	6,650,000,000	1	6,650,000,000	5	6,650,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
69	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah	dokumen	0	70	3,692,778,138	70	12,385,000,000	70	14,535,000,000	75	16,970,000,000	75	17,630,000,000	75	17,630,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang	Perda/Pergub	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	40	50		60		70		80		90		90		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
70	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kapasitas Penataan dan pengembangan sarana prasarana permukiman pada Kawasan Strategis Nasional/Provinsi	dokumen	0	2	6,687,971,425	4	13,900,000,000	7	14,500,000,000	9	18,500,000,000	10	20,000,000,000	10	20,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
71	Program pembangunan pengelolaan persampahan	Dokumen Perencanaan	dokumen	4	1	5,000,000,000	4	54,950,000,000	3	68,000,000,000	2	88,500,000,000	1	95,000,000,000	15	95,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Terbangunan TPA Regional	unit	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
72	Program Pembinaan dan Pengembangan Bangunan Gedung	Kapasitas Pembinaan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Negara	%	0	10	82,163,320,000	25	167,150,000,000	40	201,950,000,000	60	245,450,000,000	80	256,950,000,000	80	256,950,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
73	Program Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	meter	251	256	0	263	0	271	0	278	0	285	0	285	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
74	Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Layanan Air Minum Layak	%	77	89	60,396,350,000	90	90,000,000,000	90	112,000,000,000	90	135,000,000,000	91	140,000,000,000	91	140,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Cakupan Akses Minum Perpipaan	%	32	33	0	34	0	35	0	36	0	37	0	37	0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Sambungan Rumah(SR)	29	29		29		30		30		30		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang		
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	4,098,849,960	100	4,166,153,592	100	4,243,351,592	100	4,328,269,392	100	4,421,678,972	0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
76	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	15,039,340,000	100	20,432,985,800	100	4,187,576,800	100	4,267,576,800	100	2,196,240,000	0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
77	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	63,000,000	100	210,000,000	100	210,000,000	100	210,000,000	100	210,000,000	0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
78	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	674,087,460	100	680,000,000	100	680,000,000	100	680,000,000	100	680,000,000	0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
79	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	784,894,035	100	1,042,954,035	100	1,110,269,950	100	1,110,269,950	100	1,260,269,950	0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
80	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	unit	0	3	49,458,556,940	3	39,161,960,423	3	54,150,000,000	3	61,850,000,000	3	61,850,000,000	0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
81	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0	20	46,332,966,407	40	60,465,984,000	60	75,318,591,900	80	87,654,335,900	100	97,639,999,900	0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
82	Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	%	0	93	32,812,969,605	93	34,100,000,000	94	34,100,000,000	94	44,900,000,000	95	61,569,000,000	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
Badan Kesatuan Bangsa, Politik																	
83	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	bulan	60	12	3,343,000,740	12	3,100,000,000	12	3,350,000,000	12	3,350,000,000	12	3,350,000,000	60	3,350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
84	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	60	12	1,259,966,000	12	4,597,116,725	12	1,880,000,000	12	5,850,000,000	12	2,450,000,000	60	2,450,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
85	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	orang	73	71	99,980,000	71	600,000,000	71	600,000,000	71	600,000,000	71	600,000,000	71	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
86	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	bulan	60	12	394,999,700	12	350,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	60	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
87	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan	dokumen	25	5	431,630,647	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	25	450,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
88	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	%	63	64	3,213,186,669	64	4,050,000,000	64	5,050,000,000	64	4,700,000,000	64	4,850,000,000	65	4,850,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
89	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	0	60	1,874,967,205	61	1,800,000,000	62	3,850,000,000	63	3,030,000,000	64	3,180,000,000	64	3,180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
90	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perbaikan Peringkat Pelapor Rencana Aksi	%	13	9	3,843,092,465	9	2,850,000,000	8	3,850,000,000	8	3,950,000,000	7	3,950,000,000	7	3,950,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
91	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Ormas yang terdaftar dan melapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	buah	160	100	5,092,214,896	100	4,202,883,275	100	4,620,000,000	100	4,620,000,000	100	9,420,000,000	100	9,420,000,000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Satuan Polisi Pamong Praja																	
92	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	81	12,548,000,000	83	14,430,200,000	85	16,264,105,000	88	18,703,720,750	90	21,509,278,863	90	21,509,278,863	Satuan Polisi Pamong Praja
93	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	68	229,840,629,960	79	294,821,724,454	86	353,786,069,345	89	424,543,283,214	90	509,451,939,857	0	509,451,939,857	Satuan Polisi Pamong Praja
94	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	orang	0	95	1,750,000,000	96	2,100,000,000	97	2,520,000,000	98	3,024,000,000	99	3,628,800,000	0	3,628,800,000	Satuan Polisi Pamong Praja
95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Kali	0	95	19,650,000,000	96	22,597,500,000	97	25,987,125,000	98	29,885,193,750	99	46,218,052,188	0	46,218,052,188	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
96	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	Dokumen Laporan	0	32	3,100,000,000	32	3,720,000,000	32	4,464,000,000	32	5,356,800,000	32	6,428,160,000	0	6,428,160,000	Satuan Polisi Pamong Praja
97	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Persentase Terpeliharanya Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur	%	0	95	57,908,900,000	96	66,595,235,000	98	76,584,520,250	99	88,072,198,288	100	101,283,028,031	100	101,283,028,031	Satuan Polisi Pamong Praja
98	Program Peningkatan Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	%	0	45	7,240,000,000	60	8,688,000,000	75	10,425,600,000	80	12,510,720,000	85	15,012,864,000	85	15,012,864,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
99	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	12	12	4,223,629,310	12	4,858,500,000	12	4,905,000,000	12	4,905,000,000	12	5,181,000,000	12	5,181,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	paket	10	10	4,265,269,650	10	3,544,813,000	7	2,990,000,000	7	3,045,000,000	7	3,700,000,000	7	3,700,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
101	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	orang	70	74	81,000,000	78	270,000,000	80	300,000,000	82	340,000,000	84	340,000,000	86	340,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
102	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	orang	55	65	1,111,708,000	78	1,470,000,000	80	1,685,000,000	82	1,945,000,000	85	2,130,000,000	88	2,130,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
103	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	laporan	12	12	1,843,626,095	14	2,170,000,000	14	2,928,750,000	14	2,810,000,000	14	3,035,000,000	14	3,035,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
104	Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	kab/kota	33	33	7,447,119,680	33	8,479,687,000	33	10,642,250,000	33	10,170,000,000	33	12,495,000,000	33	12,495,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
105	Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya Upaya Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Sumatera Utara	kab/kota	33	33	9,372,245,700	17	10,250,000,000	17	11,450,000,000	17	12,200,000,000	17	12,808,000,000	17	12,808,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
106	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab/Kota	kab/kota	2	2	3,725,227,990	3	5,180,000,000	3	6,999,000,000	4	7,709,000,000	5	7,100,000,000	6	7,100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
107	Program Penguatan Kelembagaan Bencana	Meningkatnya Peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu	%	50	50	1,927,781,250	65	1,995,000,000	75	2,100,000,000	85	2,600,000,000	90	3,000,000,000	100	3,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial																	
Dinas Sosial																	
108	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	0	12	30,990,926,402	12	31,487,449,330	12	32,432,072,810	12	33,405,034,994	12	34,407,186,044	60	34,407,186,044	Dinas Sosial
109	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	0	12	5,915,668,960	12	6,829,631,339	12	7,034,520,279	12	7,245,555,888	12	7,462,922,564	60	7,462,922,564	Dinas Sosial
110	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	bulan	0	0	0	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	266,200,000	4	266,200,000	Dinas Sosial
111	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	bulan	0	12	147,295,000	12	66,375,000	12	68,366,250	12	70,417,238	12	72,529,755	60	72,529,755	Dinas Sosial
112	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh ketrampilan dan bantuan usaha dalam mencapai keluarga sejahtera	Kepala Keluarga (KK)	0	186	719,996,640	311	1,463,332,000	371	1,507,231,960	1.514	1,324,581,500	1.515	1,599,022,386	3.897	1,599,022,386	Dinas Sosial
113	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat melangsungkan dan mengembangkan hidupnya sesuai dengan fungsi sosialnya	Kegiatan/Orang	0	2.46	5,186,984,648	2.36	10,355,952,680	2.22	10,666,631,260	2.085	10,986,630,198	1.98	11,316,229,104	11.105	11,316,229,104	Dinas Sosial
114	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang didayagunakan sesuai dengan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial	Kegiatan/Orang	0	1.087	877,754,600	1.087	1,997,744,000	1.287	2,057,676,320	1.287	2,119,406,610	1.287	2,182,988,808	6.035	2,182,988,808	Dinas Sosial

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
115	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kader dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan masyarakat serta kelompok penyuluhan sosial di lokasi rawan bencana dan konflik	kab/kota	0	3	170,744,600	3	187,819,000	3	193,453,570	4	199,257,177	4	205,234,892	17	205,234,892	Dinas Sosial
116	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah korban bencana dan keluarga miskin yang mendapatkan pemuenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidupnya	Kegiatan/Orang	0	469	742,999,800	469	1,309,491,000	469	1,348,775,730	524	1,389,239,002	604	1,430,916,172	2.535	1,430,916,172	Dinas Sosial
117	Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kab/Kota yang terlibat didalam mekanisme kelembagaan, Sistem Kerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Kegiatan/Kota/ Bulan	0	33	1,191,168,950	33	1,302,205,651	33	1,341,271,821	33	1,381,509,975	33	1,422,955,274	165	1,422,955,274	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Tenaga Kerja																	
Dinas Tenaga Kerja																	
118	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	0	12	4,349,864,361	12	5,219,837,233	12	6,263,804,680	12	7,516,565,616	12	9,019,878,739	12	9,019,878,739	Dinas Tenaga Kerja
119	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	0	12	3,338,754,233	12	6,034,614,923	12	32,661,435,466	12	11,678,049,291	12	9,810,311,018	12	9,810,311,018	Dinas Tenaga Kerja
120	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	bulan	0	12	0	12	425,000,000	12	450,000,000	12	475,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja
121	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	bulan	0	12	390,998,844	12	995,199,519	12	1,045,199,519	12	848,239,423	12	888,239,423	12	888,239,423	Dinas Tenaga Kerja
122	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	bulan	0	12	911,059,335	12	1,532,000,000	12	1,988,133,469	12	2,392,159,345	12	2,826,591,214	12	2,826,591,214	Dinas Tenaga Kerja
123	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Kasus	228	285	2,483,643,710	340	12,042,691,823	360	18,547,781,400	380	22,676,877,582	400	27,022,130,642	1.765	27,022,130,642	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah kepesertaan Jamsostek penerima upah	orang	549.578	686.972		692.534		698.141		703.793		709.491		709.491		Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah kepesertaan Jamsostek bukan penerima upah	orang	78.395	97.994		114.35		133.435		155.707		181.696		181.696		Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3	Perusahaan	640	800		880		970		1.067		1.175		1.175		Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan yang diselesaikan	Kasus	100	200		400		500		550		600		600		Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang diselesaikan	Kasus	80	100		120		132		145		160		160		Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan	Peraturan	60	0		75		85		95		105		105		Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan	PKB	40	0		50		65		75		105		105		Dinas Tenaga Kerja
124	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	UPT	73	15	419,997,537	15	1,240,000,000	15	2,900,839,545	15	3,335,965,477	15	3,836,360,298	15	3,836,360,298	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah masyarakat transmigran yang dilayani	Kepala Keluarga (KK)	0	6		6		6		6		5.655		29.655		Dinas Tenaga Kerja
125	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	orang	1.5	320	2,014,996,360	664	3,423,487,360	712	6,846,393,705	792	8,165,672,446	792	9,748,806,935	3.576	9,748,806,935	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis masvarakat	orang	128	456		488		520		600		600		2.664		Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan	Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan (dalam dan luar negeri)	orang	350	300		520		560		580		620		1.45		Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor informal	orang	288	100		300		400		500		600		1.9		Dinas Tenaga Kerja

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
126	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	385	480	1,770,271,982	480	3,087,169,142	520	4,632,434,000	520	5,782,962,265	600	6,863,806,996	1.4	6,863,806,996	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah lowongan kerja yang terdaftar	orang	2.988			3.2		3.5		3.8		4.1		4.5		4.5	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	2.16			2.5		2.8		3.1		3.4		3.7		3.7	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
127	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	80	2,156,239,888	84	2,205,487,568	87	2,206,487,568	90	2,207,487,568	96	2,387,832,427	96	2,387,832,427	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
128	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	80	929,196,941	84	929,196,941	90	929,296,941	94	932,141,800	98	1,029,496,941	0	1,029,496,941	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
129	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	80	77,025,000	85	77,125,000	90	77,225,000	95	77,325,000	100	77,425,000	100	77,425,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
131	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	77	113,400,000	79	113,500,000	83	113,600,000	85	113,700,000	88	113,800,000	88	113,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
132	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
133	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kesetaraan Gender	%	0	76	1,093,523,600	79	1,468,023,600	82	1,570,523,600	86	1,571,523,600	90	1,870,523,600	90	1,870,523,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
134	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan	%	0	80	1,804,148,911	82	2,082,401,611	85	2,138,751,611	88	2,095,109,072	92	2,120,259,072	92	2,120,259,072	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
135	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah di semua sektor pembangunan daerah	%	0	76	1,215,889,850	79	1,398,692,170	86	1,415,639,850	90	1,416,639,850	90	1,515,889,850	90	1,515,889,850	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
136	Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	0	75	871,532,000	79	1,371,632,000	82	1,371,632,000	87	1,418,132,000	92	1,716,832,000	92	1,716,832,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
137	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	%	0	77	2,889,143,810	81	3,205,941,110	85	3,413,843,430	88	3,505,941,110	92	3,704,941,110	0	3,704,941,110	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pangan																		
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan																		
138	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	3,730,000,000	100	8,317,152,960	100	4,008,000,000	100	4,183,380,000	100	4,247,739,000	100	4,247,739,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
139	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	4,673,936,000	100	5,702,864,797	100	5,016,000,000	100	5,235,487,000	100	5,316,038,000	100	5,316,038,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
140	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	tahun	1	1	517,000,000	1	619,000,000	1	554,000,000	1	578,244,000	1	587,137,000	1	587,137,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
141	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	tahun	1	1	96,500,000	1	192,500,000	1	103,000,000	1	107,507,000	1	109,160,000	1	109,160,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
142	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	tahun	1	1	2,513,000,000	1	5,499,579,511	1	2,667,000,000	1	2,815,014,000	1	2,858,321,000	1	2,858,321,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
143	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dan Pencegahan / Penanggulangan Penyakit Hewan	Produksi daging	Ton	160.499	169.776	93,972,000,000	175.552	0	181.328	100,867,000,000	187.104	105,280,690,000	192.881	106,900,393,000	192.881	106,900,393,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Produksi telur	Ton	173.605	186.062		191.961		197.861		203.76		209.659		209.659		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Ton	1.403	1.588		1.662		1.736		1.81		1.884		1.884		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor peternakan	Ton	11.234		11.438		11.517		11.596		11.675		11.754		11.754
144	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Diversifikasi Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89	90	10,532,799,000	92	10,532,799,442	94	11,305,000,000	96	11,799,678,000	98	11,981,212,000	98	11,981,212,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Lingkungan Hidup																	
Dinas Lingkungan Hidup																	
145	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	9,917,219,619	100	9,848,151,262	100	9,758,151,262	100	10,599,634,874	100	10,924,923,920	100	10,924,923,920	Dinas Lingkungan Hidup
146	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	4,818,224,000	100	1,907,456,000	100	2,361,456,000	100	2,573,987,040	100	2,651,206,651	100	2,651,206,651	Dinas Lingkungan Hidup
147	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	499,925,000	100	499,925,000	100	499,925,000	100	544,918,250	100	561,265,798	100	561,265,798	Dinas Lingkungan Hidup
148	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	1,050,612,550	100	809,612,550	100	965,612,550	100	1,052,517,679	100	1,084,093,209	100	1,084,093,209	Dinas Lingkungan Hidup
149	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	1,852,430,100	100	1,572,480,350	100	2,020,480,350	100	2,237,483,626	100	2,402,403,508	100	2,402,403,508	Dinas Lingkungan Hidup
150	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan hidup	%		82	4,377,324,944	85	3,213,993,154	88	3,952,370,886	90	4,335,099,233	100	4,515,252,699	100	4,515,252,699	
151	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%		80	6,984,824,162	80	4,961,300,883	80	7,303,905,093	100	7,812,558,839	100	8,197,282,967	100	8,197,282,967	
152	Program Pengendalian Pencemaran	Penurunan Tingkat pencemaran air	%	71	71	12,278,209,124	72	17,450,796,431	73	11,817,299,040	74	13,651,217,505	75	14,881,261,030	75	14,881,261,030	Dinas Lingkungan Hidup
		Penurunan Tingkat Pencemaran udara	%	81	81	696,967,750	82	900,969,750	83	1,896,967,750	84	977,694,847	85	1,007,025,692	85	1,007,025,692	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	100	100	1,482,826,000	100	1,261,896,200	100	1,482,826,000	100	1,616,280,339	100	1,664,768,749	100	1,664,768,749	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
152	dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	80	80	1,385,893,350	85	1,005,893,450	90	1,655,893,450	95	1,795,923,859	100	1,846,801,575	100	1,846,801,575	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan	Ton	35	35	1,077,239,950	39	1,344,661,000	43	1,943,802,168	47	2,195,547,178	50	2,258,732,818	50	2,258,732,818	Dinas Lingkungan Hidup
153	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui implementasi 3R	%	20	20	11,578,303,451	22	13,357,863,970	24	14,528,310,451	26	15,607,136,731	27	16,004,981,384	27	16,004,981,384	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
154	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	5,407,990,834	100	3,311,060,754	100	5,962,309,894	100	6,260,425,389	100	6,573,446,659	0	6,573,446,659	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
155	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	82	1,000,000,000	84	5,000,000,000	86	1,102,500,000	88	1,157,625,000	90	1,215,506,250	0	1,215,506,250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
156	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	82	232,201,205	84	123,701,250	86	256,001,878	88	268,801,972	90	282,242,071	0	282,242,071	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
157	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	82	50,000,000	84	50,000,000	86	55,125,000	88	57,881,250	90	60,775,313	0	60,775,313	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
158	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	82	157,968,700	84	62,500,000	86	174,160,492	88	182,868,516	90	192,011,942	0	192,011,942	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
159	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	%	0	100	2,425,737,996	100	2,425,737,996	100	2,674,376,141	100	2,808,094,948	100	2,948,499,695	0	2,948,499,695	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
160	PROGRAM PEMBINAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan	%	0	89	1,390,900,000	91	650,000,000	93	1,533,467,250	95	1,610,140,613	98	1,690,647,643	0	1,690,647,643	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
161	PROGRAM PEMBINAAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil	%	0	47	795,201,220	51	550,000,000	55	876,709,345	59	920,544,812	63	966,572,053	0	966,572,053	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
162	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	0	100	1,675,000,000	100	1,020,000,000	100	1,846,687,500	100	1,939,021,875	100	2,035,972,969	0	2,035,972,969	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
163	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	%	0	25	1,415,000,000	35	575,000,000	45	1,560,037,500	55	1,638,039,375	67	1,719,941,344	0	1,719,941,344	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
164	PROGRAM SADAR KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kesadaran Stake Holder terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	0	100	450,000,000	100	350,000,000	100	496,125,000	100	520,931,250	100	546,977,813	0	546,977,813	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
165	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	87	100	3,133,180,355	100	2,968,000,000	100	3,068,000,000	100	3,168,000,000	100	3,338,000,000	100	3,338,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
166	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	97	100	2,955,673,150	100	1,234,000,000	100	1,234,000,000	100	1,234,000,000	100	1,264,000,000	100	1,264,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
167	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	233,000,000	100	303,000,000	100	303,000,000	100	233,000,000	100	303,000,000	100	303,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
168	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	86	100	453,950,575	100	60,000,000	100	60,000,000	100	290,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
169	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	49	100	271,131,600	100	275,000,000	100	275,000,000	100	275,000,000	100	275,000,000	100	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
170	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	0	100	1,806,186,785	100	5,031,399,750	100	2,582,354,120	100	2,357,877,470	100	2,305,860,470	100	2,305,860,470	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
171	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa, keterampilan berusaha masyarakat perdesaan dan akses masyarakat terhadap informasi serta menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	%	79	100	4,242,170,500	100	3,855,000,000	100	5,282,675,105	100	5,599,033,955	100	6,176,153,955	100	6,176,153,955	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
172	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kemampuan SDM aparatur Desa dalam Menajemen Pemerintah Desa	%	42	100	3,323,278,500	100	3,261,950,000	100	3,261,950,000	100	3,761,950,000	100	3,281,847,000	100	3,281,847,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
173	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkat partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka membangun desa	%	90	100		100	2,611,650,250	100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
174	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga ekonomi, sosial dan budaya baik formal maupun non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kehidupan masyarakat di daerah tertinggal	%	0	100	3,924,725,800	100	4,900,000,000	100	5,000,000,000	100	5,200,000,000	100	5,240,000,000	100	5,240,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
173	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	98	1,540,713,472	98	1,782,673,031	98	2,218,627,584	98	2,662,352,896	99	3,194,823,424	0	3,194,823,424	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
174	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	76	462,927,936	77	489,988,000	78	666,616,192	80	799,939,456	80	959,927,360	0	959,927,360	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
175	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	82	205,266,000	85	39,368,800	89	295,583,040	90	354,699,648	95	425,639,584	0	425,639,584	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
176	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	92	138,019,600	95	347,000,000	97	198,748,224	98	238,497,872	99	286,197,440	0	286,197,440	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
177	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	90	374,999,904	92	27,999,750	94	539,999,872	96	647,999,808	98	777,599,808	0	777,599,808	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
178	Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	RS	0	59	330,000,000	62	2,606,560,584	65	475,200,000	67	570,240,000	69	684,288,000	0	684,288,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			%	0	43	210,000,000	45	0	47	302,400,000	49	362,880,000	51	435,456,000	0	435,456,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	0	3	155,000,000	5	2,398,564,000	5	223,200,000	7	267,840,000	7	321,408,000	0	321,408,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	0	54	340,000,000	57	0	59	489,600,000	61	587,520,000	63	705,024,000	0	705,024,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
179	Program Keluarga Berencana	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	0	19	800,000,000	18	2,434,994,210	17	1,150,000,000	16	1,300,000,000	15	1,700,000,000	0	1,700,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	0	13	700,000,000	12	0	11	1,100,000,000	10		9	1,500,000,000	0	1,500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0	32	800,000,000	34	2,485,000,000	36	1,200,000,000	38	1,400,000,000	40	1,800,000,000	0	1,800,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	0	48	900,000,000	50	0	50	1,150,000,000	53	1,500,000,000	55	1,700,000,000	0	1,700,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
180	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendali Penduduk	%	0	5	1,350,000,000	10	3,051,416,150	15	1,944,000,000	20	2,332,800,000	25	2,799,360,000	0	2,799,360,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan	sektor	0	5	2,050,000,000	10	3,122,342,000	15	2,952,000,000	20	3,542,400,000	20	4,250,880,000	0	4,250,880,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerjasama	0	1	700,000,000	1	0	2	1,008,000,000	2	1,209,600,000	3	1,451,520,000	0	1,451,520,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
181	PROGRAM KEBLIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0	1	450,000,000	1	219,999,775	2	648,000,000	2	777,600,000	2	933,120,000	0	933,120,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan																	
Dinas Perhubungan																	
182	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	95	7,283,316,957	96	7,883,209,262	97	7,883,207,952	98	7,883,207,952	100	7,883,208,005	0	7,883,208,005	Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
183	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	95	1,619,580,250	96	1,488,865,750	97	1,471,315,750	98	1,245,915,750	100	1,245,915,750	0	1,245,915,750	Dinas Perhubungan
184	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	95	428,750,000	96	663,300,000	97	663,300,000	98	663,300,000	100	663,300,000	0	663,300,000	Dinas Perhubungan
185	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	95	512,129,058	96	520,129,058	97	520,129,058	98	520,129,058	99	520,514,765	0	520514765	Dinas Perhubungan
186	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	95	460,234,780	96	809,621,780	97	559,621,780	98	559,621,780	100	559,621,780	0	559,621,780	Dinas Perhubungan
187	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	%	0	40	1,986,700,399	50	2,135,071,349	60	2,135,071,349	70	2,135,071,349	80	2,135,071,349	0	2,135,071,349	Dinas Perhubungan
188	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana perhubungan	%	0	0	0	0	0	50	0	60	0	70	0	0	0	Dinas Perhubungan
189	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	%	0	90	1,551,719,870	92	882,637,850	94	882,637,850	96	882,637,850	98	882,637,850	0	882,637,850	Dinas Perhubungan
190	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	%	0	0	0	0	4,314,320,000	50	7,581,871,310	60	10,607,271,310	70	4,484,320,000	0	4,484,320,000	Dinas Perhubungan
191	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas		%	0	30	11,370,241,866	40	7,715,043,031	50	7,715,043,031	60	7,715,043,031	80	14,837,608,581	0	14,837,608,581	Dinas Perhubungan
192	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor dan kualitas lingkungan hidup	%	0	40	1,778,447,740	50	2,587,801,920	60	2,587,801,920	70	2,587,801,920	80	2,587,801,920	0	2,587,801,920	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika																	
Dinas Komunikasi dan Informatika																	
193	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	95	3,590,605,814	96	3,662,605,814	97	3,813,914,245	97	3,905,601,719	100	3,753,343,020	0	3,753,343,020	Dinas Komunikasi dan Informatika
194	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	90	3,604,119,776	92	2,730,948,800	93	3,532,570,955	95	3,919,945,196	100	4,000,764,280	0	4,000,764,280	Dinas Komunikasi dan Informatika
195	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	90	404,230,000	93	404,230,000	95	428,800,000	95	451,088,000	100	461,088,000	0	461,088,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
196	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	85	295,706,000	90	300,247,500	90	447,038,344	95	556,000,000	100	481,971,344	0	481,971,344	Dinas Komunikasi dan Informatika
197	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	80	612,242,095	92	581,501,095	95	623,976,600	95	685,836,514	100	750,612,600	0	750,612,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
198	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya data Statistik Sektoral	%	0	0	0	90	897,523,098	93	897,523,098	95	1,097,523,098	100	1,336,759,283	0	1,336,759,283	Dinas Komunikasi dan Informatika
199	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	0	0		80	12,207,992,450	90	12,258,016,265	92	12,570,852,270	100	12,648,998,270	0	12,648,998,270	Dinas Komunikasi dan Informatika
200	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan persandian dan keamanan informasi	%	0	0		85	1,351,116,490	87	1,496,116,490	90	1,521,000,000	100	1,536,000,000	0	1,536,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
201	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	0	0		85	10,714,834,753	87	10,659,044,003	90	11,783,153,203	100	12,030,463,203	0	12,030,463,203	Dinas Komunikasi dan Informatika
202	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga	Terwujudnya pelayanan informasi kemitraan	%	0	96	5,845,148,603	97		98		99		100		0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
203	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terwujudnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas	%	0	98	12,484,269,700	98		98		99		100		0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
204	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya kepastian legal yg menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to tell)	%	0	90	4,554,167,500	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	
205	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	4,692,871,168	100	4,927,514,624	100	5,173,890,048	100	5,432,584,704	100	5,704,214,016	0	5,704,214,016	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
206	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	80	1,049,905,280	80	1,102,400,512	80	1,157,520,512	80	1,215,396,608	80	1,276,166,400	0	1,276,166,400	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
207	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	99	525,194,880	99	551,454,656	99	579,027,392	99	607,978,752	99	638,377,664	0	638,377,664	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
208	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	99	254,172,000	99	266,880,608	99	280,224,640	99	294,235,872	99	310,619,520	0	310,619,520	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
209	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	2,207,959,552	100	2,318,357,504	100	2,434,275,328	100	2,555,988,992	100	2,683,788,544	0	2,683,788,544	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
210	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM	Meningkatnya Produk Koperasi Yang Berdaya Saing	unit	0	35	7,682,699,776	35	10,925,790,208	40	12,044,976,128	40	4,839,979,008	48	5,978,867,200	0	5,978,867,200	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
211		Meningkatnya Produk KUKM Yang Berdaya Saing	unit	0	90		95		98		105		108		0		
212	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KUKM	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM	orang	0	3.804	9,987,989,504	4.184	13,949,599,744	4.644	18,987,749,376	4.876	23,785,650,176	4.973	26,998,990,848	0	26,998,990,848	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
213	PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	unit	0	6.245	13,805,134,848	6.35	16,959,494,144	6.415	21,571,354,624	6.51	30,857,101,312	6.595	34,260,283,392	0	34,260,283,392	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif	unit	0	2,858,000		2,859,000		2,860,000		2,861,000		2,862,000		0		
214	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI	Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif	%	0	58	5,299,999,744	59	5,352,999,936	60	5,406,530,048	61	5,560,595,456	62	6,952,001,024	0	6,952,001,024	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal																	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu																	
215	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	24	12	3,480,000,000	12	3,515,175,000	12	4,330,000,000	12	4,655,000,000	12	4,945,000,000	60	4,945,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
216	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	tahun	2	1	4,000,000,000	1	1,890,000,000	1	4,900,000,000	1	5,085,000,000	1	5,265,000,000	5	5,265,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
217	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	tahun	2	1	335,000,000	1	440,000,000	1	760,000,000	1	840,000,000	1	920,000,000	5	920,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
218	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	tahun	2	1	1,485,000,000	1	400,000,000	1	1,415,000,000	1	2,200,000,000	1	1,805,000,000	5	1,805,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
219	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	tahun	2	1	1,370,000,000	1	810,000,000	1	2,640,000,000	1	2,965,000,000	1	2,980,000,000	5	2,980,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
220	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Misi Investasi yang diikuti baik di tingkat nasional maupun internasional	tahun	2	1	7,805,000,000	1	4,868,825,000	1	13,550,000,000	1	14,775,000,000	1	15,655,000,000	5	15,655,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
221	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Jumlah Kab/Kota yang memiliki data potensi dan peluang investasi	tahun	2	1	1,125,000,000	1	800,000,000	1	1,865,000,000	1	2,321,000,000	1	17,700,000,000	5	17,700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
222	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Capaian Target Lama Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan sesuai target Renstra	%	70	75	7,165,000,000	78	3,026,000,000	80	9,880,000,000	85	10,800,000,000	90	12,655,000,000	92	12,655,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
223	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor di Sumatera Utara guna mendukung terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja	tahun	2	1	3,250,000,000	1	875,000,000	1	4,090,000,000	1	5,490,000,000	1	5,120,000,000	5	5,120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olah Raga																	
Dinas Pemuda dan Olah Raga																	
224	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	18,880,956,530	100	21,269,052,183	100	23,395,957,401	100	25,735,553,141	100	25,735,553,141	0	25,735,553,141	Dinas Pemuda dan Olah Raga
225	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio Luas Kantor/Jumlah Aparatur	%	0	100	10,939,574,170	100	10,515,394,987	100	11,566,934,486	100	12,723,627,934	100	12,723,627,935	0	12,723,627,935	Dinas Pemuda dan Olah Raga
226	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai	%	0	100	344,300,000	100	378,730,000	100	416,603,000	100	458,263,300	100	458,263,300	1	458,263,300	Dinas Pemuda dan Olah Raga
227	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Dokumen/ Laporan yang Mampu Disusun Secara Mandiri Tepat Waktu	%	0	100	2,045,177,934	100	1,833,622,065	100	2,016,984,272	100	2,218,682,699	100	2,218,682,699	0	2,218,682,699	Dinas Pemuda dan Olah Raga
228	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan	%	0	100	2,578,084,620	100	2,277,996,403	100	2,505,796,043	100	2,756,375,648	100	2,756,375,648	0	2,756,375,648	Dinas Pemuda dan Olah Raga
229	Program Pengembangan dan Keresarian Kebijakan Kepemudaan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemuda Trampil	%	0	100	4,641,247,850	100	6,305,372,635	100	6,935,909,899	100	7,629,500,888	100	7,629,500,888	0	7,629,500,888	Dinas Pemuda dan Olah Raga
230	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Jumlah Atlet, Pelatih, dan Wasit dalam Mengikuti Event Olahraga	%	0	100	20,770,340,190	100	37,097,374,209	100	89,657,111,630	100	99,418,380,173	100	99,418,380,173	0	99,418,380,173	Dinas Pemuda dan Olah Raga
231	Program Pengelolaan Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang Disediakan	%	0	100	79,405,104,734	100	68,281,400,929	100	223,999,541,223	100	281,193,937,964	100	279,793,937,965	100	279,793,937,965	Dinas Pemuda dan Olah Raga
232	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Meningkatnya Jumlah Pemuda yang Mengikuti pelatihan keterampilan bidang usaha	%	0	100	10,045,372,100	100	19,000,909,310	100	23,901,000,041	100	26,291,100,045	100	26,291,100,045	0	26,291,100,045	Dinas Pemuda dan Olah Raga

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
233	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya Organisasi Keolahragaan Atlet dan Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Olahraga	%	0	100	4,489,463,880	100	6,109,121,700	100	7,120,033,870	100	7,832,037,257	100	7,832,037,257	0	7,832,037,257	Dinas Pemuda dan Olah Raga
234	Program Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Kebakatan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan, Pembinaan Sentra dan Kebakatan Olahraga	%	0	100	1,821,756,288	100	16,931,025,579	100	18,484,128,137	100	20,142,540,950	100	20,142,540,950	0	20,142,540,950	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kebudayaan																	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																	
235	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	9,943,686,010	100	10,749,000,000	100	10,544,700,000	100	10,454,700,000	100	10,454,700,000	100	10,454,700,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
236	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	82	12,393,251,705	82	10,362,000,000	85	5,000,000,000	90	5,000,000,000	95	5,000,000,000	95	5,000,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
237	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	99	199,955,000	99	361,000,000	99	374,955,000	99	374,955,000	99	374,955,000	99	374,955,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
238	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	98	99,910,000	98	370,000,000	98	370,000,000	98	370,000,000	98	370,000,000	98	370,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
239	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	98	471,722,120	98	465,000,000	98	471,722,120	98	471,722,120	98	471,722,120	98	471,722,120	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
240	Program Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0	8	5,865,989,250	9	11,240,000,000	9	8,340,000,000	9	9,090,000,000	10	9,340,000,000	10	9,340,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut	orang	0	280,000	0	300,000	0	370,000	0	400,000	0	500,000	0	500,000	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
241	Program Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Sumut	orang	0	280,000	25,450,849,988	300,000	19,133,000,000	370,000	26,920,000,000	400,000	28,970,000,000	500,000	29,120,000,000	500,000	29,120,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan Destinasi	kab/kota	0	2	0	2	0	3	0	3	0	2	0	12	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
242	Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah Kerjasama dengan Stakeholder Budaya dan Pariwisata	Kerjasama	0	1	3,448,106,702	1	2,510,000,000	1	3,245,000,000	1	3,295,000,000	1	3,295,000,000	5	3,295,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
243	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase SDM Industri Pariwisata yang kompeten	%	0	70	6,300,000,000	75	5,200,000,000	80	6,350,000,000	85	6,370,000,000	90	6,370,000,000	90	6,370,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
244	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyeleng garaan Festival Seni dan Budaya	Kali	0	21	9,963,187,130	22	14,340,000,000	23	12,213,622,880	24	12,037,622,880	25	12,800,622,880	25	12,800,622,880	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Sanggar seni dan Lembaga Budaya yang dibina	unit	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
245	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	0	9	10,658,279,690	10	16,575,000,000	11	9,160,000,000	12	9,160,000,000	13	9,160,000,000	13	9,160,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perpustakaan																	
Dinas Perpustakaan dan Arsip																	
246	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	3,245,737,450	100	3,834,503,000	100	3,998,171,938	100	3,649,000,000	100	3,649,000,000	0	3,649,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
247	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	2,879,341,982	100	3,224,863,630	100	3,547,349,322	100	3,902,084,254	100	4,097,188,467	0	4,097,188,467	Dinas Perpustakaan dan Arsip
248	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	187,760,000	100	157,505,000	100	229,680,000	100	208,800,000	100	208,800,000	0	208,800,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
249	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	496,927,270	100	637,763,000	100	612,214,397	100	672,957,746	100	706,605,633	0	706,605,633	Dinas Perpustakaan dan Arsip
250	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	92,941,300	100	204,094,500	100	114,503,682	100	114,000,000	100	119,405,900	0	119,405,900	Dinas Perpustakaan dan Arsip

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB									
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA											
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)									
251	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya Program Pengembangan Budaya Baca, Pembinaan Perpustakaan dan Peningkatan Layanan Bagi Pengunjung Perpustakaan	Perp, Eks, Kegiatan, Orang	0	34	12,904,238,640	40	15,244,000,000	45	14,906,802,200	50	15,397,000,000	55	16,075,000,000	0	16,075,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip									
252	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Terlaksananya Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	%	0	4	862,141,675	5	1,168,956,270	5	1,062,158,544	6	1,062,158,000	6	1,100,000,000	0	1,100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip									
253	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi yang sesuai Standard Pelayanan	orang	0	31	806,103,830	32	1,578,224,000	33	993,119,919	34	994,000,000	35	1,000,000,000	0	1,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																										
Kelautan dan Perikanan																										
Dinas Kelautan dan Perikanan																										
254	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%	0	100	7,237,916,805	100	6,681,367,318	100	7,272,009,353	100	7,360,899,796	100	7,645,899,796	0	7,645,899,796	Dinas Kelautan dan Perikanan									
255	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	1,024,924,767	100	955,300,190	100	1,009,466,055	100	971,931,245	100	999,653,299	0	999,653,299	Dinas Kelautan dan Perikanan									
256	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	0	100	266,866,584	100	286,084,943	100	284,995,006	100	293,174,787	0	293,174,787	Dinas Kelautan dan Perikanan									
257	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	225,398,278	100	206,046,529	100	222,084,030	100	222,616,194	100	228,965,798	0	228,965,798	Dinas Kelautan dan Perikanan									
258	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	4,418,883,307	100	4,039,496,550	100	4,353,908,211	100	4,364,341,170	100	4,533,297,543	0	4,533,297,543	Dinas Kelautan dan Perikanan									
259	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani	Hektar	0	50.65	4,308,212,062	35.75	3,938,327,073	50.55	4,286,480,588	45.5	4,338,876,995	50.75	4,418,448,774	0	4,418,448,774	Dinas Kelautan dan Perikanan									
		Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani	Hektar	0	3.8	0	2.5	29.03	0	105.605	119.05	0	0		Dinas Kelautan dan Perikanan											
		Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani	Hektar	0	1		1.5	1		1.5	1	0		Dinas Kelautan dan Perikanan												
260	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	Ton	0	237.222	13,454,899,318	244.339	12,179,132,713	251.669	12,870,968,159	259.219	12,913,287,007	266.996	13,281,608,166	0	13,281,608,166	Dinas Kelautan dan Perikanan									
261	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	0	544.233	23,731,358,014	560.56	21,374,855,613	577.376	22,923,934,319	594.698	24,254,659,532	612.539	25,687,450,842	0	25,687,450,842	Dinas Kelautan dan Perikanan									
262	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kapital/tahun	0	44	4,244,701,107	46	3,880,268,902	47	4,182,287,180	48	4,233,409,963	50	4,742,152,312	0	4,742,152,312	Dinas Kelautan dan Perikanan									
263	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Patroli pengawasan (kali)	Kali	0	0	4,996,706,341	0	4,567,710,125	0	4,923,234,956	0	4,886,649,484	0	5,075,792,344	0	5,075,792,344	Dinas Kelautan dan Perikanan									
		Patroli pengawasan (kali) 1. Laut	Kali	0	12	16	0	18	0	20	0	22	0	0		Dinas Kelautan dan Perikanan										
		Patroli pengawasan (kali) 2. Perairan Umum (danau Toba)	Kali	0	2										4	6	8	10	0		Dinas Kelautan dan Perikanan					
264	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan	Patroli pengawasan (kali)	Kali	0	0	0	0	966,907,912	0	1,031,949,258	0	1,024,280,652	0	1,053,495,850	0	1,053,495,850	Dinas Kelautan dan Perikanan									
		Patroli pengawasan (kali) 1. Laut	Kali	0	12		14	16	0	18	0	20	0	0		Dinas Kelautan dan Perikanan										
		Patroli pengawasan (kali) 2. Perairan Umum (danau Toba)	Kali	0	2		4	6	8	10	0	0	0	0		Dinas Kelautan dan Perikanan										
265	Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani	Hektar	0	50.65	0	35.75	870,217,120	50.55	945,102,044	45.5	929,673,365	50.75	967,422,294	0	967422294	Dinas Kelautan dan Perikanan									
		Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani	Hektar	0	3.8		2.5	29.03	105.605	0	119.05	0	0	0		Dinas Kelautan dan Perikanan										
		Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani	Hektar	0	1									1.5	1	1.5	1	0		Dinas Kelautan dan Perikanan						
266	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar	Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	Ton	0	237.222	244.339	3,867,631,646	251.669	418,910,095	259.219	4,048,894,570	266.996	4,582,526,656	0	4582526656	Dinas Kelautan dan Perikanan										
267	Program Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani	Hektar	0	50.65											35.75	821,871,725	50.55	873,580,808	45.5	854,985,018	50.75	901,230,242	0	901230242	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani	Hektar	0	3.8											2.5	29.03	0	105.605	0	119.05	0	0	0		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani	Hektar	0	1	1.5	1	1.5	1	0		Dinas Kelautan dan Perikanan															
Pertanian																										
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura																										

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
268	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	0	18,190,491,273	0	18,990,491,273	0	20,990,491,273	0	21,990,491,273	0	22,990,491,273	0	22,990,491,273	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
269	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	0	11,257,139,446	0	13,257,139,446	0	15,257,139,446	0	18,257,139,446	0	22,257,139,446	0	22,257,139,446	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
270	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	0	0	0	1,000,000,000	0	1,100,000,000	0	1,200,000,000	0	1,300,000,000	0	1,300,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
271	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	0	1,995,391,097	0	3,995,391,097	0	4,895,391,097	0	4,995,391,097	0	4,995,391,097	0	4,995,391,097	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
272	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	0	2,209,986,535	0	3,109,986,535	0	3,609,986,535	0	4,109,986,535	0	4,309,986,535	0	4,309,986,535	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi tanaman hortikultura	%	0	6	27,790,049,280	3	30,974,750,720	3	35,142,725,632	3	39,447,072,768	3	48,122,109,952	0	48,122,109,952	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Bawang Merah	Ton	0	16.918	0	17.341	0	17.775	18.219	0	18.675	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Cabe	Ton	0	168.822		173.887		179.103	184.476		190.011		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura			
		Kentang	Ton	0	102.794		105.877		109.054	112.325		115.695		0		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Meningkatkan Produksi tanaman Pangan	%	0	5	23,999,444,992	2	28,604,600,320	2	31,689,402,368	2	34,539,843,584	2	32,824,739,840	0	32,824,739,840	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Padi	Ton	0	5,375,168	0	5,498,796	0	5,625,269	5,754,650	0	5,887,007	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Jagung	Ton	0	1,829,409		1,875,144		1,922,023	1,970,074		2,019,325		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura			
		Kedelai	Ton	0	8.905		9.528		10.195	10.909		11.673		0		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pertanian	%	0	0	48,565,972,992	0	50,155,999,232	0	53,513,199,616	0	55,404,998,656	0	58,275,000,320	0	58,275,000,320	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi	%	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui	%	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
276	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman	Meningkatnya Luas serangan OPT yang dikendalikan	Hektar	0	29.013	990,000,000	27.17	3,128,000,000	25.089	4,172,400,128	22.606	5,384,119,808	20.914	6,899,356,160	0	6,899,356,160	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
277	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		%	0	0	2,300,000,000	0	2,895,000,064	0	3,301,750,016	0	3,768,009,984	0	4,302,709,760	0	4,302,709,760	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	%	0	0	22,786,875,392	0	34,778,251,264	0	35,737,022,464	0	37,383,221,248	0	38,490,247,168	0	38,490,247,168	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani	%	0	95	0	95	0	95	0	95	0	95	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya	%	0	0		0		0		0		0		0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Meningkatnya Nilai Tambah Usaha tani dan Akses Permodalan	%	0	0	5,654,585,344	0	5,747,087,872	0	6,109,616,128	0	6,440,451,584	0	6,698,494,976	0	6,698,494,976	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Margin Usahatani Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	%	0	5		5		5		5		5		0		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB								
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA										
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)								
		Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani yang memperoleh akses permodalan (kelompok)	%	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura								
Dinas Perkebunan																									
280	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	5,134,429,094	100	5,237,117,676	100	5,393,707,494	100	6,202,763,619	100	6,947,095,253	0	6,947,095,253	Dinas Perkebunan								
281	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	76	2,873,641,157	76	2,931,113,980	76	3,018,754,288	76	3,471,567,431	76	3,837,392,790	0	3,837,392,790	Dinas Perkebunan								
282	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	96	429,174,540	96	99,890,140	96	303,617,686	96	132,612,152	96	368,924,816	0	368,924,816	Dinas Perkebunan								
283	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	97	1,058,645,850	97	1,010,927,590	97	1,036,200,779	97	1,230,752,107	97	1,917,638,978	0	1,917,638,978	Dinas Perkebunan								
284	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	97	1,726,425,675	97	1,760,954,189	97	1,810,260,906	97	2,027,492,214	97	2,502,330,891	0	2,502,330,891	Dinas Perkebunan								
	Program Peningkatan Produksi , Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	0	7,589,709	35,497,334,767	7,817,401	36,069,237,358	8,051,923	36,940,834,478	8,293,480	49,467,620,510	8,542,285	62,329,201,843	0	62,329,201,843	Dinas Perkebunan								
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan 1. Kelapa Sawit	Ton	0	7,004,660		7,223,006		7,447,878		7,679,554		7,918,271		0		Dinas Perkebunan								
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan 2	Ton	0	323.589		32,682,491		330.093		333.394		336.728		0		Dinas Perkebunan								
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan 3. Kopi Arabika	Ton	0	65.328		67.667		70.089		72.598		75.197		0		Dinas Perkebunan								
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan 4. Kopi Robusta	Ton	0	9.223		9.408		9.596		9.788		9.983		0		Dinas Perkebunan								
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan 5. Kelapa	Ton	0	102.944		106.312		107.734		110.212		112.747		0		Dinas Perkebunan								
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan 6. Kakao	Ton	0	41.937		42.146		42.357		42.569		42.782		0		Dinas Perkebunan								
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan 7. Komoditi Lainnya	Ton	0	42.029		43.037		44.176		45.366		46.577		0		Dinas Perkebunan								
		NTP Perkebunan	Poin	0	99		100		100		101		101		0		Dinas Perkebunan								
		PDRB Perkebunan	%	0	10		10		11		11		11		0		Dinas Perkebunan								
		Luas Areal Komoditi Perkebunan	Hektar	0	1,153,469		1,162,326		1,171,295		1,179,926		1,188,661		0		Dinas Perkebunan								
		Luas Areal Komoditi Perkebunan 1. Kelapa Sawit	Hektar	0	437.889		443.582		449.348		454.74		460.197		0		Dinas Perkebunan								
		Luas Areal Komoditi Perkebunan 2. Karet	Hektar	0	393.189		393.189		393.189		393.189		393.189		0		Dinas Perkebunan								
		Luas Areal Komoditi Perkebunan 3. Kopi Arabika	Hektar	0	73.214		74.495		75.799		77.126		78.475		0		Dinas Perkebunan								
		Luas Areal Komoditi Perkebunan 4. Kopi Robusta	Hektar	0	19.61		19.806		20.004		20.024		20.406		0		Dinas Perkebunan								
		Luas Areal Komoditi Perkebunan 5. Kelapa	Hektar	0	109.936		110.76		111.591		112.428		113.271		0		Dinas Perkebunan								
		Luas Areal Komoditi Perkebunan 6. Kakao	Hektar	0	56.631		57.055		57.483		57.914		58.349		0		Dinas Perkebunan								
		Luas Areal Komoditi Perkebunan 7. Komoditi Lainnya	Hektar	0	63		63.439		63.88		64.325		64.774		0		Dinas Perkebunan								
		Kehutanan																							
		Dinas Kehutanan																							
286	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	11,006,414,720	100	12,693,362,740	100	14,198,390,700	100	15,438,240,000	100	15,802,000,000	100	15,802,000,000	Dinas Kehutanan								
287	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	55	55	13,324,915,600	56	14,391,491,350	57	13,625,000,000	58	15,127,000,000	59	17,103,000,000	59	17,103,000,000	Dinas Kehutanan								
288	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	98	98	200,000,000	98	918,000,000	98	850,000,000	98	320,000,000	98	370,000,000	98	370,000,000	Dinas Kehutanan								

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
289	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase Tingkat Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	%	0	0	0	20	70,000,000	20	45,000,000	20	60,000,000	20	80,000,000	20	80,000,000	Dinas Kehutanan
290	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	80	80	1,234,000,000	81	820,000,000	82	850,000,000	83	875,000,000	84	1,020,000,000	84	1,020,000,000	Dinas Kehutanan
291	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	934,179,948	100	1,435,000,000	100	1,561,000,000	100	1,667,000,000	100	1,848,000,000	100	1,848,000,000	Dinas Kehutanan
292	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Cakupan Penerimaan PNPB	%	100	100	1,550,226,990	100	1,562,339,150	100	1,709,125,256	100	1,674,184,088	100	2,049,065,749	100	2,049,065,749	Dinas Kehutanan
293	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Cakupan Paket Layanan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Hutan	%	100	100	9,169,443,542	100	7,575,000,000	100	8,275,000,000	100	9,305,000,000	100	9,990,000,000	100	9,990,000,000	Dinas Kehutanan
294	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan	%	55	55	17,188,375,240	56	15,653,782,540	57	15,669,674,800	58	18,596,458,000	59	21,395,000,000	59	21,395,000,000	Dinas Kehutanan
295	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	35	35	20,427,622,570	36	15,856,732,740	37	13,500,500,000	38	11,437,300,000	39	12,736,700,000	39	12,736,700,000	Dinas Kehutanan
		Cakupan Ketersediaan Tata kelola Perencanaan RHL/ Pengelolaan DAS	%	20	15		18		20		25		22		22		Dinas Kehutanan
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	%	50	65		68		70		75		72		72		Dinas Kehutanan
296	Program Pembinaan dan Penertiban Pemanfaatan Hasil Hutan	Cakupan Penerimaan PNPB	%	100	100	1,550,226,990	100	1,562,339,150	100	1,760,434,500	100	1,723,502,000	100	2,053,850,000	100	2,053,850,000	Dinas Kehutanan
297	Program Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Cakupan Tertib Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan	%	60	61	3,836,083,210	62	7,060,000,000	63	6,390,000,000	64	7,000,000,000	65	7,215,000,000	65	7,215,000,000	Dinas Kehutanan
298	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Persentase Tertib Luas Perhutanan Sosial dan Kemitraan yang dikelola dengan baik	%	30	30	5,834,446,700	31	6,670,000,000	32	8,275,000,000	33	8,450,500,000	34	9,386,450,000	34	9,386,450,000	Dinas Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral																	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																	
299	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	4,470,333,745	100	3,500,000,000	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
300	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	60	70	3,998,217,700	80	8,376,530,700	90	4,850,000,000	100	5,200,000,000	100	4,200,000,000	100	4,200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
301	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	60	65	564,481,600	70	600,000,000	75	600,000,000	80	600,000,000	85	600,000,000	85	600,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
302	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	60	65	479,703,000	70	480,000,000	75	500,000,000	80	500,000,000	85	500,000,000	85	500,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
303	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	905,469,300	100	905,469,300	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
304	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi Dan Air Tanah	Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral geologi dan air tanah	%	40	50	18,699,045,210	60	18,000,000,000	70	18,500,000,000	90	19,000,000,000	100	19,000,000,000	100	19,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
305	Program Pengembangan Pelayanan Energi Baru Dan Terbarukan	Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan	%	7	17	12,272,857,000	20	10,000,000,000	23	12,000,000,000	25	12,000,000,000	33	12,000,000,000	33	12,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Infrastruktur energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang dibangun	unit	1.892	601		853		1.069		1.069		859		4.403		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
306	Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Mineral dan BatuBara	Persentase rekomendasi/persetujuan teknis perizininan mineral dan batubara	%	80	100	1,802,979,030	100	1,800,000,000	100	1,800,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
307	Program Pembinaan dan	Persentase pemegang IUP yang menyampaikan laporan dengan baik	%	5	20	2 296 444 950	40	2 000 000 000	60	2 000 000 000	80	2 500 000 000	100	2 500 000 000	100	2 500 000 000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
307	Pengawasan Mineral dan BatuBara	Persentase pemegang IUP yang menempatkan jaminan reklamasi/pasca tambang	%	5	20	2,230,111,500	40	2,000,000,000	60	2,000,000,000	80	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
308	Program Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Meningkatkan Pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara	%	40	50	703,125,000	60	700,000,000	70	700,000,000	90	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
309	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	%	40	50	1,765,974,325	60	1,700,000,000	70	1,700,000,000	90	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
310	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Ratio elektrifikasi	%	99	100	2,960,480,740	100	2,900,000,000	100	2,900,000,000	100	3,000,000,000	100	3,000,000,000	100	3,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Beban puncak	MW	1.893	2.009		2.219		2.394		2.568		2.752		2.752		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Daya listrik terpasang	MW	3.427	4.244		5.307		6.496		6.546		6.683		6.683		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Reserve Margin (Cadangan Daya Listrik)	%	23	30		30		30		30		30		30		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Konsumsi Listrik Perkapita	KWH	1.004	1.029		1.054		1.154		1.212		1.273		1.273		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
311	Program Pemanfaatan Energi	Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan	%	7	17	247,521,750	20	250,000,000	23	500,000,000	25	400,000,000	33	400,000,000	33	400,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Peningkatan Persentasi Lifting (Volume produksi yang terjual) Minyak dan Gas	%	65	75		85		95		100		100		100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
312	Program Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Energi	Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan	%	7	17	1,407,570,800	20	1,450,000,000	23	1,450,000,000	25	1,400,000,000	33	1,400,000,000	33	1,400,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Penurunan Intensitas Energi Primer	%	0	1		1		1		1		1		4		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
313	Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	Rasio Elektrifikasi	%	99	100	1,887,795,850	100	1,800,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Daya listrik terpasang	MW	3.427	4.244		5.307		6.496		6.546		6.683		6.683		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Desa Berlistrik	Desa	5.954	6.008		6.11		6.11		6.11		6.11		6.11		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan																	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan																	
314	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	4,724,150,000	100	3,756,940,000	100	4,900,000,000	100	5,920,000,000	0	6,559,000,000	0	6,559,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
315	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	3,155,450,000	100	6,064,000,000	100	3,259,000,000	100	3,933,000,000	100	4,351,000,000	0	4,351,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
316	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	223,000,000	100	200,000,000	100	230,000,000	100	277,000,000	0	306,000,000	0	306,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
317	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	557,500,000	100	415,450,000	100	575,000,000	100	694,000,000	0	767,000,000	0	767,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
318	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	2,453,000,000	100	2,160,610,000	100	2,533,000,000	100	3,057,000,000	0	3,381,000,000	0	3,381,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
319	Program Penataan Struktur Industri	Nilai PDRB Industri Pengolahan Sumatera Utara (Harga Berlaku)	Rp. Triliun	0	146	1,170,750,000	153	1,042,000,000	161	1,208,000,000	169	1,458,000,000	177	1,227,000,000	0	1,227,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
320	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerima bantuan peralatan dan/atau sosialisasi teknologi industri	IKM	70	80	892,000,000	90	835,000,000	100	920,000,000	110	1,110,000,000	120	1,612,000,000	120	1,612,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
321	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Penanganan sengketa konsumen melalui BPSK	Kasus	0	130	6,690,000,000	140	6,504,000,000	150	6,910,000,000	160	8,341,000,000	170	9,227,000,000	0	9,227,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
322		2. Jumlah komoditi yang diawasi	%	0	49	0	51	0	53	0	55	0	57	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
323	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.	unit	0	61	2,374,950,000	62	2,631,000,000	63	2,453,000,000	64	2,961,000,000	65	3,275,000,000	0	3,275,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Jumlah komoditas strategis yang dipantau lewat PIHPS	Komoditi	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
324	Program Peningkatan kerjasama Perdagangan Internasional	1. Nilai Ekspor Bersih Sumatera Utara	Rupiah	0	5	1,672,500,000	5	1,480,000,000	6	1,724,000,000	6	2,081,000,000	6	2,302,000,000	0	2,302,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Jumlah komoditi yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri	jenis	0	42	0	44	0	46	0	48	0	50	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
325	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor-Impor	1. Jumlah SKA yang terbitkan	dokumen	0	52.492	1,115,000,000	53.692	630,000,000	55.892	1,151,000,000	57.092	1,389,000,000	58.292	1,536,000,000	0	1,536,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan ekspor	unit	0	52	0	54	0	56	0	58	0	60	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
326	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Sumatera Utara	%	0	2	3,233,500,000	3	3,071,000,000	3	3,338,000,000	3	4,029,000,000	3	4,457,000,000	0	4,457,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru yang Dilatih	unit	0	500	0	530	0	560	0	590	0	620	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
Perencanaan																	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
327	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	8,185,999,872	100	8,185,999,872	100	8,349,720,064	100	8,517,000,192	100	8,687,339,520	0	8,687,339,520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
328	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	6,072,000,000	100	106,071,998,464	100	106,071,998,464	100	3,000,000,000	100	3,000,000,000	0	3,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
329	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	2,190,000,128	100	2,190,000,128	100	2,233,799,936	100	2,278,476,032	100	2,324,999,936	0	2,324,999,936	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
330	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Koordinasi dan Pembinaan tentang Perencanaan Pembangunan	%	0	100	450,000,000	100	450,000,000	100	459,000,000	100	468,000,000	100	477,360,000	0	477,360,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
348	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Menyerahkab Laporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	491,715,090	100	491,715,090	100	491,715,090	100	491,715,090	100	491,715,090	100	491,715,090	Badan Kepegawaian Daerah
349	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	100	100	13,682,656,820	100	13,682,656,820	100	13,682,656,820	100	13,682,656,820	100	13,682,656,820	100	13,682,656,820	Badan Kepegawaian Daerah
350	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah	%	100	100	2,027,681,500	100	2,027,681,500	100	2,027,681,500	100	2,027,681,500	100	2,027,681,500	100	2,027,681,500	Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan																	
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia																	
351	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran	%	0	100	6,370,718,876	100	6,662,406,170	100	7,366,971,539	100	8,018,566,348	100	8,489,113,886	100	8,489,113,886	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
352	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan	%	0	100	4,408,679,150	100	1,503,787,326	100	1,811,290,796	100	2,155,969,627	100	2,431,800,323	100	2,431,800,323	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
353	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	234,200,000	100	269,330,000	100	269,330,000	100	269,330,000	100	269,330,000	100	269,330,000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
354	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan	%	0	100	2,656,437,685	100	3,619,307,426	100	3,843,763,775	100	4,081,151,616	100	4,626,816,510	100	4,626,816,510	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
355	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja Keuangan	%	0	100	611,374,025	100	242,651,625	100	266,916,788	100	293,608,467	100	322,969,313	100	322,969,313	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
356	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Mewujudkan ASN yang Profesional, Amanah dan Bermartabat	%	0	100	14,090,528,331	100	21,918,565,761	100	21,441,727,102	100	20,681,373,942	100	19,659,969,968	100	19,659,969,968	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Penelitian dan Pengembangan																	
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah																	
357	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	2,420,529,566	100	3,351,060,816	100	3,609,193,600	100	3,561,193,000	100	3,597,193,600	100	3,597,193,600	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
358	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan	%	100	100	2,435,640,000	100	3,049,914,520	100	3,392,806,400	100	2,742,806,400	100	3,812,806,400	100	3,812,806,400	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
359	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	0	0	100	249,980,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
360	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	350,305,000	100	485,195,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
361	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	419,425,135	100	624,418,850	100	691,000,000	100	686,000,000	100	756,000,000	100	756,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
362	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemanfaatan Hasil Penelitian	%	24	44	3,975,003,532	64	3,929,999,192	80	3,850,000,000	85	3,850,000,000	100	3,850,000,000	100	3,850,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
363	Program Desiminasi Informasi Teknologi	Meningkatnya Kualitas Informasi Teknologi Hasil Penelitian	%	12	24	4,001,949,370	27	250,000,000	30	5,757,000,000	33	5,710,000,000	36	5,824,000,000	36	5,824,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
364	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Penguatan Sistem Inovasi Daerah	%	0	50	200,017,655	50	5,259,431,622	50	650,000,000,000	50	700,000,000	50	700,000,000	50	700,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah																	
Biro Umum dan Perlengkapan																	
365	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	23,957,102,592	100	26,352,814,080	100	28,988,094,464	100	31,886,905,344	100	35,075,596,288	0	35,075,596,288	Biro Umum dan Perlengkapan
366	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	36,556,681,216	100	68,339,245,056	100	75,173,167,104	100	82,690,490,368	100	90,959,536,128	0	90,959,536,128	Biro Umum dan Perlengkapan
367	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Efektivitas dan Produktifitas Layanan	%	0	100	1,129,500,032	100	1,242,450,048	100	1,366,695,040	100	1,503,364,480	100	1,653,700,992	0	1,653,700,992	Biro Umum dan Perlengkapan
368	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	490,000,000	100	539,000,000	100	592,899,968	100	652,190,016	100	717,409,024	0	717,409,024	Biro Umum dan Perlengkapan
369	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	0	100	16,495,714,304	100	25,845,315,584	100	28,429,846,528	100	31,272,830,976	100	34,400,112,640	0	34,400,112,640	Biro Umum dan Perlengkapan
370	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tahun	1	1	2,601,703,652	1	2,368,747,110	1	2,368,747,110	1	2,368,747,110	1	2,368,747,110	5	2,368,747,110	Biro Umum dan Perlengkapan
371	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	%	0	100	9,907,794,944	100	10,898,575,360	100	11,988,432,896	100	13,187,275,776	100	14,506,003,456	0	14,506,003,456	Biro Umum dan Perlengkapan
372	Program Pemeliharaan dan pengelolaan Bangunan Gedung Negara	Terpeliharanya dan Terkelolanya Bangunan Gedung Negara Dengan Baik	%	0	100	8,691,940,352	100	34,201,133,056	100	37,621,248,000	100	41,383,370,752	100	45,521,711,104	0	45,521,711,104	Biro Umum dan Perlengkapan
Biro Pemerintahan																	
373	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	surat	4.813	4.813	2,928,361,200	4.813	2,930,000,000	4.813	3,010,896,592	4.813	2,931,346,479	4.813	3,500,000,000	24.065	3,500,000,000	Biro Pemerintahan
374	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	unit	238	238	538,975,000	238	539,000,000	238	538,000,000	238	539,000,000	238	551,000,000	238	551,000,000	Biro Pemerintahan
375	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	orang	78	55	0	55	0	55	0	55	0	55	200,000,000	275	200,000,000	Biro Pemerintahan
376	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	Buku	65	75	109,829,172	100	110,000,000	100	115,000,000	100	125,000,000	100	150,000,000	0	150,000,000	Biro Pemerintahan
377	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terfasilitasinya penyelesaian persoalan tanah yg dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dim mewujudkan	kab/kota	231	198	1,039,653,521	198	1,050,000,000	198	1,266,346,479	198	1,239,653,521	198	1,267,000,000	198	1,267,000,000	Biro Pemerintahan
378	Program Kepemerintahan Yang Baik	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyeleng pemerintahan dan pembangunan	%	1.365	631	5,096,194,601	631	5,191,000,000	631	6,464,756,929	631	6,100,000,000	631	6,600,000,000	3.155	6,600,000,000	Biro Pemerintahan
379	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tertatanya wilayah administrasi pemerintahan daerah kab/kota dan provinsi melalui batas wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan	%	322	121	2,057,795,563	121	2,100,000,000	121	2,455,000,000	121	2,100,000,000	121	2,100,000,000	605	2,100,000,000	Biro Pemerintahan
380	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tertatanya kepemilikan tanah serta kawasan khusus dan umum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kab/Kota dan Provinsi demi tercapainya pem yg baik	kab/kota	33	33	299,983,930	33	300,000,000	33	400,000,000	33	400,000,000	33	400,000,000	165	400,000,000	Biro Pemerintahan
Biro Bina Perekonomian																	
381	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	78	78	1,555,380,000	79	1,400,000,000	80	1,400,000,000	82	1,400,000,000	84	1,500,000,000	84	1,500,000,000	Biro Bina Perekonomian
382	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	80	50,000,000	81	50,000,000	82	50,000,000	84	60,000,000	86	75,000,000	86	75,000,000	Biro Bina Perekonomian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
383	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	80	80	150,000,000	82	150,000,000	84	150,000,000	86	160,000,000	88	175,000,000	88	175,000,000	Biro Bina Perekonomian
384	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	82	82	6,131,500,000	84	5,850,000,000	86	5,900,000,000	88	5,970,000,000	90	6,250,000,000	90	6,250,000,000	Biro Bina Perekonomian
385	Program Pemberdayaan BUMD	Meningkatnya Pemberdayaan BUMD	%	6	6	1,013,120,000	6	1,500,000,000	6	1,500,000,000	6	1,550,000,000	6	1,700,000,000	6	1,700,000,000	Biro Bina Perekonomian
Biro Sosial dan Kesejahteraan																	
386	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	4,717,364,224	100	5,189,100,544	100	5,708,010,496	100	6,278,811,648	100	6,906,692,608	0	6,906,692,608	Biro Sosial dan Kesejahteraan
387	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	250,000,000	100	275,000,000	100	302,500,000	100	332,750,016	100	366,024,992	0	366,024,992	Biro Sosial dan Kesejahteraan
388	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	350,000,000	100	385,000,000	100	423,500,000	100	465,849,984	100	512,435,008	0	512,435,008	Biro Sosial dan Kesejahteraan
389	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	250,000,000	100	275,000,000	100	302,500,000	100	332,750,016	100	366,024,992	0	366,024,992	Biro Sosial dan Kesejahteraan
390	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Pelayanan Publik Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan	%	0	100	3,539,996,672	100	3,893,996,288	100	4,283,395,840	100	4,711,735,808	100	5,182,908,928	0	5,182,908,928	Biro Sosial dan Kesejahteraan
391	Program Fasilitasi Pembinaan Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Terlaksananya Fungsi Pembinaan terhadap Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan	%	0	100	3,440,031,744	100	3,784,034,816	100	4,162,438,400	100	4,578,682,368	100	5,036,550,656	0	5,036,550,656	Biro Sosial dan Kesejahteraan
392	Program pembinaan keagamaan	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama	%	0	100	9,280,903,168	100	10,208,993,280	100	10,208,993,280	100	11,229,892,608	100	12,352,881,664	0	12,352,881,664	Biro Sosial dan Kesejahteraan
Biro Organisasi																	
393	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	1,418,000,000	100	1,500,000,000	100	1,510,000,000	100	1,520,000,000	100	1,550,000,000	0	1,550,000,000	Biro Organisasi
394	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	150,000,000	100	155,000,000	100	155,000,000	100	160,000,000	100	170,000,000	0	170,000,000	Biro Organisasi
395	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	32,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	0	60,000,000	Biro Organisasi
396	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Meningkatkan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	0	100	3,441,000,000	100	3,575,000,000	100	3,393,000,000	100	4,404,000,000	100	4,882,000,000	0	4,882,000,000	Biro Organisasi
397	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	%	0	100	1,787,000,000	100	900,000,000	100	910,000,000	100	1,190,000,000	100	1,302,000,000	0	1,302,000,000	Biro Organisasi
398	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	0	0	0	100	800,000,000	100		100		100		100		Biro Organisasi
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama																	
399	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	99	100	1,332,338,917	100	1,330,150,000	100	1,593,000,000	100	1,753,000,000	100	1,743,000,000	100	1,743,000,000	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
400	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	10,350,000	100	10,350,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
401	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	150	100	173,192,000	100	135,000,000	100	180,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
402	Program Kepemerintahan Yang Baik	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan LPPD Provsu	%	92	100	844,933,200	100	680,000,000	100	770,000,000	100	820,000,000	100	1,540,000,000	100	1,540,000,000	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
403	Program Pembinaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Kewenangan Pusat dan Provinsi di Daerah serta lancarnya pelaksanaan Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	5,362,956,778	100	5,794,500,000	100	5,695,000,000	100	5,965,000,000	100	6,255,000,000	100	6,255,000,000	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Biro Administrasi Pembangunan																	
404	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	830,000,000	100	913,000,000	100	1,004,300,000	100	1,104,730,000	100	1,104,730,000	0	1,104,730,000	Biro Administrasi Pembangunan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
405	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	26,620,000	0	26,620,000	Biro Administrasi Pembangunan
406	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	1,500,000,000	100	1,650,000,000	100	1,815,000,000	100	1,996,500,000	100	1,996,500,000	0	1,996,500,000	Biro Administrasi Pembangunan
407	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	3,750,000,000	100	4,125,000,000	100	4,537,500,000	100	4,991,250,000	100	4,991,250,000	0	4,991,250,000	Biro Administrasi Pembangunan
408	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase perkembangan pengguna Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	%	0	100	1,510,200,000	100	1,661,220,000	100	1,827,342,000	100	2,010,076,200	100	2,010,076,200	0	2,010,076,200	Biro Administrasi Pembangunan
409	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya berbagai Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsu dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsu di Dalam dan Luar Negeri	%	0	100	4,760,000,000	100	5,236,000,000	100	5,759,600,000	100	6,335,560,000	100	6,335,560,000	0	6,335,560,000	Biro Administrasi Pembangunan
Biro Hukum																	
410	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	1,323,904,200	100	1,462,332,704	100	1,605,812,628	100	1,798,510,143	100	1,814,331,361	100	1,814,331,361	Biro Hukum
411	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	50	144,950,000	50	127,744,000	50	143,073,280	50	273,282,074	50	305,115,923	250	305,115,923	Biro Hukum
412	Program Perencanaan Hukum	Tersusunnya produk hukum Provinsi Sumatera Utara yang terarah terkoordinasi dan terpadu	%	0	100	784,171,500	100	878,272,080	100	953,664,730	100	1,168,104,498	100	1,208,277,038	100	1,208,277,038	Biro Hukum
413	Program Pembinaan Peraturan Daerah	Tersebarluasnya produk hukum Daerah Provsu dan terwujudnya penyusunan Ranperda Provsu dan Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan umum dan Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya	%	0	100	992,102,550	100	1,111,154,856	100	1,244,493,439	100	1,393,832,650	100	1,401,092,568	100	1,401,092,568	Biro Hukum
414	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia	Meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprovsu serta menjunjung tinggi HAM dalam pelayanan publik	%	0	100	607,452,850	100	660,347,192	100	739,588,855	100	928,339,518	100	933,740,260	100	933,740,260	Biro Hukum
415	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Meningkatkan penyelesaian perkara dan sengketa hukum di lingkungan pemerintah Provsu	%	0	100	1,314,290,400	100	1,452,005,248	100	1,526,245,878	100	1,709,395,383	100	1,780,522,829	100	1,780,522,829	Biro Hukum
416	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sipil Biro Hukum Setdaprovsu	%	0	100	275,128,500	100	308,143,920	100	345,121,190	100	486,535,733	100	514,920,021	100	514,920,021	Biro Hukum
Biro Humas dan Keprotokolan SETDA																	
415	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	2,866,941,892	100	2,900,000,000	100	2,922,000,000	100	3,127,000,000	100	3,533,000,000	0	3,533,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
416	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	1,448,765,600	100	1,482,000,000	100	1,504,000,000	100	1,709,000,000	100	2,115,000,000	100	2,115,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
417	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan efektivitas dan produktifitas layanan	%	100	100	563,500,000	100	596,000,000	100	619,000,000	100	824,000,000	100	1,230,000,000	100	1,230,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
418	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	172,384,000	100	205,000,000	100	227,000,000	100	433,000,000	100	839,000,000	100	839,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
419	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	64,489,418	100	97,000,000	100	120,000,000	100	325,000,000	100	731,000,000	100	731,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
420	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	%	0	100	7,648,598,487	100	7,681,000,000	100	7,704,000,000	100	7,909,000,000	100	8,315,000,000	100	8,315,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
421	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	0	100	1,118,493,725	100	1,151,000,000	100	1,174,000,000	100	1,379,000,000	100	1,785,000,000	100	1,785,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
422	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	%	0	100	6,670,326,878	100	6,709,000,000	100	6,728,000,000	100	6,936,300,000	100	7,339,000,000	100	7,339,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
423	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Terselenggaranya Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi	%	0	100	1,369,500,000	100	1,402,000,000	100	1,425,000,000	100	1,630,000,000	100	2,036,000,000	100	2,036,000,000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
Sekretariat DPRD																	
424	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	25,316,271,370	100	25,316,271,370	100	25,316,271,370	100	25,316,271,370	100	25,316,271,370	100	126,581,356,850	Sekretariat DPRD
425	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan	%	100	100	10,947,503,701	100	6,247,503,701	100	6,247,503,701	100	6,247,503,701	100	6,247,503,701	100	35,937,518,505	Sekretariat DPRD
426	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	3,941,550,000	100	3,941,550,000	100	3,941,550,000	100	3,941,550,000	100	3,941,550,000	100	19,707,750,000	Sekretariat DPRD
427	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	356,170,000	100	356,170,000	100	356,170,000	100	356,170,000	100	356,170,000	100	1,780,850,000	Sekretariat DPRD
428	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	577,440,000	100	577,440,000	100	577,440,000	100	577,440,000	100	577,440,000	100	2,887,200,000	Sekretariat DPRD
429	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik	Terciptanya Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik	%	100	100	206,938,158,229	100	211,691,158,229	100	216,691,158,229	100	226,691,158,229	100	231,691,158,229	100	1,093,702,791,145	Sekretariat DPRD
430	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rapat dan Dokumen Penataan Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	870,399,700	100	870,399,700	100	870,399,700	100	870,399,700	100	870,399,700	100	4,351,998,500	Sekretariat DPRD
431	Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah	Jumlah Rakor Peningkatan Pelayanan dan Risalah	%	100	100	236,500,000	100	236,500,000	100	236,500,000	100	236,500,000	100	236,500,000	100	1,182,500,000	Sekretariat DPRD
432	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Jumlah Laporan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	%	100	100	763,007,000	100	763,007,000	100	763,007,000	100	763,007,000	100	763,007,000	100	3,815,035,000	Sekretariat DPRD
560	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	5,535,145,440	100	5,906,305,440	100	6,479,169,440	100	6,717,447,000	100	6,917,447,000	100	6,917,447,000	Inspektorat Daerah Provinsi
561	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2,267,697,060	100	2,767,697,060	100	4,360,833,060	100	3,675,555,500	100	3,575,555,500	100	3,575,555,500	Inspektorat Daerah Provinsi
562	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	240,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi
563	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	1,084,424,000	100	1,137,264,000	100	1,137,264,000	100	1,757,264,000	100	1,757,264,000	100	1,757,264,000	Inspektorat Daerah Provinsi
564	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	dokumen	25	25	814,942,500	25	814,942,500	25	934,942,500	25	1,134,942,500	25	1,534,942,500	25	1,534,942,500	Inspektorat Daerah Provinsi
565	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Serta Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	65	71	28,057,791,000	76	28,777,791,000	81	28,877,791,000	86	30,747,791,000	91	31,713,791,000	95	31,713,791,000	Inspektorat Daerah Provinsi
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah																	
566	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	0	20	99,749,736,338	20	111,724,709,972	20	128,483,416,468	20	154,180,099,761	20	192,725,124,701	100	686,863,087,240	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
567	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	20	70,906,623,200	20	77,997,285,520	20	89,696,878,348	20	107,636,254,018	20	134,545,317,522	100	480,782,358,608	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
568	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS	%	0	20	159,989,600	20	175,988,560	20	202,386,844	20	242,864,213	20	303,580,266	100	1,084,809,483	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
569	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	20	2,790,019,450	20	3,069,021,395	20	3,529,374,604	20	4,235,249,525	20	5,294,061,906	100	18,917,726,881	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
570	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tingkat Ketaatan dan Kepatuhan dalam Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	0	20	6,026,361,500	20	6,628,997,650	20	7,623,347,298	20	9,148,016,757	20	11,435,020,946	100	40,861,744,151	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
571	Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Capaian realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	%	0	20	8,755,600,700	20	9,631,160,770	20	11,705,834,886	20	13,291,001,863	20	16,613,752,328	100	59,367,350,546	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
572	Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	%	0	20	2,082,409,010	20	2,290,649,911	20	2,634,247,398	20	3,161,096,877	20	3,951,371,096	100	14,119,774,292	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
573	Program Peningkatan Pajak Air Permukaan	Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor	%	0	20	1,899,999,100	20	2,089,999,010	20	2,403,498,862	20	2,884,198,634	20	3,605,248,292	100	12,882,943,898	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
574	Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah	Persentase Capaian Realisasi Penerimaan pajak Rokok	%	0	20	99,999,900	20	109,999,890	20	126,499,874	20	151,799,848	20	189,749,810	100	687,049,322	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
575	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib pajak dan Wajib Retribusi	%	0	20	6,223,989,800	20	6,846,388,780	20	7,873,347,097	20	9,448,016,516	20	11,810,020,646	100	42,201,762,839	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
576	PROGRAM PEMANFAATAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI DAERAH	Persentase Cakupan Pelayanan Sesuai ISO	%	0	20	750,000,000	20	1,125,000,000	20	1,293,750,000	20	1,552,500,000	20	1,940,625,000	100	6,661,875,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
577	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	0	20	2,550,629,800	20	2,805,692,780	20	3,226,546,697	20	3,871,856,036	20	4,839,820,046	100	17,294,545,359	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Badan Penghubung Daerah Provinsi																	
578	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	3,937,333,009	100	4,041,826,851	100	4,280,758,801	100	4,662,471,000	100	4,511,682,450	0	0	Badan Penghubung Daerah Provinsi
579	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	3,816,793,292	100	4,184,117,000	100	5,156,468,000	100	5,930,443,666	100	5,776,273,000	0		Badan Penghubung Daerah Provinsi
580	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	192,220,000	100	194,142,200	100	196,149,000	100	275,933,000	100	240,726,000	0		Badan Penghubung Daerah Provinsi
581	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	609,430,000	100	615,523,000	100	621,677,000	100	718,843,000	100	672,272,000	0		Badan Penghubung Daerah Provinsi
582	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	58,508,000	100	59,093,000	100	59,684,000	100	60,280,000	100	70,000,000	0		Badan Penghubung Daerah Provinsi
583	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan Penghubung Daerah Provsu	%	0	100	1,773,518,500	100	2,600,369,950	100	2,596,737,000	100	2,975,601,334	100	3,486,551,000	0		Badan Penghubung Daerah Provinsi

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
584	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	%	0	100	2,311,997,199	100	2,304,928,199	100	2,644,526,199	100	2,602,428,000	100	3,289,495,550	0		Badan Penghubung Daerah Provinsi

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET CAPAIAN SASARAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	77	80	83	85	90
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90.4	92.3	94.3	96.3	98.1
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	100.1	100.1	100.1	100.1	100.2
4	Rasio Rumah Layak huni	Persen	92.72	93.22	93.72	94.22	94.72
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68.74	68.87	69	69.13	70.00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.5	5.45	5.4	5.35	5.3
7	Pertumbuhan PDRB	Persen	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
8	Persentase kemiskinan	Persen	8.87	8.43	8.04	7.7	7.39
9	Indeks Gini	Poin	0.325	0.32	0.315	0.31	0.3
10	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82.99	84.52	86.29	88.59	90
11	Rasio Elektrifikasi	Persen	99.9	100	100	100	100
12	Inflasi	Persen	2.95	2.9	2.85	2.8	2.75
13	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2.86	2.84	2.82	2.8	2.78
14	IPM	Poin	71.12	71.67	72.22	72.77	73.32
15	Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	B	B	BB	BB	BB
17	Persentase Penegakan Perda	Persen	45	60	75	80	85
18	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.79	9.97	10.15	10.33	10.50
19	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Poin	0.9	0.93	0.96	0.99	1
20	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.87	90.93	91	91.08	91.17
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68	69	70	71	72
22	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	134.4	127	121	109
23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	280000	300000	370000	400000	500000

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.18	71.12	71.67	72.22	72.77	73.32	73.32	Seluruh Perangkat Daerah
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.85	90.87	90.93	91.00	91.08	91.17	91.17	
3	Angka Melek Huruf	98.96	99.24	99.38	99.52	99.66	99.80	99.80	
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9.34	9.45	9.62	9.79	9.95	10.12	10.12	Dinas Pendidikan
5	Harapan Lama Sekolah	13.14	13.37	13.81	14.01	14.21	14.42	14.42	
6	Usia Harapan Hidup	68,37 Tahun	68,54 Tahun	68,72 Tahun	68,89 Tahun	69,07 Tahun	70,00 Tahun	70, 00 Tahun	Dinkes
7	Penanganan Daerah Rawan Bencana	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	25.00	BPBD
8	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	7,124,000	7,324,000	7,524,000	7,725,000	7,924,000	8,124,000	8,124,000	Dinas Tenaga Kerja
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.82	73.01	74.20	75.39	76.58	77.77	77.77	Dinas Tenaga Kerja
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.56	5.50	5.45	5.40	5.35	5.30	5.30	Dinas Tenaga Kerja
11	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	Biro Organisasi
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA								
1	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga								
1.1	Jumlah Group Kesenian	38	48	58	68	78	88	88	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	4	5	5	6	6	7	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.3	Jumlah Klub Olahraga	1,837	2,020	2,203	2,386	2,569	2,752	2,752	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.4	Jumlah Gedung Olahraga	11	14	18	22	27	34	34	Dinas Pemuda dan Olah Raga
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
B.1.1	PELAYANAN DASAR								
1	PENDIDIKAN								
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	97.14	97.03	97.16	97.28	97.40	97.52	97.52	Dinas Pendidikan
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	71.19	69.07	69.33	69.59	69.86	70.12	70.12	Dinas Pendidikan
1.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	1.36	1.29	1.25	1.21	1.18	1.14	1.14	Dinas Pendidikan
1.4	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98.27	97.04	97.06	97.08	97.11	97.13	97.13	Dinas Pendidikan
1.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	109.82	110.77	111.13	111.49	111.86	112.22	112.22	Dinas Pendidikan
1.6	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	1,131	1,204	1,241	1,277	1,314	1,350	1,350	Dinas Pendidikan
1.7	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	1:391	1:455	1:487	1:519	1:551	1:584	1:584	Dinas Pendidikan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.8	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98.96	99.26	99.41	99.56	99.71	99.86	99.86	Dinas Pendidikan
1.9	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	93.59	94.26	94.59	94.93	95.26	95.60	95.60	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN								
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	NA	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	Dinkes
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11.07	11.01	10.99	10.97	10.95	10.93	10.93	Dinkes
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	NA	80.1	75.1	70.2	68.1	64.3	64.3	Dinkes
2.4	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun	32.30	31.50	30.50	29.50	28.50	27.50	27.50	Dinkes
2.5	Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Ideal (80%)	98.12	100.00	95.00	90.00	85.00	80.00	80	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.6	Rata-rata LOS (Length of Stay)	66.36	65.00	61.00	57.00	53.00	47.00	42	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	>81.25	>81.26	>81.27	>81.28	>81.29	>81.30	>81.31	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.8	Persentase Bed Occupancy Rate BOR)	60	60.00	62.00	65.00	67.00	70.00	70	Rumah Sakit Haji Medan
2.9	Length Of Stay (LOS)	6	6.00	6.00	7.00	7.00	8.00	8	Rumah Sakit Haji Medan
2.10	Bed Turn Over (BTO) 40-50	45	40.00	42.00	42.00	41.00	40.00	40	Rumah Sakit Haji Medan
2.11	Turn Over Internal (TOI)	3	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2	Rumah Sakit Haji Medan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	PEKERJAAN UMUM								
3.1.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	81.17	82.99	84.52	86.29	88.59	90	90	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	81.88	84.26	84.78	85.42	87.24	88.43	88.43	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	2.65	-	2.68	2.71	2.74	2.77	2.80	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	88.51	89.23	89.66	90.02	90.33	90.61	90.61	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.5	Cakupan Akses Minum Perpipaan (%)	12.78	15.28	15.77	17.01	17.69	18.99	18.99	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.6	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR)	-	100	200	300	400	500	500	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.7	Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten/kota (TPA Regional)	-	1	1	1	1	1	5	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3.1.8	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	-	500,000	535,000	570,000	605,000	640,000	640,000	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	
3.1.9	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	81.82	82.50	84.00	85.50	87.00	88.50	88.50	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	
3.1.10	Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal (%)	53.48	55.00	57.50	60.00	62.50	65.00	65.00	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	
3.1.12	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	325,000	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000	410,000	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	
3.2	PENATAAN RUANG									
3.2.1	Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	NA	70	70	70	75	75	75	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	
3.2.2	Tersedianya regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang (Perda/Pergub)	0	1 Perda/ Pergub	1 Perda/ Pergub	1 Perda/ Pergub	1 Perda/ Pergub	1 Perda/ Pergub	5 Perda/ Pergub	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	
3.2.3	Tersedianya regulasi daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang diterbitkan (Perda)	0	0	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	5 Perda	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	
3.2.4	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	NA	20	40	60	80	100	100	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
4.1	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Na	92.72	93.22	93.72	94.22	94.72	94.72	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4.2	Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	135	135 ha	135 ha	135 ha	135 ha	135 ha	675 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4.3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	Na	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	10,383	12,978	16,226	20,321	25,401	31,751	31,751	Satpol PP	
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	20	65	68	71	76	80	80	Satpol PP	
5.3	Persentase Penegakan PERDA	33	45	60	75	80	85	85	Satpol PP	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.4	Persentase LSM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bakesbangpol	
5.5	Pembinaan Politik di Daerah	8 Kegiatan	10 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	42 Kegiatan	Bakesbangpol	
5.6	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	20 Kegiatan	Bakesbangpol	
5.7	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	33	33	33	33	33	33	33	BPBD	
5.8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	3	4	5	5	5	22	BPBD	
5.9	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	2	2	2	2	3	3	12	BPBD	
5.10	Indeks Resiko Bencana	150	145	134.4	127	121	109	109	BPBD	
6	SOSIAL									
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	NA	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	5,835	Dinas Sosial	
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	NA	530	530	530	530	530	2,650	Dinas Sosial	
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	NA	293	293	293	293	293	1,465	Dinas Sosial	
6.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	NA	285	285	285	285	285	1,425	Dinas Sosial	
6.5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	NA	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	Dinas Sosial	
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR									
1	TENAGA KERJA									
1.1	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun (Kasus)	222	210	200	190	180	170	170	Dinas Tenaga Kerja	
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	53	70	90	110	130	150	150	Dinas Tenaga Kerja	
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	4,441	7,000	10,000	13,000	16,000	19,000	19,000	Dinas Tenaga Kerja	
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	1,309,580	1,350,000	1,400,000	1,450,000	1,500,000	1,550,000	1,550,000	Dinas Tenaga Kerja	
1.5	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Kompetensi	336	416	464	512	592	592	2,576	Dinas Tenaga Kerja	
1.6	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Masyarakat	176	256	288	320	400	400	1,664	Dinas Tenaga Kerja	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.35	70.34	71.61	72.88	75.15	75.42	75.42	Seluruh Perangkat Daerah
2.2	Pesentase Kabupaten/kota layak Anak (menuju)	17	30	45	60	75	90	90	Seluruh Perangkat Daerah
2.3	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	40	50	60	70	80	100	100	Dinas PP dan PA
2.4	Persentase Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	55	60	72	78	84	96	96	Dinas PP dan PA
2.5	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	17	15	13	10	7	5	5	Dinas PP dan PA
2.6	Rasio kekerasan terhadap Anak	20.5	20	18	15	13	10	10	Dinas PP dan PA
2.7	Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang <i>up to date</i>	55	60	65	70	75	90	90	Dinas PP dan PA
3	PANGAN								
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89.10	90.40	92.30	94.30	96.30	98.10	98.10	Dinas Ketapang
3.2	Produksi Daging (ton)	160,498.61	169,775.74	175,551.96	181,328.18	187,104.40	192,880.62	192,880.62	Dinas Ketapang
3.3	Produksi Telur (ton)	173,605.34	186,062.33	191,961.45	197,860.67	203,759.69	209,658.81	209,658.81	Dinas Ketapang
3.4	Produksi susu (ton)	1,402.56	1,587.56	1,661.68	1,735.80	1,809.92	1,884.05	1,884.05	Dinas Ketapang
4	PERTANAHAN								
5	LINGKUNGAN HIDUP								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	67.17	68.00	68.70	70.70	71.70	72.70	72.70	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Indeks Kualitas Air (%)	77.50	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	82.00	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Indeks Kualitas Udara (%)	85.59	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	90.00	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	45.60	47.00	47.26	50.75	51.75	52.75	52.75	Dinas Lingkungan Hidup
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
6.1	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	78,76%	84%	87%	90%	93%	96%	96%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun	68,02%	71%	76%	81%	86%	91%	91%	
6.3	Cakupan Akte Perkawinan	27,47%	32%	37%	42%	47%	52%	52%	
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA)	8 Kab/Kota	12 Kab/Kota	17 Kab/Kota	22 Kab/Kota	27 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.5	Jumlah PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan	20 OPD	26 OPD	32 OPD	38 OPD	42 OPD	49 OPD	49 OPD	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
7.1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	-	30	32	35	38	40	40	Dinas Pemdes
7.2	Persentase Kelompok Binaan PKK	-	40	42	45	50	55	55	Dinas Pemdes
7.3	Jumlah LPM Berprestasi	-	10	12	14	16	18	18	Dinas Pemdes
7.4	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	5	6	7	8	9	9	Dinas Pemdes
7.5	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemdes
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2.91	2.86	2.84	2.82	2.8	2.78	2.78	Dinas PP dan KB
8.1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	2%	5%	10%	15%	20%	25%	25%	Dinas PP dan KB
8.2	Rata-rata Anak Per Keluarga	2.46	2.20	2.18	2.16	2.14	2.12	2.12	Dinas PP dan KB
8.3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	54	59.2	59.39	59.57	59.75	60	60	Dinas PP dan KB
8.4	Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	21.92	22.02	22.11	22.2	22.29	22.38	22.38	Dinas PP dan KB
8.5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	20.07%	19.00%	18.00%	17.00%	16.00%	15.00%	15.00%	Dinas PP dan KB
8.6	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11.54%	12.50%	11.50%	10.50%	9.50%	8.50%	8.50%	Dinas PP dan KB
8.7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33.1%	32.00%	34.00%	36.00%	38.00%	40.00%	40.00%	Dinas PP dan KB
8.8	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	40.28%	45.00%	47.50%	50.00%	52.5%	55.00%	55.00%	Dinas PP dan KB
8.9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	56,88	59,10%	62,25%	65,80%	69,12%	70,30%	70,30%	Dinas PP dan KB
8.10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	38,35%	43,20%	45,15%	48,25%	51,42%	57,35%	57,35%	Dinas PP dan KB
8.11	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	-	8,7	9,3	10,7	12,58	15,70	15,70	Dinas PP dan KB

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8.12	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	50,20%	54,20%	56,70%	59,47%	60,10%	62,52%	62,52%	Dinas PP dan KB	
8.13	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes		1%	1.20%	1.50%	1.80%	2%	2%	Dinas PP dan KB	
9	PERHUBUNGAN									
9.1	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi (%)	N/A	90	92	94	96	98	98	Dinas Perhubungan	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
10.1	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumatera Utara	67%	84%	86%	90%	95%	100%	100%	Diskominfo	
10.2	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	80%	85%	87%	90%	95%	100%	100%	Diskominfo	
10.3	Rasio sistem pelayanan berbasis online	6%	20%	41%	61%	82%	100%	100%	Diskominfo	
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
11.1	Persentase Koperasi Aktif	57.26	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	62.00	Dinas Koperasi dan UKM	
11.2	Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	2,857,124	2,858,000	2,859,000	2,860,000	2,861,000	2,862,000	2,862,000	Dinas Koperasi dan UKM	
12	PENANAMAN MODAL									
12.1	Jumlah Investor PMDN (Proyek)	187	309	200	205	215	210	215	DPM&P2TSP	
12.2	Jumlah Investor PMA (Proyek)	330	380	337	342	342	357	362	DPM&P2TSP	
12.3	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	11.68	8.37	11.89	12.00	12.75	13.00	13.60	DPM&P2TSP	
12.4	Jumlah Nilai Investasi PMA (RP. Triliun)	20.24	16.45	21.11	22.00	22.25	23.00	23.40	DPM&P2TSP	
12.5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	31.92	38.19	33.00	33.80	34.00	34.60	34.70	DPM&P2TSP	
12.6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA	10.69	11.26	11.30	11.40	12.00	12.30	12.30	DPM&P2TSP	
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	136	28.35	68.50	68.75	70.00	70.20	70.50	DPM&P2TSP	
12.8	Lama Proses Perizinan								DPM&P2TSP	
	- PMDN	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja		
	- Sektorat	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja		
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	NA	71	73	75	77	78	78	Dinas Pemuda dan Olah Raga	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.2	Persentase Wirausaha Muda	NA	56	62	70	70	75	81	Dinas Pemuda dan Olah Raga
13.3	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	NA	88	90	92	94	95	95	Dinas Pemuda dan Olah Raga
13.4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	NA	90	91	92	93	94	94	Dinas Pemuda dan Olah Raga
13.5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	NA	71	75	79	83	87	87	Dinas Pemuda dan Olah Raga
14	STATISTIK								
14.1	Data Statistik Sektoral yang terintegrasi	NA	25%	50%	75%	85%	100%	100%	Diskominfo
15	PERSANDIAN								
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian	NA	10%	25%	55%	75%	100%	100%	Diskominfo
16	KEBUDAYAAN								
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	20	21	22	23	24	25	25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	8	9	10	11	12	13	13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.3	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	608	625	650	675	700	725	725	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	PERPUSTAKAAN								
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	129,562	160,395	192,474	221,345	243,480	267,828	1,200,091	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	14.790	11,611	11,959	12,318	12,688	13,068	835,706	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0.61%	0.06%	0.08%	0.10%	0.13%	0.17%	1.16%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	9,547	2,864	3,723	4,840	6,292	8,180	35,447	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	98,326	3,441	4,474	5,816	7,561	9,829	129,447	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.6	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	0	4	4	4	4	4	31	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.7	Indeks Minat Membaca	-	1%	1.4%	1.6%	1.7%	1.9%	1.9%	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	KEARSIPAN								
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	42%	4%	4.62%	5.08%	5.59%	6.15%	67.64%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	248	50	60	71	86	103	618	Dinas Perpustakaan dan Arsip
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
1	PARIWISATA								
1.1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	231.465	280,000	300,000	370,000	400,000	500,000	500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2	Lama Kunjungan Wisata	NA	2.26	2.36	2.46	2.56	2.66	2.66	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	7.38	8.15	8.56	8.99	9.44	9.92	9.92	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.4	Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi	2	2	2	3	3	2	12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	PERTANIAN/PERKEBUNAN								
2.1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan								Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Padi (ton GKG)	5,136,186.00	5,375,167.60	5,498,796.45	5,625,268.77	5,754,649.95	5,887,006.90	5,887,006.90	
	2. Jagung (ton pipilan kering)	1,741,258.00	1,829,409.19	1,875,144.42	1,922,023.03	1,970,073.60	2,019,325.44	2,019,325.44	
	3. Kedele (ton)	7,778.00	8,905.03	9,528.38	10,195.37	10,909.05	11,672.68	11,672.68	
2.2	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan								Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Padi (ton/Ha)	5.20	5.22	5.23	5.25	5.26	5.27	5.27	
	2. Jagung (ton/Ha)	6.19	6.24	6.27	6.29	6.32	6.35	6.35	
	3. Kedele (ton/ha)	1.30	1.30	1.31	1.31	1.32	1.32	1.32	
2.3	Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura								Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	16,103.20	16,918.42	17,341.39	17,774.92	18,219.29	18,674.78	18,674.78	
	2. Cabe (ton)	159,131.00	168,822.08	173,886.74	179,103.34	184,476.44	190,010.74	190,010.74	
	3. Sayur-sayuran (ton)	988,612.30	998,498.42	1,008,483.41	1,018,568.24	1,028,753.92	1,039,041.46	1,039,041.46	
	4. Buah - buahan (ton)	1,154,687.60	1,180,230.44	1,193,212.98	1,206,338.32	1,219,608.04	1,233,023.73	1,233,023.73	
2.4	Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura								Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	7.70	7.89	7.99	8.08	8.18	8.28	8.28	
	2. Cabe (ton)	9.70	9.91	10.02	10.13	10.24	10.36	10.36	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)		300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	Dinas Perkebunan
2.6	Produksi								Dinas Perkebunan
	1. K. Sawit (ton)	6,621,409.42	7,004,659.63	7,223,006.12	7,447,877.73	7,679,553.61	7,918,271.07	7,918,271.07	
	2. Karet (ton)	311,076.66	323,589.02	326,824.91	330,093.16	333,394.09	336,728.03	336,728.03	
	3. Kopi Arabika (ton)	58,155.09	65,327.91	67,666.65	70,089.12	72,598.31	75,197.32	75,197.32	
	3. Kopi Robusta (ton)	8,484.72	9,223.04	9,407.50	9,595.65	9,787.56	9,983.32	9,983.32	
	4. Kelapa (ton)	96,256.55	102,943.95	106,311.66	107,733.83	110,211.71	112,746.58	112,746.58	
	5. Kakao (ton)	41,520.52	41,936.76	42,146.44	42,357.17	42,568.95	42,781.79	42,781.79	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	37,472.76	42,028.92	43,037.24	44,175.89	45,365.99	46,576.52	46,576.52	
2.7	Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao)								Dinas Perkebunan
	1. K. Sawit (kg/Ha/tahun)	15,962.67	16,202.11	16,445.14	16,691.81	16,942.19	17,196.32	17,454.27	
	2. Karet (kg/Ha/tahun)	1,082.33	1,091.35	1,098.25	1,103.25	1,104.15	1,105.36	1,105.36	
	3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun)	1,135.93	1,158.65	1,181.83	1,205.46	1,229.57	1,254.16	1,279.25	
	3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun)	783.52	795.27	807.20	819.31	831.60	844.08	856.74	
	4. Kelapa (kg/Ha/tahun)	1,063.15	1,067.41	1,070.61	1,073.82	1,078.12	1,082.43	1,082.43	
	5. Kakao (kg/Ha/tahun)	1,028.07	1,029.25	1,030.00	1,031.02	1,046.48	1,062.18	1,062.18	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun)								
2.8	Luas Areal								Dinas Perkebunan
	1. K. Sawit (Ha)	414,915.84	437,889.03	443,581.59	449,348.15	454,740.33	460,197.21	460,197.21	
	2. Karet (Ha)	394,113.57	393,189.02	393,189.02	393,189.02	393,189.02	393,189.02	393,189.02	
	3. Kopi Arabika (Ha)	61,063.35	73,214.13	74,495.38	75,799.05	77,125.53	78,475.23	78,475.23	
	3. Kopi Robusta (Ha)	20,643.00	19,609.88	19,805.98	20,004.04	20,204.08	20,406.12	20,406.12	
	4. Kelapa (Ha)	110,457.93	109,935.50	110,760.02	111,590.72	112,427.65	113,270.86	113,270.86	
	5. Kakao (Ha)	66,623.88	56,630.65	57,055.38	57,483.29	57,914.42	58,348.78	58,348.78	
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	60,096.42	63,000.41	63,438.56	63,880.23	64,325.44	64,774.23	64,774.23	
2.9	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2018								
3	KEHUTANAN								
3.1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	276.336	276,336	276,226	276,116	276,000	275,900	275,900	Dinas Kehutanan
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	56,500	60,500	59,500	58,500	57,500	56,500	56,500	Dinas Kehutanan
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0.84	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.88	Dinas Kehutanan
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
4.1	Daya Listrik Terpasang	4,107.20	4,244.00	5,307.00	6,496.00	6,546.00	6,683.00	6,683.00	Dinas ESDM
4.2	Rasio Elektrifikasi	99.99	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas ESDM

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3	Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	15	15	20	25	30	35	35	Balitbang
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	NA	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Balitbang
5	PENGAWASAN								
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	65	71	76	81	86	91	91	Inspektorat
5.2	Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas	50	50	55	60	65	70	70	Inspektorat
6	SEKRETARIAT DEWAN								
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	Setwan
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	Setwan
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	18	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	Setwan
7	SEKRETARIAT DAERAH								
7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah	-	B	B	B	A	A	A	Biro Organisasi
7.2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA	77	80	83	85	90	90	Biro Sosial
7.3	Jumlah fasilitasi kehumasan	-	10	12	14	16	18	70	Biro Humas dan Keprotokolan
7.4	Fasilitsi Penyelesaian Konflik Pertanahan	-	50%	60%	70%	80%	90%	90%	Biro Pemerintahan
7.5	Penyelesaian Batas Daerah	14	20	15	0	0	0	0	Biro Pemerintahan
7.6	Jumlah fasilitasi kerjasama	-	4	4	4	4	4	20	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.7	Perkembangan kemajuan laporan realisasi fisik pembangunan daerah setiap OPD secara tepat waktu (%)	-	80	90	100	100	100	100	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7.8	Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (%)	-	70	75	80	85	90	90	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7.9	Jumlah eksaminasi harmonisasi produk hukum daerah (dokumen)	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	Biro Hukum
7.10	Tingkat kepuasan terhadap layanan administrasi dan konsultasi (%)	-	70	75	80	85	90	90	Biro Umum dan Perlengkapan
7.11	Tingkat realisasi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan gedung dan mess pemerintah provinsi (%)	-	80	85	90	95	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
C.1	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH								
1	Nilai Tukar Petani	97.98	100.10	100.10	100.10	100.10	100.22	100.22	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
	- Peternakan	112.07	113.65	114.44	115.23	116.02	116.81	116.81	
	- Pangan	93.11	100.62	100.64	100.66	100.68	100.82	100.82	
	- Holtikultura	94.22	100.98	101.01	101.03	101.06	101.20	101.20	
	- Perikanan	103.17	101.12	101.14	101.15	101.16	101.29	101.29	
	- Perkebunan	98.53	99.02	99.51	100.01	100.51	101.01	101.01	
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkpita	86.99	86.99	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	
C.2	FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR								
3.1.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	81.17	82.99	84.52	86.29	88.59	90	90	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
4.2	Rasio Elektrifikasi	99.99	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas ESDM
3.1.9	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	81.82	82.50	84.00	85.50	87.00	88.50	88.50	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	88.51	89.23	89.66	90.02	90.33	90.61	90.61	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
5	Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan	-	87.97	90.16	92.01	93.61	95.02	95.02	Dinas SDA, CK, TR
C.3	FOKUS IKLIM BERINVESTASI								

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	18	20	20	20	20	20	20	BP2RDSU
2	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	2	1	1	1	1	1	2	DPM&P2TSP
C.4	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA								
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	97.14	97.03	97.16	97.28	97.40	97.52	97.52	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	71.19	69.07	69.33	69.59	69.86	70.12	70.12	Dinas Pendidikan
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98.27	97.04	97.06	97.08	97.11	97.13	97.13	Dinas Pendidikan
4	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	93.59	94.26	94.59	94.93	95.26	95.60	95.60	Dinas Pendidikan
	*) Untuk Indikator Dengan Target Penjumlahan, Tidak Menggunakan Rumus Tetapi Langsung Menentukan Jumlah Yang Dicapai								
	*) Indikator Diatas Dapat Disesuaikan/Ditambah Sesuai Dengan Kebutuhan								



GOVERNOR SUMATRA UTARA

GOVERNOR SUMATRA UTARA
REGIONAL REGULATION PROVINCE SUMATRA UTARA
NUMBER 5 YEAR 2019

ABOUT

REGIONAL DEVELOPMENT PLAN MIDDLE REGION
PROVINCE SUMATRA UTARA YEAR 2019-2023

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR SUMATRA UTARA,

Considering : that in order to implement the provisions of Article 263 and Article 264 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government as it has been amended several times with Law Number 9 Year 2015 on the Second Amendment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government it is necessary to establish Regional Regulation on the Middle Regional Development Plan Province Sumatra Utara 2019-2023;

Remembering : 1. Article 18 paragraph (6) of the 1945 Indonesian Basic Law;
2. Law Number 24 Year 1956 on the Formation of Regional Autonomous Propinsi Atjeh and the Amendment of the Formation of Propinsi Sumatra Utara (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956 Number 64, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1103);
3. Law Number 25 Year 2004 on the National Development Planning System (State Gazette

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2037;
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Kerja Perangkat Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dan pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
25. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

26. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. Visi, Misi, dan Program Gubernur;
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi;
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah, dan;
 - e. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berfungsi menjadi pedoman bagi :
 - a. Penyusunan RKPD selama kurun waktu tahun 2019 - 2023;
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2023;
 - c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
 - e. Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Bab IX Penutup

BAB II

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22), sebagaimana diubah dengan

dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Mei 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

EDY RAHMAYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

1. PENJELASAN UMUM

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar diluar Pulau Jawa dilihat dari jumlah penduduk, dan memiliki peran yang sangat strategis di wilayah Indonesia bagian barat, sebagai pusat kegiatan perekonomian khususnya perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan, pariwisata, keuangan dan jasa, dan sebagai salah satu gerbang utama wisatawan manca negara di bagian utara Pulau Sumatera, dan berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand. Dengan posisi dan peranan tersebut, maka pembangunan di wilayah Sumatera Utara mempunyai potensi yang sangat besar, sekaligus tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas

bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

RPJMD Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019-2023 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

RPJMD Tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2019-2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
2. Acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2019-2023; dan
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019
NOMOR 50